DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PEMERINTAH KOTA JAMBI

LAPORAN AKHIR

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DAERAH (KLHS)

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KOTA JAMBI TAHUN 2025-2030















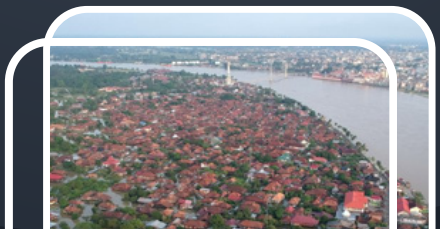





KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur atas kehadirat Allah SWT karena Ridho dan KaruniaNya Dokumen pendahuluan KLHS RPJMD Kota Jambi ini dapat disusun dengan lancar.

Perlahan mulai disadari bahwa perlu langkah masiv untuk mencegah semakin buruknya dampak pertumbuhan ekonomi terhadap sumberdaya alam dan lingkungan. Proses pembangunan mulai mempertimbangkan metode-metode yang terencana dan rasional dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan, sehingga pembangunan itu sendiri dapat berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan, sejatinya adalah bagaimana upaya pemenuhan kebutuhan generasi saat ini dapat terpenuhi, namun dukungan dan kemampuan generasi selanjutnya dalam memenuhi kebutuhan tidak berkurang.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis memuat telaah terhadap dampak dari suatu kebijakan, rencana, program pembangunan, kondisi dan kecenderungan yang mempengaruhi eksistensi lingkungan. Hasil telaahan ditujukan untuk mengintegrasikan aspek-aspek lingkungan dan konsep pembangunan berkelanjutan ke dalam suatu kebijakan ataupun rencana program pembangunan.

Agar selaras dengan tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka KLHS RPJMD Kota Jambi ini disusun untuk meningkatkan capaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui pendekatan yang dapat mendeteksi permasalahan pada tingkat kebijakan, rencana, dan/atau program.

Jambi, Desember 2023
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Kota Jambi







DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel v
Daftar Gambar xii

BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran I-4
1.3 Ruang Lingkup I-6
1.4 Keluaran I-7
1.5 Dasar Hukum I-7

BAB II LANDASAN TEORI II-1
2.1 Konsep Dasar Lingkungan Hidup II-1
2.2 Pengelolaan Lingkungan Hidup II-4
2.3 KLHS Dalam Pembangunan Berkelanjutan II-5
2.3.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) II-11
2.3.2 Prinsip Penyelenggaraan KLHS II-15
2.3.3 Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan RPJPD dan RPJMD II-16
2.4 Metode Pendekatan Penyusunan II-18

BAB III KONDISI UMUM DAERAH KOTA JAMBI III-1
3.1 Aspek Geografis dan Demografi Kota III-1
3.1.1 Karakteristik Wilayah Kota Jambi III-1
3.1.1.1 Letak Geografi dan Batas Administrasi III-1
3.1.1.2 Iklim dan Curah Hujan III-4
3.1.1.3 Kelerengan III-5
3.1.1.4 Geologi dan Struktur Batuan III-7
3.1.1.5 Jenis Tanah III-9
3.1.1.6 Kedalaman Efektif Tanah III-9
3.1.1.7 Hidrologi III-10
3.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah III-14
3.1.2.1 Peran dan Fungsi Kota Jambi Dalam Konstelasi





Regional III-14
3.1.2.2 Sistem Jaringan Prasarana Regional III-16
3.1.3 Sistem Infrastruktur III-17
3.1.3.1 Sitem Transportasi III-17
3.1.3.2 Sistem Penyediaan Air Minum III-23
3.1.3.3 Sistem Jaringan Drainase III-36
3.1.3.4 Sistem Jaringan Listrik III-37
3.1.3.5 Sistem Jaringan Telekomunikasi III-40
3.1.4 Kondisi Umum Demografi III-41
3.1.4.1 Jumlah Penduduk Kota Jambi III-41
3.1.4.2 Kepadatan Penduduk Kota Jambi III-43
3.1.4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin III-44
3.1.4.4 Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur III-44
3.1.4.5 Struktur Penduduk Menurut Agama III-45
3.1.4.6 Perkiraan Jumlah Penduduk di Kota Jambi Tahun 2024-2044 ..... III-46
3.1.4.7 Indeks Pembangunan Manusia III-48
3.1.4.8 Ketenagakerjaan III-49
3.1.4.9 Kondisi Kemiskinan III-50
3.2 Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup III-51
3.2.1 Jasa Layanan Ekosistem III-51
3.2.2 Ketersediaan dan Kebutuhan Air Untuk Daya Dukung Lingkungan III-91
3.2.3 Daya Dukung Permukiman III-95
3.2.4 Daya Tampung Air III-97
3.2.5 Keanekaragaman Hayati III-102
3.3 Gambaran Keuangan Daerah III-103
3.3.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Kota Jambi III-103
3.3.2 Neraca Daerah Kota Jambi III-117
3.3.3 Kinerja Keuangan Daerah Dalam Pencapaian TPB III-125
3.3.4 Aspek Daya Ekonomi Dan Keuangan III-126
3.3.4.1 Struktur Dan Pertumbuhan Ekonomi III-126
3.3.4.2 Produktivitas Total Daerah III-131
3.3.4.3 Iklim Berinvestasi III-133
3.4 PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENCAPAIAN TPB III-135

BAB IV ANALISIS CAPAIAN TPB/SDG'S IV-1
4.1. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan IV-2
4.1.1 Dimensi Sosial IV-6
4.1.2 Dimensi Ekonomi IV-8
4.1.3 Dimensi Lingkungan IV-10
4.1.4 Dimensi Hukum dan Tata Kelola IV-13
4.2 Identifikasi Dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan ... IV-16
4.2.1 Isu Pembangungan Berkelanjutan (PB) Strategis





(Karakteristik Lingkungan Yang Berpotensi Terkena Dampak) IV-16
4.2.1.1 Pelingkupan Isu Pembangunan Berkelanjutan IV-16
4.2.1.2 Pemusatan Isu IV-18
4.2.2 Perubahan Penggunaan Lahan IV-33
4.2.2.1 Pola Perkembangan Kota IV-33
4.2.2.2 Pola Penggunaan Lahan Kota Jambi IV-38
4.2.2.3 Intensitas Pemanfaatan Lahan IV-40
4.2.2.4 Ketersediaan RTH Publik IV-50
4.2.2.5 Perubahan Pemanfaatan Kawasan Sempadan Sungai Dan Daerah Resapan Air Akibat Pelanggaran Pendirian Bangunan IV-65
4.2.2.6 Perkiraan Kebutuhan dan Ketersediaan Lahan Kota IV-67
4.2.3 Kualitas Air Permukaan dan Kualitas Udara IV-69
4.2.3.1 Kondisi Kualitas Air Permukaan IV-69
4.2.3.2 Kualitas Udara IV-83
4.2.4 Kawasan Rawan Bencana IV-85
4.2.5 Sistem Persampahan IV-90
4.2.6 Sistem Penyediaan Air Limbah IV-97
4.2.7 Kerentanan Terhadap Perubahan Iklim IV-102
4.2.8 Infrastruktur Transportasi dan Pola Pergerakan IV-104

BAB V ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR TPB PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH V-1

BAB VI ALTERNATIF SKENARIO DAN REKOMENDASI VI-1
6.1 Pendekatan Perumusan Alternatif Skenario dan Rekomendasi . VI-1
6.2 Alternatif Skenario Dan Rekomendasi VI-12
6.2.1 Alternatif Skenario dan Rekomendasi Daya Dukung Dan Daya Tampung VI-12
6.2.2 Alternatif Skenario Dan Rekomendasi Dengan Upaya Tambahan VI-24
6.3 Rekomendasi, Visi, Misi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Kota Jambi VI-61

BAB VII KESIMPULAN VII-1







DAFTAR TABEL

Tabel II.3.1	Tipe KLHS Menurut Evolusi Paradigma	II-10
Tabel III.1.1	Luas Wilayah Administrasi Kota Jambi	III-2
Tabel III.1.2	Suhu Udara Dan Kelembaban Udara Di Kota Jambi, Tahun 2022	III-4
Tabel III.1.3	Curah Hujan (mm) dan Hari Hujan (hh) Di Kota Jambi, Tahun 2022	III-5
Tabel III.1.4	Kelerengan Lahan di Kota Jambi	III-5
Tabel III.1.5	Formasi Geologi Kota Jambi	III-7
Tabel III.1.6	Jenis Tanah Di Kota Jambi	III-9
Tabel III.1.7	Kedalaman Efektif Tanah Di Kota Jambi	III-10
Tabel III.1.8	Daerah Aliran Sungai yang Melintasi Wilayah Kota Jambi	III-12
Tabel III.1.9	Panjang Jalan Kota Jambi Menurut Permukaan, Kondisi, dan Kelas Jalan Tahun 2020 – 2022	III-18
Tabel III.1.10	Fasilitas Terminal Tipe A Alam Barajo	III-20
Tabel III.1.11	Cakupan Pelayanan PDAM Tirta Mayang Kota Jambi Tahun 2022	III-23
Tabel III.1.12	Instalasi Pengolahan Air PDAM Tirta Mayang Kota Jambi	III-27
Tabel III.1.13	Rekapitulasi Panjang Pipa Transmisi, Distribusi dan Retikulasi PDAM Tirta Mayang Kota Jambi Tahun 2022	III-28
Tabel III.1.14	Tingkat Kehilangan Air PDAM Tirta Mayang Tahun 2022	III-33
Tabel III.1.15	Data Kumulatif Jumlah Sarana Air Bersih Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) per Kecamatan di Kota Jambi	III-36
Tabel III.1.16	Banyaknya Pelanggan PLN Golongan Rumah Tangga di Kota Jambi Menurut Golongan Tarif Tahun 2022	III-39
Tabel III.1.17	Banyaknya Pelanggan PLN Golongan Rumah Tangga di Kota Jambi Menurut Golongan Tarif Tahun 2022	III-39
Tabel III.1.18	Sistem Jaringan Telekomunikasi di Kota Jambi Tahun 2020	III-40
Tabel III.1.19	Jumlah Penduduk di Kota Jambi Tahun 2016-2022	III-42
Tabel III.1.20	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Menurut Kecamatan Tahun 2022	III-43
Tabel III.1.21	Jumlah Penduduk (Jiwa) Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2022	III-44
Tabel III.1.22	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kota Jambi Tahun 2022	III-45
Tabel III.1.23	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kota Jambi Tahun 2022	III-46
Tabel III.1.24	Proyeksi Penduduk Kota Jambi Menurut Kecamatan	III-46





Tabel III.1.25 Proyeksi Distribusi Penduduk Kota Jambi Menurut Kecamatan III-47
Tabel III.1.26 Proyeksi Kepadatan Penduduk Kota Jambi Menurut Kecamatan III-47
Tabel III.1.27 Indek Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Dalam Propinsi Jambi 2014-2022..... III-49
Tabel III.1.28 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Utama III-50
Tabel III.2.1 Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan III-53
Tabel III.2.2 Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih III-53
Tabel III.2.3 Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyediaan Serat III-53
Tabel III.2.4 Distrubisi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyediaan Energi..... III-53
Tabel III.2.5 Distrubisi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyediaan Sumberdaya Genetik III-53
Tabel III.2.6 Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Menurut BWP III-54
Tabel III.2.7 Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Menurut BWP III-55
Tabel III.2.8 Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyediaan Serat Menurut BWP III-55
Tabel III.2.9 Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyediaan Energi Menurut BWP III-56
Tabel III.2.10 Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyediaan Sumberdaya Genetik Menurut BWP III-56
Tabel III.2.11 Distrubisi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Iklim III-62
Tabel III.2.12 Distrubisi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Tata Kelola Air III-62
Tabel III.2.13 Distrubisi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Bencana III-62
Tabel III.2.14 Distrubisi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pemurnian Air III-62
Tabel III.2.15 Distrubisi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pengaturan Limbah III-63
Tabel III.2.16 Distrubisi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Kualitas Udara III-63
Tabel III.2.17 Distrubisi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyerbukan Alami III-63
Tabel III.2.18 Distrubisi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pengendalian Hama Penyakit III-63
Tabel III.2.19 Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Menurut BWP III-64
Tabel III.2.20 Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air Menurut BWP III-65
Tabel III.2.21 Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pengaturan Bencana Menurut BWP III-65
Tabel III.2.22 Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pemurnian Air Menurut BWP III-66
Tabel III.2.23 Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Air Limbah Menurut BWP III-66
Tabel III.2.24 Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Kualitas Udara Menurut BWP III-67
Tabel III.2.25 Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyerbukan Alami Menurut BWP III-67





Tabel III.2.26 Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pengendalian Hama Menurut BWP III-68
Tabel III.2.27 Distrubisi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Tempat Tinggal III-77
Tabel III.2.28 Distrubisi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Rekreasi III-77
Tabel III.2.29 Distrubisi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Estetika III-77
Tabel III.2.30 Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Tempat Tinggal Menurut BWP III-78
Tabel III.2.31 Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Rekreasi Menurut BWP ... III-78
Tabel III.2.32 Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Estetika Menurut BWP III-79
Tabel III.2.33 Distrubisi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Tanah III-83
Tabel III.2.34 Distrubisi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Siklus Hara III-83
Tabel III.2.35 Distrubisi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Produksi Primer III-83
Tabel III.2.36 Distrubisi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Biodiversitas III-83
Tabel III.2.37 Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Tanah Menurut BWP..... III-84
Tabel III.2.38 Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Siklus Hara Menurut BWP III-85
Tabel III.2.39 Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Produksi Primer Menurut BWP III-85
Tabel III.2.40 Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Biodiversitas Menurut BWP III-86
Tabel III.2.41 Luas status Daya Dukung dan Daya Tampung Air (Ha) di Kota Jambi III-93
Tabel III.2.42 Luas Potensi Permukiman di Kota Jambi III-95
Tabel III.2.43 Indeks Kualitas Air Sungai di Kota Jambi III-101
Tabel III.2.44 Indeks Kualitas Air Danau di Kota Jambi III-101
Tabel III.2.45 Definisi Operasional Klasifikasi Layanan Ekosistem Penyedia Keanekaragaman Hayati III-102
Tabel III.2.46 Kawasan Konservasi di Dalam Hutan Sebagai Penyedia Sumberdaya Genetik Kota Jambi III-103
Tabel III.3.1 Perbandingan Target dan Realisasi PAD Kota Jambi Tahun 2018-2022 ..... III-104
Tabel III.3.2 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2022.. III-110
Tabel III.3.3 Angaran Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Kota Jambi Tahun 2018-2022 ..... III-115
Tabel III.3.4 Ratio Likuiditas di Tahun 2018 – 2022 ..... III-118
Tabel III.3.5 Ratio Salvabilitas di Tahun 2018 – 2022 ..... III-119
Tabel III.3.6 Debt Ratio di Tahun 2018 – 2022 ..... III-119
Tabel III.3.7 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Jambi Tahun 2018 – 2022 ..... III-121
Tabel III.3.8 Nila Neraca Daerah Kota Jambi Tahun 2018 – 2022 ..... III-122
Tabel III.3.9 Indikator Urusan Keuangan Kota Jambi Tahun 2018-2022 ..... III-126
Tabel III.3.10 Perhitungan Sektor Ekonomi Basis III-128
Tabel III.3.11 Hasil Perhitungan Analisis Shift Share III-130
Tabel III.3.12 Persentase Produktivitas Total Daerah di Kota Jambi Tahun 2018-2022 ..... III-132



Tabel III.1.13	Realisasi Investasi PMA dan PMDN di Kota Jambi Tahun 2018-2022	III-134
Tabel III.4.1	Pemangku Kepentingan TPB di Kota Jambi	III-136
Tabel IV.1.1	Rekapitulasi Status Capaian Indikator Berdasarkan SDGs Nasional Tahun 2022 Kota Jambi	IV-3
Tabel IV.1.2	Ketercapaian Indikator SDGs/TPB Kota Jambi (2022) Dimensi Sosial	IV-7
Tabel IV.1.3	Ketercapaian Indikator SDGs/TPB Kota Jambi (2022) Dimensi Ekonomi	IV-9
Tabel IV.1.4	Ketercapaian Indikator SDGs/TPB Kota Jambi (2022) Dimensi Lingkungan	IV-12
Tabel IV.1.5	Ketercapaian Indikator SDGs/TPB Kota Jambi (2022) Dimensi Tata Kelola	IV-14
Tabel IV.1.6	Capaian Indikator TPB Kota Jambi Terhadap Target Nasional	IV-15
Tabel IV.2.1	Longlist Isu PB	IV-16
Tabel IV.2.2	Pemusatan Isu PB	IV-20
Tabel IV.2.3	Matrik Interaksi dan Analisis Antara Sintesa Isu PB	IV-23
Tabel IV.2.4	Tingkat Penting Isu PB	IV-27
Tabel IV.2.5	Analisis Isu PB Paling Strategis	IV-32
Tabel IV.2.6	Luas Perubahan Penggunaan Lahan	IV-39
Tabel IV.2.7	Luas RTH Publik di Kota Jambi (berdasarkan IHBI)	IV-51
Tabel IV.2.8	RTH Taman di Kota Jambi	IV-52
Tabel IV.2.9	RTH Taman Perumahan di Kota Jambi	IV-54
Tabel IV.2.10	RTH Jalur Hijau Jalan	IV-57
Tabel IV.2.11	RTH Pulau Jalan	IV-57
Tabel IV.2.12	Kondisi Pemanfaatan Lahan di Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Jambi	IV-60
Tabel IV.2.13	Kondisi Pemanfaatan Lahan di Kawasan Sempadan Danau Di Kota Jambi	IV-62
Tabel IV.2.14	RTH Pemakaman di Kota Jambi	IV-63
Tabel IV.2.15	Pelanggaran Bangunan di Kawasan Lindung Kota Jambi	IV-65
Tabel IV.2.16	Perkiraan Kebutuhan Rumah di Kota Jambi pada Tahun 2044	IV-67
Tabel IV.2.17	Perkiraan kebutuhan luas lahan Perumahan di Kota Jambi pada Tahun 2044	IV-68
Tabel IV.2.18	Luas Peluang Ketersediaan Permukiman Horizontal di Kota Jambi	IV-68
Tabel IV.2.19	Kualitas Udara Ambien di Kota Jambi Tahun 2022	IV-83
Tabel IV.2.20	Penggunaan Bahan Bakar Industri Dan Rumah Tangga di Kota Jambi	IV-85
Tabel IV.2.21	Penggunaan Bahan Bakar Industri Dan Rumah Tangga di Kota Jambi	IV-85
Tabel IV.2.22	Kejadian Bencana di Kota Jambi	IV-86
Tabel IV.2.23	Rekap Data Penerima Bantuan Bencana Kota Jambi	IV-86
Tabel IV.2.24	Kawasan Rawan Bencana Banjir	IV-88
Tabel IV.2.25	Jumlah Penduduk Per-Kecamatan dan Potensi Timbulan Sampah di Kota Jambi Tahun 2022	IV-91





Tabel IV.2.26	Komposisi Timbulan Sampah di Kota Jambi Tahun 2022	IV-92
Tabel IV.2.27	Perkiraan Timbulan Sampah di Kota Jambi Tahun 2024 – 2044	IV-97
Tabel IV.2.28	Perkiraan Kebutuhan Sarana Persampahan di Kota Jambi Tahun 2024 – 2044	IV-97
Tabel IV.2.29	Pengelolaan Air Limbah Kota Jambi Tahun 2022	IV-98
Tabel IV.2.30	Rekapitulasi Perhitungan Timbulan Emisi Gas Rumah Kaca Kota Jambi tahun 2021	IV-103
Tabel IV.2.31	Kinerja Lalu Lintas Kota Jambi	IV-104
Tabel V.1	Keterkaitan TPB Terhadap Program Organisasi Perangkat Daerah...	V-2
Tabel V.2	Keterkaitan TPB Terhadap Program Organisasi Perangkat Daerah ..	V-4
Tabel V.3	Keterkaitan TPB Terhadap Program Organisasi Perangkat Daerah...	V-5
Tabel V.4	Keterkaitan TPB Terhadap Program Organisasi Perangkat Daerah...	V-9
Tabel V.5	Keterkaitan TPB Terhadap Program Organisasi Perangkat Daerah...	V-11
Tabel V.6	Keterkaitan TPB Tujuan 6 Terhadap Program Organisasi Perangkat Daerah	V-13
Tabel V.7	Keterkaitan TPB Tujuan 7 Terhadap Program Organisasi Perangkat Daerah	V-15
Tabel V.8	Keterkaitan TPB Tujuan 8 Terhadap Program Organisasi Perangkat Daerah	V-16
Tabel V.9	Keterkaitan TPB Tujuan 9 Terhadap Program Organisasi Perangkat Daerah	V-17
Tabel V.10	Keterkaitan TPB Tujuan 10 Terhadap Program Organisasi Perangkat Daerah	V-18
Tabel V.11	Keterkaitan TPB Tujuan 11 Terhadap Program Organisasi Perangkat Daerah	V-22
Tabel V.12	Keterkaitan TPB Tujuan 12 Terhadap Program Organisasi Perangkat Daerah	V-26
Tabel V.13	Keterkaitan TPB Tujuan 13 Terhadap Program Organisasi Perangkat Daerah	V-29
Tabel V.14	Keterkaitan TPB Tujuan 16 Terhadap Program Organisasi Perangkat Daerah	V-30
Tabel V.15	Keterkaitan TPB Tujuan 17 Terhadap Program Organisasi Perangkat Daerah	V-37
Tabel V.16	Rekapitulasi Status Capaian Indikator Berdasarkan Target SDGs Nasional Tahun 2022	V-40
Tabel V.17	Kewenangan OPD Dalam Capaian Indikator di Kota Jambi	V-41
Tabel V.18	Kondisi Capaian TPB Berdasarkan OPD yang Bertanggung Jawab ...	V-74
Tabel VI.1.1	Matriks Keterkaitan Isu PB Strategis Dengan Indikator TPB	VI-3
Tabel VI.1.2	Rekapitulasi Indikator TPB Butuh Upaya Tambahan Yang Yang terkait Dengan Isu PB Strategis.....	VI-12
Tabel VI.2.1	Alternatif Rekomendasi Arah Kebijakan Ketahanan Pangan.....	VI-16
Tabel VI.2.2	Alternatif Rekomendasi Arah Kebijakan Daya Dukung dan Daya Tampung Air.....	VI-18
Tabel VI.2.3	Alternatif Rekomendasi Arah Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan.....	VI-21





Tabel VI.2.4 Proyeksi Tingkat Kemiskinan Ekstrim Tahun 2022-2030 di Kota Jambi VI-25
Tabel VI.2.5 Keterkaitan TPB Tujuan 1 Terhadap Indikator TPB Yang Berkorelasi Kuat VI-26
Tabel VI.2.6 Rekomendasi Skenario, Arah Kebijakan, dan Program TPB Tujuan 1 Dengan Upaya Tambahan VI-27
Tabel VI.2.7 Keterkaitan TPB Tujuan 2 Terhadap Indikator TPB Yang Berkorelasi Kuat VI-28
Tabel VI.2.8 Rekomendasi Skenario, Arah Kebijakan, dan Program TPB Tujuan 2 Dengan Upaya Tambahan VI-29
Tabel VI.2.9 Proyeksi Partisipasi Dalam Pembelajaran Tahun 2022-2030 di Kota Jambi VI-30
Tabel VI.2.10 Keterkaitan TPB Tujuan 4 Terhadap Indikator TPB Yang Berkorelasi Kuat VI-31
Tabel VI.2.11 Rekomendasi Skenario, Arah Kebijakan, dan Program TPB Tujuan 4 Dengan Upaya Tambahan VI-32
Tabel VI.2.12 Keterkaitan TPB Tujuan 6 Terhadap Indikator TPB Yang Berkorelasi Kuat VI-33
Tabel VI.2.13 Rekomendasi Skenario, Arah Kebijakan, dan Program TPB Tujuan 6 Dengan Upaya Tambahan VI-34
Tabel VI.2.14 Proyeksi Laju pertumbuhan PDB Tahun 2022-2030 perkapita di Kota Jambi VI-35
Tabel VI.2.15 Keterkaitan TPB Tujuan 8 Terhadap Indikator TPB Yang Berkorelasi Kuat VI-35
Tabel VI.2.16 Rekomendasi Skenario, Arah Kebijakan, dan Program TPB Tujuan 8 Dengan Upaya Tambahan VI-37
Tabel VI.2.17 Proyeksi Kondisi mantap jalan nasional Tahun 2022-2030 perkapita di Kota Jambi VI-38
Tabel VI.2.18 Keterkaitan TPB Tujuan 9 Terhadap Indikator TPB Yang Berkorelasi Kuat VI-39
Tabel VI.2.19 Rekomendasi Skenario, Arah Kebijakan, dan Program TPB Tujuan 9 Dengan Upaya Tambahan VI-40
Tabel VI.2.20 Proyeksi Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2022-2030 perkapita di Kota Jambi VI-41
Tabel VI.2.21 Keterkaitan TPB Tujuan 10 Terhadap Indikator TPB Yang Berkorelasi Kuat VI-42
Tabel VI.2.22 Rekomendasi Skenario, Arah Kebijakan, dan Program TPB Tujuan 10 Dengan Upaya Tambahan VI-43
Tabel VI.2.23 Keterkaitan TPB Tujuan 11 Terhadap Indikator TPB Yang Berkorelasi Kuat VI-44
Tabel VI.2.24 Rekomendasi Skenario, Arah Kebijakan, dan Program TPB Tujuan 11 Dengan Upaya Tambahan VI-45
Tabel VI.2.25 Jumlah Timbulan Sampah yang didaur ulang di Kota Jambi VI-46



Tabel VI.2.26 Keterkaitan TPB Tujuan 12 Terhadap Indikator TPB Yang Berkorelasi Kuat VI-46
Tabel VI.2.27 Rekomendasi Skenario, Arah Kebijakan, dan Program TPB Tujuan 12 Dengan Upaya Tambahan VI-47
Tabel VI.2.28 Keterkaitan TPB Tujuan 13 Terhadap Indikator TPB Yang Berkorelasi Kuat VI-48
Tabel VI.2.29 Rekomendasi Skenario, Arah Kebijakan, dan Program TPB Tujuan 13 Dengan Upaya Tambahan VI-49
Tabel VI.2.30 Proyeksi Target Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B..... Tahun 2022-2045 di Kota Jambi VI-50
Tabel VI.2.31 Keterkaitan TPB Tujuan 16 Terhadap Indikator TPB Yang Berkorelasi Kuat VI-51
Tabel VI.2.32 Rekomendasi Skenario, Arah Kebijakan, dan Program TPB Tujuan 16 Dengan Upaya Tambahan VI-52
Tabel VI.2.33 Keterkaitan TPB Tujuan 17 Terhadap Indikator TPB Yang Berkorelasi Kuat VI-53
Tabel VI.2.34 Rekomendasi Skenario, Arah Kebijakan, dan Program TPB Tujuan 17 Dengan Upaya Tambahan VI-54
Tabel VI.2.35 Alernatif skenario direkomendasikan untuk dipertahankan VI-56
Tabel VI.3.1 Rekomendasi Arah Kebijakan dan Rekapitulasi Rekomendasi Program Pembangunan VI-64







DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.4.1	Alur Penyusunan KLHS RPJMD dan Integrasinya Dalam RPJMD	II-18
Gambar 2.4.2	Tahapan Penyelenggaraan KLHS RPJMD	II-20
Gambar 2.4.3	Integrasi KLHS Kedalam RPJMD	II-25
Gambar 3.1.1	Grafik Komposisi Luas Kecamatan	III-2
Gambar 3.1.2	Peta Administrtasi Kota Jambi	III-3
Gambar 3.1.3	Peta Topografi Kota Jambi	III-6
Gambar 3.1.4	Peta Geologi Kota Jambi	III-8
Gambar 3.1.5	Peta Daerah Aliran Sungai di Kota Jambi	III-13
Gambar 3.1.6	Hierarki Sistem Pusat Permukiman di Provinsi Jambi	III-15
Gambar 3.1.7	Arahan Dominasi Fungsi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi	III-15
Gambar 3.1.8	Kota Jambi Terhadap Sistem Prasarana Utama dan Pola Aliran Baran di Provinsi Jambi	III-16
Gambar 3.1.9	Skematik Pelayanan Zona 1	III-31
Gambar 3.1.10	Skematik Pelayanan Zona 2	III-31
Gambar 3.1.11	Skematik Pelayanan Zona 3	III-32
Gambar 3.1.12	Skematik Pelayanan Zona 4	III-32
Gambar 3.1.13	Grafik Distribusi Penduduk Per Kecamatan di Kota Jambi Tahun 2022	III-42
Gambar 3.1.14	Grafik Jumlah Penduduk di Kota Jambi Tahun 2016-2022	III-43
Gambar 3.1.15	Grafik Perkembangan IPM Kota Jambi 2014-2022 Terhadap IPM Provinsi Jambi	III-49
Gambar 3.1.16	Grafik Perkembangan Angka Kemiskinan Kota Jambi	III-51
Gambar 3.2.1	Grafik Jasa Ekosistem Penyediaan	III-54
Gambar 3.2.2	Peta Jasa Ekosistem Untuk Penyediaan Pangan	III-57
Gambar 3.2.3	Peta Jasa Ekosistem Untuk Penyediaan Air Bersih	III-58
Gambar 3.2.4	Peta Jasa Ekosistem Untuk Penyediaan Serat	III-59
Gambar 3.2.5	Peta Jasa Ekosistem Untuk Penyediaan Energi	III-60
Gambar 3.2.6	Peta Jasa Ekosistem Untuk Penyediaan Sumberdaya Genetik	III-61
Gambar 3.2.7	Grafik Jasa Ekosistem Pengaturan	III-64
Gambar 3.2.8	Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim	III-69
Gambar 3.2.9	Peta Jasa Ekosistem Tata Kelola Air	III-70
Gambar 3.2.10	Peta Jasa Ekosistem Bencana	III-71
Gambar 3.2.11	Peta Jasa Ekosistem Pemurnian Air	III-72





Gambar 3.2.12	Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Limbah	III-73
Gambar 3.2.13	Peta Pengaturan IKU Udara Kota Jambi	III-74
Gambar 3.2.14	Peta Jasa Ekosistem Pengendalian Penyerbukan Alami	III-75
Gambar 3.2.15	Peta Jasa Ekosistem Pengendalian Hama Penyakit	III-76
Gambar 3.2.16	Grafik Jasa Ekosistem Jasa Budaya	III-77
Gambar 3.2.17	Peta Jasa Ekosistem Tempat Tinggal	III-80
Gambar 3.2.18	Peta Jasa Ekosistem Rekreasi	III-81
Gambar 3.2.19	Peta Jasa Ekosistem Estetika	III-82
Gambar 3.2.20	Grafik Jasa Ekosistem Pendukung	III-84
Gambar 3.2.21	Peta Jasa Ekosistem Tanah	III-87
Gambar 3.2.22	Peta Jasa Ekosistem Siklus Hara	III-88
Gambar 3.2.23	Peta Jasa Ekosistem Produksi Primer	III-89
Gambar 3.2.24	Peta Jasa Ekosistem Biodversitas	III-90
Gambar 3.2.25	Fasilitas Air Minum Perpipaan di Kota Jambi	III-92
Gambar 3.2.26	Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Air	III-94
Gambar 3.2.27	Peta Potensi Kelayakan Permukiman di Kota Jambi	III-96
Gambar 3.3.1	Grafik Terealisasi Berupa Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2022	III-106
Gambar 3.3.2	Grafik Terealisasi Berupa Pendapatan Transperan Kota Jambi Tahun 2018-2022	III-107
Gambar 3.3.3	Grafik Terealisasi Berupa Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Kota Jambi Tahun 2018-2022	III-107
Gambar 3.3.4	Grafik Rekap Teralisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2022	III-108
Gambar 3.3.5	Grafik Terealisasi Belanja Operasi di Kota Jambi Tahun 2018-2022	III-112
Gambar 3.3.6	Grafik Terealisasi Belanja Modal di Kota Jambi Tahun 2018-2022	III-113
Gambar 3.3.7	Grafik Rekap Teralisasi Belanja Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2022	III-113
Gambar 3.3.8	Grafik Netto Angaran Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Kota Jambi Tahun 2018-2022	III-117
Gambar 3.3.9	Grafik Ratio Likuiditas di Tahun 2018 – 2022	III-118
Gambar 3.3.10	Ratio Salvabilitas di Tahun 2018 – 2022	III-119
Gambar 3.3.11	Debt Ratio di Tahun 2018 – 2022	III-120
Gambar 3.3.12	Grafik Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Jambi Tahun 2018 – 2022	III-121
Gambar 3.1.13	Grafik Persentase Produktivitas Total Daerah di Kota Jambi Tahun 2018 – 2022	III-133
Gambar 3.3.14	Garafik Laju Pertumbuhan Realisasi PMA dan PMDN di Kota Jambi Tahun 2018 – 2022	III-134
Gambar 4.1.1	Grafik Persentase Capaian Indikator Target 2022 Rencana Aksi Daerah (RAD) SDG's Kota Jambi	IV-3
Gambar 4.1.2	Jumlah Indikator Pada Setiap Tujuan Yang Sudah Dilaksanakan Dan Sudah Mencapai Target	IV-4



Gambar 4.1.3	Indikator TPB Yang Sudah Dilaksanakan Tetapi Belum Mencapai Target	IV-4
Gambar 4.1.4	Indikator TPB yang sudah dilaksanakan namun perlu perhatian Khusus	IV-5
Gambar 4.1.5	Indikator TPB yang tidak/belum memiliki data	IV-5
Gambar 4.1.6	Grafik Ketercapaian Indikator SDG's/TPB Kota Jambi Dimensi Sosial	IV-7
Gambar 4.1.7	Target Realisasi SDGs/TPB Kota Jambi Dimensi Sosial	IV-8
Gambar 4.1.8	Ketercapaian Indikator SDGs/TPB Kota Jambi Dimensi Ekonomi	IV-10
Gambar 4.1.9	Target Realisasi SDGs/TPB Kota Jambi Dimensi Ekonomi	IV-10
Gambar 4.1.10	Ketercapaian Indikator SDGs/TPB Kota Jambi Dimensi Lingkungan	IV-12
Gambar 4.1.11	Target Realisasi SDGs/TPB Kota Jambi Dimensi Lingkungan	IV-13
Gambar 4.1.12	Target Realisasi SDGs/ Kota Jambi Dimensi Hukum dan Tata Kelola	IV-14
Gambar 4.1.13	Target Realisasi SDGs/TPB Kota Jambi Dimensi Hukum dan Tata Kelola	IV-15
Gambar 4.1.14	Presentase Capaian Jumlah Indikator TPB	IV-15
Gambar 4.2.1	Ilustrasi Pola Perkembangan Kota Jambi	IV-34
Gambar 4.2.2	Ilustrasi Pengaruh Perkembangan Ekternal Kota Bagian Selatan	IV-37
Gambar 4.2.3	Grafik Luas Perubahan Penggunaan Lahan	IV-39
Gambar 4.2.4	Peta Perubahan Guna Lahan Kota Jambi	IV-40
Gambar 4.2.5	Komposisi Guna Lahan Kota Jambi	IV-40
Gambar 4.2.6	Visualisasi Intensitas Pemanfaatan Ruang BWP I	IV-42
Gambar 4.2.7	Visualisasi Intensitas Pemanfaatan Ruang BWP II	IV-44
Gambar 4.2.8	Visualisasi l Intensitas Pemanfaatan Ruang BWP III	IV-46
Gambar 4.2.9	Visualisasi Intensitas Pemanfaatan Ruang BWP IV	IV-47
Gambar 4.2.10	Visualisasi Intensitas Pemanfaatan Ruang BWP V	IV-49
Gambar 4.2.11	Visualisasi Intensitas Pemanfaatan Ruang BWP VI	IV-50
Gambar 4.2.12	Peta Bangunan Di Kawasan Lindung Kota Jambi	IV-66
Gambar 4.2.13	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Tembuku Hulu, Tahun 2022	IV-69
Gambar 4.2.14	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Tembuku Tengah, Tahun 2022	IV-70
Gambar 4.2.15	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Tembuku Hilir, Tahun 2022	IV-70
Gambar 4.2.16	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Selincah Hulu, Tahun 2022	IV-71
Gambar 4.2.17	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Selincah Tengah, Tahun 2022	IV-71
Gambar 4.2.18	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Selincah Hilir, Tahun 2022	IV-72
Gambar 4.2.19	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Solok Hulu, Tahun 2022	IV-72
Gambar 4.2.20	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Solok Tengah, Tahun 2022	IV-73
Gambar 4.2.21	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Solok Hilir, Tahun 2022	IV-73
Gambar 4.2.22	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Putri Hulu 1, Tahun 2022	IV-74
Gambar 4.2.23	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Putri Tengah, Tahun 2022	IV-74
Gambar 4.2.24	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Putri Hulu 2, Tahun 2022	IV-75
Gambar 4.2.25	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Putri Hulu 3, Tahun 2022	IV-75



Gambar 4.2.26	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Putri Hilir, Tahun 2022	IV-76
Gambar 4.2.27	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Kambang Hulu 1, Tahun 2022	IV-76
Gambar 4.2.28	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Kambang Tengah, Tahun 2022.....	IV-77
Gambar 4.2.29	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Kambang Hulu 2, Tahun 2022	IV-77
Gambar 4.2.30	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Kambang Hilir, Tahun 2022	IV-78
Gambar 4.2.31	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Kenali Besar Hulu, Tahun 2022	IV-78
Gambar 4.2.32	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Kenali Besar Tengah, Tahun 2022	IV-79
Gambar 4.2.33	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Kenali Besar Hilir, Tahun 2022	IV-79
Gambar 4.2.34	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Kenali Kecil Hulu, Tahun 2022.....	IV-80
Gambar 4.2.35	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Kenali Kecil Tengah, Tahun 2022 .	IV-80
Gambar 4.2.36	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Kenali Kecil Hilir, Tahun 2022.....	IV-81
Gambar 4.2.37	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Asam Hulu, Tahun 2022	IV-81
Gambar 4.3.38	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Asam Tengah, Tahun 2022.....	IV-82
Gambar 4.2.39	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Asam Hilir, Tahun 2022	IV-82
Gambar 4.2.40	Peta Sebaran Lokasi Banjir di Kota Jambi.....	IV-90
Gambar 4.2.41	Peta Cakupan Akses Dan Sistem Layanan Persampahan Kota Jambi.....	IV-95
Gambar 4.2.42	Ilustrasi Interaksi Antar Komponen Ruang.....	IV-110
Gambar 5.1	Grafik Persentase Capaian Indikator SDGs Kota Jambi Terhadap Target Nasional	V-40
Gambar 5.2	Grafik Jumlah Indikator Mencapai Terget Pada Perangkat Daerah (PD)	V-79
Gambar 5.3	Grafik Jumlah Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target Pada Perangkat Daerah (PD)	V-80
Gambar 5.4	Grafik Indikator TPB yang sudah dilaksanakan namun perlu perhatian khusus Pada Perangkat Daerah (PD)	V-81
Gambar 5.5	Grafik Indikator TPB yang Tidak Memiliki Data (N/A) Pada Perangkat Daerah (PD)	V-82
Gambar 6.1.1	Ilustrasi Perumusan Alternatif Rekomendasi Kebijakan	VI-2
Gambar 6.2.1	Keterkaitan Daya Dukung Air Dengan Isu PB Strategis	VI-13
Gambar 6.2.2	Keterkaitan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Dengan Isu PB Strategis.....	VI-14
Gambar 6.2.3	Grafik Tingkat Kemiskinan Ekstrim di Kota Jambi	VI-25
Gambar 6.2.4	Grafik Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.....	VI-30
Gambar 6.2.5	Grafik Laju pertumbuhan PDB perkapita di Kota Jambi.....	VI-35
Gambar 6.2.6	Grafik Kondisi mantap jalan nasional di Kota Jambi	VI-38
Gambar 6.2.7	Grafik Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan di Kota Jambi	VI-41
Gambar 6.2.8	Grafik Jumlah Timbulan Sampah yang di Daur Ulang di Kota Jambi.....	VI-46
Gambar 6.2.9	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B	VI-50







BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), mengamanatkan kewajiban bagi pemerintah untuk menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program termasuk dalam penyusunan perencanaan program pembangunan daerah, salah satunya dokumen RPJMD baik baru maupuan perubahan. Tata cara penyusunan KLHS RPJMD selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 serta Permendagri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dijelaskan bahwa KLHS menjadi bagian dari kaidah perumusan kebijakan rencana pembangunan. Selain itu KLHS juga menjadi dokumen yang terintegrasi ke dalam rencana pembangunan dan salah satu syarat penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJPD dan RPJMD sebagai salah satu instrumen mengintegrasikan pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan





keputusan yang bersifat strategis, yakni pada aras kebijakan, rencana dan program pembangunan.

Kota merupakan pusat pemukiman penduduk yang melibatkan berbagai kegiatan budidaya dengan berbagai implikasi terhadap penurunan kualitas lingkungan kawasan perkotaan tersebut itu sendiri. Kota Jambi yang merupakan pusat regional Provinsi Jambi terus mengalami perkembangan sosial dan ekonomi, yang mendorong peningkatan pertumbuhan penduduk dan tentunya diikuti oleh pesatnya perkembangan pemanfaatan ruang fisik kota, sehingga muncul indikasi-indikasi penurunan kualitas lingkungan perkotaan.

Lingkungan merupakan aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam penyelenggaraan pembangunan. Rumusan keseimbangan antara lingkungan buatan dan lingkungan alami juga merupakan muatan yang dituju dalam suatu rumusan konsep pembangunan, termasuk pembangunan perkotaan yang dituangkan dalam bentuk produk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah (RPJMD). Dalam konteks ini, RPJMD juga berfungsi sebagai arah serta pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga para pelaku bisnis atau sektor swasta serta seluruh komponen masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi sesuai konsepsi pemerintahan dengan paradigma Good Governance yang mengedepankan interaksi para pelaku pembangunan (Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat) yang bersendikan transparansi,akuntabilitas dan partisipasi. Selain itu RPJMD berfungsi sebagai tolak ukur penilaian Kinerja Kepala Daerah di setiap akhir tahun anggaran dan juga pada akhir masa Jabatan.

Beberapa komponen lingkungan, memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan perkembangan dan perikehidupan dalam ruang wilayah ataupun perkotaan. Laju pertumbuhan penduduk akan berbanding terbalik terhadap kualitas/kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Jika ruang terus dimanfaatkan untuk perkembangan kegiatan



budidaya tanpa mempertimbangkan kemampuan lingkungan, tentu akan semakin memperkecil aspek keberlanjutan lingkungan atau fungsi lingkungan hidup kota tersebut. Pembangunan yang berkelanjutan pada hakekatnya dapat memposisikan 3 (tiga) aspek utama, yaitu : ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai satu kesatuan yang dapat saling mendukung dan memperkuat.

Pengintegrasian TPB dilakukan melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB yang diwajibkan bagi pemerintah provinsi dengan dukungan data capaian dari kabupaten/kota. Selanjutnya RAD TPB memberikan masukan untuk kebijakan pembangunan daerah melalui RPJMD maupun RPJPD. Selain itu dalam Permendagri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah mengamanatkan penyusunan KLHS dalam setiap penyusunan RPJMD baik baru maupun perubahan yang di dalamnya menggunakan pendekatan penilaian pencapain TPB daerah untuk mendukung capaian TPB nasional. KLHS yang bertujuan untuk memastikan bahwa aspek pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi dalam Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP) yang dalam hal ini adalah RPJMD menggunakan pendekatan capaian TPB daerah dibandingkan dengan target TPB nasional. Dengan pendekatan tersebut maka diharapkan pencapaian TPB yang belum mencapai target dapat dilakukan percepatan melalui upaya tambahan dalam RPJMD.

Sebagai lingkungan binaan, kota pada dasarnya cenderung tidak memiliki sumberdaya alam yang memadai untuk mendukung perikehidupan yang berlangsung didalamnya. Namun sebagai suatu proses, pembangunan kota yang berkelanjutan selayaknya dapat mengejawantahkan perubahan-perubahan paradigma dengan tujuan peningkatan kualitas kearah yang lebih baik. Walaupun tidak dapat diukur secara pasti, namun konsep pembangunan kota yang berkelanjutan dapat mewujudkan perubahan-perubahan orientasi, sehingga secara perlahan prinsip-prinsip keberlanjutan tersebut dapat semakin terealisasi.

Pada dasarnya keseimbangan lingkungan merupakan syarat perwujudan perkembangan ekonomi dan sosial itu sendiri pada masa yang akan datang.





Namun demikian, di Kota Jambi masih banyak ditemukan fakta-fakta lingkungan yang tidak dapat dipungkiri telah menunjukan kondisi sebaliknya. Ketidak sesuaian pemanfaatan lahan, lingkungan permukiman dengan kualitas lingkungan yang buruk, peningkatan potensi paparan genangan/banjir, penurunan kualitas sumberdaya air, serta semakin memburuknya kualitas udara adalah sebagian dari dampak perkembangan fisik kota. kondisi ini disebabkan oleh beberapa penyebab, diantaranya adalah perkembangan fisik kota yang sudah lebih dahulu dan lebih cepat dari rencana penataan ruang, rencana penataan ruang yang kurang konsisten dilaksanakan, atau dapat juga disebabkan oleh perumusan rencana-rencana atau arah pembangunan yang kurang didukung oleh kajian-kajian yang berkaitan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Konsep pembangunan yang mengarah kepada dukungan keberlanjutan diperlukan dalam mengimbangi akselerasi pertumbuhan dan perkembangan sosial di Kota Jambi. Dalam konteks menjaga atau bahkan meningkatkan kondisi kualitas lingkungan di Kota Jambi, pemerintah daerah perlu melakukan langkah-langkah pengelolaan dan perlindungan termasuk dengan melakukan review terhadap produk rencana pembangunan seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang didalamnya juga diamanatkan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

1.2 MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

1. Maksud

   Maksud pelaksanaan kegiatan ini adalah mewujudkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Jambi yang susuai dengan kaidah berdasarkan peraturan perundang-undangan

2. Tujuan

   Sedangkan tujuan yang diharapkan dihasilkan dari pekerjaan ini berdasarkan maksud diatas, adalah Tujuan pelaksanaan kegiatan ini





adalah memperkuat rancangan teknokratik dari review dan evaluasi RPJMD Kota Jambi.

3. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

a. Kajian kebijakan pengembangan wilayah dan tata ruang Kota Jambi;
b. Memberikan Pertimbangan terhadap Kebijakan Rencana dan Program (KRP) dalam RPJMD Kota Jambi yang akan disusun dan berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup yang kemudian dapat digunakan sebagai dasar dalam evaluasi dalam penyusunan RPJMD Kota Jambi
c. Pembaharuan informasi biogeofisik, demografi dan sosek, serta kerawanan Kota Jambi;
d. Inventarisasi potensi sumberdaya alam;
e. Inventarisasi dan kajian tentang dokumen perencanaan pada tingkat lokal (RPJMD, RPJPD, Renstra OPD, dll) dan tinjauan dokumen perencanaan pada tingkat regional dan provinsi
f. Inventarisasi isu lingkungan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya alam dan pengembangan wilayah Kota Jambi;
g. Analisis daya dukung dan daya tampung wilayah Kota Jambi dan dalam pengembangan konteks regional;
h. Rekomendasi kebijakan penggunaan sumber daya dan kebijakan pengembangan wilayah Kota Jambi.





1.3 RUANG LINGKUP

Lingkup Kegiatan

- Rapat Persiapan/Koordinasi awal dalam rangka penyamaan pandangan, difokuskan kepada diskusi dan mendapatkan umpan balik dari seluruh pihak terkait utamanya adalah pihak OPD dan stakeholder kunci lainnya;
- Mengkaji dampak lingkungan atas rencana tata ruang dan Kegiatan/Rencana/Program memberi kesempatan untuk memasukkan aspek LH dalam proses perencanaan pada tahap sangat awal sehingga dapat sepenuhnya memprakirakan dampak lingkungan potensial, termasuk yang bersifat kumulatif jangka panjang dan sinergistik;
- Forum Group Discussion dilaksanakan untuk mengelaborasi analisis dampak KRP pada tataran konsep diskusi dengan OPD dan staleholder kunci lainnya.
- Dalam pelaksanaan FGD dihadirkan narasumber yang dapat menjelaskan dan menjembatani kegiatan FGD serta memberikan penjelasan tentang tujuan dan maksud penyusunan KLHS ini. Melakukan inventarisasi dan kajian kebijakan yang mempunyai dampak dalam proses pengambilan keputusan di Kota Jambi;
- Mengkaji daya dukung dan daya tampung Kota Jambi baik itu melalui pendekatan kuantitatif ataupun kualitatif;
- Rapat pembahasan dengan para ahli dan tim yang terlibat dalam penyusunan untuk melakukan kajian tentang isu-isu lingkungan yang mungkin terjadi;
- Melakukan kegiatan Pelaporan dan Tinjauan (reporting and review);
- Finalisasi Laporan dan Penyerahan Laporan.





Lokasi Kegiatan

Kegiatan jasa konsultan ini harus dilaksanakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tepatnya di wilayah Kota Jambi Provinsi Jambi.

1.4 KELUARAN

Hasil yang diharapkan dari penerapan KLHS RPJMD Kota Jambi adalah tersusunnya laporan pelaksanaan Dokumen KLHS yang memuat rekomendasi mitigasi dampak negatif kebijakan dan/atau rencana pembangunan terhadap lingkungan hidup disertai dengan serta kajian daya dukung dan daya tampung. Laporan Dokumen Review KLHS Kota Jambi bersifat interaktif yang dapat dan bahkan perlu dimutakhirkan oleh OPD terkait. Laporan KLHS ini diharapkan bermanfaat bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi berikutnya agar sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Dokumen-dokumen perencanaan dan lingkungan seperti halnya tata ruang, rencana pembangunan dan status lingkungan hidup Kota Jambi merupakan referensi utama yang dapat dijadikan baseline bagi analisis KLHS ini.

1.5 DASAR HUKUM

Penyusunan Dokumen KLHS untuk mengkaji KRP yang tersusun dalam RPMJD Kota Jambi merupakan kegiatan yang bersifat lintas sektor yang implementasinya akan berdampak terhadap masyarakat dan lingkungan hidup. Landasan idiil RPJMD daerah ini adalah Pancasila dan Landasan Konstitusional adalah UUD 1945, sedangkan landasan operasional meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;





2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
3. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 TH 2010 tentang Pelaksanaan PP No 8 TH 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, yang telah diubah menggunakan Keputusan Mendagri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;





BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 KONSEP DASAR LINGKUNGAN HIDUP

Lingkungan hidup, menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009, adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Kebijakan umum tentang lingkungan hidup di Indonesia, telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Selain itu, disebutkan pula dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pasal 2 ayat 2 dan pasal 17 ayat 1 mengenai tugas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang memiliki kewenangan dalam mengatur pembuatan dan pelaksanaan KLHS Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Terkait dengan kajian masalah lingkungan hidup, banyak para ahli memberikan definisi atau arti mengenai lingkungan hidup. Tentunya mereka mendefinisikan didasarkan atas latar belakang keilmuan yang mereka miliki.

Prof. Dr. Emil Salim mendifinisikan lingkungan hidup sebagai : “Segala benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang



kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia''1

Hal serupa dikemukakan oleh Otto Soemarwoto, namun dalam perspektif yang berbeda, bahwa : "Lingkungan adalah jumlah semua benda kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Secara teoritis ruang itu tdak terbatas jumlahnya, oleh karena misalnya matahari dan bintang termasuk di dalamnya''[2]

Begitu juga Husein yang menyatakan :"Lingkungan hidup mengandung mengandung arti termpat, wadah atau ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dan tak hidup yang berhubungan dan saliong pengaruh-mempengaruhi satu sama lain, baik antara makhluk-makhluk itu sendiri maupun antara makhlukmakhluk itu dengan alam sekitarnya''[3]

Prof Dr. Munadjat Danusaputro SH Menurutnya, lingkungan hidup didefinisikan sebagai berikut : "Semua benda dan daya serta kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup yang lain. dengan demikian, lingkungan hidup mencakup dua lingkungan, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan budaya"[4]

Keberlanjutan (sustainability), konsep keberlanjutan yang digunakan disini berasosiasi dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang diperkenalkan oleh World Commission on Environment and Development sebagaimana tertuang dalam laporan Brundtland: "pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka". Wikipedia mendefinisikan keberlanjutan sebagai karakteristik suatu proses atau kondisi tertentu yang dapat terus bertahan untuk jangka waktu yang tak terbatas. Sementara Partidario (2007) mendefinisikan keberlanjutan sebagai

sebagai hasil pembangunan

ang waktu yang panjang.





Strategi (s), merupakan konsepsi yang lahir dari ilmu kemiliteran dan umumnya merujuk pada kajian atau perencanaan sarana atau alat-alat untuk pencapaian tujuan suatu kebijakan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 1995), mendefinisikan strategi sebagai ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu diperang dan damai; atau sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.

Oxford Dictionary (2005) mendefinisikan strategis sebagai suatu tindakan yang ditempuh dalam tahap perencanaan dengan maksud agar tujuan atau manfaat tertentu dapat dicapai (Oxford Dictionary 2005).

Dapat disimpulkan "strategis" mengandung arti perbuatan atau aktivitas yang dilakukan sejak awal proses pengambilan keputusan yang berakibat signifikan terhadap hasil akhir yang akan diraih. Dalam konteks KLHS, perbuatan dimaksud adalah suatu kajian yang dapat menjamin dipertimbangkannya sejak dini aspek lingkungan hidup dalam proses pengambilan keputusan di aras kebijakan, rencana atau program.

Sejalan dengan pengertian tersebut, pendekatan strategis dalam Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) dengan demikian bukanlah untuk mencari tahu apa yang akan terjadi di masa depan, melainkan untuk merencanakan dan mengendalikan langkah-langkah yang akan ditempuh sedemikian rupa sehingga terbangun atau terbentuk route untuk menuju masa depan yang diinginkan (Partidário 2007).

Kebijakan, Rencana dan Program (KRP), walau atribut yang membedakan ketiga istilah seringkali tidak jelas, namun secara generik perbedaannya adalah sebagai berikut (UNEP 2002: 499; Partidário 2004):

- Kebijakan (*Policy*) : arah yang hendak ditempuh (road-map) berdasarkan tujuan yang digariskan, penetapan prioritas, garis besar aturan dan mekanisme untuk mengimplementasikan tujuan.



- Rencana (*Plan*) : desain, prioritas, opsi, sarana dan langkah-langkah yang akan ditempuh berdasarkan arah kebijakan dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kesesuaian sumber daya.
- Program (*Programme*) : serangkaian komitmen, pengorganisasian aktivitas atau sarana yang akan diimplementasikan pada jangka waktu tertentu dengan berlandaskan pada kebijakan dan rencana yang telah digariskan.

Dalam prakteknya, ketiga definisi tersebut satu sama lain saling bertindih (overlapping) dan berbeda-beda antara satu negara dan negara lain, terutama definisi rencana dan program. Kedua istilah yang terakhir ini dibeberapa negara sering digunakan saling bergantian. Sehingga yang perlu dipahami disini cukup definisi generik saja. Implikasinya, aplikasi KLHS di suatu negara harus disesuaikan dengan definisi KRP yang umum dianut oleh negara yang bersangkutan.

2.2 PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pasal 3 UU No. 32 Th. 2009 dikemukakan bahwa tujuan pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

a) melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
b) menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
c) menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
d) menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
e) mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
f) menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;



g) menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;

h) mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;

i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan

i) mengantisipasi isu lingkungan global.

Dari sasaran-sasaran pengelolaan lingkungan hidup di atas, terlihat bahwa kelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan tujuan utama yang dapat diukur. Kelestarian fungsi lingkungan hidup dapat diukur dengan dua parameter utama, yaitu Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup. Dua parameter ini menjadi ukuran/indikator untuk rencana usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak besar dan penting bagi lingkungan hidup.

2.3 KLHS DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Strategic Environmental Assessment (SEA) SEA definitions are much like music: minor variations derived from a common theme and compressed into a narrow band width (Sadler 2005: 1). Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau Strategic Environmental Assessment (SEA) adalah instrumen pendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan melalui upaya internalisasi kepentingan lingkungan hidup (LH) dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam perencanaan pembangunan tersebut. Upaya pengarusutamaan kepentingan LH dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ini penting karena pelaksanaan pembangunan selama ini selain telah meningkatkan keuntungan ekonomi, juga mengakibatkan kemerosotan kualitas LH dan persoalan-persoalan sosial.[5]

Dalam dua dekade terakhir seiring dengan semakin bertambahnya pengetahuan di bidang kajian lingkungan, telah berkembang aneka definisi KLHS yang merefleksikan perbedaan dalam memaknai tujuan KLHS. Sehingga boleh dikatakan tidak ada definisi KLHS yang secara universal dianut oleh semua





pihak. Namun demikian secara umum dijumpai empat jenis definisi KLHS sebagaimana contoh berikut ini.

Sadler dan Verheem (1996):

”KLHS adalah proses sistematis untuk mengevaluasi konsekuensi lingkungan hidup dari suatu usulan kebijakan, rencana, atau program sebagai upaya untuk menjamin bahwa konsekuensi dimaksud telah dipertimbangkan dan dimasukan sedini mungkin dalam proses pengambilan keputusan paralel dengan pertimbangan sosial dan ekonomi”

(“SEA is a systematic process for evaluating the environmental consequences of proposed policy, plan or programme initiatives in order to ensure they are fully included and appropriately addressed at the earliest appropriate stage of decision making on par with economic and social considerations”)

Therievel et al (1992):

”KLHS adalah proses yang komprehensif, sistematis dan formal untuk mengevaluasi efek lingkungan dari kebijakan, rencana, atau program berikut alternatifnya, termasuk penyusunan dokumen yang memuat temuan evaluasi tersebut dan menggunakan temuan tersebut untuk menghasilkan pengambilan keputusan yang memiliki akuntabilitas publik”

(”SEA is the formalised, systematic and comprehensive process of evaluating the environmental effects of a policy, plan or programme (PPPs) and its alternatives, including the preparation of a written report on the findings of that evaluation, and using the findings in publicly accountable decisionmaking”)

DEAT dan CSIR (2000):

”KLHS adalah proses mengintegrasikan konsep keberlanjutan dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis”

(”SEA is a process of integrating the concept of sustainability into strategic decision-making”)

Brown dan Therievel (2000):





"KLHS adalah suatu proses yang diperuntukan bagi kalangan otoritas yang bertanggung jawab atas pengembangan kebijakan (pemrakrasa) (saat formulasi kebijakan) dan pengambil keputusan (pada saat persetujuan kebijakan) dengan maksud untuk memberi pemahaman holistik perihal implikasi sosial dan lingkungan hidup dari rancangan kebijakan, dengan fokus telaahan diluar isu-isu yang semula merupakan faktor pendorong lahirnya kebijakan baru"

("SEA is a process directed at providing the authority responsible for policy development (the 'proponent') (during policy formulation) and the decision-maker (at the point of policy approval) with a holistic understanding of the environmental and social implications of the policy proposal, expanding the focus well beyond the issues that were the original driving force for new policy")

Dua definisi KLHS yang pertama boleh dikatakan menggunakan kerangka fikir AMDAL yakni menelaah implikasi atau efek dari rancangan kebijakan, rencana atau program terhadap lingkungan hidup. Pendekatan KLHS yang menyerupai AMDAL ini disebut juga sebagai "EIA-based" SEA atau KLHS yang berbasis pendekatan AMDAL (Partidario 1999).[6]

Adapun definisi ketiga dan keempat yang diajukan oleh DEAT dan CSIR (2000) serta Brown dan Therievel (2000) menunjukkan peran KLHS dalam memfasilitasi lahirnya KRP yang berorientasi berkelanjutan (sustainability). Di dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa prinsip-prinsip dan tujuan keberlanjutan dapat diintegrasikan dalam pengambilan keputusan sejak dini. Melalui pendekatan ini dapat difasilitasi terbentuknya kerangka-kerja (framework) untuk berkelanjutan yang dapat digunakan sebagai pemandu untuk rencana dan program dan/atau untuk menelaah rencana atau program yang tengah berjalan. Pendekatan ini boleh dikatakan merefleksikan apa yang disebut oleh Therivel et al (1992) sebagai "sustainability-led" SEA atau KLHS yang dipandu oleh keberlanjutan.





KLHS yang berbasis pendekatan AMDAL (EIA-based SEA) maupun yang berbasis pendekatan keberlanjutan (sustainability-led SEA) pada dasarnya hadir sebagai respon terhadap adanya beragam kebutuhan akan KLHS. KLHS berbasis pendekatan AMDAL muncul untuk mengatasi beberapa kelemahan yang dijumpai dalam AMDAL yang bersifat spesifik proyek; sementara KLHS berbasis keberlanjutan muncul sebagai sarana untuk mengimplementasikan konsep berkelanjutan (Therivel et al 1992). Dalam KLHS yang berbasis pendekatan AMDAL kajian diperluas hingga melampaui aras (level) proyek, yakni mengevaluasi konsekuensi positif dan negatif dari kebijakan, rencana dan program. Sementara dalam KLHS berbasis pendekatan keberlanjutan dapat diformulasikan visi, tujuan dan kerangka-kerja keberlanjutan untuk memandu pengambilan keputusan KRP yang lebih baik di masa mendatang. Bila KLHS difungsikan sebagai pemandu untuk keberlanjutan, maka implikasinya KLHS tersebut harus dapat mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan biofisik dalam proses KRP (DEAT 2004).

Belakangan KLHS yang berbasis pendekatan berkelanjutan ini berkembang menjadi KLHS untuk Jaminan Keberlanjutan Lingkungan Hidup (SEA for Environmental Sustainability Assurance, ESA).[2] KLHS ini memang berbasis pembangunan berkelanjutan namun sangat berorientasi pada perlindungan lingkungan sehingga diklasifikasikan sebagai dark green. KLHS ini dipromosikan secara meluas oleh International Association for Impact Assessment (IAIA 2002). Manfaatnya tergolong cukup besar, diantaranya adalah lebih relevan dan lebih banyak diterima oleh kalangan pengambil keputusan (Sadler 2005:3)

Dari berbagai perkembangan definisi KLHS tersebut dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, KLHS lebih tepat dipahami sebagai suatu proses generik yang di dalamnya terkandung sekelompok instrumen dan peralatan dengan nama, bentuk dan lingkup aplikasi yang berbeda-beda (Sadler 2005: 2).





Kedua, KLHS untuk Menjamin Keberlanjutan Lingkungan (ESA atau Environmental Appraisal) telah menggeser paradigma KLHS dari yang semula berorientasi menanggulangi pengaruh negatif KRP ke arah yang berorientasi memelihara stok sumber daya alam. Sadler (2005) menggambarkan evolusi paradigma kajian ini pada Tabel II.3.1. Tabel ini juga dapat ditafsirkan sebagai agenda jangka panjang riset dan pengembangan KLHS.

Ketiga, integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan pada KRP pada dasarnya baru bermakna bila terlebih dahulu dilakukan evaluasi pengaruh KRP terhadap lingkungan hidup. Hasil evaluasi ini kemudian menjadi dasar bagi integrasi atau kedalaman intervensi prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam KRP. Sejauh ini dapat dikatakan berbagai definisi KLHS yang ada belum secara eksplisit memadukan kedua analisis tersebut. Memperhatikan kondisi sumber daya alam, lingkungan hidup, sosial, ekonomi dan politik, serta kapasitas sumber daya manusia dan institusi di masa mendatang; maka konstruksi definisi KLHS yang dipandang sesuai untuk Indonesia adalah: Suatu proses sistematis untuk mengevaluasi pengaruh lingkungan hidup dan menjamin diintegrasikannya prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis.

> *SEA is a systematic process for evaluating the environmental effect of and for ensuring the integration of sustainability principles into strategic decision-making.*

Dalam definisi di atas terkandung tiga proses penting yang perlu ditempuh dalam KLHS di Indonesia:

i) evaluasi pengaruh kebijakan, rencana dan program terhadap lingkungan hidup;

ii) integrasi prinsipprinsip keberlanjutan dalam kebijakan, rencana dan program; dan





iii) proses-proses kelembagaan yang harus ditempuh untuk menjamin prinsip-prinsip keberlanjutan telah diintegrasikan dalam kebijakan, rencana dan program.

Tabel II.3.1
Tipe KLHS Menurut Evolusi Paradigma

Paradigma	Karakteristik kunci
KLHS sebagaimana yang umum diaplikasikan (EIA based SEA)	Generasi kedua KLHS: ditujukan ke sumber atau hulu persoalan (berbeda dengan AMDAL yang berorientasi ke symptom atau hilir persoalan); fokus ke usulan kebijakan, rencana, atau program; integrasi pertimbangan lingkungan dalam pengambilan keputusan; mempertimbangkan alternatif dan penanggulangan efek dari implementasi; pemantauan terbatas dan tindak lanjut
KLHS untuk Menjamin Keberlanjutan Lingkungan Hidup atau Penilaian Keberlanjutan Lingkungan (SEA for Environmental Sustainability Assurance, ESA, or Environmental Appraisal)	Semua yang diutarakan di atas plus: penilaian terhadap dampak lingkungan yang timbul vs perlindungan atas stok sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang menipis; jaminan bahwa rusak dan hilangnya sumberdaya dapat dipertahankan dalam batasbatas yang masih dapat ditolerir; kompensasi untuk dampak residual yang sejalan dengan prinsip tidak ada sumberdaya yang hilang – no net loss(keberlanjutan tinggi), atau minimum standar (keberlanjutan moderat); pemantauan sistematis terhadap hasil dan dampak.
Kajian Terpadu untuk Menjamin Keberlanjutan atau Penilaian Keberlanjutan (Integrated Assessment for Sustainability Assurance, ISA, or Sustainability Appraisal)	Semua yang diutarakan di atas plus: identifikasi tujuan sosial dan ekonomi serta batas ambang yang harus dicapai; penilaian terhadap dampak lingkungan yg akan timbul sebagai akibat dari usulan dan alternatif yang diajukan vs triple bottom line (TBL); evaluasi dampak penting vs evaluasi keberlanjutan untuk klarifikasi trade-off dikalangan para pihak; mencari keseimbangan yang paling baik untuk menjamin tercapainya keberlanjutan.

Sadler (1999, 2002, 2005); UNEP (2002)

Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, Pemerintah melalui UU 31/2009 telah menetapkan KLHS sebagai salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Pasal 14). Pada Pasal 15 mengamanatkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah





menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program, dengan muata kajian antara lain :

a) kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
b) perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
c) kinerja layanan/jasa ekosistem;
d) efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
e) tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
f) tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Penerapan KLHS sebagai instrumen untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan ditekankan kembali pada Pasal 17, dimana hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah, dan apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:

a) kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
b) segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

2.3.1 TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Menurut *Brundtland* dari PBB, pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.

Agenda pembangunan berkelanjutan dibuat untuk menjawab tuntutan dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk





aksi nyata. Konsep Tujuan Pembangunan Berkelanjutan lahir pada Konferensi Pembangunan Berkelanjutan PBB, dengan menetapkan rangkaian target yang bisa diaplikasikan secara universal serta dapat diukur dalam menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan; (1) lingkungan, (2) sosial, dan (3) ekonomi.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda internasional yang menjadi kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goals (MDGs). SDGs disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan melibatkan 194 negara, civil society, dan berbagai pelaku ekonomi dari seluruh penjuru dunia. Agenda ini dibuat untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) atau Agenda 2030 telah dideklarasikan pada tanggal 25 September 2015, bertepatan dengan berlangsungnya United Nations General Assembly (UNGA) di kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat. TPB/ SDGs yang cakupan dan substansinya selaras dengan Nawacita, terdiri atas 17 Tujuan dan 169 Target. Tujuan dan target tersebut menggambarkan visi dan ruang lingkup agenda pembangunan global yang inklusif dan multidimensi, yang akan menjadi panduan bagi komunitas global selama 15 tahun ke depan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat global. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini terdiri atas 17 tujuan, yaitu:

a) TPB 1 : Tanpa Kemiskinan

   Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun;

b) TPB 2 : Tanpa Kelaparan

   Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;

c) TPB 3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera

   Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;





d) TPB 4 : Pendidikan Berkualitas

Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;

e) TPB 5 : Kesetaraan Gender

Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;

f) TPB 6 : Air Bersih dan Sanitasi Layak

Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;

g) TPB 7 : Energi Bersih dan Terjangkau

Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;

h) TPB 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;

i) TPB 9 : Industri, Inovasi, dan Infrastruktur

Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;

j) TPB 10 : Berkurangnya Kesenjangan

Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara;

k) TPB 11 : Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan

Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;

l) TPB 12 : Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;

m) TPB 13 : Penanggulangan Perubahan Iklim





Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;

n) TPB 14 : Ekosistem Laut

Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;

o) TPB 15 : Ekosistem Darat

Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasim lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;

p) TPB 16 : Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh

Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan;

q) TPB 17 : Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Divisi Statistik UN-DESA telah mengeluarkan metadata 247 indikator (april 2020) untuk mengukur pencapaian target TPB/SDGs. Berdasarkan Metadata Indikator SDGs Global tersebut, telah dikembangkan Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia yang meliputi 17 Tujuan, 169 Target dan 289 Indikator. Komitmen pemerintah indonesia terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan ditegaskan melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dimana pencapaian TPB/SDGs sekaligus menjadi tolok ukur tercapainya agenda pembangunan nasional dan daerah. Untuk itu, pemerintah daerah berperan sebagai pelaksana dalam pencapaian TPB/SDGs sebagai bagian dari prioritas nasional dan komitmen internasional sehingga harus terintegrasi ke dalam pembangunan daerah. Tahapan dan proses





pencapaian TPB/SDGs di daerah merupakan bagian dari tahapan dan proses pembangunan daerah itu sendiri, karena pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.

2.3.2 Prinsip Penyelenggaraan KLHS

KLHS bertujuan untuk menjamin bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam melakukan pembangunan. Terdapat tiga nilai penting dalam penyelenggaraan KLHS yang dapat mencerminkan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu keterkaitan (*interdependency*), keseimbangan (*equilibrium*), dan keadilan (*justice*) di antara pilar dan isu di atas.

1. Keterkaitan (*interdependency*)

   Bertujuan supaya penyelenggaraan KLHS dapat menghasilkan kebijakan, rencana, atau program yang mempertimbangkan keterkaitan antar sektor, wilayah, global-lokal. Nilai ini juga mengandung makna dihasilkannya KLHS yang bersifat holistik berkat adanya keterkaitan analisis antar komponen fisik-kimia, biologi, dan sosial-ekonomi.

2. Keseimbangan (*equilibrium*)

   Bertujuan supaya penyelenggaraan KLHS senantiasa dijiwai keseimbangan antara kepentingan sosial-ekonomi dengan kepentingan lingkungan hidup, antara kepentingan jangka pendek dan jangka panjang, antara kepentingan pembangunan pusat dan daerah, dan keseimbangan-keseimbangan lainnya. Implikasinya, usaha pemetaan ragam dan bentuk kepentingan para pihak menjadi salah satu proses dan metode yang penting digunakan dalam KLHS.

3. Keadilan (*justice*)

   Bertujuan supaya penyelenggaraan KLHS dapat menghasilkan kebijakan, rencana, dan program yang tidak mengakibatkan marjinalisasi sekelompok atau golongan tertentu dalam masyarakat karena adanya pembatasan





akses dan kontrol terhadap sumber-sumber alam atau modal atau pengetahuan.

2.3.3 Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan RPJPD dan RPJMD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018, KLHS RPJPD dan RPJMD adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJPD dan RPJMD. KLHS RPJPD dan RPJMD disusun sebelum dirumuskannya RPJMD dengan fokus kajian pada pencapaian target TPB/SDGs dan mengakomodir isu strategis TPB/SDGs yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola. Dalam pemanfaatannya, KLHS RPJPD dan RPJMD dapat dimanfaatkan untuk penyusunan dokumen RPJPD dan RPJMD dan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs.

KLHS RPJPD dan RPJMD memuat kajian pembangunan berkelanjutan serta perumusan skenario pembangunan berkelanjutan. Pengkajian pembangunan berkelanjutan dilakukan melalui identifikasi dan analisis data kondisi umum daerah, capaian indikator TPB/SDGs yang relevan, serta pembagian peran antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, filantropi, pelaku usaha, akademisi dan pihak terkait lainnya; sedangkan perumusan skenario pembangunan berkelanjutan disusun berdasarkan alternatif proyeksi untuk pencapaian target dengan dan/atau tanpa upaya tambahan.

Berdasarkan metadata edisi II dalam pencapaian TPB/SDGs sebagai dokumen acuan atas indikator-indikator TPB/SDGs yang merupakan alat ukur pencapaian TPB/SDGs di Indonesia. Kaji ulang metadata dilakukan dengan mengacu pada: pertama, perubahan yang ditetapkan oleh Kantor Statistik Persatuan Bangsa-Bangsa (UN-STAT) di tingkat global yang awalnya pada tahun 2016 berjumlah 241 indikator menjadi 247 indikator pada April 2020 dan meliputi perubahan tingkatan indikator (Tiers), dan redaksional metadata





indikator global. Kedua, relevansi indikator dengan Agenda Pembangunan Nasional yang selaras dengan TPB/SDGs.

Pemanfaatan KLHS RPJPD dan RPJMD untuk RPJPD dan RPJMD dan RAD TPB/SDGs terbagi dalam beberapa tahapan, antara lain tahap pembuatan, pemanfaatan, penelaahan, penjaminan kualitas, pendokumentasian, dan validasi. Untuk masing-masing RPJPD dan RPJMD dan RAD TPB/SDGs memiliki pemanfaatan yang berbeda antara satu dengan lainnya. Secara umum, dalam tahap pembuatan KLHS RPJPD dan RPJMD terdapat kegiatan pengkajian dan perumusan skenario.

Dalam pengkajian, kegiatan yang dilakukan adalah melakukan identifikasi, pengumpulan, dan analisis data berupa kondisi umum daerah, capaian indicator TPB/SDGs, dan pembagian peran. Sedangkan dalam perumusan skenario, kegiatan yang dilakukan adalah membuat alternatif proyeksi. Alternatif proyeksi dibagi dalam alternatif proyeksi tanpa upaya tambahan atau BAU (*business as usual*) dan alternatif proyeksi dengan upaya tambahan. Alternatif proyeksi ini dibuat berdasarkan isu strategis, permasalahan, serta sasaran strategis.

Pemanfaatan untuk RPJPD dan RPJMD: KLHS dapat dimanfaatkan sebagai gambaran umum, hasil identifikasi permasalahan dan isu strategis, serta penentuan arah kebijakan dalam RPJPD serta tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD, KLHS berperan sebagai rancangan teknokratis yang digunakan sebagai rancangan awal. Rancangan awal RPJPD dan RPJMD ditelaah kesesuaiannya dengan rancangan teknokratis sebelum menjadi rancangan dokumen rencana daerah (dokrenda). Rancangan dokrenda menjadi instrumen utama yang akan dibahas di musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) daerah. Setelah dokumen mendapat masukkan, kemudian dokumen tersebut ditetapkan sebagai rancangan akhir dan ditetapkan sebagai dokrenda.

Pemanfaatan untuk RAD: Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, RAD TPB/SDGs merupakan dokumen rencana kerja 5 (lima)



tahunan di tingkat provinsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB/SDGs yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah. KLHS untuk RAD TPB/SDGs dimanfaatkan sebagai penentuan usulan program dan kegiatan baik untuk daerah, pemerintah pusat di daerah, maupun untuk non pemerintah. Dalam tahap persiapan, pembuatan, dan pelaksanaan KLHS RPJPD dan RPJMD.

2.4 METODE PENDEKATAN PENYUSUNAN

A. KONSEP KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ atau kebijakan, rencana, dan/ atau program. Penyelenggaraan KLHS khususnya untuk RPJMD untuk Pemerintah Daerah baik Provinsi ataupun Kabupaten/ Kota berdasarkan Permendagri No. 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, merupakan analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan Pembangunan Berkelanjutan kedalam dokumen RPMPD.

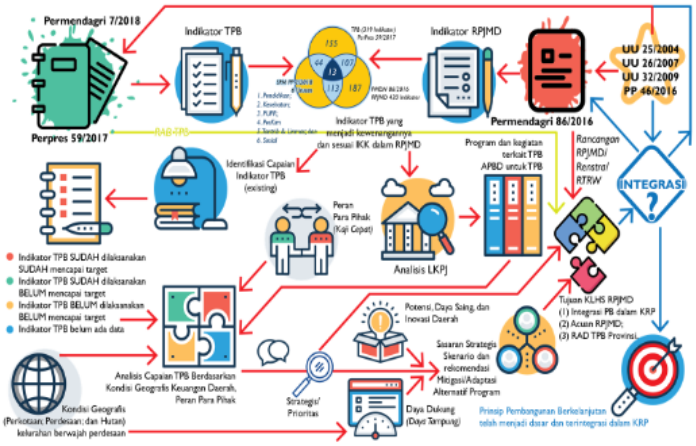

Gambar 2.4.1
Alur Penyusunan KLHS RPJMD dan Integrasinya Dalam RPJMD



Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi kebijakan, rencana, dan/ atau program pada tingkat nasional, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/ Kota. Penyelenggaraan KLHS merupakan mandat dari Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sedangkan tata cara penyelenggaraannya diatur di dalam PP Nomor 46 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2017 tersebut selanjutnya diatur di dalam PerMenLHK Nomor P.69/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Penyelenggaraan KLHS untuk RPJMD baik untuk Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota secara khusus telah diatur dalam Permendagri No. 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

B. KONSEP PENYELENGGARAAN KLHS RPJMD

Bangunan pembentuk KLHS RPJMD adalah rangkaian proses mengumpulkan, menganalisis, dan menghasilkan informasi; rangkaian proses dialog pihak-pihak yang berkepentingan; dan rangkaian proses mengintegrasikan hasilnya dalam dokumen perencanaan. KLHS RPJMD yang akuntabel tidak hanya karena analisisnya baik, namun juga karena dibangun dengan proses terpadu, transparan dan partisipatif melibatkan pemangku kepentingan, yaitu para perencana, pengambil keputusan, dan masyarakat.





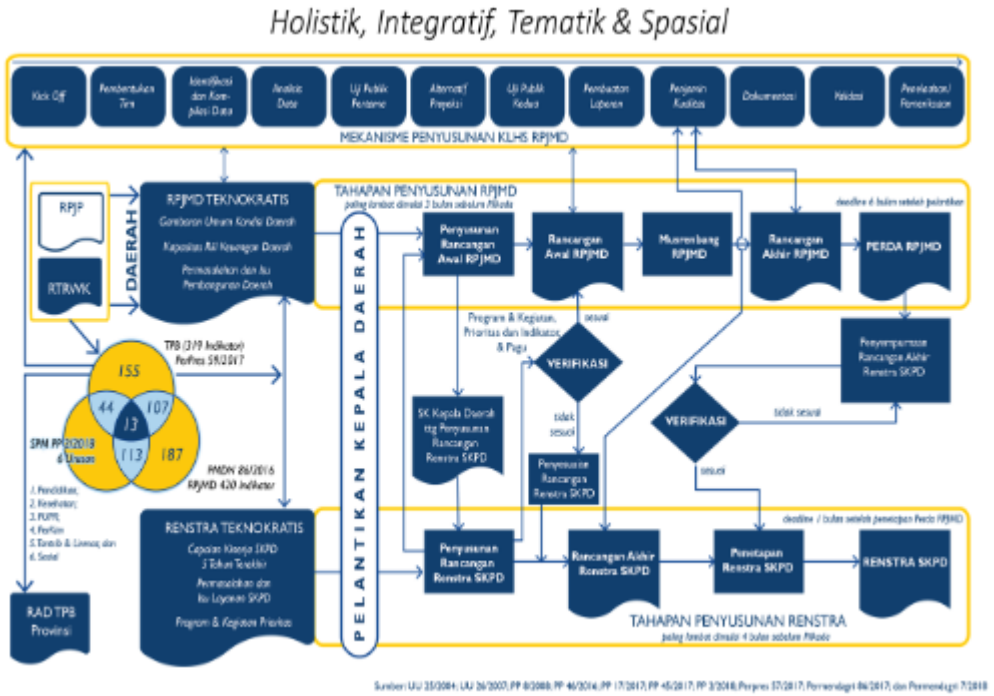

Gambar 2.4.2
Tahapan Penyelenggaraan KLHS RPJMD

Prinsip-prinsip tersebut dilaksanakan dalam penyelenggaraan KLHS RPJMD Kota Jambi dengan berlandaskan pada kebijakan yang menjadi landasan hukum pelaksanaannya, yakni sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.





Pasal 3 Permendagri Nomor 7 Tahun 2018, Tahapan penyusunan KLHS RPJPD dan RPJMD dimulai dari tahap persiapan, pembuatan, hingga pelaksanaan.

1. Pembentukan tim pembuat KLHS RPJPD dan RPJMD. Tim ini terdiri dari anggota yang memenuhi standar kompetensi berupa kriteria ketepatan keahlian pada isu yang dikaji dan pengalaman di bidang pembuatan dan pelaksanaan KLHS atau kajian sejenis. Pembentukan tim pembuat KLHS RPJPD dan RPJMD Tahapan persiapan dalam penyelenggaraan KLHS untuk RPJMD adalah Pembetukan tim pembuat KLHS RPJMD dilakukan dengan berdasarkan ketetapan Pemerintah Daerah. Tim pembuat KLHS untuk RPJMD yang selanjutnya disebut Tim Pokja (Kelompok Kerja) KLHS terdiri dari perangkat daerah dengan melibatkan ormas, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pihak terkait lainnya yang kompeten dan sesuai kebutuhan dalam pembuatan KLHS RPJMD. Tim Pokja KLHS bertugas untuk menyusun Kerangka Acuan Kerja, menyelenggarakan KLHS, melaksanakan kajian pembangunan berkelanjutan, dan merumuskan skenario pembangunan berkelanjutan.

2. Pengumpulan data terkait kebutuhan analisis laporan KLHS RPJPD dan RPJMD. Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan/Perumusan Isu Strategis. Kajian ini meliputi tahap analisis data, konsultasi publik, dan penetapan isu. Identifikasi isu strategis dilakukan dengan melihat kondisi saat ini dan pencapaiannya terhadap target. Analisis isu biasanya ditinjau dari (namun tidak terbatas) kondisi lingkungan hidup (kajian 6 muatan KLHS, lihat Pasal 13 PP 46/2016), isu strategis RPJMD (dapat berupa rancangan awal/dokumen teknokratik), visi misi kepala daerah, dan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals*.
3. Perumusan Skenario dan Rekomendasi Pembangunan Berkelanjutan. Tahap ini untuk merumuskan alternatif atau proyeksi kondisi capaian di beberapa tahun mendatang serta memberikan rekomendasi kebijakan dan





arahan program yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan isu/permasalahan yang ada. Pada tahapan ini juga dilakukan konsultasi publik.

4. Penjaminan Kualitas, Pendokumentasian, dan Validasi. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memastikan telah tepatnya proses pembuatan maupun isi KLHS RPJPD dan RPJMD, serta telah diintegrasikannya rekomendasi KLHS ke dalam RPJPD dan RPJMD.
5. Tahap penyusunan KLHS RPJPD dan RPJMD yang terakhir yaitu tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, dilakukan berdasarkan pemanfaatannya untuk RPJMD dan RAD TPB/SDGs kota.

   Pengkajian Muatan Pembangunan berkelanjutan Pengkajian muatan pembangunan berkelanjutan dalam penyelenggaraan KLHS untuk RPJMD adalah mengkaji tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat, dan juga ketetapan di tingkat Pemerintah Daerah yang mendukung. Pada mekanisme pengkajian ini, dilakukan melalui identifikasi data, pengumpulan data, dan analisa data mencakup:

   - Kondisi umum daerah
   - Capaian indikator pembangunan berkelanjutan yang relevan
   - Pembagian peran antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat, Filantropi, pelaku usaha serta akademisi dan pihak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   - Selain itu hasil pengkajian yang dilakukan memuat analisa paling sedikit, yaitu
   - Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
   - Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup
   - Kinerja atau layanan jasa ekosistem
   - Efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam
   - Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
   - Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati





6. Perumusan skenario pembangunan berkelanjutan Mekanisme selanjutnya dalam penyelenggaraan KLHS adalah merumuskan skenario pembangunan berkelanjutan atau alternatif program baik yang merupakan perbaikan dari program yang disusun didalam dokumen RPJPD ataupun yang belum tercantum di dalam dokumen RPJPD akan tetapi penting untuk dilaksanakan. Perumusan skenario dilakukan dengan memberikan alternative proyeksi kondisi tujuan pembangunan berkelanjutan berupa target pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tanpa upaya tambahan dan/ atau dengan upaya tambahan. Upaya tambahan yang disusun dengan memperhatikan

- Pencapaian target tanpa upaya tambahan
- Pencapaian target yang ditetapkan secara nasional
- Potensi, daya saing dan inovasi daerah
- Daya dukung dan daya tampung daerah
- Pertimbangan lain sesuai dengan kebutuhan daerah

a. Penjaminan kualitas, pendokumentasian, dan validasi KLHS RPJPD dan RPJMD Mekanisme penjaminan kualitas, pendokumentasian, dan validasi KLHS merupakan mekanisme yang terakhir dalam penyelenggaraan KLHS. Proses penjaminan kualitas dilakukan untuk penyempurnaan KLHS dengan berdasarkan penilaian mandiri oleh penyusun kebijakan, rencana dan/ atau program pada setiap tahapan penyusunan atau sekaligus pada saat terakhir penyusunan.

Proses pendokumentasian KLHS merupakan hasil pembuatan dan pelaksanaan KLHS yang disampaikan didalam laporan KLHS. Laporan KLHS merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Kebijakan, Rencana, dan Program yang dijadikan sebagai informasi pendukung sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan serta sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik.





Proses validasi dalam penyelenggaraan KLHS dilakukan untuk memastikan penjaminan kualitas telah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik.

Penjaminan kualitas untuk kebijakan, rencana, dan program tingkat Kabupaten/ Kota dilakukan oleh Gubernur. Prosedur dalam validasi KLHS untuk kebijakan kebijakan, rencana, dan program tingkat Kabupaten/ Kota dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur dengan melampirkan :

- Rancangan kebijakan, rencana, dan/ atau program
- Laporan KLHS
- Bukti pemenuhan standar kompetensi penyusun KLHS

C. Hasil KLHS

Hasil dari penyelenggaraan KLHS untuk RPJPD dan RPJMD adalah Laporan KLHS merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen RPJMD untuk dijadikan sebagai informasi pendukung sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan serta sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik. Laporan KLHS yang disusun memuat informasi tentang dasar pertimbangan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program sehingga perlu dilengkapi KLHS; metoda, teknik, rangkaian langkah-langkah dan hasil pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi Lingkungan Hidup; metoda, teknik, rangkaian langkah-langkah dan hasil perumusan alternatif muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; pertimbangan, muatan, dan konsekuensi rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan; gambaran pengintegrasian hasil KLHS dalam Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; pelaksanaan partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi KLHS; dan hasil penjaminan kualitas KLHS.





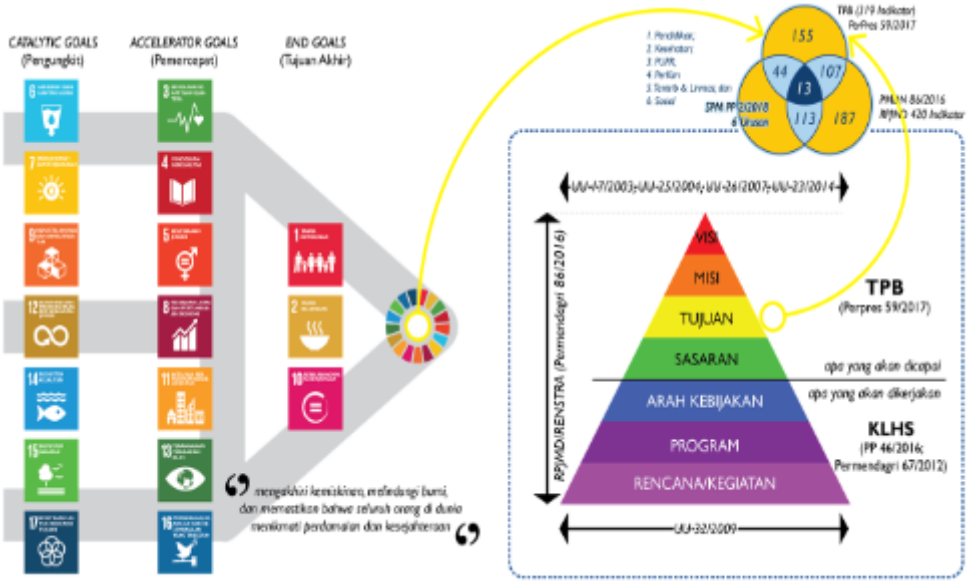

Gambar 2.4.3
Integrasi KLHS Kedalam RPJMD



BAB III

KONDISI UMUM DAERAH KOTA JAMBI

3.1 ASPEK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFI KOTA

3.1.1 Karakterisik Wilayah Kota Jambi

3.1.1.1 Letak Geografi dan Batas Administrasi

Kota Jambi sebagai pusat wilayah dan Ibukota Propinsi Jambi, secara geografis terletak pada koordinat 01°030'2,98" sampai dengan 01°040'1,07" Lintang Selatan dan 103°40'1,67" sampai dengan 103°40'022" Bujur Timur. Secara administrasi wilayah kota Jambi berbatasan langsung dengan :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi.

Luas keseluruhan wilayah Kota Jambi ± 169,85 Km^2 terdiri dari 11 kecamatan dan 68 kelurahan. Untuk lebih jelasnya mengenai orientasi wilayah Kota Jambi dan batas administrasinya dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel III.1.1
Luas Wilayah Administrasi Kota Jambi

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas (Km^2)	%
1.	Kota Baru	7	27,25	16,04
2.	Alam Barajo	7	36,06	21,23
3.	Jambi Selatan	5	7,60	4,47
4.	Paal Merah	6	24,25	14,28
5.	Jelutung	7	7,61	4,48
6.	Pasar Jambi	4	1,67	0,98
7.	Telanaipura	7	20,32	11,96
8.	Danau Sipin	5	7,28	4,29
9.	Danau Teluk	5	13,44	7,91
10.	Pelayangan	6	10,69	6,29
11.	Jambi Timur	9	13,68	8,05
Kota Jambi		**68**	**169,85**	**100**

Sumber : Kota Jambi Dalam Angka, Tahun 2023
Revisi RTRW Kota Jambi 2023-2043; dan
Permendagri No. 88 Tahun 2017 dan PPBW BIG, 2021



Gambar 3.1.1
Grafik Komposisi Luas Kecamatan



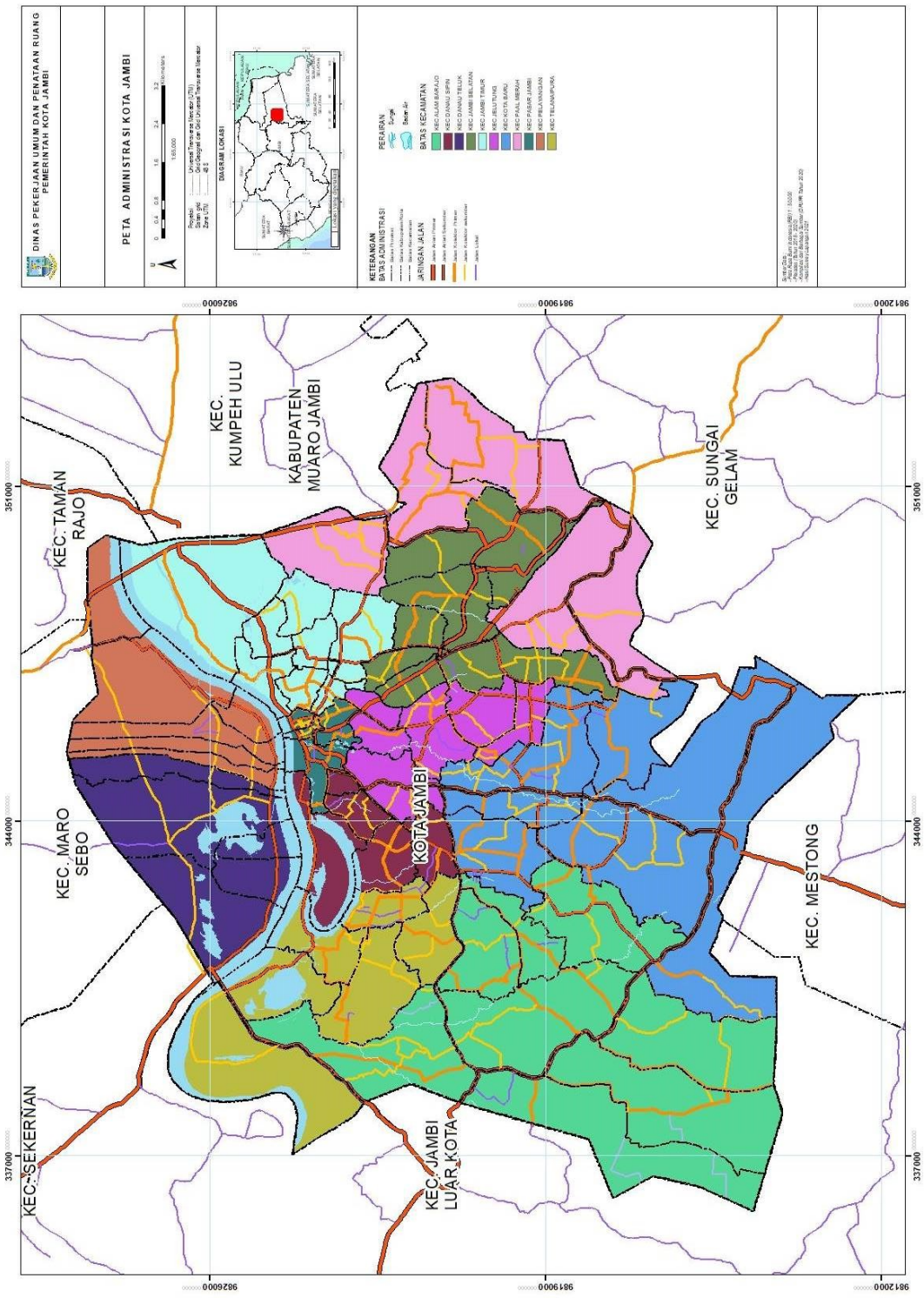

Gambar 3.1.2
Peta Administrasi Kota Jambi



3.1.1.2 Iklim dan Curah Hujan

Pada umumnya wilayah Kota Jambi dan sekitarnya ber iklim tropis dengan dipengaruhi oleh dua musim, yaitu Musim Barat dan Musim Timur. Pada saat Musim Barat angin bertiup ke arah barat yang biasanya terjadi pada bulan April – bulan Oktober, sementara pada Musim Timur angin bertiup ke arah Timur dan Selatan yang berlangsung pada bulan Oktober – bulan April. Musim kemarau umumnya terjadi pada bulan Mei sampai bulan September dan musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai bulan April.

Selama tahun 2022 rata-rata suhu di Kota Jambi berkisar antara 21.2˚C sampai 27,9˚C. Dengan suhu maksimum 35,2˚C yang terjadi pada bulan November dan suhu minimum 21,2˚C terjadi pada bulan Februari dan bulan Agustus. Curah hujan di Kota Jambi selama tahun 2022 beragam antara 148,1 mm sampai 435,2 mm, dengan jumlah hari hujan antara 12 hari sampai 23 hari per bulannya. Kecepatan angin di tiap bulan hampir merata antara 11 knots hinggai 18 knots. Sedangkan rata-rata kelembaban udara berkisar 82,7% - 86,2%. Selengkapnya curah hujan di Kota Jambi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.1.2
Suhu Udara Dan Kelembaban Udara Di Kota Jambi, Tahun 2022

No.	Bulan	Suhu Udara			Kelembaban (%)		
		Minimum	Rata-Rata	Maksimum	Minimum	Rata-Rata	Maksimum
1	Januari	22,4	27,2	33,3	55,0	83,1	98,0
2	Februari	21,2	27,0	34,6	51,0	82,7	98,0
3	Maret	21,4	27,6	34,8	49,0	82,8	99,0
4	April	21,8	27,6	33,9	56,0	83,0	100,0
5	Mei	22,2	27,9	34,7	50,0	83,5	99,0
6	Juni	22,6	26,8	34,0	58,0	85,0	99,0
7	Juli	20,9	27,3	34,0	50,0	84,0	99,0
8	Agustus	21,2	27,0	34,2	52,0	84,2	99,0
9	September	22,2	27,1	33,8	53,0	84,0	99,0
10	Oktober	22,2	26,8	34,3	59,0	86,2	99,0
11	November	22,4	27,3	35,2	44,0	83,8	98,0
12	Desember	21,8	26,7	32,8	56,0	84,5	99,0

Sumber : Kota Jambi Dalam Angka Tahun 2023





Tabel III.1.3
Curah Hujan (mm) dan Hari Hujan (hh) Di Kota Jambi, Tahun 2022

No.	Bulan	Jumlah Curah Hujan (MM)	Jumlah Hari Ujan (Hari)	Penyinaran Matahari (%)
1	Januari	251,6	13	4,6
2	Februari	172,8	13	4,2
3	Maret	295,3	15	5,3
4	April	126,6	13	4,9
5	Mei	202,0	13	5,0
6	Juni	148,1	18	4,6
7	Juli	226,6	13	5,0
8	Agustus	251,2	17	5,8
9	September	176,0	12	4,4
10	Oktober	435,2	23	3,7
11	November	268,5	17	3,3
12	Desember	155,9	18	2,5

Sumber : Kota Jambi Dalam Angka Tahun 2023

3.1.1.3 Kelerengan

Berdasarkan hasil Interpretasi Peta Citra (2021) Dan Revisi RTRW Kota Jambi Tahun 2022-2042 diketahui sebagian besar wilayah Kota Jambi mempunyai kelerengan antara 0 – 2% yaitu seluas 9.213,13 hektar dari luas keseluruhan Kota Jambi. Wilayah dengan kelerengan 2 – 8% seluas 4.312,54 hektar, dan kemiringan 8 – 15% seluas 2.538,07 hektar. Jika Di lihat penyebarannya pada masing-masing kecamatan, kemiringan lereng 0 – 2% tersebar di seluruh kecamatan, luas terbesar terdapat di Kecamatan Paal Merah yaitu masing-masing seluas 1.914,18 hektar. Kelerengan 2 – 8% terbesar di Kecamatan Kota Baru seluas 1.671,58 hektar, dan kelerengan 8 – 15% terbesar di Kecamatan Alam Barajo seluas 1.501,39. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada berikut ini.

Tabel III.1.4
Kelerengan Lahan di Kota Jambi

No	Kecamatan	Kemiringan Lereng (Ha)			Danau/ Sungai (Ha)	Jumlah (Ha)
		0 - 2 %	2 - 8 %	8 - 15 %		
1	Telanai Pura	1.518,60	203,34	32,38	282,53	2.036,84
2	Jambi Selatan	557,06	165,36	37,10	-	759,53
3	Jambi Timur	1.259,19			127,85	1.387,04
4	Pasar Jambi	124,10	19,81		21,31	165,23
5	Pelayangan	879,49			90,24	969,73
6	Danau Teluk	1.189,43			248,15	1.437,58
7	Kota Baru	255,25	1.671,58	753,88	0,64	2.681,36
8	Jelutung	275,89	434,86	49,69	2,98	763,42
9	Alam Barajo	779,41	1.340,19	1.501,39	-	3.620,99
10	Danau Sipin	460,53	1,61	111,85	140,90	714,88
11	Paal Merah	1.914,18	475,78	51,78	7,02	2.448,75
Jumlah		**9.213,13**	**4.312,54**	**2.538,07**	**921,61**	**16.985,35**

Sumber : Interpretasi Peta Citra (2020) Dan Revisi RTRW Kota Jambi Tahun 2022-2042



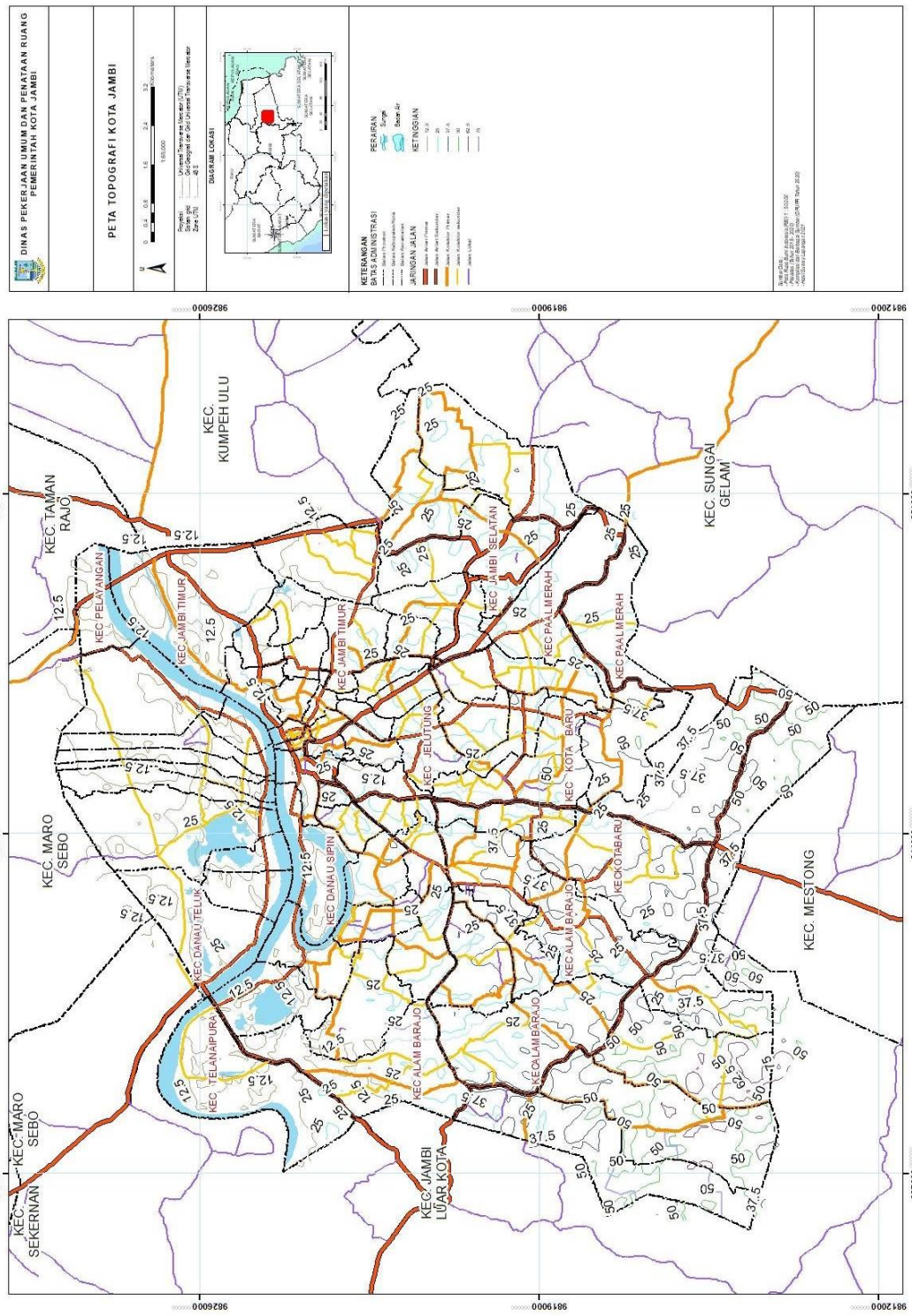

Gambar 3.1.3
Peta Topografi Kota Jambi



3.1.1.4 Geologi dan Struktur Batuan

Dilihat dari struktur batuan, pada umumnya wilayah Kota Jambi terbentuk dari struktur batuan endapan permukaan, batuan sedimen umur miosen dan batuan sedimen umur pliosen. Struktur batuan endapan permukaan pada umumnya tersebar di sebelah utara Sungai Batanghari, meliputi Kecamatan Danau Teluk dan Kecamatan Pelayangan. Sedangkan batuan sedimen umur miosen tersebar di sebelah barat wilayah Kota Jambi meliputi Kecamatan Kota Baru.

Dilihat luas terbesar berada di jenis Tmpn sebesar 7.664,22 ha, dan yang terkecil berada di jenis Danau sekitar 57,99 ha (0,34%) dari luas total wilayah Kota Jambi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.1.5
Formasi Geologi Kota Jambi

No.	Formasi Geologi	Luas (Ha)	%
1	Danau	57,99	0,34%
2	Pasir	2.784,08	16,39%
3	Qa	3.813,09	22,45%
4	QTk	1.561,44	9,19%
5	Tma	1.104,50	6,50%
6	Tmpm	7.664,22	45,12%
Jumlah		**16.985,32**	**100,00%**

Sumber : Interpretasi Peta Citra (2020) Dan Revisi RTRW Kota Jambi Tahun 2022-2042



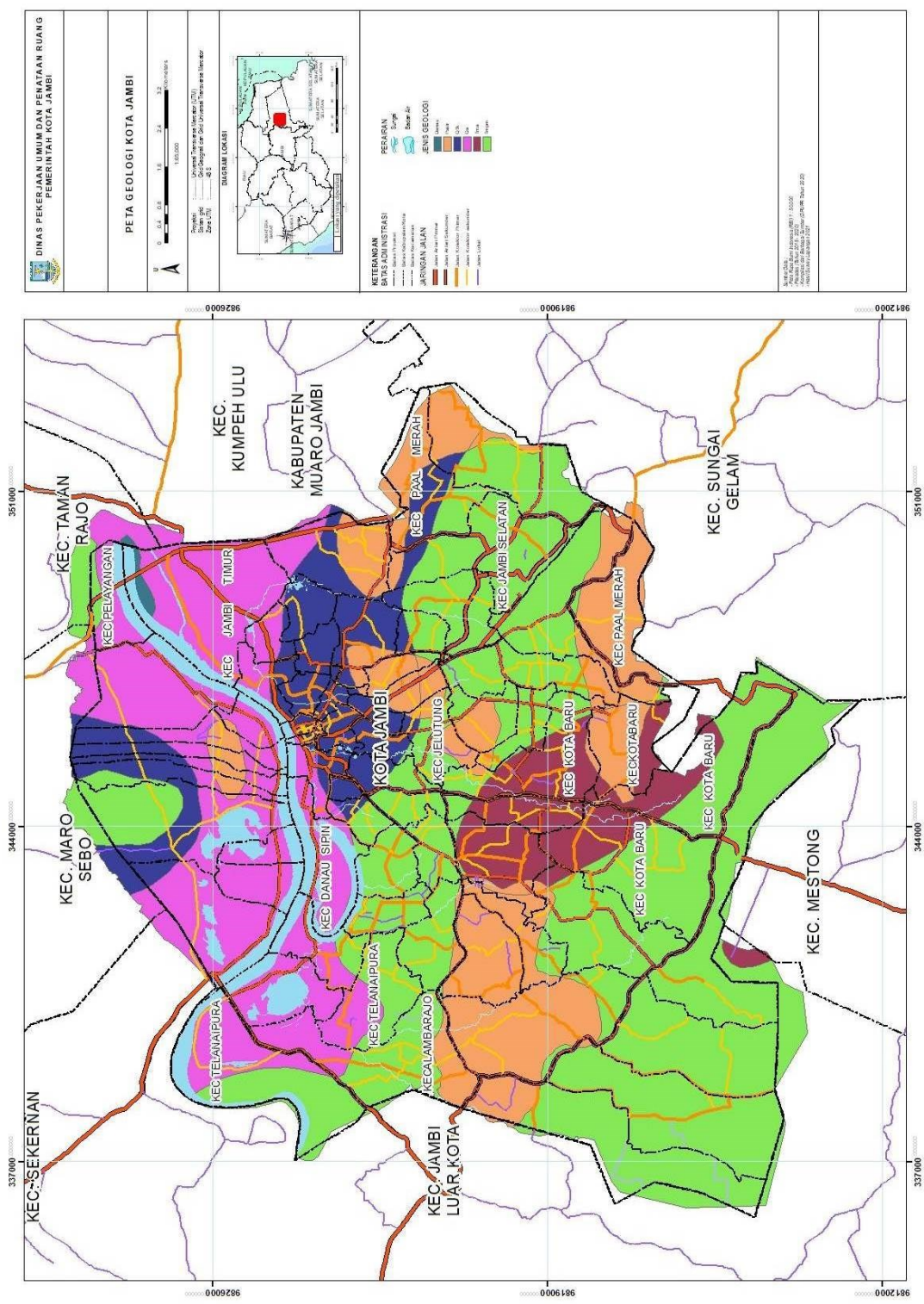

Gambar 3.1.4
Peta Geologi Kota Jambi



3.1.1.5 Jenis Tanah

Jenis tanah di wilayah Kota Jambi memilik 2 jenis tanah (Kompleks Latosol dan Litosol dan Podsolik). Luas terbesar dengan jenis tanah Kompleks Latosol dan Litosol sekitar 10.453,32 Ha dan jenis tanah Podsolik sekitar 6.531,96 ha, yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kota Jambi. Untuk lebih jelasnya jenis tanah dan tekstur tanah di Kota Jambi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.1.6
Jenis Tanah Di Kota Jambi

No	Kecamatan	Jenis Tanah (Ha)		
		Kompleks Latosol dan Litosol	Podsolik	Jumlah
1	Telanaipura	2.024,93	7,55	2.032,48
2	Jambi Selatan	737,19	22,85	760,04
3	Jambi Timur	1.367,59	-	1.367,59
4	Pasar Jambi	166,99	-	166,99
5	Pelayangan	1.068,95	-	1.068,95
6	Danau Teluk	1.344,14	-	1.344,14
7	Kota Baru	735,12	1.990,35	2.725,47
8	Jelutung	761,42	-	761,42
9	Alam Barajo	816,61	2.789,07	3.605,68
10	Danau Sipin	727,61	-	727,61
11	Paal Merah	702,77	1.722,14	2.424,91
Jumlah		**10.453,32**	**6.531,96**	**16.985,28**

Sumber : Interpretasi Peta Citra (2020) Dan Revisi RTRW Kota Jambi Tahun 2022-2042

3.1.1.6 Kedalaman Efektif Tanah

Sebagian besar wilayah Kota Jambi mempunyai kedalaman efektif tanah lebih dari 90 cm yaitu seluas 19.260 hektar atau sekitar 93,78% dari luas wilayah keseluruhan Kota Jambi. Sedangkan kedalaman efektif tanah lainnya berkisar antara 60 – 90 cm seluas 188 hektar atau sekitar 0,91% dari luas wilayah keseluruhan. Kedalaman efektif tanah lebih dari 90 cm sebagian besar terdapat dua kecamatan yaitu Kecamatan Kota Baru seluas 7.708 hektar dan Kecamatan Jambi Selatan seluas 3.378 hektar. Untuk lebih jelasnya kedalaman efektif tanah di Kota Jambi dapat dilihat pada tabel berikut.





Tabel III.1.7
Kedalaman Efektif Tanah Di Kota Jambi

No.	Kecamatan	Kedalaman Efektif Tanah				Danau / Sungai	Jumlah (Ha)
		<30 cm	30-60 cm	60-90 cm	>90 cm		
1	Kota Baru	-	-	-	7,708	70	7,778
2	Alam Barajo	*)	*)	*)	*)	*)	*)
3	Jambi Selatan	-	-	-	3,378	29	3,407
4	Paal Merah	*)	*)	*)	*)	*)	*)
5	Jelutung	-	-	-	771	21	792
6	Pasar Jambi	-	-	-	356	46	402
7	Telanaipura	-	-	-	2,731	308	3,039
8	Danau Sipin	*)	*)	*)	*)	*)	*)
9	Danau Teluk	-	-	-	1,377	193	1,570
10	Pelayangan	-	-	188	1,295	234	1,717
11	Jambi Timur	-	-	-	1,643	190	1,833
Jumlah		**0**	**0**	**188**	**19,259**	**1,091**	**20,538**
Persentase (%)		**0.00**	**0.00**	**0.92**	**93.77**	**5.31**	**100.00**

Sumber : Matek Revisi RTRW Kota Jambi Tahun 2022-2042

**) Data masih tergabung dengan kecamatan induk*

3.1.1.7 Hidrologi

Kota Jambi dibelah oleh Sungai Batanghari menjadi 2 (dua) bagian besar yaitu bagian selatan dan bagian utara. Bagian selatan merupakan bagian terbesar wilayah kota Jambi dimana di wilayah bagian selatan ini sedikitnya terdapat 5 (lima) buah anak Sungai Batanghari, yaitu

1. **Sungai Kenali Kecil**

   Sungai ini melewati Pematang Sulur, Penyengat Rendah, dan Teluk Kenali.

2. **Sungai Kenali Besar**

   Sungai ini melewati Kenali Asam Bawah, Bagan Pete, Mayang Mangurai, Beliung, Rawasari, dan Kenali Besar.

3. **Sungai Kambang**

   Daerah pengaliran Sungai Kambang meliputi Simpang III SIpin, Simpang IV Sipin , Pematang Sulur, dan Telanai.

4. **Sungai Danau Teluk**

   Sungai ini melewati Sungai Putri, Solok Sipin dan Legok.

5. **Sungai Putri**

   Sungai ini melewati Selamat dan Sungai Putri.





6. Sungai Asam

Daerah pengaliran Sungai Asam meliputi Kenali Asam Bawah, Paal V, Suka Karya, Jelutung, Lebak Bandung, Cempaka Putih, Sungai Asam, Beringin dan Orang Kayo Hitam.

7. Sungai Tembuku

Daerah pengaliran Sungai Tembuku meliputi Thehok, Jelutung, Tambak Sari, Talang Jauh, Pakuan Baru, Budiman, Sulanjana, Rajawali, Orang Kayo Hitam, dan Kasang.

8. Sungai Sijenjang

Daerah pengaliran Sungai Sijenjang meliputi Pura, Talang Banjar, Payo Selincah, Tanjung Sari, Sijenjang, dan Kasang Jaya.

Sungai Batanghari selain berfungsi hidrologi juga berfungsi sebagai prasarana transportasi dan penunjang kegiatan ekonomi masyarakat serta sebagai sumber air baku untuk air minum. Sedangkan danau yang ada di Kota Jambi antara lain adalah Danau Sipin, Danau Teluk, Danau Penyengat dan Danau Kambang.



Tabel III.1.8
Daerah Aliran Sungai yang Melintasi Wilayah Kota Jambi

No	Daerah Aliran Sungai	Panjang (Km)	Bagian Hulu	Bagian Hilir	Kelurahan Yang Dilintasi	Bwk Yang Dilintasi
1	Sungai Kenali Kecil	10,68	Perumahan Citraraya	Jembatan Buluran Pematang Sulur	Pematang Sulur, Penyengat Rendah, dan Teluk Kenali	BWK VI
2	Sungai Kenali Besar	13,79	Balai Benih Ikan	Danau Teluk Kenali	Kenali Asam Bawah, Bagan Pete, Mayang Mangurai, Beliung, Rawasari, dan Kenali Besar	BWK V
3	Sungai Kambang	4,3	SMA 4	Danau Sipin	Simpang III SIpin, Simpang IV Sipin , Pematang Sulur, dan Telanai	BWK V dan BWK VI
4	Sungai Danau Teluk	8,79	SMA 1	Danau Sipin	Sungai Putri, Solok Sipin dan Legok	BWK I dan VI
5	Sungai Putri	2,97	Lorong Diamon	Danau Sipin	Selamat dan Sungai Putri	BWK VI
6	Sungai Asam	10,68	Pertamina Kenali Asam	Pintu Air Angso Duo Sungai Batanghari	Kenali Asam Bawah, Paal V, Suka Karya, Jelutung, Lebak Bandung, Cempaka Putih, Sungai Asam, Beringin dan Orang Kayo Hitam	BWK IV, BWK V, dan BWK I
7	Sungai Tembuku	5,35	Thehok	Jl. Raden Pamuk	Thehok, Jelutung, Tambak Sari, Talang Jauh, Pakuan Baru, Budiman, Sulanjana, Rajawali, Orang Kayo Hitam, dan Kasang	BWK I dan IV
8	Sungai Sijenjang/Lubukraman	8,37	Perumahan Parma	S. Lubuk Raman	Pasir Putih, Wijaya Pura, Talang Banjar, Payo Selincah, Tanjung Sari, Sijenjang, dan Kasang Jaya	BWK III

Sumber : Interpretasi Peta Citra (2020) Dan Revisi RTRW Kota Jambi Tahun 2022-2042



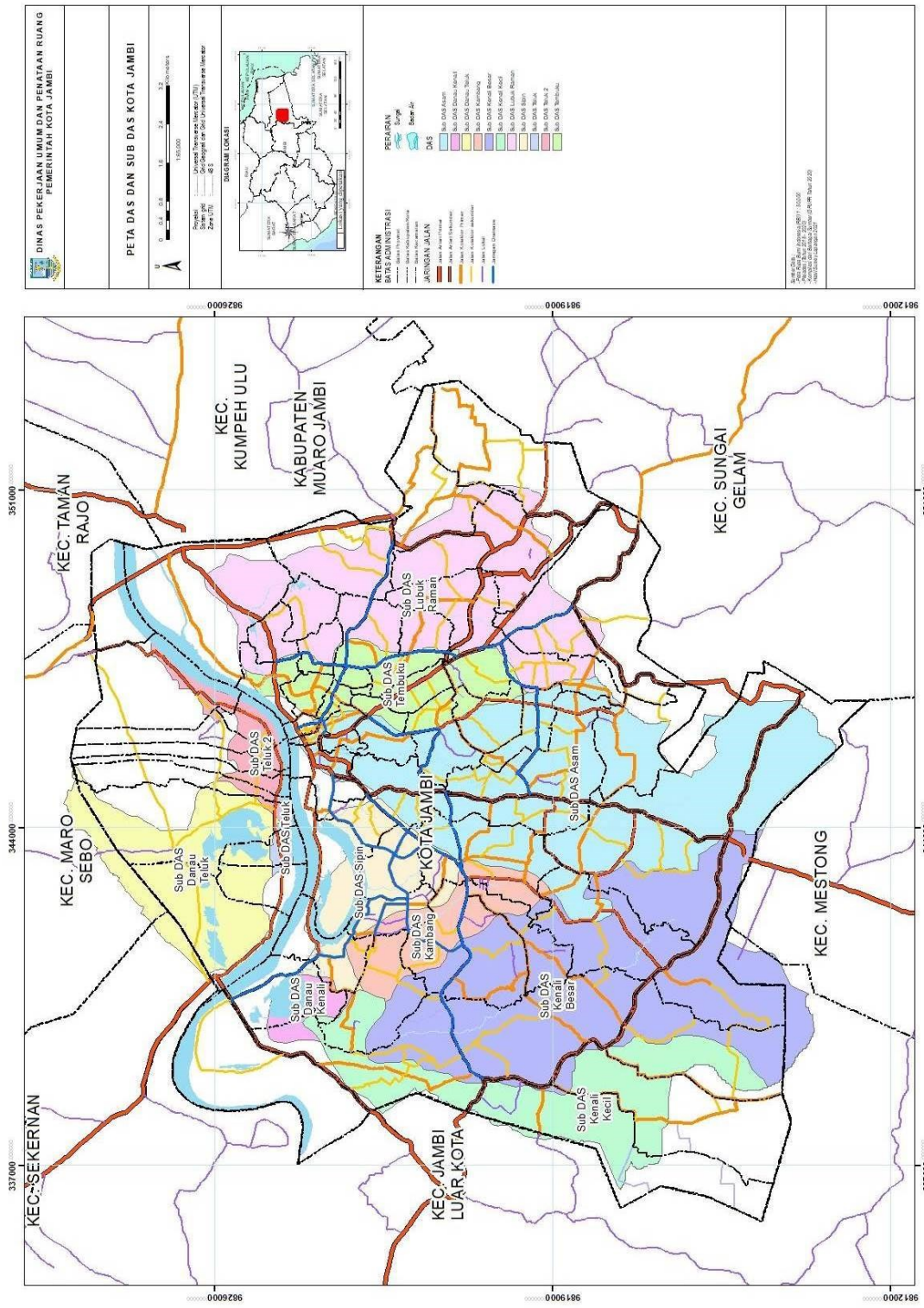

Gambar 3.1.5
Peta Daerah Aliran Sungai di Kota Jambi



3.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

3.1.2.1 Peran dan Fungsi Kota Jambi Dalam Konstelasi Regional

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi ditetapkan pada Tahun 2013 melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi 2013-2033. Rumusan rencana yang ditetapkan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033.

Saat ini, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional telah direvisi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Begitu juga dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi yang telah dilakukan perubahan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Jambi Tahun 2023-2043. Dalam muatan RTRWN maupun RTRW Provinsi Jambi, Peran Kota Jambi tidak mengalami perubahan, dimana Kota Jambi masih tetap sebagai salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Pulau Sumatera dengan arahan Revitalisasi dan Percepatan pengembangan Kota-Kota pusat Pertumbuhan Nasional. Sementara berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi, Kota Jambi diarahkan sebagai Pusat Jasa, bisnis, keuangan, dan permukiman skala besar.

Berdasarkan aspek kebijakan terhadap arahan peran dan fungsi Kota Jambi dalam konstelasi regional ini, dapat digambarkan bahwa Kota Jambi memiliki potensi pengembangan sektor-sektor sekunder dan sektor tersier.



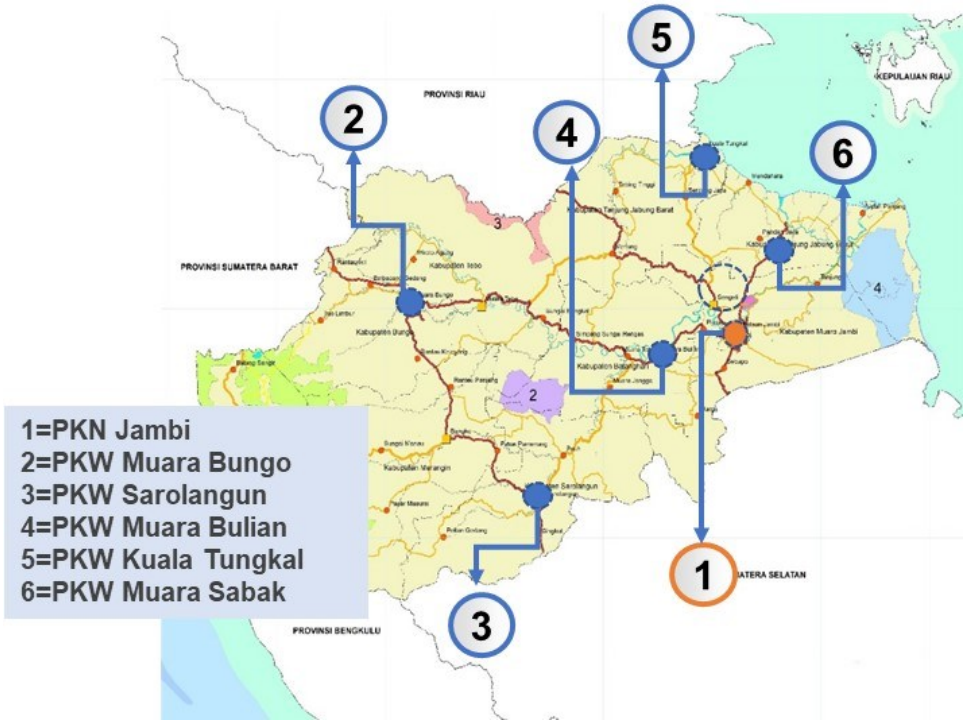

Gambar 3.1.6
Hierarki Sistem Pusat Permukiman di Provinsi Jambi

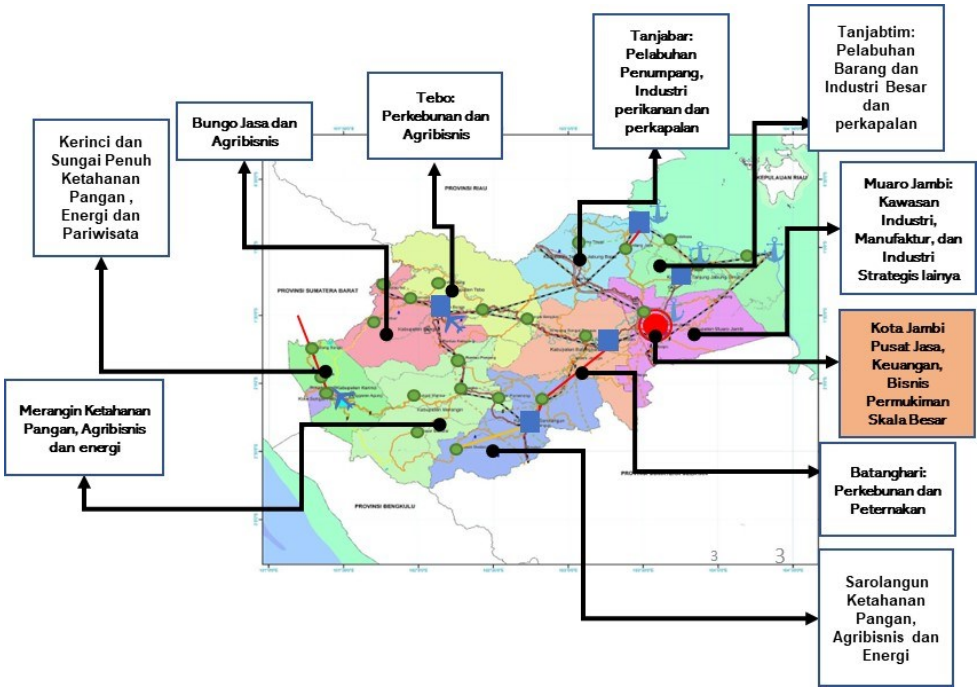

Gambar 3.1.7
Arahan Dominasi Fungsi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi



3.1.2.2 Sistem Jaringan Prasarana Regional

Sistem jaringan prasarana regional memiliki peran yang cukup signifikan dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah. Sebagai pusat utama di Provinsi Jambi, sistem jaringan prasarana utama yang dimiliki dan mempengaruhi perkembangan wilayah diantaranya adalah:

a) Jalan Arteri Primer (JAP), meliputi:
   1. Lintas Timur Sumatera;
   2. *Feeder* Kota Jambi-Muara Bungo;
   3. Jalan akses menuju Pelabuhan Talang Duku dan Pelabuhan Muara Sabak

b) Rencana Jalan Tol Sumatera, yang berada di *hinterland* kota;

c) Terminal Tipe A.

d) Bandar Udara Pengumpul Sekunder;

e) Rencana jaringan rel kereta api;

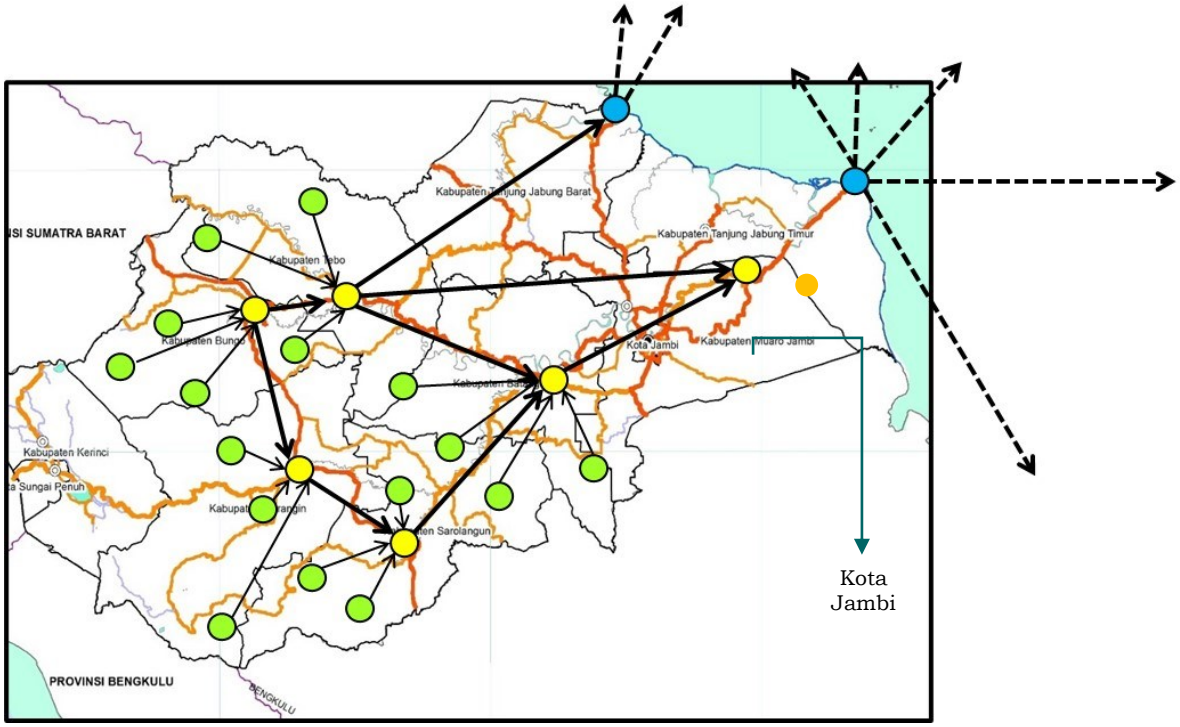

Gambar 3.1.8
Kota Jambi Terhadap Sistem Prasarana Utama dan Pola Aliran Baran di Provinsi Jambi



3.1.3 Sistem Infrastruktur

Infrastruktur wilayah terdiri dari beberapa aspek yaitu infrastruktur jalan, sumber daya air dan irigasi, listrik dan energi, telekomunikasi, serta sarana dan prasarana permukiman. Kebutuhan akan infrastruktur wilayah tidak terlepas dari fungsi dan peranannya terhadap pengembangan wilayah, yaitu sebagai pengarah dan pembentuk struktur tata ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan wilayah, serta pengikat wilayah.

3.1.3.1 Sistem Transportasi

Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lain secara fisik dalam waktu yang tertentu dengan menggunakan atau digerakkan oleh manusia, hewan atau mesin. Secara umum transportasi dibagi menjadi tiga yaitu transportasi darat, transportasi laut dan transportasi udara.

Prasarana transportasi merupakan seluruh elemen pendukung yang dibuat dengan tujuan untuk melancarkan proses pergerakan dalam sistem transportasi. Sedangkan Sarana transportasi adalah segala sesuatu yang dibuat untuk melayani pergerakan dalam sistem transportasi baik manusia, hewan ataupun barang.

A. Jaringan Jalan

Jalan merupakan salah satu prasarana yang sangat penting untuk melancarkan kegiatan perekonomian karena dapat memperlancar arus perdagangan dari satu tempat ke tempat lainnya. Menurut Kota Jambi Dalam Angka tahun 2022, Panjang jalan di Kota Jambi telah mencapai 510,452 Km. Rincian dari masing-masing jalan dapat dilihat pada tabel berikut ini.





Tabel III.1.9
Panjang Jalan Kota Jambi Menurut Permukaan, Kondisi, dan Kelas Jalan Tahun 2020 – 2022

No	Rincian	Panjang Jalan (Km)		
		2020	2021	2022
1	Permukaan			
	Aspal	465.408	473.127	475.693
	Kerikil	8.924	4.766	5.565
	Tanah	36.120	32.559	29.194
	Tidak Terinci	-	-	-
	Total	**510.452**	**510.452**	**510.452**
2	Kondisi Jalan			
	Baik	371.910	366.587	412.814
	Sedang	40.241	35.350	43.914
	Rusak	54.337	71.027	47.825
	Rusak Berat	43.964	37.488	5.899
	Total	**510.452**	**510.452**	**510.452**

Sumber : Kota Jambi Dalam Angka Tahun 2023

B. Bandar Udara

Kota Jambi memiliki satu Bandar Udara yaitu Bandara Udara Sultan Thaha Syaiffudin yang melayani penerbangan domestik. Terminal bandara ini dengan luas sekitar 13.015 m^2. Bandara ini memiliki landasan penerbangan sepanjang 2.600 meter dan lebar 45 meter untuk mengakomodasi pesawat jenis Boeing 747-400 dan Airbus A-330.

C. Transportasi Sungai

Transportasi sungai di Kota Jambi terbatas bagi kapal motor yang tidak terlalu besar, mengingat kondisi sedimentasi yang berpengaruh pada kedalaman Sungai Batanghari. Untuk memasok kebutuhan bahan pangan untuk Kota Jambi di lakukan bongkar muat di Dermaga Angso Duo baru. Untuk keperluan Bongkar Muat kapal yang besar pelayananannya dilakukan melalui Pelabuhan Talang Duku yang berada di Kabupaten Muaro Jambi.





D. Terminal Angkutan

Untuk melayani pengguna jasa angkutan umum di kota jambi telah disediakan prasarana angkutan umum berupa terminal yang tersebar di beberapa titik di kota jambi diantaranya yaitu:

1. Terminal Penumpang Tipe A Alam Barajo

   Pada Saat ini, di wilayah Kota Jambi hanya ada satu terminal Tipe A yaitu: Terminal Alam Barajo. Terminal Alam Barajo kota jambi di resmikan pada Tanggal 12 Agustus 1999. Banyak hal yang dilakukan untuk mengoptimalkan Terminal tersebut agar dapat berlaku sesuai dengan fungsinya sebagai titik pergantian moda,maupun sebagai tempat naik dan turunnya penumpang yang menggunakan jasa angkutan umum namun semuanya belum membuahkan hasil sebagaimana mestinya.

   Berikut adalah Gambaran Umum Terminal Tipe A Alam Barajo :

   - Tahun pembangunan : 1994/1995
   - Tahun peresmian : 1999
   - Lokasi : JL.lingkar Barat III
   - Luas Terminal : 65,280 m^2
   - Ruang Data : 16 m^2
   - Pos Keamanan : 42 m^2
   - Menara pengawas : 36 m^2
   - Pos retribusi : 8 m^2
   - Lapangan Parkir : 19.900 m^2
   - Ruang Tunggu : 250 m^2
   - Luas Mushola : 36 m^2
   - WC : 90 m^2
   - Parkir kendaraan pengantar : 800 m^2
   - Loket : 30 unit(5x3) 24 unit (2x3)
   - Kios : 14 unit(3x4)
   - Listrik PLN : 26.000 VA





- Air Bersih : PDAM

Tabel III.1.10
Fasilitas Terminal Tipe A Alam Barajo

No	Fasilitas	Keterangan	Kondisi
I	Fasilitas Utama		
1	Jalur Masuk Kendaraan	Ada	Baik
2	Jalur keluar Kendaraan	Ada	Kurang Baik
3	Lapangan Parkir Kendaraan	Ada	Baik
4	Bangunan Kantor Terminal	Ada	Baik
5	Pos Retribusi	Ada	Baik
6	Menara Pengawas	Ada	Baik
7	Tempat tunggu penumpang	Ada	Kurang Baik
8	Loket Penjualan Karcis	Ada	Baik
9	Lampu Penerangan	Ada	Baik
10	Parkir Kendaraan Pengantar	Ada	Kurang Baik
II	Fasilitas Penunjang		
1	WC	Ada	Kurang Baik

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Jambi, 2014

2. Terminal Penumpang Tipe C Rawasari

Terminal Penumpang Tipe C yang ada di kota Jambi melayani Jenis Angkutan perkotaan, Semua angkutan kota yang berada di kota Jambi yang beroperasi diwajibkan masuk ke terminal Rawasari.Terminal Rawasari melayani semua angkutan perkotaan yang ada yaitu 15 trayek yang telah dizinkan.Perubahan pola Terminalisasi terjadi semenjak beroperasinya Terminal Tipe A Alam Barajo.

Berikut adalah gambaran kondisi Terminal Tipe C Rawasari.

- Lokasi : JL.Halim P.Kusuma
- Tahun Pembangunan : 1972/1973
- Mulai beroperasi : 1973
- Luas Terminal : 10.000 m^2
- Kantor Terminal : 1 Unit(48 m^2)
- Menara Pengawas : 1 unit(9 m^2)
- Pos Retribusi : 1 unit(6 m^2)
- Lapangan Parkir : 1.500 m^2
- Ruang Tunggu : 32 m^2
- Kamar Mandi/WC : 36 m^2





- Kios : 23 unit (12 m²)
- Sumber Air Bersih : Sumur Gali
- Kapasitas kendaraan parkir : 225 Kendaraan
- Kap. jalur pemberangkatan : 25 kendaraan
- Kap. jalur turun penumpang : 7 kendaraan

3. Terminal Angkutan Penumpang Tipe C Sijenjang

Terminal penumpang Tipe C yang berada di wilayah Sijenjang merupakan terminal Tipe C yang belum dioperasikan, karena masih banyak fasilitas terminal yang belum tersedia. Berikut gambaran Fasilitas-fasilitas yang ada di Terminal Sijenjang.

E. Sistem Parkir

Fasilitas parkir merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem transportasi. Lalu-lintas biasanya timbul demi kepentingan pergerakan. Kendaraan berjalan menuju tempat tujuan dan setelah mencapai tempat tersebut kendaraan harus diparkir.

Banyaknya pemilikan kendaraan menimbulkan masalah parkir yang serius. Di kawasan permukiman, setiap ruang kosong yang tersedia selalu diisi kendaraan yang diparkir sepanjang siang maupun malam hari. Begitu pula di dekat pusat perdagangan, sering terjadi kemacetan jalan yang cukup serius, karena makin banyaknya orang yang memilih pergi ke kota dengan kendaraan pribadi daripada menggunakan sarana angkutan umum.

Di antara penyebab seriusnya kondisi ini adalah bahwa parkirtelah merupakan "urusan setiap orang". Tanggung jawabpenyelenggaraan dan pengaturannya seringkali dibagi-bagi di antarapemilik gedung, pedagang, investor, perencana, otoritas terminal dantransit, dan jawatan pemerintah lainnya. Sebagai tambahan, tanggungjawab penetapan ruang yang tersedia untuk para pemakai, penetapanbiaya, dan kebijaksanaan pengaturannya biasanya antara lain dilakukanoleh dewan kota, polisi, insinyur lalu-lintas,





dan pengadilan. Kreasijawatan yang terutama berhubungan dengan parkir umumnyamengusulkan cara untuk memecahkan dilema yang berkelanjutan ini.

Permasalahan Umum Kondisi Parkir di Kota Jambi

1) Aktifitas suatu pusat kegiatan akan menimbulkan aktifitas parkir kendaraan yang berpotensi menimbulkan masalah antara lain:
   - ❖ Bangkitan tidak tertampung oleh fasilitas parkir di luar badan jalan yang tersedia, sehingga meluap ke badan jalan. Luapan parkir di badan jalan akan mengakibatkan gangguan kelancaran arus lalulintas;
   - ❖ Tidak tersedianya fasilitas parkir di luar badan jalan sehingga bangkitan parkir secara otomatis memanfaatkan badan jalan untuk parkir.
2) Permasalahan parkir berdasarkan fungsi kawasan di Kota Jambi :
   - ➢ Pasar : penyediaan dan pengaturan parkir belum memadai sehingga pada jam puncak pagi hari umumnya menimbulkan masalah terhadap kelancaran arus lalulintas;
   - ➢ Kompleks Pertokoan/Perdagangan : pada saat jam puncak menimbulkan permasalahan karena kapasitas jalan berkurang dengan adanya aktifitas parkir pengunjung.
   - ➢ Kompleks Sekolah : parkir kendaraan penjemput anak sekolah sering menimbulkan masalah terhadap kelancaran arus lalulintas karena tidak tersedia fasilitas parkir dan pengaturan parkir di badan jalan yang belum baik.
   - ➢ Kompleks Perkantoran : umumnya sudah menyediakan fasilitas parkir, namun ada kantor-kantor tertentu yang bangkitan parkirnya cukup besar, sehingga tidak tertampung oleh fasilitas yang ada.
   - ➢ Tempat Ibadah, umumnya tidak tersedia fasilitas parkir untuk kendaraan roda 4 yang memadai sehingga pada hari-hari





tertentu sering terjadi lonjakan bangkitan parkir yang besar sehingga tidak tertampung oleh fasilitas parkir yang ada (bersifat insidental).

- Pemukiman, umumnya tidak tersedia fasilitas parkir untuk tamu sehingga menimbulkan bangkitan parkir di badan jalan.

3.1.3.2 Sistem Penyediaan Air Minum

Sistem penyediaan air minum merupakan kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. Kota Jambi memiliki sistem penyediaan air minum yang menyebarkan air minum ke beberapa kecamatan, dan pelayanan ini didominasi dan dikelola oleh PDAM Tirta Mayang untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.1.11
Cakupan Pelayanan PDAM Tirta Mayang Kota Jambi Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Pelanggan (SR)	Jumlah Penduduk Terlayani (Jiwa)*	Persentase (%)**
1	Telanaipura	49.720	9.483	47.415	95%
2	Kota Baru	83.381	17.043	76.694	92%
3	Jelutung	59.744	11.995	59.975	100%
4	Pasar Jambi	11.147	3.529	10.587	95%
5	Jambi Timur	66.925	10.569	52.845	79%
6	Jambi Selatan	57.515	7.431	37.155	65%
7	Danau Teluk	13.009	2.021	10.105	78%
8	Pelayangan	13.050	2.121	10.605	81%
9	Danau Sipin	43.734	8.089	40.445	92%
10	Alam Barajo	113.146	15.720	78.600	69%
11	Paal Merah	108.182	6.005	30.025	28%
12	PKS.Sei Gelam		150		
Jumlah		**619.553**	**94.156**	**454.451**	**80%**

Sumber: PDAM Tirta Mayang Kota Jambi Tahun 2023
**)Asumsi 1 SR = 5 Jiwa*
***)Hasil Pengolahan Data*

Saat ini, kapasitas terpasang PDAM Tirta Mayang Kota Jambi adalah 1.900 l/detik, sedangkan Kapasitas operasional saat ini sebesar 1.303 l/detik yang dioperasikan secara kombinasi dengan pemompaan dan gravitasi, dan 597 L/dt lainnya belum terpakai,





A. Sistem Jaringan Perpipaan

- **Unit Air Baku**

  Sumber air baku yang digunakan PERUMDA Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi berasal dari Sungai Batanghari terbagi menjadi 4 zona pelayanan :

  1. Zona 1 untuk pelayanan Kec Danau Teluk dan Pelayangan dengan titik penyadapan air baku berlokasi di intake pasir panjang dan intake tanjung johor dengan pengolahan di IPA Pasir Panjang dan Tanjung Johor
  2. Zona 2 untuk pelayanan Kec Alam Barajo, Telanipura dengan titik penyadapan air baku berlokasi di Intake Aurduri dengan pengolahan di IPA Aurduri 2, IPA Aurduri 3, dan IPA Perumnas Aurduri
  3. Zona 3 untuk pelayanan Kec Danau Sipin, Jambi Selatan, Jelutung, Kota baru, Paal Merah, dan Pasar Jambi dengan titik penyadapan air baku di intake pulau pandan dengan pengolahan di IPA Broni 1 dan IPA Broni 2
  4. Zona 4 untuk pelayanan Kec Jambi timur dengan titik penyadapan air baku berlokasi di Intake Sijinjang dengan pengolahan di IPA Tanjung sari 1 dan 2

- **Unit Produksi**

  Penyelenggaraan penyediaan air minum perpipaan di Kota Jambi dimulai sejak zaman Pemerintah Hindia Belanda Tahun 1928. Staadfonds atau Pemerintah Kota pada waktu itu mendirikan waterleiding bedrijf dengan kapasitas 7 liter/detik, selanjutnya dengan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Jambi No. 25/X/1974 tanggal 27 Maret 1974 ditetapkan menjadi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).



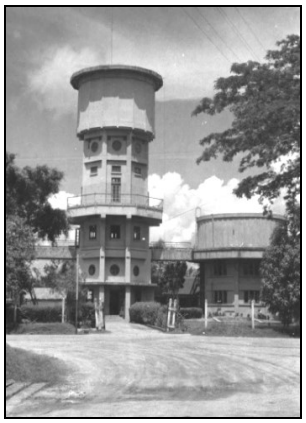

IPA Benteng, Desember 1953



IPA Benteng Saat Ini

a. Tahun 1975-1976, Instalasi Pengolahan Air (IPA) Benteng (1928) yang dibangun dengan kapasitas 7 liter/detik ditingkatkan secara bertahap dari kapasitas 26 liter/detik menjadi 42 liter/detik.

b. Tahun 1978–1983, Proyek Lima Kota yang dibiayai dari pinjaman Bank Dunia membangun SPAM di Kota Jambi. Salah satu kegiatan proyek tersebut membangun IPA Broni dengan kapasitas 300 liter/detik dan mulai dioperasikan tahun 1982, dan membangun IPA Jambi Seberang dengan kapasitas 10 liter/detik. Sejak saat itu IPA Benteng dihentikan operasinya, karena kelebihan produksi dari IPA Broni, selain kondisi teknis IPA Benteng yang sudah rusak.

c. Tahun 1989–1993,Proyek SumateraSecondary Cities Urban Development Project(SSC-UDP) yang didanai dari pinjaman RDI dan sebagian hibah APBN, ditujukan untuk mengoperasikan kembali IPA Benteng dengan di Up-rating menjadi 220 liter/detik dan mengembangkan jaringan distribusi untuk melayani wilayah Tengah dan Timur Kota Jambi diantaranya kecamatan Jelutung, Pasar, Jambi Timur dan Jambi Selatan.

d. Tahun 1997–1998, proyek kerjasama/kemitraan PDAM dengan Pihak Swasta mengembangkan SPAM di Wilayah Barat Kota Jambi, khususnya Kecamatan Telanaipura dan Kota Baru dengan membangun IPA Aurduri kapasitas 100 liter/detik dan jaringan pipa induk distribusi.



e. Tahun 1997–2000, Proyek Sumatera Urban Development Sector Project (SUDSP) merehabilitasi dan meningkatkan kapasitas IPA Broni menjadi 600 liter/detik, dan pembangunan reservoir kapasitas 750 m3 yang berlokasi di Jl. M. Kukuh Kecamatan Kota Baru.
f. Tahun 2005, pembangunan booster pump kapasitas 10 liter/detik yang berlokasi di Tanjung Pasir Jambi Kota Seberang ditujukan untuk memperbaiki pendistribusian air kepada pelanggan di Kecamatan Danau Teluk dan Kecamatan Pelayangan.
g. Tahun 2006, pembangunan pipa induk di Jambi Kota Seberang dan Kota Baru (daerah Mayang Mengurai) melalui bantuan proyek APBD 2006 Kota Jambi ditujukan untuk meningkatkan kinerja dan mengembangkan pelayanan air minum.
h. Tahun 2007, pembangunan reservoir kapasitas 500 m3 pada lokasi Mayang Mengurai yang dimaksudkan untuk memperbaiki dan memperluas jaringan di wilayah Kecamatan Kota Baru.Tahun 2009, pembangunan reservoir dengan kapasitas 150 m^3.Tahun 2013, pembangunan Intake Sijinjang dan IPA Tanjung Sari dengan kapasitas 100 liter/detik.

Saat ini kapasitas terpasang PDAM Tirta Mayang sebesar 1.900 liter/detik dengan kebutuhan pelanggan sebesar (130-140) liter/orang/hari atau rata-rata (23-25) m3/bulan/SR, sedangkan kapasitas produksi nyata saat ini 1.303 liter/detik. Sumber air baku yang digunakan oleh PDAM Tirta Mayang adalah Sungai Batanghari, diolah melalui 7 unit IPA .

Proses pengolahan yang ada pada seluruh IPA tersebut merupakan proses pengolahan lengkap yakni :

- Koagulasi (proses pencampuran bahan kimia)





- Flokulasi (proses pengikatan koloid (butir-butir pengeruh) oleh bahan kimia)
- Sedimentasi (proses pemisahan koloid (butir pengeruh))
- Filtrasi (proses penyaringan)
- Klorinasi (proses penghilangan bakteri dari air terolah)

Tabel III.1.12
Instalasi Pengolahan Air PDAM Tirta Mayang Kota Jambi

No.	Unit	Kap. Terpasang (L/S)	Kap. Produksi (Kemampuan) (MAX) (L/S)	Kap. Belum Terpakai (L/S)	Ket.
1	IPA Broni 1	600	300	300	Rusak
2	IPA Broni 2	600	600	0	
3	IPA Benteng	220	0	220	Rusak
4	IPA Tanjung Sari 1	100	80	20	
5	IPA Tanjung Sari 2	100	100	0	
6	IPA Aur Duri 1	100	50	50	Usia Teknis /Rusak
7	IPA Aur Duri 2	100	100	0	
8	IPA Aur Duri 3	100	100	0	
9	IPA Perumnas Aur Duri	20	20	0	
10	IPA Pasir Panjang	40	40	0	
11	IPA Tanjung Johor	20	14	6	
Total		**2.000**	**1.404**	**596**	

Sumber : PERUMDA Air Minum Tirta Mayang Kota JambiTahun 2023

- **Unit Distribusi**

  Tahun 2022, sistem perpipaan distribusi air bersih di yang dimiliki PERUMDA AIR MINUM Air Minum Kota JambiKota Jambi memiliki total sepanjang 1.373.899 m. Rincian mengenai pipa distribusi terdapat pada tabel berikut:





Tabel III.1.13
Rekapitulasi Panjang Pipa Transmisi, Distribusi dan Retikulasi
PDAM Tirta Mayang Kota Jambi Tahun 2022

No	Jenis Pipa	Pipa		Tahun							
		Dia (Inci)	Jenis	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I	**Pipa Transmisi Air Baku**										
	1 Intake P. Pandan -> IPA Broni	32"	PE	-	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
		32"	GI	-	56	56	56	56	56	56	56
		24"	PVC	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		20"	STELL	1.088	1.088	1.088	1.088	1.088	1.088	1.088	1.088
		20"	PE	112	112	112	112	112	112	112	112
		Total		**2.400**	**4.286**	**4.286**	**4.286**	**4.286**	**4.286**	**4.286**	**4.286**
	2 Intake P. Pandan -> IPA Benteng	20"	Stell	1.269	1.269	1.269	1.269	1.269	1.269	1.269	1.269
	3 Intake Sijenjang -> IPA Tjg. Sari	16"	PE	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4 Intake Aurduri -> IPA Aurduri	12"	PVC	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		16"	PE	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		Total		**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
	5 Intake Aurduri -> IPA Perum Aurduri	8"	PVC	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	6 Intake Psr. Panjang -> IPA Psr. Panjang	8"	PVC	200	200	200	200	200	200	200	200
	7 Intake Tj. Johor -> IPA Tj. Johor	6"	PVC	200	200	200	200	200	200	200	200
	Total Pipa Transmisi Air Baku			**10.569**	**12.455**	**12.455**	**12.455**	**12.455**	**12.455**	**12.455**	**12.455**





No	Jenis Pipa	Pipa		Tahun							
		Dia (Inci)	Jenis	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
II	**Pipa Tranmisi/Distribusi**										
	1 IPA Broni -> Sip. Pulai/Tugu Gajah	24"	PE	866	866	866	866	866	866	866	866
		20"	PE	5.274	5.274	5.274	5.274	5.274	5.274	5.274	5.274
		Total		**6.140**	**6.140**	**6.140**	**6.140**	**6.140**	**6.140**	**6.140**	**6.140**
	2 IPA Benteng -> Menara Jelutung	14"	PE	1.953	1.953	1.953	1.953	1.953	1.953	1.953	1.953
	3 Boster M. Kukuh -> Boster Sunan Bonang	8"	PE	0	3.006	3.006	3.006	3.006	3.006	3.006	3.006
	4 Simp. 4 Pertamina -> Boster Pall 7	12"	PE	0	0	750	750	750	750	750	750
	Total Pipa Transmisi Air Baku			**8.093**	**11.099**	**11.849**	**11.849**	**11.849**	**11.849**	**11.849**	**11.849**
III	**PIPA DISTRIBUSI**	14"	-	-	-	-	-	-	-	-	498
		16"	ACP	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
			PVC	16.970	16.970	16.970	16.970	16.970	16.970	16.970	16.970
			GI	6	6	6	6	6	6	6	6
			PE	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.361	3.361	3.361
		Total		**21.809**	**21.809**	**21.809**	**21.809**	**21.809**	**21.837**	**21.837**	**21.837**
		14"	STEEL	240	240	240	240	240	240	240	240
			PVC	570	570	570	570	570	570	582	582
		Total		**810**	**810**	**810**	**810**	**810**	**810**	**822**	**822**
		12"	ACP	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
			PE	27.394	27.394	27.394	29.277	29.277	29.390	29.390	31.109
			GI	18	18	18	18	18	18	18	18
			PVC	231	231	231	231	231	195	197	197
		Total		**28.723**	**28.723**	**28.723**	**30.606**	**30.606**	**30.683**	**30.685**	**32.404**





No	Jenis Pipa	Pipa		Tahun							
		Dia (Inci)	Jenis	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		10"	ACP	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
			PVC	5.812	5.812	5.812	5.812	5.812	5.812	5.812	5.812
			STEEL	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	2.614	2.614
			Total	**10.314**	**10.314**	**10.314**	**10.314**	**10.314**	**10.314**	**10.316**	**10.316**
		8"	ACP	5.206	5.206	5.206	5.206	5.206	5.188	5.188	5.188
			PE	18.830	19.730	19.730	20.205	21.610	22.057	25.264	27.910
			GI	12	12	12	12	12	20	20	20
			PVC	50.441	50.441	50.441	50.441	50.441	50.441	50.441	50.441
			STEEL	473	473	473	473	473	473	473	473
			Total	**74.962**	**75.862**	**75.862**	**76.337**	**77.742**	**78.179**	**81.386**	**84.032**
		6"	ACP	11.259	11.247	11.247	11.247	11.247	11.247	11.247	11.247
			GI	12	12	12	12	12	12	12	12
			PE	14.458	15.422	16.684	25.933	27.333	32.160	36.768	44.612
			PVC	60.701	60.701	60.701	60.701	60.701	60.701	60.701	60.701
			Total	**86.430**	**87.382**	**88.644**	**97.893**	**99.293**	**104.120**	**108.728**	**116.572**
		4"	PE/PVC/ACP/GI	289.972	289.028	289.028	288.853	288.853	284.938	284.860	284.860
			PE	28.127	31.571	43.775	53.657	67.759	77.173	82.386	93.579
			Total	**318.099**	**320.599**	**332.803**	**342.510**	**356.612**	**362.111**	**367.246**	**378.439**
		3"	PE/PVC/ACP/GI	63.335	62.365	62.365	62.365	62.365	62.020	61.976	61.976
			PE	19.189	28.648	37.988	60.901	99.551	132.295	149.693	169.547
			Total	**82.524**	**91.013**	**100.353**	**123.266**	**161.916**	**194.315**	**211.669**	**231.523**
		2"	PE/PVC/ACP/GI	386.432	385.797	385.797	385.797	385.797	378.568	377.423	377.423
			PE	61.044	62.854	63.644	72.362	72.362	72.844	80.570	95.729
			Total	**447.476**	**448.651**	**449.441**	**458.159**	**458.159**	**451.412**	**457.993**	**473.152**
	Total Pipa Distribusi			**1.071.147**	**1.085.163**	**1.108.759**	**1.161.704**	**1.217.261**	**1.253.781**	**1.290.682**	**1.349.595**
	Total Pipa Tranmisi + Distribusi			**1.089.809**	**1.108.717**	**1.133.063**	**1.186.008**	**1.241.565**	**1.278.085**	**1.314.986**	**1.373.899**

Sumber : PERUMDA Air Minum Tirta Mayang Kota JambiTahun 2023

Skematik Pelayanan Jambi Kota Seberang



Gambar 3.1.9
Skematik Pelayanan Zona 1

Skematik Pelayanan Jambi Kota



Gambar 3.1.10
Skematik Pelayanan Zona 2



Gambar 3.1.11
Skematik Pelayanan Zona 3



Gambar 3.1.12
Skematik Pelayanan Zona 4

Tingkat kehilangan air/non revenue water (NRW) PDAM Tirta Mayang Kota Jambi sampai tahun 2022 masih sangat besar yaitu sekitar 38,51 %.



Tabel III.1.14
Tingkat Kehilangan Air PDAM Tirta Mayang Tahun 2022

No	Uraian	Volume	Sat
1	Produksi Air	31.789.771	M^3
2	Distribusi Air	30.866.001	M^3
3	Konsumsi Air	19.003.603	M^3
4	NRW	11.862408	M^3
5	NRW	38,51	%

Sumber : PERUMDA Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi Tahun 2023

Permasalahan Pelayanan Air Minum Kota Jambi

a) Sumber

- Kekeruhan air baku cenderung meningkat selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, indikasi adanya pencemaran air sungai.
- Intake sering mengalami kesulitan dalam penyadapan air baku. Khususnya di Intake Sijinjang yang masih menggunakan jenis intake saluran, yaitu terganggunya pengaliran ke pintu masuk (inlet) intake, terutama pada musim kemarau karena terjadinya penumpukan sedimentasi.
- Kualitas dan tinggi muka air Sungai Batanghari fluktuatif, sehingga menyebabkan tingkat kesulitan yang relatif tinggi dalam mengolah air.

b) Pengolahan

- Menurunnya kinerja dan kapasitas operasi Instalasi Pengolahan Air.
- Kerusakan pada klariflokulator dan filter, serta menurunnya efisiensi dan debit pompa.

c) Transmisi – Distribusi

- Tingkat kehilangan air sebesar 38,51 % pada tahun 2022.
- Cakupan pelayanan mencapai (80 %) untuk daerah perkotaan.
-

Penyebab Permasalahan

1) Adanya penambangan emas tanpa izin (Peti) dihulu Sungai Batanghari.
2) Fluktuasi muka Sungai Batanghari yang mencapai 1 m pada saat musim kemarau dan 8 meter pada hujan.
3) Sedimentasi Sungai Batanghari cukup tinggi.





4) Bila terjadi kemarau, dibeberapa unit pengolahanmengalami penurunan kapasitas produksi.
5) Usia teknis peralatan mekanikal, elektrikal, peralatan pengolahan (tube settler keropos, filter), perpompaan dan pipa.
6) Kontinuitas operasi pelayanan yang belum mencapai 24 jam.
7) Unit pengolahan yang menggunakan sistem pengolahan lengkap belum dilengkapi/didukung oleh sarana yang lengkap.
8) Suhu air pada unit produksi tidak konstan.
9) Kapasitas pengolahan lengkap saat ini masih terbatas.
10) Jaringan pipa yang sudah melebihi umur ekonomis (sudah tua, rata-rata >20 tahun).
11) Kondisi jaringan pipa sudah banyak yang berada di badan jalan dan di bawah bangunan, sehingga kebocoran pipa tidak dapat terdeteksi.
12) Meter air pelanggan banyak yang sudah melebihi umur ekonomis (> 5 tahun), 15013 SR yang meter airnya belum diganti.
13) Belum adanya sistim zoning di daerah pelayanan yang menggunakan alat ukur.
14) Pemakaian air pada hidran kebakaran tidak dapat dideteksi karena tidak dilengkapi dengan watermeter.
15) Adanya indikasi pengambilan air oleh pelanggan sebelum meter air.
16) Adanya indikasi sambungan illegal terutama pada sambungan yang sudah dicabut.
17) Belum dimilikinya sarana pendeteksi kebocoran pipa.
18) Pada saat penggantian meter pelanggan, masih ditemukan meteran buram sehingga stan meter sulit terbaca
19) Sebagian pipa asbes (ACP) masih dioperasikan.

Selain mengandalkan air minum perpipaan 49,3 % penduduk Kota Jambi mengandalkan air minum dari sistem nonperpipaan

a. Sistem nonperpipaan eksisting, terdiri dari :
   - ❖ Sumur Gali dan Sumur Pompa,





- ❖ Sumur Bor
- ❖ Mobil Tangki Air
- ❖ Air Hujan

b. Permasalahan air minum sistem nonperpipaan

- → Kontinuitas sumur gali didaerah selatan terganggu pada musim kemarau
- → +30% sumur gali tidak memenuhi syarat kualitas bakteriologi karena tercemar
- → Lifetime sumur bor pendek, karena potensi air tanah dalam kecil
- → Mobil tangki terbatas

B. Sistem Bukan Jaringan Perpipaan Kota

Berdasarkan Permen PU No. 01/2009 tentang SPAM Bukan Jaringan Perpipaan yang dimaksudkan dengan sistem bukan jaringan perpipaan kota adalah hidran umum, terminal air, mobil tangki air, penampungan air hujan, perlindungan mata air, sumur dalam, sumur pompa tangan, sumur gali, IPA sederhana, saringan rumah tangga, destilator surya atap kaca dan IPA reserve osmosis. Sistem Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) yang ada di Kota Jambi saat ini Sumur Gali Terbuka (SGL), Terminal AiR (TA)/Hidran Umum (HU), Sumur Pompa Tangan Dangkal (SPT dk), Sumur Pompa Tangan Dalam (SPT dl), Penampungan Air Hujan (PAH) dan lainnya.





Tabel III.1.15
Data Kumulatif Jumlah Sarana Air Bersih Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) per Kecamatan di Kota Jambi

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Parameter			
			Jenis	Jumlah	Jumlah Kk Terlayani	Tingkat Pelayanan (%)
1	Telanaipura	Putri Ayu	SGL	1.171	1.321	14,54
		Penyengat Rendah	SGL	198	224	4,78
		Simpang IV Sipin	SGL	2.854	3.218	37,69
2	Jambi Timur	Tanjung Pinang	SGL	3.127	3.526	40,48
		Payo Selincah	SGL	9.340	10.532	194,35
			TA/HU	6	7	0,13
		Talang Banjar	SGL	965	1.089	13,15
			TA/HU	1	2	0,02
3	Jambi Selatan	Pakuan Baru	SPT dk	330	373	3,92
			SGL	1.563	1.763	18,52
		Talang Bakung	SGL	10.388	11.713	91,73
		Paal Merah	SPT dl	115	130	1,14
			SGL	4.810	5.424	53,60
		Lingkar Selatan	SGL	16	19	0,43
4	Danau Teluk	Olak Kemang	SGL	113	128	3,92
5	Pelayangan	Tatul Yaman	SPT dl	323	365	10,96
			SGL	99	112	3,36
			PAH	53	60	1,80
6	Kota Baru	Kenali Asam Bawah	SPT dl	14	16	0,30
			SGL	2.787	3.143	59,08
			PAH	22	25	0,41
			Lainnya	2	4	0,08
		Rawasari	SPT dk	3.974	4.481	32,31
7	Jelutung	Lebak Bandung	SPT dk	9	11	0,08
			SGL	1.835	2.069	15,54

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Jambi, Triwulan II Tahun 2014
Keterangan: SGL (Sumur Gali Terbuka)
TA/HU (Terminal Air/Hidran Umum)
SPT dk (Sumur Pompa Tangan Dangkal)
SPT dl (Sumur Pompa Tangan Dalam)
PAH (Penampungan Air Hujan)
Lainnya (Jenis sarana air bersih selain daripada yang telah dijalankan)

3.1.3.3 Sistem Jaringan Drainase

Kota Jambi telah mempunyai sistem drainase yang dikategorikan melalui pola aliran permukaan pada daerah layanan. Secara fisik, kondisi sungai dan saluran drainase yang ada berfungsi dengan cukup baik, namun di beberapa tempat kondisi sungai/saluran belum dilengkapi dengan saluran drainase perkotaan dalam arti masih mengalir secara alami dengan sistem gravitasi sesuai dengan keadaan topografinya. Kondisi sungai utama yang berfungsi sebagai





drainase primer di Kota jambi saat ini memiliki Sistem drainase meliputi; drainase besar berupa sungai dan sistem drainase kecil berupa drainase jalan

Sungai utama di kota Jambi adalah sungai Batanghari yang merupakan muara dari semua sungai-sungai di kota Jambi, mengalir dari barat kearah timur. Umumnya sungai-sungai di Jambi Kota mengalir kurang lebih dari arah selatan ke utara ke sungai Batanghari. Sungai-sungai tersebut, urutannya dari barat ke timur adalah Sungai Kenali Kecil, Sungai Kenali Besar, Sungai Kambang, Sungai Solok Sipin, Sungai Putri, Sungai Asam, Sungai Tembuku dan Sungai Selincah. Ke semua sungai-sungai inilah saluran-saluran drainase yang lebih kecil mengalir, sehingga membentuk sistim drainase Kota Jambi.

Ada empat danau di Kota Jambi, dua di Jambi Kota, yaitu danau Teluk Kenali dan danau Sipin, serta dua lagi di Kota Seberang, yaitu danau Penyengat dan danau Teluk. Danau Sipin, Penyengat dan Teluk mengalir ke Sungai Batanghari, sedangkan danau Teluk Kenali mengalir ke danau Sipin.

3.1.3.4 Sistem Jaringan Listrik

PT PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Jambi merupakan salah satu sektor pembangkitan andalan di Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan (KITSBS). Semula pembangkitan Jambi merupakan unit dari Sektor Pembangkitan Keramasan dan pada akhirnya pada tanggal 15 Januari 2009 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) NO. 267.K/DIR/2008 secara resmi ditetapkan sebagai Sektor Pambangkitan saat itu oleh Direktur utama PT. PLN (Persero) Bapak Fahmi Mochtar dan Gubernur Jambi Bapak Zulkipli Nurdin.

Beberapa unit pembangkit yang dimiliki Sektor Pembangkitan Jambi yaitu:

1) PLTD Payo Selincah

Pada tahun 1985 – 1987 PLTD (Pusat Listrik Tenaga Diesel) Payo Selincah mulai dibangun berlokasi di kelurahan Payo Selincah kecamatan Jambi Timur. PLTD Payo Selincah awalnya memiliki 5 unit pembangkit diesel "Mirrless Black Stone KV12 Major" dengan kapasitas masing-masing 5,2 MW, namun pada tahun 1989 unit #3 tidak beroperasi. Kemudian pada





tahun 1992 mendapatkan diesel tambahan sebanyak 2 unit dengan jenis mesin yang sama. Pada awal tahun 2012 PLTD Payo Selincah kehilangan unit #2 yang mengakibatkan harus dikeluarkan dari pengusahaan sektor Dalkit Jambi. Desain awalnya unit pembangkit ini beroperasi menggunakan bahan bakar solar (HSD), pada bulan Mei tahun 2004 dimulainya instalasi fasilitas gasifikasi 6 Unit PLTD Payo Selincah, dan pada tahun 2006 instalasi gasifikasi tersebut dilaksanakan uji operasional dengan menggunakan LPG, pelaksanaan proyek ini dilakukan oleh PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA. Dengan masuknya suplai Natural Gas ke lokasi Payo Selincah maka pada tahun 2008 proyek uji operasional dilanjutkan kembali. Natural Gas bersumber dari Conoco Philips, dengan mediatornya PT. Energasindo Heksa Karya. Saat iniseluruh Unit PLTD yang semula menggunakan Full HSD sudah beroperasi Mix Dual Fuel (HSD – Gas) dengan komposisi 60% Natural Gas dan 40% HSD. Dan saat ini pusat listrik PLTD Payo Selincah telah berubah menjadi PLTD/G Payo Selincah.

2) PLTG Batang Hari

Pusat Listrik Tenaga Gas Batang Hari merupakan pembangkit yang mulanya beroperasi di Pauhlimo Padang dan kemudian direlokasi ke Jambi pada tahun 1997 secara cash program untuk menanggulangi kekurangan energi listrik pada masa itu. Dan pada tahun 1998 PLTG Batang Hari yang lokasinya sama dengan PLTD Payo Selincah diresmikan oleh Gubernur Jambi saat itu Bapak Ir. Abdul Rahman Sayuti. PLTG Batang Hari mempunyai 2 unit pembangkit dengan daya terpasang 2 X 30 MW, jenis mesin General Electrical type MS 6001 B. Pada mulanya PLTG ini beroperasi dengan bahan bakar solar (HSD) dan gas, namun saat ini bahan bakar yang digunakan 100 % murni gas yang berupa Natural Gas yang didistribusikan oleh PT Energasindo Heksa Karya.

3) PLTMG Sei Gelam

Pusat Listrik Tenaga Mesin Gas Sei Gelam merupakan pembangkit pertama yang dijadikan Pilot Project oleh PLN Pusat sebagai pembangkit efisien





yang dimiliki dan dikelola langsung oleh PLN. Pembangkit ini COD dan masuk kedalam sistem ketanagalistrikan di Jambi pada awal tahun 2013. Meskipun pada awalnya Pembangkit ini tidak bisa beroperasi secara maksimal dikarenakan kesiapan jaringan 150 kV belum selesai, akan tetapi pada pertengahan Juli 2014 PLTMG Sei Gelam dapat beroperasi penuh dengan kapasitas 90 MW pada beban puncak.

Dari sisi pelayanan terhadap konsumen, berdasarkan profil kecamatan-kecamatan di Kota Jambi memang telah di identifikasikan bahwa seluruh kecamatan telah terlayani oleh listrik dari PLN. Konsumen tersebut terbagi atas golongan tarif sosial, rumah tangga, industri, usaha/hotel, gedung/perkantoran, serta penerangan. Berikut ialah data pelanggan PLN di Kota Jambi. Data mengenai pelanggan PLN di kota Jambi terdapat dalam tabel-tabel berikut

Tabel III.1.16
Banyaknya Pelanggan PLN Golongan Rumah Tangga di Kota Jambi Menurut Golongan Tarif Tahun 2022

Golongan Tarif	Jumlah Langganan	Jumlah VA/ Langganan	KWH/ Langganan
R1 s/d 450 VA	57.519	25.883.550	87.140.738
R1 s/d 900 VA	144.401	129.960.900	202.661.381
R1 / 1300 VA	261.701	340.211.300	365.717.724
R1 2200 VA	18.731	41.208.200	65.213.605
R2 / >3500s/d5 500 VA	5.217	21.137.700	30.252.370
R2/ >6600 VA	598	8.757.000	10.571.319
Jumlah	**488.167**	**567.158.650**	**761.557.137**

Sumber : Kota Jambi Dalam Angka Tahun 2023

Tabel III.1.17
Banyaknya Pelanggan PLN Golongan Rumah Tangga di Kota Jambi Menurut Golongan Tarif Tahun 2022

Golongan Tarif	Jumlah Pelangganan	Jumlah VA/ Langganan Number	Nilai Penjualan (Rp)
Sosial	2.872	28.076.350	40.295.878
Rumah Tangga	210.823	274.483.850	420.865.622
Industri	113	29.210.200	62.490.035
Usaha	22.551	140.626.450	218.750.735
Perkantoran	841	16.622.800	22.795.389
Penerangan Jalan	945	4.122.500	10.988.457
Multiguna	20	132.000	613.069
Jumlah	**238.165**	**493.274.150**	**776.799.185**

Sumber : Kota Jambi Dalam Angka Tahun 2023





3.1.3.5 Sistem Jaringan Telekomunikasi

Sistem jaringan telekomunikasi merupakan perangkat telekomunikasi yang digunakan untuk saling bertukar informasi, dengan menggunakan media transmisi. Berupa suara, teks maupun video yang dapat diterima dari pengirim ke penerima pesan tersebut. Kota Jambi telah memiliki system jaringan telekomunikasi yang tersebar di beberapa kecamatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.1.18
Sistem Jaringan Telekomunikasi di Kota Jambi Tahun 2020

No.	Kecamatan	Nama Menara/Tower	Jumlah
1	Telanaipura	Tower	21
		Pro 2 - RRI	2
		Tower Operator IM3	2
		Operator XL dan 3	1
		Telekomunikasi Selular	2
		Menara Telekomunikasi	5
		Tower HP	2
		Tower Telkomsel	5
		Tower Tri	2
		Indosat	1
		Tower TVRI	1
2	Kota Baru	Tower Telkomsel	23
		Tower	15
		Tower Indosiar	1
		Tower RCTI	1
		Tower SCTV	1
		Tower Batang Hari TV	1
		Pemancar Satelit	1
		Tower Bersama	7
		PT. Protelindo	17
		Tower XL	12
		Tower (DISTARUM)	3
		Tower (Dishub Kota)	1
		PT. Centro TV Indonesia	1
		Tower 3	1
		PT. Pertamina	1
		PT. Solusi Tunas Pratama/XL	1
		Tower (PT.CTS)	1
		Tower (PT. HCPT)	1
		Tower (CV. Cahaya Utama)	1
3	Jelutung	PT. Telekomunikasi	4
		PT. Bahana Utama Media Internusa	1
		PT. Radio Angkasa Jambi Abadi	1
		Tower XL	6
		Tower Indosat	4
		Tower Tri	2





No.	Kecamatan	Nama Menara/Tower	Jumlah
		PT. Protelindo	2
		Tower	4
		Menara Telkomsel	3
4	Pasar Jambi	XL Center	1
		Tower Ceria	2
		Sam Ratulangi	1
		Jambi Net Joni Jihad	1
		Kurnia Tunggal Nugraha Budiyanto	1
		Tower Tri	1
		Tower Telkomsel	2
		PT. Corona Telecommunication	1
5	Jambi Timur	Menara XL	8
		Menara Telkomsel	10
		Menara Indosat	1
		Menara Tri	1
		Menara IM3	2
		Tower Radio	1
		Menara Flexi	1
6	Jambi Selatan	Tower	43
		Tower Bersama	1
		Tower Pro XL	1
		Telekomunikasi	7
		Tower Radio	2
		Tower Sektoral	3

Sumber: DPM-PTSP, 2021

3.1.4 Kondisi Umum Demografi

3.1.4.1 Jumlah Penduduk Kota Jambi

Jumlah penduduk di Kota Jambi pada than 2016 adalah 583.487 jiwa dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2022 Kota Jambi memiliki jumlah penduduk sebanyak 619.553 jiwa. Rata-rata kenaikan jumlah penduduk sekitar 0,86% per tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.





Tabel III.1.19
Jumlah Penduduk di Kota Jambi Tahun 2016-2022

No	Kecamatan	Tahun						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kota Baru	73.513	75.384	77.049	78.620	80.062	81.525	83.381
2	Alam Barajo	94.773	97.184	99.349	101.350	108.196	110.377	113.146
3	Jambi Selatan	61.122	61.743	62.349	62.907	56.929	57.194	57.515
4	Paal Merah	89.002	89.835	90.641	91.383	105.906	106.895	108.182
5	Jelutung	62.907	63.369	63.792	64.213	59.442	59.602	59.744
6	Pasar Jambi	12.557	12.532	12.498	12.465	11.193	11.182	11.147
7	Telanaipura	49.970	50.482	50.966	51.451	49.212	49.456	49.720
8	Danau Sipin	47.738	48.228	48.689	49.152	43.375	43.561	43.734
9	Danau Teluk	12.036	12.083	12.123	12.160	12.822	12.907	13.009
10	Pelayangan	13.469	13.585	13.694	13.803	12.939	12.994	13.050
11	Jambi Timur	66.400	66.709	66.973	67.234	66.124	66.469	66.925
Total		**583.487**	**591.134**	**598.123**	**604.738**	**606.200**	**612.162**	**619.553**

Sumber: Kota Jambi Dalam Angka,2023

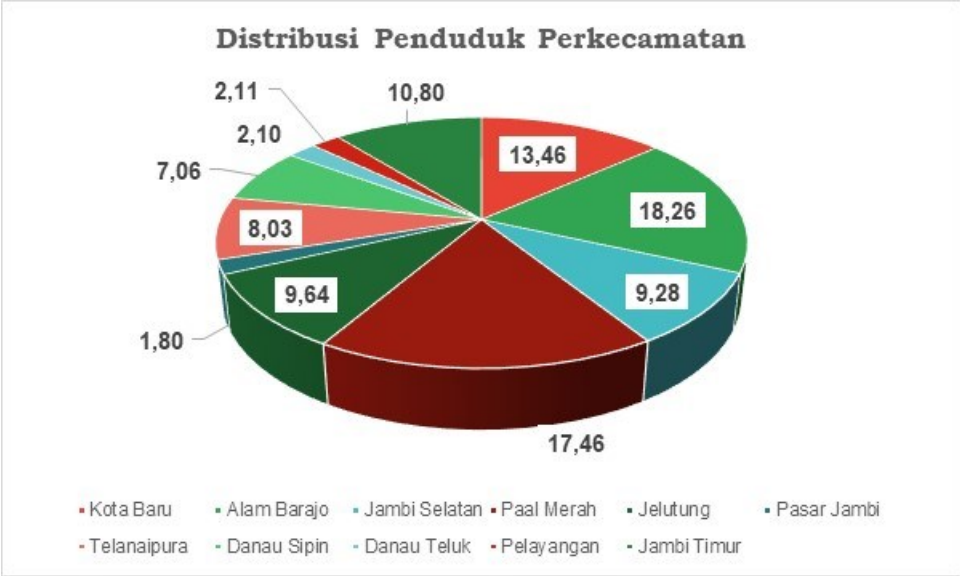

Gambar 3.1.13
Grafik Distribusi Penduduk Per Kecamatan
di Kota Jambi Tahun 2022



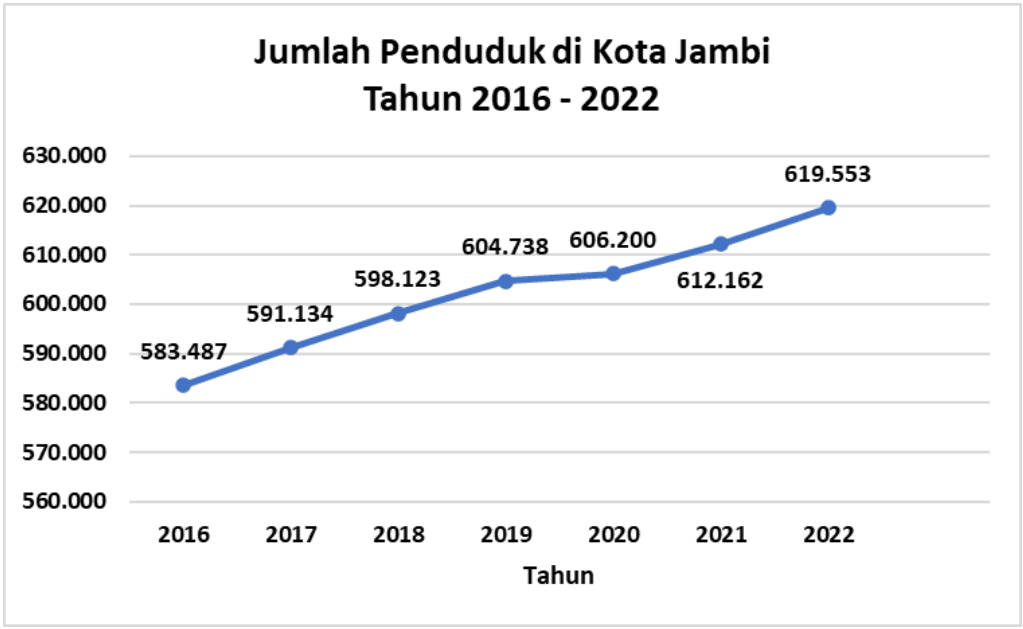

Gambar 3.1.14
Grafik Jumlah Penduduk di Kota Jambi Tahun 2016-2022

3.1.4.2 Kepadatan Penduduk Kota Jambi

Pada tahun 2022, jumlah penduduk Kota Jambi tercatat sebanyak 619.553 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Alam Barajo sebanyak 113.146 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan Pasar Jambi yakni sebanyak 11.147 jiwa. Dari segi kepadatan penduduk tahun 2022 maka kepadatan per km^2 menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.1.20
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Menurut Kecamatan Tahun 2022

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km^2)
1	Kota Baru	27,25	83.381	3.059,85
2	Alam Barajo	36,06	113.146	3.137,71
3	Jambi Selatan	7,6	57.515	7.567,76
4	Paal Merah	24,25	108.182	4.461,11
5	Jelutung	7,61	59.744	7.850,72
6	Pasar Jambi	1,67	11.147	6.674,85
7	Telanaipura	20,32	49.720	2.446,85
8	Danau Sipin	7,28	43.734	6.007,42
9	Danau Teluk	13,44	13.009	967,93
10	Pelayangan	10,69	13.050	1.220,77
11	Jambi Timur	13,68	66.925	4.892,18
Jumlah		**169,85**	**619.553**	**3.647,65**

Sumber : Kota Jambi Dalam Angka Tahun 2023



3.1.4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin di Kota Jambi pada tahun 2022 didominasi oleh penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 311.616 jiwa dan berjenis perempuan dengan jumlah 307.937 jiwa, dengan rasio jenis kelamin tertinggi berada pada Kecamatan Pelayangan sebesar 101,19. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.1.21
Jumlah Penduduk (Jiwa) Menurut Kecamatan,
Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2022

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
1	Kota Baru	41.762	41.619	83.381	101,92
2	Alam Barajo	56.712	56.434	113.146	101,35
3	Jambi Selatan	29.121	28.394	57.515	100,06
4	Paal Merah	54.658	53.524	108.182	102,22
5	Jelutung	29.992	29.752	59.744	99,24
6	Pasar Jambi	5.696	5.451	11.147	97,50
7	Telanaipura	24.910	24.810	49.720	100,45
8	Danau Sipin	21.898	21.836	43.734	101,15
9	Danau Teluk	6.529	6.480	13.009	102,07
10	Pelayangan	6.795	6.255	13.050	103,11
11	Jambi Timur	33.543	33.382	66.925	101,81
Jumlah		**311.616**	**307.937**	**619.553**	**101,19**

Sumber : Kota Jambi Dalam Angka Tahun 2023

3.1.4.4 Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kota Jambi tahun 2022 secara keseluruhan hampir setiap tahunnya mengalami peningkatan. Jumlah peduduk tertinggi berada pada kelompok umur 15-19 tahun dan umur 20-24 tahun pada jenis kelamin perempuan yang mana pada usia tersebut termasuk ke dalam usia produktif. Untuk lebih jelasnnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.





Tabel III.1.22
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
di Kota Jambi Tahun 2022

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0 - 4	27.773	26.657	54.430
2	5 - 9	26.467	25.266	51.733
3	10 - 14	25.499	23.964	49.463
4	15 - 19	25.283	24.078	49.361
5	20 - 24	25.840	25.079	50.919
6	25 - 29	26.541	25.654	52.195
7	30 - 34	25.199	24.327	49.526
8	35 - 39	23.521	24.291	47.812
9	40 - 44	22.831	23.226	46.057
10	45 - 49	21.354	21.982	43.336
11	50 - 54	18.535	19.030	37.565
12	55 - 59	15.437	15.453	30.890
13	60 - 64	11.522	11.448	22.970
14	65 - 69	8.011	8.478	16.489
15	70 - 74	4.464	4.682	9.146
16	+75	3.339	4.322	7.661
Jumlah		**311.616**	**307.937**	**619.553**

Sumber : Kota Jambi Dalam Angka Tahun 2023

3.1.4.5 Struktur Penduduk Menurut Agama

Berdasarkan agama yang dianut pada tahun 2022, agama islam merupakan agama dengan jumlah penduduk terbanyak di Kota Jambi yakni sebesar 553.711 jiwa dari total jumlah penduduk. Sedangkan agama lainnya merupakan agama yang memiliki jumlah penduduk paling rendah yaitu sebesar 5.539 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.





Tabel III.1.23
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kota Jambi Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Agama (Jiwa)					
		Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
1	Kota Baru	72.577	3.086	2.690	25	3.730	404
2	Alam Barajo	95.253	7.250	6.624	637	1.240	704
3	Jambi Selatan	55.013	984	799	441	457	192
4	Paal Merah	105.059	844	1.026	541	400	314
5	Jelutung	51.216	2.316	3.036	2.888	4	861
6	Pasar Jambi	7.775	1.145	640	37	1.714	6
7	Telanaipura	42.780	3.199	2.082	851	765	375
8	Danau Sipin	42.543	784	304	53	335	67
9	Danau Teluk	13.063	0	0	0	0	0
10	Pelayangan	13.140	11	0	0	0	0
11	Jambi Timur	55.292	2.059	3.323	1.668	2.315	2.616
Jumlah		**553.711**	**21.678**	**20.524**	**7.141**	**10.960**	**5.539**

Sumber : Kota Jambi Dalam Angka Tahun 2023

3.1.4.6 Perkiraan Jumlah Penduduk di Kota Jambi Tahun 2024-2044

Berdasarkan perkiraan/proyeksi pada 20 (duapuluh) tahun yang akan datang, diperkirakan jumlah penduduk Kota Jambi akan meningkat menjadi lebih dari 1.089.977 jiwa pada tahun 2044, dengan perhitungan seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.1.24
Proyeksi Penduduk Kota Jambi Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2024	2029	2034	2039	2044
1	Kota Baru	86.568	95.396	105.128	115.850	127.666
2	Alam Barajo	122.108	145.127	172.485	205.000	243.645
3	Jambi Selatan	58.157	59.762	61.367	62.972	64.577
4	Paal Merah	123.011	158.789	204.974	264.590	341.547
5	Jelutung	60.038	60.773	61.506	62.243	62.978
6	Pasar Jambi	12.331	15.291	18.251	21.211	24.171
7	Telanaipura	50.248	51.566	52.888	54.208	55.528
8	Danau Sipin	44.454	46.149	47.874	49.599	51.324
9	Danau Teluk	13.651	15.092	16.685	18.447	20.394
10	Pelayangan	13.790	15.640	17.490	19.340	21.190
11	Jambi Timur	67.837	70.117	72.397	74.677	76.957
Jumlah		**652.193**	**733.702**	**831.045**	**948.137**	**1.089.977**

Sumber : Analisis, Tahun 2023





Tabel III.1.25
Proyeksi Distribusi Penduduk Kota Jambi Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Distribusi (%)				
		2024	2029	2034	2039	2044
1	Kota Baru	13,27	13,00	12,65	12,22	11,71
2	Alam Barajo	18,72	19,78	20,76	21,62	22,35
3	Jambi Selatan	8,92	8,15	7,38	6,64	5,92
4	Paal Merah	18,86	21,64	24,66	27,91	31,34
5	Jelutung	9,21	8,28	7,40	6,56	5,78
6	Pasar Jambi	1,89	2,08	2,20	2,24	2,22
7	Telanaipura	7,70	7,03	6,36	5,72	5,09
8	Danau Sipin	6,82	6,29	5,76	5,23	4,71
9	Danau Teluk	2,09	2,06	2,01	1,95	1,87
10	Pelayangan	2,11	2,13	2,10	2,04	1,94
11	Jambi Timur	10,40	9,56	8,71	7,88	7,06
Jumlah		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: Analisis, Tahun 2023

Kepadatan penduduk Kota Jambi tentu juga akan mengalami peningkatan dan diperkirakan dapat mencapai 75.680 jiwa/km^2 pada tahun 2044. Sedangkan untuk Kepadatan penduduk yang tertinggi di tahun 2044 berada di Kecamatan Pasar Jambi sekitar 14.474 jiwa/km^2 dan Kecamatan Paal Merah sekitar 14.084 jiwa/km^2. Untuk kepadatan penduduk paling kecil berada di Kecamatan Danau Teluk sekitar 1.517 jiwa/km^2 dan Kecamatan Pelayangan sekitar 1.982 jiwa/km^2. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel III.1.26
Proyeksi Kepadatan Penduduk Kota Jambi Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (km2)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km^2)				
			2024	2029	2034	2039	2044
1	Kota Baru	27,25	3.177	3.501	3.858	4.251	4.685
2	Alam Barajo	36,06	3.386	4.025	4.783	5.685	6.757
3	Jambi Selatan	7,6	7.652	7.863	8.075	8.286	8.497
4	Paal Merah	24,25	5.073	6.548	8.453	10.911	14.084
5	Jelutung	7,61	7.889	7.986	8.082	8.179	8.276
6	Pasar Jambi	1,67	7.384	9.156	10.929	12.701	14.474
7	Telanaipura	20,32	2.473	2.538	2.603	2.668	2.733
8	Danau Sipin	7,28	6.106	6.339	6.576	6.813	7.050
9	Danau Teluk	13,44	1.016	1.123	1.241	1.373	1.517
10	Pelayangan	10,69	1.290	1.463	1.636	1.809	1.982
11	Jambi Timur	13,68	4.959	5.126	5.292	5.459	5.626
Jumlah			**50.405**	**55.667**	**61.528**	**68.135**	**75.680**

Sumber: Analisis, Tahun 2023





3.1.4.7 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan angka untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan indeks pembangunan manusia (IPM) yang mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan standar hidup. Mulai Tahun 2014, telah dipakai IPM metode baru sesuai dengan rekomendasi PBB. Perbedaan metode baru dengan metode lama ini adalah dimensi pendidikan dimana angka melek huruf diganti dengan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah dihitung dari penduduk usia 25 tahun keatas.

IPM Kota Jambi pada tahun 2014 sampai 2022 menunjukkan tren yang cenderung meningkat. Dibandingakan dengan Provinsi Jambi, capaian IPM Kota jambi selalu lebih tinggi. IPM Kota Jambi pada tahun 2022 sebesar 79,58 lebih tinggi bila dibandingkan dengan IPM Provinsi Jambi yaitu 70,14. Nilai IPM Kota Jambi lebih tinggi bila dibandingkan dengan IPM di Kota/Kabupaten Provinsi Jambi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.





Tabel III.1.27
Indek Pembangunan Manusia Menurut
Kabupaten/Kota Dalam Propinsi Jambi 2014-2022

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kerinci	68,45	68,89	69,67	69,68	70,59	70,95	71,21	71,45	71,99
Merangin	67,25	67,15	67,86	67,86	68,81	69,07	69,19	69,53	69,98
Sarolangun	67,67	68,1	68,79	68,73	69,41	69,72	69,86	70,25	70,89
Batanghari	67,99	68,05	68,91	68,7	69,33	69,67	69,84	70,11	70,51
Muara Jambi	66,12	66,66	67,58	67,55	68,34	69,01	69,18	69,55	70,18
Tanjab Timur	60,86	61,12	61,86	61,88	63,32	63,92	64,43	64,91	65,77
Tanjab Barat	64,22	65,03	66	65,91	67,13	67,54	67,54	68,16	68,79
Tebo	67,33	67,29	68,04	68,05	68,67	69,02	69,14	69,35	69,78
Bungo	68,08	68,34	68,73	68,77	69,42	69,86	69,92	70,15	70,55
Kota Jambi	**74,86**	**75,58**	**76,12**	**76,14**	**77,41**	**78,26**	**78,37**	**79,12**	**79,58**
Kota Sungai Penuh	73,67	73,03	73,38	73,35	74,67	75,36	75,42	75,7	76,17
Provinsi Jambi	**68,49**	**68,89**	**69,63**	**69,62**	**70,65**	**71,26**	**71,26**	**71,63**	**70,14**

Sumber : Provinsi Jambi Dalam Angka, Tahun 2023

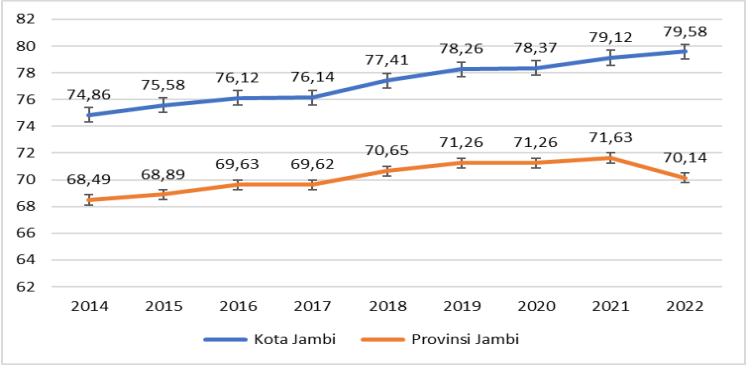

Gambar 3.1.15
Grafik Perkembangan IPM Kota Jambi 2014-2022
Terhadap IPM Provinsi Jambi
Sumber : Provinsi Jambi Dalam Angka, Tahun 2023

3.1.4.8 Ketenagakerjaan

Dalam pasal 1 angka 1 undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa ketenagakerjaan adalah hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja, kemudian di pasal 2 menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.

Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk yang memiliki usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun





sementara tidak bekerja atau pengangguran. Berdasarkan dara dari BPS Kota Jambi, jumlah angkatan kerja di Kota Jambi pada tahun 2022 sebanyak 276.359 jiwa, sedangkan yang masih pengangguran sebanyak 27.158 jiwa. Kemudian penduduk yang bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain pribadi. Berdasarkan data BPS Kota Jambi, jumlah penduduk bukan angkatan kerja di Kota Jambi sebanyak 166.898 jiwa. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam dalam periode survei, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Berdasarkan data BPS Kota Jambi, persentase TPAK pada tahun 2022 sebesar 64,52% dan persentase TPT sebesar 8,95%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.1.28
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun
Keatas Menurut Kegiatan Utama

No	Kegiatan Utama	Jumlah
1	Bekerja	276.359
2	Pengangguran	27.158
3	Angka Kerja	303.517
4	Bukan Angka Kerja	166.898

Sumber : Kota Jambi Dalam Angka Tahun 2023

3.1.4.9 Kondisi Kemiskinan

Angka kemiskinan merupakan persentase dari jumlah penduduk yang secara ekonomi tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup (2.100 kkal per hari) plus kebutuhan dasar primer non makan. Berdasarkan data dari BPS Kota Jambi, persentase penduduk miskin di Kota Jambi cenderung mengalami penurunan pada tahun 2022 yaitu mencapai 8,33% dari total penduduk Kota Jambi.



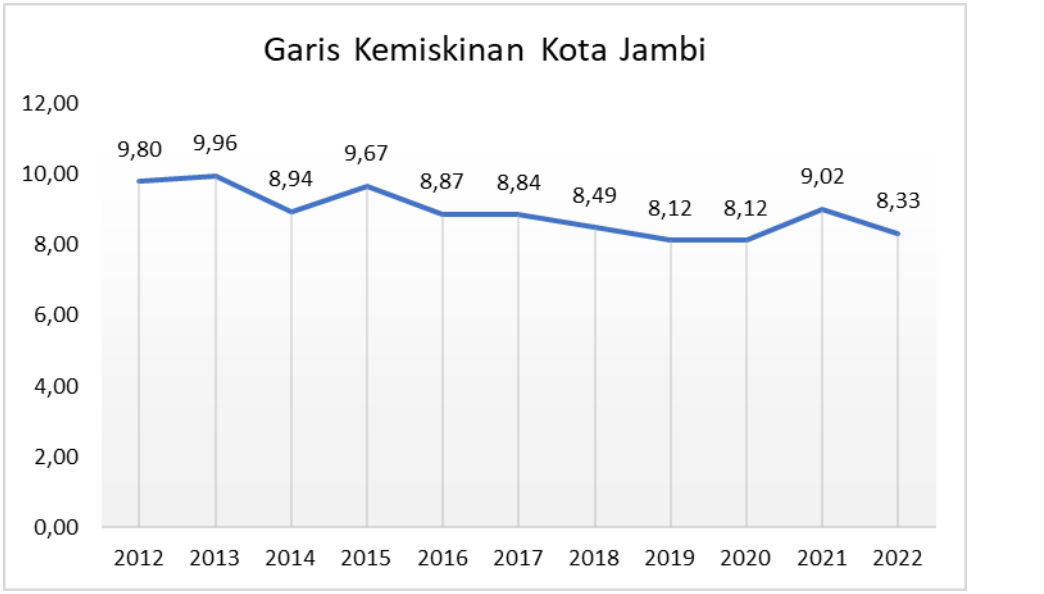

Gambar 3.1.16
Grafik Perkembangan Angka Kemiskinan Kota Jambi
Sumber : BPS Provinsi Jambi Tahun 2023, dan Kota Jambi Dalam Angka Tahun 2023

3.2 DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP

3.2.1 Jasa Layanan Ekosistem

Ekosistem adalah entitas yang kompleks yang terdiri atas komunitas tumbuhan, binatang dan mikro organisme yang dinamis beserta lingkungan abiotiknya yang saling berinteraksi sebagai satu kesatuan unit fungsional (MA, 2005). Fungsi ekosistem adalah kemampuan komponen ekosistem untuk melakukan proses alam dalam menyediakan materi dan jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung (De Groot, 1992).

Jasa ekosistem adalah keuntungan yang diperoleh manusia dari ekosistem (MA, 2005). Jasa ekosistem dikategorikan menjadi empat, yaitu meliputi jasa penyediaan (provisioning), jasa pengaturan (regulating), jasa budaya (cultural), dan jasa pendukung (supporting) (MA, 2005). Berdasarkan empat kategori ini dikelaskan ada 23 kelas klasifikasi jasa ekosistem, yaitu (De Groots, 2002) :

A. Jasa penyediaan :
   1) bahan makanan,
   2) air bersih,



3) serat, bahan bakar dan bahan dasar lainnya,
4) materi genetik,
5) bahan obat dan biokimia,
6) spesies hias.

B. Jasa Pengaturan :

7) Pengaturan kualitas udara,
8) Pengaturan iklim,
9) Pencegahan gangguan,
10) Pengaturan air,
11) Pengolahan limbah,
12) Perlindungan tanah,
13) Penyerbukan,
14) Pengaturan biologis,
15) Pembentukan tanah.

C. Budaya :

16) Estetika,
17) Rekreasi,
18) Warisan dan indentitas budaya,
19) Spiritual dan keagamaan,
20) Pendidikan.

D. Pendukung :

21) Habitat berkembang biak,
22) Perlindungan plasma nutfah

A. Jasa Penyediaan

Dari hasil perhitungan interval tersebut didapatkan distribusi kondisi jasa ekosistem di Wilayah Kota Jambi, yang diuraikan melalui tabel dan gambar peta berikut ini.





Tabel III.2.1
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan

EKOREGION	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
	HA	%	HA	%	HA	%	HA	%	HA	%
Dataran Aluvial	507,10	2,98	0	0	1165,90	6,86	984,85	5,79	2142,01	12,61
Lembah Antar Perbukitan	5561,42	32,74	0	0	1875,39	11,04	21,07	0,12	4724,61	27,82
Total	6068,53	35,73	0	0	3041,30	17,90	1005,93	5,92	6866,62	40,43

Sumber : Hasil Analisa 2020

Tabel III.2.2
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih

EKOREGION	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
	HA	%	HA	%	HA	%	HA	%	HA	%
Dataran Aluvial	507,10	2,98	222,67	1,31	1809,84	10,65	1275,40	7,51	984,85	5,79
Lembah Antar Perbukitan	5561,42	32,74	1093,74	6,44	4805,62	28,29	708,44	4,17	13,26	0,07
Total	6068,53	35,73	1316,41	7,75	6615,47	38,95	1983,85	11,68	998,12	5,87

Sumber : Hasil Analisa 2020

Tabel III.2.3
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyediaan Serat

EKOREGION	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
	HA	%	HA	%	HA	%	HA	%	HA	%
Dataran Aluvial	507,10	2,98	984,85	5,79	322,24	1,89	2142,01	12,61	843,66	4,96
Lembah Antar Perbukitan	5584,95	32,88	13,26	0,07	1166,36	6,86	4724,61	27,82	693,31	4,08
Total	6092,05	35,87	998,12	5,87	1488,61	8,76	6866,62	40,43	1536,97	9,05

Sumber : Hasil Analisa 2020

Tabel III.2.4
Distrubisi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyediaan Energi

EKOREGION	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
	HA	%	HA	%	HA	%	HA	%	HA	%
Dataran Aluvial	729,77	4,29	1809,84	10,65	1275,40	7,51		0	984,85	5,79
Lembah Antar Perbukitan	6655,17	39,18	4805,62	28,29	708,44	4,17		0	13,26	0,07
Total	7384,94	43,48	6615,47	38,95	1983,85	11,68	0	0	998,12	5,87

Sumber : Hasil Analisa 2020

Tabel III.2.5
Distrubisi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyediaan Sumberdaya Genetik

EKOREGION	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
	HA	%	HA	%	HA	%	HA	%	HA	%
Dataran Aluvial	507,10	2,98	222,67	1,31	2241,58	13,19	1828,51	10,76		0
Lembah Antar Perbukitan	5561,42	32,74	1093,74	6,44	4820,75	28,38	706,58	4,16		0
Total	6068,53	35,73	1316,41	7,75	7062,34	41,58	2535,10	14,92	0	0

Sumber : Hasil Analisa 2020



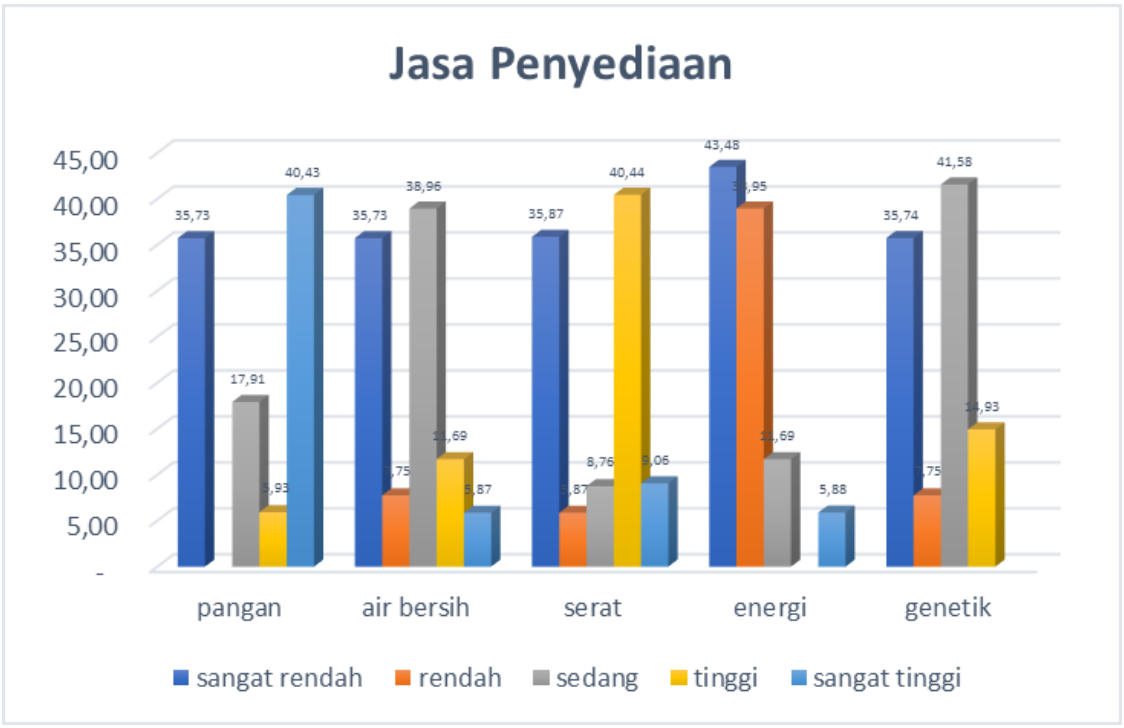

Gambar 3.2.1
Grafik Jasa Ekosistem Penyediaan

Tabel III.2.6
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Menurut BWP

BWP	EKOREGION	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
		HA	%	HA	%	HA	%	HA	%	HA	%
I	Dataran Aluvial	141,71	0,83		0	14,71	0,08	38,95	0,22	22,59	0,13
	Lembah Antar Perbukitan	542,58	3,19		0	25,95	0,15	5,38	0,03	76,10	0,44
II	Dataran Aluvial	155,49	0,91		0	818,91	4,82	402,76	2,37	1047,13	6,16
	Lembah Antar Perbukitan		0		0		0		0		0
III	Dataran Aluvial	64,42	0,37		0	143,89	0,84	117,25	0,69	479,13	2,82
	Lembah Antar Perbukitan	1422,08	8,37		0	208,99	1,23	6,26	0,03	1021,12	6,01
IV	Dataran Aluvial		0		0		0		0		0
	Lembah Antar Perbukitan	1202,60	7,08		0	563,43	3,31	9,13	0,053	958,89	5,64
V	Dataran Aluvial		0		0		0		0		0
	Lembah Antar Perbukitan	1420,281	8,36		0	916,09	5,39		0	2262,04	13,31
VI	Dataran Aluvial	145,47	0,85		0	188,38	1,10	425,88	2,50	593,16	3,49
	Lembah Antar Perbukitan	973,87	5,73		0	160,91	0,94	0,29	0,0017	406,45	2,39
Total		6068,53	35,73	0	0	3041,30	17,90	1005,93	5,92	6866,62	40,43

Sumber : Hasil Analisa 2020



Tabel III.2.7
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Menurut BWP

BWP	EKOREGION	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
		HA	%	HA	%	HA	%	HA	%	HA	%
I	Dataran Aluvial	141,71	0,83	14,71	0,08	14,85	0,08	7,73	0,04	38,95	0,22
	Lembah Antar Perbukitan	542,58	3,19	24,85	0,14	74,75	0,44	2,45	0,01	5,38	0,03
II	Dataran Aluvial	155,49	0,91	114,60	0,67	783,78	4,61	967,65	5,69	402,76	2,37
	Lembah Antar Perbukitan		0		0		0		0		0
III	Dataran Aluvial	64,42	0,37	41,344	0,24	431,24	2,53	150,43	0,88	117,25	0,69
	Lembah Antar Perbukitan	1422,08	8,37	206,09	1,21	1011,65	5,95	12,37	0,072	6,26	0,03
IV	Dataran Aluvial		0		0		0		0		0
	Lembah Antar Perbukitan	1202,60	7,08	363,27	2,13	970,12	5,71	196,74	1,15	1,32	0,007
V	Dataran Aluvial		0		0		0		0		0
	Lembah Antar Perbukitan	1420,28	8,36	392,43	2,31	2312,27	13,61	473,41	2,78		0
VI	Dataran Aluvial	145,47	0,85	52,00	0,30	579,95	3,41	149,57	0,88	425,88	2,50
	Lembah Antar Perbukitan	973,87	5,73	107,08	0,63	436,81	2,57	23,46	0,13	0,29	0,001
Total		6068,53	35,73	1.316,41	7,75	6615,47	38,95	1983,85	11,68	998,12	5,87

Sumber : Hasil Analisa 2020

Tabel III.2.8
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyediaan Serat Menurut BWP

BWP	EKOREGION	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
		HA	%	HA	%	HA	%	HA	%	HA	%
I	Dataran Aluvial	141,71	0,83	38,95	0,22	14,71	0,08	22,59	0,13		0
	Lembah Antar Perbukitan	542,58	3,19	5,38	0,03	25,95	0,15	76,10	0,44		0
II	Dataran Aluvial	155,49	0,91	402,76	2,37	150,32	0,88	1047,13	6,16	668,59	3,93
	Lembah Antar Perbukitan		0		0		0		0		0
III	Dataran Aluvial	64,42	0,37	117,25	0,69	42,63	0,25	479,13	2,82	101,25	0,59
	Lembah Antar Perbukitan	1422,08	8,37	6,26	0,03	208,06	1,22	1021,12	6,01	0,937	0,005
IV	Dataran Aluvial		0		0		0		0		0
	Lembah Antar Perbukitan	1210,41	7,12	1,32	0,007	366,69	2,15	958,89	5,64	196,74	1,15
V	Dataran Aluvial		0		0		0		0		0
	Lembah Antar Perbukitan	1420,28	8,36		0	442,67	2,60	2262,04	13,31	473,41	2,78
VI	Dataran Aluvial	145,47	0,85	425,88	2,50	114,57	0,67	593,16	3,49	73,81	0,43
	Lembah Antar Perbukitan	989,58	5,82	0,29	0,001	122,97	0,72	406,45	2,39	22,21	0,13
Total		6092,05	35,87	998,12	5,87	1488,61	8,76	6866,62	40,43	1536,97	9,05

Sumber : Hasil Analisa 2020





Tabel III.2.9
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyediaan Energi Menurut BWP

BWP	EKOREGION	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
		HA	%	HA	%	HA	%	HA	%	HA	%
I	Dataran Aluvial	156,42	0,92	14,85	0,08	7,73	0,045		0	38,95	0,22
	Lembah Antar Perbukitan	567,44	3,34	74,75	0,44	2,45	0,014		0	5,38	0,03
II	Dataran Aluvial	270,09	1,59	783,78	4,61	967,65	5,69		0	402,76	2,37
	Lembah Antar Perbukitan		0		0		0		0		0
III	Dataran Aluvial	105,76	0,62	431,24	2,53	150,43	0,88		0	117,25	0,69
	Lembah Antar Perbukitan	1628,17	9,58	1011,65	5,95	12,37	0,072		0	6,26	0,03
IV	Dataran Aluvial		0		0		0		0		0
	Lembah Antar Perbukitan	1565,87	9,22	970,12	5,71	196,74	1,15		0	1,32	0,007
V	Dataran Aluvial		0		0		0		0		0
	Lembah Antar Perbukitan	1812,71	10,67	2312,27	13,61	473,41	2,78		0		0
VI	Dataran Aluvial	197,48	1,16	579,95	3,41	149,57	0,88		0	425,88	2,50
	Lembah Antar Perbukitan	1080,96	6,36	436,81	2,57	23,46	0,13		0	0,29	0,001
Total		7384,94	43,48	6615,47	38,95	1983,85	11,68	0	0	998,12	5,87

Sumber : Hasil Analisa 2020

Tabel III.2.10
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyediaan Sumberdaya Genetik Menurut BWP

BWP	EKOREGION	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
		HA	%	HA	%	HA	%	HA	%	HA	%
I	Dataran Aluvial	141,71	0,83	14,71	0,08	22,59	0,13	38,95	0,22		0
	Lembah Antar Perbukitan	542,58	3,19	24,85	0,14	77,20	0,45	5,38	0,03		0
II	Dataran Aluvial	155,49	0,91	114,60	0,67	1082,84	6,37	1071,35	6,30		0
	Lembah Antar Perbukitan		0		0		0		0		0
III	Dataran Aluvial	64,42	0,37	41,34	0,24	480,42	2,82	218,51	1,28		0
	Lembah Antar Perbukitan	1422,08	8,37	206,09	1,21	1023,09	6,02	7,2	0,04		0
IV	Dataran Aluvial		0		0		0		0		0
	Lembah Antar Perbukitan	1202,60	7,08	363,27	2,13	970,12	5,71	198,06	1,16		0
V	Dataran Aluvial		0		0		0		0		0
	Lembah Antar Perbukitan	1420,28	8,36	392,43	2,31	2312,27	13,61	473,41	2,78		0
VI	Dataran Aluvial	145,47	0,85	52,00	0,30	655,72	3,86	499,69	2,94		0
	Lembah Antar Perbukitan	973,87	5,73	107,08	0,63	438,05	2,57	22,51	0,13		0
Total		6068,53	35,73	1316,41	7,75	7062,34	41,58	2535,10	14,92	0	0

Sumber : Hasil Analisa 2020





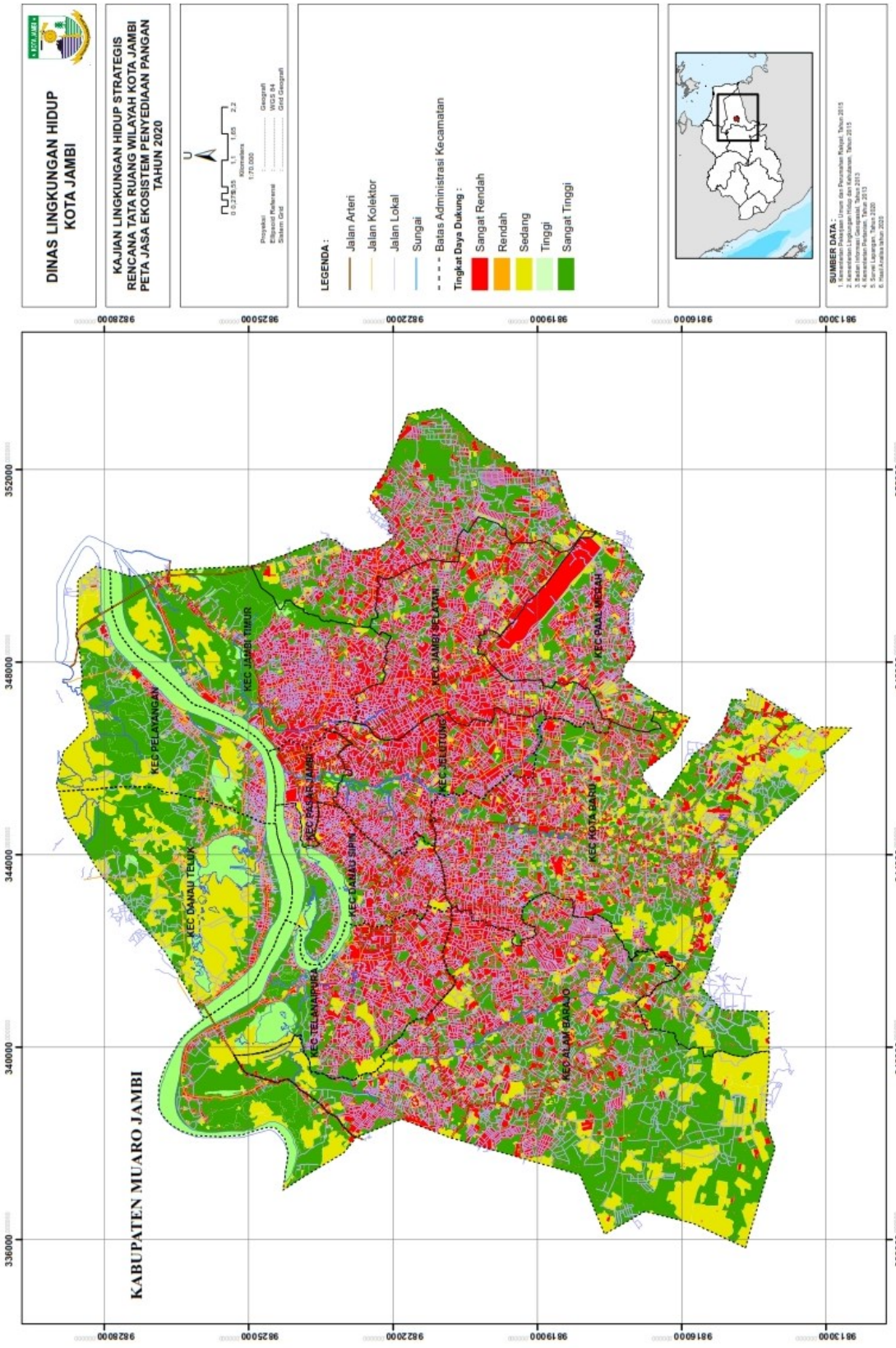

Gambar 3.2.2
Peta Jasa Ekosistem Untuk Penyediaan Pangan



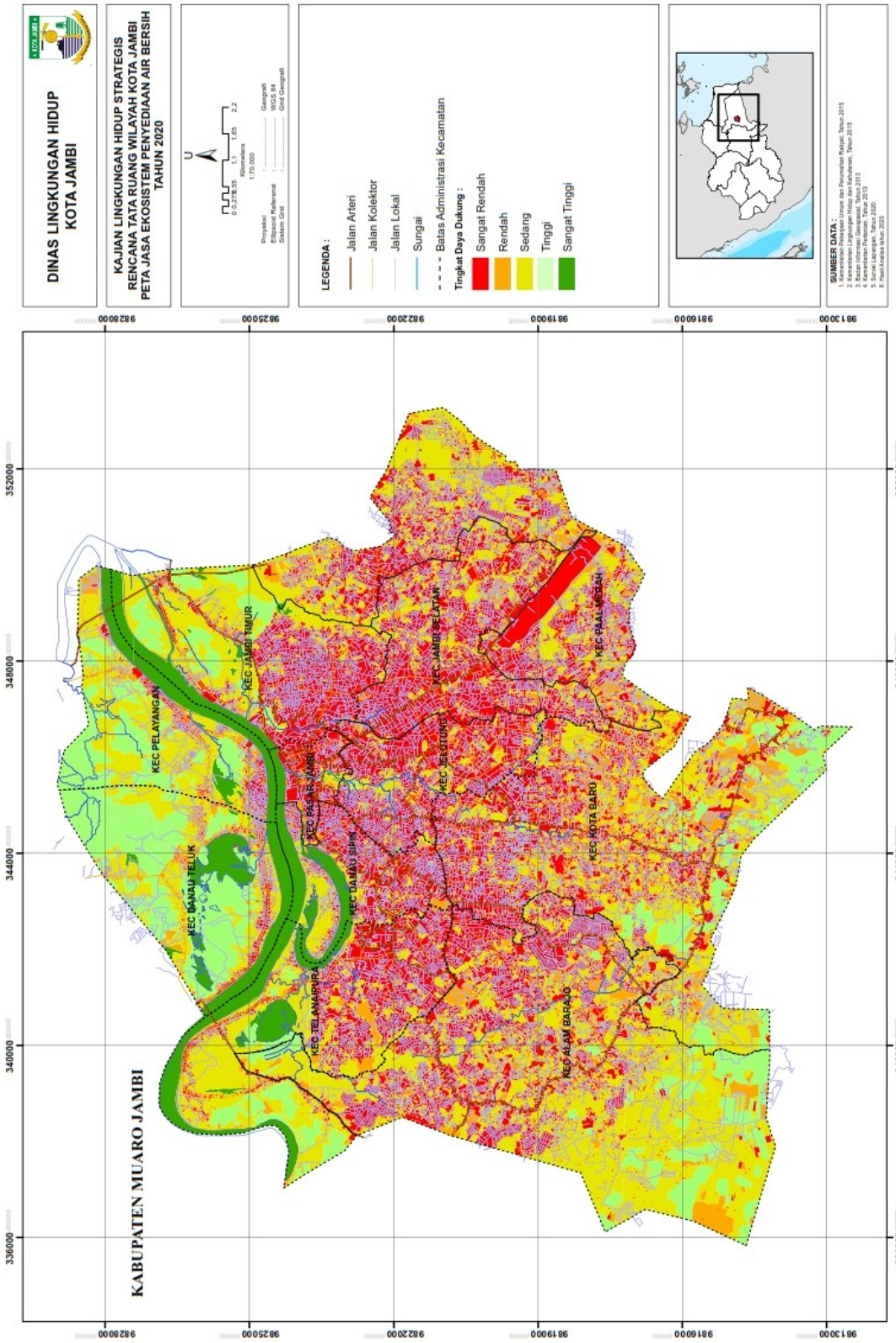

Gambar 3.2.3
Peta Jasa Ekosistem Untuk Penyediaan Air Bersih



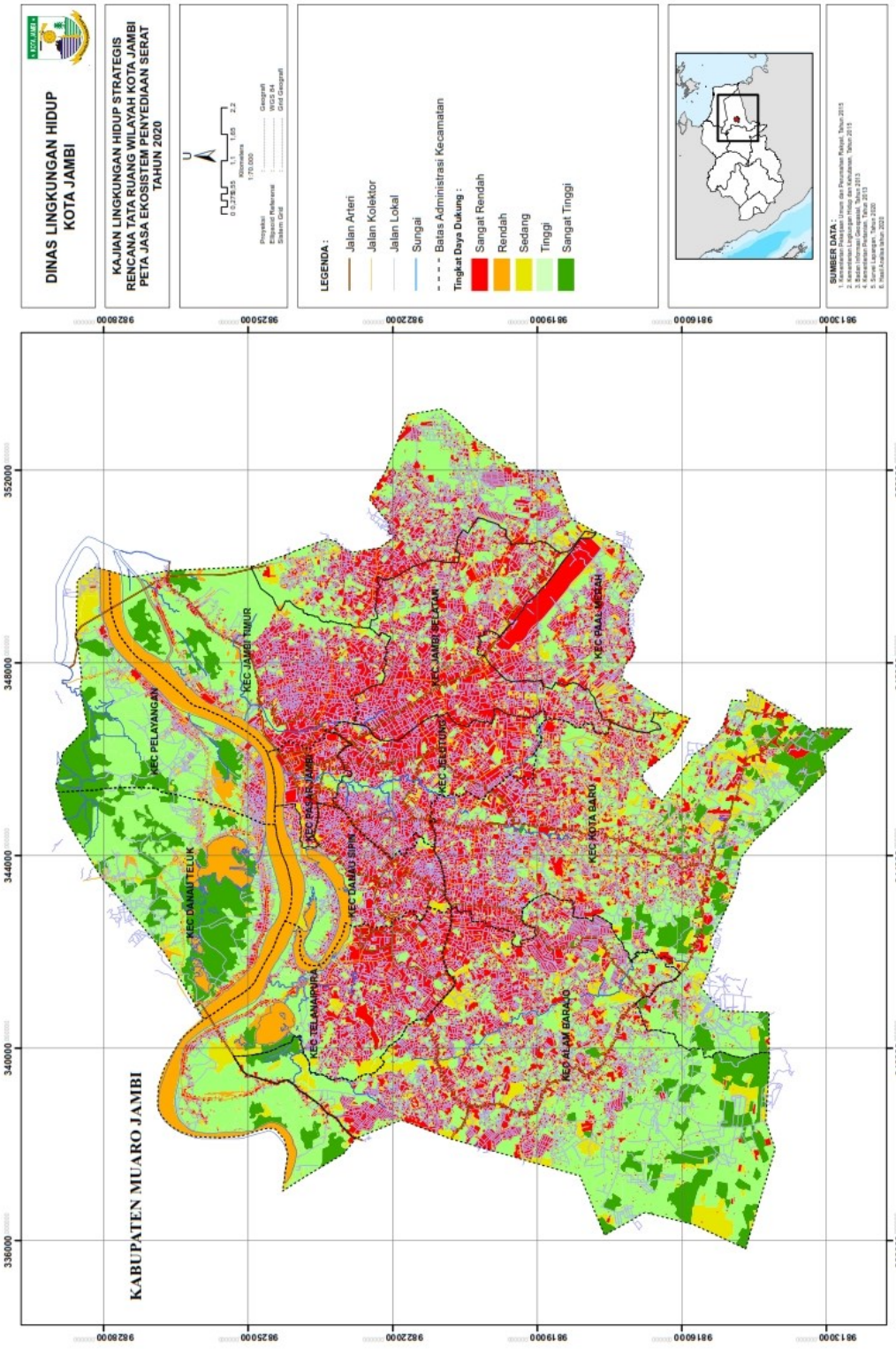

Gambar 3.2.4
Peta Jasa Ekosistem Untuk Penyediaan Serat



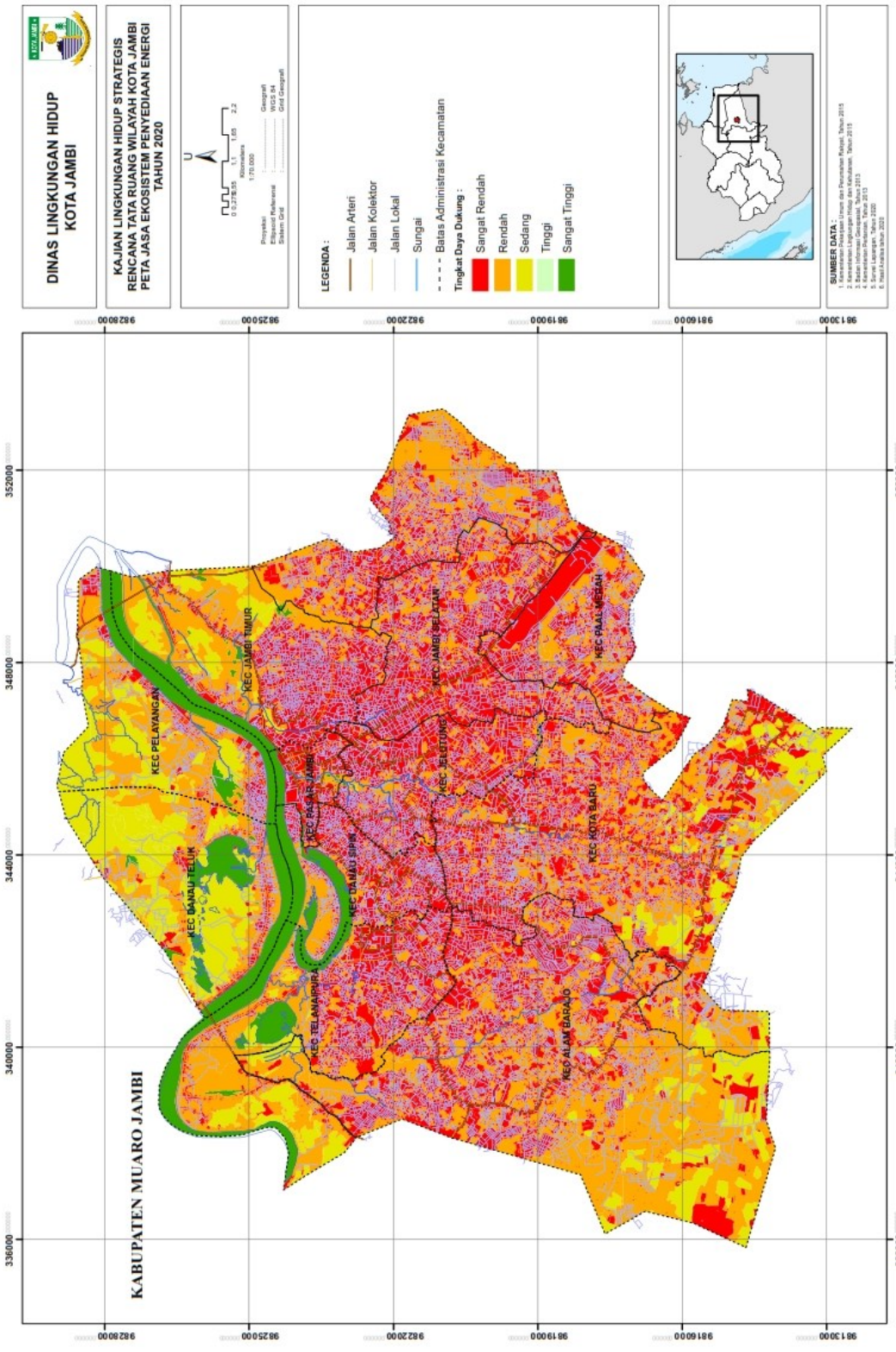

Gambar 3.2.5
Peta Jasa Ekosistem Untuk Penyediaan Energi



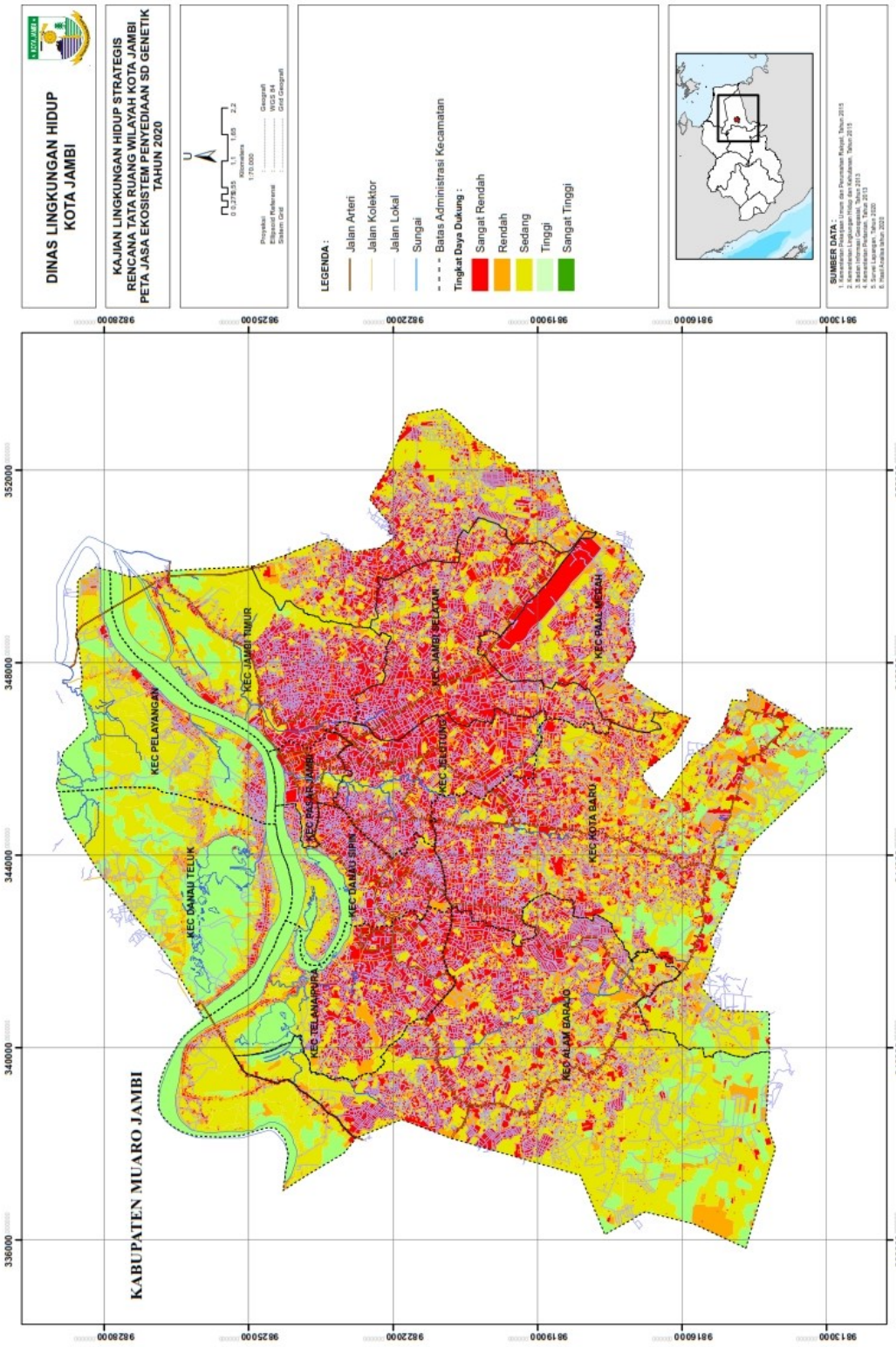

Gambar 3.2.6
Peta Jasa Ekosistem Untuk Penyediaan Sumberdaya Genetik



B. Jasa Pengaturan

Dari hasil perhitungan interval tersebut didapatkan distribusi kondisi jasa ekosistem di Wilayah Kota Jambi, yang diuraikan melalui tabel dan gambar peta berikut ini.

Tabel III.2.11
Distrubisi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Iklim

EKOREGION	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Dataran Aluvial	507,10	2,98	222,67	1,31	3226,44	18,99	843,66	4,96		0
Lembah Antar Perbukitan	5561,42	32,74	1093,74	6,44	4834,02	28,46	693,31	4,08		0
Total	6068,53	35,73	1316,41	7,75	8060,47	47,46	1536,97	9,05	0	0

Tabel III.2.12
Distrubisi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Tata Kelola Air

EKOREGION	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Dataran Aluvial	507,10	2,98	222,67	1,31	1809,84	10,65	1275,40	7,51	984,85	5,79
Lembah Antar Perbukitan	5561,42	32,74	1093,74	6,44	4805,62	28,29	708,44	4,17	13,26	0,07
Total	6068,53	35,73	1316,41	7,75	6615,47	38,95	1983,85	11,68	998,12	5,87

Tabel III.2.13
Distrubisi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Bencana

EKOREGION	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Dataran Aluvial		0	729,77	4,29	2241,58	13,19	1828,51	10,76		0
Lembah Antar Perbukitan		0	6655,17	39,18	4820,75	28,38	706,58	4,16		0
Total	0	0	7384,94	43,48	7062,34	41,58	2535,10	14,92	0	0

Tabel III.2.14
Distrubisi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pemurnian Air

EKOREGION	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Dataran Aluvial	507,10	2,98	222,67	1,31	1809,84	10,65	1275,40	7,51	984,85	5,79
Lembah Antar Perbukitan	5561,42	32,74	1093,74	6,44	4820,75	28,38	693,31	4,08	13,26	0,07
Total	6068,53	35,73	1316,41	7,75	6630,60	39,04	1968,71	11,59	998,12	5,87





Tabel III.2.15
Distrubisi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pengaturan Limbah

EKOREGION	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Dataran Aluvial	507,10	2,98	222,67	1,31	2653,50	15,62	431,74	2,54	984,85	5,79
Lembah Antar Perbukitan	5561,42	32,74	63,26	0,37	6529,41	38,44	15,13	0,08	13,26	0,07
Total	6068,53	35,73	285,93	1,68	9182,92	54,07	446,87	2,63	998,12	5,877

Tabel III.2.16
Distrubisi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Kualitas Udara

EKOREGION	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Dataran Aluvial	507,10	2,98	222,67	1,31	3226,44	18,99	843,66	4,96		0
Lembah Antar Perbukitan	5561,42	32,74	1093,74	6,44	4834,02	28,46	693,31	4,08		0
Total	6068,53	35,73	1316,41	7,75	8060,47	47,46	1536,97	9,05	0	0

Tabel III.2.17
Distrubisi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyerbukan Alami

EKOREGION	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Dataran Aluvial	507,10	2,98	1207,52	7,11		0	3085,25	18,16		0
Lembah Antar Perbukitan	5569,23	32,79	1099,20	6,47		0	5514,07	32,46		0
Total	6076,34	35,78	2306,73	13,58	0	0	8599,32	50,63	0	0

Tabel III.2.18
Distrubisi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pengendalian Hama Penyakit

EKOREGION	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Dataran Aluvial	507,10	2,98	1207,529	7,11	1809,84	10,65	1275,40	7,51		0
Lembah Antar Perbukitan	5561,42	32,74	1107,011	6,51	4805,62	28,29	708,44	4,17		0
Total	6068,53	35,73	2314,54	13,62	6615,47	38,95	1983,85	11,68	0	0



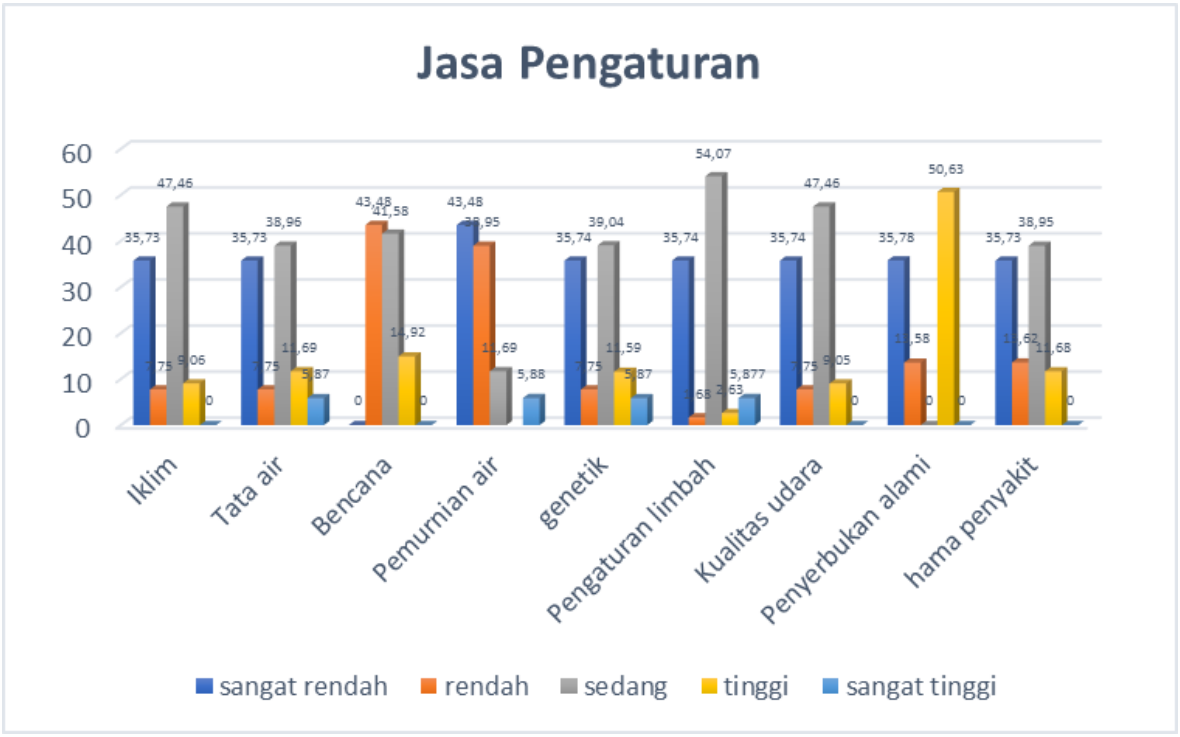

Gambar 3.2.7
Grafik Jasa Ekosistem Pengaturan

Tabel III.2.19
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Menurut BWP

BWP	EKOREGION	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
		HA	%	HA	%	HA	%	HA	%	HA	%
I	Dataran Aluvial	141,71	0,83	14,71	0,08	61,54	0,36		0		0
	Lembah Antar Perbukitan	542,58	3,19	24,85	0,14	82,58	0,48		0		0
II	Dataran Aluvial	155,49	0,91	114,60	0,67	1485,61	8,74	668,59	3,93		0
	Lembah Antar Perbukitan		0		0		0		0		0
III	Dataran Aluvial	64,42	0,37	41,34	0,24	597,67	3,51	101,258	0,59		0
	Lembah Antar Perbukitan	1422,08	8,37	206,09	1,21	1029,36	6,06	0,937	0,005		0
IV	Dataran Aluvial		0		0		0		0		0
	Lembah Antar Perbukitan	1202,60	7,08	363,27	2,13	971,45	5,72	196,74	1,15		0
V	Dataran Aluvial		0		0		0		0		0
	Lembah Antar Perbukitan	1420,28	8,36	392,43	2,31	2312,27	13,61	473,41	2,78		0
VI	Dataran Aluvial	145,47	0,85	52,00	0,30	1081,61	6,36	73,811	0,43		0
	Lembah Antar Perbukitan	973,87	5,73	107,08	0,63	438,35	2,58	22,219	0,13		0
Total		**6068,53**	**35,73**	**1316,41**	**7,75**	**8060,47**	**47,463**	**1536,975**	**9,05**	**0**	**0**



Tabel III.2.20
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air Menurut BWP

BWP	EKOREGION	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
		HA	%	HA	%	HA	%	HA	%	HA	%
I	Dataran Aluvial	141,71	0,83	14,71	0,086	14,85	0,08	7,73	0,04	38,95	0,22
	Lembah Antar Perbukitan	542,58	3,19	24,85	0,14	74,75	0,44	2,4	0,01	5,38	0,031
II	Dataran Aluvial	155,49	0,91	114,60	0,67	783,78	4,61	967,65	5,69	402,76	2,37
	Lembah Antar Perbukitan		0		0		0		0		0
III	Dataran Aluvial	64,42	0,37	41,34	0,24	431,24	2,53	150,43	0,88	117,25	0,69
	Lembah Antar Perbukitan	1422,08	8,37	206,09	1,21	1011,65	5,95	12,37	0,072	6,26	0,036
IV	Dataran Aluvial		0		0		0		0		0
	Lembah Antar Perbukitan	1202,60	7,08	363,27	2,13	970,12	5,71	196,74	1,15	1,32	0,007
V	Dataran Aluvial		0		0		0		0		0
	Lembah Antar Perbukitan	1420,28	8,36	392,43	2,31	2312,27	13,61	473,41	2,78		0
VI	Dataran Aluvial	145,47	0,85	52,00	0,30	579,95	3,41	149,57	0,88	425,88	2,50
	Lembah Antar Perbukitan	973,87	5,73	107,08	0,63	436,81	2,57	23,46	0,13	0,29	0,001
Total		**6068,53**	**35,73**	**1316,41**	**7,75**	**6615,47**	**38,95**	**1983,85**	**11,68**	**998,12**	**5,87**

Tabel III.2.21
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pengaturan Bencana Menurut BWP

BWP	EKOREGION	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
		HA	%	HA	%	HA	%	HA	%	HA	%
I	Dataran Aluvial		0	156,42	0,92	22,59	0,13	38,95	0,22		0
	Lembah Antar Perbukitan		0	567,44	3,34	77,202	0,45	5,38	0,03		0
II	Dataran Aluvial		0	270,09	1,59	1082,84	6,37	1071,35	6,30		0
	Lembah Antar Perbukitan		0		0		0		0		0
III	Dataran Aluvial		0	105,76	0,62	480,42	2,82	218,51	1,28		0
	Lembah Antar Perbukitan		0	1628,17	9,58	1023,09	6,02	7,2	0,04		0
IV	Dataran Aluvial		0		0		0		1		0
	Lembah Antar Perbukitan		0	1565,87	9,22	970,12	5,71	198,06	1,16		0
V	Dataran Aluvial		0		0		0		0		0
	Lembah Antar Perbukitan		0	1812,71	10,67	2312,27	13,61	473,41	2,78		0
VI	Dataran Aluvial		0	197,48	1,16	655,72	3,86	499,69	2,94		0
	Lembah Antar Perbukitan		0	1080,96	6,36	438,05	2,57	22,51	0,13		0
Total		**0**	**0**	**7384,94**	**43,48**	**7062,34**	**41,58**	**2535,10**	**14,92**	**0**	**0**





Tabel III.2.22
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pemurnian Air Menurut BWP

BWP	EKOREGION	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
		HA	%	HA	%	HA	%	HA	%	HA	%
I	Dataran Aluvial	141,71	0,83	14,71	0,086	14,85	0,08	7,73	0,04	38,95	0,22
	Lembah Antar Perbukitan	542,58	3,19	24,85	0,14	77,20	0,45		0	5,38	0,031
II	Dataran Aluvial	155,49	0,91	114,60	0,67	783,78	4,61	967,65	5,69	402,76	2,37
	Lembah Antar Perbukitan		0		0		0		0		0
III	Dataran Aluvial	64,42	0,37	41,34	0,24	431,24	2,53	150,43	0,88	117,25	0,69
	Lembah Antar Perbukitan	1422,08	8,37	206,09	1,21	1023,09	6,02	0,93	0,005	6,26	0,03
IV	Dataran Aluvial		0		0		0		0		0
	Lembah Antar Perbukitan	1202,60	7,08	363,27	2,13	970,12	5,71	196,74	1,15	1,32	0,007
V	Dataran Aluvial		0		0		0		0		0
	Lembah Antar Perbukitan	1420,28	8,36	392,43	2,31	2312,27	13,61	473,41	2,78		0
VI	Dataran Aluvial	145,47	0,85	52,00	0,30	579,95	3,41	149,57	0,88	425,88	2,50
	Lembah Antar Perbukitan	973,87	5,73	107,08	0,63	438,05	2,57	22,21	0,13	0,29	0,0017
Total		**6068,53**	**35,73**	**1316,41**	**7,75**	**6630,60**	**39,04**	**1968,71**	**11,59**	**998,12**	**5,87**

Tabel III.2.23
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Air Limbah Menurut BWP

BWP	EKOREGION	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
		HA	%	HA	%	HA	%	HA	%	HA	%
I	Dataran Aluvial	141,71	0,83	14,71	0,08	14,85	0,08	7,73	0,04	38,95	0,22
	Lembah Antar Perbukitan	542,58	3,19	5,13	0,03	94,47	0,55	2,45	0,01	5,38	0,03
II	Dataran Aluvial	155,49	0,91	114,60	0,67	1452,37	8,55	299,06	1,76	402,76	2,37
	Lembah Antar Perbukitan		0		0		0		0		0
III	Dataran Aluvial	64,42	0,37	41,34	0,24	532,50	3,13	49,17	0,28	117,25	0,69
	Lembah Antar Perbukitan	1422,08	8,37	4,78	0,02	1213,9	7,14	11,44	0,06	6,26	0,03
IV	Dataran Aluvial		0		0				0		0
	Lembah Antar Perbukitan	1202,60	7,08	13,36	0,07	1516,77	8,93		0	1,32	0,007
V	Dataran Aluvial		0		0		0		0		0
	Lembah Antar Perbukitan	1420,28	8,36	21,19	0,12	3156,93	18,58		0		0
VI	Dataran Aluvial	145,47	0,85	52,00	0,30	653,77	3,84	75,76	0,44	425,88	2,50
	Lembah Antar Perbukitan	973,87	5,73	18,79	0,11	547,33	3,22	1,24	0,007	0,29	0,001
Total		**6068,53**	**35,73**	**285,93**	**1,68**	**9182,92**	**54,07**	**446,87**	**2,63**	**998,12**	**5,87**





Tabel III.2.24
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Kualitas Udara Menurut BWP

BWP	EKOREGION	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
		HA	%	HA	%	HA	%	HA	%	HA	%
I	Dataran Aluvial	141,71	0,83	14,71	0,08	61,54	0,36		0		0
	Lembah Antar Perbukitan	542,58	3,19	24,85	0,14	82,58	0,48		0		0
II	Dataran Aluvial	155,49	0,91	114,60	0,67	1485,61	8,74	668,59	3,93		0
	Lembah Antar Perbukitan		0		0		0		0		0
III	Dataran Aluvial	64,42	0,37	41,34	0,24	597,67	3,51	101,25	0,59		0
	Lembah Antar Perbukitan	1422,08	8,37	206,09	1,21	1029,36	6,06	0,93	0,005		0
IV	Dataran Aluvial		0		0		0		0		0
	Lembah Antar Perbukitan	1202,60	7,08	363,27	2,13	971,45	5,72	196,74	1,15		0
V	Dataran Aluvial		0		0		0		0		0
	Lembah Antar Perbukitan	1420,28	8,36	392,43	2,31	2312,27	13,61	473,41	2,78		0
VI	Dataran Aluvial	145,47	0,85	52,00	0,30	1081,61	6,36	73,81	0,43		0
	Lembah Antar Perbukitan	973,87	5,73	107,08	0,63	438,35	2,58	22,21	0,13		0
Total		6068,53	35,73	1316,41	7,75	8060,47	47,46	1536,97	9,05	0	0

Tabel III.2.25
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyerbukan Alami Menurut BWP

BWP	EKOREGION	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
		HA	%	HA	%	HA	%	HA	%	HA	%
I	Dataran Aluvial	141,71	0,83	53,66	0,31		0	22,59	0,13		0
	Lembah Antar Perbukitan	542,58	3,19	30,24	0,17		0	77,20	0,45		0
II	Dataran Aluvial	155,49	0,91	517,36	3,04		0	1751,44	10,31		0
	Lembah Antar Perbukitan		0		0		0		0		0
III	Dataran Aluvial	64,42	0,37	158,59	0,93		0	581,68	3,42		0
	Lembah Antar Perbukitan	1422,08	8,37	212,35	1,25		0	1024,03	6,02		0
IV	Dataran Aluvial		0		0		0		0		0
	Lembah Antar Perbukitan	1210,41	7,12	356,78	2,10		0	1166,86	6,87		0
V	Dataran Aluvial		0		0		0		0		0
	Lembah Antar Perbukitan	1420,28	8,36	392,43	2,31		0	2785,69	16,40		0
VI	Dataran Aluvial	145,47	0,85	477,89	2,81		0	729,53	4,29		0
	Lembah Antar Perbukitan	973,87	5,73	107,38	0,63		0	460,27	2,71		0
Total		6076,34	35,78	2306,73	13,58	0	0	8599,32	50,63	0	0





Tabel III.2.26
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pengendalian Hama Menurut BWP

BWP	EKOREGION	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
		HA	%	HA	%	HA	%	HA	%	HA	%
I	Dataran Aluvial	141,71	0,83	53,66	0,31	14,85	0,08	7,73	0,04		0
	Lembah Antar Perbukitan	542,58	3,19	30,24	0,17	74,75	0,44	2,45	0,01		0
II	Dataran Aluvial	155,49	0,91	517,36	3,04	783,78	4,61	967,65	5,69		0
	Lembah Antar Perbukitan		0		0		0		0		0
III	Dataran Aluvial	64,42	0,37	158,59	0,93	431,24	2,53	150,43	0,88		0
	Lembah Antar Perbukitan	1422,08	8,37	212,35	1,25	1011,65	5,95	12,37	0,07		0
IV	Dataran Aluvial		0		0		0		0		0
	Lembah Antar Perbukitan	1202,60	7,08	364,59	2,14	970,12	5,71	196,74	1,15		0
V	Dataran Aluvial		0		0		0		0		0
	Lembah Antar Perbukitan	1420,28	8,36	392,43	2,31	2312,27	13,61	473,41	2,78		0
VI	Dataran Aluvial	145,47	0,85	477,89	2,81	579,95	3,41	149,57	0,88		0
	Lembah Antar Perbukitan	973,87	5,73	107,38	0,63	436,81	2,57	23,46	0,13		0
Total		6068,53	35,73	2314,54	13,62	6615,47	38,95	1983,85	11,68	0	0



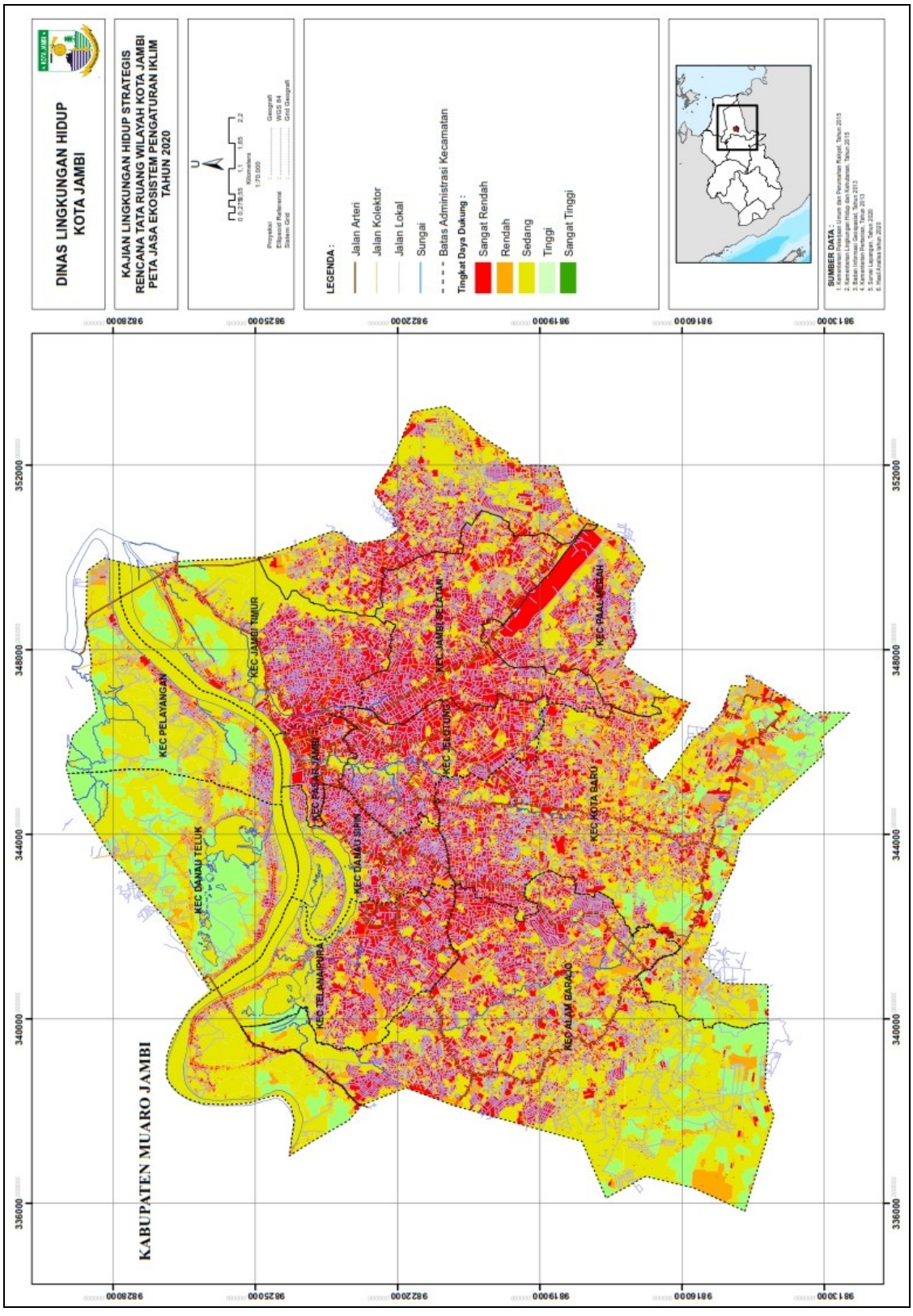

Gambar 3.2.8
Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim

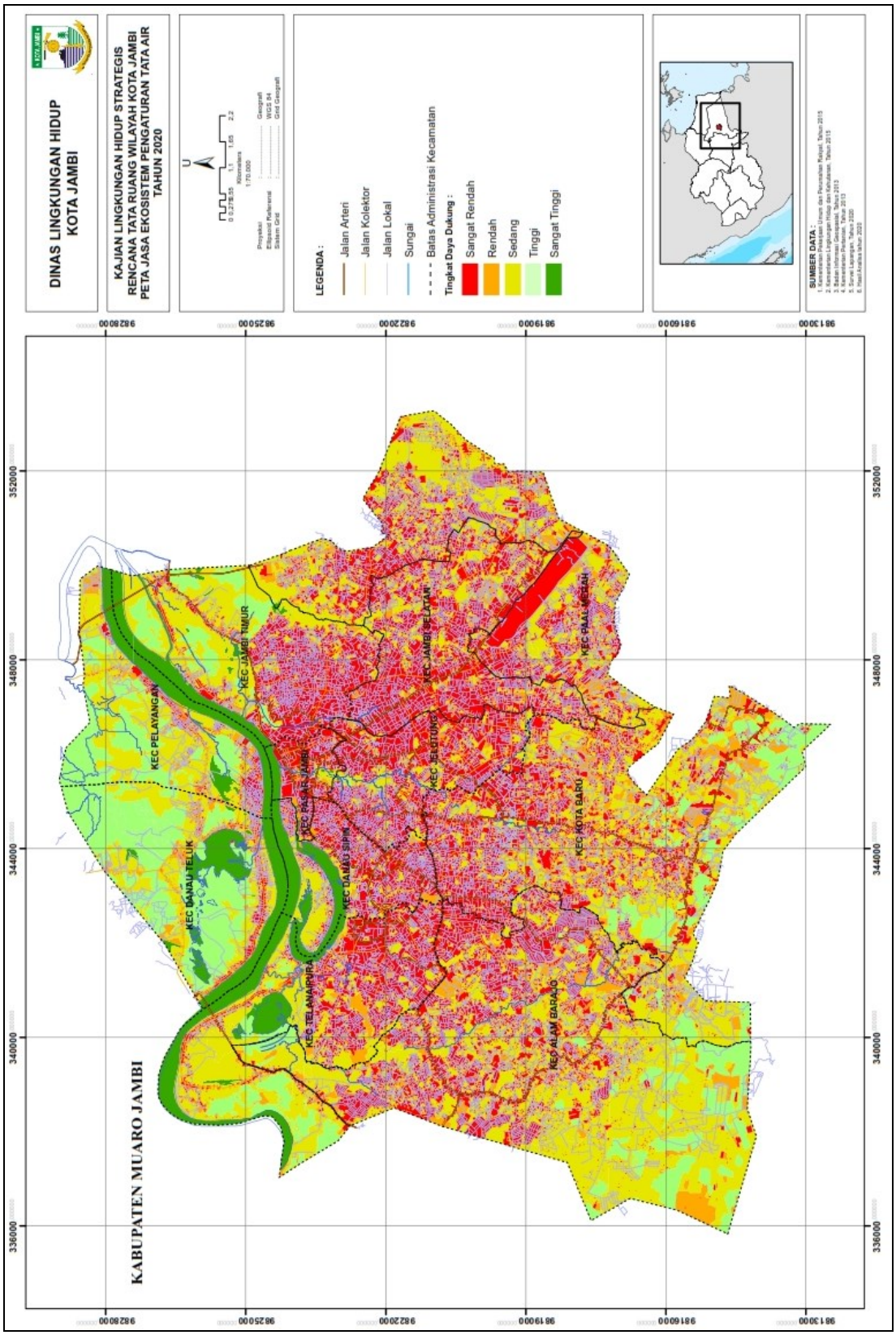

Gambar 3.2.9
Peta Jasa Ekosistem Tata Kelola Air

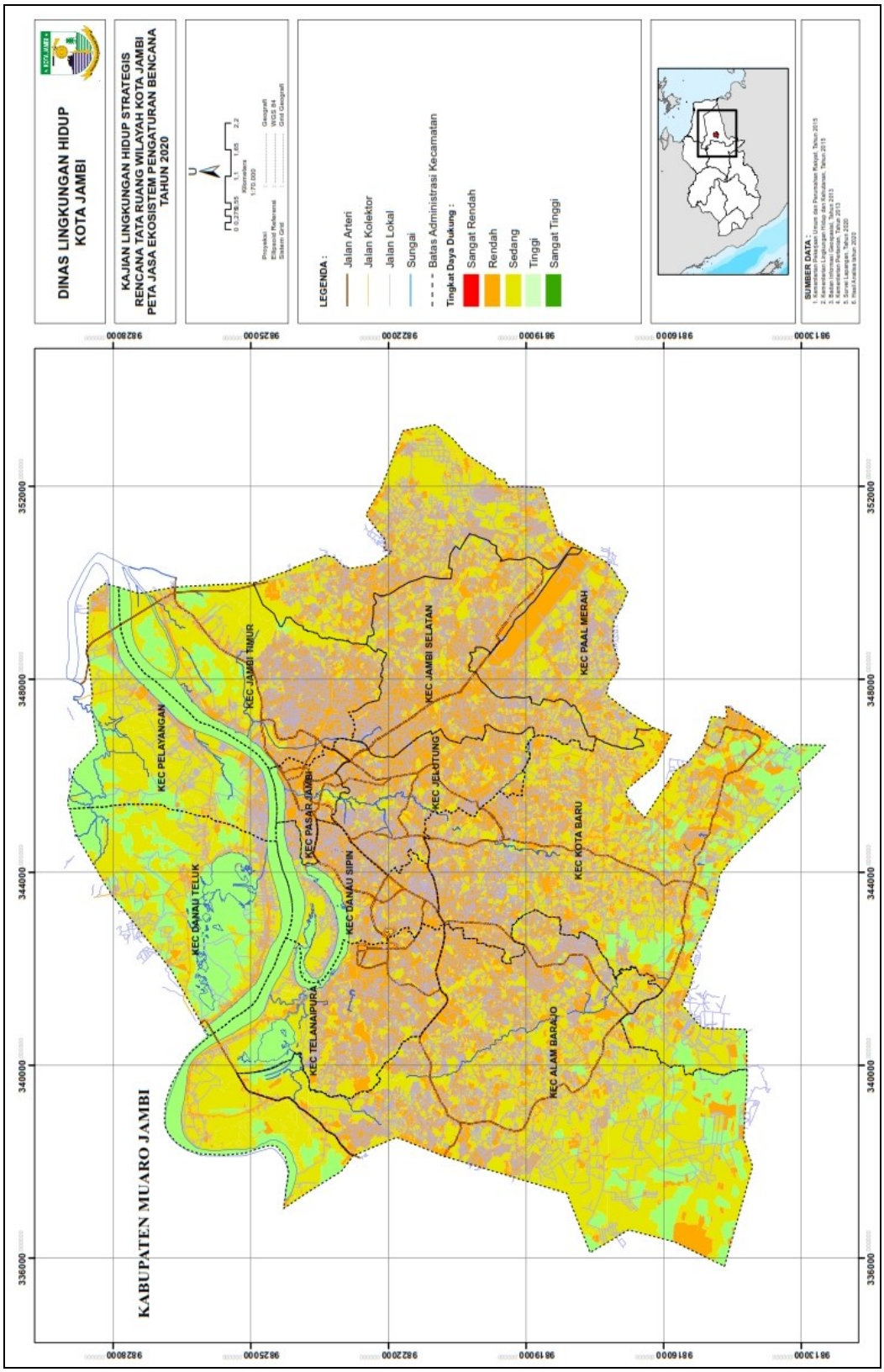

Gambar 3.2.10
Peta Jasa Ekosistem Bencana



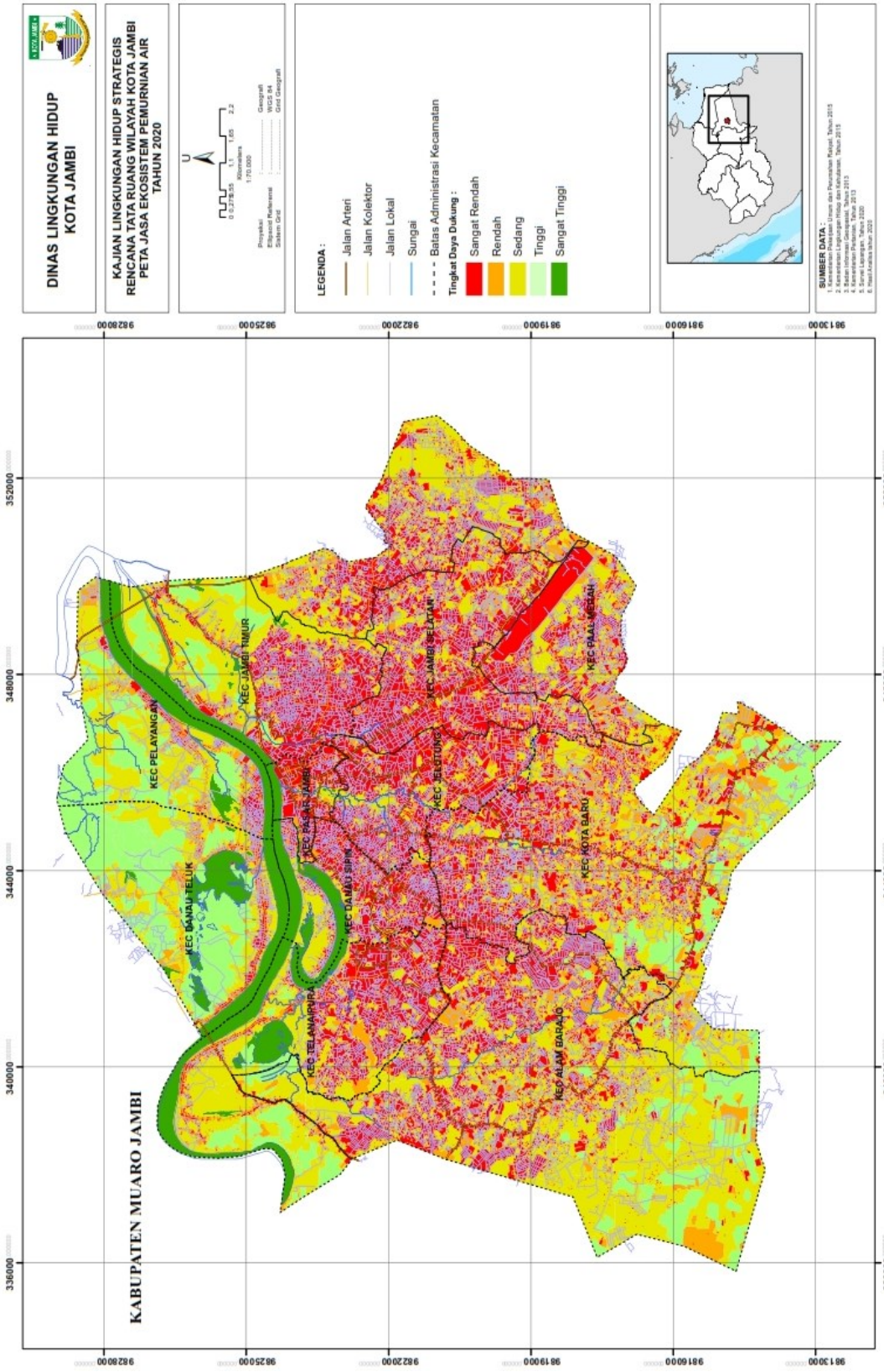

Gambar 3.2.11
Peta Jasa Ekosistem Pemurnian Air



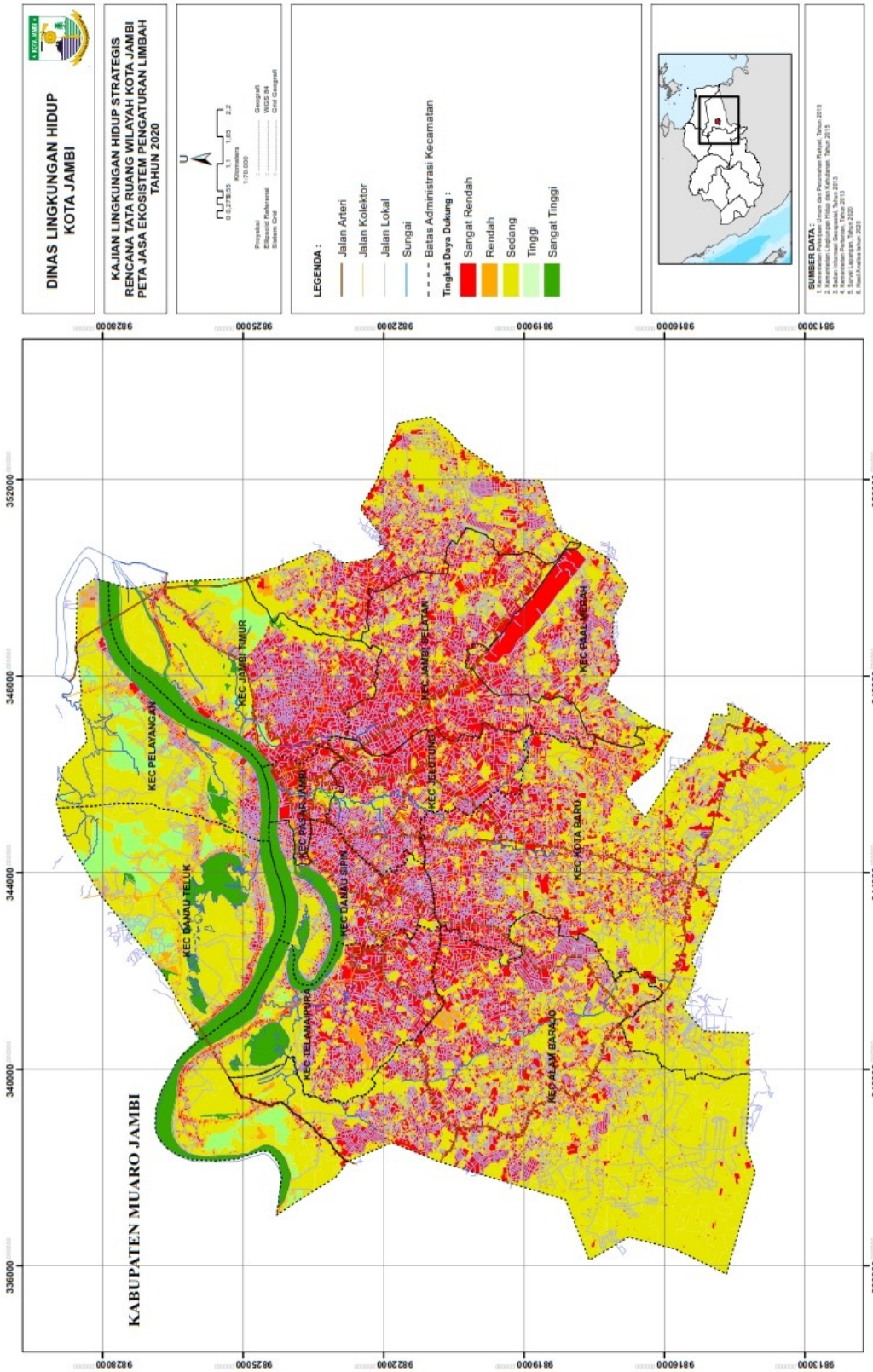

Gambar 3.2.12
Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Limbah



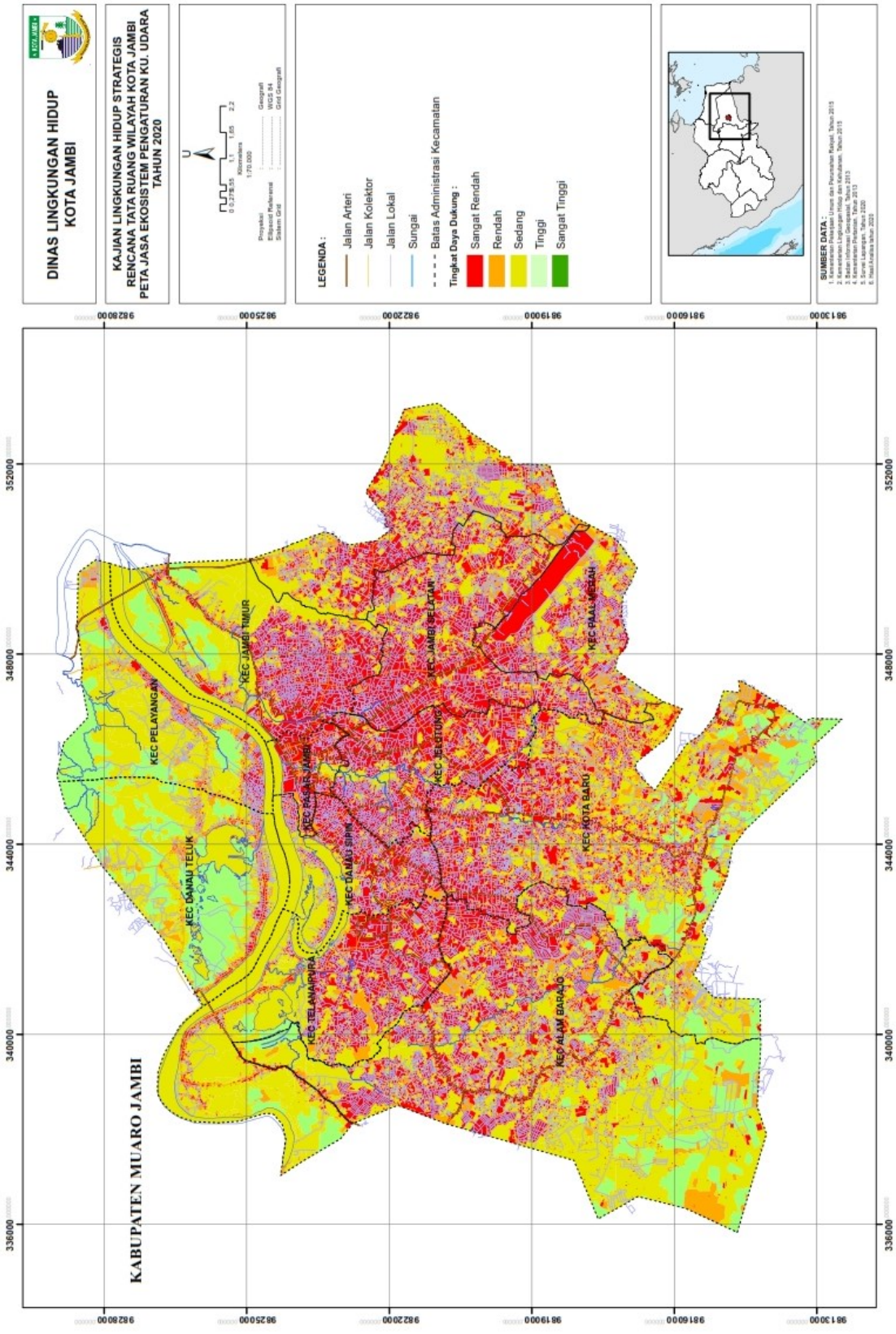

Gambar 3.2.13
Peta Pengaturan IKU Udara Kota Jambi



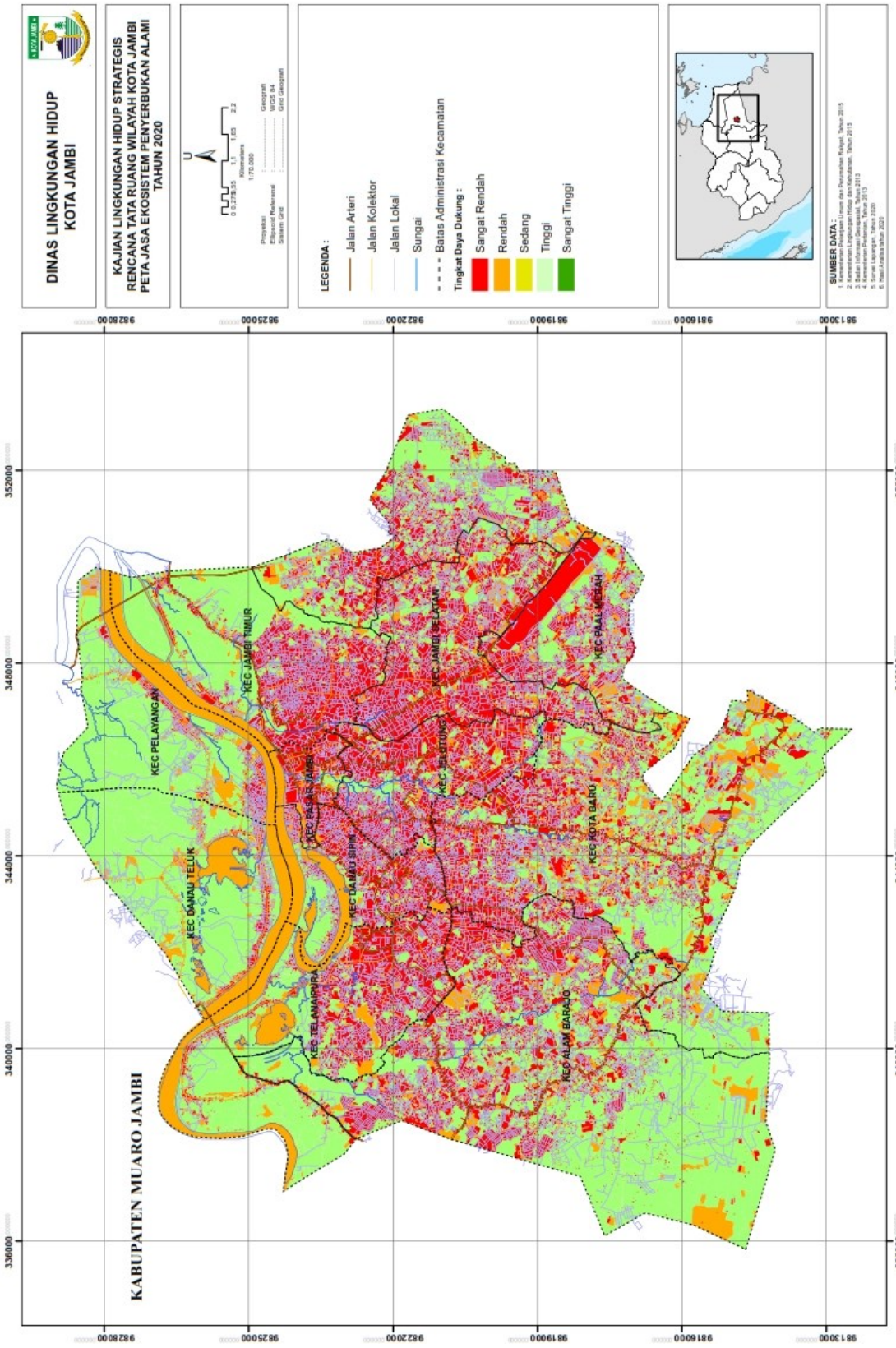

Gambar 3.2.14
Peta Jasa Ekosistem Pengendalian Penyerbukan Alami



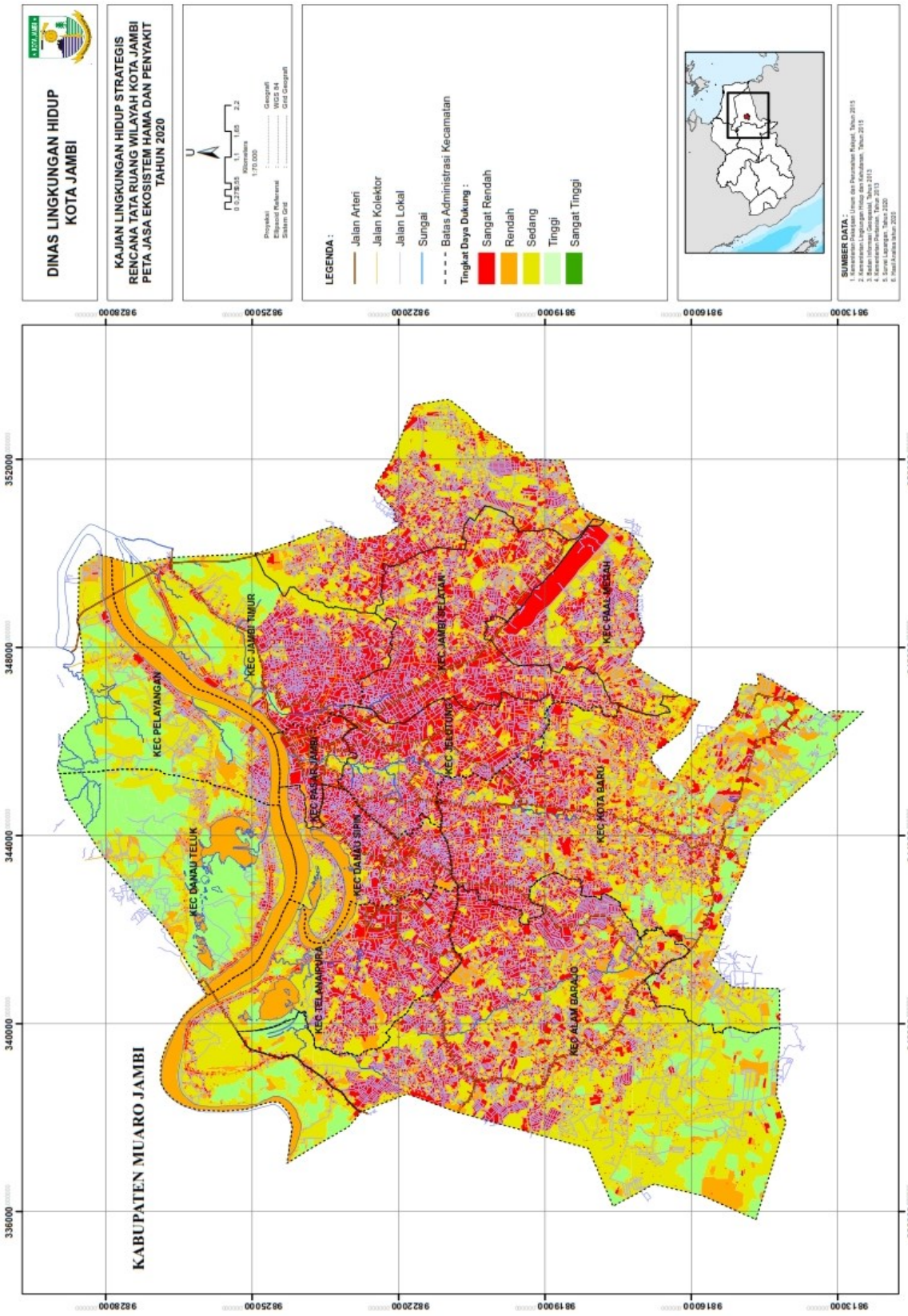

Gambar 3.2.15
Peta Jasa Ekosistem Pengendalian Hama Penyakit



C. Jasa Budaya

Dari hasil perhitungan interval tersebut didapatkan distribusi kondisi jasa ekosistem di Wilayah Kota Jambi, yang diuraikan melalui tabel dan gambar peta berikut ini.

Tabel III.2.27
Distrubisi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Tempat Tinggal

EKOREGION	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
	HA	%	HA	%	HA	%	HA	%	HA	%
Dataran Aluvial		0	100,40	0,59	2590,48	15,25	1710,26	10,07	398,72	2,34
Lembah Antar Perbukitan		0	151,60	0,89	2680,16	15,78	4709,48	27,73	4641,26	27,32
Total	0	0	252,00	1,48	5270,64	31,03	6419,74	37,80	5039,99	29,67

Tabel III.2.28
Distrubisi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Rekreasi

EKOREGION	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
	HA	%	HA	%	HA	%	HA	%	HA	%
Dataran Aluvial	322,24	1,89	3059,27	18,01	1,76	0,01	431,74	2,54	984,85	5,79
Lembah Antar Perbukitan	1189,88	7,00	10814,47	63,68	149,75	0,88	15,13	0,08	13,26	0,07
Total	1512,13	8,90	13873,74	81,69	151,51	0,89	446,87	2,63	998,12	5,87

Tabel III.2.29
Distrubisi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Estetika

EKOREGION	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
	HA	%	HA	%	HA	%	HA	%	HA	%
Dataran Aluvial	322,24	1,89	2952,65	17,38	108,37	0,63	431,74	2,54	984,85	5,79
Lembah Antar Perbukitan	1189,88	7,00	10044,06	59,14	920,16	5,41	15,13	0,08	13,26	0,07
Total	1512,13	8,90	12996,71	76,53	1028,54	6,05	446,87	2,63	998,12	5,87

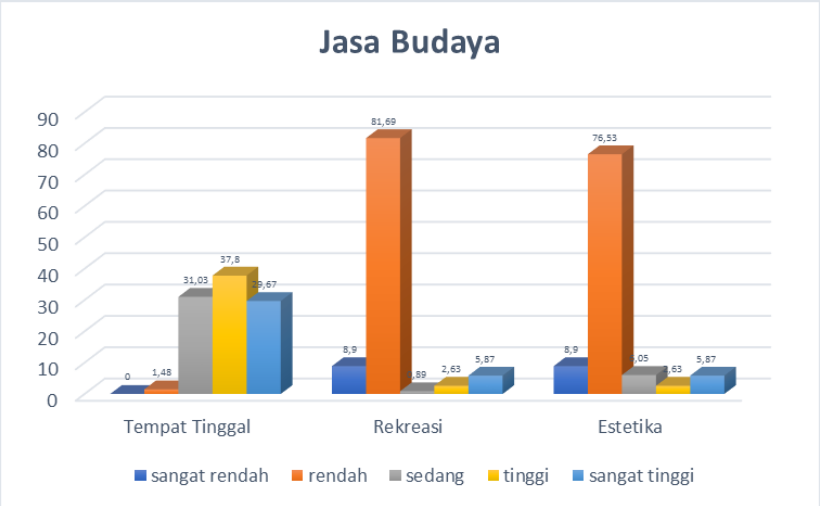

Gambar 3.2.16
Grafik Jasa Ekosistem Jasa Budaya





Tabel III.2.30
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Tempat Tinggal Menurut BWP

BWP	EKOREGION	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
		HA	%	HA	%	HA	%	HA	%	HA	%
I	Dataran Aluvial		0	0,07	0,0004	133,44	0,78	14,85	0,08	69,60	0,40
	Lembah Antar Perbukitan		0	6,23	0,03	157,61	0,92	73,65	0,43	412,52	2,42
II	Dataran Aluvial		0	36,09	0,21	1496,56	8,81	748,06	4,40	143,57	0,84
	Lembah Antar Perbukitan		0		0		0		0		0
III	Dataran Aluvial		0	1,39	0,008	313,55	1,84	429,95	2,53	59,79	0,35
	Lembah Antar Perbukitan		0	6,75	0,03	462,42	2,72	1009,68	5,94	1179,61	6,94
IV	Dataran Aluvial		0		0		0		0		0
	Lembah Antar Perbukitan		0	16,78	0,09	750,85	4,42	958,89	5,64	1007,53	5,93
V	Dataran Aluvial		0		0		0		0		0
	Lembah Antar Perbukitan		0	71,43	0,42	1025,86	6,04	2262,04	13,31	1239,07	7,29
VI	Dataran Aluvial		0	62,84	0,37	646,91	3,80	517,39	3,04	125,75	0,74
	Lembah Antar Perbukitan		0	50,39	0,29	283,40	1,66	405,21	2,38	802,52	4,72
Total		**0**	**0**	**252,00**	**1,48**	**5270,64**	**31,03**	**6419,74**	**37,80**	**5039,99**	**29,67**

Tabel III.2.31
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Rekreasi Menurut BWP

BWP	EKOREGION	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
		HA	%	HA	%	HA	%	HA	%	HA	%
I	Dataran Aluvial	14,71	0,08	155,43	0,91	1,13	0,006	7,73	0,04	38,95	0,22
	Lembah Antar Perbukitan	25,95	0,15	615,38	3,62	0,85	0,005	2,45	0,01	5,38	0,03
II	Dataran Aluvial	150,32	0,88	1571,52	9,25	0,62	0,003	299,06	1,76	402,76	2,37
	Lembah Antar Perbukitan		0		0		0		0		0
III	Dataran Aluvial	42,63	0,25	595,63	3,50		0	49,17	0,28	117,25	0,69
	Lembah Antar Perbukitan	208,06	1,22	2292,44	13,49	140,26	0,82	11,44	0,06	6,26	0,03
IV	Dataran Aluvial		0		0		0		0		0
	Lembah Antar Perbukitan	374,50	2,20	2353,56	13,85	4,67	0,02		0	1,32	0,007
V	Dataran Aluvial		0		0		0		0		0
	Lembah Antar Perbukitan	442,67	2,60	4151,76	24,44	3,97	0,02		0		0
VI	Dataran Aluvial	114,57	0,67	736,67	4,33		0	75,76	0,44	425,88	2,50
	Lembah Antar Perbukitan	138,69	0,81	1401,30	8,25		0	1,24	0,007	0,29	0,001
Total		1512,13	8,90	13873,73	81,69	151,51	0,89	446,87	2,631	998,12	5,87





Tabel III.2.32
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Estetika Menurut BWP

BWP	EKOREGION	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
		HA	%	HA	%	HA	%	HA	%	HA	%
I	Dataran Aluvial	14,71	0,08	84,45	0,49	72,11	0,42	7,73	0,04	38,95	0,22
	Lembah Antar Perbukitan	25,95	0,15	486,18	2,86	130,05	0,76	2,45	0,01	5,38	0,03
II	Dataran Aluvial	150,32	0,88	1560,23	9,18	11,92	0,07	299,06	1,76	402,76	2,37
	Lembah Antar Perbukitan		0		0		0		0		0
III	Dataran Aluvial	42,63	0,25	591,00	3,48	4,62	0,02	49,17	0,28	117,25	0,69
	Lembah Antar Perbukitan	208,06	1,22	2190,23	12,89	242,47	1,42	11,44	0,06	6,26	0,036
IV	Dataran Aluvial		0		0		0		0		0
	Lembah Antar Perbukitan	374,50	2,20	2163,16	12,73	195,07	1,14		0	1,32	0,007
V	Dataran Aluvial		0		0		0		0		0
	Lembah Antar Perbukitan	442,67	2,60	3974,52	23,40	181,21	1,06		0		0
VI	Dataran Aluvial	114,57	0,67	716,95	4,22	19,71	0,11	75,76	0,44	425,88	2,50
	Lembah Antar Perbukitan	138,69	0,81	1229,95	7,24	171,35	1,00	1,24	0,007	0,29	0,001
Total		**1512,13**	**8,90**	**12996,71**	**76,53**	**1028,54**	**6,05**	**446,87**	**2,63**	**998,12**	**5,87**





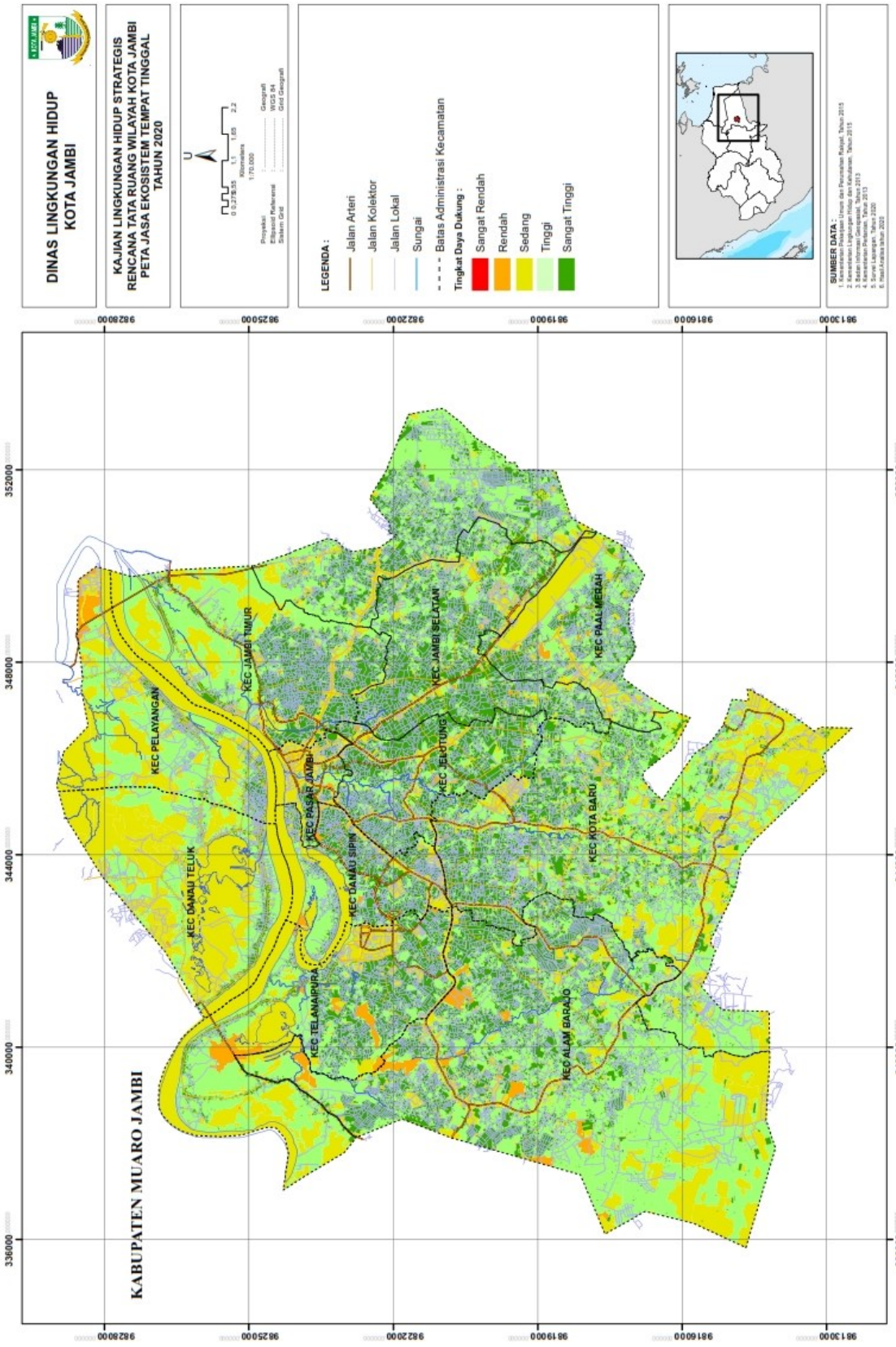

Gambar 3.2.17
Peta Jasa Ekosistem Tempat Tinggal



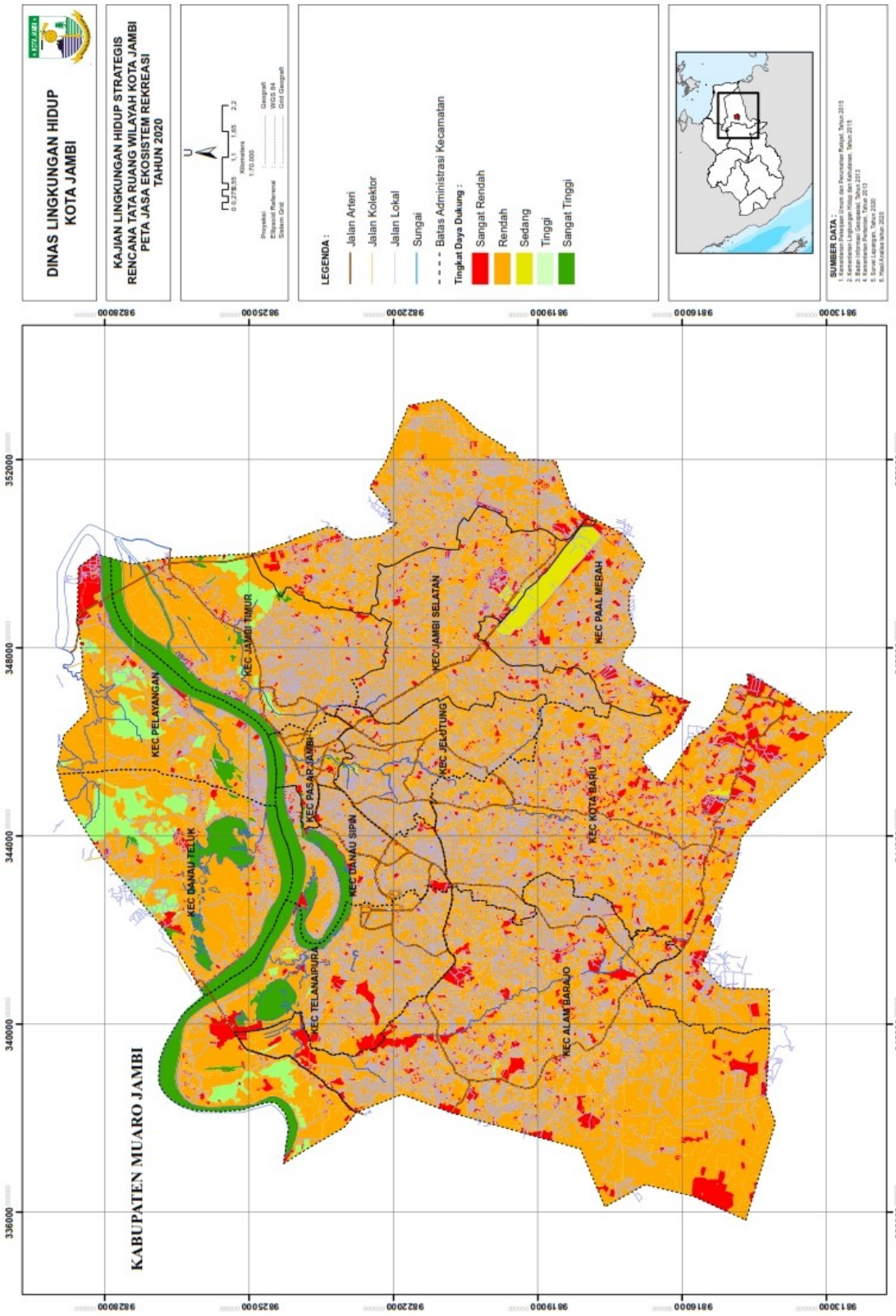

Gambar 3.2.18
Peta Jasa Ekosistem Rekreasi



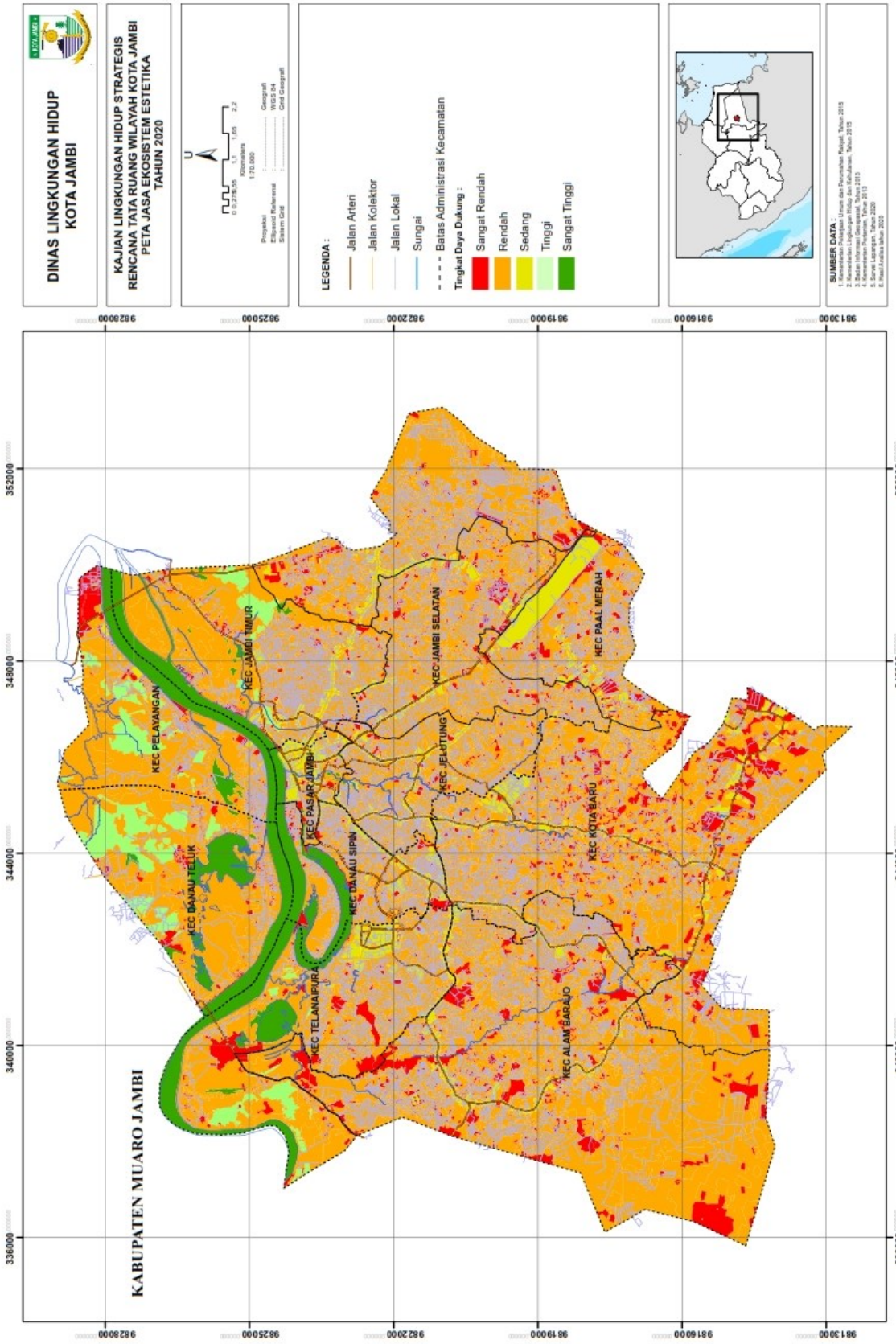

Gambar 3.2.19
Peta Jasa Ekosistem Estetika



D. Jasa Pendukung

Dari hasil perhitungan interval tersebut didapatkan distribusi kondisi jasa ekosistem pendukung di Wilayah Kota Jambi, yang diuraikan melalui tabel dan gambar peta berikut ini.

Tabel III.2.33
Distrubisi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Tanah

EKOREGION	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
	HA	%	HA	%	HA	%	HA	%	HA	%
Dataran Aluvial	507,10	2,98		0	2917,79	17,18	1374,98	8,09		0
Lembah Antar Perbukitan	5561,42	32,74		0	5816,41	34,25	804,59	4,73		0
Total	**6068,53**	**35,73**	**0**	**0**	**8734,28**	**51,43**	**2179,57**	**12,83**	**0**	**0**

Tabel III.2.34
Distrubisi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Siklus Hara

EKOREGION	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
	HA	%	HA	%	HA	%	HA	%	HA	%
Dataran Aluvial	507,10	2,98	1275,40	7,51	1809,84	10,65	222,67	1,31	984,85	5,79
Lembah Antar Perbukitan	5561,42	32,74	1093,74	6,44	4805,62	28,29	708,44	4,17	13,26	0,07
Total	**6068,53**	**35,73**	**2369,14**	**13,95**	**6615,47**	**38,95**	**931,11**	**5,48**	**998,12**	**5,87**

Tabel III.2.35
Distrubisi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Produksi Primer

EKOREGION	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
	HA	%	HA	%	HA	%	HA	%	HA	%
Dataran Aluvial	507,10	2,98	222,67	1,31	1809,84	10,65	2260,26	13,30		0
Lembah Antar Perbukitan	5561,42	32,74	1093,74	6,44	4805,62	28,29	721,71	4,24		0
Total	6068,53	35,73	1316,41	7,751	6615,47	38,95	2981,97	17,55	0	0

Tabel III.2.36
Distrubisi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Biodiversitas

EKOREGION	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
	HA	%	HA	%	HA	%	HA	%	HA	%
Dataran Aluvial	507,10	2,98	222,67	1,31	2241,58	13,199	1828,51	10,76		0
Lembah Antar Perbukitan	5561,42	32,74	1085,93	6,39	4820,75	28,38	714,39	4,206		0
Total	6068,53	35,73	1308,60	7,70	7062,34	41,58	2542,9	14,97	0	0





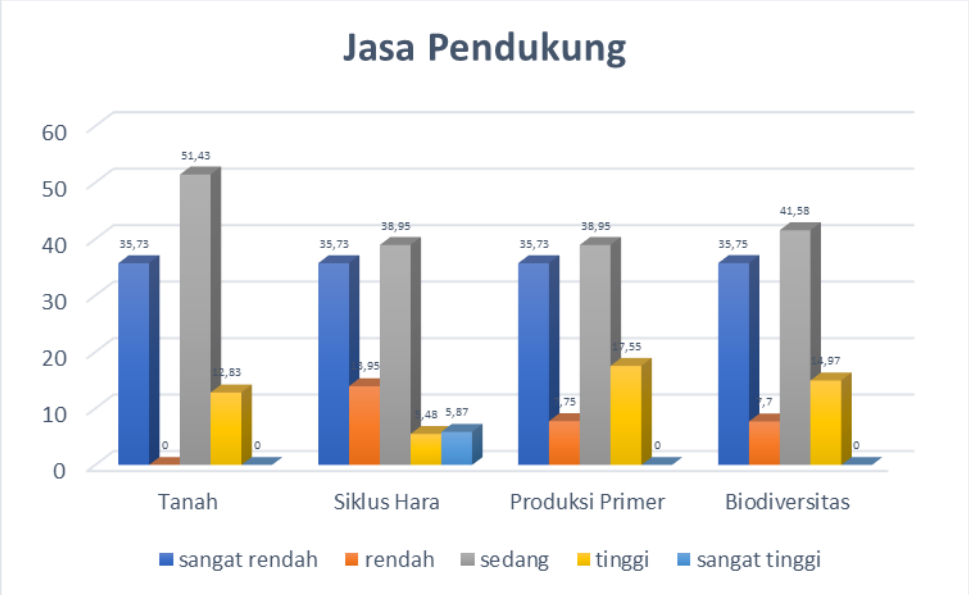

Gambar 3.2.20
Grafik Jasa Ekosistem Pendukung

Tabel III.2.37
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Tanah Menurut BWP

BWP	EKOREGION	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
		HA	%	HA	%	HA	%	HA	%	HA	%
I	Dataran Aluvial	141,71	0,83		0	68,52	0,40	7,73	0,04		0
	Lembah Antar Perbukitan	542,58	3,19		0	103,89	0,611	3,55	0,02		0
II	Dataran Aluvial	155,49	0,91		0	1265,43	7,45	1003,37	5,90		0
	Lembah Antar Perbukitan		0		0		0		0		0
III	Dataran Aluvial	64,42	0,37		0	588,55	3,46	151,72	0,89		0
	Lembah Antar Perbukitan	1422,08	8,37		0	1222,03	7,19	14,35	0,08		0
IV	Dataran Aluvial		0		0		0		0		0
	Lembah Antar Perbukitan	1202,60	7,08		0	1323,48	7,79	207,97	1,22		0
V	Dataran Aluvial		0		0		0		0		0
	Lembah Antar Perbukitan	1420,28	8,36		0	2654,47	15,63	523,65	3,08		0
VI	Dataran Aluvial	145,47	0,85		0	995,28	5,86	212,14	1,24		0
	Lembah Antar Perbukitan	973,87	5,73		0	512,59	3,01	55,06	0,32		0
Total		6068,53	35,73	0	0	8734,28	51,43	2179,57	12,83	0	0





Tabel III.2.38
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Siklus Hara Menurut BWP

BWP	EKOREGION	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
		HA	%	HA	%	HA	%	HA	%	HA	%
I	Dataran Aluvial	141,71	0,83	14,71	0,08	14,85	0,08	7,73	0,04	38,95	0,22
	Lembah Antar Perbukitan	542,58	3,19	24,85	0,14	74,75	0,44	2,45	0,01	5,38	0,03
II	Dataran Aluvial	155,49	0,91	114,60	0,67	783,78	4,61	967,65	5,69	402,76	2,37
	Lembah Antar Perbukitan		0		0		0		0		0
III	Dataran Aluvial	64,42	0,37	41,34	0,24	431,24	2,53	150,43	0,88	117,25	0,69
	Lembah Antar Perbukitan	1422,08	8,37	206,09	1,21	1011,65	5,95	12,37	0,07	6,26	0,03
IV	Dataran Aluvial		0		0		0		0		0
	Lembah Antar Perbukitan	1202,60	7,08	363,27	2,13	970,12	5,71	196,74	1,15	1,32	0,007
V	Dataran Aluvial		0		0		0		0		0
	Lembah Antar Perbukitan	1420,28	8,36	392,43	2,31	2312,27	13,61	473,41	2,78		0
VI	Dataran Aluvial	145,47	0,85	52,00	0,30	579,95	3,41	149,57	0,88	425,88	2,50
	Lembah Antar Perbukitan	973,87	5,73	107,08	0,63	436,81	2,57	23,46	0,13	0,29	0,001
Total		6068,53	35,73	1316,41	7,75	6615,47	38,95	1983,85	11,68	998,12	5,87

Tabel III.2.39
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Produksi Primer Menurut BWP

BWP	EKOREGION	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
		HA	%	HA	%	HA	%	HA	%	HA	%
I	Dataran Aluvial	141,71	0,83	14,71	0,08	14,85	0,08	46,69	0,27		0
	Lembah Antar Perbukitan	542,58	3,19	24,85	0,14	74,75	0,44	7,83	0,04		0
II	Dataran Aluvial	155,49	0,91	114,60	0,67	783,78	4,61	1370,41	8,06		0
	Lembah Antar Perbukitan		0		0		0		0		0
III	Dataran Aluvial	64,42	0,37	41,34	0,24	431,24	2,53	267,68	1,57		0
	Lembah Antar Perbukitan	1422,08	8,37	206,09	1,21	1011,65	5,95	18,64	0,10		0
IV	Dataran Aluvial		0		0				0		0
	Lembah Antar Perbukitan	1202,60	7,08	363,27	2,13	970,12	5,71	198,06	1,16		0
V	Dataran Aluvial		0		0		0		0		0
	Lembah Antar Perbukitan	1420,28	8,36	392,43	2,31	2312,27	13,61	473,418	2,78		0
VI	Dataran Aluvial	145,47	0,85	52,00	0,30	579,95	3,41	575,4	3,38		0
	Lembah Antar Perbukitan	973,87	5,73	107,08	0,63	436,81	2,57	23,75	0,13		0
Total		6068,53	35,73	1316,41	7,75	6615,47	38,95	2981,97	17,55	0	0





Tabel III.2.40
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Biodiversitas Menurut BWP

BWP	EKOREGION	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
		HA	%	HA	%	HA	%	HA	%	HA	%
I	Dataran Aluvial	141,71	0,83	14,71	0,08	22,59	0,13	38,95	0,22		0
	Lembah Antar Perbukitan	542,58	3,19	24,85	0,14	77,20	0,45	5,38	0,03		0
II	Dataran Aluvial	155,49	0,91	114,60	0,67	1082,84	6,37	1071,35	6,30		0
	Lembah Antar Perbukitan		0		0		0		0		0
III	Dataran Aluvial	64,42	0,37	41,34	0,24	480,42	2,82	218,51	1,28		0
	Lembah Antar Perbukitan	1422,08	8,37	206,09	1,21	1023,09	6,02	7,2	0,04		0
IV	Dataran Aluvial		0		0		0		0		0
	Lembah Antar Perbukitan	1202,60	7,08	355,46	2,09	970,12	5,71	205,87	1,21		0
V	Dataran Aluvial		0		0		0		0		0
	Lembah Antar Perbukitan	1420,28	8,36	392,43	2,31	2312,27	13,6	473,41	2,78		0
VI	Dataran Aluvial	145,47	0,85	52,00	0,30	655,72	3,86	499,69	2,94		0
	Lembah Antar Perbukitan	973,87	5,73	107,08	0,63	438,05	2,57	22,51	0,13		0
Total		6068,53	35,73	1308,60	7,70	7062,34	41,58	2542,91	14,97	0	0





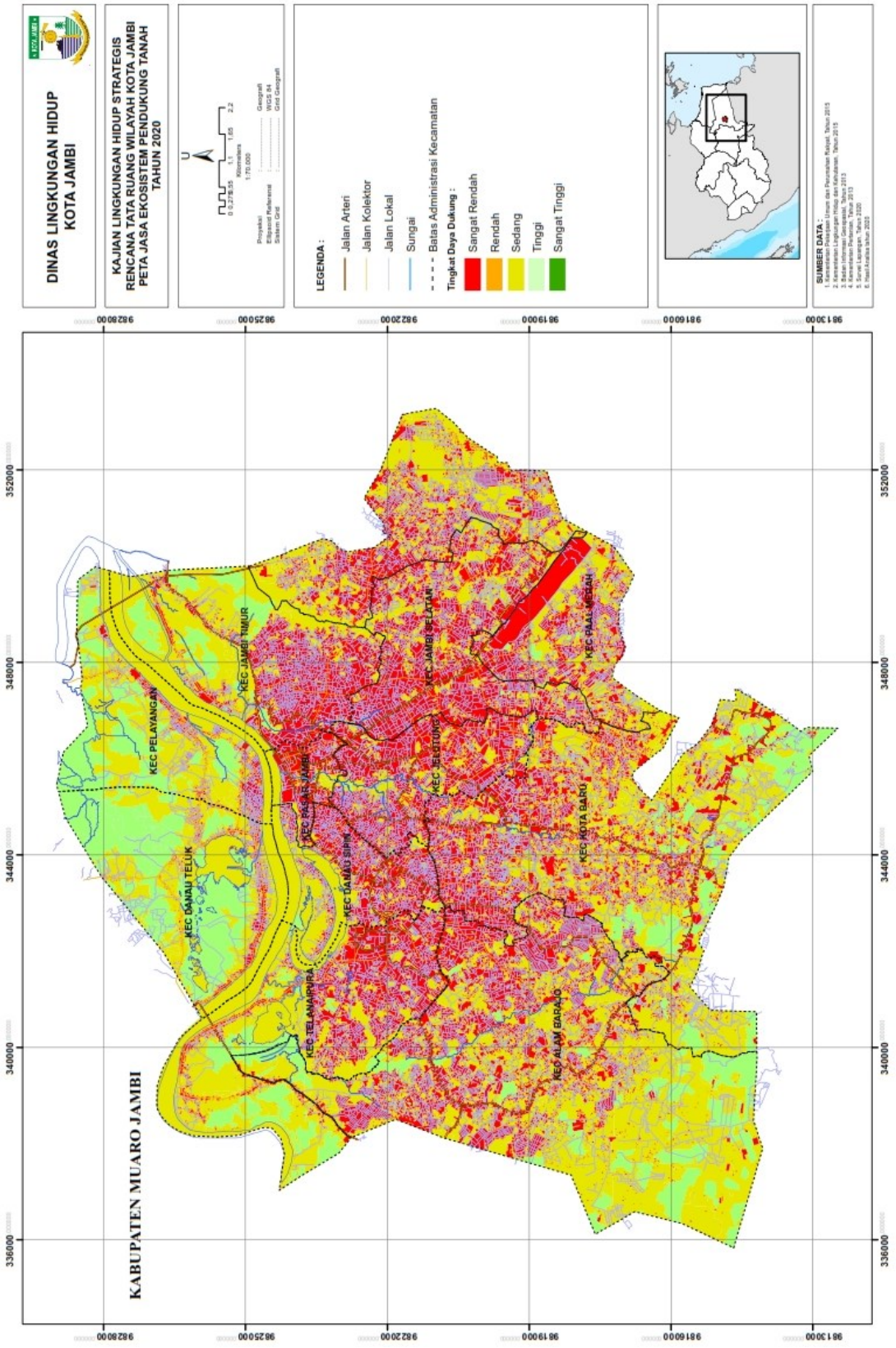

Gambar 3.2.21
Peta Jasa Ekosistem Tanah



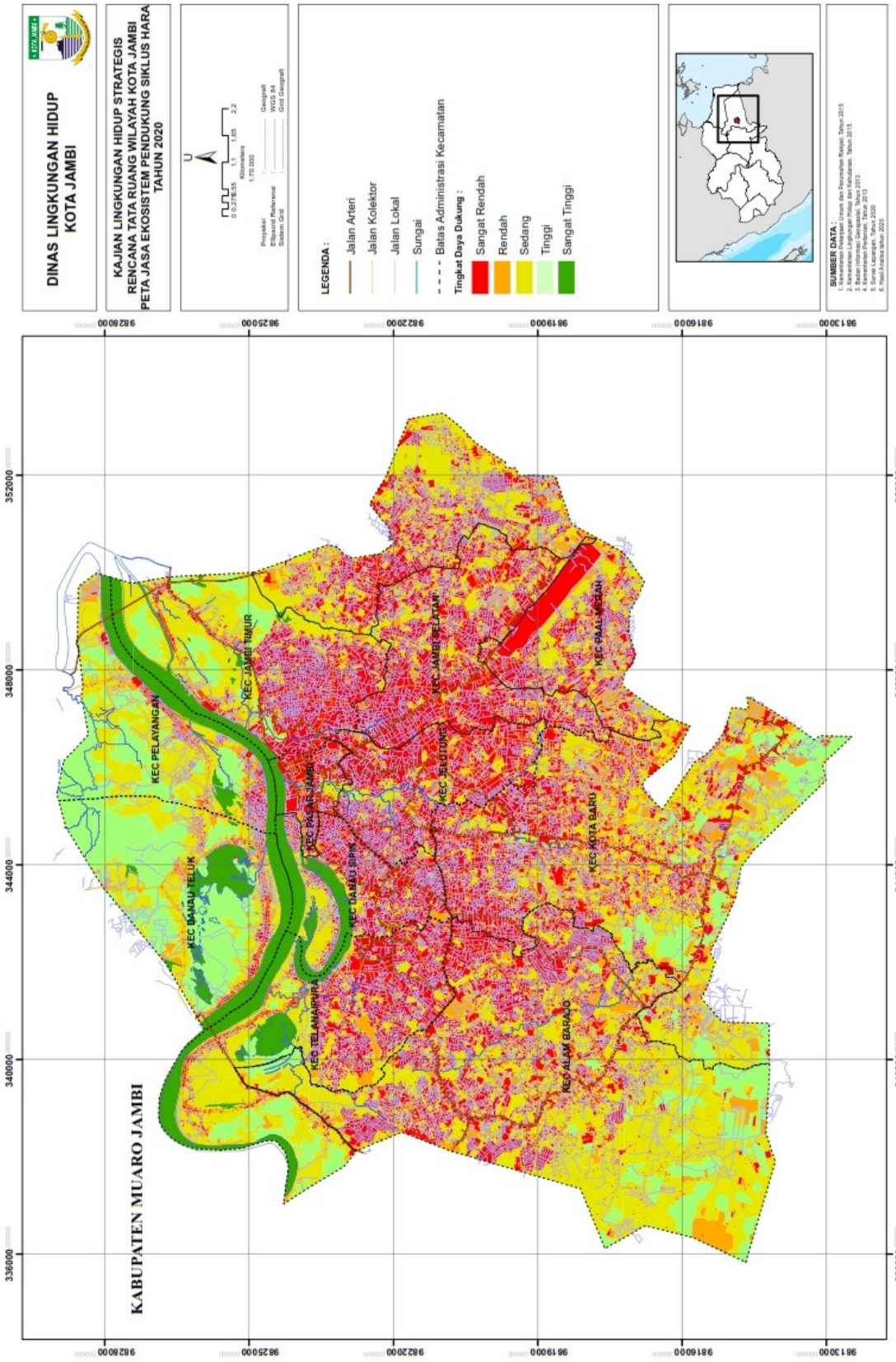

Gambar 3.2.22
Peta Jasa Ekosistem Siklus Hara



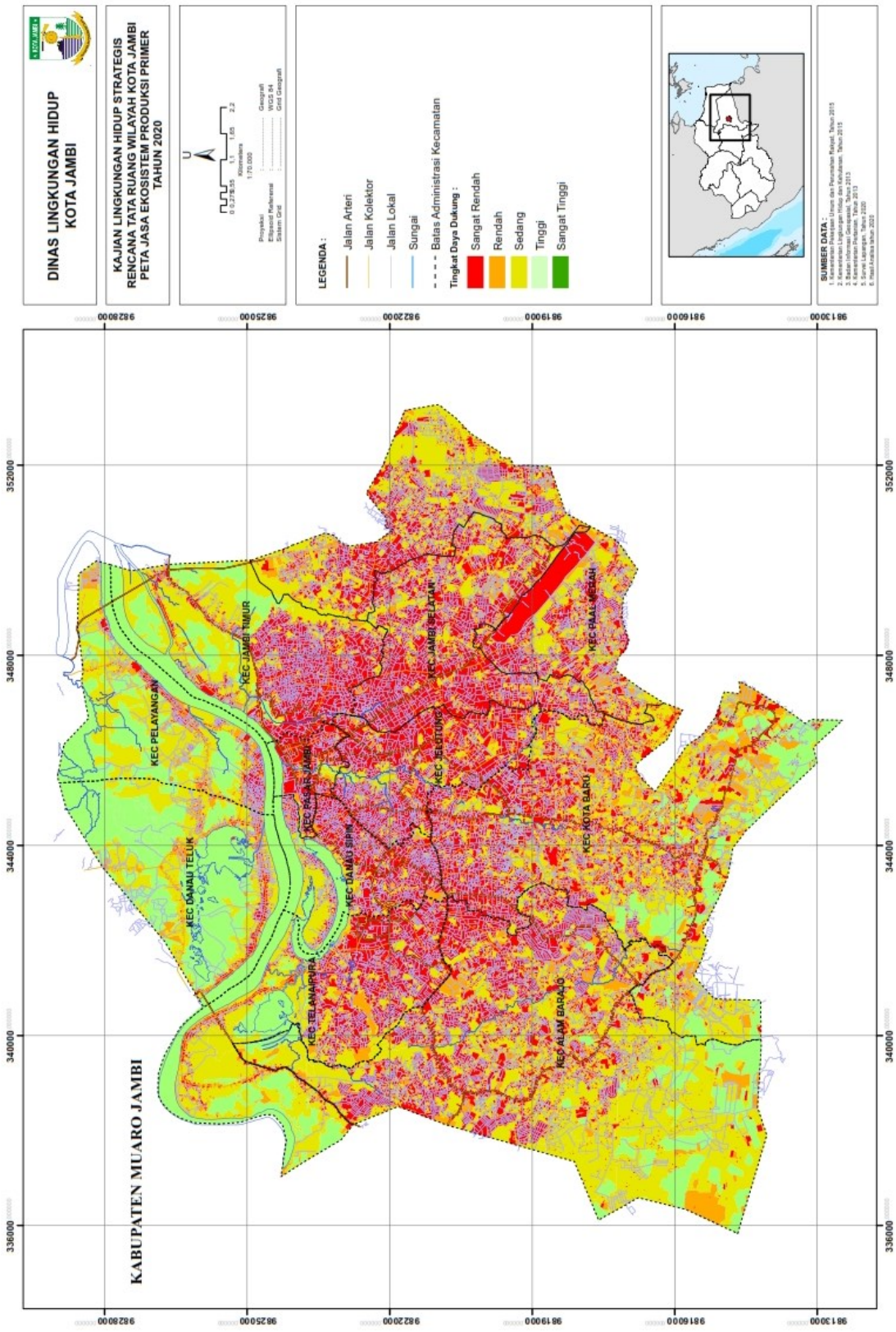

Gambar 3.2.23
Peta Jasa Ekosistem Produksi Primer



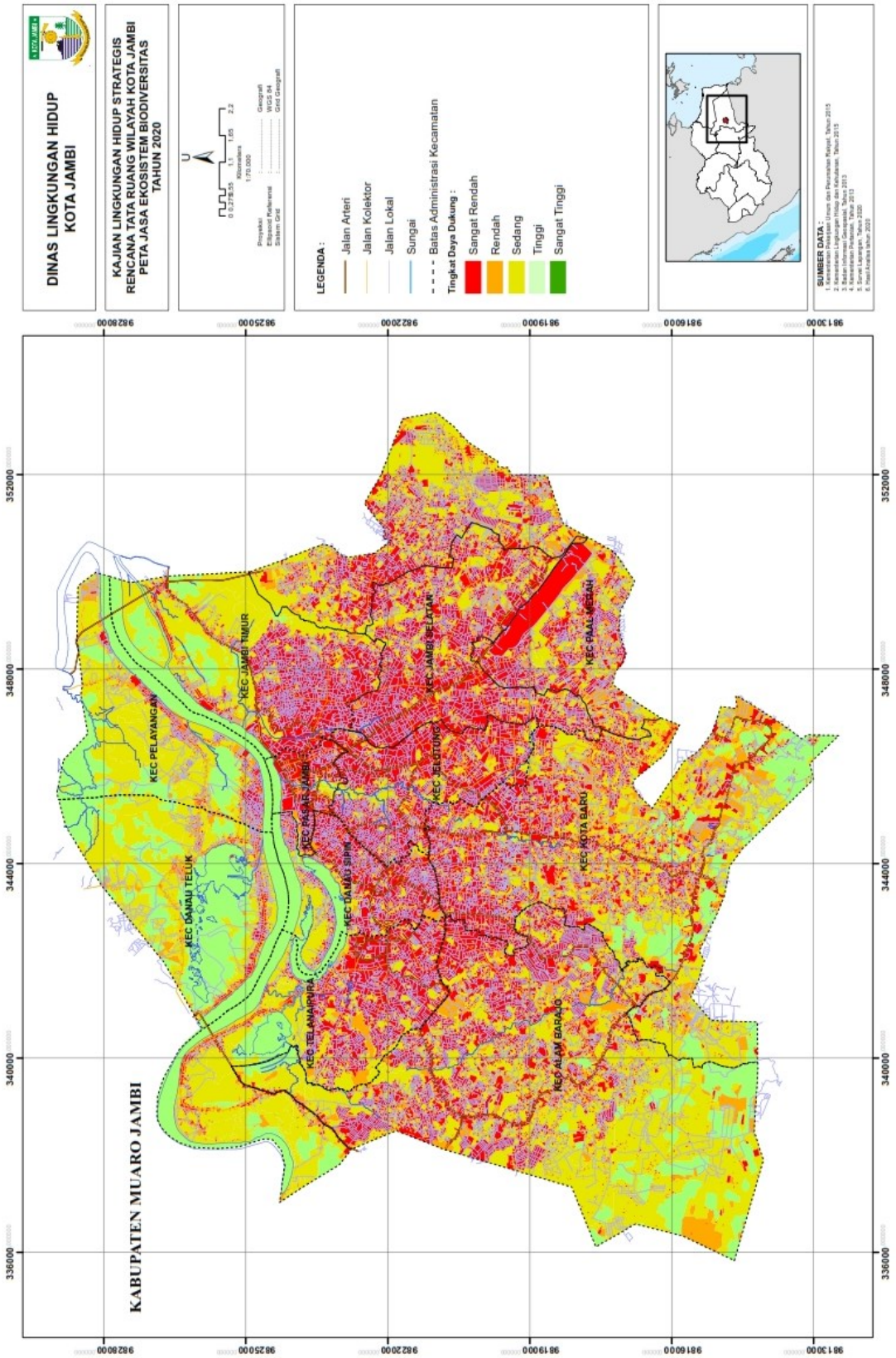

Gambar 3.2.24
Peta Jasa Ekosistem Biodversitas



3.2.2 Ketersediaan dan Kebutuhan Air Untuk Daya Dukung Lingkungan

Berbagai bentuk kegiatan /aktivitas manusia dimanapun berada, tidak dapat lepas dari kebutuhan akan air. Kondisi tersebut menjadikan upaya menjaga kualitas dan kuantitas sumberdaya air sebagai suatu hal yang mutlak untuk dilakukan. Lintas sektor pada suatu entitas ruang harus mampu menjaga ketersediaan air dapat mencukupi kebutuhan terhadap air tersebut. Perbandingan antara tingkat ketersediaan dan angka kebutuhan perlu terus diketahui, agar dapat menjadi pedoman dalam menentukan dan melaksanakan langkah-langkah pemenuhan kebutuhan akan air.

Peningkatan populasi penduduk pada suatu entitas ruang yang diikuti oleh perkembangan aktivitas-aktivitas baru, dapat memberi pengaruh terhadap pola penggunaan air dan eksistensi ketersediaan air tersebut. Pengelolaan yang tidak berorientasi terhadap upaya menjaga ketersediaan, akan dapat menyebabkan dampak negatif terhadap ketersediaan air tersebut atau bahkan bencana lingkungan apabila ketersediaan tersebut justru melampaui.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009, tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah, penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan berdasarkan dengan beberapa pendekatan, dimana salah satunya adalah dengan melakukan pembandingan antara ketersediaan dan kebutuhan, termasuk dalam hal ini adalah ketersediaan dan kebutuhan air. Ketersediaan air ditentukan dengan menggunakan metode koefisien limpasan berdasarkan informasi penggunaan lahan serta data curah hujan tahunan. Sementara itu, kebutuhan air dihitung dari hasil konversi terhadap kebutuhan hidup layak.

A. Kebutuhan Air

Kebutuhan air merupakan jumlah air yang digunakan untuk keperluan berbagai bentuk kegiatan masyarakat dalam suatu ruang wilayah dalam hal ini adalah Kabupaten Sarolangun. Dalam kasus ini kebutuhan air yang diperhitungkan yaitu kebutuhan air untuk peruntukan kegiatan rumah tangga



(domestik), dan kebutuhan non domestik seperti: fasilitas umum, sepert meliputi perkantoran, pendidikan, irigasi, peternakan, industri, serta untuk pemeliharaan/ penggelontoran sungai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah, penghitungan kebutuhan *(demand)* air dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut:

$D_A = N \times KHL_A$

Dimana:
D_A = Total kebutuhan air (m^3/tahun)
N = Jumlah penduduk (orang)
KHL_A = Kebutuhan air untuk hidup layak
= 1.600 m^3 air/kapita/tahun,
= 2 x 800 m^3 air/kapita/tahun, dimana:
800 m3 air/kapita/tahun merupakan kebutuhan air untuk keperluan domestik dan untuk menghasilkan pangan

Dari pendekatan tersebut, diperkirakan kebutuhan air Di Kota Jambi adalah sebagai berikut:

D_A = 619.553 x 1.600

= 991.284.800 m^3/tahun





Gambar 3.2.25
Fasilitas Air Minum Perpipaan di Kota Jambi



B. Ketersediaan Air

Dalam perhitungan ketersediaan air diugunakan pemodelan spasial, data yang digunakan berada pada tingkat skala yang memungkinkan mengubah data tabular menjadi sebaran (spasial). Dalam penentuan kecupukan jasa lingkungan hidup sebagai penyedia air sistem grid dibuat dengan memperhatikan datum geodetic, sistem koordinat, titik asal sistem koordinat.

Tabel III.2.41
Luas status Daya Dukung dan Daya Tampung Air (Ha) di Kota Jambi

Kecamatan	Telampaui		Belum Telampaui	
	Ha	%	Ha	%
Alam Barajo	-	-	3.606	21,19
Danau Sipin	-	-	728	4,28
Danau Teluk	-	-	1.344	7,90
Jambi Selatan	-	-	760	4,47
Jambi Timur	-	-	1.368	8,04
Jelutung	-	-	761	4,47
Kota Baru	-	-	2.725	16,02
Paal Merah	-	-	2.425	14,25
Pasar Jambi	-	-	197	1,16
Pelayangan	-	-	1.069	6,28
Telanaipura	-	-	2.032	11,94
Jumlah	**-**	**-**	**17.015**	**100**

Sumber; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHS), Tahun 2022



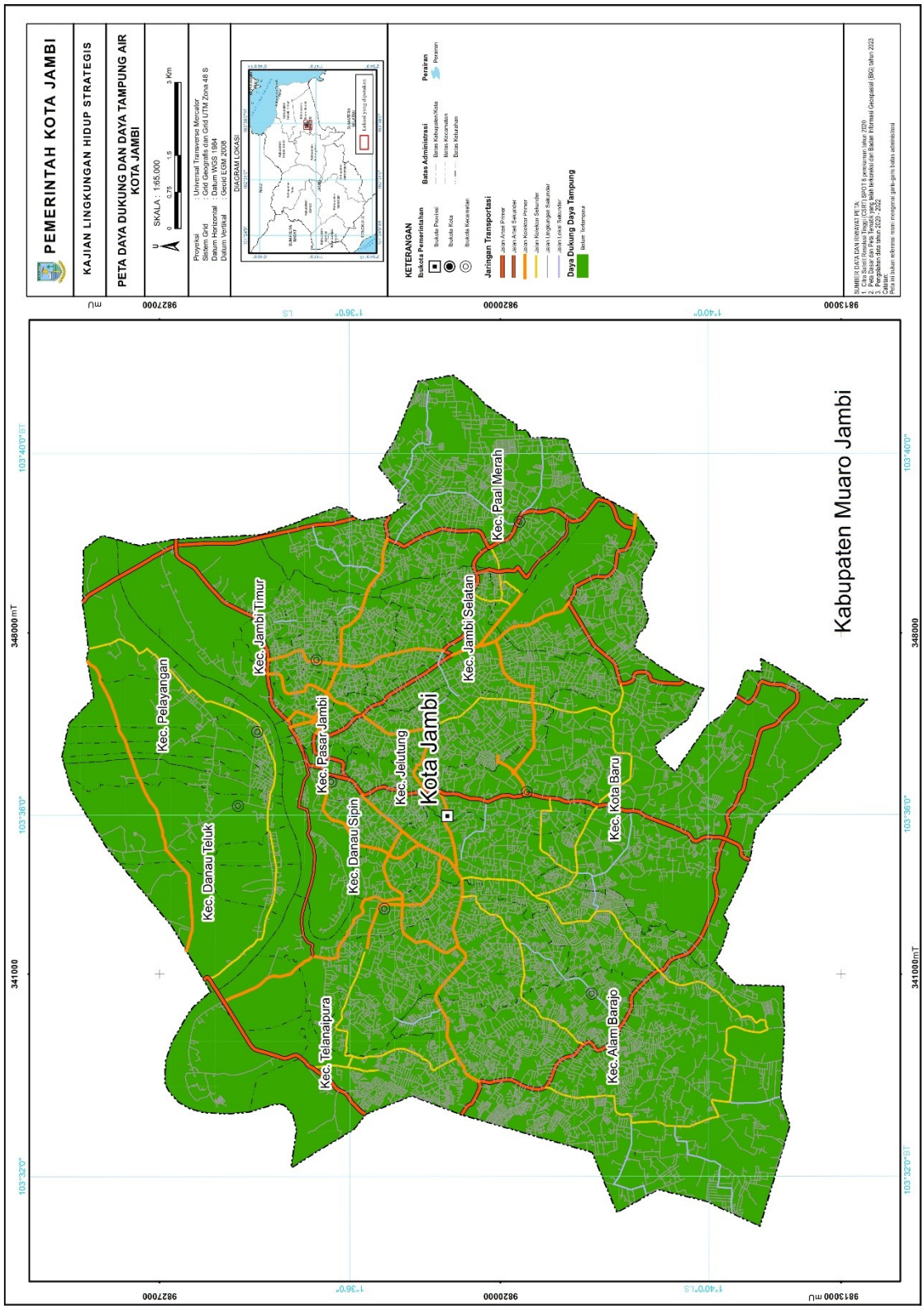

Gambar 3.2.26
Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Air



3.2.3 Daya Dukung Permukiman

Merujuk pada pemanfaatan lahan, kawasan perkotaan akan didominasi dengan kegiatan untuk fungsi sebagai kawasan permukiman. Cepatnya pertumbuhan jumlah penduduk yang berbanding terbalik dengan ketersediaan lahan akan berdampak kepada penggunaan lahan yang terlalu berlebihan sehingga melampaui kemampuan lahan, yang berakibat pada menurunnya daya dukung lahan dan berdampak pada penurunan produktivitas lahan yang selanjutnya dapat berdampak terhadap permasalahan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, perkiraan kebutuhan akan lahan dan sumberdaya alam suatu wilayah, tidak dapat lepas dari kajian perkiraan jumlah penduduk pada masa yang akan datang, atau masa KRP yang akan dirumuskan.

Penduduk merupakan faktor utama dalam perencanaan, karena suatu perencanaan yang disusun untuk keperluan pada masa datang didasari oleh pengetahuan tentang masalah yang sama pada masa sebelumnya. Perkembangan kehidupan dan semua aktivitas merupakan hal yang penting dalam perumusan KRP. Angka pertambahan penduduk tidak lepas dari data–data penduduk sebelumnya. Banyak faktor yang mempengaruhi angka pertambahan penduduk seperti masalah kesehatan, sosial, ekonomi, politik dan lain–lain. Populasi berubah dengan angka–angka kematian, kelahiran dan perpindahan penduduk. Jadi faktor–faktor seperti kelahiran, kematian dan migrasi.

Tabel III.2.42
Luas Potensi Permukiman di Kota Jambi

No	Kecamatan	Potensi		Tidak Potensi	
		Luas	%	Luas	%
1	Alam Barajo	2.627,60	71,22	1.061,93	28,78
2	Danau Sipin	341,91	51,07	327,62	48,93
3	Danau Teluk	0,67	0,05	1.352,07	99,95
4	Jambi Selatan	1.023,89	83,40	203,80	16,60
5	Jambi Timur	1.023,89	17,97	1.124,85	82,03
6	Jelutung	518,98	68,05	243,67	31,95
7	Kota Baru	2.747,03	91,83	244,48	8,17
8	Paal Merah	1.202,82	61,45	754,66	38,55
9	Pasar Jambi	61,94	28,50	155,38	71,50
10	Pelayangan	3,19	0,30	1.068,37	99,70
11	Telanaipura	545,64	32,65	1.125,66	67,35
Total		**10.097,55**	**56,86**	**7.662,50**	**43,14**

Sumber; Analisis ptensi lahan permukiman Kota Jambi, Tahun 2022



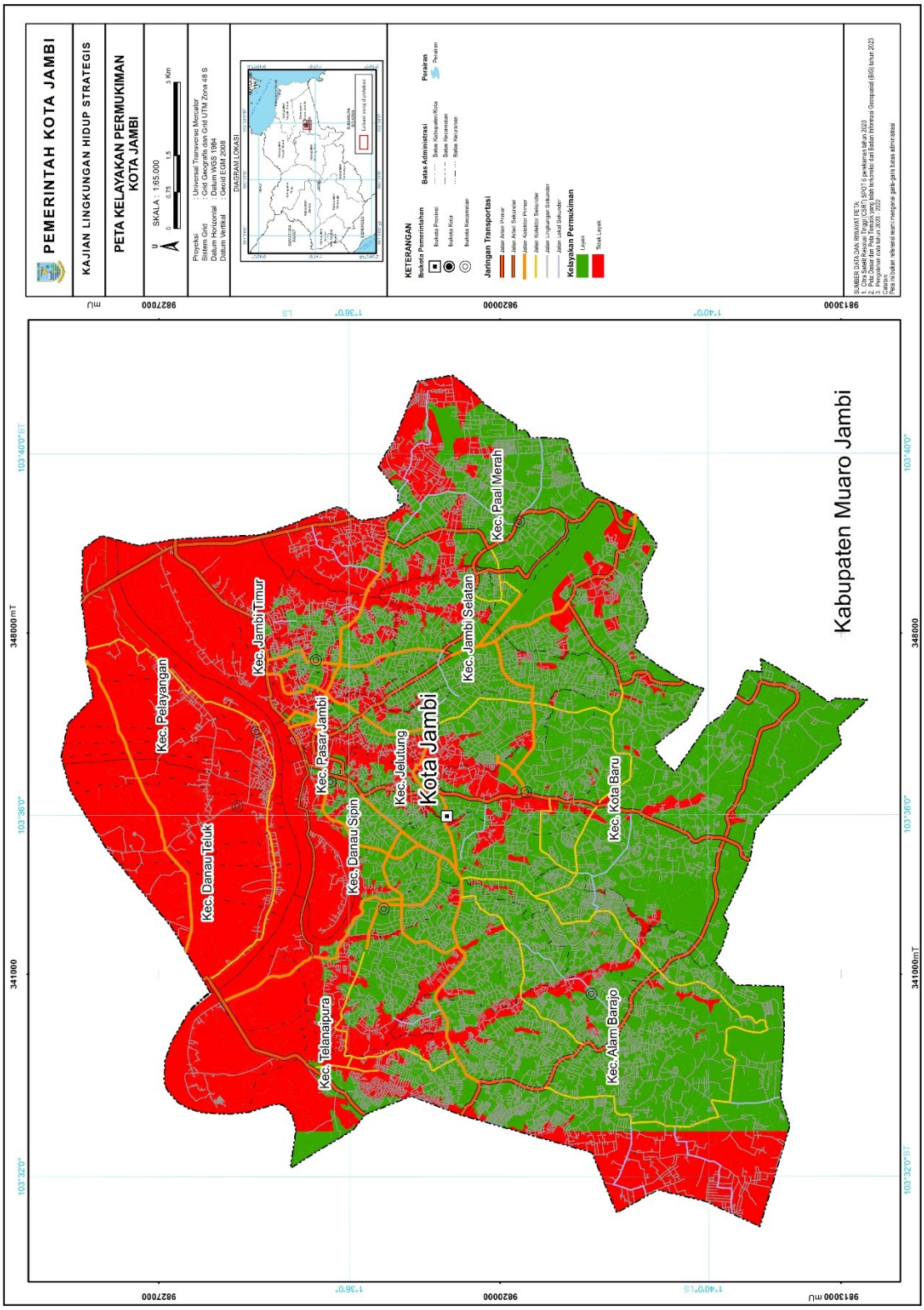

Gambar 3.2.27
Peta Potensi Kelayakan Permukiman di Kota Jambi



3.2.4 Daya Tampung Air

Air merupakan kebutuhan yang sangat berguna bagi kehidupan manusia. Jika kebutuhan akan air tersebut belum terpenuhi dapat memberikan dampak terhadap kerawanan kesehatan maupun sosial, karenaair merupakan komponen lingkungan hidup yang penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Selanjutnya pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya (PP No 82 Tahun 2001).

Dewasa ini air menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian yang seksama dan cermat. Karena untuk mendapatkan air yang bersih, sesuai dengan standar tertentu, saat ini menjadi barang yang mahal karena air sudah banyak tercemar oleh bermacam-macam limbah dari hasil kegiatan manusia, baik limbah dari kegiatan rumah tangga, limbah dari kegiatan industri dan kegiatan-kegiatan lainnya dan ketergantungan manusia terhadap air pun semakin besar sejalan dengan perkembangan penduduk yang semakin meningkat.

Perubahan tata guna lahan yang ditandai dengan meningkatnya aktivitas domestik, pertanian dan industri akan mempengaruhi dan memberikan dampak terhadap kondisi kualitas air sungai (Priyambada, 2008). Bertambahnya jumlah penduduk dan perubahan tata guna lahan telah mengakibatkan penurunan fungsi sungai, baik dalam kualitas dan kuantitas air sungai.

Meningkatnya kegiatan dan aktivitas manusia di sekitar pinggiran sungai seperti industri, pembuangan limbah domestik, limbah padat, serta penggunaan lahan yang berkontribusi terjadinya peningkatan pencemaran air di sungai tersebut. Selain itu penurunan kualitas air sungai juga disebabkan oleh tidak terkontrolnya penggunaan pupuk kimia pada lahan pertanian dimana terakumulasi dalam proses drainase lahan ke sungai (Djoko Kirmanto, 2012).





Kualitas air sungai merupakan kondisi kualitatif yang diukur berdasarkan parameter tertentu dan dengan metode tertentu sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Kualitas air sungai dapat dinyatakan dengan parameter yang menggambarkan kualitas air tersebut. Parameter tersebut meliputi parameter fisika, kimia dan biologi.

Pencemaran air adalah masuknya polutan ke dalam air atau berubahnya tatanan air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai pada tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya PP RI No. 82 tahun 2001. Sumber pencemar dapat dibedakan menjadi dua yaitu sumber domestik dan sumber non domestik. Sumber domestik dapat berasal dari perkampungan, kota, pasar, jalan, terminal, rumah sakit, hotel, serta usaha kecil dan sebagainya. Sedangkan non domestik dapat berasal dari pabrik, industri, pertanian, peternakan, perikanan, transportasi, dan sumber-sumber lainnya.

Pencemaran air terjadi pada sumber-sumber air seperti danau, sungai, laut dan air tanah yang disebabkan olek aktivitas manusia. Air dikatakan tercemar jika tidak dapat digunakan sesuai dengan fungsinya. Walaupun fenomena alam, seperti gunung meletus, pertumbuhan ganggang, gulma yang sangat cepat, badai dan gempa bumi merupakan penyebab utama perubahan kualitas air, namun fenomena tersebut tidak dapat disalahkan sebagai penyebab pencemaran air. Pencemaran ini dapat disebabkan oleh limbah industri, perumahan, pertanian, rumah tangga, industri, dan penangkapan ikan dengan menggunakan racun. Polutan industri antara lain polutan organik (limbah cair), polutan anorganik (padatan, logam berat), sisa bahan bakar, tumpaham minyak tanah dan oli merupakan sumber utama pencemaran air, terutama air tanah. Disamping itu penggundulan hutan, baik untuk pembukaan lahan pertanian, perumahan dan konstruksi bangunan lainnya mengakibatkan pencemaran air tanah. Limbah rumah tangga seperti sampah organik (sisa-sisa makanan), sampah anorganik (plastik, gelas,





kaleng) serta bahan kimia (detergen, batu batere) juga berperan besar dalam pencemaran air, baik air di permukaan maupun air tanah.

Meningkatnya kegiatan dan aktivitas manusia di sekitar pinggiran sungai seperti industri, pembuangan limbah domestik, limbah padat, serta penggunaan lahan yang berkontribusi terjadinya peningkatan pencemaran air di sungai tersebut. Selain itu penurunan kualitas air sungai juga disebabkan oleh tidak terkontrolnya penggunaan pupuk kimia pada lahan pertanian dimana terakumulasi dalam proses drainase lahan ke sungai. Di tambah lagi kurangnya kesadaran masyarakat yang langsung membuang kotoran atau tinja maupun sampah ke dalam sungai, serta kegiatan lainnya seperti laundry, cucian mobil, cucian motor dan lain sebagainya yang langsung membuang ke drainase sehingga air buangan tersebut langsung mengalir ke sungai, sehingga menyebabkan proses pencemaran sungai yang ada di Kota Jambi

Pengendalian pencemaran air merupakan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu. Mengingat sifat air yang dinamis dan pada umumnya mengalir melintasi wilayah administrasi pemerintahan, maka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dilakukan secara terpadu dengan didasarkan pada karakteristik ekosistemnya. Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara terpadu dilakukan menyeluruh mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

1. Air Permukaan

a. Air Sungai

Wilayah Sungai Batanghari merupakan salah satu Wilayah Sungai Lintas Provinsi yang berlokasi di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai. Pengelolaan sumber daya air sebagaimana diamanatkan dalam Undang – undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan





mencakup kepentingan lintas sektoral dan lintas wilayah yang memerlukan keterpaduan tindak untuk menjaga kelangsungan fungsi dan manfaat air dan sumber air dengan memperhatikan azas kelestarian, azas keseimbangan fungsi sosial, azas lingkungan hidup dan ekonomi, azas kemanfaatan umum, azas keterpaduan dan keserasian, azas kemandirian, serta azas transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan sumber daya air tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air.

Sungai Batanghari merupakan air permukaan yang utama dan mengalir melewati Kota Jambi yang berasal dari Pegunungan Bukit Barisan Propinsi Sumatera Barat melewati Kota Jambi dan bermuara di Selat Berhala. Luas DAS Batanghari sekitar 37.500 km^2 yang meliputi sebagian dari Propinsi Sumatera Barat, Bengkulu, dan Jambi. Sungai Batanghari merupakan sungai terpanjang di pulau Sumatera dengan panjang keseluruhan lebih kurang 1.700 km. Sungai Batanghari membelah Kota Jambi menjadi dua bagian di sisi utara dan selatannya. Kondisi geologi DAS Batanghari secara litologi memperlihatkan jenis litologi batuan yang terdiri dari sedimen lepas atau setengah padu (kerikil, pasir, lanau, dan lempung) hasil gunung api (lava, lahar, tufa, dan breksi), batu gamping atau dolomite, sedimen padu (tak terbedakan) dan batuan beku atau metamorfosa.

Struktur geologi yang utama berupa sesar semangko (yang memanjang disepanjang pulau Sumatera atau Pegunungan Bukit Barisan) dijumpai di bagian atas DAS Batanghari yang juga merupakan garis pemisah utama air pemukaanantara sungai–sungai yang bermuara ke Pantai Timur Sumatera.

Dari hasil Analisa terhadap kualitas air sungai di kota Jambi diketahui Indeks pencemaran air sungai adalah ;





Tabel III.2.43
Indeks Kualitas Air Sungai di Kota Jambi

No	Nama Anak Sungai	IP	Status Mutu Air
1	Kenali Besar (hulu)	4.8	ringan
2	Kenali Besar (hilir)	5.4	Sedang
3	Kenali Kecil (hulu)	4.2	ringan
4	Kenali Kecil (hilir)	5.8	Sedang
5	Asam (hulu)	5.2	Sedang
6	Asam (hilir)	5.3	Sedang
7	Tembuku (hulu)	6.4	Sedang
8	Tembuku (hilir)	5.9	Sedang
9	Selincah (hulu)	4.3	Ringan
10	Selincah (hilir)	3.8	Ringan
11	Kambang (hulu)	5.7	Sedang
12	Kambang (hilir)	4.3	Sedang
13	Putri (hulu)	5.8	Sedang
14	Putri (hilir)	5.2	Sedang
15	Solok Sipin (hulu)	3.5	Ringan
16	Solok SIpin (hilir)	5.0	Sedang

Sumber : hasil analisa 2021, laporan indeks kualitas laporan sungai di Kota Jambi

Dari table diatas diketahui nilai indeks pencemaran (IP) berada antara 3.5-6.4 dengan nilai IP terendah berada pada hulu sungai Solok Sipin dengan kategori tercemar ringan, sedangkan IP tertinggi berada pada hulu sungai tembuku dengan kategori tercemar sedang. Pencemaran sungai di Kota Jambi didominasi oleh tingginya kadar *BOD_5,COD,DO,PO_4,CU dan Zn*.

Tabel III.2.44
Indeks Kualitas Air Danau di Kota Jambi

No	Nama Anak Sungai	IP	Status Mutu Air
1	Danau Sipin (Komersil)	4.2	ringan
2	Danau Sipin (non Komersil)	2.9	ringan
3	Danau Sipin (muara)	5.1	sedang
4	Danau Teluk (Komersil)	3.2	ringan
5	Danau Teluk (non Komersil)	2.1	ringan
6	Danau Teluk (muara)	4.6	ringan
7	Danau Kenali (Komersil)	3.5	ringan
8	Danau Kenali (non Komersil)	2.8	ringan
9	Danau Kenali (muara)	4.3	ringan

Sumber : hasil analisa 2021, laporan indeks kualitas laporan sungai di Kota Jambi

Pencemaran air danau di Kota Jambi di dominasi dengan tingginya kadar *BOD_5,COD,Nitrit,PO_4,CU dan Zn*. Nilai Indeks Pencemar terendah berada di Danau teluk (non komersil) sedangkan yang tertinggi di Danau Sipin (muara).





3.2.5 Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati penting bagi keberlanjutan kehidupan alam, sehingga baik langsung maupun tidak langsung memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Secara luas keanekaragaman hayati merupakan lanskap penting yang berperan terhadap berbagai jasa ekosistem seperti air bersih, pembentukan dan perlindungan tanah, meremediasi polutan, dan juga menjaga stabilitas iklim baik makro maupun mikro. Selain itu sumber daya hayati juga memberikan manfaat besar bagi ketersediaan makanan dan obat-obatan, sedangkan sosial budaya sumber daya hayati memberikan manfaat bagi pendidikan dan wisata.

Tabel III.2.45
Definisi Operasional Klasifikasi Layanan Ekosistem Penyedia Keanekaragaman Hayati

Jasa Ekosistem	Penyedia Sumberdaya Genetik
Definisi Operasional	Keanekaragaman hayati flora dan fauna
Tujuan Pembangunan Sektor Lingkungan	Menjaga kelsetarian keanekaragaman flora dan fauna
Sektor Terkait	Kehutanan, pertanian
Tutupan Lahan	Kawasan Cagar Alam (CA)
	Kawasan Hutan Lindung (HL)
	Kawasan Tahura
	Kawasan Taman Nasional (TN)

Jasa ekosistem keanekaragaman hayati sebagai penyedia sumber daya genetik ditujukan untuk menjaga kelestarian keanekaragaman flora dan fauna. Prioritas utama kawasan yang berfungsi sangat tinggi sebagai konservasi keanekaragaman hayati adalah kawasan hutan. Upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan keanekaragaman hayati adalah pengelolaan kawasan hutan lindung maupun cagar alam, agar bisa terjaga dari campur tangan manusia yang cenderung merusak. Kawasan hutan yang dikelola oleh pemerintah di Kota Jambi mengalokasikan kawasan penting untuk perlindungan keanekaragaman hayati melalui penetapan hutan kota. Sedangkan kawasan cagar alam, taman nasional, dan taman wisata alam dikelola yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam, tidak terdapat di Kota Jambi.



Tabel III.2.46
Kawasan Konservasi di Dalam Hutan Sebagai Penyedia Sumberdaya Genetik Kota Jambi

Kelas	Luas Peta (Ha)	Lokasi
Hutan Kota M.Sabki	10 ha	Kecamatan Kotabaru
Hutan Kota Bagan Pete	46 ha	Kecamatan Bagan Pete
Hutan Pinus	11 ha	Kecamatan Bagan Pete

Sumber : Materi Teknis RTRW Kota Jambi

3.3 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.3.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Kota Jambi

Kinerja pelaksanaan keuangan Daerah Kota Jambi terutama dilihat dari pendapatan asli daerah dan belanja daerah uang menunjukan tingkat kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Dalam kurun waktu Tahun 2018-2022

A. Pendapatan Daerah

Realisasi penerimaan PAD Kota Jambi Tahun 2022 mencapai Rp. 2.565.665.891,20 dari target sebesar Rp. 1.670.844.905,50 dan memberikan kontribusi sebesar 34,87% terhadap total realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi pada Tahun 2022. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan PAD tahun tahun 2021, yakni sebesar Rp. 1.652.119.462,70, maka PAD Tahun 2022 meningkat 35,61% atau naik sebesar Rp. 913.546.429. Sedangkan untuk data tahun 2020 realisasi penerimaan PAD Kota Jambi mengalami penurunan dari tahun 2021 sekitar 5,62% (dengan total PAD 1.559.194.791,80 tahun 2020). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.





Tabel III.3.1

Perbandingan Target dan Realisasi PAD Kota Jambi Tahun 2018-2022

No	Jenis Pendapatan	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Terealisasi (%)	Target	Realisasi	Terealisasi (%)	Target	Realisasi	Terealisasi (%)
1	**Pendapatan Asli Daerah**									
	1.1 Pajak Daerah	203.500.000,00	215.444.388,00	105,87	242.090.000,00	255.915.037,50	105,71	232.060.000,00	216.815.393,50	93,43
	1.2 Retribusi Daerah	44.012.000,00	40.389.059,00	91,77	45.068.647,00	38.540.603,60	85,52	36.618.000,00	40.479.596,10	110,55
	1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kakayaan Daerah yang Disahkan	8.850.000,00	8.854.962,00	100,06	9.700.000,00	9.783.144,60	100,86	10.000.000,00	9.602.267,40	96,02
	1.4 Lain-lain PAD yang Sah	79.540.135,00	74.203.846,00	93,29	84.885.038,00	89.191.009,80	105,07	90.916.193,00	88.607.794,20	97,46
Total A		**335.902.135,00**	**338.892.255,00**	**100,89**	**381.743.685,00**	**393.429.795,50**	**103,06**	**369.594.193,00**	**355.505.051,20**	**96,19**
2	**Dana Perimbangan**									
	2.1 Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak	118.890.269,00	118.633.409,00	99,78	137.965.056,00	132.185.357,70	95,81	87.667.936,00	99.720.170,90	113,75
	2.2 Dana Alokasi Umum	714.783.378,00	714.783.378,00	100,00	757.404.051,00	757.404.051,00	100,00	690.724.772,00	687.484.664,00	99,53
	2.3 Dana Alokasi Khusu	291.823.567,00	277.298.116,00	95,02	234.950.785,00	220.587.624,70	93,89	254.829.051,10	249.254.139,80	97,81
	2.4 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.5 Pendapatan Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total B		**1.125.497.214,00**	**1.110.714.903,00**	**98,69**	**1.130.319.892,00**	**1.110.177.033,40**	**98,22**	**1.033.221.759,10**	**1.036.458.974,70**	**100,31**
3	**Lain-lain Pendapatan Yang Sah**									
	3.1 Pendapatan Hibah	62.534.000,00	35.914.102,00	57,43	61.479.800,00	60.013.627,90	97,62	75.761.804,50	10.745.942,10	14,18
	3.2 Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3 Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemda lainnya	81.347.485,00	92.499.055,00	113,71	81.347.488,00	114.911.044,00	141,26	97.614.609,00	115.018.774,80	117,83
	3.4 Dana Penyesuaian Otsus	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	11.291.209,00	11.291.209,00	100,00	37.746.049,00	37.746.049,00	100,00
	3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi Jambi	5.220.000,00	3.720.000,00	71,26	9.720.000,00	9.720.000,00	100,00	3.720.000,00	3.720.000,00	100,00
	3.6 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C		**167.101.485,00**	**150.133.157,00**	**89,85**	**163.838.497,00**	**195.935.880,90**	**119,59**	**214.842.462,50**	**167.230.765,90**	**77,84**
Jumlah A + B + C		**1.628.500.834,00**	**1.599.740.315,00**	**98,23**	**1.675.902.074,00**	**1.699.542.709,80**	**101,41**	**1.617.658.414,60**	**1.559.194.791,80**	**96,39**





Lanjutan Tabel diatas.....

No	Jenis Pendapatan	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Terealisasi (%)	Target	Realisasi	Terealisasi (%)
1	**Pendapatan Asli Daerah**						
	1.1 Pajak Daerah	297.860.000,00	244.016.777,50	81,92	320.380.000,00	301.796.809,10	94,20
	1.2 Retribusi Daerah	55.312.900,00	51.844.265,40	93,73	50.544.550,00	40.216.623,30	79,57
	1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kakayaan Daerah yang Disahkan	9.602.267,40	9.638.772,80	100,38	9.602.267,40	10.528.936,30	109,65
	1.4 Lain-lain PAD yang Sah	91.226.666,90	78.507.749,30	86,06	98.643.995,50	84.343.087,60	85,50
Total A		**454.001.834,30**	**384.007.565,00**	**84,58**	**479.170.812,90**	**436.885.456,30**	**91,18**
2	**Dana Perimbangan**						
	2.1 Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2 Dana Alokasi Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3 Dana Alokasi Khusu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.028.242.964,10	1.070.421.415,80	104,10	1.055.509.404,70	1.083.896.725,00	102,69
	2.5 Pendapatan Transfer Antar Daerah	114.936.579,70	135.605.387,00	117,98	136.164.687,90	146.977.167,10	107,94
Total B		**1.143.179.543,80**	**1.206.026.802,80**	**105,50**	**1.191.674.092,60**	**1.230.873.892,10**	**103,29**
3	**Lain-lain Pendapatan Yang Sah**						
	3.1 Pendapatan Hibah	1.000.000,00	597.000,00	59,70	0,00	897.906.542,80	0,00
	3.2 Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3 Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemda lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.4 Dana Penyesuaian Otsus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi Jambi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.6 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan	60.224.550,00	61.488.094,90	102,10	0,00	61.488.094.937,00	0,00
Total C		**61.224.550,00**	**62.085.094,90**	**101,41**	**0,00**	**897.906.542,80**	**0,00**
Jumlah A + B + C		**1.658.405.928,10**	**1.652.119.462,70**	**99,62**	**1.670.844.905,50**	**2.565.665.891,20**	**153,55**

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Jambi Tahun Anggaran 2019;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Jambi Tahun Anggaran 2020;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Jambi Tahun Anggaran 2021;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Jambi Tahun Anggaran 2022;
BPS Kota Jambi Tahun 2018 (tentang Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2018); dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2024.



Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa untuk hasil teralisasi pada tahun 2018 hingga 2022 pada jenis pendapatan daerah meliputi:

1. Jenis Pendapatan berupa berupa Pendapatan Asli Daerah mengalami fluktuasi dimana tahun 2018 sekitar 100,89%, mengalami kenaikan pada tahun 2019 sekitar 103,06%. Pada tahun 2020 mengalami penurunan sekitar 96,19%, dan mengalami kenaikan pada tahun 2022 sekitar 91,18%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

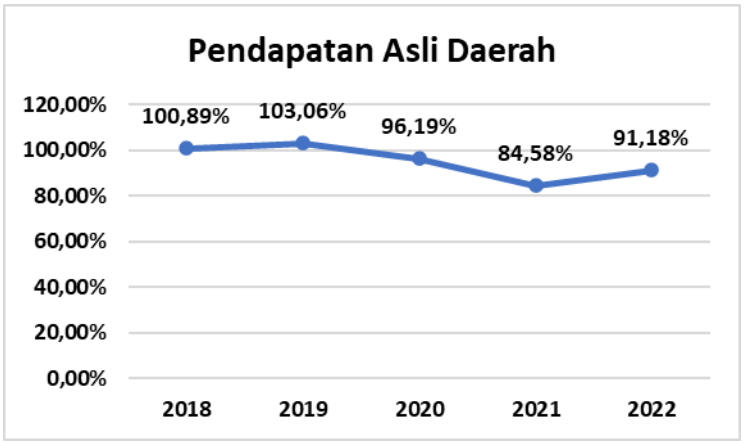

Gambar 3.3.1
Grafik Terealisasi Berupa Pendapatan Asli Daerah
Kota Jambi Tahun 2018-2022

2. Jenis Pendapatan berupa Dana Perimbangan ini mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2018 mencapai 98,69% hingga pada tahun 2022 mencapai 103,29%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

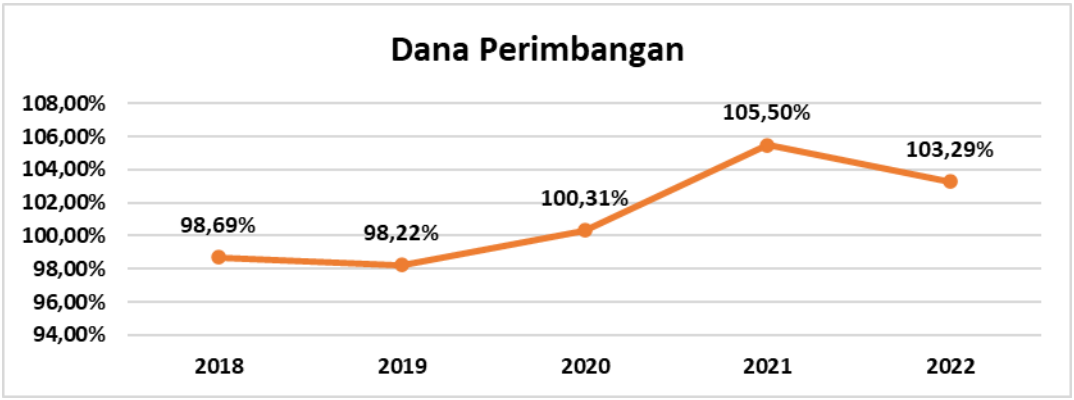

Gambar 3.3.2
Grafik Terealisasi Berupa Pendapatan Transperan
Kota Jambi Tahun 2018-2022

3. Jenis Pendapatan berupa berupa lain-lain pendapatan yang sah mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2018 mencapai 89,85% hingga pada tahun 2022 mencapai 0%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

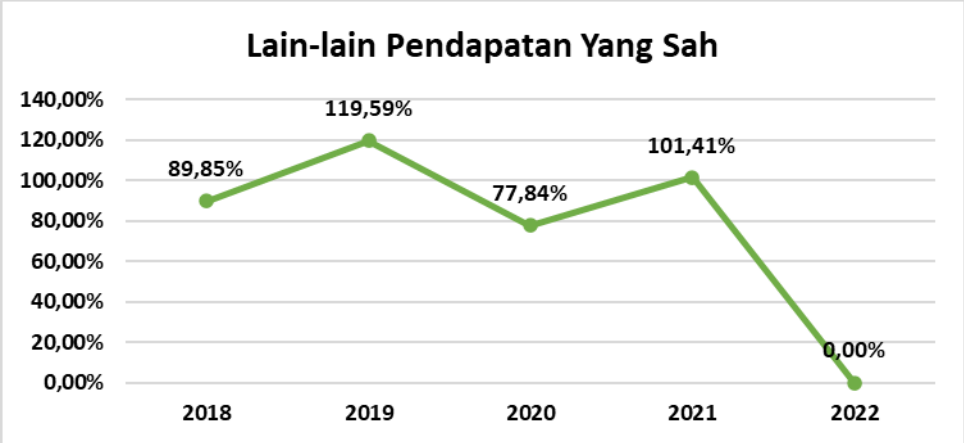

Gambar 3.3.3
Grafik Terealisasi Berupa Lain-Lain Pendapatan Yang Sah
Kota Jambi Tahun 2018-2022

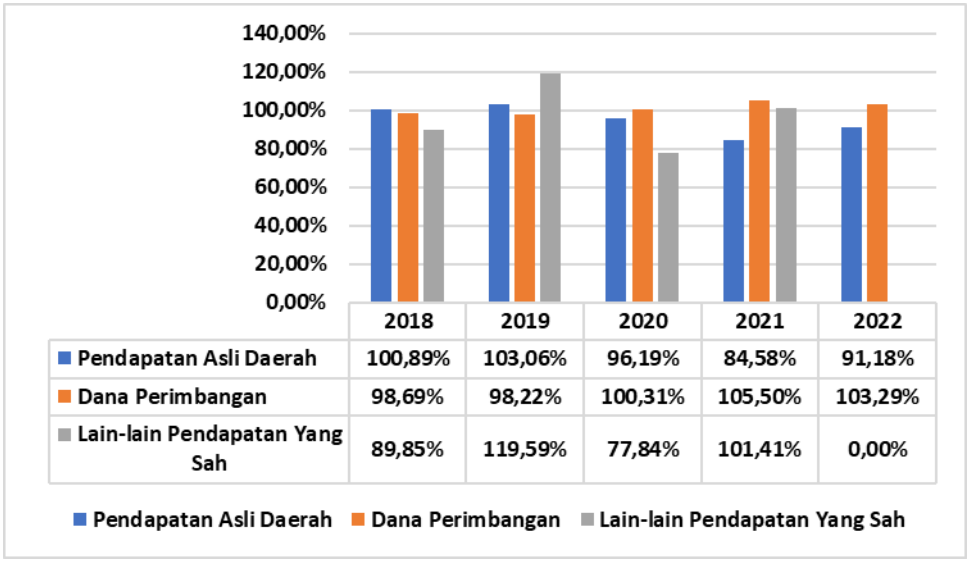

	2018	2019	2020	2021	2022
Pendapatan Asli Daerah	100,89%	103,06%	96,19%	84,58%	91,18%
Dana Perimbangan	98,69%	98,22%	100,31%	105,50%	103,29%
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	89,85%	119,59%	77,84%	101,41%	0,00%

Gambar 3.3.4
Grafik Rekap Teralisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2022

B. Belanja Daerah

Perwujudan pelayanan publik di daerah tentunya berkorelasi erat dengan kebijakan belanja daerah. Anggaran Belanja Daerah akan mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila terealisasi dengan baik. Dengan demikian, secara ideal seharusnya Belanja Daerah dapat menjadi komponen yang cukup berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Belanja Daerah merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mendanai seluruh program/kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik di daerah. Program/kegiatan dimaksud dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah, pemerataan pendapatan, serta pembangunan di berbagai sektor. Komponen yang mengindikasikan aktivitas dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Belanja Daerah. Komponen ini merupakan pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah yang diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja yang pengeluarannya disesuaikan dengan kemampuan dan



potensi fiskal daerah. Arah kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran yang berbasis kinerja, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, prioritas pembangunan sesuai potensi dan permasalahannya, serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun depan.

Target Belanja Daerah Pemerintah Kota Jambi sampai dengan Perubahan APBD Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 1.812.832.658.629,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 1.622.747.432.178,57 (89,51%)yang terdiri dari:

1) Belanja Tidak Langsung; dan
2) Belanja Langsung.

Tabel berikut menunjukkan target dan realisasi Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran dari 2018 hingga tahun 2022.





Tabel III.3.2

Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2022

No	Uraian Belanja	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Terealisasi (%)	Target	Realisasi	Terealisasi (%)
1	**Belanja Tidak Langsung**	**759.889.727.857,00**	**653.382.038.968,00**	**85,98**	**806.303.727.641,00**	**695.916.805.729,00**	**86,31**
	1.1 Belanja Pegawai	709.626.059.182,00	614.857.160.444,00	86,65	780.513.273.241,00	674.551.639.407,00	86,42
	1.2 Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3 Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4 Belanja Hibah	42.749.214.275,00	36.588.195.224,00	85,59	14.726.000.000,00	13.663.492.850,00	92,78
	1.5 Belanja Bantuan Sosial	4.116.455.000,00	39.154.000,00	0,95	7.651.455.000,00	5.801.400.000,00	75,82
	1.6 Belanja Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa	1.292.132.400,00	1.292.132.400,00	100,00	1.307.132.400,00	836.172.392,00	63,97
	1.7 Belanja Tidak Terduga	2.105.867.000,00	605.396.900,00	28,75	2.105.867.000,00	1.064.101.080,00	50,53
2	**Belanja Langsung**	**995.261.904.610,00**	**921.543.238.332,20**	**92,59**	**1.042.522.489.234,00**	**936.571.372.047,03**	**89,84**
	2.1 Belanja Pegawai	70.245.532.548,00	59.854.132.455,00	85,21	66.138.355.995,00	58.246.248.150,00	88,07
	2.2 Belanja Barang dan Jasa	460.107.061.790,00	415.879.943.828,24	90,39	523.039.125.378,00	456.724.739.127,71	87,32
	2.3 Belanja Modal	464.909.310.272,00	445.809.162.048,96	95,89	453.345.007.861,00	421.600.384.769,32	93,00
Jumlah Belanja Daerah		**1.755.151.632.467,00**	**1.574.925.277.300,20**	**89,73**	**1.848.826.216.875,00**	**1.632.488.177.776,03**	**88,30**

Lanjutan Tabel diatas.....

No	Uraian Belanja	Tahun 2020			Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Terealisasi (%)	Target	Realisasi	Terealisasi (%)
1	**Belanja Tidak Langsung**	**775.565.398.117,00**	**694.999.439.218,53**	**89,61**	**80.835.215.251,00**	**57.367.760.603,00**	**70,97**
	1.1 Belanja Pegawai	680.603.063.244,00	628.395.170.421,00	92,33	0,00	0,00	0,00
	1.2 Belanja Bunga	1.000.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000.000,00	1.626.646.569,00	10,84
	1.3 Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	197.820.000,00	197.820.000,00	100,00
	1.4 Belanja Hibah	25.985.781.492,00	19.888.786.667,53	76,54	47.934.807.576,00	43.843.156.233,00	91,46
	1.5 Belanja Bantuan Sosial	7.637.723.000,00	5.671.400.000,00	74,26	7.287.353.850,00	6.637.634.682,00	91,08
	1.6 Belanja Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7 Belanja Tidak Terduga	60.238.830.381,00	41.044.082.130,00	68,14	10.415.233.825,00	5.062.503.119,00	48,61
2	**Belanja Langsung**	**1.053.269.936.008,00**	**943.512.962.709,92**	**89,58**	**1.880.859.703.807,00**	**1.682.442.656.245,79**	**89,45**
	2.1 Belanja Pegawai	66.106.459.381,00	59.788.279.570,00	90,44	745.627.187.957,00	682.947.098.349,00	91,59
	2.2 Belanja Barang dan Jasa	531.635.283.032,00	448.351.268.568,00	84,33	570.570.340.308,00	503.689.765.887,85	88,28
	2.3 Belanja Modal	455.528.193.595,00	435.373.414.571,92	95,58	564.662.175.542,00	495.805.792.008,94	87,81
Jumlah Belanja Daerah		**1.828.835.334.125,00**	**1.638.512.401.928,45**	**89,59**	**1.961.694.919.058,00**	**1.739.810.416.848,79**	**88,69**





Lanjutan Tabel diatas.....

No	Uraian Belanja	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Terealisasi (%)
1	**Belanja Tidak Langsung**	**80.826.742.766,00**	**60.982.112.538,00**	**75,45**
	1.1 Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
	1.2 Belanja Bunga	6.901.104.160,00	5.866.774.340,00	0,00
	1.3 Belanja Subsidi	2.100.000.000,00	614.964.000,00	29,28
	1.4 Belanja Hibah	52.968.676.490,00	47.357.346.311,00	89,41
	1.5 Belanja Bantuan Sosial	14.440.317.100,00	3.934.494.800,00	27,25
	1.6 Belanja Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00
	1.7 Belanja Tidak Terduga	4.416.645.016,00	3.208.533.087,00	72,65
2	**Belanja Langsung**	**1.732.005.915.863,00**	**1.561.765.319.640,57**	**90,17**
	2.1 Belanja Pegawai	736.429.689.205,00	657.648.319.579,50	89,30
	2.2 Belanja Barang dan Jasa	593.746.544.387,00	535.487.916.812,58	90,19
	2.3 Belanja Modal	401.829.682.271,00	368.629.083.248,49	91,74
Jumlah Belanja Daerah		**1.812.832.658.629,00**	**1.622.747.432.178,57**	**89,51**

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Jambi Tahun Anggaran 2019;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Jambi Tahun Anggaran 2020;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Jambi Tahun Anggaran 2021;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Jambi Tahun Anggaran 2022;
BPS Kota Jambi Tahun 2018 (tentang Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2018); dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2024.



Melihat pada tabel diatas bahwa terhadap belanja daerah Kota Jambi dari tahun 2018 hingga 2022 mengalami fluktuasi antara lain:

1. Untuk belanja tidak langsung yang teralisasi mengalami fluktuasi dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Pada tahun 2018 sekitar 85,98% (atau sekitar Rp. 653.382.038.968,00) mengalami kenaikan hingga tahun 2020 sekitar 89,61% (atau sekitar Rp. 694.999.439.218,53), pada tahun 2022 mengalami penurunan sekitar 75,45% (atau sekitar Rp. 60.982.112.538,00). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

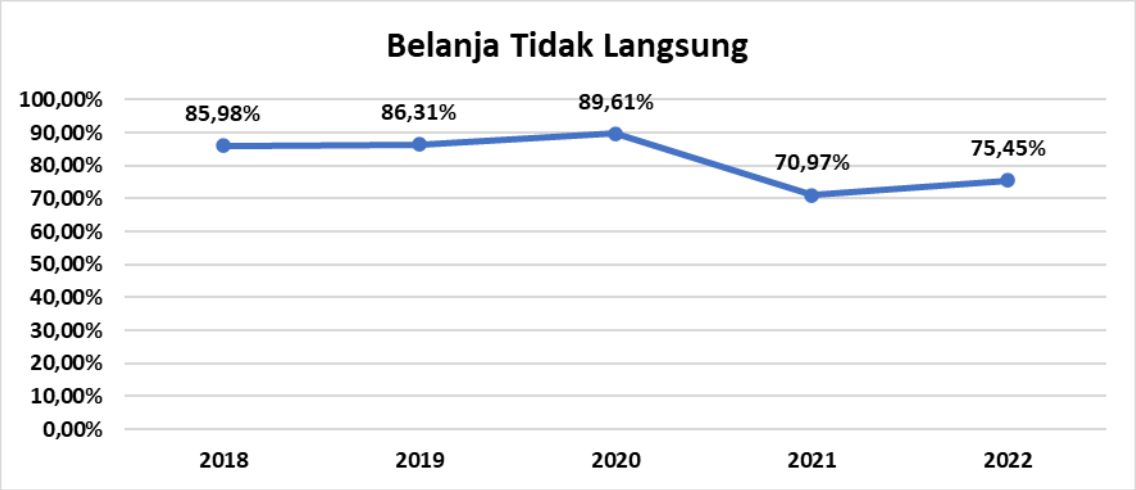

Gambar 3.3.5
Grafik Terealisasi Belanja Operasi di Kota Jambi Tahun 2018-2022

2. Untuk belanja langsung yang teralisasi mengalami penurunan dari tahun 2018 sekitar 92,59% (atau sekitar Rp. 921.543.238.332,20) hingga tahun 2022 sekitar 90,17% (atau sekitar Rp. 1.561.765.319.640,57). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.



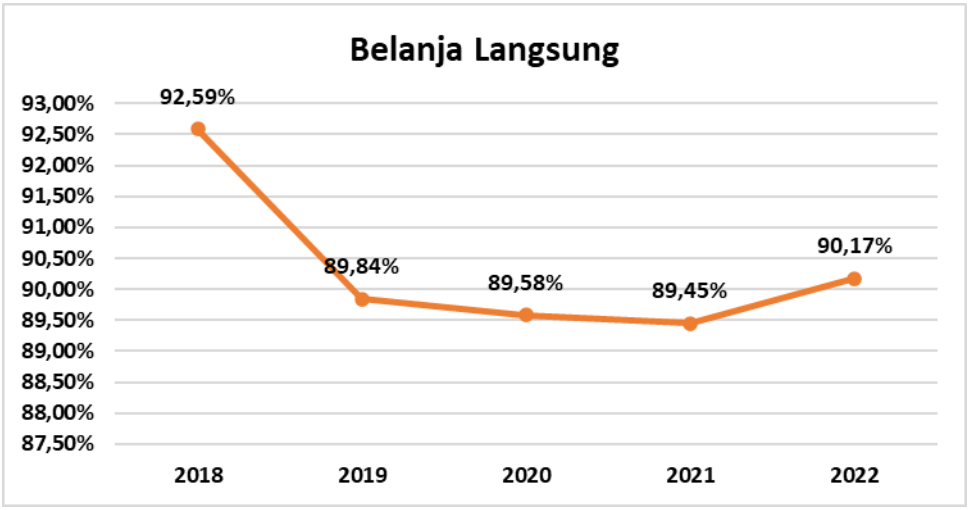

Gambar 3.3.6
Grafik Terealisasi Belanja Modal di Kota Jambi Tahun 2018-2022

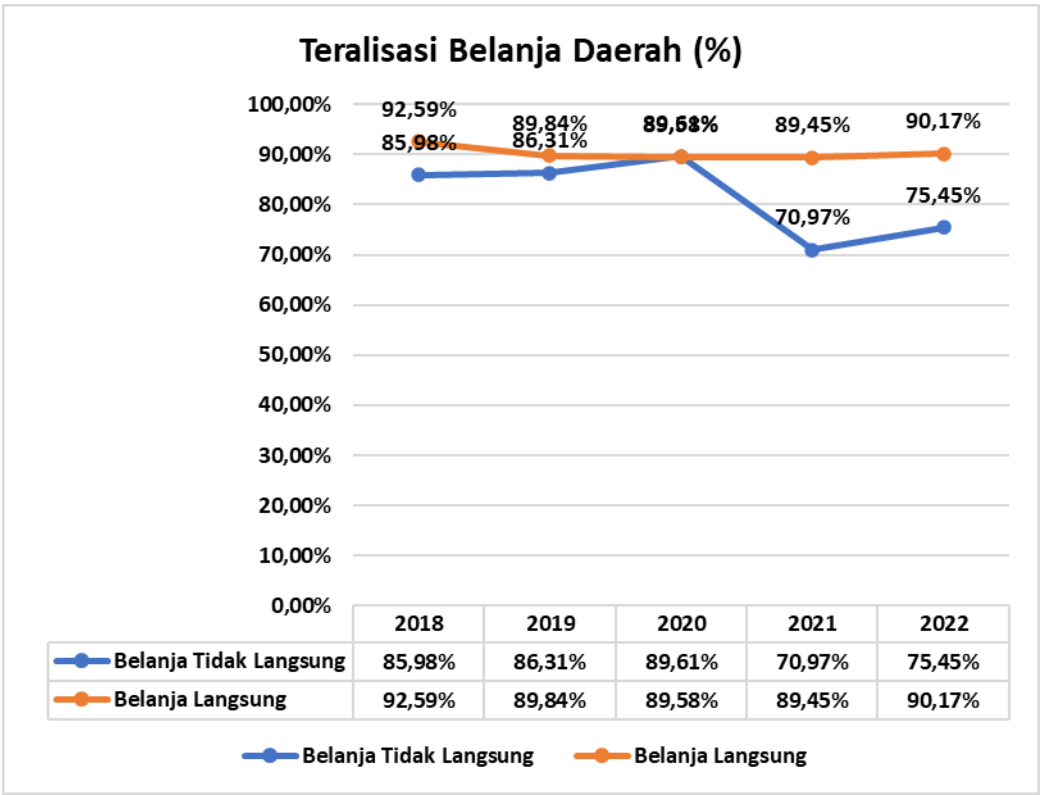

Gambar 3.3.7
Grafik Rekap Teralisasi Belanja Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2022





C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah terdiri penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

Realisasi pembiayaan daerah apabilia dibandingkan dengan anggran yang telah ditentukan terjadi defisit anggaran pada tahun 2019 sekitar - 89,14% (sekitar -Rp. 154.138.956.336), dan terus terjadi hingga tahun 2022 mencapai -67,76% (sekitar -Rp.96.277.930.218). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.





Tabel III.3.3
Angaran Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Kota Jambi Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun 2018				Tahun 2019			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Lebih (Kurang) (Rp)	(%)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Lebih (Kurang) (Rp)	(%)
	Pembiayaan Daerah								
1	**Penerimaan Pembiayaan**								
	1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	131.650.797.288,00	131.650.797.288,00	0,00	0,00	172.924.144.899,89	172.924.144.899,89	0	0,00
	1.2 Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**131.650.797.288,00**	**131.650.797.288,00**	**0,00**	**0,00**	**172.924.144.899,89**	**172.924.144.899,89**	**0**	**0,00**
2	**Pengeluaran Pembiayaan**								
	2.1 Penyertaan Modal Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	2.2 Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
	Pembiayaan Netto	**131.645.797.288,00**	**131.645.797.288,00**	**0,00**	**0,00**	**172.924.144.899,89**	**172.924.144.899,89**	**0**	**0,00**
	Surplus/(Defisit)	**(131.645.797.288,00)**	**(131.645.797.288,00)**	**0,00**	**0,00**	**(172.924.144.899,89)**	**18.785.188.563,83**	**(154.138.956.336)**	**(89,14)**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**191.709.333.463,72**	**(191.709.333.464)**	**(100,00)**

Lanjutan Tabel diatas.....

No	Uraian	Tahun 2020				Tahun 2021			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Lebih (Kurang) (Rp)	(%)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Lebih (Kurang) (Rp)	(%)
	Pembiayaan Daerah								
1	**Penerimaan Pembiayaan**								
	1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	211.176.919.411,00	162.476.477.416,00	48.700.441.995,00	23,06	305.288.991.024,00	248.402.635.024,06	56.886.355.999,94	18,63
	1.2 Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**211.176.919.411,00**	**162.476.477.416,00**	**48.700.441.995,00**	**23,06**	**305.288.991.024,00**	**248.402.635.024,06**	**56.886.355.999,94**	**18,63**
2	**Pengeluaran Pembiayaan**								
	2.1 Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00
	2.2 Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Pembiayaan Netto	**211.176.919.411,00**	**162.476.477.416,00**	**48.700.441.995,00**	**23,06**	**303.288.991.024,00**	**246.402.635.024,06**	**56.886.355.999,94**	**18,76**
	Surplus/(Defisit)	**211.176.919.411,00**	**(79.316.610.038,62)**	**131.860.309.372,38**	**62,44**	**(303.288.991.024,00)**	**(87.690.954.095,33)**	**(215.598.036.928,67)**	**(71,09)**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	**0,00**	**83.159.867.377,38**	**(83.159.867.377)**	**(100,00)**	**0,00**	**158.711.680.928,73**	**(158.711.680.929)**	**(100,00)**





Lanjutan Tabel diatas.....

No	Uraian	Tahun 2022			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Lebih (Kurang) (Rp)	(%)
	Pembiayaan Daerah				
1	**Penerimaan Pembiayaan**				
	1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	159.678.657.158,00	159.683.323.627,49	(4.666.469)	(0,003)
	1.2 Penerimaan Pinjaman Daerah	55.409.096.000,00	55.409.096.000,00	0	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**215.087.753.158,00**	**215.092.419.627,49**	**(4.666.469)**	**(0,0022)**
2	**Pengeluaran Pembiayaan**				
	2.1 Penyertaan Modal Daerah	73.000.000.000,00	73.000.000.000,00	0	0,00
	2.2 Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**73.000.000.000,00**	**73.000.000.000,00**	**0**	**0,00**
	Pembiayaan Netto	**142.087.753.158,00**	**142.092.419.627,49**	**(4.666.469)**	**(0,003)**
	Surplus/(Defisit)	**(142.087.753.158,00)**	**45.809.822.940,23**	**(96.277.930.218)**	**(67,76)**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	**0,00**	**187.902.242.567,72**	**(187.902.242.568)**	**(100,00)**

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Jambi Tahun Anggaran 2019;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Jambi Tahun Anggaran 2020;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Jambi Tahun Anggaran 2021;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Jambi Tahun Anggaran 2022;
BPS Kota Jambi Tahun 2018 (tentang Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2018); dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2024.



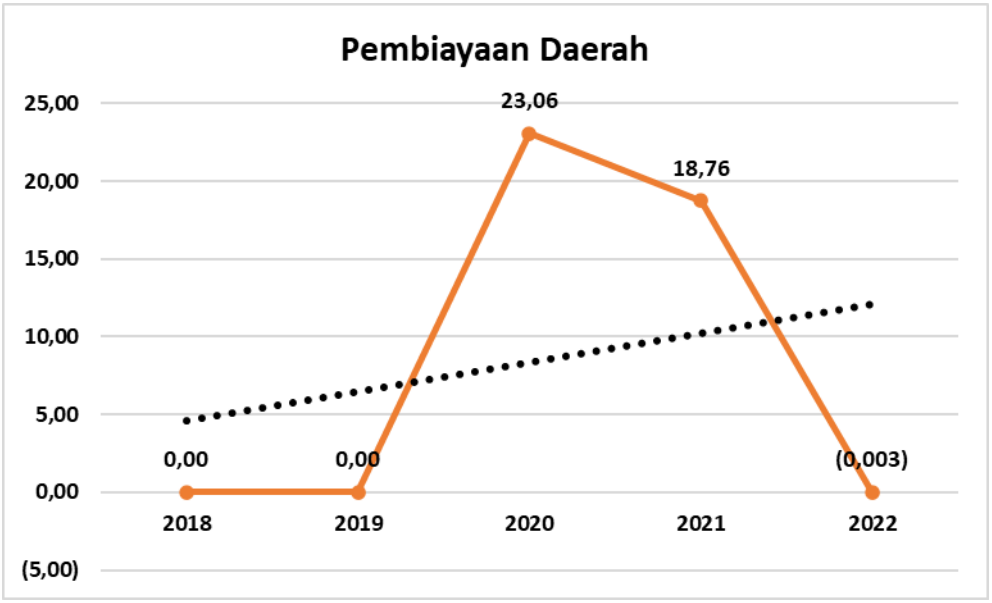

Gambar 3.3.8
Grafik *Netto* Angaran Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Kota Jambi Tahun 2018-2022

3.3.2 Neraca Daerah Kota Jambi

Perkembangan neraca daerah Kota Jambi, analisis rasio likuiditas, analisis rasio solvabilitas dan analisis rasio aktivitas.

Rasio Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan/entitas ekonomi untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. Secara umum untuk menghitung Rasio Likuditas dilakukan dengan menghitung current ratio dan quick ratio. Nilai current rasio Kota Jambi adalah setiap Rp.1 utang lancar dijamin oleh Rp. 16,06 harta lancar atau perbandingannya antara aktiva lancar dengan hutang lancar adalah 16,06 : 1.

Quick Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Nilai quick ratioadalah sebesar 7,50 yang berarti keadaanya sangat baik karena kota dapat membayar hutang walaupun sudah dikurangi persediaan.



Tabel III.3.4
***Ratio Likuiditas* di Tahun 2018 – 2022**

No	Tahun	Current Rasio	Quick Ratio
1	2018	19,46	9,18
2	2019	37,03	12,43
3	2020	15,35	9,09
4	2021	4,68	3,22
5	2022	3,76	3,56
Rata-rata		**16,06**	**7,50**

Sumber: BPKAD Kota Jambi Tahun 2018 - 2022

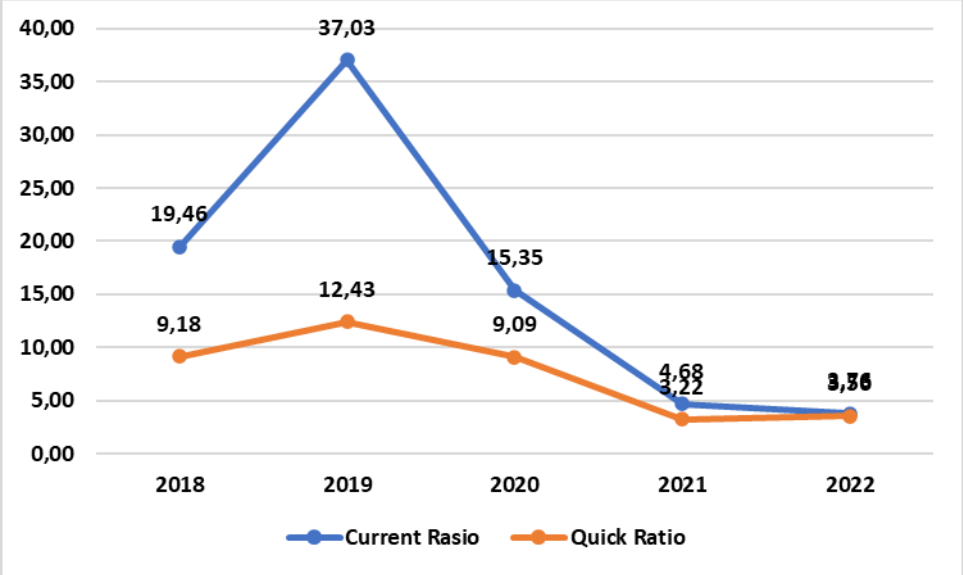

Gambar 3.3.9
***Grafik Ratio Likuiditas* di Tahun 2018 – 2022**

Ratio Solvabilitias adalah kemampuan sebuah entitas organisasi (pemerintah/perusahaan) untuk memenuhi segala kewajiban finansialnya apabila sekiranya perusahaan tersebut pada saat itu dilikuidasikan. Rasio ini mengukur likuiditas jangka panjang perusahaan/entitas perekonomian dan dengan demikian memfokuskan pada sisi kanan neraca.

Secara umum besarnya nilai *rasio solvabilitas* baik menggunakan Total *debt to equity ratio* dengan nilai rata-rata sekitar 1,02, sedangkan Total *debt to total asset ratio* dengan nilai rata-rata sekitar 0,02, yang artinya Pemeritah Daerah Kota Jambi sangat bisa menutupi hutang dari nilai aseynya.





Tabel III.3.5
***Ratio Salvabilitas* di Tahun 2018 – 2022**

No	Uraian	Tahun					Rata-Rata
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	*Total Debt to Equity Rasio*	1,01	1,01	1,01	1,03	1,03	1,02
2	*Total Debt to Total Asset Rasio*	0,01	0,01	0,01	0,03	0,03	0,02

Sumber: BPKAD Kota Jambi Tahun 2018 - 2022

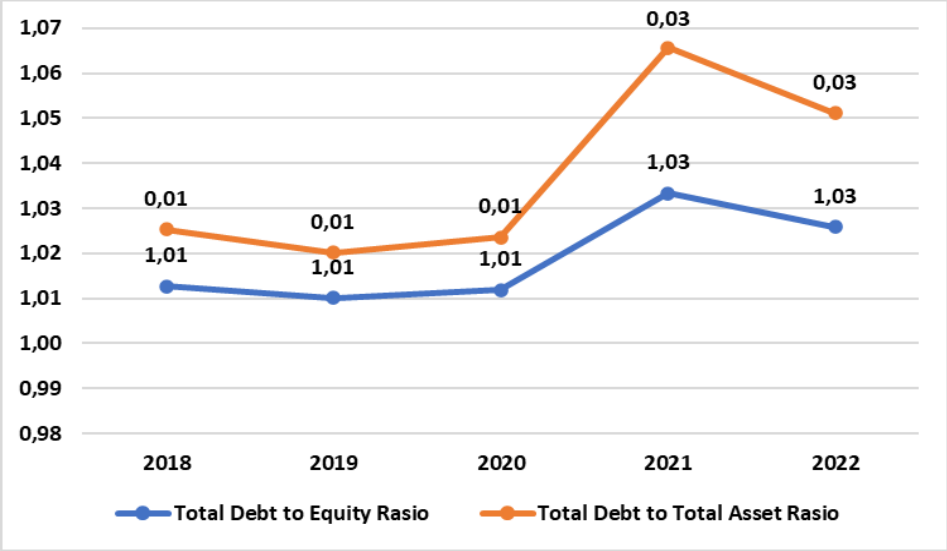

Gambar 3.3.10
***Ratio Salvabilitas* di Tahun 2018 – 2022**

Debt Ratio menunjukan sejauh mana hutang dapat ditutupi oleh aktiva. Secara umum besarnya nilai kewajiban hutang masih sangat kecil dibandingkan dengan nilai aset Kota Jambi dengan kecenderungan rata-rata sekitar 1,84%, yang artinya kewajiban hutang masih kecil dibandingkan dengan aset Kota Jambi miliki.

Tabel III.3.6
***Debt Ratio* di Tahun 2018 – 2022**

No	Tahun	Rasio (%)
1	2018	1,26
2	2019	1,00
3	2020	1,17
4	2021	3,23
5	2022	2,52
Rata-rata		**1,84**

Sumber: BPKAD Kota Jambi Tahun 2018 - 2022



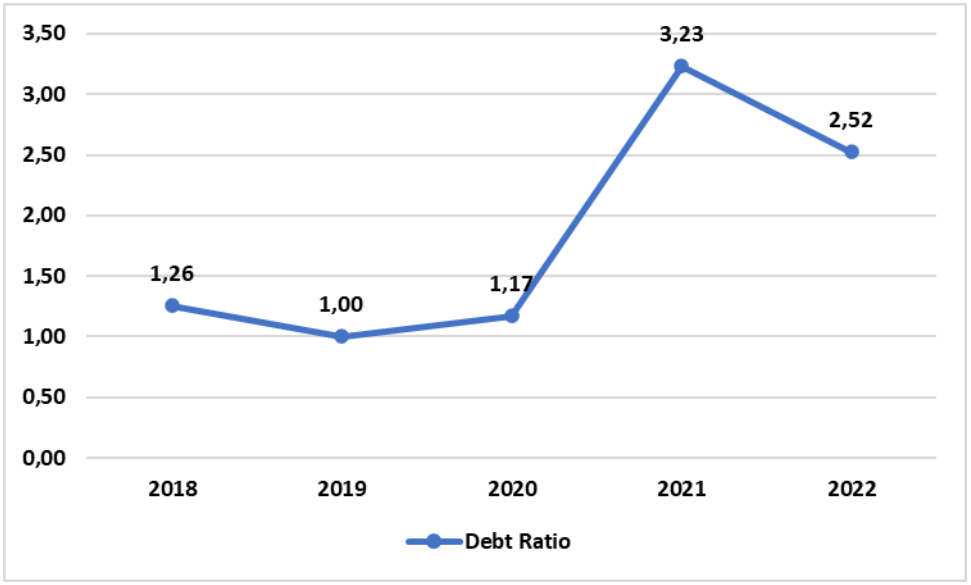

Gambar 3.3.11
***Debt Ratio* di Tahun 2018 – 2022**

Bila dilihat dari rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah, nilai Aset terus mengalami kenaikan pert tahun nya yaitu dengan rata-rata sebesar 9,83% per tahun nya. Dari komponennya, Aset Lancar Kota Jambi pertumbuhannya fluktuasi dengan nilai rata-rata pertahun nya sekitar 9,78%. Sedangkan untuk nilai aset tetap mengalami kenaikan dengan nilai pertumbuhan rata-rata sebesar 10,03% pertahun. Untuk nilai Investasi Jangka Panjang mengalami fluktuasi yang cukup signifikan yaitu dengan nilai pertumbuhan rata-rata pertahun sekitar 12,39%. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan nilai Kewajiban maka pertumbuhan rata-rata pertahun sekitar 4,61%. Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat ditingkatkan dengan memperbaiki kinerja pengelolaan aset, termasuk dalam pengelolaan aset investasi jangka panjang dan penyusunan strategi agar aset Kota Jambi memberikan pengaruh positif terhadap pendapatan daerah, pelayanan publik, serta pertumbuhan ekonomi kota. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel III.3.7
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Jambi Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	Nilai Pertumbuhan Pertahun (%)					Rata-Rata
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Aset Lancar	31,56	21,55	(19,89)	17,21	(1,52)	**9,78**
2	Aset Tetap	17,46	3,59	10,08	8,30	10,70	**10,03**
3	Investasi Jangla Panjang	42,84	20,92	(5,64)	1,11	2,70	**12,39**
4	Kewajiban	(29,09)	(17,96)	20,51	66,47	(16,86)	**4,61**

Sumber: BPKAD Kota Jambi Tahun 2018 - 2022

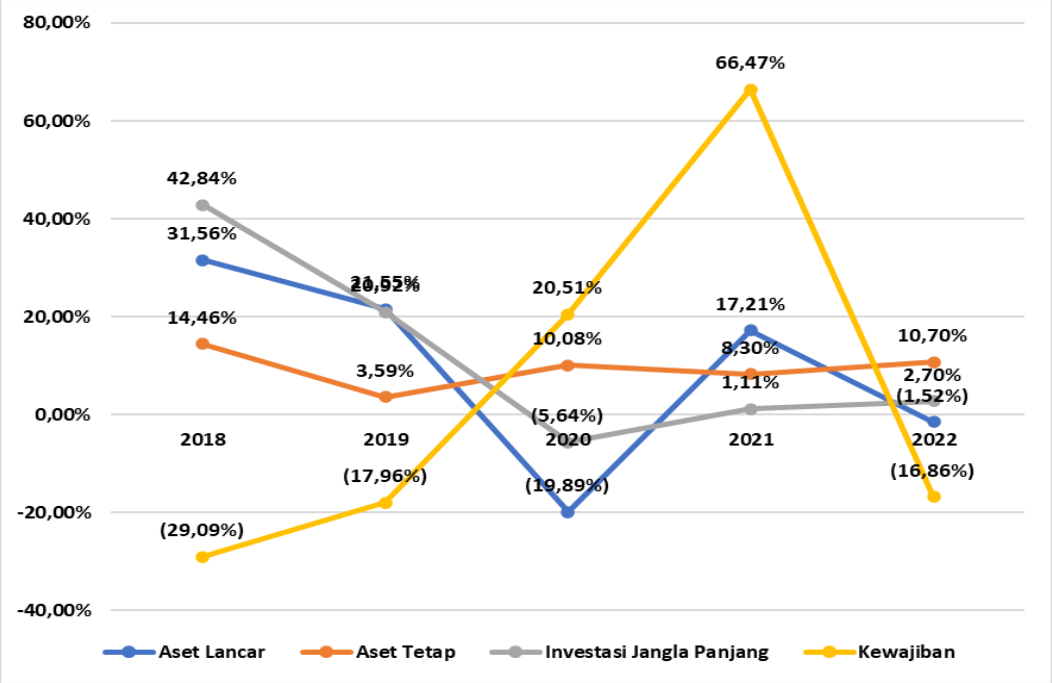

Gambar 3.3.12
Grafik Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Jambi Tahun 2018 – 2022





Tabel III.3.8
Nila Neraca Daerah Kota Jambi Tahun 2018 – 2022

No	Ref	Uraian	Rata-Rata Pertumbuhan (%)				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	**5.3.1**	**ASET**					
2	**5.3.1.1**	**ASET LANCAR**					
3	5.3.1.1.1	Kas di Kas Daerah	103.646.263.728,36	200.237.403.767,48	155.477.665.003,42	149.617.730.164,55	184.326.446.621,64
4	5.3.1.1.2	Kas di Bendahara Pengeluaran	430.649.548,00	24.190.554,00	9.474.874,00	3.408.635,00	3.084.422,00
5	5.3.1.1.3	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	104.356.700,00	0,00	0,00	0,00	111.484.575,00
6	5.3.1.1.4	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	6.796.702,00	39.172.280,00	541.360.337,00	4.960.155,00
7	5.3.1.1.5	Kas di BLUD	11.921.191.447,93	6.316.485.719,84	6.907.958.431,84	8.830.342.316,38	3.041.823.556,72
8	5.3.1.1.6	Kas di Bendahara Dana BOS	369.346.498,60	2.960.081.649,80	1.723.796.145,07	602.361.078,80	517.337.954,80
9	5.3.1.1.7	Kas Lainnya	1.631.961.018,00	1.631.961.018,00	2.219.411.417,53	145.897.508,76	151.838.316,56
10	5.3.1.1.8	Setara Kas	55.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	5.3.1.1.9	Piutang Pajak	69.077.655.492,50	83.828.637.105,50	95.550.308.428,50	102.446.982.298,50	106.199.018.164,50
12	5.3.1.1.10	Piutang Retribusi	2.256.004.907,62	2.535.281.830,89	2.655.626.866,98	2.785.353.898,98	2.855.003.746,98
13	5.3.1.1.11	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	7.303.904.367,37	9.398.082.469,96	5.124.050.429,85	61.835.584.420,25	40.910.976.362.362,30
14	5.3.1.1.12	Piutang Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	0,00	18.995.915.913,00	11.660.668.324,00	0,00	0,00
15	5.3.1.1.13	Piutang Dana Bagi Hasil dari Provinsi	47.579.459.681,26	54.402.857.829,90	42.178.873.288,00	46.951.151.955,00	51.517.348.364,00
16	5.3.1.1.14	Penyisihan Piutang	(44.352.588.821,08)	(50.254.758.610,57)	(57.099.912.952,95)	(63.524.278.417,36)	(70.123.250.807,56)
17	5.3.1.1.15	Belanja Dibayar Dimuka	347.630.567,71	454.484.124,09	334.343.898,91	189.958.065,00	206.891.349,58
18	5.3.1.1.16	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	29.303.126,14	92.182.809,81	97.835.751,96	116.083.087,61	105.820.729,54
19	5.3.1.1.17	Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	5.3.1.1.18	Persediaan	19.647.418.747,27	19.883.258.381,44	25.484.229.979,09	42.579.477.436,42	27.992.539.505,37
21	**Jumlah Aset Lancar (No 3 sd 20)**		**274.992.557.009,68**	**350.512.861.265,14**	**292.363.502.166,20**	**353.121.412.784,89**	**347.821.323.016,48**
22	**5.3.1.2**	**Investasi Jangka Panjang**					
23	5.3.1.2.1	Investasi Non Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Investasi Non Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	5.3.1.2.2	Investasi Permanen	235.740.516.861,00	298.095.777.114,00	282.174.577.550,58	285.335.001.955,84	293.264.113.221,07
26		Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	235.740.516.861,00	298.095.777.114,00	282.174.577.550,58	285.335.001.955,84	293.264.113.221,07





No	Ref	Uraian	Rata-Rata Pertumbuhan (%)				
			2018	2019	2020	2021	2022
27	**Jumlah Investasi Jangka Panjang (No 23 dan 25)**		**235.740.516.861,00**	**298.095.777.114,00**	**282.174.577.550,58**	**285.335.001.955,84**	**293.264.113.221,07**
28	**5.3.1.3**	**Aset Tetap**					
29	5.3.1.3.1	Tanah	446.942.358.502,00	443.249.985.142,00	532.078.576.169,00	561.718.011.374,00	83.465.233.610,00
30	5.3.1.3.2	Peralatan san Mesin	640.607.006.467,74	721.041.631.595,73	856.569.347.811,13	943.093.802.640,65	1.011.854.497.151,55
31	5.3.1.3.3	Gedung dan Bangunan	1.023.171.254.060,93	1.160.175.333.633,91	1.259.108.922.869,71	1.441.383.417.029,41	1.519.964.184.705,20
32	5.3.1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.921.235.725.076,41	2.276.893.733.565,51	2.446.262.820.544,85	2.689.838.993.180,88	2.906.223.956.056,33
33	5.3.1.3.5	Aset Tetap Lainnya	318.430.670.997,84	156.101.786.042,71	206.542.105.332,34	263.645.627.281,34	289.462.761.379,33
34	5.3.1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	5.033.028.969,81	3.123.088.549,99	21.372.814.499,99	25.204.316.050,00	46.142.825.050,00
35	5.3.1.3.7	Akumulasi Penyusutan	(1.512.401.509.987,92)	(1.811.787.140.836,60)	(2.042.510.938.073,42)	(2.348.666.761.395,62)	(2.608.375.034.397,83)
36	**Jumlah Aset Tetap (No 29 sd 35)**		**2.843.018.534.086,81**	**2.948.798.417.693,25**	**3.279.423.649.153,60**	**3.576.217.406.160,66**	**4.004.738.423.554,58**
37	**5.3.1.4**	**Aset Lainnya**					
38	5.3.1.4.1	Tuntutan Ganti Rugi	874.616.224,15	879.986.456,07	106.520.691,78	73.512.803,57	50.530.476,19
39	5.3.1.4.2	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	41.117.000.000,00	41.117.000.000,00	41.117.000.000,00	41.117.000.000,00	41.117.000.000,00
40	5.3.1.4.3	Aset Tak Berwujud	5.674.368.539,77	6.574.190.577,77	6.688.836.527,77	6.773.637.327,88	6.892.477.827,88
41	5.3.1.4.4	Aset Lain-Lain	82.614.131.833,28	67.055.274.076,18	89.954.806.808,21	53.568.125.703,59	21.285.918.848,26
42	5.3.1.4.5	Amortisasi	(3.266.425.096,25)	(4.631.270.849,09)	(5.563.329.590,67)	(6.327.454.605,88)	(6.685.312.052,88)
43	5.3.1.4.6	Kas Yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	0,00	0,00	46.425.751,00	100.568.438,00
44	5.3.1.4.7	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	0,00	0,00	0,00	13.836.304.323,00
45	**Jumlah Aset Lainnya (No 38 sd 44)**		**127.013.691.500,95**	**110.995.180.260,93**	**132.303.834.437,09**	**95.251.246.980,16**	**76.597.487.860,45**
46	**JUMLAH ASET**		**3.480.765.299.458,44**	**3.708.402.236.333,32**	**3.986.265.563.307,47**	**4.309.925.067.881,55**	**4.722.421.347.652,58**
47	**5.3.2**	**KEWAJIBAN**					
48	**5.3.2.1**	**Kewajiban Jangka Pendek**					
49	5.3.2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1.398.491,00	0,00	501.036.728,27	62.442.882,00	114.233.034,00
50	5.3.2.1.2	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	2.000.000.000,00	0,00	47.000.000.000,00	68.522.740.000,00
51	5.3.2.1.3	Utang Bunga	0,00	0,00	0,00	1.043.869.978,00	962.846.340,00
52	5.3.2.1.4	Pendapatan Diterima Dimuka	4.570.201.021,00	4.096.908.111,07	4.263.139.399,07	4.056.805.067,44	3.238.180.189,88
53	5.3.2.1.5	Utang Belanja	8.105.936.902,56	3.367.855.541,00	14.277.916.948,00	22.711.187.493,00	19.330.724.939,00
54	5.3.2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.453.015.332,50	0,00	0,00	616.670.888,00	345.387.498,00





No	Ref	Uraian	Rata-Rata Pertumbuhan (%)				
			2018	2019	2020	2021	2022
55	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (No 48 sd 54)		14.130.551.747,06	9.464.763.652,07	19.042.093.075,34	75.490.976.308,44	92.514.112.000,88
56	5.3.2.2	Kewajiban Jangka Panjang					
57		Utang Jangka Panjang Lainnya	29.659.670.000,00	27.659.670.000,00	27.659.670.000,00	63.773.314.000,00	26.659.670.000,00
58	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		29.659.670.000,00	27.659.670.000,00	27.659.670.000,00	63.773.314.000,00	26.659.670.000,00
59	JUMLAH KEWAJIBAN		43.790.221.747,06	37.124.433.652,07	46.701.763.075,34	139.264.290.308,44	119.173.782.000,88
60	5.3.3	JUMLAH EKUITAS	3.436.975.077.711,38	3.671.277.803.681,24	3.939.563.800.232,13	4.170.660.777.613,11	4.603.247.565.651,70
61	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		3.480.765.299.458,44	3.708.402.237.333,31	3.986.265.563.307,47	4.309.925.067.921,55	4.722.421.347.652,58

Sumber: BPKAD Kota Jambi Tahun 2018 - 2022;





3.3.3 Kinerja Keuangan Daerah Dalam Pencapaian TPB

Dalam hal ini melihat perkembahangan terhadap kinerja keuangan daerah kKota Jambi terutama dilihat dari pendapatan asli daerah yang menunjukkan tingkat kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Dalam kurun waktu tahun 2018-2022, persentase kontribusi PAD terhadap total APBD dari sebesar 20,85% pada tahun 2018 meningkat menjadi sebesar 26,18% pada tahun 2022. Selama ini ada dua sektor yang memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan Kota Jambi yaitu Sektor Pajak Daerah: PPJU, Parkir dan PBB, serta lain-lain PAD yang sah. Adapun kendala yang dihadapi dalam peningkatan PAD yaitu kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah dan retribusi daerah secara mandiri masih rendah sehingga perlu peran aktif petugas pajak daerah untuk melakukan pengawasan dan penagihan.

Pengelolaan keuangan daerah Kota Jambi menunjukkan kinerja yang baik. Meskipun demikian penerapan manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis accrual dirasa belum optimal. Berdasarkan hasil audit BPK, laporan keuangan pemerintah daerah Kota Jambi memperoleh status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 5 tahun berturut-turut. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Jambi dalam rangka mempertahankan status tersebut yaitu menindaklanjuti temuan pengecualian atas LKPD, penyusunan Peraturan Walikota dan Surat Edaran Walikota sebagai pedoman perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, dan rekonsiliasi angka dalam laporan.





Tabel III.3.9
Indikator Urusan Keuangan Kota Jambi Tahun 2018-2022

No	Indikator	Capaian Kinerja Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Belanja Langsung terhadap total APBD (%)	58,37	41,89	53,20	49,60	48,60
2	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD (Realisasi) (%)	20,85	23,15	21,93	23,17	26,18
3	Rasio SILPA terhadap total belanja tahun sebelumnya (%)	11,55	13,37	9,94	9,42	10,80
4	Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja (%)	89,73	88,30	89,59	88,69	89,51
5	Rasio realisasi PAD terhadap target PAD (%)	98,23	101,41	96,39	99,62	153,55
6	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7	Rasio Belanja Modal dibanding Total Belanja Daerah	28,24	26,01	26,64	28,50	22,71
8	Rasio Belanja Pegawai Tidak Langsung dibanding Total Belanja Daerah (%)	38,94	40,60	37,68	39,25	40,53
9	Persentase penyusunan APBD tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2021 Hingga Tahun 2023
BPS Kota Jambi Tahun 2018 (tentang Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2018)
Survei Statistik Keuangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 hingga tahun 2022
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2024
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Jambi Tahun Anggaran 2019;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Jambi Tahun Anggaran 2020;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Jambi Tahun Anggaran 2021;dan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Jambi Tahun Anggaran 2022.

3.3.4 Aspek Daya Ekonomi Dan Keuangan

3.3.4.1 Struktur Dan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan outpit per kapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi biasanya digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan yang berupa proses peningkatan suatu output dari setiap periode. Pertumbuhan ekonomi mengakibatkan terjadinya perubahan struktur perekonomian. Perubahan struktur perekonomian diakibatkan oleh adanya interaksi akumulasi modal dan konsumsi masyarakat yang merupakan salah satu pembetuk Pendapat Domestik Regional Bruto (PDRB).





A. Sektor Ekonomi Basis

Sektor ekonomi basis dapat diketahui dengan menggunakan metode Location Quotient (LQ). Metode LQ bertujuan untuk mengidetifikasi komoditas unggulan dalam suatu wilayah. Analisis ini dilakukan dengan melihat perbandingan antara sektor ekonomi sudatu daerah terhadap sektor ekonomi yang sama pada cakupan administratif yang lebih besar. Data yang digunakan pada analisis ini yaitu PDRB atas dasar harga konstan dengan tujuan untuk melihat perkembangan perekonomian secara riil yang pertumbuhannya tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan harga atau inflasi/deflasi. Analisis LQ digunakan untuk menentikan kategori suatu sektor termasuk dalam sektor bepotensi unggulan atau bukan unggulan, dengan rumus:

$$LQ = \frac{Sik/PDRBK}{Sip/PDRBP}$$

Keterangan:

Sik	= sumbangan sektor i studi k (kabupaten)
PDRBK	= PDRB total daerah k (kabupaten)
Sip	= sumbangan sektor i daerah refernesi (provinsi)
PDRBP	= PDRB total referensi (provinsi)

Hasil analisis tersebut menghasilkan 3 kemungkinan dimana:

1. LQ = 1, artinya sektor ekonomi di daerah i memiliki laju pertumbuhan yang sama dengan perekonomian di daerah referensi (provinsi) pada sektor yang sama;
2. LQ > 1, artinya sektor ekonomi di daerah i memiliki laju pertumbuhan yang lebih besar dari daerah referensi (provinsi) atau dapat dikatakan sebagai sektor unggulan; dan
3. LQ < 1, artinya artinya sektor ekonomi di daerah i memiliki laju pertumbuhan yang lebih kecil dari daerah referensi (provinsi) atau sektor ekonomi tersebut tergolong sektor non basis.





Tabel III.3.10
Perhitungan Sektor Ekonomi Basis

Kategori menurut Lapangan Usaha	LQ Kota Jambi	Hasil	Keterangan
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,04	LQ < 1	Non Basis
Pertambangan dan Penggalian	0,10	LQ < 1	Non Basis
Industri Pengolahan	1,12	LQ > 1	Basis
Pengadaan Listrik dan Gas	3,52	LQ > 1	Basis
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,78	LQ > 1	Basis
Konstruksi	1,34	LQ > 1	Basis
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,81	LQ > 1	Basis
Transportasi dan Pergudangan	3,86	LQ > 1	Basis
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,15	LQ > 1	Basis
Informasi dan Komunikasi	1,43	LQ > 1	Basis
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,66	LQ > 1	Basis
Real Estate	1,77	LQ > 1	Basis
Jasa Perusahaan	2,73	LQ > 1	Basis
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,15	LQ > 1	Basis
Jasa Pendidikan	1,42	LQ > 1	Basis
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,29	LQ > 1	Basis
Jasa lainnya	0,77	LQ < 1	Non Basis

Sumber: Hasil analisis, Tahun 2023

Berdasarkan hasil analisis LQ pada tabel diatas, sektor basis dan non basis Kota Jambi adalah sebagai berikut:

Sektor Basis:

1. sektor industri pengolahan;
2. sektor pengadaan listrik dan gas;
3. sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang;
4. sektor konstruksi
5. sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor;
6. sektor transportasi dan pergudangan;
7. sektor penyediaan akomodasi dan makan minum;
8. sektor informasi dan komunikasi;
9. sektor jasa keuanan dan asuransi;
10. sektor real estate;
11. sektor jasa Perusahaan;
12. sektor administrasi pemerintahan;





13. sektor jasa pendidikan; dan
14. sektor Kesehatan dan kegiatan sosial.

Sektor Non Basis:

1. sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan;
2. Sektor pertambangan dang penggalian; dan
3. Jasa lainnya.

uraian diatas menunjukkan bahwa 14 sektor basis diatas sangat berpotensi untuk dikembangkan oleh Kota Jambi karena memiliki keunggulan komparatif dan merupakan sumber pertumbuhan perekonomian Kota Jambi sehingga 16 sektor ini tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan daerah saja namun dapat juga di ekspor ke luar daerah. Sedangkan 3 sektor non basis diatas tidak memiliki keunggulan komparatif sehigga produksinya hanya dapat memenuhi kebutuhan Kota Jambi saja.

B. Analisis Pergeseran Struktur Ekonomi

Analisis pergeseran struktur ekonomi biasanya menggunakan analisis *shift share*. Analisis *shift share* merupakan salah satu pendekatan uang menjelaskan perubahan ekonomi yang dipengaruhi oleh sektor secara nasional, regional, maupun lokal. Penggunaan analisis *shift share* yaitu untuk menggambarkan tren pertumbuhan, memperkirakan pertumbuhan wilayah, dan menganalisis efek dari inisiatif kebijakan serta mengembangkan perencanaan strategis bagi suatu wilayah maupun komunitas. Terdapat beberapa komponen dalam analisis *shift share* diantaranya:

a. *Proportional Shift*, dilakukan untuk menilai pertumbuhan sektor i lokal dibandingkan dengan sektor i secara wilayah atau nasional.
    1. PP > 0 (bernilai positif), menunjukkan bahwa sektor tersebut tumbuh secara pesat dalam lingkup nasional/regional
    2. PP < 0 (bernilai negatif), menunjukkan bahwa sektor tersebut tumbuh secara lambat dalam lingkup nasional/regional





b. *Differential shift*, dilakukan untuk menilai pertumbuhan sektor i lokal dibanding dengan seluruh sektor lokal.
   1. PPW > 0 (bernilai positif, menunjukkan bahwa sektor tersebut memiliki keunggulan kompetitif di daerah tersebut
   2. PPW < 0 (bernilai negatif), menunjukkan bahwa sektor tersebut tidak dapat bersaing

c. Pergeseran bersih, merupakan penjumlahan dari proportiolan shift dan differential shift.
   1. PP+PPW = PB > 0, menunjukkan bahwa sektor tersebut berkembang progresif
   2. PP+PPW = PB < 0, menunjukkan bahwa sektor tersebut mengalami kemunduran

Tabel III.3.11
Hasil Perhitungan Analisis *Shift Share*

Kategori Menurut Lapangan Usaha	PP	PPW	PB	Keterangan
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,01	-0,23	-0,24	Terbelakang
Pertambangan dan Penggalian	-0,02	-0,03	-0,05	Terbelakang
Industri Pengolahan	-0,06	-0,01	-0,07	Terbelakang
Pengadaan Listrik dan Gas	0,12	-0,02	0,09	Cenderung Berpotensi
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	-0,12	-0,09	Cenderung Berpotensi
Konstruksi	0,09	-0,04	0,05	Cenderung Berpotensi
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,08	-0,08	0,01	Cenderung Berpotensi
Transportasi dan Pergudangan	-0,15	-0,16	-0,31	Terbelakang
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0,04	0,01	-0,03	Berkembang
Informasi dan Komunikasi	0,15	0,02	0,17	Tumbuh Cepat dan Berdaya Saing
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,05	-0,01	0,04	Cenderung Berpotensi
Real Estate	0,02	0,02	0,05	Tumbuh Cepat dan Berdaya Saing
Jasa Perusahaan	-0,06	-0,01	-0,07	Terbelakang
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,08	0,02	-0,06	Berkembang
Jasa Pendidikan	0,04	0,02	0,05	Tumbuh Cepat dan Berdaya Saing
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,27	0,03	0,30	Tumbuh Cepat dan Berdaya Saing
Jasa lainnya	-0,05	0,00	-0,05	Berkembang

Sumber: Hasil analisis, Tahun 2023





Proportional Sift:

Berdasarkan tabel diatas terdapat 9 sektor yang tumbuh relatif lebih cepat dari sektor yang sama di tingkat Provinsi Jambi, diantaranya:

1. sektor pengadaan listrik dan gas;
2. sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang;
3. sektor konstruksi;
4. sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor;
5. sektor informasi dan komunikasi;
6. sektor jasa keuangan dan asuransi;
7. sektor real estate;
8. sektor jasa pendidikan; dan
9. sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Differential Shift:

Berdasarkan tabel diatas terdapat 7 sektor yang memiliki keunggulan lokasi yang sangat baik atau tumbuh lebih cepat daripada industri yang sama ditempat lain, diantaranya:

1. sektor penyediaan akomodasi dan makan minum;
2. sektor informasi an komunikasi;
3. sektor real estate;
4. sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib;
5. sektor jasa pendidikan;
6. sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan
7. jasa lainnya.

3.3.4.2 Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per Angkatan kerja yang meninjukan seberapa produktif tiap Angkatan kerja dalam mendorog ekonomi daerah per sektor. Produktivitas total daerah dapat diketahui dengan menghitung produktivitas daerah per sektor





yang merupakan jumlah PDRB dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang bersangkutan. Sektor dalam PDRB diklasifikasikan menjadi 3 sektor diantaranya:

a. sektor pertanian : pertanian
b. sektor industri : pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, air, gas, dan konstruksi
c. sektor jasa : perdagangan, angkutan, pergudangan, keuangan, jasa perusahaan, dan jasa kemasyarakatan

Berdasarkan hasil perhitungan, sektor industri merupakan sektor yang memiliki produktivitas tertinggi di Kota Jambi yaitu sebesar 71,88% pada tahun 2022, sedangkan produktivitas terendah berada pada sektor pertanian yaitu sebesar 13,71%. Hal ini dapat terjadi dikarenakan lahan pertanian di Kota Jambi dapat dikatakan kecil sehingga produktivitasnya kecil. Produktivitas total daerah di Kota Jambi tahun 2018-2022 pada sektor pertanian mengalami penurunan setiap tahunnya sedangkan pada sektor industri dan jasa mengalami naik turun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.3.12
Persentase Produktivitas Total Daerah
di Kota Jambi Tahun 2018-2022

Sektor	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian	20,54	19,08	16,92	16,04	13,71
Industri	86,82	82,25	58,17	89,75	71,88
Jasa	44,60	46,44	62,62	50,59	53,08

Sumber: BPS Kota Jambi Tahun 2023 dan BPS Provinsi Jambi Tahun 2023



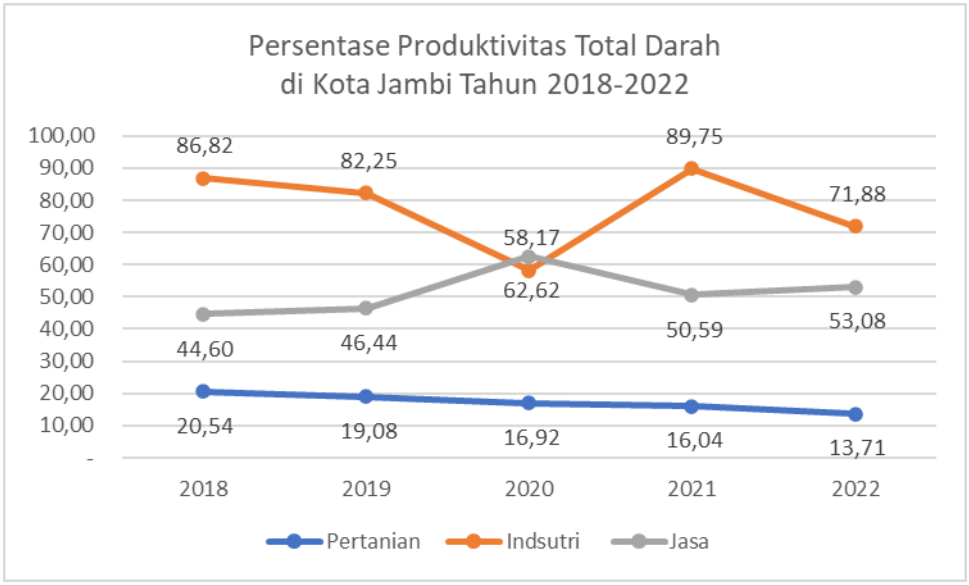

Gambar 3.1.13
Grafik Persentase Produktivitas Total Daerah
di Kota Jambi Tahun 2018 – 2022

3.3.4.3 Iklim Berinvestasi

Iklim investasi dapat diartikan sebagai kebijakan, institusional dan kondisi lingkungan yang berpengaruh terhadap tingkat pengambilan dan risiko suatu investasi. Terdapat 3 faktor utama dalam menyusun iklim investasi, diantaranya:

1) Fundamental makro berupa stabiitas ekonomi makro, keterbukaan ekonomi, persaingan pasar, sosial dan stabilitas politik;
2) Pemerintahan dan kelembagaan-transparasi dan efesiensi dari kebijakan, perpajakan, legal sistem, kekuatan sektor finansial, serta kondisi ketenagakerjaan; dan
3) Infrastruktur-transportasi, telekomunikasi, listrik dan air.

Iklim investasi merujuk pada kondisi ekonomi, politik serta sosial yang dapat mempengaruhi pengambilan kepututsan investor. Adapun kriteria yang menentukan iklim investasi menurut *International Finance Corporation* diantaranya, perizinan, keamanan, kondisi lapangan bisnis, jasa infrastruktur public, peraturan ketenagakerjaan, tanah atau lahan, akses pembiayaan, perpajakan, jalan raya dan kepabeanan dan Pelabuhan.



Mengacu pada kriteria diatas, Pemerintah Kota Jambi saat ini terus berusaha meningkatkan pelayanan perizinan online yang cepat dan memudahkan bagi masyarakat. Hal ini tentunya sangat efisien dan efektif bagi masyarakat dalam perizinan usaha dan akan berpengaruh pada peningkatan iklim berinvestasi di Kota Jambi. Berdasarkan data NSWI, realisasi investasi PMA dan PMDN di Kota Jambi tahun 2018-2022 mengalami naik turun. Dimana pada tahun 2018-2019 PMA mau pun PMDN mengalami peningkatan sebesar 12,6% dan 25,4% lalu pada tahun 2019-2020 keduanya mengalami penurunan sebesar 84,8% dan 44,9%, hal ini dapat terjadi karena adanya pandemic covid-19 yang menyebabkan penurunan investasi di Kota Jambi. Selanjutnya pada tahun 2022 PMA mengalami menurunan sebesar 11,4% dari tahun 2021 sedangkan untuk PMDN mengalami peningkatan sebesar 19,2% dari tahun 2021. Untuk lebiih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel III.1.13
Realisasi Investasi PMA dan PMDN di Kota Jambi Tahun 2018-2022

Investasi	2018	2019	2020	2021	2022
PMA (Ribu USD)	25.228,6	28.395,0	4.324,3	7.211,1	6.392,5
PMDN (Juta Rupiah)	153.869,2	192.908,3	106.290,3	547.897,2	653.052,7

Sumber: NSWI, Tahun 2023

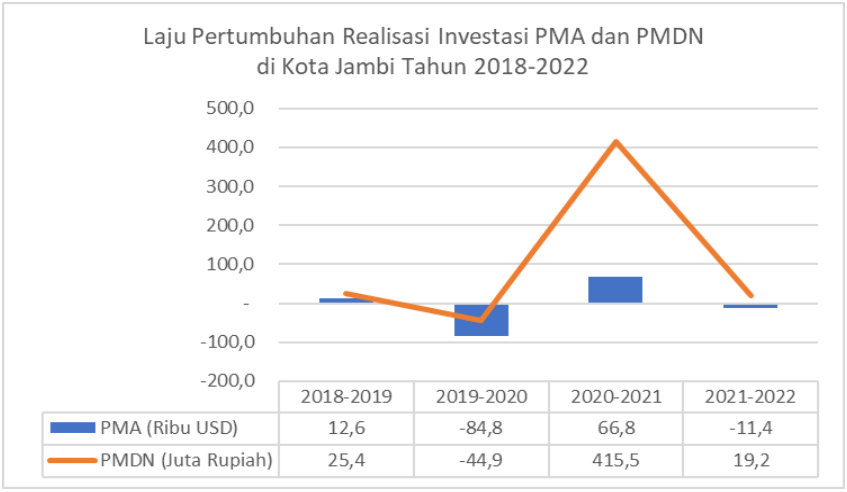

Gambar 3.3.14
Grafik Laju Pertumbuhan Realisasi PMA dan PMDN
di Kota Jambi Tahun 2018 – 2022





3.4 PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENCAPAIAN TPB

Untuk melaksanakan SDGs, Kota Jambi menjalankan prinsip partisipasi yang inklusif dengan melibatkan 4 platform partisipasi yang terdiri atas: (1) Pemerintah dan Parlemen; (2) Akademisi dan Pakar; (3) Filantropi dan Pelaku Usaha; serta (4) Organisasi Masyarakat Sipil dan Media.

Organisasi perangkat daerah yang terlibat dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pada disagresi kota diantaranya Dinas Pendidikan Kota Jambi, Dinas Kesehatan Kota Jambi, Dinas PUPR Kota Jambi, Bappeda Kota Jambi, Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi, BPBD Kota Jambi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, BPS Kota Jambi, Dinas Perhubungan Kota Jambi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi, Dinas Ketenagakerjaan Kota Jambi, Dinas Petanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi, POLRESTA JAMBI dan BNN Kota Jambi.

Berdasarkan tabel di bawah ini, dari sekian banyak para pihak di Kota Jambi, memang masih sedikit yang masih aktif dan berkontribusi untuk Kota Jambi. Dalam konteks ini, aktif yang dimaksud adalah masih melakukan aktifitas program dan kegiatan secara rutin sesuai bidangnya. Secara normatif bentuk program dan anggaran yang dijalankan oleh para pihak belum sepenuhnya dapat terukur akuntabilitasnya. Hal ini disebabkan belum adanya kebijakan pemerintah Kota Jambi yang mengatur lebih lanjut peran para pihak yang terlibat dalam aktifitas tersebut.

Terdapat 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dicapai oleh para pihak dengan perannya masing-masing yang berkontribusi untuk Kota Jambi yang terdiri dari berbagai macam bidang dan latar belakang seperti ormas/LSM, perbankan, dan lain-lain. Kontribusi dari masing-masing para pihak tersebut juga merupakan bagian dari indikator Tujuan Pembangunan Bereklanjutan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi. Itu artinya, para pihak ini sudah





berkontribusi dan membantu Pemerintah Kota Jambi dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Akan tetapi, masih banyak urusan-urusan atau indikator yang dapat dilakukan oleh para pihak selain organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Jambi. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Jambi dapat memberdayakan para pihak yang saat ini keberadannya kurang aktif dengan cara membangkitkan kembali para pihak yang sudah tidak aktif dengan cara memberikan arahan program dan kegiatan untuk membantu Pemerintah Kota Jambi dalam upaya pelaksanaan dan pencapaian indikator TPB.

Tabel III.4.1
Pemangku Kepentingan TPB di Kota Jambi

No	Nama Stakeholder	Peran	Bidang
Stakeholder Aktif			
1	Fasilitator KOTAKU	memfasilitasi dalam mendampingi masyarakat dalam penanganan kawasan kumuh	Lingkungan
2	PKK Kota Jambi	kader perempuan membantu dalam pelaksanaan prograam-program pemerintah	perempuan, kesetaraan gender
4	Bank Sampah Bangkitku	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah	sampah, lingkungan
5	Dirut Bank Jambi	Penyedia Dana CSR	
6	PT. Pertamina	Penyedia Dana CSR	
Asosiasi/FORUM/Ormas/LSM			
1	PMI	membantu pemerintah dalam bidang sosial dan kemanusiaan	kesehatan, sosial
2	PKBI daerah Jambi	sosialisasi kesehatan terutama kesehatan seksualitas dan reproduksi	kesehatan
3	HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesa)		ekonomi
4	Himpunan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI)		pendidikan
5	Forum Komunikasi Organisasi Masyarakat Kota Jambi		sosial
6	Forum Anak Bumi Siginjai	sebagai wadah untuk mewujudkan kota layak anak	pendidikan dan sosial
7	Forum Anak Bumi Angso Duo Kota Jambi	sebagai wadah untuk mewujudkan kota layak anak	sosial
8	LSM	mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat	Sosial
Perguruan Tinggi			





No	Nama Stakeholder	Peran	Bidang
1	Universitas Jambi		Pendidikan
2	Universitas Batanghari		Pendidikan
3	UIN Sultan Thaha		Pendidikan
4	Universtias Nurdin Hamzah		Pendidikan
5	Politeknik Jambi		Pendidikan
6	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Baiturrahim (STIKBA)		Pendidikan
7	Universitas Adiwangsa		Pendidikan
8	Universitas Terbuka		Pendidikan
9	Universitas Dinamika Bangsa		Pendidikan
10	Universitas Muhammadiyah Jambi		Pendidikan
11	STIKES Harapan IBU		Pendidikan
12	Poltekkes Kemenkes Jambi		Pendidikan
13	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Jambi		Pendidikan
14	STITEKNAS Jambi		Pendidikan
		Rumah Sakit	
1	RSUD H. Abdul Manap Jambi		Kesehatan
2	Siloam Hospital		Kesehatan
3	Mitra Hospital		Kesehatan
4	RS Bayangkara Jambi		Kesehatan
5	RS Islam Arafah		Kesehatan
6	RS Dr. Bratanata Jambi		Kesehatan
7	RS Baiturrahim		Kesehatan
8	RS Kambang		Kesehatan
9	RSUD Raden Mataher		Kesehatan
10	RSIA Annisa		Kesehatan
11	RS Erni Medika		Kesehatan
12	RSJD Provinsi Jambi		Kesehatan
13	RSUD H, Abdurrahman Sayoeti		Kesehatan
14	RS Rimbo Medika		Kesehatan
15	RS Royal Prima		Kesehatan
		Perseroan	
1	PT Pertamina		
2	PDAM Tirta Mayang		
3	PT Telkom		
		Organisasi Profesi	
1	Ikatan Dokter Indonesia (IDI)		Kesehatan
2	Persatuan Dokter Gigi Indinesia (PDGI)		Kesehatan
3	Ikatan Guru Indonesia (IGI)		Pendidikan
4	Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam		Kesehatan





No	Nama Stakeholder	Peran	Bidang
	Indonesia (PAPDI)		
5	Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI)		Kesehatan
6	Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI)		Tenaga Kerja







BAB IV

ANALISIS CAPAIAN TPB/SDG's



Pada bagian ini akan dipaparkan capaian tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan per tujuan. Setiap tujuan terdiri atas indikator – indikator capaian yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dengan merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2020 tersebut. Daftar indikator yang dituangkan dalam substansi ini adalah indikator yang menjadi kewenangan daerah Kota. Pembagian indikator yang menjadi kewenangan daerah Kota tersebut didasarkan kepada buku metadata TPB Indonesia dan juga berdasarkan dengan hasil koordinasi dengan Sekretarian SDGs Bappenas.

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) bertujuan guna menjaga keberlanjutan kehidupan sosial, peningkatan kesejahteraan ekonomi Masyarakat secara berkesinambungan, menjaga kualitas lingkungan hidup serta





menjaga terlaksananya hukum dan tata kelola yang mampu meningkatkan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang terdiri dari 17 tujuan kemudian dikelompokan menjadi 4 (empat) pilar, yaitu: pilar Pembangunan sosial, pilar Pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan hidup dan pilar pembangunan hukum dan tata kelola.

4.1 CAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Dari proses *updating* capaian indikator TPB Kota Jambi yang ditargetkan sampai dengan Tahun 2022 diketahui masih banyak indikator yang perlu ditingkatkan untuk memenuhi target dan beberapa indikator belum ditargetkan sebelumnya didalam RPJMD Kota Jambi. Rekapitulasi yang menggambarkan ketercapaian indikator dari masing-masing Tujuan TPB yang merupakan kewenangan Kota, dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut ini:





Tabel IV.1.1
Rekapitulasi Status Capaian Indikator Berdasarkan SDGs Nasional

No	Tujuan PB	Jumlah Indikator				Jumlah Indikator
		T	BT	NA	Belum di Targetkan Sebelumnya	
1	Tanpa Kemiskinan	1	5	4	5	10
2	Tanpa Kelaparan	1	1	1	3	3
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	2	3	9	5	14
4	Pendidikan Berkualitas	2	5	1	1	8
5	Kesetaraan Gender	1	1	1	2	3
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	2	0	3	1	5
7	Energi Bersih dan Terjangkau	2	1	0	1	3
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan ekonomi	1	2	0	2	3
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	0	2	1	0	3
10	Berkurangnya kesenjangan	2	1	8	1	11
11	Kota dan permukiman berkelanjutan	1	2	8	2	11
12	Konsumsi dan produksi bertanggung jawab	0	3	5	2	8
13	Penanganan perubahan iklim	1	1	0	0	2
14	Ekosistim lautan	0	0	0	0	0
15	Ekosistem daratan	0	0	0	0	0
16	Perdamaian keadilan dan kelembagaan tangguh	4	6	10	10	20
17	Kemitraan untuk mencapai tujuan	2	1	4	3	7
Jumlah		**22**	**34**	**55**	**38**	**111**

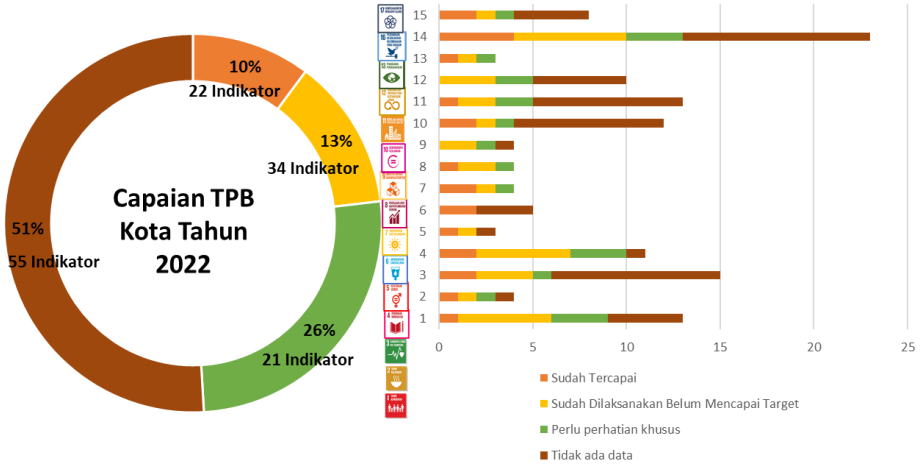

Gambar 4.1.1
Grafik Persentase capaian indikator SDGs Kota jambi teradap target nasional





Adapun kategori capaian TPB terbagi menjadi 4 (empat) kategori :

1. Indikator TPB yang sudah mencapai target

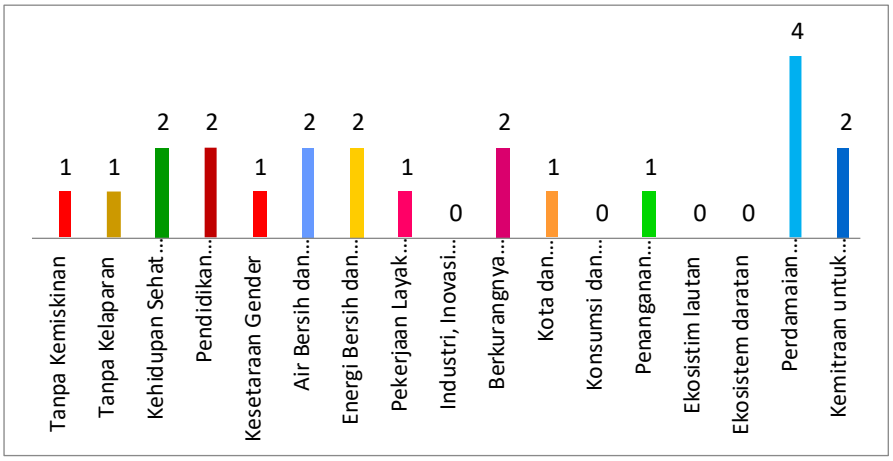

Gambar 4.1.2
Jumlah Indikator Pada Setiap Tujuan Yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target

2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target

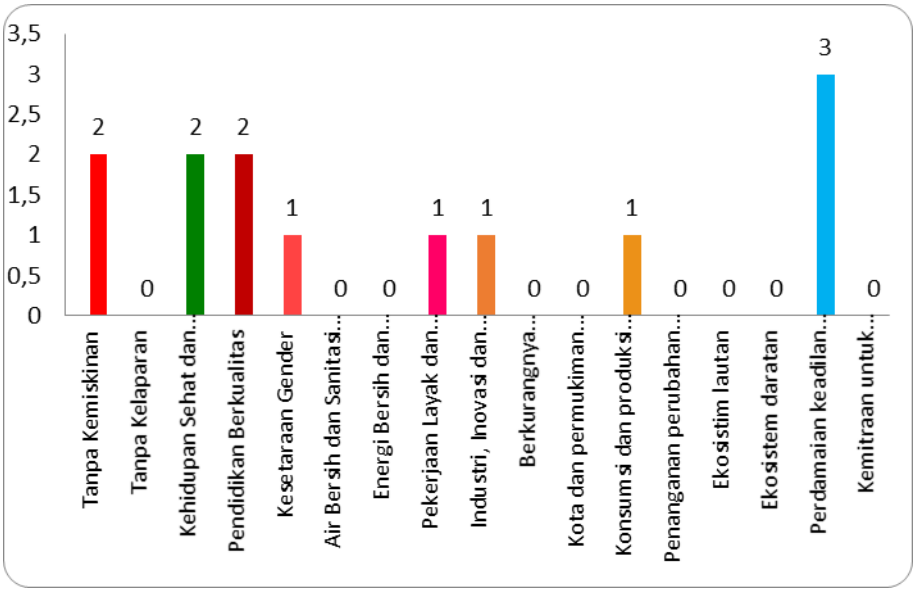

Gambar 4.1.3
Indikator TPB Yang Sudah Dilaksanakan Tetapi Belum Mencapai Target

3. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan namun perlu perhatian khusus

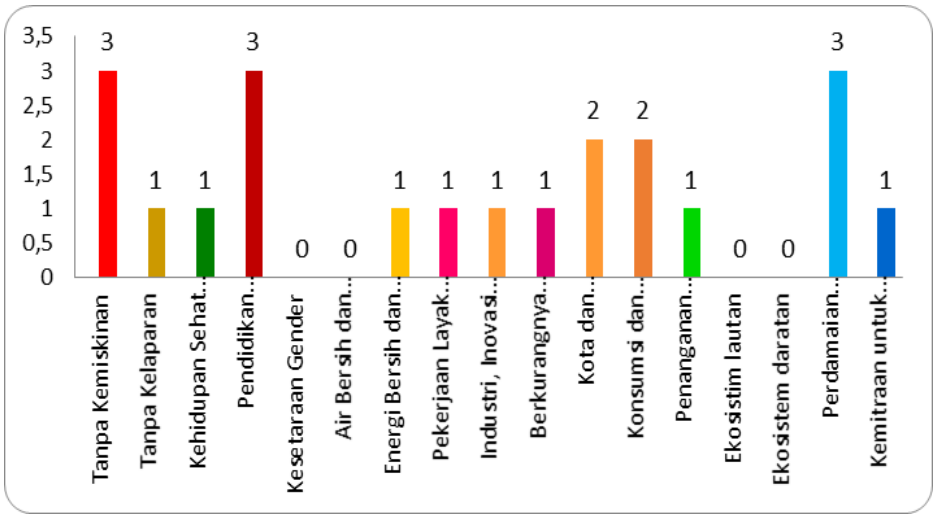

Gambar 4.1.4
Indikator TPB yang sudah dilaksanakan namun perlu perhatian khusus

4. **Indikator TPB yang tidak/belum memiliki data**

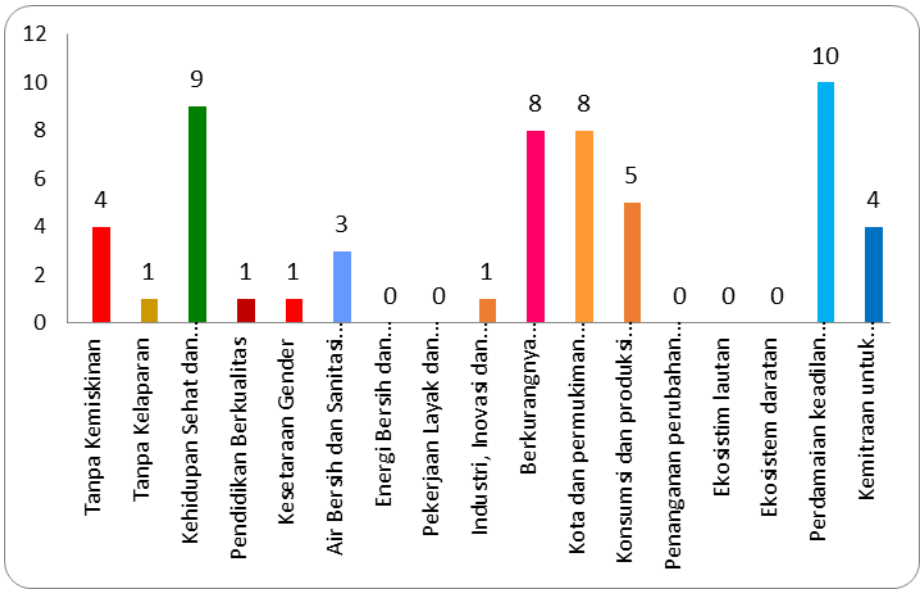

Gambar 4.1.5
Indikator TPB yang tidak/belum memiliki data

Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan di Kota Jambi tahun 2022 dalam subbab ini diuraikan berdasarkan empat dimensi dalam TPB/SDGs sebagaimana dijelaskan sebagai berikut.

Secara umum Kota Jambi masih menghadapi tantangan yang cukup panjang dalam menghadapi pencapaian indikator TPB. Hal ini didasarkan atas



capaian jumlah indikator yang telah mencapai target nasional. Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data menunjukan bahwa indikator TPB di Kota Jambi yang telah dilaksanakan dan mancapai target nasional baru mencapai 19,82% (22 indikator) dari total 111 indikator yang menjadi kewenangan kota.

4.1.1 Dimensi Sosial

Dalam Metadata SDGs/TPB, dimensi sosial memiliki 5 tujuan (tujuan 1,2,3,4, dan 5) yang terdiri dari dari 38 indikator yang disagregasi di Wilayah Kota termuat dalam lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2020. Ketercapaian Kota Jambi dalam SDGs/TPB diukur dengan cara membandingkan sasaran target SDGs/TPB yang tertuang RPJMD Kota, RPJMN dan Rencana Strategis masing-masing OPD dengan data capaian indikator SDGs/TPB Kota Jambi. Hasil identifikasi dan penelaahan pada data-data yang tersedia, menunjukan bahwa program-program yang disusun oleh Pemerintah Kota Jambi telah mend ukung upaya ketercapaian SDGs/TPB meskipun ada beberapa tujuan, target-target dan indikator dalam SDGs belum dikaji lebih lanjut karena mempertimbangkan kondisi dan kemampuan Kota Jambi dalam mewujudkannya.

Jika diperinci berdasarkan indikator SDGs yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2020, ketersediaan data di TPB/SDGs belum sepenuhnya mendukung ketercapaian indikator SDGs/TPB karena hanya terdapat 39,4% dari 38 indikator SDGs yang tersedia datanya. Dari 38 indikator TPB/SDGs jumlah data indikator yang tercapai sebanyak 7 indikator (18,42%), data indikator yang belum tercapai sebanyak 15 indikator (39,47%) dan indikator yang tidak ada data sebanyak 16 indikator (42,10%). Dari 38 indikator tersebut, terdapat 16 indikator (42,10%) indikator yg sebelumnya belum ditargetkan didalam RPJMD Kota Jambi. Berikut adalah tabel yang menunjukan ketercapaian Kota Jambi dalam memujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan dimensi sosial.



Tabel IV.1.2
Ketercapaian Indikator SDGs/TPB Kota Jambi (2022) Dimensi Sosial

No	Tujaun	Indikator SDGs/TPB	Pecapaian Indikator SDGs/TPB			Target	
			Tercapai	Belum Tercapai	Data Tidak Tersedia	Sudah di Targetkan	Belum di Targetkan Sebelumnya
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	10	1	5	4	5	5
2	Menghilangkan Kelaparan, Mecapai Ketahanan pangan dan Gizi Yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	3	1	1	1	0	3
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan meningkatkan kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	14	2	3	9	9	5
4	Menjamin Kualitas Pendidikan Yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	8	2	5	1	7	1
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memperdayakan kaum Perempuan	3	1	1	1	1	2
Total		**38**	**7**	**15**	**16**	**22**	**16**

Sumber : Hasil Analisa 2023

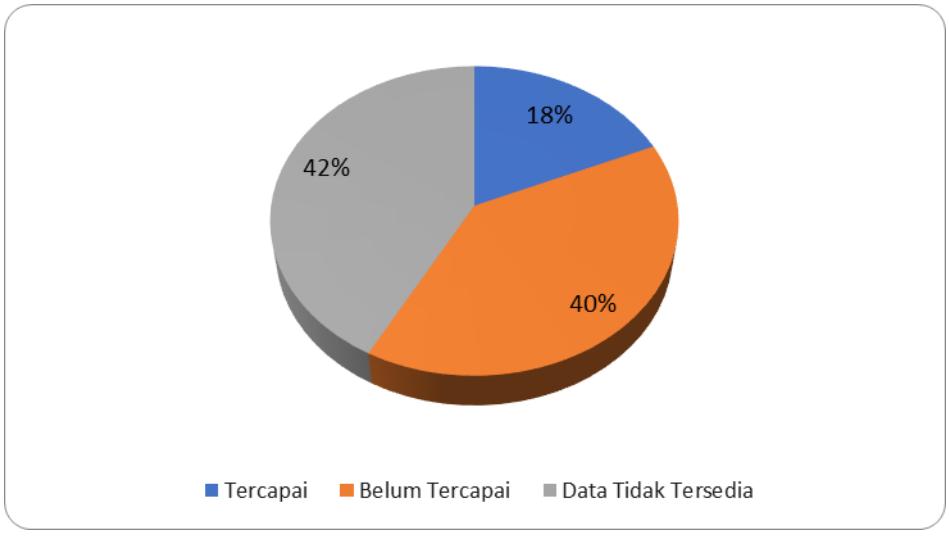

Gambar 4.1.6
Grafik Ketercapaian Indikator SDG's/TPB Kota Jambi Dimensi Sosial

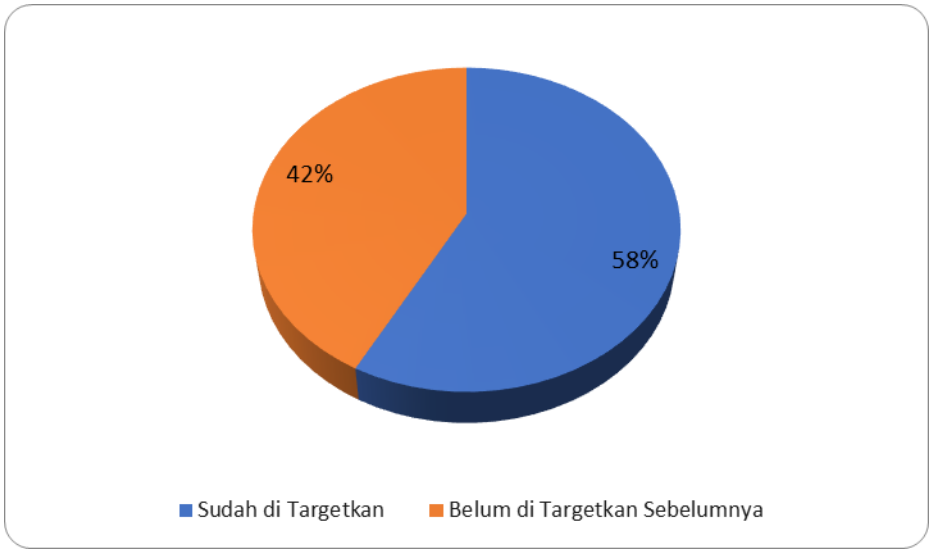

Gambar 4.1.7
Target Realisasi SDGs/TPB Kota Jambi Dimensi Sosial

4.1.2 Dimensi Ekonomi

Dalam Metadata SDGs, dimensi ekonomi memiliki 5 tujuan (7,8,9,10,17) yang terdiri dari 27 indikator yang disagregasi di Wilayah Kota termuat dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Ketercapaian Kota Jambi dalam SDGs/TPB diukur dengan cara membandingkan sasaran target SDGs/TPB yang tertuang RPJMD Kota, RPJMN dan Rencana Strategis masing-masing OPD dengan data capaian indikator SDGs/TPB Kota Jambi. Hasil identifikasi dan penelaahan pada data-data yang tersedia, menunjukan bahwa program-program yang disusun oleh Pemerintah Kota Jambi telah mendukung upaya ketercapaian SDGs/TPB meskipun ada beberapa tujuan, target-target dan indikator dalam SDGs belum dikaji lebih lanjut karena mempertimbangkan kondisi dan kemampuan Kota Jambi dalam mewujudkannya. Beberapa tujuan SDGs yang belum dikaji di dalam RAD SDGs Kota Jambi meliputi tujuan 7 yaitu Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua.



Jika diperinci berdasarkan indikator SDGs yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018. Dari 27 indikator TPB/SDGs jumlah data indikator yang tercapai sebanyak 7 indikator (25,92%), data indikator yang belum tercapai sebanyak 7 indikator (25,92%) dan indikator yang datanya tidak tersedia sebanyak 13 indikator (48,14%). Dilihat dari target yang direalisasikan, terdapat 20 (74,07%) indikator yang sudah ditargetkan dan 7 indikator (25,93%) indikator yang belum ditargetkan didalam RPJMD Kota Jambi. Berikut adalah tabel yang menunjukan ketercapaian Kota Jambi dalam memujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan dimensi ekonomi.

Tabel IV.1.3
Ketercapaian Indikator SDGs/TPB Kota Jambi (2022) Dimensi Ekonomi

Tujuan	Tujaun	Indikator SDGs/TPB	Pecapaian Indikator SDGs/TPB			Target	
			Tercapai	Belum Tercapai	Data Tidak Tersedia	Sudah di Targetkan	Belum di Targetkan Sebelumnya
7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	3	2	1	0	2	1
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, kesemoatan kerja yang Produktif dan menyeluruh, Serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	3	1	2	0	1	2
9	Membangun Infrastruktur yang Tanggung, meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi	3	0	2	1	1	2
10	Mengurangi Kesenjangan Intra-dan Antar Negara	11	2	1	8	3	8
17	Menguatkan Sarana pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	7	2	1	4	5	2
Total		**27**	**7**	**7**	**13**	**12**	**15**

Sumber : Hasil Analisa 2023



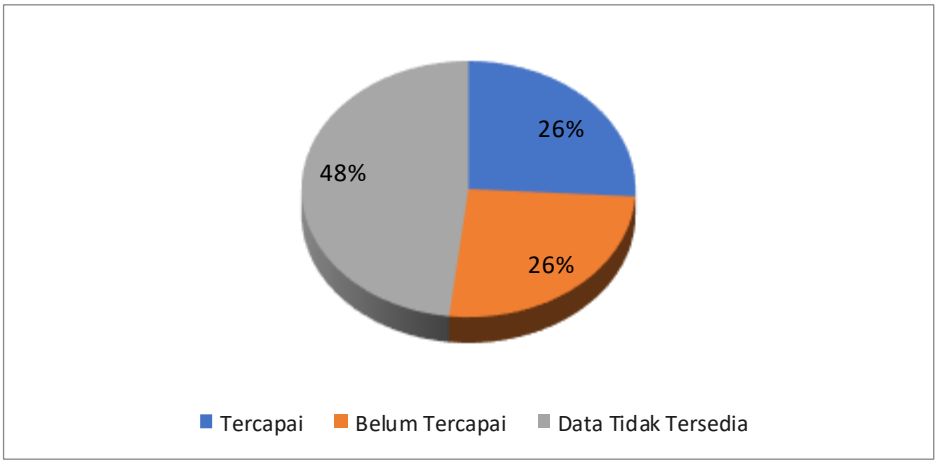

Gambar 4.1.8
Ketercapaian Indikator SDGs/TPB Kota Jambi Dimensi Ekonomi

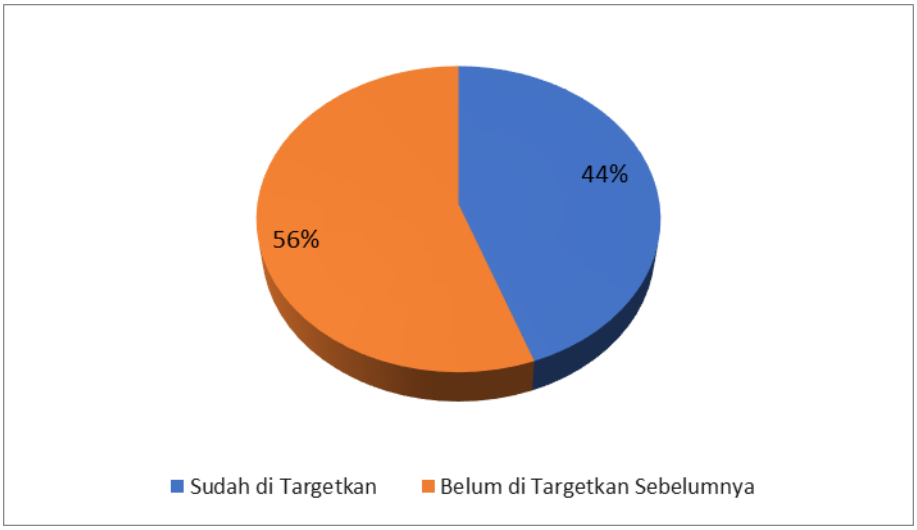

Gambar 4.1.9
Target Realisasi SDGs/TPB Kota Jambi Dimensi Ekonomi

4.1.3 Dimensi Lingkungan

Dalam Metadata SDGs, dimensi lingkungan memiliki 6 tujuan (6,11,12,13,14 dan 15) yang terdiri dari 29 indikator yang termuat dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Ketercapaian Kota Jambi dalam SDGs/TPB diukur dengan cara membandingkan sasaran target SDGs/TPB yang tertuang RPJMD Kota, RPJMN dan Rencana



Strategis masing-masing OPD dengan data capaian indikator SDGs/TPB Kota Jambi. Hasil identifikasi dan penelaahan pada data-data yang tersedia, menunjukan bahwa program-program yang disusun oleh Pemerintah Kota Jambi telah mendukung upaya ketercapaian SDGs/TPB meskipun ada beberapa tujuan, target-target dan indikator dalam SDGs belum dikaji lebih lanjut karena mempertimbangkan kondisi dan kemampuan Kota Jambi dalam mewujudkannya. Beberapa tujuan SDGs yang belum dikaji meliputi tujuan 13 (Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya), tujuan 14 (Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudra untuk Pembangunan Berkelanjutan), dan tujuan 15 (Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, Serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati).

Jika diperinci berdasarkan indikator SDGs yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018, terdapat 26 indikator TPB/SDGs jumlah data indikator yang tercapai sebanyak 4 indikator (15%), data indikator yang belum tercapai sebanyak 8 indikator (31%) dan indikator yang datanya tidak tersedia sebanyak 14 indikator (54%). Dilihat dari target yang direalisasikan, terdapat 19 (73%) indikator yang sudah ditargetkan dan 7 (27%) indikator yang sebelumnya belum ditargetkan didalam RPJMD Kota Jambi. Berikut adalah tabel yang menunjukan ketercapaian Kota Jambi dalam memujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan dimensi lingkungan.





Tabel IV.1.4
Ketercapaian Indikator SDGs/TPB Kota Jambi (2022) Dimensi Lingkungan

Tujuan	Tujaun	Indikator SDGs/TPB	Pecapaian Indikator SDGs/TPB			Target	
			Tercapai	Belum Tercapai	Data Tidak Tersedia	Sudah di Targetkan	Belum di Targetkan Sebelumnya
6	Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Yang Berkelanjutan untuk Semua	5	2	0	3	1	4
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11	1	4	6	2	9
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	8	0	3	5	6	2
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	2	1	1	0	0	2
14	Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudra untuk Pembangunan Berkelanjutan	0	0	0	0	0	0
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, Serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	0	0	0	0	0	0
Total		**26**	**4**	**8**	**14**	**9**	**17**

Sumber : Hasil Analisa 2023

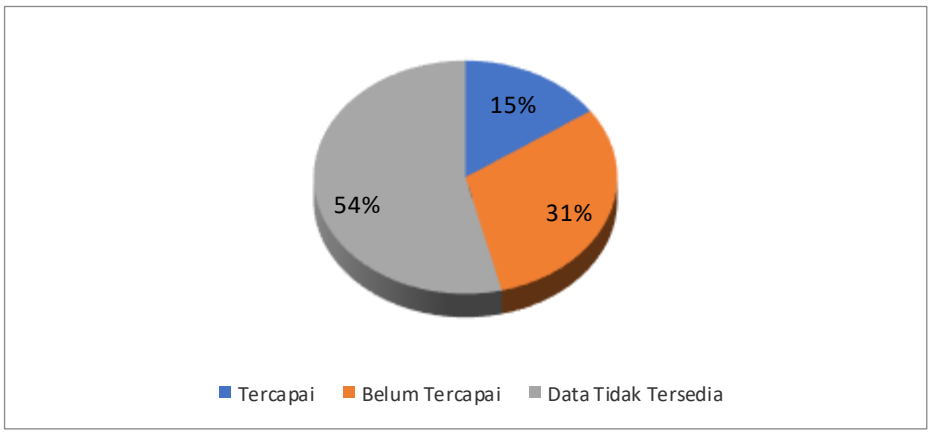

Gambar 4.1.10
Ketercapaian Indikator SDGs/TPB Kota Jambi Dimensi Lingkungan



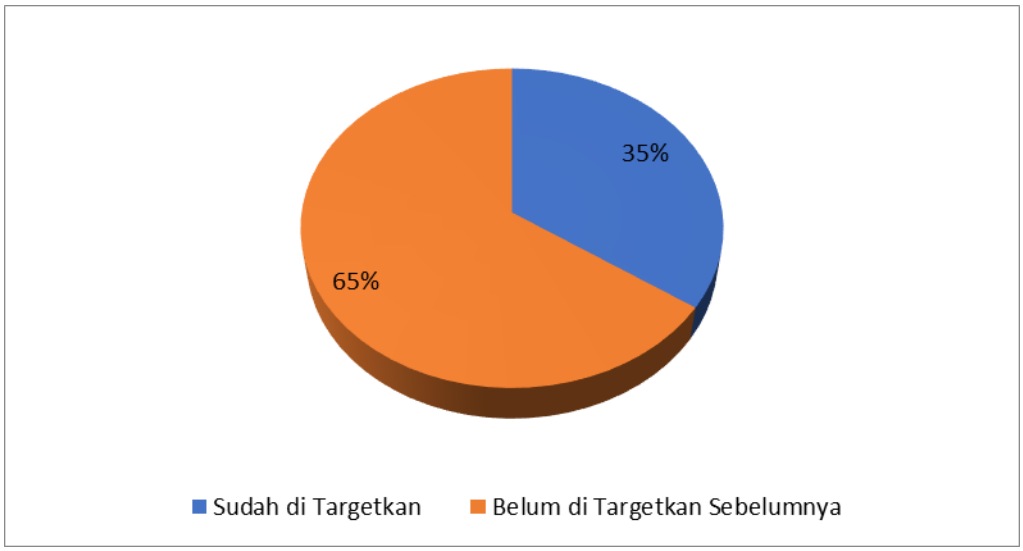

Gambar 4.1.11
Target Realisasi SDGs/TPB Kota Jambi Dimensi Lingkungan

4.1.4 Dimensi Hukum dan Tata Kelola

Dalam Metadata SDGs, dimensi kelembagaan hanya memiliki 1 tujuan yaitu tujuan 16 yang terdiri dari 20 indikator yang termuat dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Ketercapaian Kota Jambi dalam SDGs/TPB diukur dengan cara membandingkan sasaran target SDGs/TPB yang tertuang RPJMD Kota, RPJMN dan Rencana Strategis masing-masing OPD dengan data capaian indikator SDGs/TPB Kota Jambi. Hasil identifikasi dan penelaahan pada data-data yang tersedia, menunjukan bahwa program-program yang disusun oleh Pemerintah Kota Jambi telah mendukung upaya ketercapaian SDGs/TPB meskipun ada beberapa tujuan, target-target dan indikator dalam SDGs belum dikaji lebih lanjut karena mempertimbangkan kondisi dan kemampuan Kota Jambi dalam mewujudkannya.

Jika diperinci berdasarkan indikator SDGs yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018, Dari 20 indikator TPB/SDGs jumlah data indikator yang tercapai sebanyak 1 indikator (5%), indikator yang datanya tidak tersedia sebanyak 16 indikator (80%) dan



indikator yang belum ditargetkan sebelumnya sebanyak 19 indikator (95%). Berikut adalah tabel yang menunjukan ketercapaian Kota Jambi dalam memujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan dimensi kelembagaan.

Tabel IV.1.5
Ketercapaian Indikator SDGs/TPB Kota Jambi (2021)
Dimensi Hukum dan Tata Kelola

Tujuan	Tujuan	Indikator SDGs/TPB	Pecapaian Indikator SDGs/TPB			Target	
			Tercapai	Belum Tercapai	Data Tidak Tersedia	Sudah di Targetkan	Belum di Targetkan Sebelumnya
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	20	4	6	10	10	10

Sumber : Hasil Analisa, 2022

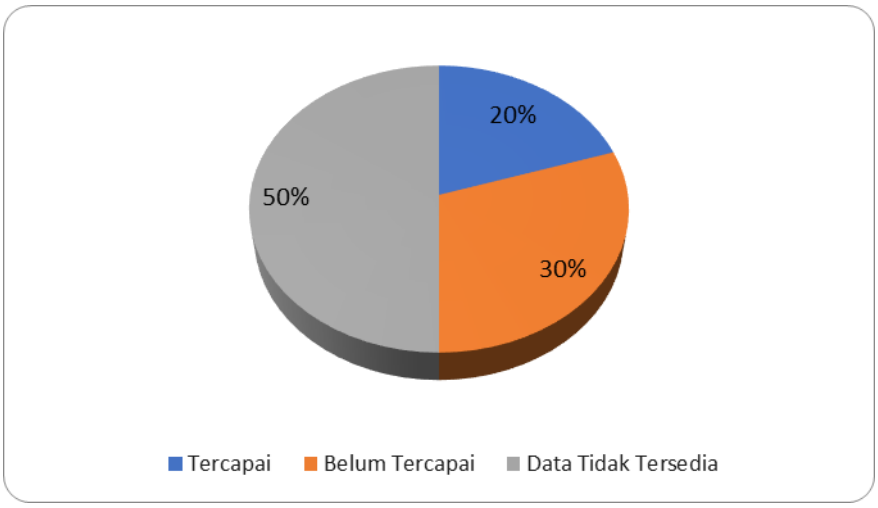

Gambar 4.1.12
Ketercapaian Indikator SDGs/TPB Kota Jambi Dimensi Tata Kelola



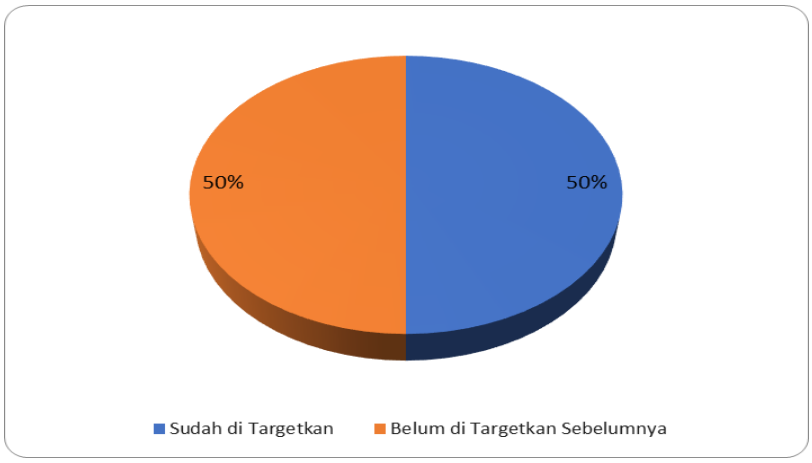

Gambar 4.1.13
Target Realisasi SDGs/TPB Kota Jambi Dimensi Tata Kelola

Tabel IV.1.6
Capaian Indikator TPB Kota Jambi Terhadap Target

No	Kriteria	Jumlah Indikator	Persentase
1.	Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target	22 Indikator	20%
2.	Indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target	13 Indikator	12%
3.	Indikator yang sudah dilaksanakan namun perlu perhatian khusus	21 Indikator	19%
4.	Data tidak tersedia	55 Indikator	49%
Total Indikator yang menjadi Urusan dan kewenangan Kota Jambi		111 Indikator	100%

Sumber : Hasil Analisa, 2023

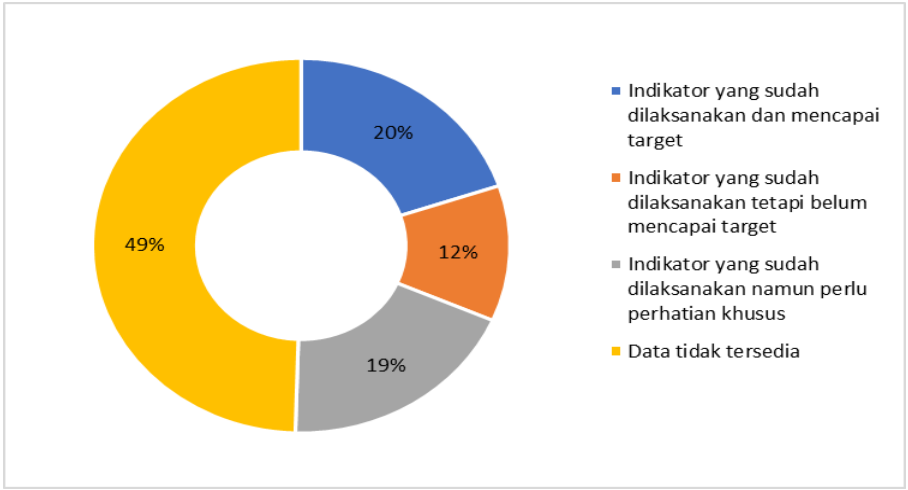

Gambar 4.1.14
Presentase Capaian Jumlah Indikator TPB



4.2 IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

4.2.1 Isu Pembangungan Berkelanjutan (PB) Strategis (Karakteristik Lingkungan Yang Berpotensi Terkena Dampak)

4.2.1.1 Pelingkupan Isu Pembangunan Berkelanjutan

Identifikasi dan Pelingkupan Isu Strategis dilakukan dalam sebuah lokakarya yang melibatkan pemangku kepentingan. Tim Kerja KLHS mempelajari berbagai data dan informasi terkait kondisi fisik, lingkungan, kependudukan, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya untuk keperluan penyusunan pra pelingkupan. Diskusi dengan metode *brainstorming* dilakukan untuk mengkonfirmasi hasil prapelingkupan dan menggali isu-isu lain yang belum tercantum pada hasil prapelingkupan tersebut.

Tabel IV.2.1
***Longlist* Isu PB**

No	Instansi		Sumber Isu
1	BMKG Kota Jambi	Pemantauan terhadap polusi udara kabut asap	DIKPLHD Kota Jambi
2	Dinas Pertanian Kota Jambi	Perubahan pemanfaatan lahan dari pertanian menjadi Terhadap Kegiatan Perumahan	
3	BWS VI Kota Jambi	Resiko Banjir Akibat ada perubahan guna lahan	
		Banjir dan genangan masih menjadi masalah di kota jambi	
		Program Penangan Banjir melalui JFC dan Stasiun Pompa Asam	
4	Bappeda Kota Jambi	Perubahan guna lahan perlu dicermati khususnya untuk kawasan LP2B yang termuat dalam RTRW Kota Jambi	
		Kualitas Air akibat sampah yang tidak di kelola	
		Kualitas air perlu untuk diperhatikan karena adanya tingkat pencemaran yang tinggi	
		Perubahan ekstrim terhadap Iklim	
		Banjir dan genangan masih menjadi masalah di kota jambi	
		Drainase yang tidak lancar akibat sampah dan tingginya debit air	
		Komitmen pemerintah kota jambi terhadap gas rumah kaca dengan melakukan inventarisasi emisi gas rumah kaca	
5	Dinas Kesehatan Kota Jambi	Tata guna lahan masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian khusus	
		Timbulan sampah rumah tangga perlu dikelola dengan baik	
		Kualitas air khususnya yang tercemar bakteri e-coli perlu penanganan segera	
6	Dinas Perhubunagn Kota Jambi	Pencematan Udara akibat pertumbuhan transportasi	
7	PUPR Kota Jambi	Masiive-nya pembangunan di kota jambi perlu untuk dicermati agar sesuai dengan arahan dari rencana tata ruang	
		Pembangunan sistem drainase kota perlu segera direncanakan dan dibangun dengan memperhatikan faktor lingkungan	





No	Instansi		Sumber Isu
		Perubahan pemnfaatan lahan kawasan resapan terhadap kegiatan perumahan	
		Komitmen Perwujudan RTH Publik	
8	Damkar Kota Jambi	Resiko bencana yang ada di kota jambi masih berupa banjir dan genangan terutama di musim penghujan	
		Penanganan drainase perlu dilakukan secara komprehensif (hulu ke hilir)	
		Adanya potensi rawan bencana kebakaran di kawasan permukiman	
9	DLH Kota Jambi	Pengelolaan sampah hasil medis	
		Perubahan pemanfaatan lahan kawasan resapan terhadap kegiatan perumahan	
		Adanya perubahan pemanfaatan lahan hijau ke lahan perumahan	
		Masalah banjir di kawasan perumahan	
		Tahun 2021 mulai difungsikannnya sanitary landfill	
10	UPTD Taman Rimba DLH Kota Jambi	Tata Kelola Air drainase di lingkungan taman rimba tidak maksimal	
		Penanganan Sampah di objek wisata taman rimba	
11	UPTD Persampahan DLH Kota Jambi	Perlu adanya reboisasi di TPA Talang Gulo	
		Perlu adanya mitigasi emisi gas rumah kaca	
12	UPTD Hutan Kota DLH Kota Jambi	Pengangan masalah sampah di hutan kota saat ini bekerja sama dengan Bank sampah	
13	UPTD Laborratorium DLH Kota Jambi	Indeks kualitas air di pengaruhi oleh banyaknya timbulan sampah di badan air	
14	Rosyani (Akademisi Universitas Jambi)	masalah transportasi di kota jambi	KLHS RPJMD dan RPJPD Kota Jambi
15	Aswandi (Guru Besar Universitas Jambi)	Dalam rangka Percepatan Pembangunan menjadikan kota Jambi sebagai kota metropolitan, maka Perlu untuk dilakukan perencanaan yang tepat	
		Room for water dan *room for land* sebagai konsentrasi dasar pembangunan daerah, khusus ROW perlu diperhatikan masalah sedimentasi yang berdampak pada terhambatnya transportasi air	
		Sedimentasi menyebabkan “matinya” sungai, danau teluk sipin dan danau kenali terintegrasi sebagai sarana transportasi sungai	
		Alih fungsi lahan salah satunya menggunakan teknologi sumur resapan, biopori, kolam retensi yang dapat digunakan sebagai kawasan wisata.	
16	Husni Thamrin (LSM Pinang Sebatang)	Dalam isu bagaimana menerapkan pembangunan jangka panjang sedangkan dalam proses 20 tahun ada 4 periode kepemimpinan, (bagaimana Singkronisasi pembangunan dalam jangka panjang tersebut)	
		Dalam mencapai target 2045, masih harus memiliki visi dan komitmen antara kebijakan provinsi dan Kota Jambi dalam pembangunan di kota jambi	
		Isu Alih fungsi lahan terhadap sempadan sungai perlu menjadi perhatian khusus, konsep *waterfront city* menjadi pertimbangan.	
17	Bappeda Kota	Pembangunan pertahanan iklim menjadi kebutuhan	





No	Instansi		Sumber Isu
	Jambi	monitoring dan evaluasi terhadap Pembangunan di kota Jambi belum maksimal	
		Nilai ekonomi karbon dan bagaimana kota menyikapi hal tersebut	
		Isu ranwal RPJPD Limbah dan energi baru terbarukan	
18	Dinas Perindag Kota Jambi	Pemikiran tentang wisata sejalan dengan sustaiability (pariwisata pemberdayaan masyarakat), dimana secara konseptual bertumpu pada pemanfaatan dan pengelolaan air	
		Pusat pengelolaan air di danau sipin menjadi lumbung air yang pada akhirnya dapat menjadi kawasan destinasi pariwisata	
		Percampuran pemanfaatan lahan gudang yang bercampur dengan kawasan permukiman	
		Pasar baru angsa duo sudah SNI namun tidak mudah mengelola karena masyarakat (pedagang) masih belum mampu menerapkan di kegiatan perdagangan sehari2.	
		Industri yang sering menjadi masalah di masyarakat adalah industri tahu dan tempe karena bercampur dengan kawasan permukiman.	
		Pasar lama di kawasan kota Jambi berpotensi menjadi kawasan wisata (kota Tua)	
19	Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Jambi	Adanya rencana Pemindahan rumah potong hewan ke alam barajo (BBH)	
		Balai benih induk di Paal X sering banjir pada saat musim penghujan	
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi	Infrastruktur jaringan Jalan di Kota Jambi belum memiliki sistem yang jelas	
		Menyangkut masalah banjir perlu penguatan masalah isu banjir dan genangan (peraturan dan regulasi)	
		Penguatan isu mengenai pengendalian pembangunan di kota jambi	
21	Dinas Kesehatan Kota Jambi	Seiring peningkatan kota jambi diprediksi hingga 1 juta penduduk, ada 15 RS pemerintah dan swasta, perlu dikembangkan untuk titik peningkatan pelayanan penduduk.	
		Pengelolaan limbah tinja di kota Seberang hampir 100 persen Septi tank tidak kedap air dikhawatirkan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan.	
22	Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi	Perlu peningkatan kapasitas pada tingkat bawah, sehingga masalah dapat diidentifikasi dari tingkat kelurahan.	
		Penataan isu tentang penataan lingkungan khususnya di kawasan sempadan jalan	

Sumber : Tim Penyusun tahun 2023

4.2.1.2 Pemusatan Isu

Setelah proses pra-pelingkungan dilakukan, tahap berikutnya adalah proses pemusatan terhadap isu strategis pembangunan berkelanjutan. Pada tahap ini dilakukan seleksi atau pemilihan terhadap isu strategis pembangunan





berkelanjutan yang paling prioritas. Proses pelingkungan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Memeriksa duplikasi terhadap berbagai isu strategis yang diidentifikasi pada tahap pra-pelingkupan. Hal ini dilakukan sebagai satu langkah awal sebelum memeriksa isu-isu ini menggunakan kriteria strategis.
- Memilih isu strategis yang paling signifikan berdasarkan kriteria strategis yang ditetapkan, yaitu: (1) karakteristik; (2) tingkat penting dampak; (3) potensi dampak kumulatif & efek ganda; serta (4) penyebab; (5) bersifat lintas sektor. Setiap isu strategis yang diidentifikasi diberi nilai berdasarkan kriteria untuk mendapatkan isu prioritas.
- Memilih isu yang memiliki dimensi keruangan untuk dianalisis lebih jauh.





Tabel IV.2.2
Pemusatan Isu PB

Kelompok Isu	Isu PB Sejenis	Isu PB Strategis
Lingkungan	Tata Guna Lahan (LH1)	Perubahan pemanfaatan lahan dari pertanian menjadi Kegiatan Perumahan
		Perubahan pemanfaatan lahan kawasan resapan terhadap kegiatan perumahan
		Resiko Banjir Akibat ada perubahan guna lahan
		Perubahan guna lahan perlu dicermati khususnya untuk kawasan LP2B yang termuat dalam RTRW Kota Jambi
		Tata guna lahan masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian khusus
		Masiive-nya pembangunan di kota jambi perlu untuk dicermati agar sesuai dengan arahan dari rencana tata ruang
		Adanya perubahan pemanfaatan lahan hijau ke lahan perumahan
		Alih fungsi lahan salah satunya menggunakan teknologi sumur resapan, biopori, kolam retensi yang dapat digunakan sebagai kawasan wisata.
		Isu Alih fungsi lahan terhadap sempadan sungai perlu menjadi perhatian khusus, konsep *waterfront city* menjadi pertimbangan.
		monitoring dan evaluasi terhadap Pembangunan di kota Jambi belum maksimal
		Percampuran pemanfaatan lahan gudang yang bercampur dengan kawasan permukiman
		Industri yang sering menjadi masalah di masyarakat adalah industri tahu dan tempe karena bercampur dengan kawasan permukiman.
		Penguatan isu mengenai pengendalian pembangunan di kota jambi
	Kualitas Air (LH2)	Kualitas Air akibat sampah yang tidak di kelola
		Kualitas air perlu untuk diperhatikan karena adanya tingkat pencemaran yang tinggi
		Kualitas air khususnya yang tercemar bakteri e-coli perlu penanganan segera
		Indeks kualitas air di pengaruhi oleh banyaknya timbulan sampah di badan air
		Room for water dan *room for land* sebagai konsentrasi dasar pembangunan daerah, khusus ROW perlu diperhatikan masalah sedimentasi yang berdampak pada terhambatnya transportasi air
		Sedimentasi menyebabkan “matinya” sungai, danau teluk sipin dan danau kenali terintegrasi sebagai sarana transportasi sungai
	Kualitas Udara (LH3)	Pemantauan terhadap polusi udara kabut asap
		Nilai ekonomi karbon dan bagaimana kota menyikapi hal tersebut
		Perubahan ekstrim terhadap Iklim
		Pencematan Udara akibat pertumbuhan transportasi
		Komitmen pemerintah kota jambi terhadap gas rumah kaca dengan melakukan inventarisasi emisi gas rumah kaca
		Perlu adanya mitigasi emisi gas rumah kaca
		Pembangunan pertahanan iklim menjadi kebutuhan
	Resiko Bencana (LH4)	Resiko Banjir Akibat ada perubahan guna lahan
		Program Penangan Banjir melalui JFC dan Stasiun Pompa Asam
		Tata Kelola Air drainase di lingkungan taman rimba tidak maksimal
		Banjir dan genangan masih menjadi masalah di kota jambi
		Resiko bencana yang ada di kota jambi masih berupa banjir dan





Kelompok Isu	Isu PB Sejenis	Isu PB Strategis
		genangan terutama di musim penghujan
		Masalah banjir di kawasan perumahan
		Adanya potensi rawan bencana kebakaran di kawasan permukiman
		Drainase yang tidak lancar akibat sampah dan tingginya debit air
		Penanganan drainase perlu dilakukan secara komprehensif (hulu ke hilir)
		Pembangunan sistem drainase kota perlu segera direncanakan dan dibangun dengan memperhatikan faktor lingkungan
		Menyangkut masalah banjir perlu penguatan masalah isu banjir dan genangan (peraturan dan regulasi)
		Balai benih induk di Paal X sering banjir pada saat musim penghujan
	Persampahan (LH5)	Pengelolaan sampah hasil medis
		Penanganan Sampah di objek wisata taman rimba
		Timbulan sampah rumah tangga perlu dikelola dengan baik
		Penanganan masalah sampah di hutan kota saat ini bekerja sama dengan Bank Sampah
		Indeks kualitas air di pengaruhi oleh banyaknya timbulan sampah di badan air
		Tahun 2021 mulai difungsikannya sanitary landfill
		Pengelolaan limbah tinja di kota Seberang hampir 100 persen Septi tank tidak kedap air dikhawatirkan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan.
		perlu adanya reboisasi di TPA Talang Gulo
Ekonomi	Perkembangan Ekonomi (LH7)	Pasar baru angso duo sudah SNI namun tidak mudah mengelola karena masyarakat (pedagang) masih belum mampu menerapkan di kegiatan perdagangan sehari2
		Adanya rencana Pemindahan rumah potong hewan ke alam barajo (BBH)
		Dalam isu bagaimana menerapkan pembangunan jangka panjang sedangkan dalam proses 20 tahun ada 4 periode kepemimpinan, (bagaimana Singkronisasi pembangunan dalam jangka panjang tersebut)
		Dalam mencapai target 2045, masih harus memiliki visi dan komitmen antara kebijakan provinsi dan Kota Jambi dalam pembangunan di kota jambi
		Dalam rangka Percepatan Pembangunan menjadikan kota Jambi sebagai kota metropolitan, maka Perlu untuk dilakukan perencanaan yang tepat
		Pemikiran tentang wisata sejalan dengan sustaiability (pariwisata pemberdayaan masyarakat), dimana secara konseptual bertumpu pada pemanfaatan dan pengelolaan air
		Pusat pengelolaan air di danau sipin menjadi lumbung air yang pada akhirnya dapat menjadi kawasan destinasi pariwisata
		Pasar lama di kawasan kota Jambi berpotensi menjadi kawasan wisata (kota Tua)
	Infrastruktur (LH8)	Infrastruktur jaringan Jalan di Kota Jambi belum memiliki sistem yang jelas dan sudah mengalami VC ratio tidak layak (kemacetan)
		Penataan isu tentang penataan lingkungan khususnya di kawasan sempadan jalan
		Pembangunan sistem drainase kota perlu segera direncanakan dan dibangun dengan memperhatikan faktor lingkungan
		Seiring peningkatan kota jambi diprediksi hingga 1 juta penduduk,





Kelompok Isu	Isu PB Sejenis	Isu PB Strategis
		ada 15 RS pemerintah dan swasta, perlu dikembangkan untuk titik peningkatan pelayanan penduduk.
		Isu ranwal RPJPD Limbah dan energi baru terbarukan
Sosial Budaya	Peningkatan SDM (LH9)	Perlu peningkatan kapasitas pada tingkat bawah, sehingga masalah dapat diidentifikasi dari tingkat kelurahan.

Sumber : Tim Penyusun tahun 2023





Tabel IV.2.3
Matrik Interaksi dan Analisis Antara Sintesa Isu PB

NO	ISU PB	Karakteristik Wilayah	Tingkat Pentingnya Dampak LH	Keterkaitan antar ISU PB	Keterkaitan dengan IndikatorTPB	Muatan RPPLH	KLHS KRP Hierarki Atas	Kesimpulan hasil Analisis
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(10)*
1	Tata Guna Lahan	• Guna Lahan di dominasi oleh kawasan permukiman dengan luas 5.040 Ha. • Badan Air di Kota Jambi Terdiri dari Das Batanghari dan 8 Sub Das dengan luas 998,13 Ha. • Ruang Terbuka Hijau di Kota Jambi memiliki luas keseluruhan sebesar 818,11 Ha. • Pelanggaran bangunan di Kawasan Lindung di Kota Jambi mencapai 127,37 Ha (0,75%) • Pemanfaatan sempadan sungai di Kota Jambi sebesar 211,49 Ha, ditemukan pelanggaran pemanfaatan sempadan sungai yang di dominasi oleh bangunan permukiman sebanyak 50,43 Ha. • Pemanfaatan sempadan Danau di Kota Jambi sebesar 211,02 Ha, ditemukan pelanggaran pemanfaatan sempadan sungai yang di dominasi oleh bangunan permukiman sebanyak 24,95 Ha. • Terdapat lahan potensial kritis di Kota Jambi seluas 4.268, 59 Ha. • RTH Publik berdasarkan Indeks Hijau Biru Indonesia beru mencapai 12,05%	• **Jumlah penduduk yang terkena dampak ;** masyarakat pada administrasi dan kawasan yang berbatasan dengan Kota Jambi • **Luas Wilayah Penyebaran Dampak ;** berdampak terhadap Kawasan disekitar dan mempengaruhi perubahan iklim mikro • **Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;** cukup sering dan signifikan • **Banyaknya Komponen LH yang terkena dampak;** berupa Tanah, air dan udara • **Sifat Kumulatif dampak ;** Cukup signifikan pada Kawasan konservasi • **Berbalik atau tidak berbalik dampaknya ;** berpengaruh terhadap keanekaragaman hayati • **Kriteria Lain ;** berpengaruh terhadap kualitas hidup, keselamatan dan dampak ekonomi masyarakat	• Kualitas Air • Perubahan Iklim • Persampahan • Resiko Bencana • Perkembangan Ekonomi • Pariwisata dan peningkatan SDM	Terkait dengan Pilar Ekonomi, Pliar Lingkungan dan Pilar Sosial	- Pencadangan Keanekaragaman Hayati - Perlindungan kualitas lingkungan hidup - Pelestarian sumberdaya alam - Mitigasi terhadap perubahan iklim	KLHS RTRW Kota Jambi	**strategis**
2	Kualitas Air	• Badan Air di Kota Jambi Terdiri dari Das Batanghari dan 8 Sub Das dengan luas 998,13 Ha. • Indeks Pencemar air anak sungai tembuku (hilir) merupakan yang terburuk yaitu sebesar 11,1.	• **Jumlah penduduk yang terkena dampak ;** masyarakat pada administrasi dan kawasan yang berbatasan dengan Kota Jambi • **Luas Wilayah Penyebaran Dampak ;** berdampak terhadap Kawasan disekitar	• Tata Guna Lahan • Perubahan Iklim • Persampahan • Resiko Bencana • Pariwisata dan peningkatan SDM	Terkait dengan Pilar Ekonomi, Pliar Lingkungan dan Pilar Sosial	- Pencadangan Keanekaragaman Hayati - Perlindungan kualitas lingkungan hidup - Pelestarian sumberdaya alam	KLHS RTRW Kota Jambi	**strategis**





		• Pemanfaatan sempadan sungai di Kota Jambi sebesar 211,49 Ha, ditemukan pelanggaran pemanfaatan sempadan sungai yang di dominasi oleh bangunan permukiman sebanyak 50,43 Ha. • Pemanfaatan sempadan Danau di Kota Jambi sebesar 211,02 Ha, ditemukan pelanggaran pemanfaatan sempadan sungai yang di dominasi oleh bangunan permukiman sebanyak 24,95 Ha. • Kawasan wisata air (sungai dan danau) memiliki potensi yang cukup besar. • Sungai dan danau yang rentan mengalami perubahan fungsi lahan yang berpotensi dampak mengalami kerusakan berupa peningkatan sedimentasi dan peningkatan sampah yang berdampak buruk pada kualitas air sungai dan danau.	dan mempengaruhi perubahan iklim mikro • **Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;** cukup sering dan signifikan • **Banyaknya Komponen LH yang terkena dampak;** berupa Tanah, air dan udara • **Sifat Kumulatif dampak ;** Cukup signifikan pada Kawasan di Kota Jambi • **Berbalik atau tidak berbalik dampaknya ;** berpengaruh terhadap keanekaragaman hayati • **Kriteria Lain ;** berpengaruh terhadap kualitas hidup, keselamatan dan dampak ekonomi masyarakat			- Mitigasi terhadap perubahan iklim		
3	Kualitas Udara	• Kualitas Udara Ambien di Kota Jambi di dominasi oleh kegiatan transportasi, dikarenakan kota jambi merupakan ibukota dan pusat pemerintahan, ekonomi di Provinsi Jambi, serta Kota Jambi merupakan salah satu simpul jaringan jalan lintas timur di Pulau Sumatera. • Peningkatan emisi karbon dipengaruhi oleh jumlah kendaraan bermotor yang ada di Kota Jambi sebanyak 911.537 Unit Kendaraan naik berbahan bakar jenis bensin, solar maupun gas. • Penurunan kualitas udara akibat kabut asap di Kota Jambi dipengaruhi terbakarnya lahan di luar administrasi Kota Jambi.	• **Jumlah penduduk yang terkena dampak ;** masyarakat pada administrasi dan kawasan yang berbatasan dengan Kota Jambi • **Luas Wilayah Penyebaran Dampak ;** berdampak terhadap Kawasan disekitar dan mempengaruhi perubahan iklim • **Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;** cukup sering dan signifikan • **Banyaknya Komponen LH yang terkena dampak;** berupa udara • **Sifat Kumulatif dampak ;** Tidak signifikan di Kawasan kota Jambi • **Berbalik atau tidak berbalik dampaknya ;** berpengaruh terhadap kesehatan manusia • **Kriteria Lain ;** berpengaruh terhadap kualitas hidup	• Tata Guna Lahan • Perubahan Iklim • Persampahan	Terkait dengan Pilar Ekonomi, Pliar Lingkungan dan Pilar Sosial	- Pencadangan Keanekaragaman Hayati - Perlindungan kualitas lingkungan hidup - Pelestarian sumberdaya alam - Mitigasi terhadap perubahan iklim	KLHS RTRW Kota Jambi	Tidak strategis
4	Resiko Bencana	• Peningkatan runoff sebagai dampak perubahan tutupan lahan serta peningkatan curah hujan yang	• **Jumlah penduduk yang terkena dampak ;** masyarakat pada administrasi Kota Jambi • **Luas Wilayah Penyebaran Dampak ;**	• Kualitas Air • Tata Guna Lahan • Perubahan Iklim	Terkait dengan Pilar Ekonomi, Pliar Lingkungan dan Pilar	- Perlindungan kualitas lingkungan hidup - Pelestarian	KLHS RTRW Kota Jambi	**strategis**





		mengakibatkan banjir dan genangan di sejumlah Kecamatan di Kota Jambi • Permukiman terdampak banjir di Kota Jambi berada di 9 (sembilan) Kecamatan dengan luas permukiman terdampak seluas 1.301 Ha dan 26.240 unit rumah.	berdampak terhadap Kawasan disekitar yang mempengaruhi kesehatan dan kerugian material masyarakat terdampak • **Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;** signifikan pada musim penghujan • **Banyaknya Komponen LH yang terkena dampak;** mempengaruhi kualitas Tanah dan air • **Sifat Kumulatif dampak ;** Cukup signifikan pada periode tertentu • **Berbalik atau tidak berbalik dampaknya ;** berpengaruh terhadap kesehatan dan keselamatan manusia • **Kriteria Lain ;** berpengaruh terhadap kualitas hidup, keselamatan dan dampak ekonomi masyarakat	• Persampahan	Sosial	sumberdaya alam - Mitigasi terhadap perubahan iklim		
5	Persampahan	• Jumlah penduduk Kota Jambi tahun 2022 mencapai 619.553 jiwa dengan menghasilkan jumlah sampah per hari mencapai 433,69 M3/hari • Kota Jambi memiliki TPA talang gulo dengan luas 21,3 Ha dengan kapasitas layanan sampah sebesar 620.000 m^3.	• **Jumlah penduduk yang terkena dampak ;** masyarakat pada administrasi dan kawasan yang berbatasan dengan Kota Jambi (Kabupaten Muaro Jambi) • **Luas Wilayah Penyebaran Dampak ;** berdampak terhadap Kawasan disekitar dan mempengaruhi Kesehatan Masyarakat • **Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;** cukup sering dan signifikan • **Banyaknya Komponen LH yang terkena dampak;** mempengaruhi kualitas Tanah, air dan udara • **Sifat Kumulatif dampak ;** Cukup signifikan di Kawasan kota Jambi • **Berbalik atau tidak berbalik dampaknya ;** berpengaruh terhadap kesehatan manusia • **Kriteria Lain ;** berpengaruh terhadap kualitas hidup, keselamatan dan dampak ekonomi masyarakat	• Tata Guna Lahan • Perubahan Iklim • Kualitas Air • Kualitas Udara • Resiko Bencana	Terkait dengan Pilar Ekonomi, Pliar Lingkungan dan Pilar Sosial	- Pencadangan Keanekaragaman Hayati - Perlindungan kualitas lingkungan hidup - Pelestarian sumberdaya alam - Mitigasi terhadap perubahan iklim	KLHS RTRW Kota Jambi	**strategis**
6	Perkembangan Ekonomi dan Pembangunan	• jumlah penduduk Kota Jambi sudah bertambah sebanyak 2,39%, dari 604.738 jiwa menjadi 619.553 jiwa.	• **Jumlah penduduk yang terkena dampak ;** masyarakat pada administrasi Kota Jambi • **Luas Wilayah Penyebaran Dampak ;**	-	Terkait dengan Pilar Ekonomi dan Pilar Sosial	-	KLHS RTRW Kota Jambi	Tidak Strategis





		• Peran Sektor Ekonomi dalam PDRB di Kota Jambi pada Tahun 2012 di dominasi dari Jasa penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 23,34%, diikuti oleh Jasa Perusahaan sebesar 19,12%.	berdampak terhadap Kawasan disekitar kawasan Kota Jambi • **Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;** tidak ada • **Banyaknya Komponen LH yang terkena dampak;** tidak ada • **Sifat Kumulatif dampak ;** tidak ada • **Berbalik atau tidak berbalik dampaknya ;** berpengaruh terhadap Kesejahteraan manusia • **Kriteria Lain ;** berpengaruh terhadap kualitas hidup dan dampak ekonomi masyarakat					
7	Pariwisata dan Peningkatan SDM	• Kota Jambi memiliki potensi wisata alam yang di Danau Sipin dan Sungai Batanghari, namun belum dikelola dengan maksimal • Kawassan cagar budaya seperti	• **Jumlah penduduk yang terkena dampak ;** masyarakat pada administrasi Kota Jambi • **Luas Wilayah Penyebaran Dampak ;** berdampak terhadap Kawasan disekitar kawasan Kota Jambi • **Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;** tidak ada • **Banyaknya Komponen LH yang terkena dampak;** tidak ada • **Sifat Kumulatif dampak ;** tidak ada • **Berbalik atau tidak berbalik dampaknya ;** tidak ada • **Kriteria Lain ;** -	• Tata Guna Lahan • Kualitas Air	Terkait dengan Pilar Ekonomi, Pliar Lingkungan dan Pilar Sosial	-	KLHS RTRW Kota Jambi	Tidak Strategis

Sumber: Pokja KLHS RPJPD Kota Jambi





Tabel IV.2.4
Tingkat Penting Isu PB

NO	SINTESA ISU PB	ANALISIS ISU PB DENGAN KRITERIA TINGKAT PENTINGNYA POTENSI DAMPAK	KESIMPULAN HASIL ANALISIS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	Tata Guna Lahan	**a) Kapasitas D3TLH ;** Berpengaruh terhadap pemanfaatan lahan yang tidak sesuai daya dukung, seperti lahan basah atau paparan banjir. Semakin menurun lahan potensi pertanian perkotaan yang berdampak terhadap semakin rendahnya daya dukung pangan. **b) Perkiraan Dampak resiko LH;** Peningkatan tutupan lahan berdampak terhadap peningkatan *runoff* dan resiko bencana banjir di kawasan permukiman. **c) Kinerja JE;** Jasa ekosistem penyediaan air yang dalam kategori sangat rendah hingga sedang akan semakin menurun karena berkurangnya air tanah sebagai akibat semakin meningkatnya tutupan lahan. Permasalahan lainnya adalah semakin menurunya JE tata kelola air. **d) Status Mutu dan ketersediaan SDA;** Semakin terbatas ketersediaan lahan dan meningkatnya harga lahan, berpotensi pemanfaatan lahan untuk menjaga mutu sumber daya alam seperti sempadan sungai dan danau. **e) Ketahanan dan Potensi Kehati;** perubahan guna lahan dari non terbangun menjadi terbangun, berpotensi dampak terhadap menurunnya tempat hidup flora dan fauna, serta peningkatan sedimen yang mendukung pendangkalan DAS dan Sub Das termasuk danau. **f) Kerentanan Kapasitas terhadap Adaptasi Perubahan iklim;** potensi penurunan lahan hijau dan selanjutnya menurunkan penyerap karbon	**Strategis**
2	Kualitas Air	**a) Kapasitas D3TLH ;** Semakin meningkat sumber pencemar yang disalurkan ke Sub DAS menyebabkan semakin menurunnya daya tampung air yang sudah pada kategori tercemar sedang.	**Strategis**





NO	SINTESA ISU PB	ANALISIS ISU PB DENGAN KRITERIA TINGKAT PENTINGNYA POTENSI DAMPAK	KESIMPULAN HASIL ANALISIS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
		b) Perkiraan Dampak resiko LH; Peningkatan jumlah penduduk, kegiatan sosial dan ekonomi berpotensi dampak peningkatan kadar pencemaran air permukaan. **c) Kinerja JE;** Jasa ekosistem pengelolaan air limbah di Kota Jambi didominasi kategori sangat rendah hingga sedang. Perkembangan kota akan berpotensi dampak terhadap peningkatan Persentase pengelolaan air limbah pada kategori sangat rendah dan rendah. **d) Status Mutu dan ketersediaan SDA;** Penurunan mutu air sungai dan danau. **e) Ketahanan dan Potensi Kehati;** penurunan mutu air sungai dan danau akan berdampak terhadap penurunan keanekaragaman hayati di sungai dan danau.	
3	Kualitas Udara	**a) Kapasitas D3TLH ;** Kualitas udara buruk berpotensi dampak terhadap . kerusakan fisiologis tanaman pertanian pangan perkotaan, seperti nekrosis daun, akibat partikulat dan senyawa-senyawa kimia beracun dalam udara. **b) Perkiraan Dampak resiko LH;** Dampak kesehatan yang selanjutnya berdampak peningkatan konsumsi rumah tangga untuk biaya kesehatan, serta penurunan produktivitas kerja **c) Kinerja JE;** Jasa ekosistem kualitas udara di Kota Jambi sekitar 90,94% pada kategori sangat rentah hingga sedang, dengan komposisi: 35,37% sangat rendah, 7,75% rendah, dan 47,46% sedang. **d) Status Mutu dan ketersediaan SDA;** Penurunan mutu udara perkotaan **e) Ketahanan dan Potensi Kehati;** polusi udara dapat merusak atau menghancurkan habitat hewan di kota, yang mengurangi ketersediaan tempat tinggal dan makanan bagi beragam spesies. Selain itu, polusi udara dapat	**Strategis**





NO	SINTESA ISU PB	ANALISIS ISU PB DENGAN KRITERIA TINGKAT PENTINGNYA POTENSI DAMPAK	KESIMPULAN HASIL ANALISIS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
		memengaruhi perilaku hewan, termasuk migrasi, reproduksi, dan pola makan, yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem perkotaan. Kualitas udara yang buruk juga dapat memengaruhi kesehatan hewan, menyebabkan gangguan pernapasan dan masalah kesehatan lainnya Dampak terhadap tanaman adalah pertumbuhan tanaman yang terhambat akibat peningkatan kadar ozon troposferik yang menghambat pertumbuhan tanaman dan mengurangi produktivitas pertanian di sekitar perkotaan. **f) Kerentanan Kapasitas terhadap Adaptasi Perubahan iklim;** potensi penurunan kemampuan tanaman dalam menyerap karbon	
4	Resiko Bencana	**a) Kapasitas D3TLH ;** • Penurunan kualitas air permukaan; • Kerusakan lahan pertanian perkotaan. • Penurunan lahan layak pengembangan permukiman. **b) Perkiraan Dampak resiko LH;** Dampak ekonomi dan sosial penduduk hingga finansial pemerintah daerah. **c) Kinerja JE;** Jasa ekosistem tata Kelola air di Kota Jambi, sebesar 82,43% berada di kategori sangat rendah hingga sedang. **d) Status Mutu dan ketersediaan SDA;** Penurunan luas lahan layak perkembangan permukiman **e) Ketahanan dan Potensi Kehati;** Kerusakan kehati di sempadan sungai dan paparan banjir lainnya. **f) Kerentanan Kapasitas terhadap Adaptasi Perubahan iklim;** Penurunan luas hijau yang terpapar banjir dan selanjutnya berdampak penurunan penyerapan karbon	**Strategis**
5	Persampahan	**a) Kapasitas D3TLH ;** Dampak terhadap daya tampung air dan tanah terhadap sampah yang tidak terkelolaa (dibuang ke	**Strategis**





NO	SINTESA ISU PB	ANALISIS ISU PB DENGAN KRITERIA TINGKAT PENTINGNYA POTENSI DAMPAK	KESIMPULAN HASIL ANALISIS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
		badan air/dihampar di tanah) **b) Perkiraan Dampak resiko LH;** Pencemaran udara, tanah, dan air yang berpotensi dampak terhadap air minum dan kesehatan Masyarakat dan selanjutnya peningkatan pengeluaran/konsumsi untuk rehabilitasi kesehatan. **c) Kinerja JE;** Jasa ekosistem hama penyakit di Kota Jambi, sebesar 83,30% berada di kategori sangat rendah hingga sedang. **d) Status Mutu dan ketersediaan SDA;** Penurunan mutu kualitas air tanah dan air permukaan **e) Ketahanan dan Potensi Kehati;** Kerusakan kehati di sungai dan danau. **f) Kerentanan Kapasitas terhadap Adaptasi Perubahan iklim;** Tumpukan sampah di udara terbuka mengeluarkan gas metana, salah satu gas yang bertanggung jawab atas pemanasan global	
6	Perkembangan Ekonomi, Pembangunan, dan Infrastruktur	**a) Kapasitas D3TLH ;** Peningkatan emisi berdampak lebih lanjut terhadap Kualitas udara buruk berpotensi dampak terhadap . kerusakan fisiologis tanaman pertanian pangan perkotaan, seperti nekrosis daun, akibat partikulat dan senyawa-senyawa kimia beracun dalam udara. **b) Perkiraan Dampak resiko LH;** • Pembangunan tidak sesuai daya dukung lingkungan hidup berdampak terhadap penurunan kualitas lingkungan permukiman perkotaan; • Kemacetan dan dampak lanjutan terhadap peningkatan emisi **c) Kinerja JE;** Penurunan jasa layanan ekosistem terutama kelompok penyediaan dan pengaturan akibat peningkatan tutupan lahan/perubahan rona eksisting **d) Status Mutu dan ketersediaan SDA;** Penurunan mutu udara perkotaan **e) Ketahanan dan Potensi Kehati;**	**Strategis**





NO	SINTESA ISU PB	ANALISIS ISU PB DENGAN KRITERIA TINGKAT PENTINGNYA POTENSI DAMPAK	KESIMPULAN HASIL ANALISIS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
		perubahan guna lahan dari non terbangun menjadi terbangun, berpotensi dampak terhadap menurunnya tempat hidup flora dan fauna, serta peningkatan sedimen yang mendukung pendangkalan DAS dan Sub Das termasuk danau. **f) Kerentanan Kapasitas terhadap Adaptasi Perubahan iklim;** potensi penurunan lahan hijau dan selanjutnya menurunkan penyerap karbon	
7	Peningkatan SDM	**a) Kapasitas D3TLH ;** Peningkatan dan penurunan tata Kelola Pembangunan berkelanjutan akan sangat mempengaruhi terhadap bertahannya D3TLH atau justru penurunan. **b) Perkiraan Dampak resiko LH;** Peningkatan dan penurunan tata Kelola Pembangunan berkelanjutan mempengaruhi jumlah, luas, dan tingkat resiko lingkungan hidup **c) Kinerja JE;** Peningkatan dan penurunan tata Kelola Pembangunan berkelanjutan berpengaruh terhadap kinerja jasa layanan ekosistem **d) Status Mutu dan ketersediaan SDA;** Peningkatan dan penurunan tata Kelola Pembangunan berkelanjutan mempengaruhi eksistensi mutu sumberdaya alam **e) Ketahanan dan Potensi Kehati;** Peningkatan dan penurunan tata Kelola Pembangunan berkelanjutan mempengaruhi konsistensi ketersediaan Kehati. **f) Kerentanan Kapasitas terhadap Adaptasi Perubahan iklim;** Kebutuhan peningkatan tata Kelola dalam mencegah peningkatan perubahan iklim dan kebutuhan peningkatan Upaya mitigasi perubahan iklim yang sudah terjadi	**Strategis**

Sumber: Pokja KLHS RPJPD Kota Jambi





Tabel IV.2.5
Analisis Isu PB Paling Strategis

No	Sintesa ISU PB	Analisis Isu PB Dengan Kriteria Tingkat Pentingnya Potensi Dampak										Jumlah	Kesimpulan Hasil Analisis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Tata Guna Lahan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	–	9	Strategis
2	Kualitas Air	√	√	√	√	√	√	√	–	√	–	8	Strategis
3	Kualitas Udara	√	√	√	√	√	√	√	–	√	–	8	Strategis
4	Resiko Bencana	√	√	√	√	√	√	√	√	√	–	9	Strategis
5	Persampahan	√	√	√	√	√	√	√	–	√	–	8	Strategis
6	Perkembangan Ekonomi, Pembangunan, dan infrastruktur	√	√	√	√	√	√	√	√	–	–	8	Strategis
7	Peningkatan SDM	√	√	√	√	√	√	√	√	√	–	9	Strategis

Keterangan :

1. Kapasitas D3TLH ;
2. Perkiraan Dampak resiko LH;
3. Kinerja JE;
4. Intensitas dan Cakupan wilayah bencana Alam;
5. Status Mutu dan ketersediaan SDA;
6. Ketahanan dan Potensi Kehati;
7. Kerentanan Kapasitas terhadap Adaptasi Perubahan iklim;
8. Tingkat dan Status Jumlah penduduk miskin;
9. Resiko terhadap Kesehatan dan Keselamatan masyarakat;
10. Ancaman Terhadap Perlindungan Kawasan tertentu oleh masyarakat hukum adat;





Setelah melalui proses kajian dan penilaian berdasarkan keempat kriteria yang ditetapkan diatas, Tim Kerja KLHS menetapkan Isu Pembangunan Berkelanjutan Paling Strategis di Kota Jambi terutama terkait dengan berbagai aspek terlihat berkaitan dominan dengan Tingkat pentingnya dampak lingkungan hidup, oleh karena itu Isu pembangunan berkelanjutan disepakati mencakup keseluruhan isu yang terlah dipusatkan, dengan urutan sebagai berikut :

1. Tata Guna Lahan;
2. Resiko Bencana Alam;
3. Peningkatan SDM;
4. Kualitas Air;
5. Kualitas Udara;
6. Persampahan; dan
7. Perkembangan Ekonomi, Pembangunan, dan infrastruktur;

4.2.2 Perubahan Penggunaan Lahan

4.2.2.1 Pola Perkembangan Kota

A. Pola Perkembangan Internal

Kota adalah Leburan Dari bangunan dan penduduk, sedangkan bentuk kota pada awalnya adalah netral tetapi kemudian berubah sampai hal ini dipengaruhi dengan budaya yang tertentu (Spiro Kostof :1991).

Kota Jambi tumbuh secara dinamis sejalan dengan dinamika perkembangan demografis, ekonomi dan fisik-spasial. Secara fisik, penjalaran Kota Jambi diawali dengan bentuk linear, dimana pada awalnya perkembangan kota sangat dipengaruhi oleh Sungai Batanghari. Perkembangan fisik yang linear terhadap Sungai Batanghari terutama pada Kawasan Kota Seberang (BWP II) dan kawasan sempadan sungai pada bagian selatan (sebagian BWP III dan sebagian BWP VI). Perkembangan dengan pola linear terhadap Sungai Batanghari ini cenderung telah jenuh karena keterbatasan daya tampung pada kawasan tersebut. Pola perkembangan kota cenderung memusat kepada pusat utama dan



selanjutnya linear terhadap jalur transportasi utama dan semakin menjalar keluar, sehingga cenderung berpola konsentris terhadap pusat utama.

Pola penjalaran yang berorintasi linear terhadap jalur transportasi utama, pada saat ini juga cenderung semakin jenuh, karena semakin menurunnya daya tampung pada kawasan koridor jalur utama tersebut, sehingga penjalaran fisik kota menjadi linear terhadap jalur transportasi yang hirarkinya berada dibawah jalur utama dan telah menyatukan antara kawasan terbangun yang satu dengan kawasan terbangun yang lainnya, sehingga terlihat bahwa perkembangan Kota Jambi cenderung berpola radial menerus.

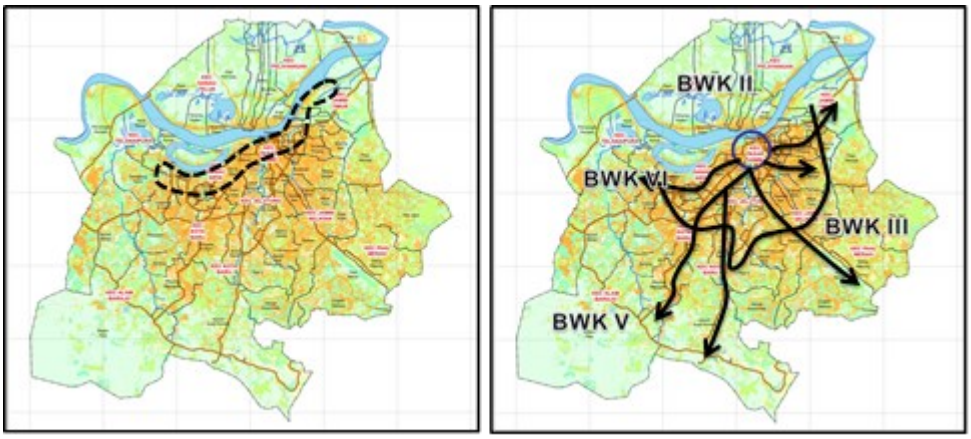

Gambar 4.2.1
Ilustrasi Pola Perkembangan Kota Jambi

B. Pola Perkembangan Wilayah Eksternal

Secara umum, kawasan non terbangun di Kota Jambi yang ada belakangan ini adalah kawasan *hinterland* kota atau kawasan bagian luar. Pada saat ini, dinamika penggunaan lahan pada kawasan ini mengalami perubahan karena tuntutan pemenuhan kebutuhan perkembangan permukiman kota. Selain karena faktor internal tersebut, perkembangan wilayah terluar juga dipicu oleh terjadinya perkembangan pada wilayah eksternal. Wilayah eksternal Kota Jambi memiliki kecenderungan harga lahan yang lebih murah. Selain daripada itu, adanya rencana investasi pembangunan infrastruktur pada wilayah tersebut



akan semakin menarik perkembangan kota kearah luar dan memicu percepatan perubahan guna lahan pada wilayah kota bagian luar.

Secara administrasi, wilayah Kota Jambi dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Pesatnya perkembangan Kota Jambi dan atas beberapa faktor pertumbuhan lainnya telah memicu perkembangan fisik wilayah yang berbatasan yang berada didalam administrasi wilayah Kabupaten Muaro Jambi, sehingga semakin mengaburkan batas administrasi wilayah dan membentuk satu kesatuan kawasan permukiman secara fungsi dan memberi pengaruh terhadap kawasan terluar dari administrasi Kota Jambi dan beberapa sistem prasarana dan sarana kota.

1) Perkembangan Kawasan Bagian Barat Kota

Kawasan ini berbatasan dengan kawasan yang merupakan arah utama pengembangan kota inti. Secara administrasi berada pada wilayah administrasi Kecamatan Jambi Luar Kota yang secara fungsi, perkembangannya dipengaruhi oleh pusat skala regional berupa pusat pendidikan tinggi Provinsi Jambi sebagai pemicu perkembangan dan didukung oleh keberadaan ruas jalan arteri primer lintas Kota Jambi-Muara Bungo. Perkembangan kawasan semakin terlihat dengan tumbuhnya pusat permukiman skala besar yang berciri kota mandiri. Sehingga tipologi kawasan lebih dekat dengan ciri *predominantly urban*. Perkembangan kegiatan komersil dan permukiman sudah semakin mirip dengan kota inti, sehingga secara fungsi tidak ada pembeda antara kawasan ini dengan kota inti.






Perkembangan Kegiatan Komersil di Jalan Utama Wilayah Barat

2) Perkembangan Kawasan Bagian Selatan Kota

Kawasan peri urban pada bagian ini merupakan kawasan yang berkembang dengan orientasi keberadaan jalan arteri primer ruas Jambi-Palembang. Perkembangan kawasan cenderung linear dengan gejala perubahan guna pada koridor jalan utama menjadi lahan komersil. Namun secara umum, pada kawasan belakangnya masih menunjukan ciri kedesaan.






Perkembangan Kegiatan Komersil di Jalan Utama Wilayah Selatan

Zona ini diprediksi akan mengalami akselerasi perkembangan yang cukup pada masa yang akan datang sebagai dampak realisasi sistem prasarana nasional (simpul TOL Sumatera) dan rencana konektivitas pusat-pusat pertumbuhan Provinsi Jambi melalui Jambi Outer Ring Road II yang

menghubungkan simpul TOL dengan kawasan industry di Kabupaten Muaro Jambi. Keberadaan jaringan prasarana ini nantinya dapat memberi pengaruh terhadap pola ruang Kota Jambi, dimana kegiatan permukiman akan semakin cepat tertarik kearah luar, serta kemungkinan tereduksinya kegiatan industri dan pergudangan pada jalan lingkar selatan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada ilustrasi berikut ini:



Gambar 4.2.2
Ilustrasi Pengaruh Perkembangan Ekternal Kota Bagian Selatan

3) Perkembangan Kawasan Bagian Timur Kota

Kawasan ini berbatasan dengan kegiatan permukiman, industri, perdagangan dan jasa kota inti. Secara administrasi, kawasan yang telah berkembang kearah perkotaan meliputi: Desa Mekar Jaya, Desa Kebun IX, Desa Tangkit Lama di Kecamatan Sungai Gelam dan Desa Kasang Kumpeh di Kecamatan Kumpeh Ulu. Sebagian kawasan yang berbatasan langsung dengan Kota Jambi dapat dikatakan berkarakter predominantly urban dan pada bagian terluar menunjukan karakter semi urban.

Perkembangan kegiatan kegiatan permukiman, perdagangan, dan jasa pada kawasan ini menunjukan karakter yang sudah hampir mirip dengan perkembangan pada kota inti. Perdagangan dan jasa berkembang melalui

bangunan deret pada koridor jalan utama dan perumahan berkembang dengan luas kavling (kepadatan) yang tidak terlalu berbeda dengan yang berkembang pada kota inti. Aksesibilitas terhadap kota inti sudah sangat baik yang dihubungkan oleh ruas jalan primer dan sistem transportasi umum kota yang melintasi kawasan tersebut.



Perkembangan Kegiatan Komersil di Jalan Utama Wilayah Timur.

4.2.2.2 Pola Penggunaan Lahan Kota Jambi

Dinamika perubahan guna lahan akan lebih akurat dilihat dengan mengintepretasikan citra satellite pada periode tertentu yang menjadi tahun pengamatan. Akan tetapi, ketersediaan data spasial secara time series tersebut cenderung sulit didapatkan, apalagi untuk ukuran pertahun. Oleh karena itu, data perubahan guna lahan disumberkan kepada ketersediaan data yang ada, seperti data dari Badan Pusat Statistik berikut ini:



Tabel IV.2.6
Luas Perubahan Penggunaan Lahan

No	Guna Lahan	Tahun 2013	Tahun 2021
1	Bangunan Non Hunian (perdagangan, perkantoran, fasilitas)	1.168,57	968,57
2	Industri dan Pergudangan	101,31	67,79
3	Permukiman (Hunian)	2.927,91	5.040,01
4	tubuh air	1.195,88	998,13
5	Lapangan	92,55	15,71
6	Lahan Kosong/belukar	6.407,49	2.985,15
7	Makam	33,91	40,57
8	Sawah	590,93	446,87
9	Kebun/ladang	5.165,37	6.419,75

Sumber : Dokumen Revisi RTRW Kota Jambi Tahun 2022-2042

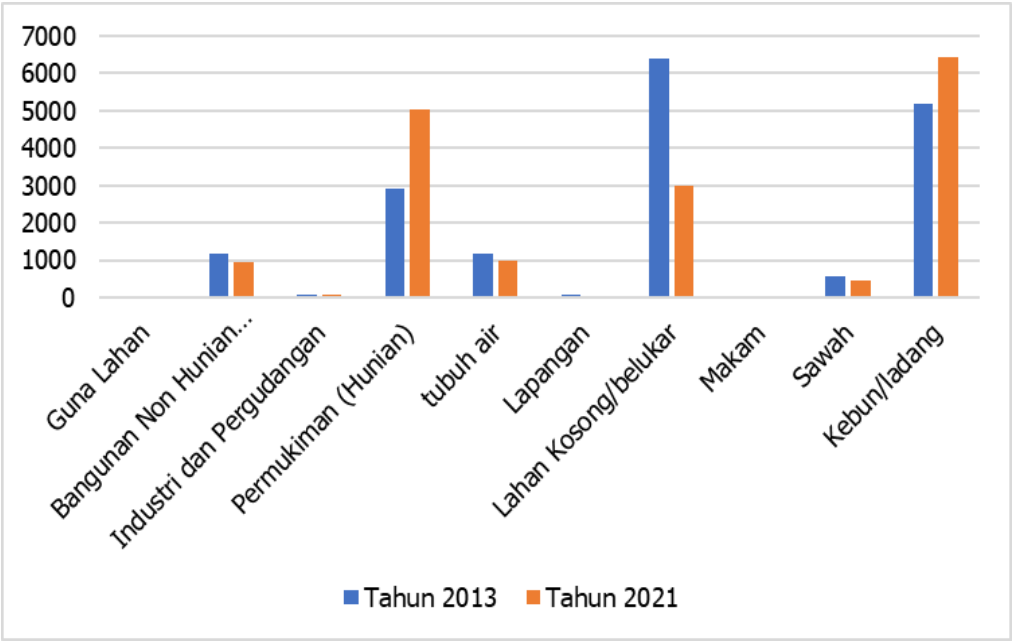

Gambar 4.2.3
Grafik Luas Perubahan Penggunaan Lahan

Dari tabel dan grafik diatas dapat terlihat bahwa terjadi perubahan signifikan pada penggunaan permukiman, dimana luasan permukiman meningkat jauh, dan berbanding terbalik dengan luas tanah kosong yang mengalami penurunan signifikan.



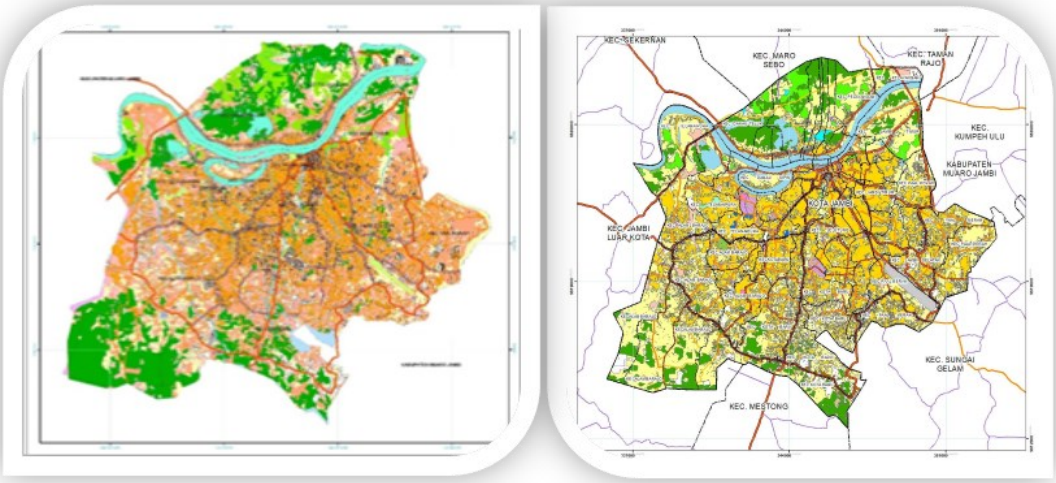

Gambar 4.2.4
Peta Perubahan Guna Lahan Kota Jambi
Sumber : Dokumen Revisi RTRW Kota Jambi Tahun 2023-2043

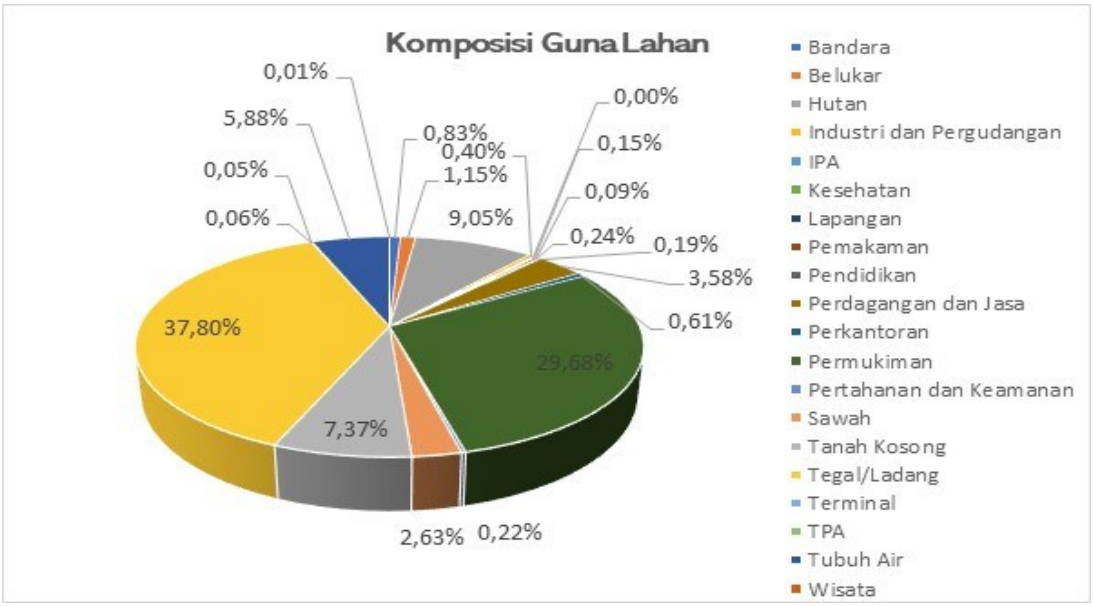

Gambar 4.2.5
Komposisi Guna Lahan Kota Jambi

4.2.2.3 Intensitas Pemanfaatan Lahan

A. Intensitas Pemanfaatan Lahan BWP I

BWP I merupakan CBD Kota Jambi yang sekaligus merupakan Kawasan Strategis Kota untuk kepentingan ekonomi. Kondisi ini terbentuk secara



eksisting dan ditegaskan melalui penekanan peran dan fungsi kawasan. Dari karakter dan fungsi ini tergambar bahwa dominasi kegiatan yang berlangsung adalah kegiatan perdagangan dan jasa skala kota bahkan skala regional.

1) Kepadatan Bangunan

Pola perkembangan yang terjadi pada BWP ini mewakili pola perkembangan wilayah Kota Jambi secara keseluruan yang cenderung radial konsentris. Kepadatan bangunan yang ada di BWP ini cenderung tinggi dengan KDB > 80% terutama untuk bangunan deret yang berada di koridor jalan utama kawasan. Kondisi kepadatan yang tidak jauh berbeda juga terjadi pada bangunan permukiman yang memang cenderung kurang tertata dan sebagian berada pada zona yang tidak sesuai dengan daya dukung karena merupakan zona yang rentan terhadap luapan yang berasal dari Batanghari dan SubDASnya,

2) Ketinggian Bangunan

Ketinggian bangunan pada BWP I walaupun memiliki fungsi yang sama yaitu fungsi umum, namun cenderung memiliki ketinggian yang berbeda. Bagian kawasan dengan ketinggian bangunan kurang dari 8 (delapan) meter adalah bagian kawasan dengan fungsi kegiatan permukiman, sementara ketinggian bangunan 8-12 meter terutama berada pada koridor jalan utama untuk fungsi komersil. Ketinggian bangunan pada kelompok ini terutama adalah bangunan jenis rumah toko. Untuk bangunan dengan ketinggian lebih dari 12 meter terutama adalah bangunan komersil seperti hotel.









Visual Kepadatan dan Ketinggian Bangunan BWP I

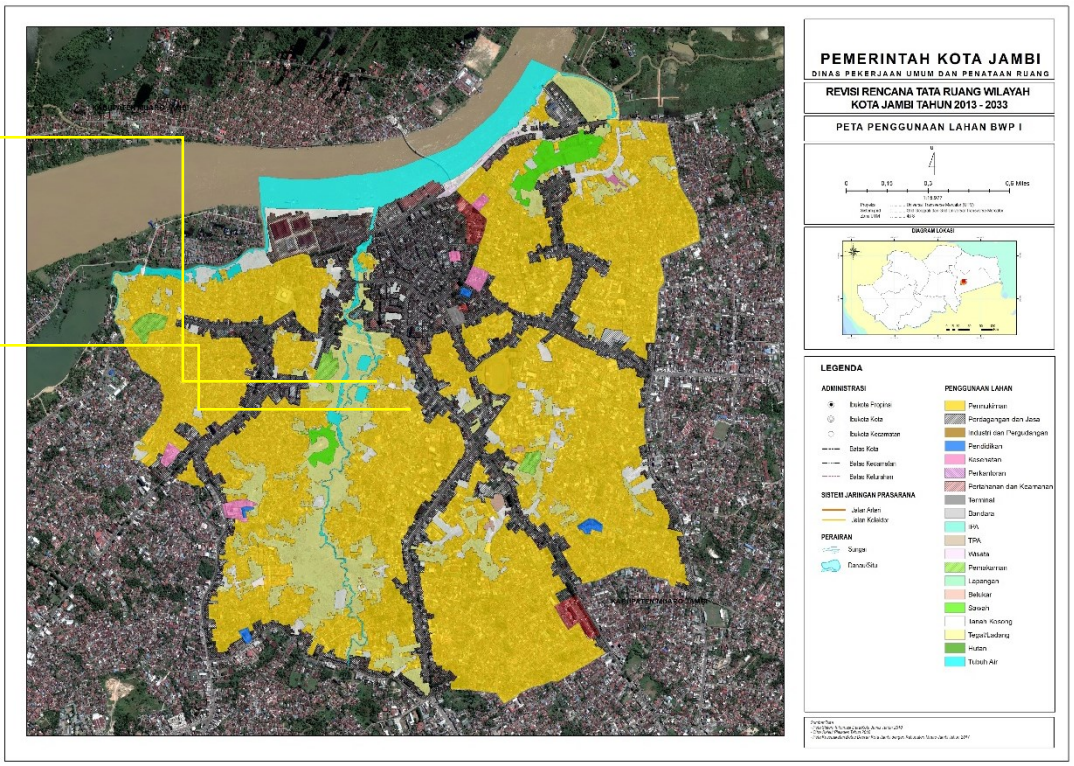

Gambar 4.2.6
Visualisasi Intensitas Pemanfaatan Ruang BWP I

B. Intensitas Pemanfaatan Lahan BWP II

Kawasan BWP II diarahkan sebagai kawasan cagar budaya Kota Jambi. Fungsi utama yang mendominasi adalah fungsi untuk kegiatan permukiman. Fungsi pendukung lainnya yang berlangsung di BWP II meliputi fungsi perdagangan dan jasa, pemerintahan, pendidikan, dan sosial budaya.

BWP II merupakan bagian wilayah Kota Jambi yang memiliki batasan fisik untuk perkembangan kegiatan terbangun, karena bagian wilayah ini cenderung rentan banjir. Kondisi ini menyebabkan tidak seluruh bagian kawasan berfungsi sebagai pendukung kegiatan terbangun. Pola perkembangan kawasan BWP II cenderung linear mengikuti pola jaringan jalan utama, dimana pola jaringan jalan utama ini linear terhadap aliran Batanghari.





1) Kepadatan bangunan di BWP II

Pemanfaatan lahan pada Kawasan BWP II didominasi oleh kegiatan permukiman. Kegiatan permukiman yang berorientasi awal terhadap Batanghari telah menciptakan pola perkembangan yang linear. Pola perkembangan ini selaras dengan pola jaringan jalan utama yang juga linear menghubungkan Jalan Arteri Primer dan Jalan Kolektor Primer di Kota Jambi. Dominasi fungsi sebagai kawasan permukiman, jika dikaitkan dengan kepadatan penduduk secara bruto dapat terlihat bahwa pada dasarnya kepadatan penduduk di BWP II cenderung rendah, namun karena karakter orientasi bermukim tersebut, menjadikan kondisi kepadatan bangunan pada kawasan terbangun di BWP II tergolong kepada kepadatan tinggi, dengan KDB bahkan >80%.

2) Ketinggian Bangunan BWP II

Ketinggian bangunan dapat dikelompokan sebagai berikut :

1. Bangunan dengan ketinggian kurang dari 8 meter. Bangunan kategori ini, yang setara dengan 1-2 lantai
2. Bangunan dengan ketinggian 8 hingga 12 meter. Bangunan kategori ini, yang setara dengan 2-3 lantai
3. Bangunan dengan ketinggian lebih dari 12 meter. Bangunan kategori ini, yang setara dengan lebih dari 3 lantai

Berdasarkan pengamatan, kondisi ketinggian bangunan di BWP II secara umum merupakan bangunan dengan ketinggian kurang dari 8 meter atau tidak lebih dari 2 lantai.



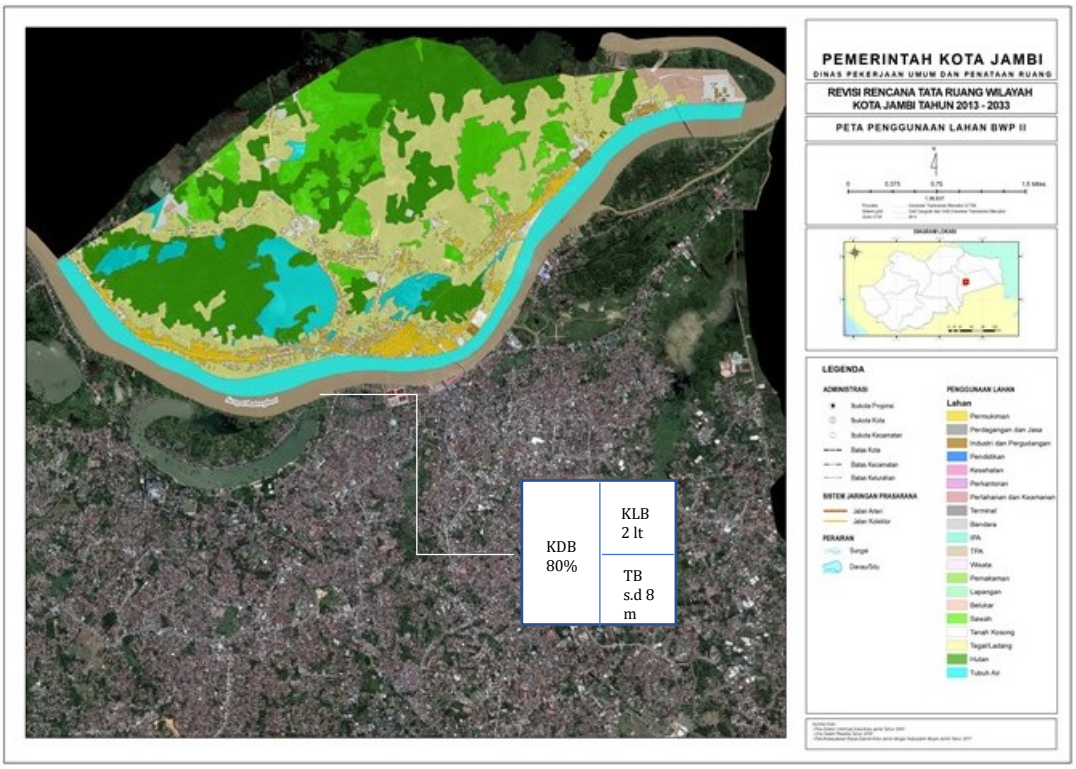

Gambar 4.2.7
Visual Intensitas Pemanfaatan Ruang BWP II

C. Intensitas Pemanfaatan Lahan BWP III

Kawasan BWP III diarahkan untuk fungsi kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, kegiatan industri, serta bandar udara. Sistem jaringan jalan utama yang mempengaruhi bagian wilayah ini adalah Jalan arteri primer yang berorientasi ke CBD Kota Jambi dan Jalan lingkar. Perkembangan kegiatan budidaya pada kawasan ini menunjukan pola semakin melebar keluar dan pada beberapa bagian kawasan justru penunjukan kegiatan permukiman yang telah menyatu dengan kegiatan permukiman kabupaten yang berbatasan (Kabupaten Muaro Jambi).

Kegiatan perdagangan dan jasa terdistribusi pada koridor jalan utama. Kegiatan industri yang berkembang pada bagian wilayah ini telah menyatu dengan kegiatan permukiman, sehingga mulai menimbulkan konflik antar fungsi ruang, sementara kegiatan kebandar udaraan berada pada bagian terluar Kawasan



1) Kepadatan bangunan di BWP III

Kepadatan bangunan di BWP III tergolong kepada kepadatan sedang hingga tinggi. Bagian kawasan dengan KDB >60% terdistribusi pada kawasan permukiman yang berbatasan dengan BWP I. Kawasan permukiman pada bagian kawasan ini termasuk kedalam kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan permukiman kumuh. Kondisi ini disebabkan oleh karena kegiatan permukiman yang berorientasi kepada kegiatan komersil yang berada di BWP I (CBD Kota). Sementara KDB antara 40% hingga 60% terdistribusi pada kawasan-kawasan seperti koridor jalan utama dan kawasan permukiman diluar kawasan permukiman kumuh, termasuh kawasan pengembangan permukiman yang berada dibagian terluar kawasan ini.

2) Ketinggian Bangunan di `BWP III

Ketinggian bangunan pada BWP III beragam, mulai dari ketinggian bangunan rendah, sedang, hingga tinggi. Bagian kawasan dengan ketinggian bangunan kurang dari 8 (delapan) meter adalah bagian kawasan dengan fungsi kegiatan permukiman, sementara ketinggian bangunan 8-12 meter terutama berada pada koridor jalan utama untuk fungsi komersil. Ketinggian bangunan pada kelompok ini terutama adalah bangunan jenis rumah toko. Untuk bangunan dengan ketinggian lebih dari 12 meter terutama adalah bangunan komersil seperti hotel.

Kondisi ketinggian bangunan merupakan salah satu yang perlu diperhatikan dalam penataan bangunan pada bagian wilayah ini, mengingat pada BWP ini terdapat kegiatan kebandar udaraan yang menuntut pembatasan ketinggian bangunan pada KKOP.







Visual Kepadatan dan Ketinggian Bangunan BWP III

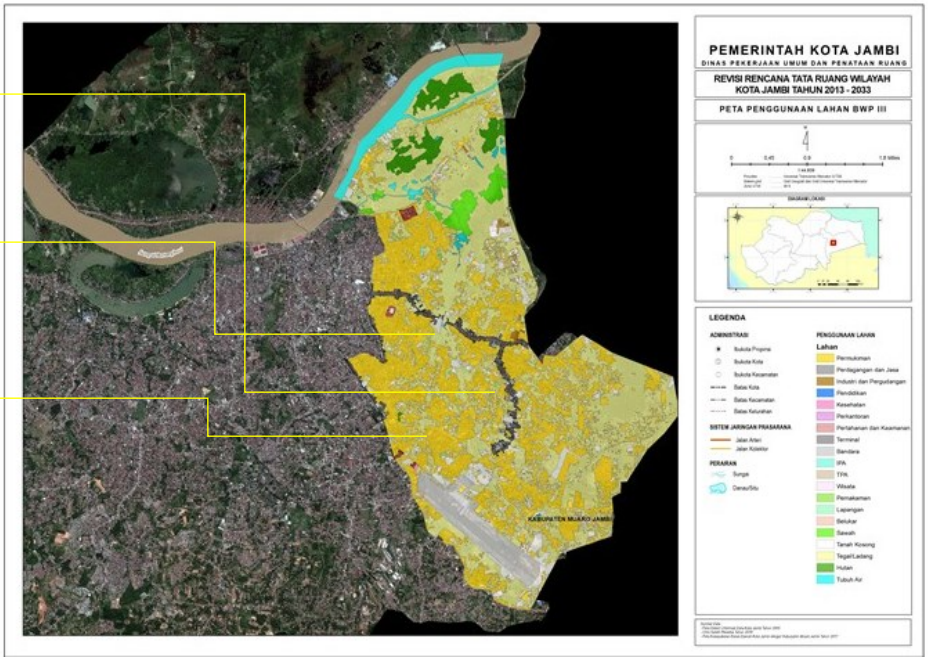

Gambar 4.2.8
Visual Intensitas Pemanfaatan Ruang BWP III

D. Intensitas Pemanfaatan Lahan BWP IV

BWP IV merupakan bagian wilayah dengan fungsi dominan sebagai kawasan permukiman. BWP IV merupakan salah satu pusat kota untuk pelayanan adminstrasi perkantoran pemerintah Kota Jambi, sehingga pada bagian pusat ini didominasi oleh bangunan perkantoran pemerintah. Pada bagian terluar yang dipengaruhi oleh *outer ring road* kegiatan lebih didominasi oleh kegiatan perdagangan, industri, dan pergudangan.

1) Kepadatan Bangunan

Pemanfaatan ruang pada BWP ini cenderung lebih tertata dibandingkan dengan bagian wilayah yang berada di pusat kota, karena memiliki kavling bangunan yang cenderung lebih luas dibandingkan kawasan pusat kota. Kawasan ini didominasi oleh kepadatan bangunan dengan KDB 40-65%. Sementara Kepadatan bangunan dengan KDB <40% terdistribusi pada bagian kawasan terluar untuk fungsi industri dan pergudangan. Bangunan dengan KDB rendah ini terutama terjadi pada bangunan fungsi hunian berupa rumah tunggal (nonperumahan).



2) Ketinggian Bangunan

ketinggian bangunan di BWP IV didominasi oleh kelompok ketinggian 0-8 meter. Kondisi ketinggian ini teutama untuk bangunan fungsi hunian, sementara bangunan dengan ketinggian 8-12 meter didominasi oleh bangunan komersil berupa bangunan rumah toko. Untuk bangunan dengan ketinggian lebih dari 12 meter, berfungsi sebagai bangunan fungsi usaha, seperti hotel. Pada dasarnya belum banyak bangunan dengan ketinggian lebih dari 12 meter yang berada pada BWP IV ini.





Visual Kepadatan dan Ketinggian Bangunan BWP IV

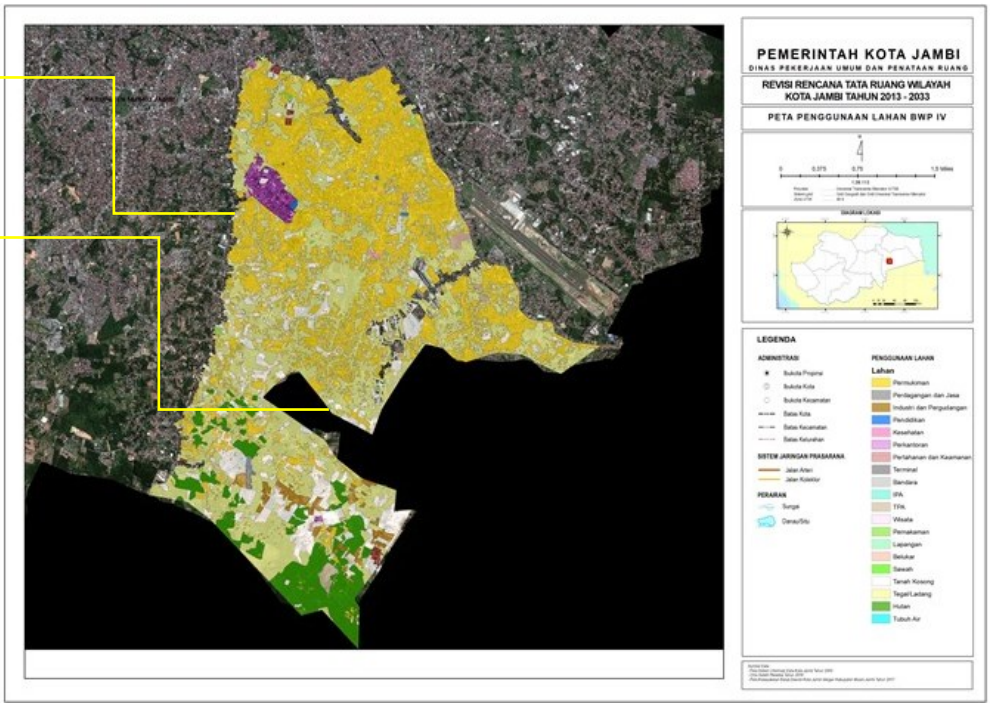

Gambar 4.2.9
Visual Intensitas Pemanfaatan Ruang BWP IV

E. Intensitas Pemanfaatan Lahan BWP V

Kawasan BWP V merupakan kawasan pengembangan permukiman di Kota Jambi. Kondisi ini ditandai dengan kegiatan pengembangan lingkungan perumahan yang semakin menjalar keluar kearah pinggiran kota.

1) Kepadatan Bangunan di BWP V

Pemanfaatan ruang pada BWP V cenderung lebih tertata dibandingkan dengan BWP II dan BWP III. Kawasan ini didominasi





oleh kepadatan bangunan dengan KDB 40-60%. Sementara Kepadatan bangunan dengan KDB <40% terdistribusi pada bagian kawasan terluar. Bangunan dengan KDB rendah ini terutama terjadi pada bangunan fungsi hunian berupa rumah tunggal (nonperumahan).

2) Ketinggian Bangunan di BWP V

ketinggian bangunan di BWP V didominasi oleh kelompok ketinggian 0-8 meter. Kondisi ketinggian ini teutama untuk bangunan fungsi hunian, sementara bangunan dengan ketinggian 8-12 meter didominasi oleh bangunan komersil berupa bangunan rumah toko. Untuk bangunan dengan ketinggian lebih dari 12 meter, berfungsi sebagai bangunan fungsi usaha, seperti hotel. Pada dasarnya belum banyak bangunan dengan ketinggian lebih dari 12 meter yang berada pada BWP V ini.



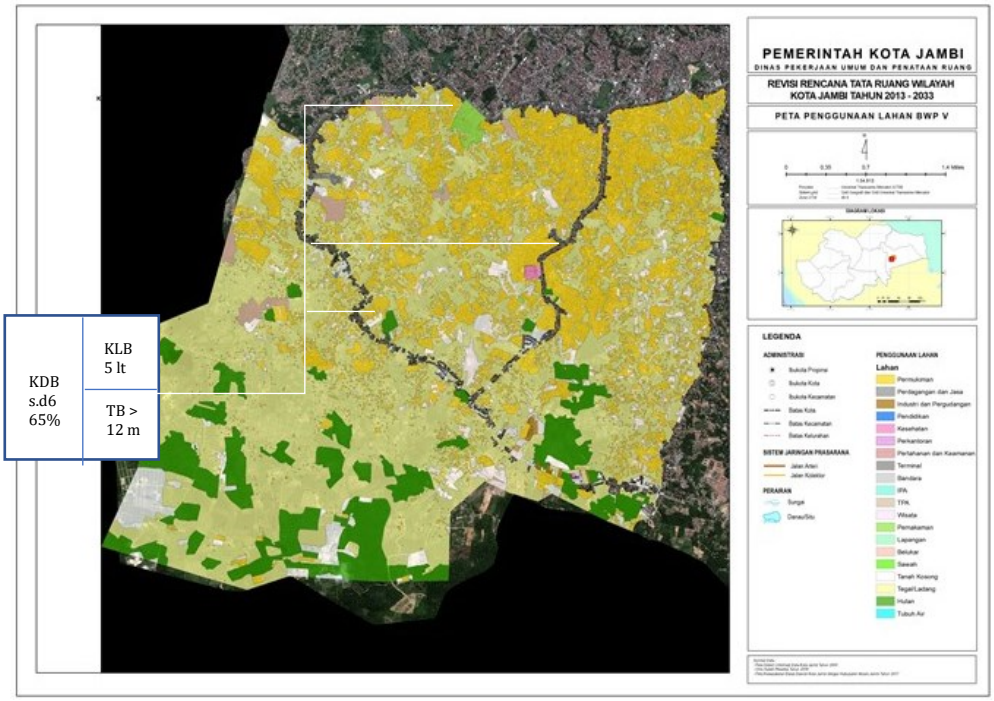

Gambar 4.2.10
Visual Intensitas Pemanfaatan Ruang BWP V

F. Intensitas Pemanfaatan Lahan BWP VI

Kawasan BWP VI yang berfungsi sebagai kegiatan permukiman, pusat administrasi Pemerintahan Provinsi Jambi dan pusat pendidikan tinggi. Selain dipengaruhi oleh fungsi pusat-pusat kegiatan tersebut, intensitas pemanfaatan ruang pada kawasan ini juga dipengaruhi oleh kondisi fisik alamiah, seperti sungai dan danau.

1) Kepadatan Bangunan di BWP VI

Walaupun berfungsi sebagai pusat-pusat kegiatan berskala regional, masih terdapat bagian-bagian kawasan dengan kepadatan rendah. Bangunan dengan KDB <40% terdistribusi terutama pada kawasan sekitar Danau, sementara bangunan dengan KDB 40-60% terdistribusi menyebar mendominasi kawasan terutama untuk bangunan dengan fungsi permukiman, perkantoran, dan perdagangan dan jasa.



2) Ketinggian Bangunan di BWP VI

Sama dengan kondisi ketinggian bangunan pada BWP V, ketinggian bangunan di BWP VI didominasi oleh kelompok ketinggian 0-8 meter. Kondisi ketinggian ini teutama untuk bangunan fungsi hunian, sementara bangunan dengan ketinggian 8-12 meter didominasi oleh bangunan komersil berupa bangunan rumah toko. Untuk bangunan dengan ketinggian lebih dari 12 meter, berfungsi sebagai bangunan fungsi usaha, seperti hotel dan juga bangunan untuk fungsi perkantoran pemerintah . Pada dasarnya juga belum banyak bangunan dengan ketinggian lebih dari 12 meter yang berada pada BWP VI ini.



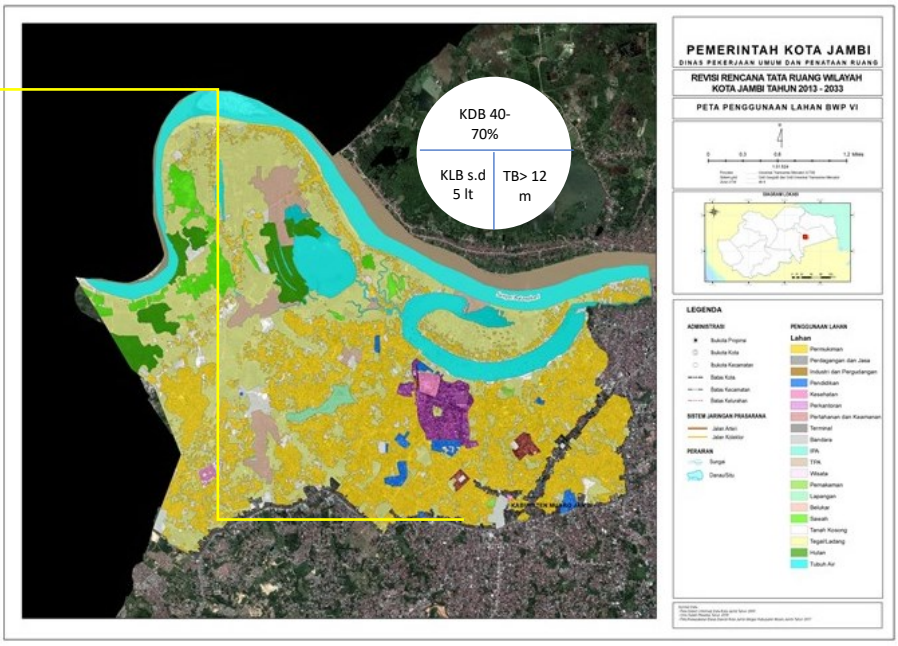

Gambar 4.2.11
Visual Intensitas Pemanfaatan Ruang BWP VI

4.2.2.4 Ketersediaan RTH Publik

RTH yang terdapat di Kota Jambi tersebar hampir diseluruh wilayah kecamatan yang ada. Secara umum, luas RTH publik di Kota Jambi diidentifikasi melalui interpretasi peta. Total luas RTH Publik di Kota Jambi hanya sekitar



4,82%, yang terdiri dari RTH Taman, RTH Pemakaman, dan RTH Hutan Kota. Luas masing-masing RTH tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel IV.2.7
Luas RTH Publik di Kota Jambi (berdasarkan IHBI)

No.	Program	Luas RTH Publik (ha)	Perhitungan IHBI berdasarkan Permen ATR/KaBPN No.14 Tahun 2022 (ha)	%
1	RTH Tipologi A sesuai Permen ATR/KaBPN No.14 Tahun 2022 (ha) a. Rimba kota: b. Taman Kota; c. Taman Kelurahan;	234,79	650,86	3,83%
2	RTH Tipologi B sesuai Permen ATR/KaBPN No.14 Tahun 2022 (ha) a. Kawasan Perlindungan Setempat b. Kawasan Tanaman Pangan	2.121,29	1.060,65	6,24%
3	RTH Tipologi C sesuai Permen ATR/KaBPN No.14 Tahun 2022 berupa ruang terbuka biru (ha)	949,93	189,99	1,12%
5	RTH Publik melalui kewajiban Penyediaan RTH Taman dan Pemakaman oleh pengembang perumahan		33,61	0,19%
6	Jalur Hijau Jalan		21,40	0,13%
7	Pemakaman		92,31	0,54%
Jumlah			**2.128,56**	**12,05%**

Sumber : Instansi Teknis Terkait dan Interpretasi Peta Citra Satelit

1) RTH Taman

RTH taman adalah merupakan RTH buatan dengan skala pelayanan kota ataupun kawasan. Sebaran RTH taman di Kota Jambi dapat dilihat pada tabel berikut ini.





Tabel IV.2.8
RTH Taman di Kota Jambi

No	Nama Taman	Luas (M^2)	Lokasi
1	Taman Tugu Makalam	38,46	Kec.Telanaipura
2	Taman PKK Murni	263	Kec.Telanaipura
3	Taman Simpang Pulai	464	Kec.Telanaipura
4	Taman Jaksa I	728	Kec.Telanaipura
5	Taman Jaksa Ii	735	Kec.Telanaipura
9	Taman Ade Irma Suryani	120	Kec.Telanaipura
10	Taman Simpang Bi	388	Kec.Telanaipura
11	Taman Simpang Tanjung	210	Kec.Telanaipura
12	Taman Simpang Rumah Sakit Umum	82	Kec.Telanaipura
13	Taman Anggrek	25.056	Kec. Telanaipura
14	Taman Kirab Remaja	47	Kec. Kota Baru
15	Taman Arena Remaja	20.086	Kec. Kota Baru
16	Taman Tugu Juang	431,78	Kec. Kota Baru
17	Taman Batas Kota	160	Kec. Kota Baru
18	Taman Adipura	1298	Kec. Jambi Selatan
19	Taman Sekapur Sirih	68	Kec. Jambi Selatan
20	Taman PKK The Hook	1.210,25	Kec. Jambi Selatan
21	Taman Anjungan Kota	4000	Kec. Jambi Selatan
22	Taman Simpang Beringin	248	Kec. Jambi Selatan
23	Taman Simpang Tanjung Lumut		Kec. Jambi Selatan
24	Taman Simpang Jelutung	66	Kec. Pasar Jambi
25	Taman TP. Sriwijaya	452,16	Kec. Pasar Jambi
26	Taman Aur Duri	140,87	Kec. Danau Teluk
27	Taman Sanggar Batik	1.147,13	Kec. Pelayangan
28	Taman Lingkungan Perumnas	1.554	Kec. Jelutung
Total		**32.345,19**	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Jambi, Tahun 2021



Taman Arena Remaja





Taman Angrek



Taman Jaksa



Taman Tugu PKK

Selain taman lingkungan ataupun kawasan yang diwujudkan oleh Pemerintah Kota seperti yang tertuang didalam tabel diatas, juga banyak terdapat taman lingkungan ataupun kawasan yang diwujudkan oleh swasta terutama oleh developer. Taman ini diwujudkan melalui taman perumahan. Beberapa taman perumahan yang telah diinventaris oleh Pemerintah Kota Jambi melalui instansi teknis terkait dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel IV.2.9
RTH Taman Perumahan di Kota Jambi

No	Nama Kecamatan	Jumlah Total Unit Rumah				Luas Lahan Efektif Perumahan	Luas Kavling Efektif	PSU Luas RTH (M^3)
		MBR	NON MBR	Toko / Ruko	Total			
1	Alam Berajo	7,308	2,205	119	9,632	1,781,834.47	1,131,337.48	134,345.19
2	Danau Sipin	12	32		44	8,911.00	6,020.07	535.83
3	Danau Teluk				0			
4	Jambi Selatan	352	285	25	662	119,058.00	82,529.14	5,418.90
5	Jambi Timur		14		14	1,909.00	1,091.00	416.00
6	Jelutung		78		78	14,984.00	10,939.50	522.00
7	Kota Baru	4,986	1,989	165	7,14	1,210,497.08	779,389.14	91,059.33
8	Paal Merah	2,151	944	218	3,313	557,120.10	368,062.68	37,174.90
9	Pasar Jambi				0			
10	Pelayangan				0			
11	Telanaipura	574	359	57	990	170,728.00	117,770.80	10,477.20

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi 2021



Taman Perumahan

2) RTH Rimba Kota

Rimba kota disediakan dengan tujuan sebagai peyangga lingkungan kota dan berfungsi untuk: memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika, meresapkan air, menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota, dan mendukung pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati.

Saat ini, terdapat 2 (dua) hutan kota dan 1 (satu) areal lahan yang direncanakan untuk difungsikan sebagai hutan kota di Kota Jambi. 1 (satu) hutan kota yang sudah terbentuk dan berfungsi pada saat ini di Kota Jambi adalah Hutan Kota M.Sabki yang terdapat di Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru dengan luas sekitar 11 (sebelas) hektar dan Hutan Kota (Hutan Pinus) di Kelurahan Bagan Pete. 1 (satu) areal lagi akan difungsikan sebagai RTH Hutan Kota ketiga ini memiliki luas sekitar 41 ha dari 90 ha luas lahan yang direncanakan, areal ini terdapat di Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Kota Baru.



Hutan Kota

3) Jalur Hijau Jalan

Jalur hijau jalan dapat berupa median jalan ataupun pulau jalan dimana dalam konteks RTH berfungsi sebagai peneduh, penyerap polusi udara, kebisingan, pemecah angin, pembatas pandangan, dan dapat juga berfungsi sebagai penahan lampu kendaraan bagi kendaraan yang berlawanan arah. Ruas jalan jalan yang memiliki jalur hijau jalan di Kota Jambi secara umum adalah ruas jalan yang berfungsi sebagai jalan arteri dan jalan kolektor.



Tabel IV.2.10
RTH Jalur Hijau Jalan

No	Nama Jalan	Lokasi	Panjang (M)
1	Jln. Soekarno Hatta	Kec. Jambi Selatan	1.450,00
2	Jln. Jend. Sudirman	Kec. Jambi Selatan	2.244,00
3	Jln. Pangeran Diponegoro	Kec. Jelutung	1.235,00
4	Jln. KH. Hasyim Asyari	Kec. Jambi Timur	680,00
5	Jln. Sultan Thaha	Kec. Jambi Timur	1.450,00
6	Jln. Rd. Pamuk	Kec. Jambi Timur	1.234,00
7	Jln. Slamet Riyadi	Kec. Telanaipura	2.057,00
8	Jln. Yusuf Singadikane	Kec. Telanaipura	800,00
9	Jln. RE. Marta Dinata	Kec. Telanaipura	430,00
10	Jln. Jend. Ahmad Yani	Kec. Telanaipura	770,00
11	Jln. Bakarudin	Kec. Telanaipura	680,00
12	Jln. Patimura	Kec. Kotabaru	3.437,00
13	Jln. Hutan Kota	Kec. Kotabaru	1.500,00
14.	Jln. MTQ	Kec. Jambi Selatan	860,00
15.	Jln. Jend. Basuki Rahmat	Kec. Kota Baru	620,00
16.	Jln. Arief Rahman Hakim	Kec. Telanaipura	1.100,00
17.	Jln. Abdul Manaf	Kec. Telanaipura	600,00
18.	Jln. Mayjen Sutoyo	Kec. Telanaipura	250,00
Total			**21.397**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Jambi, Tahun 2021

Tabel IV.2.11
RTH Pulau Jalan

No	Nama Jalan	Lokasi	Luas (M^2)
1	Sekapur Sirih	Kec. Jambi Selatan	68
2	Simpang Jelutung	Kec. Jelutung	66
3	Tp. Sriwijaya	Kec. Pasar Jambi	452,16
4	Taman Simpang Ppt	Kec. Telanaipura	52
5	Taman Honda	Kec. Telanaipura	125
6	Taman Tugu Juang	Kec. Telanaipura	200
7	Taman Kirab Remaja	Kec. Jelutung	47
8	Taman Tugu Jam	Kec. Jelutung	1074,66
Total			2.085

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Jambi, Tahun 2021







RTH Jalur Hijau Jalan



4) Jalur Hijau Sempadan Sungai

RTH sempadan sungai adalah jalur hijau yang terletak di bagian kiri dan kanan sungai yang memiliki fungsi utama untuk melindungi sungai tersebut dari berbagai gangguan yang dapat merusak kondisi sungai dan kelestariannya.

Sungai yang melintasi wilayah administrasi Kota Jambi adalah Batanghari dan 7 (tujuh) SubDAS, meliputi :

1. DAS Kenali Kecil dengan panjang sungai 10,68 Km
2. DAS Kenali Besar dengan panjang sungai 13,79 Km
3. DAS Kambang dengan panjang sungai 43,04 Km
4. DAS Asam dengan panjang sungai 10,68 Km
5. DAS Tembuku dengan panjang sungai 5,35 Km
6. DAS Sijenjang/Lubukraman dengan panjang sungai 8,37 Km
7. DAS Danau Teluk dengan panjang 8,79 Km

Pertimbangan penetapan jalur hijau sempadan sungai di Kota Jambi antara lain:

a. Seluruh aliran sungai yang mengalir di wilayah administratif Kota Jambi termasuk dalam kriteria sungai di kawasan perkotaan.
b. Tanggul sungai hanya terdapat di aliran Sungai Batanghari dan panjang tanggul yang ada tersebut tidak sampai 10% dari panjang badan sungai sehingga dianggap tidak ada tanggul.
c. Distribusi kedalaman Sungai Batanghari adalah lebih dari 3 (tiga) meter.
d. Dengan demikian untuk aliran Sungai Batanghari secara keseluruhan dianggap sebagai aliran sungai tidak bertanggul di kawasan perkotaan dengan kedalaman 3 m – 20 m sehingga penetapan sempadan sungai sekurang – kurangnya 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
e. Garis sempadan sungai tidak bertanggul didalam dan diluar kawasan perkotaan diukur ruas per ruas dari tepi sungai dengan



mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan.

f. Garis sempadan sungai tidak bertanggul yang berbatasan dengan jalan adalah tepi bahu jalan yang bersangkutan, dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan harus menjamin kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai.

Berdasarkan intepretasi peta citra satelit, tidak seluruh area yang seharusnya berfungsi lindung disempadan sungai terjaga dari kegiatan pembangunan fisik. Tabel berikut akan menjelaskan kondisi pemanfaatan lahan sempadan sungai di Kota Jambi.

Tabel IV.2.12
Kondisi Pemanfaatan Lahan
di Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Jambi

Fungsi Rencana	Tutupan Lahan Eksisting	Luas (Ha)
Sempadan Sungai	Belukar	4,00
	Hutan	2,86
	Industri dan Pergudangan	0,20
	Pemakaman	1,66
	Pendidikan	0,06
	Perdagangan dan Jasa	4,22
	Perkantoran	0,41
	Permukiman	50,43
	Pertahanan dan Keamanan	0,04
	Sawah	8,40
	Tanah Kosong	16,36
	Tegal/Ladang	103,20
	Tubuh Air	19,60
	Wisata	0,03
Total		**211,49**

Sumber : Intepretasi Peta Citra Satelit







Pemanfaatan ruang di sempadan sungai

5) RTH Sempadan Danau

Setidaknya terdapat 4 (empat) danau diwilayah Kota Jambi, yaitu Danau Sipin, Danau Teluk Kenali, Danau Teluk, dan Danau Kiambang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai, sempadan danau ditetapkan 50 (limapuluh) meter dari tepi danau yang diukur pada kondisi muka air tertinggi. Jika berpedoman kepada ketentuan yang tertuang dalam PP 38/2011 tersebut, maka luas sempadan danau di Kota Jambi seharusnya adalah sekitar 360 ha dengan rincian sebagai berikut :

a. Kawasan sempadan Danau Sipin dengan luas 161 Ha (seratus enam puluh satu hektar)
b. Kawasan sempadan Danau Teluk Kenali dengan luas 45 Ha (empat puluh lima hektar)
c. Kawasan sempadan Danau Teluk dengan luas 54 Ha (lima puluh empat hektar)
d. Kawasan sempadan Danau Kiambang dengan luas 40 Ha (empat puluh



hektar).

Sama halnya dengan sempadan sungai, lahan disempadan danau juga tidak sepenuhnya berfungsi lindung atau non terbangun. Penggunaan lahan disempadan danau dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel IV.2.13
Kondisi Pemanfaatan Lahan
di Kawasan Sempadan Danau Di Kota Jambi

Fungsi Rencana	Tutupan Lahan Eksisting	Luas (Ha)
Sempadan Danau	Belukar	4,98
	Hutan	59,78
	Kesehatan	0,01
	Perdagangan dan Jasa	0,97
	Perkantoran	0,04
	Permukiman	24,95
	Sawah	0,24
	Tanah Kosong	20,87
	Tegal/Ladang	55,64
	Tubuh Air	43,54
Total		**211,02**

Sumber : Dokumen Revisi RTRW Kota Jambi Tahun 2022-2042, dan Intepretasi Peta Citra Satelit.

6) RTH Pemakaman

Penyediaan ruang terbuka hijau pada areal pemakaman disamping memiliki fungsi utama sebagai tempat penguburan jenasah juga memiliki fungsi ekologis yaitu sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.

Luas lahan permakaman di Kota Jambi saat ini sekitar 76,11 Ha. Luas ini merupakan luas terhadap lahan pemakaman yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun lahan pemakaman yang belum dikelola oleh pemerintah daerah. Secara umum, lahan pemakaman yang ada merupakan lahan yang sudah diperuntukan untuk pemakaman dari waktu yang sudah cukup lama.





Tabel IV.2.14
RTH Pemakaman di Kota Jambi

No	Nama RTH	Lokasi	Luas (M^2)
	Kelurahan Sukakarya	RT. 1 Bumi Ayu I	3.000
		RT. 5 Bumi Ayu II / Bumi Ikhlas	12.282
		RT. 8 TPU Bumi Ayu	2.000
	Kel. Mayang Mangurai	RT. 35 TPU Pusara Agung	30.575
		RT. 22 Keluarga H. Jamari	5.000
		RT. 10 TPU Kebon Daging	10.000
		RT. 28 TPU Sakintang Dayo	16.800
	Kel. Bagan Pete	RT. 8 TPU Masyarakat Bagan Pete	5.000
		RT. 9 TPU Jln. Sari Bakti	2.500
		RT. 22 TPU Perum Permata Biru dan Pinang Merah	700
		Pemakaman dari Pengadaan Lahan Perumahan	1.500
	Kel. Kenali Besar	RT. 6 TPU Jln. Bersama	5.000
		Rt.8 TPU Jln. Pertamina	5.000
		Rt. 25, 16 Perum Bougenville	10.000
		Rt.10 Jln. Anwar Bay	5.000
		Rt. 1 Jln. Yang. Raya	2.700
		RT. 16 TPU Amuntai	10.000
	Kel. Kenali Asam Atas	RT. 21 KEBON BOHOK	15.000
	Kel. Paal V	RT. 14 PAAL V	8.962
	Kel. Rawasari	RT. 13 TPU Kuburan Cina Jln. Patimura	24.000
		RT. 25 TPU Syailendra	100
		RT. 20 TPU Bagan Pete	10.000
	Kel. Kenali Asam Bawah	RT. 1 TPU Bumi Ayu	75.000
		RT. 5 TPU Wisma Loyo	50.000
		RT. 24 TPU Mutiara Hijau	20.000
	Kec. Telanaipura		
	Kel. Sungai Putri	TPU . Putri Ayu	60.000
	Kel. Teluk Kenali	TPU RT. 3 Teluk Kenali	15.000
	Kel. Buluran Kenali	TPU RT. 5	8.000
		TPU RT. 7	3.000
		TPU RT. 12	7.000
		TPU RT. 13	2.000
		TPU RT. 14	10.000
	Kel. Penyengat Rendah	TPU RT. 1 Penyengat Rendah	10.000
		TPU Alsaihun RT. 3 Kampung Bugis	5.000
		TPU RT. 8 (TPU RT.3 – RT.10)	15.000
		TPU. RT. 9 (Habib)	
		TPU RT. 11, 12 Kasang Gelagang	10.000
		TPU Kasang Gelagang (Rt.13,14,15,16,17, 19, 20, 26, 27,28)	2.000
		TPU. RT. 24 Kampung Bugis	1.500
		TPU. RT. 24 Kampung Bugis	1.500
	Kel. Selamat	Tpu. Kel. Selamat	10.000
	Kel. Solok Sipin	Tpu. Singkawang	20.000
	Kec. Jambi Timur		
	Kel. Kasang Jaya	Tpu. RT. 1 Kasang Jaya	20.000
		Tpu. RT. 6 Kasang	500
	Kel. Tanjung Sari	Tpu. RT. 6 JL. Kerajaan Melayu	20.000
	Kel. Sijenjang	Tpu. RT. 2 Sijenjang	500
		Tpu. RT. 3 Jl. Rd. Fatah	1.500
		Tpu. RT. 6	500
		Tpu. RT. 8 Jl. Rd. Fatah	500
	Kel. Payo Selincah	Tpu. RT. 20	975





No	Nama RTH	Lokasi	Luas (M^2)
		Tpu. RT. 24 JL. Gunung Semeru	500
	Kel. Talang Banjar	Tpu. RT. 32 JL. Pangeran Antasari	10.000
	Kel. Tanjung Pinang	Tpu. RT. 33 Tanjung Pinang	500
		Tpu. RT. 13 Tanjung Pinang	500
	Kel. Thehok	Tpu. RT. 9 Sukorejo	20.060
		Tpu. RT. 25 Thehok	1.700
	Kel. Talang Bakung	Tpu. RT. 20 Talang Sari	20.000
		Tpu. RT. 10 Lrg. Makmur	10.000
		Tpu. Lrg. RT. 34 Mahkamah 1	10.000
		Tpu. Lrg. RT. 36 Mahkamah 2	10.000
	Kel. Palmerah	Tpu. RT. 6 Jl. AR. Saleh	2.232
		Tpu. RT. 16 Komplek YUKA	1.989
		Tpu. Lrg. Anugerah	603
		Tpu. RT. 33 Sri Rahayu	12.000
	Kel. Lingkar Selatan	Tpu. RT. 22 Lrg. Mustika	500
		Tpu. RT. 12 Lrg. Pengadilan	10.000
		Tpu. RT. 1	500
	Kec. Jelutung		
	Kel. Jelutung	Tpu. RT. 50 Puncak	4.500
	Kel. Talang Jauh	Tpu. RT. 30 Talang Jauh	4.000
	Kel. Handil Jaya	Tpu. Kebon Jahe	5.232
	Kec. Pasar Jambi		
	Kel. Beringin	Tpu. Kebon Jahe	20.000
	Kec. Danau Teluk		
	Kel. Pasir Panjang	Tpu. RT. 2 Pasir Panjang	7000
		Tpu. RT. 3 Pasir Panjang	5000
		Tpu. RT. 5 Pasir Panjang	3000
	Kel. Tanjung Raden	Tpu. RT. 1 Tanjung Raden	1.330
		Tpu. RT. 8 Tanjung Raden	1.500
		Tpu. RT. 1 Tanjung Raden	1.200
	Kel. Tanjung Pasir	Tpu. RT. 3 Tanjung Pasir	1.200
	Kel. Olak Kemang	Tpu. RT. 10 Olak Kemang	4.500
		Tpu. RT. 8 Olak Kemang	2.000
	Kel. Ulu Gedong	Tpu. RT. 10	4.000
	Kel. Tengah	Tpu. RT. 4 Kampung Tengah	10.000
	Kel. Jelmu	Tpu. RT. 5 Jelmu	5.000
	Kel. Mudung Laut	Tpu. RT. 8 Datuk Sintai	5.000
	Kel. Arab Melayu	Tpu. RT. 7 Arab Melayu	25.000
	Kel. Tahtul Yaman	Tpu. RT. 1 Tahtul Yaman	20.000
		Tpu. RT. 2 Tahtul Yaman	10.000
		Tpu. RT. 3 Tahtul Yaman	20.000
		Tpu. RT. 4 Tahtul Yaman	20.000
		Tpu. RT. 5 Tahtul Yaman	10.000
		Tpu. RT. 6 Tahtul Yaman	20.000
		Tpu. RT. 7 Tahtul Yaman	10.000
		Tpu. RT. 8 Tahtul Yaman	10.000
		Tpu. RT. 9 Tahtul Yaman	10.000
		Tpu. RT. 10 Tahtul Yaman	10.000
	Kel. Tanjung Johor	Tpu. RT. 5 Raudatul Janah	8.000

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Jambi, Tahun 2022





RTH Pemakaman

4.2.2.5 Perubahan Pemanfaatan Kawasan Sempadan Sungai Dan Daerah Resapan Air Akibat Pelanggaran Pendirian Bangunan

Perubahan pemanfaatan lahan di Kota Jambi pada tahun 2022 salah satunya disebabkan adanya pelanggaran bangunan. Berdasarkan hasil Analisa diketahui terdapat 0,75% pelanggaran bangunan dikawasan lindung. Jumlah bangunan yang melanggar sebanyak 11.797 unit dan luas pelanggaran bangunan seluas 127,37 ha.

Tabel IV.2.15
Pelanggaran Bangunan di Kawasan Lindung Kota Jambi

No	Kecamatan	Jumlah Bangunan yang melanggar (unit)	Luas Pelanggaran Bangunan (ha)	Presentase (%)
1	Alam Barajo	508	3,87	0,02%
2	Danau Sipin	2.179	23,76	0,14%
3	Danau Teluk	1.238	12,37	0,07%
4	Jambi Selatan	492	5,04	0,03%
5	Jambi Timur	2.645	30,94	0,18%
6	Jelutung	1.411	12,50	0,07%
7	Kota Baru	1.233	12,29	0,07%
8	Paal Merah	381	7,67	0,05%
9	Pasar	214	2,44	0,01%
10	Pelayangan	594	6,39	0,04%
11	Telanaipura	902	10,12	0,06%
Jumlah		**11.797**	**127,37**	**0,75%**

Sumber: Peta Inventarisasi Perumahan dan hasil digitasi dan interpretasi peta citra satelit, dan Analisis Tahun 2023

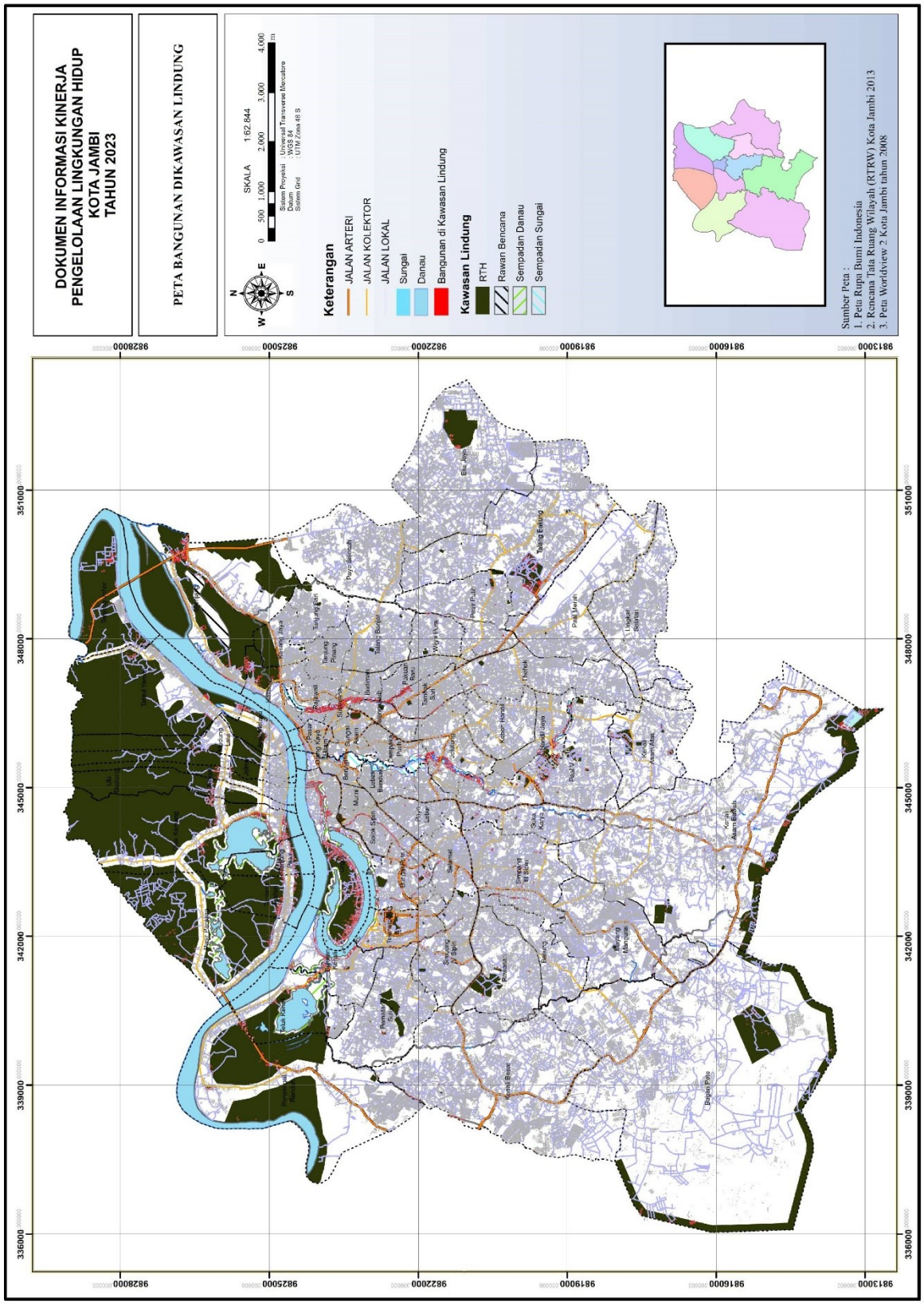

Gambar 4.2.12
Peta Bangunan Di Kawasan Lindung Kota Jambi



4.2.2.6 Perkiraan Kebutuhan dan Ketersediaan Lahan Kota

Prediksi kebutuhan perumahan, selain untuk dapat memperkirakan jumlah rumah yang dibutuhkan pada akhir tahun rencana juga bermanfaat untuk memperkirakan luas lahan yang dibutuhkan untuk perumahan penduduk dan keterkaitannya dengan kemampuan dalam mendukung ketersediaan lahan.

Pendekatan prediksi jumlah dan luas lahan yang dibutuhkan pada akhir tahun rencana sebagai berikut :

a) Jumlah rumah adalah refleksi dari jumlah KK, Rata-rata jumlah anggota setiap KK adalah 4 orang;

b) Prediksi jumlah kebutuhan rumah selain mempertimbangkan dampak pertambahan penduduk sampai akhir tahun rencana juga mempertimbangkan angka backlog saat ini *(sumber : https://jambiprima.com/read/2023/09/01/17265/angka-backlog-perumahan-di-kota-jambi-diangka-30-ribu)* ;

c) Prediksi luas lahan dibutuhkan dilakukan dengan pendekatan jumlah penduduk maksimal perhektar berdasarkan arahan kepadatan penduduk Perkotaan Kota Jambi

Berdasarkan asumsi tersebut diatas, maka perkiraan kebutuhan rumah dan luas lahan yang dibutuhkan untuk menampung perkembangan penduduk di Kota Jambi pada 20 tahun ke depan (2044) dengan kebutuhan unit rumah baru sekitar ± 148.584 unit dengan perkiraan kebutuhan total luas lahannya sekitar ± 2.971,67 ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.2.16
Perkiraan Kebutuhan Rumah di Kota Jambi pada Tahun 2044

No	Keterangan	Satuan	Jumlah
1	Penduduk 2022 (Jiwa)	Jiwa	619.553
2	Proyeksi Penduduk 2044 (Jiwa)	Jiwa	1.089.977
3	Pertambahan Penduduk hingga 2044 (Jiwa)	Jiwa	470.424
4	Perkiraan Jumlah KK	KK	117.606
5	Kebutuhan Unit Rumah (Unit)	Unit	117.606
6	Asumsi Backlog 20% dari jumlah KK eksisting	KK	30.978
7	Total Kebutuhan Rumah Baru (Unit)	Unit	148.584

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2023





Berdasarkan perkiraan kebutuhan penambahan jumlah rumah pada kawasan perencanaan pada akhir tahun rencana diatas, dapat diperkirakan luas lahan yang dibutuhkan untuk menampung perumahan tersebut sekitar 118 ha dengan perkiraan jumlah rumah sekitar 5.900 unit.

Tabel III.2.17
Perkiraan kebutuhan luas lahan Perumahan di Kota Jambi pada Tahun 2044

No	Luas Tipe Bangunan (1 : 3 : 6)	Luasan Bangunan (m^2)	Jumlah Rumah	Total Luasan (Ha)
1	Mewah	500	14.858	742,92
2	Sedang	300	44.575	1.337,25
3	Sederhana	100	89.150	891,50
Jumlah			**148.584**	**2.971,67**

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2023

Luas potensi permukiman di Kota Jambi terdapat 10,097,55 Ha (56,86%) dari total keseluruhan luas kota jambi yang dianggap layak. Sedangkan 7.662,50 Ha (43,14%) dianggap tidak berpotensi untuk dijadikan kawasan permukiman yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kawasan yang berpotensi menjadi kawasan rawan bencana, khususnya banjir.

Tabel III.2.18
Luas Peluang Ketersediaan Permukiman Horizontal di Kota Jambi

No	Kecamatan	Layak (ha)	Lahan terbangun (ha)	Lahan Potensi (ha)
1	Alam Barajo	2.627,60	1.151,92	1.475,68
2	Danau Sipin	341,91	277,8287	64,08
3	Danau Teluk	0,67	0,29	0,38
4	Jambi Selatan	1.023,89	710,1625	313,73
5	Jambi Timur	1.023,89	228,66	795,23
6	Jelutung	518,98	428,0185	90,96
7	Kota Baru	2.747,03	1228,6	1.518,43
8	Paal Merah	1.202,82	619,3738	583,45
9	Pasar Jambi	61,94	0,63	61,31
10	Pelayangan	3,19	0,63	2,56
11	Telanaipura	545,64	405,02	140,62
Total		**10.097,56**	**5.051,14**	**5.046,42**

Melihat peluang ketersediaan permukiman horizontal di Kota Jambi yang memiliki luas potensi lahan sebesar 5.046,42 Ha, diketahui bahwa luas kebutuhan lahan permukiman pada tahun 2044 masih dianggap mencukupi, mengingat luas perkiraan kebutuhan lahan perumahan di Kota Jambi hanya sebesar 2.971,67 Ha.





4.2.3 Kualitas Air Permukaan dan Kualitas Udara

4.2.3.1 Kondisi Kualitas Air Permukaan

Sumberdaya air yang terdapat di Kota Jambi meliputi: sumberdaya air sungai, sumberdaya air danau, dan sumberdaya air tanah. Sumberdaya air sungai sendiri terdiri atas 2 (dua), yaitu: sumberdaya air Sungai Batanghari dan sumberdaya air SubDAS Batanghari yang terdiri dari 8 (delapan) Sub DAS, namun sumberdaya air sungai yang dijadikan sebagai sumber air baku adalah sumberdaya air Sungai Batanghari, yang merupakan sungai lintas provinsi dan menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Berdasarkan kegiatan pemantauan kualitas air dimana beberapa informasi kualitas air dapat dilihat sebagai berikut :

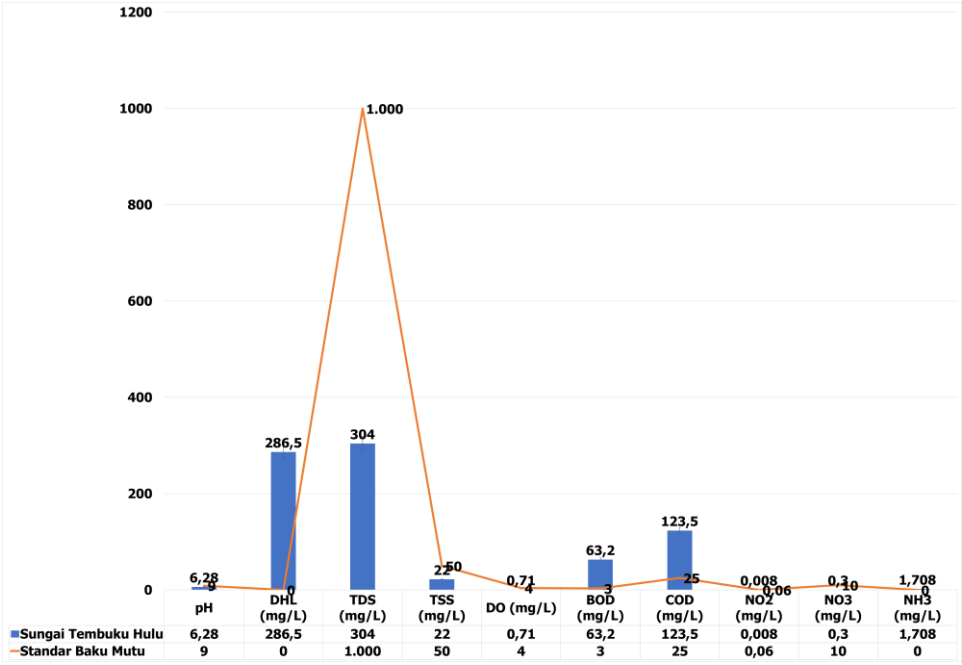

Gambar 4.2.13
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Tembuku Hulu, Tahun 2022



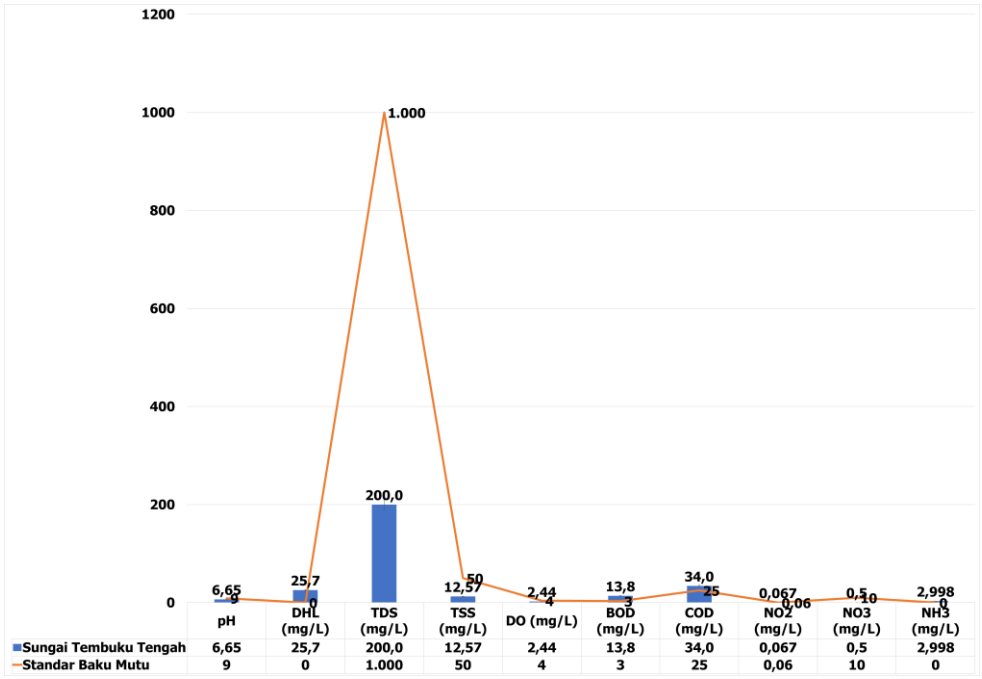

Gambar 4.2.14
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Tembuku Tengah, Tahun 2022

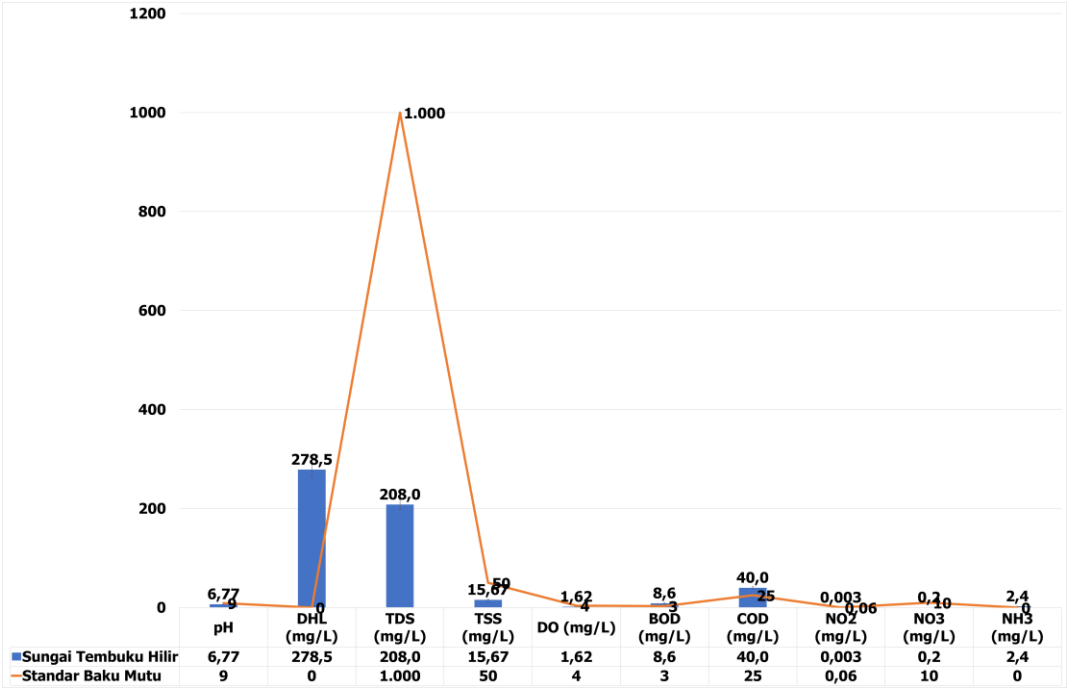

Gambar 4.2.15
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Tembuku Hilir, Tahun 2022

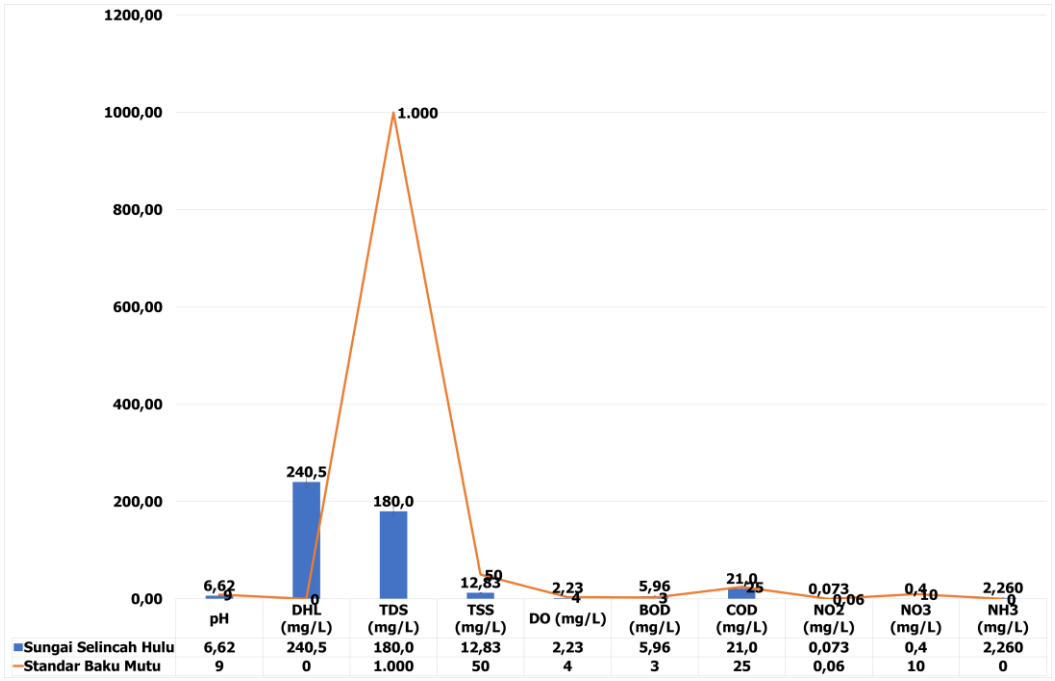

Gambar 4.2.16
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Selincah Hulu, Tahun 2022

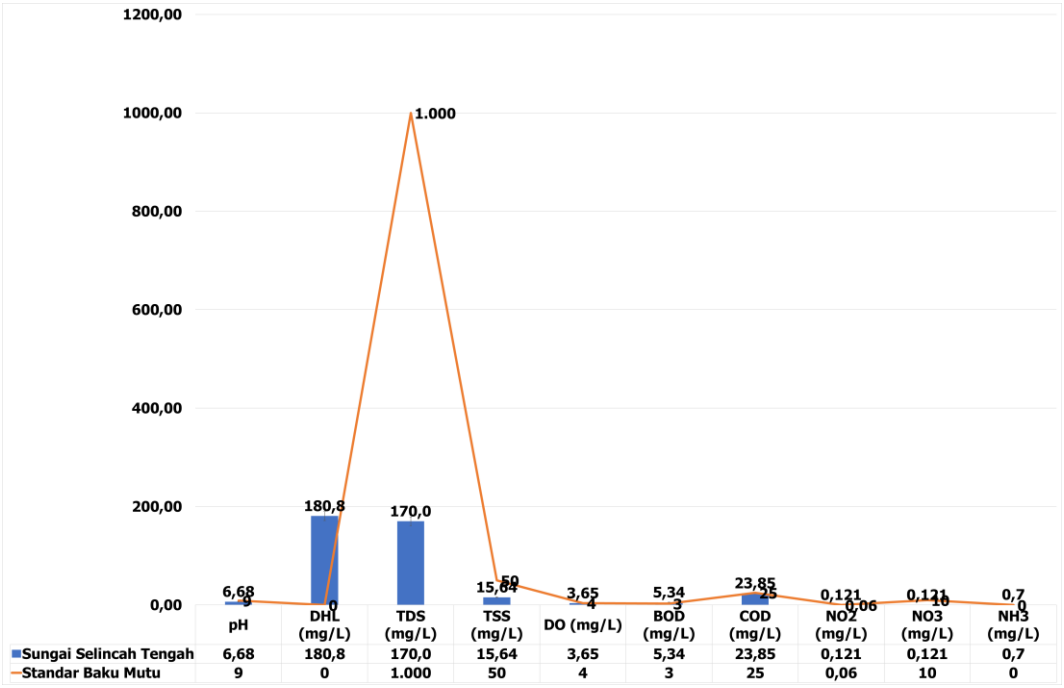

Gambar 4.2.17
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Selincah Tengah, Tahun 2022

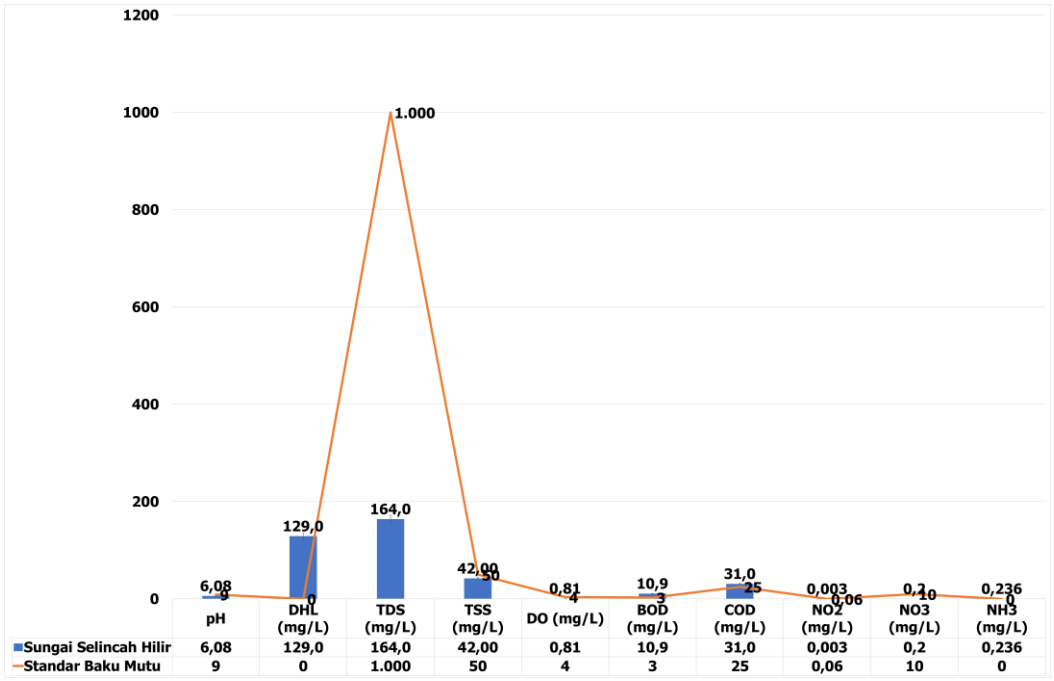

Gambar 4.2.18
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Selincah Hilir, Tahun 2022

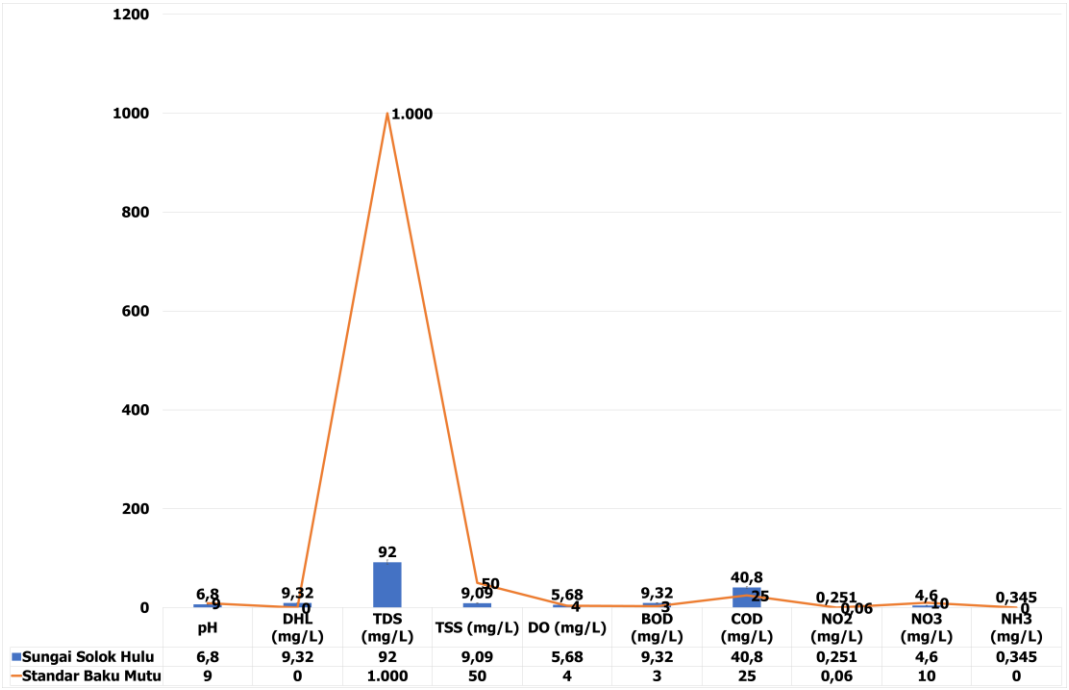

Gambar 4.2.19
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Solok Hulu, Tahun 2022

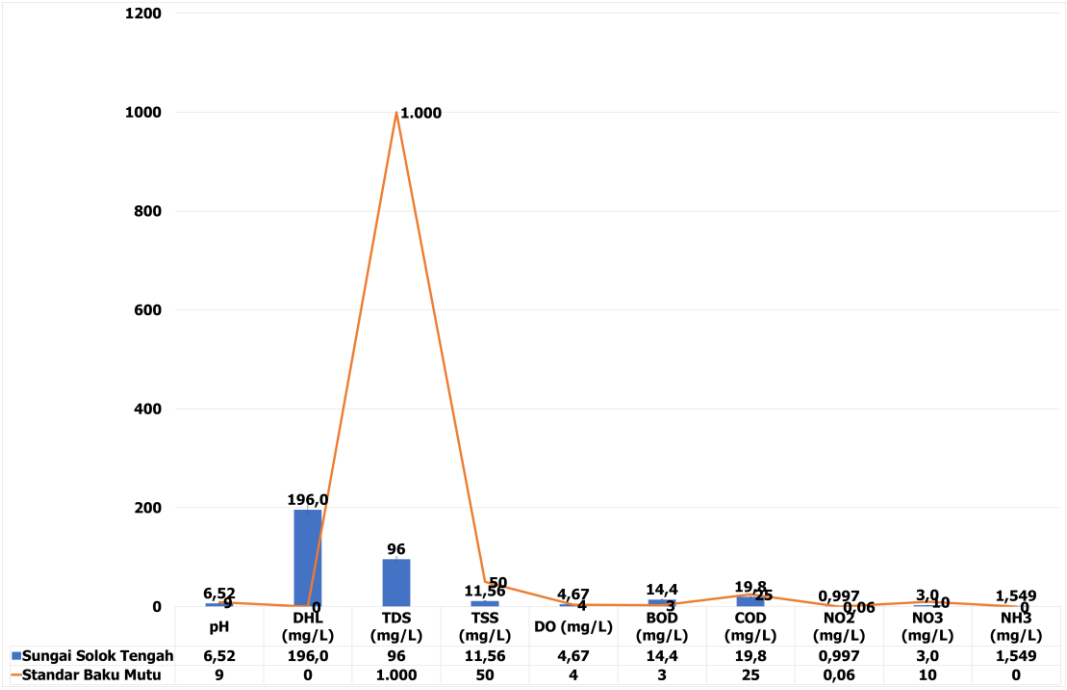

Gambar 4.2.20
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Solok Tengah, Tahun 2022

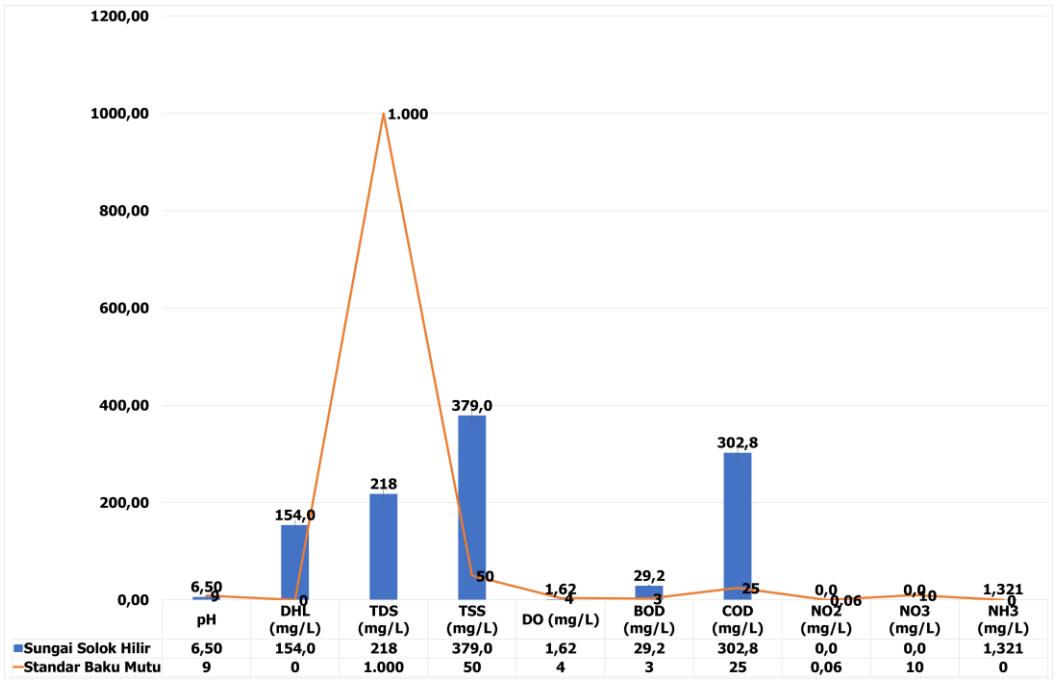

Gambar 4.2.21
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Solok Hilir, Tahun 2022

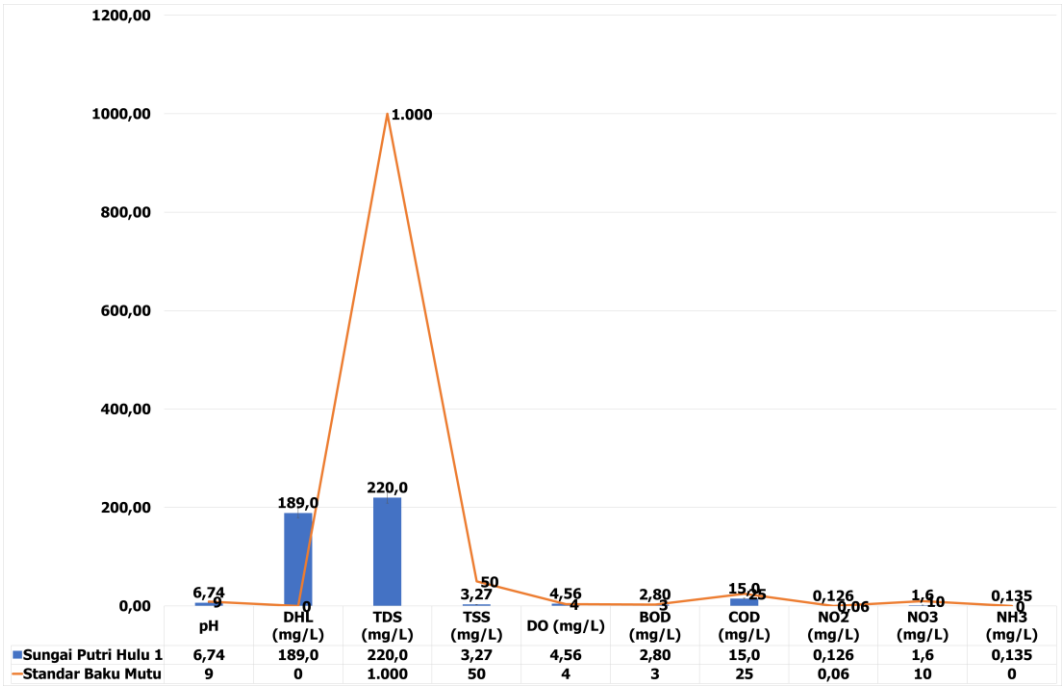

Gambar 4.2.22
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Putri Hulu 1, Tahun 2022

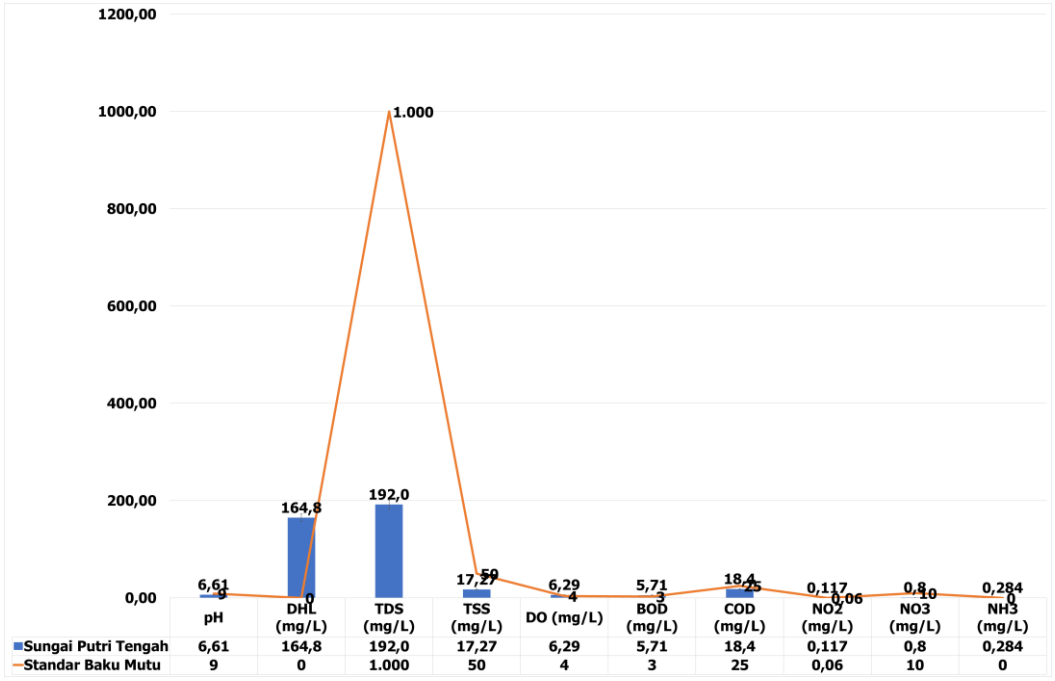

Gambar 4.2.23
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Putri Tengah, Tahun 2022

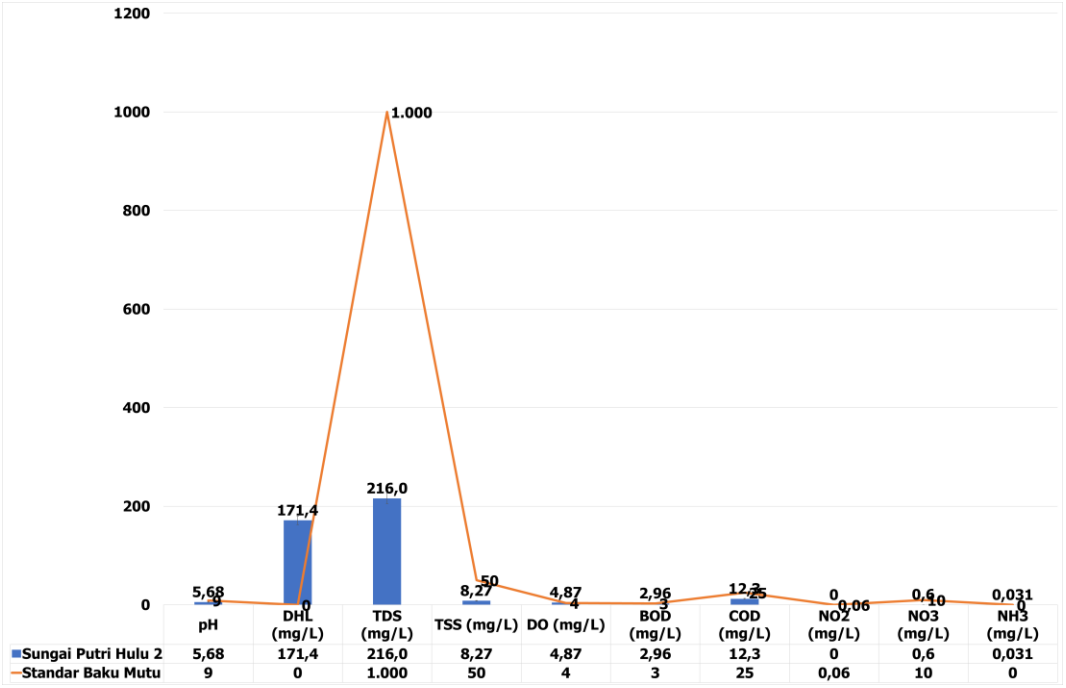

Gambar 4.2.24
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Putri Hulu 2, Tahun 2022

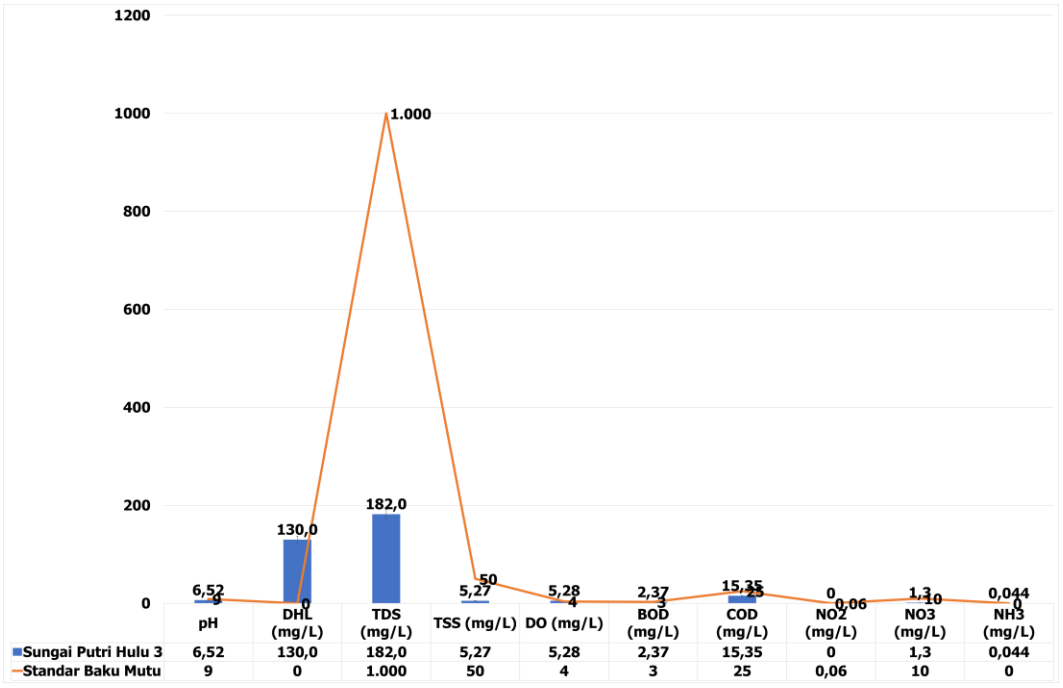

Gambar 4.2.25
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Putri Hulu 3, Tahun 2022

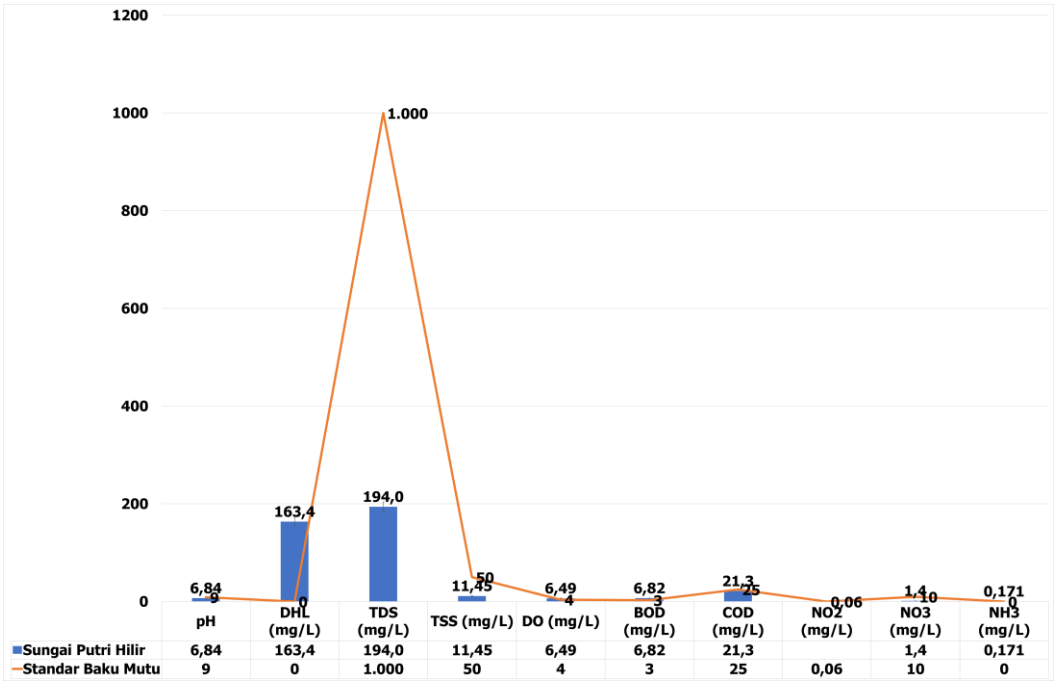

	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)
Sungai Putri Hilir	6,84	163,4	194,0	11,45	6,49	6,82	21,3		1,4	0,171
Standar Baku Mutu	9	0	1.000	50	4	3	25	0,06	10	0

Gambar 4.2.26
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Putri Hilir, Tahun 2022

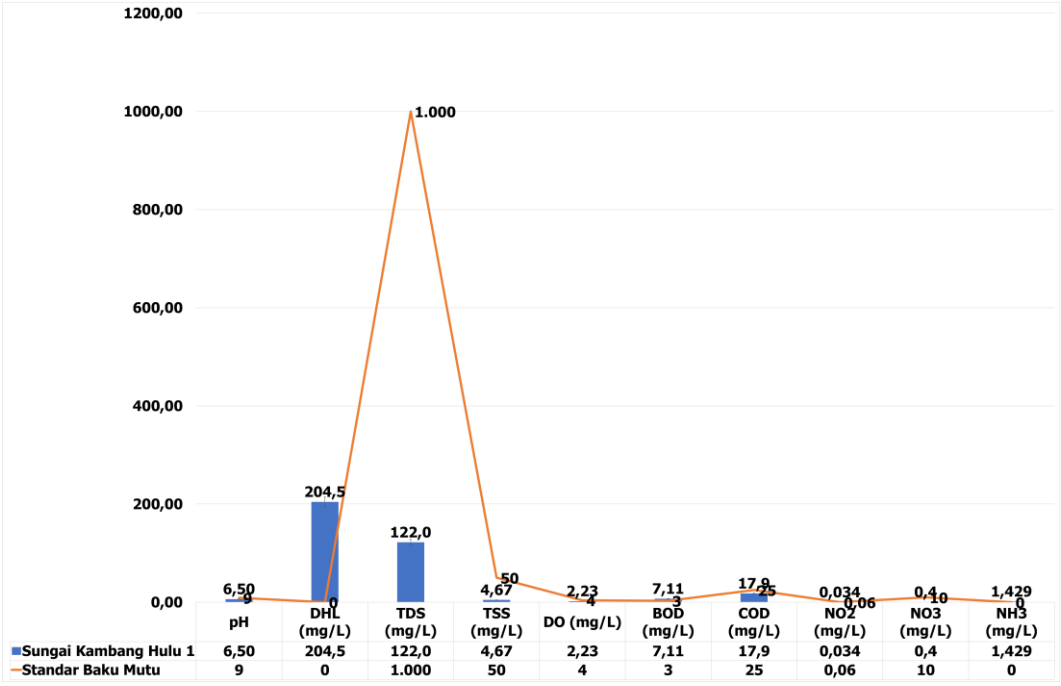

	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)
Sungai Kambang Hulu 1	6,50	204,5	122,0	4,67	2,23	7,11	17,9	0,034	0,4	1,429
Standar Baku Mutu	9	0	1.000	50	4	3	25	0,06	10	0

Gambar 4.2.27
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Kambang Hulu 1, Tahun 2022

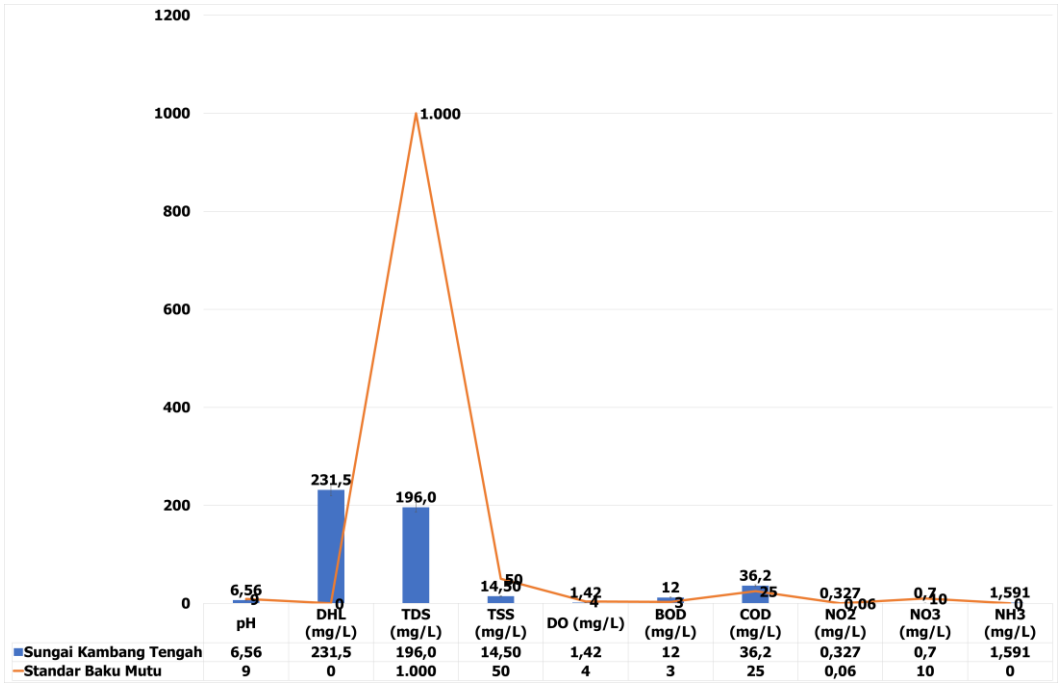

Gambar 4.2.28
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Kambang Tengah, Tahun 2022

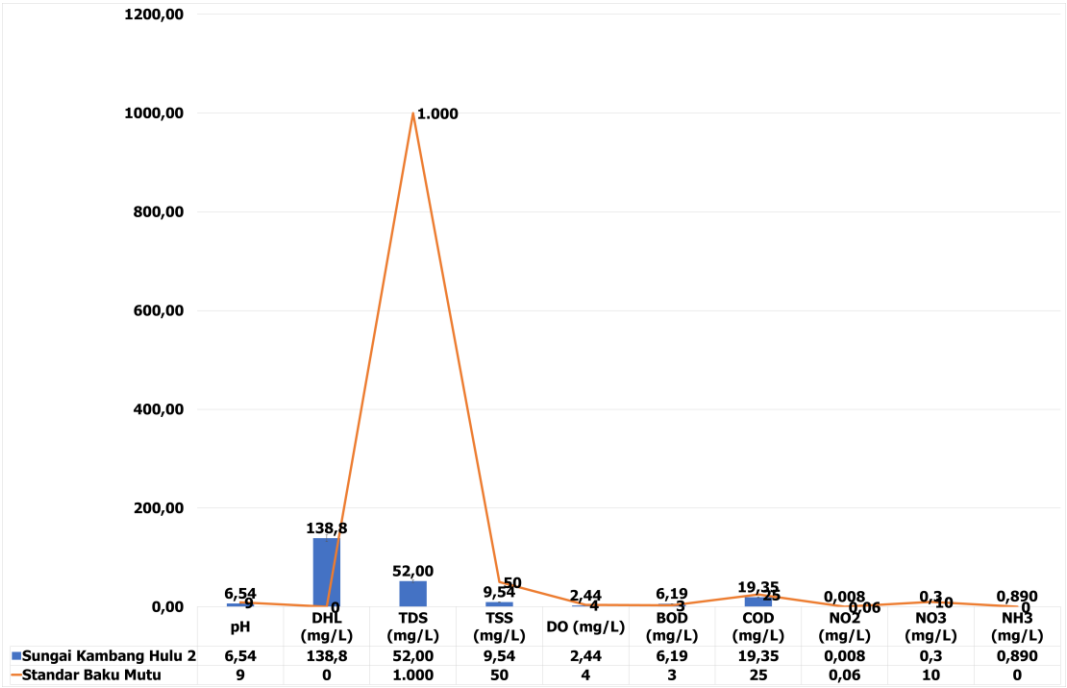

Gambar 4.2.29
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Kambang Hulu 2, Tahun 2022

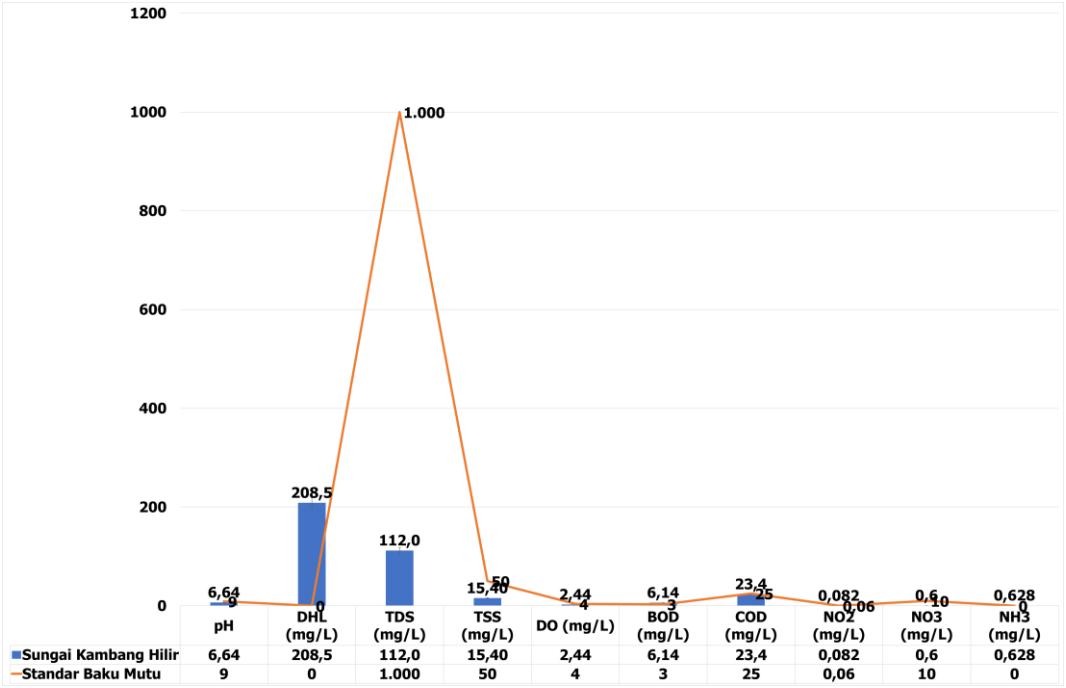

Gambar 4.2.30
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Kambang Hilir, Tahun 2022

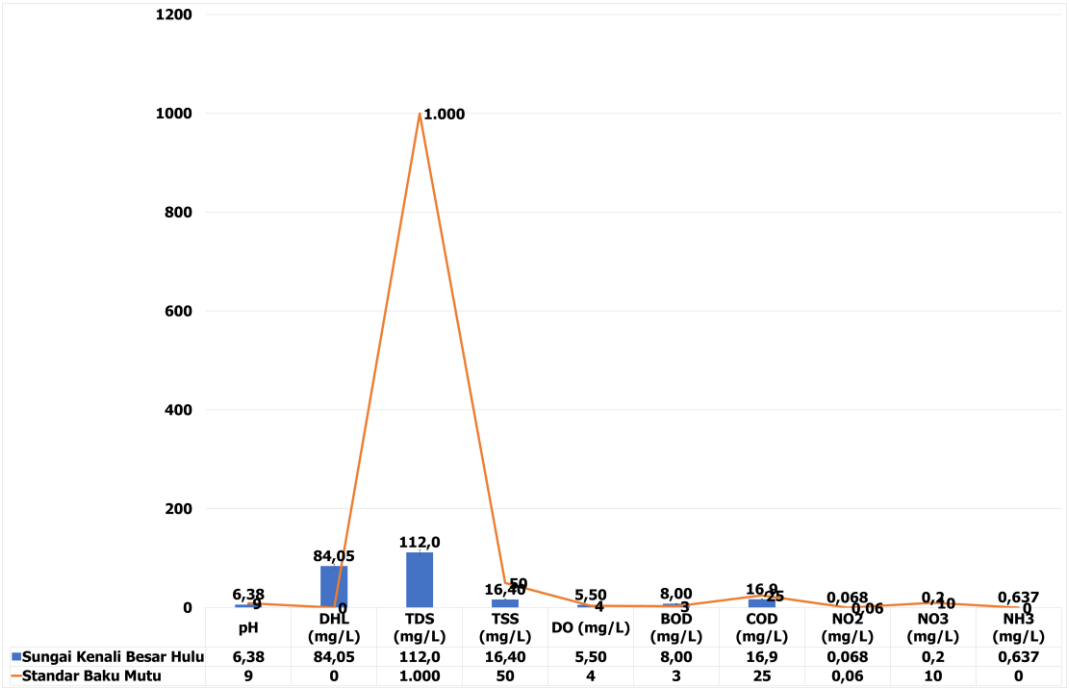

Gambar 4.2.31
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Kenali Besar Hulu, Tahun 2022

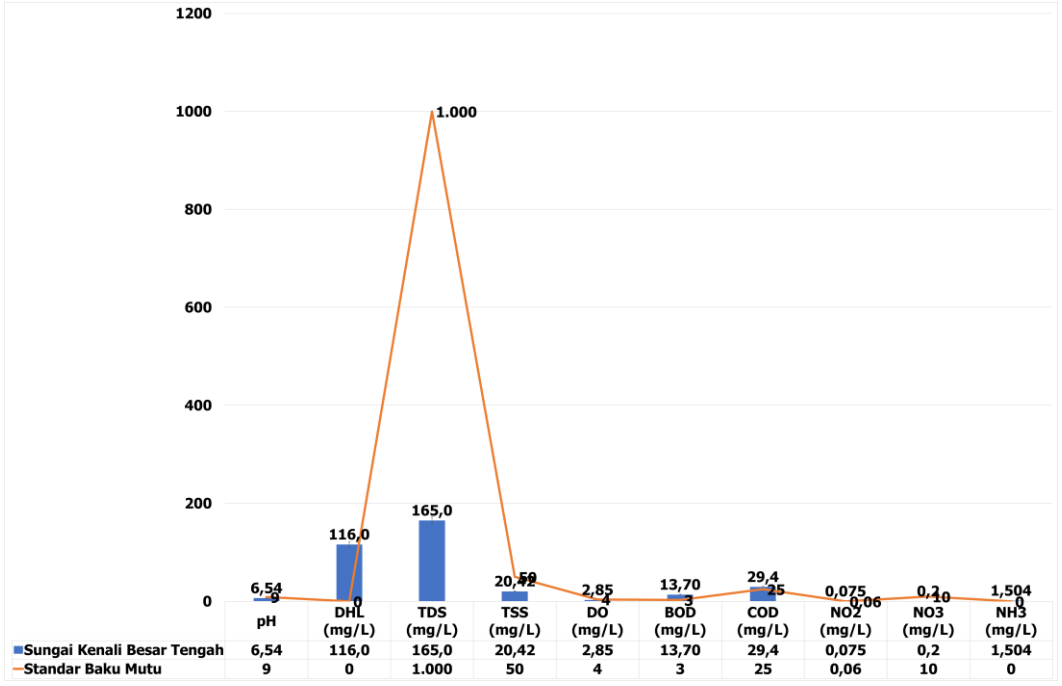

Gambar 4.2.32
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Kenali Besar Tengah, Tahun 2022

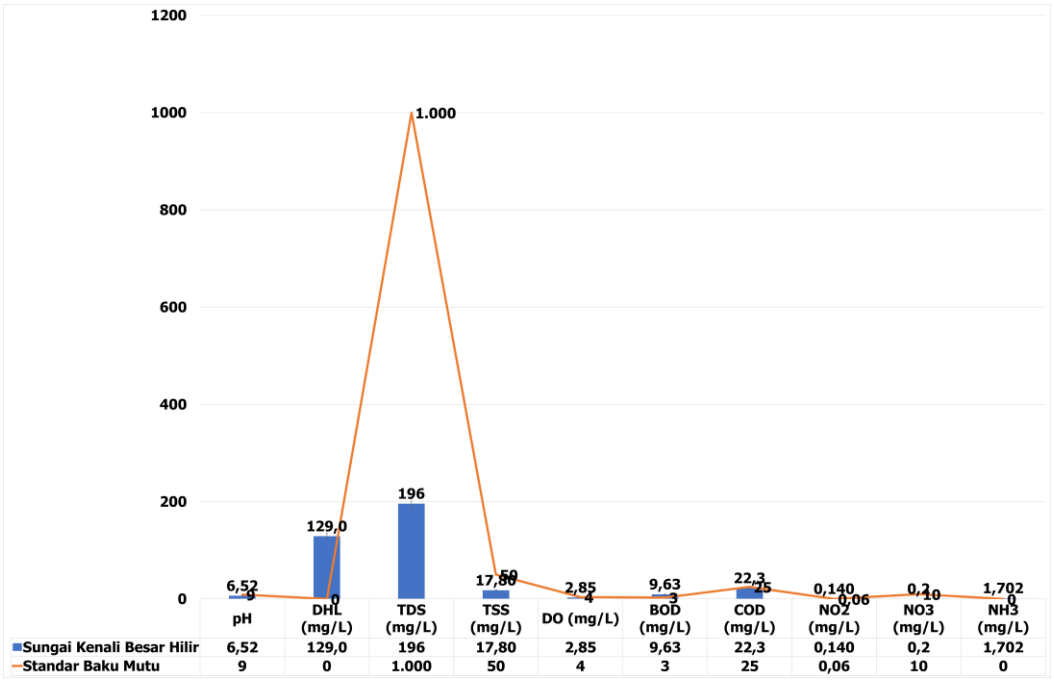

Gambar 4.2.33
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Kenali Besar Hilir, Tahun 2022

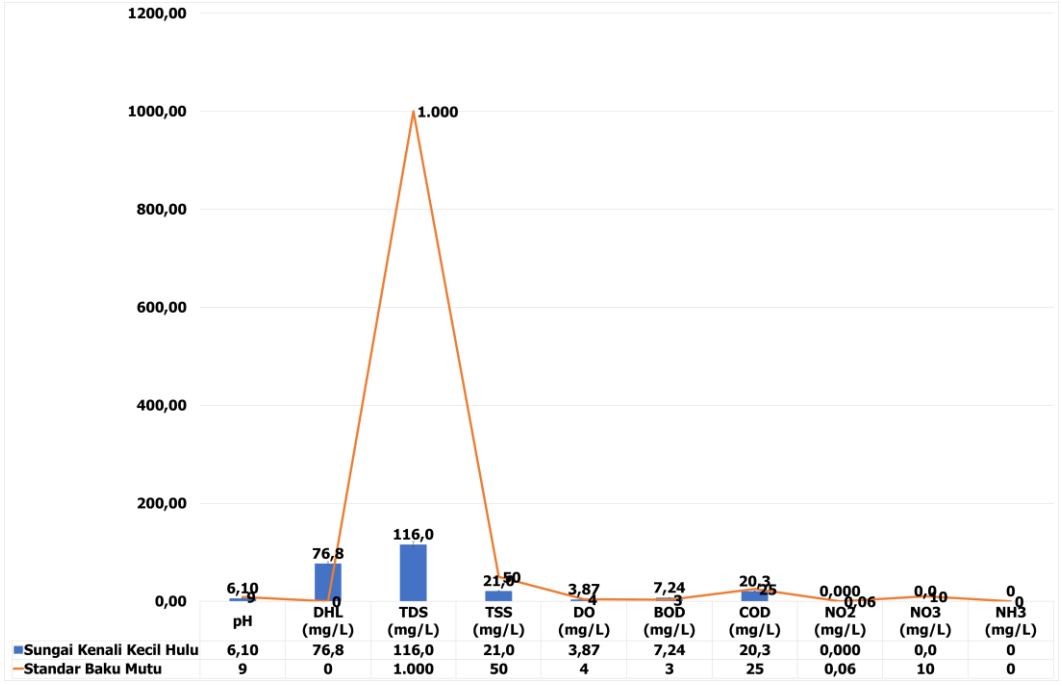

Gambar 4.2.34
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Kenali Kecil Hulu, Tahun 2022

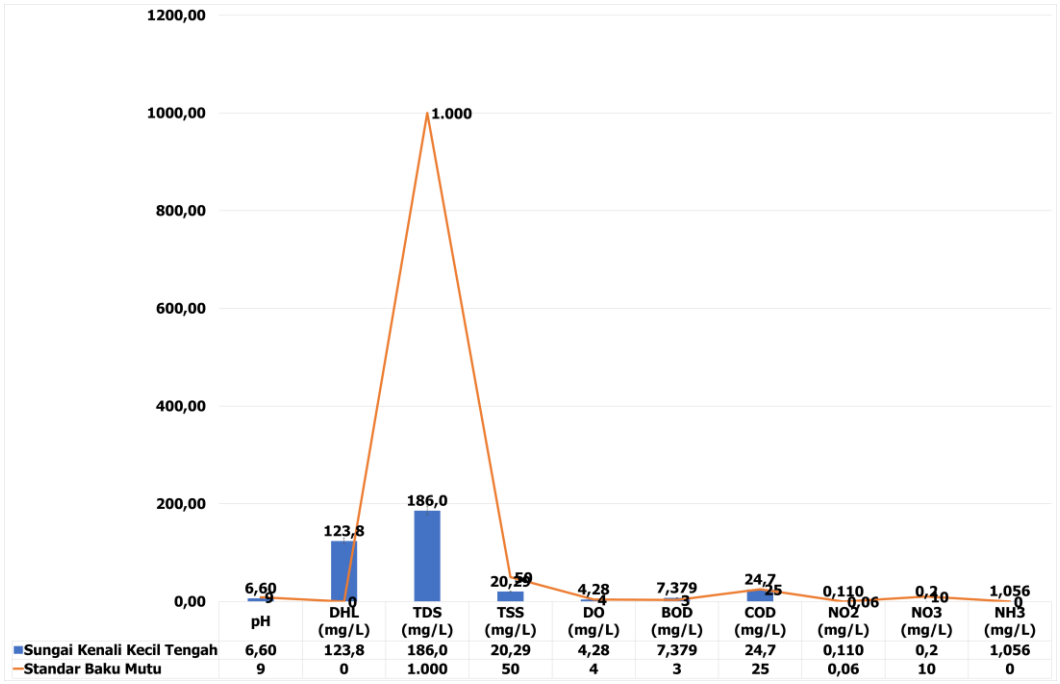

Gambar 4.2.35
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Kenali Kecil Tengah, Tahun 2022

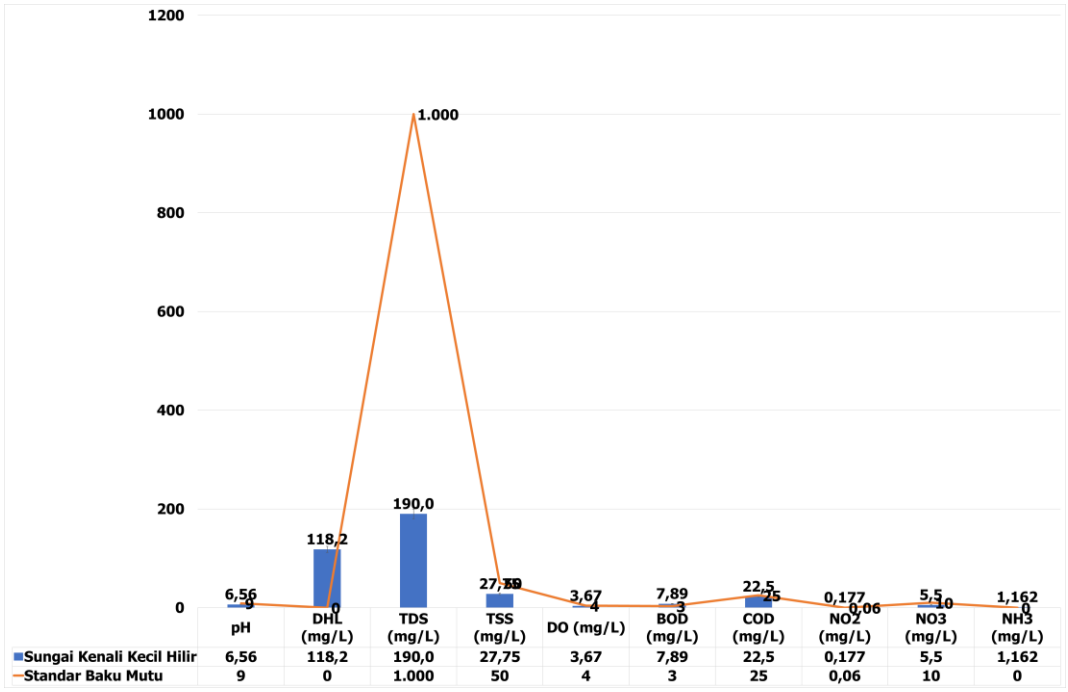

Gambar 4.2.36
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Kenali Kecil Hilir, Tahun 2022

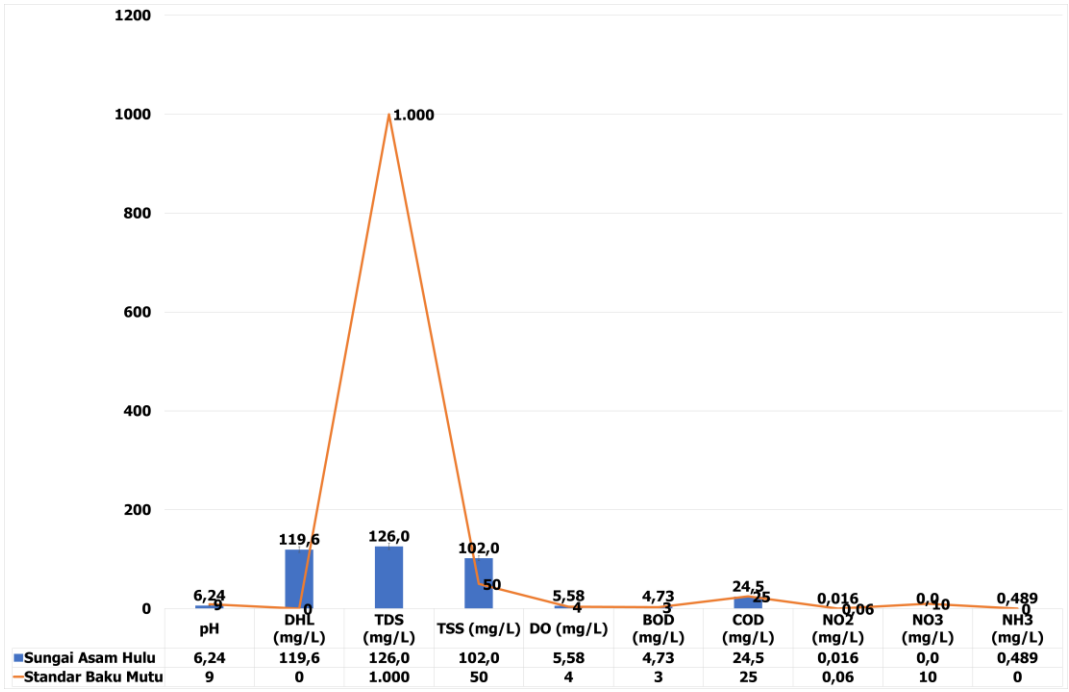

Gambar 4.2.37
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Asam Hulu, Tahun 2022

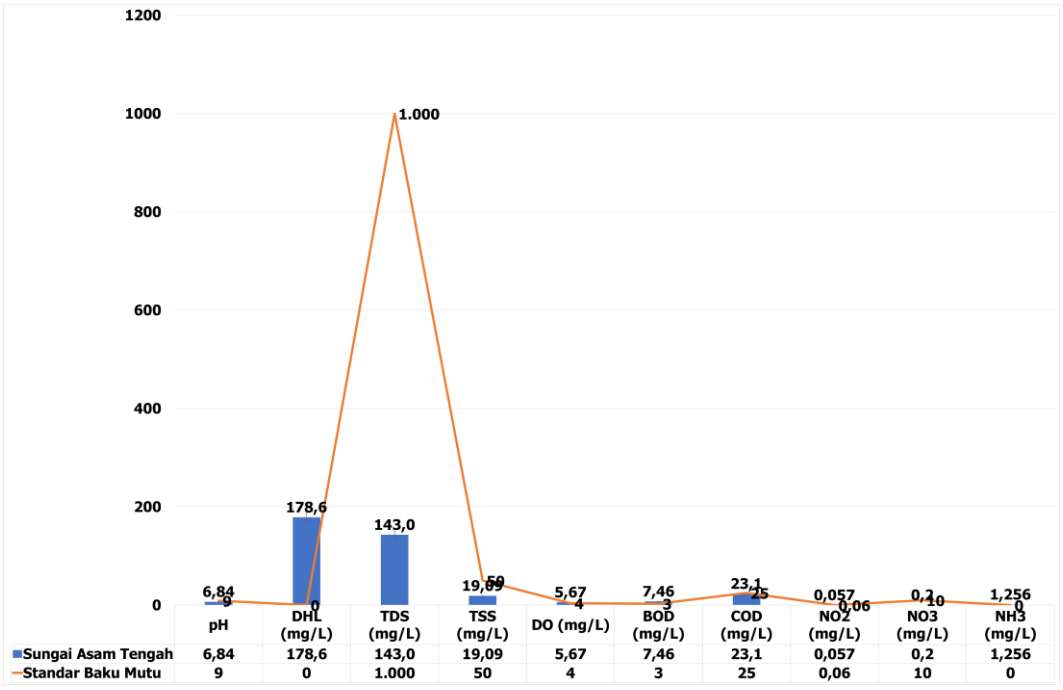

Gambar 4.3.38
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Asam Tengah, Tahun 2022

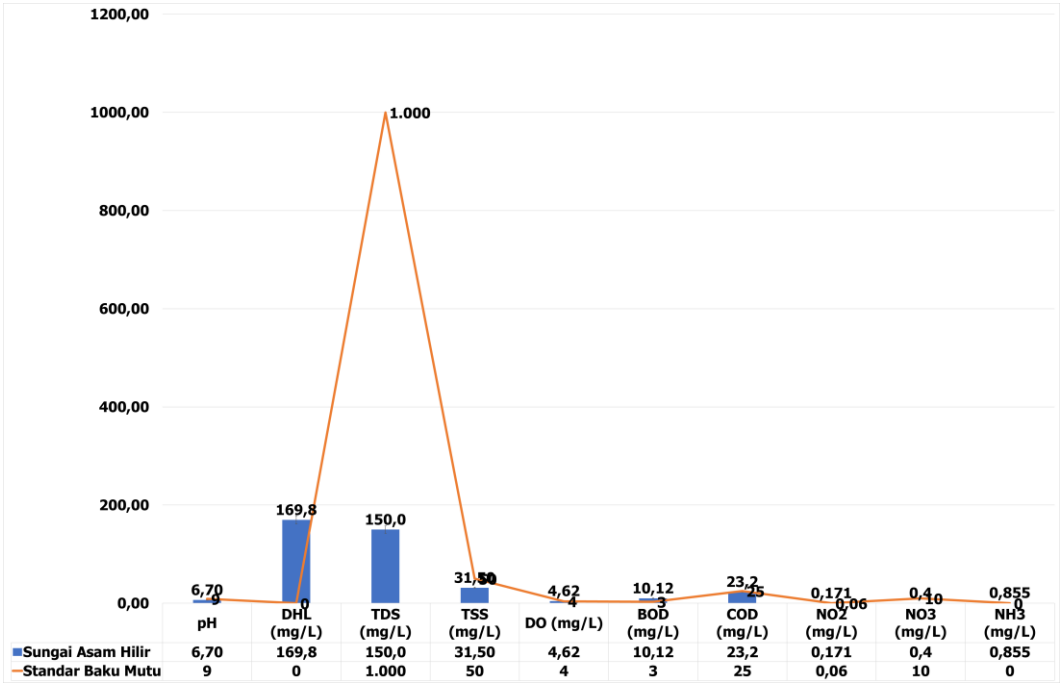

Gambar 4.2.39
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Asam Hilir, Tahun 2022



4.2.3.2 Kualitas Udara

Udara merupakan campuran gas yang terdapat pada permukaan bumi, udara tidak kasat mata, tidak berbau dan tidak memiliki rasa. Udara hanya dapat dirasakan dari adanya angina yang menggerakkan benda. Udara merupakan sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat bagi makhluk hidup. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, yang dimaksud udara ambien adalah udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.

Peningkatan kebutuhan *supply* oksigen di wilayah kota jambi akibat kualitas udara yang semakin menurun, dengan pantauan terhadap kualitas udara guna mengetahui trend tingkat pencemaranan udara secara up to date serta untuk mengetahui tingkat keberhasilan pengendalian pencemaranan udara di Kota Jambi. Kualitas Udara Ambien pada tahun 2022 telah dilakukan pemantauan kualitas udara ambien di wilayah Kota Jambi yang lokasinya mewakili kawasan padat lalu lintas, kawasan permukiman dan kawasan industri sebagai tabel berikut ini.

Tabel IV.2.19
Kualitas Udara Ambien di Kota Jambi Tahun 2022

No.	Lokasi	Titik Koordinat		Lama Pengukuran	SO_2 (µg/Nm³)	NO_2 (µg/Nm³)
		Latitude	Longitude			
1	Kantor Lurah Jambi, Kota Jambi	-1,61583	103,616419	26 APRIL 2022 pukul 09.39 WIB sampai 10 MEI 2022 pukul 09.13 WIB	4,97	20,58
2	Pabrik Karet/ Puskesmas Sijenjang	-1,3896	103,628226	26 APRIL 2022 pukul 10.02 WIB sampai 10 MEI 2022 pukul 09.40 WIB	6,86	9,08
3	Perumahan Villa Kenali	-1,645444	103,585694	26 APRIL 2022 pukul 10.42 WIB sampai 10 MEI 2022 pukul 10.14 WIB	5,38	11,66
4	Komplek Walikota Jambi	-1,629584	103,607389	26 APRIL 2022 pukul 09.20 WIB sampai 10 MEI 2022 pukul 08.58 WIB	4,27	12,01
5	Blank Sample				<2,57	<0.41
6	Kantor Lurah Jambi, Kota Jambi	-1,58525	103,618416	5 JULI 2022 pukul 08.58 WIB sampai 19 JULI 2022 pukul 08.51 WIB	5,06	25,38
7	Pabrik Karet/ Puskesmas	-1,636000	103,635694	5 JULI 2022 pukul 09.15 WIB sampai 19 JULI 2022	6,38	13,01



No.	Lokasi	Titik Koordinat		Lama Pengukuran	SO_2 (µg/Nm³)	NO_2 (µg/Nm³)
		Latitude	Longitude			
	Sijenjang			pukul 09.07 WIB		
8	Perumahan Villa Kenali	-1,618444	103,63175	5 JULI 2022 pukul 09.48 WIB sampai 19 JULI 2022 pukul 09.37 WIB	3,05	12,17
9	Komplek Walikota Jambi	-1,585805	103,61925	5 JULI 2022 pukul 08.40 WIB sampai 19 JULI 2022 pukul 08.36 WIB	6,4	12,55
10	Blank Sample				<2,57	<0.41

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Jambi, Tahun 2023



Alat AQMS di Kota Jambi

Tingginya emisi karbon di Kota Jambi salah satunya dipicu oleh perkembangan kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar Bensin sekitar 863.607 unit, bahan solar sekitar 47.912 unit dan yang menggunakan bahan bakar gas sekitar 18 unit.



Tabel IV.2.20
Penggunaan Bahan Bakar Industri Dan Rumah Tangga di Kota Jambi

No	Jenis Kendaraan Bermotor	Jumlah (Unit)			
		Jumlah	Bensin	Solar	Gas
1	Sepeda Motor	771.783	771.709	60	14
2	Mobil Penumpang	93.525	80.841	12.684	0
3	Mobil Bus	845	11	834	0
4	Mobil Barang	45.277	11.032	34.241	4
5	Kendaraan Khusus	107	14	93	0
Total		**911.537**	**863.607**	**47.912**	**18**

Sumber: Samsat Kota Jambi, Tahun 2023

Tingginya penggunaan bahan bakar minyak tanah, LPG, kayu bakar, bensin dan solar untuk kegiatan industri atau usaha/kegiatan pengolahan dan rumah tangga yang menyebabkan pencemaran udara. Bahan bakar yang menggunakan LPG pada industri kecil sebanyak 34.912 buah, dan yang menggunakan LPG pada rumah tangga sebanyak 298.464 buah. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada table berikut.

Tabel IV.2.21
Penggunaan Bahan Bakar Industri Dan Rumah Tangga di Kota Jambi

No.	Penggunaan	Minyak Bakar	Minyak Diesel	Minyak Tanah	LPG	Briket	Kayu Bakar	Bensin	Solar
A	Industri :								
1	Industri Kecil	-	-	-	34.912	-	-	-	-
2	Industri Sedang	-	-	-		-	-	-	-
3	Industri Besar	-	-	-		-	-	-	-
B	Rumah Tangga :	-	-	-	298.464	-	-	-	-
Jumlah		**-**	**-**	**-**	**333.376**	**-**	**-**	**-**	**-**

Sumber: Dinas Perdagangan dan perindustrian Kota Jambi, Tahun 2023

4.2.4 Kawasan Rawan Bencana

A. Kejadian Bencana di Kota Jambi

Berdasarkan Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI), terjadi sebanyak 41 kejadian bencana yang tercatat dari tahun 2010 sampai tahun 2021 di Kota Jambi. Kejadian bencana tersebut diantaranya adalah bencana banjir, bencana angin putting beliung dan bencana kebakaran hutan dan lahan. Kejadian bencana yang pernah ada tersebut disajikan melalui tabel berikut:





Tabel IV.2.22
Kejadian Bencana di Kota Jambi

No	Bencana	Jumlah Kejadian	Korban				Kerusakan			
			Meninggal	Terluka	Menderita	Mengungsi	Rumah	Fasilitas Pendidikan	Fasilitas Peribadatan	Perkantoran
1	Banjir	20	6	2	9.275	14.051	441	22	3	1
2	Puting beliung	8	1	2	-	-	197	-	-	-
3	Kebakaran	13	1	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		41	8	4	9.275	14.051	638	22	3	1

Sumber: Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI), data kejadian tahun 2010 - 2022

Kejadian bencana yang sering terjadi di Kota Jambi adalah bencana banjir yang terjadi dari tahun 2010 sampai tahun 2022 sebanyak 20 kejadian, korban meninggal sebanyak 6 orang, terluka sebanyak 2 orang, menderita akibat kejadian bencana banjir sebanyak 9.275 orang, mengungsi sebanyak 14.051 orang. Sementara kerusakan rumah yang terdata sebanyak 441 unit, fasilitas pendidikan yang tergenang banjir sebanyak 22 unit, fasilitas peribadatan yang terkena dampak banjir sebanyak 3 unit dan 1 unit perkantoran yang terkena dampak banjir.

Bencana angin putting beliung terjadi sebanyak 8 kejadian yang mengakibatkan korban meninggal sebanyak 1 orang, korban terluka sebanyak 2 orang. Sementara kerusakan yang terjadi mengakibatkan sebanyak 197 unit rumah mengalami kerusakan. Bencana kebakaran hutan dan lahan terjadi sebanyak 41 kejadian yang memakan korban meninggal 1 orang.

Tabel IV.2.23
Rekap Data Penerima Bantuan Bencana Kota Jambi

Kecamatan	Kelurahan	Bencana	Jumlah Penerima Bantuan (orang)
Tahun 2021			
Jambi Timur	Budiman	Kebakaran	1
	Tanjung Pinang	Kebakaran	1
Jelutung	Lebak Bandung	Kebakaran	1
	Jelutung	Rumah Roboh	5
Alam Barajo	Kenali Besar	Kestrum Listrik	1
	Mayang Mangurai	Kebakaran	3
	Rawa Sari	Rumah Roboh	2
	Bagan Pete	Kebakaran	2
Danau Teluk	Olak Kemang	Kebakaran	1
Kota Baru	Simpang III Sipin	Kebakaran	6
Danau Sipin	Legok	Kebakaran	6





Kecamatan	Kelurahan	Bencana	Jumlah Penerima Bantuan (orang)
	Sungai Putri	Kebakaran	1
	Sungai Putri	Tanah Lonsor	2
Talanai Pura	Telanai Pura	Kebakaran	1
	Buluran Kenali	Tenggelam	1
	Pematang Sulur	Rumah Roboh	1
Paal Merah	Eka Jaya	Kebakaran	3
Jambi Selatan	Pasir Putih	Kebakaran	1
Pelayangan	Arab Melayu	Kebakaran	2
Jumlah			**41**
Tahun 2022			
Alam Barajo	Kenali Besar	Kebakaran	3
	Kenali Besar	Tanah Longsor	1
	Rawa Sari	Kebakaran	2
	Rawa Sari	Angin Putting Beliung	1
	Rawa Sari	Tenggelam	1
	Bagan Pete	Kebakaran	4
	Beliung	Tertimpa Pohon	1
Jambi Timur	Kasang	Kebakaran	6
	Kasang	Angin Putting Beliung	1
	Kasang	Tenggelam	3
	Tanjung Pinang	Kebakaran	2
	Sijenjang	Kebakaran	1
	Tanjung Sari	Tenggelam	1
Jelutung	Jelutung	Kebakaran	3
	Lebak Bandung	Kebakaran	5
	Handil Jaya	Kebakaran	2
	Handil Jaya	Tenggelam	1
	Payo Lebar	Tertimpa Pohon	1
	Payo Lebar	Kebakaran	6
	Cempaka Putih	Tenggelam	1
Kota Baru	Kenali Asam	Kebakaran	4
	Suka Karya	Kebakaran	2
	Simpang III Sipin	Kebakaran	1
Telanai Pura	Buluran Kenali	Kebakaran	1
	Teluk Kenali	Kebakaran	1
Paal Merah	Lingkar Selatan	Kebakaran	2
	Payo Selincah	Kebakaran	3
	Eka Jaya	Kebakaran	2
Danau Sipin	Legok	Angin Putting Beliung	1
	Legok	Kebakaran	2
	Legok	Tanah Longsor	1
	Solok Sipin	Kebakaran	11
	Sungai Putri	Tanah Longsor	1
Jambi Selatan	Thehok	Kebakaran	1
Pelayangan	Mudung Laut	Kebakaran	1
	Tahtul Yaman	Kebakaran	3
Jumlah			**76**

Sumber: Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Jambi, 2022





Dari tabel tersebut diatas, dapat diketahui bahwa kejadian bencana yang dialami penduduk di Kota Jambi diantaranya bencana kebakaran rumah, tanah longsor, angin putting beliung. Pada tahun 2021 jumlah masyarakat yang mendapat bantuan dari Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Pemadam Kebakaran sebanyak 41 orang, dan pada tahun 2022 jumlah masyarakat yang mendapat bantuan atas kejadian bencana sebanyak 76 orang. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi selaku instansi yang terkait langsung dengan penanganan perumahan dan kawasan permukiman belum memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana untuk membangun kapasitas pemerintah daerah dalam implementasi dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kebencanaan.

B. Kawasan Rawan Bencana di Kota Jambi

Kota Jambi merupakan wilayah yang berada pada dataran rendah dengan tingkat kelerengan lahan sebagian besar 0 – 2% memiliki 5 anak sungai dengan 8 daerah aliran sungai. Disamping itu, wilayah Kota Jambi telah terjadi pembangunan yang sangat signifikan sehingga terjadi perubahan fungsi lahan yang mengakibatkan kawasan yang pada awalnya sebagai daerah tangkapan air berubah menjadi lahan perumahan dan permukiman atau lahan dengan fungsi sosial lainnya. Intensitas hujan yang tinggi, akibat perubahan fungsi lahan tersebut menjadikan air hujan tidak terserap kedalam tanah sehingga meluap kepermukaan.

Tabel IV.2.24
Kawasan Rawan Bencana Banjir

Kecamatan	Kelurahan	Luas Permukiman (Terdampak Banjir) (Ha)	Jumlah Rumah (unit)
Alam Barajo	Bagan pete	1,3	15
	Beliung	4,92	129
	Kenali Besar	51,55	463
	Kenali Kecil	79,27	1324
	Mayang Mangurai	25,93	282
	Rawasari	14,87	575
	Simpang Rimbo	57,83	839
Telanaipura	Pematang Sulur	21,93	200
	Simpang IV Sipin	37,61	1049
Danau Sipin	Murni	6,68	348
	Solok Sipin	0,1	8
Jambi Selatan	Pakuan Baru	3,16	113
	Pasir Putih	56,24	1269
	Talang Bakung	48,38	940





Kecamatan	Kelurahan	Luas Permukiman (Terdampak Banjir) (Ha)	Jumlah Rumah (unit)
	Tambak Sari	10	315
	The Hok	12,38	357
	Wijayapura	4,03	162
Jambi Timur	Budiman	0,23	4
	Kasang Jaya	4,16	98
	Rajawali	14,87	575
	Sulanjana	9,07	379
	Talang Banjar	38,45	931
	Tanjung Pinang	0,05	16
	Tanjung Sari	12,51	329
Jelutung	Cempaka Putih	1,27	53
	Handil Jaya	17,08	429
	Jelutung	84,06	1995
	Lebak Bandung	7,46	245
	Payo Lebar	8,24	307
	Talang jauh	23,15	400
Kota Baru	Kenali Asam	20,31	241
	Kenali Asam Atas	4,99	39
	Kenali Asam Bawah	30,72	334
	Paal V	102,79	1891
	Simpang III Sipin	41,17	940
	Suka Karya	52,19	827
	Talang Gulo	18,61	85
Paal Merah	Bakung Jaya	56,35	748
	Eka Jaya	109,41	2376
	Lingkar Selatan	47,98	1140
	Paal merah	84,85	1014
	Payo Selincah	75,08	2451
Pasar Jambi	Beringin	0,15	5
Jumlah		**1.301**	**26.240**

Sumber: Dinas Damkar dan Penyelamatan diolah dengan hasil digitasi dan interpretasi peta citra satelit



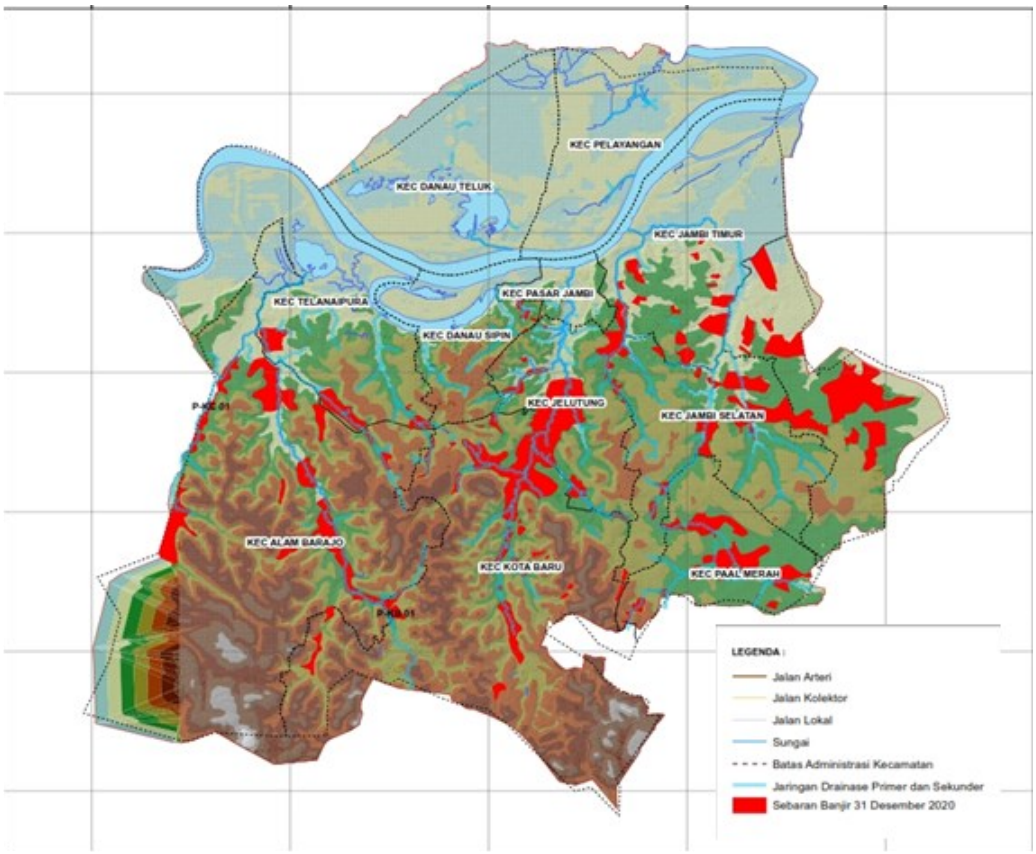

Gambar 4.2.40
Peta Sebaran Lokasi Banjir di Kota Jambi

4.2.5 Sistem Persampahan

Kota Jambi, dengan jumlah penduduk kota Jambi pada tahun 2022 adalah 619.553 jiwa yang tersebar di 11 (sebelas) kecamatan atau 68 kelurahan. Berdasarkan data kependudukan tersebut dan perkiraan timbulan sampah 0,70 kilogram per orang per hari, maka jumlah sampah yang dihasilkan di seluruh kota adalah sekitar 433.687,10 kg/hari. Dengan timbulan sampah terbesar ada Kecamatan Alam Barajo sebesar 79.202,20 kg/hari, sedangkan timbulan sampah terkecil ada di Kecamatan Pasar Jambi yang hanya sebesar 7.802,90 kg/hari. Untuk lebih detail mengenai data timbulan sampah dikota Jambi dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel IV.2.25
Jumlah Penduduk Per-Kecamatan dan Potensi Timbulan Sampah di Kota Jambi Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Massa Sampah (Kg /Orang /Hr)	Total Sampah (Kg/Hari)	Perlakuan				Massa Sampah Terangkut Ke Tpa (Kg/Hari)	Massa Sampah Terolah Di Tps 3r Dan Bank Sampah/Hari (Kg/Hari)	Massa Sampah Terkurangi 9 kg/Hari)	Sampah Yang Terkelola/Hr (Kg)	Persentase Sampah Yang Terkelola (%)
					TPA	Tps3r /Bs	Pembatasan Kantong Belanja	Tanpa Akses					
1	2	3	4	5 = 3*4	6	7	8	9	10 = 5*6	11 = 5*7	12=5*8	13=10+11+12	14=(13/5)*100
1	Kota Baru	83.381	0,7	58.366,70	75%	5%	0,10%	19,90%	43.775,03	2.918,34	58,37	46.751,73	80,10%
2	Alam Barajo	113.146	0,7	79.202,20	73%	7%	0,10%	19,90%	57.817,61	5.544,15	79,20	63.440,96	80,10%
3	Jambi Selatan	57.515	0,7	40.260,50	73%	5%	0,10%	21,90%	29.390,17	2.013,03	40,26	31.443,45	78,10%
4	Paal Merah	108.182	0,7	75.727,40	73%	4%	0,10%	22,90%	55.281,00	3.029,10	75,73	58.385,83	77,10%
5	Jelutung	59.744	0,7	41.820,80	80%	1%	0,10%	18,90%	33.456,64	418,21	41,82	33.916,67	81,10%
6	Pasar Jambi	11.147	0,7	7.802,90	91%	6%	0,20%	2,80%	7.100,64	468,17	15,61	7.584,42	97,20%
7	Telanaipura	49.720	0,7	34.804,00	76%	7%	0,10%	16,90%	26.451,04	2.436,28	34,80	28.922,12	83,10%
8	Danau Sipin	43.734	0,7	30.613,80	72%	1%	0,10%	26,90%	22.041,94	306,14	30,61	22.378,69	73,10%
9	Danau Teluk	13.009	0,7	9.106,30	70%	1%	0,05%	28,95%	6.374,41	91,06	4,55	6.470,03	71,05%
10	Pelayangan	13.050	0,7	9.135,00	70%	2%	0,05%	27,95%	6.394,50	182,70	4,57	6.581,77	72,05%
11	Jambi Timur	66.925	0,7	46.847,50	75%	4%	0,10%	20,90%	35.135,63	1.873,90	46,85	37.056,37	79,10%
Jumlah		**619.553**		**433.687,10**					**323.218,59**	**19.281,07**	**432,37**	**342.932,03**	**79,07%**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Jambi 2023





Berdasarkan Komposisinya timbulan sampah di Kota Jambi terdiri dari 2 Komposisi yaitu sampah Organik dan sampah Anorganik. Sampah Organik merupakan penyumbang terbesar timbulan sampah di Kota Jambi, timbulan sampah yang dihasilkan oleh komposisi ini sebesar 95.030,09 m3/hari atau sebesar 61,9 % dari total timbulan sampah. Sedangkan sisanya merupakan komposisi timbulan sampah An Organik. Berikut ditampilkan data komposisi timbulan sampah di Kota Jambi.

Tabel IV.2.26
Komposisi Timbulan Sampah di Kota Jambi Tahun 2022

No	Komposisi Sampah	Prosentase (%)	Jumlah Timbulan Sampah M^3/Hari
1	ORGANIK	61,9	95.030,09
2	AN ORGANIK	38,1	
	a. Plastik	12,3	18.883,20
	b. Kaca	1,2	1.842,26
	c. Logam	0,3	460,57
	d. Limbah berbahaya	0,2	307,04
	e. Kertaskardus/karton	7,2	11.053,58
	f. Kain	2,1	3.223,96
	g. Karet	0,6	921,13
	h. Tulang belulang	0,1	153,52
	h. Lain-lain	14,1	21.646,59
Jumlah		**100,0**	**153.521,95**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Daerah, Tahun 2023

1) Sistem dan Infrastruktur

Kebijakan prasarana dan sarana persampahan dalam Rencana Induk ditinjau dari pengembangan wilayah berdasarkan RTRW adalah:

a. Mengurangi volume sampah yang akan dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) dengan cara pengolahan setempat per-wilayah dengan teknik-teknik yang berwawasan lingkungan.
b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pengelolaan sampah.

Perencanaan sistem persampahan dikelompokkan ke dalam dua kelompok kebijakan, yaitu: peningkatan layanan cakupan persampahan, dan perubahan pola sistem TPA menjadi Sanitary landfill.





Saat ini, tengah dilakukan proses peningkatan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Talang Gulo dari sistem open dumping menjadi sanitary landfill yang berlokasi di Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo, dan juga sedang dibangun Waste to Energy (WTE) yang berlokasi di Pasar Talang Banjar Kecamatan jambi Timur.

Secara teknis, Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi bertugas dalam hal pengumpulan sedangkan untuk pengangkutan sampah terutama dari TPS (Tempat Penampungan Sementara) ke TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sistem operasional pelayanan persampahan dapat digambarkan dalam diagram berikut ini.

Menurut Undang-Undang 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah terdiri atas sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumberdaya.

2) <u>Kelembagaan dan Peraturan</u>

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, lembaga yang menangani pengelolaan sampah di Kota Jambi adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang Kota Jambi sesuai dengan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah yang baru; Hal ini menyebabkan tidak optimalnya pengelolaan persampahan karena ditangani oleh 2 (dua) OPD dimana tugasnya merupakan satu kesatuan.

Peraturan terkait pengelolaan sampah berupa peraturan mengenai retribusi sampah dan kebersihan, secara khusus peraturan mengenai pengelolaan sampah belum ada.





Berdasarkan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah yang baru tersebut kendala operasional yang terjadi adalah dimana proses pengumpulan dan pengangkutan sampah menjadi tugas dan fungsi Bidang Kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup Daerah, sementara peralatan berada dibawah kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi.

3) Peran Serta Swasta dan Masyarakat

Peran serta swasta dalam pengelolaan persampahan di Kota Jambi masih berupa penyediaan sarana pewadahan sampah di sumber sampah (seperti tong sampah pada sekolah/perkantoran) dan melakukan pemilahan sampah oleh kolektor sampah yang sekiranya memiliki nilai ekonomis.

Sedangkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Jambi berupa penyediaan sarana pewadahan sampah untuk kebutuhan rumah tangga, mengumpulkan sampah dari sumber ke TPS dan melakukan pemilahan sampah.



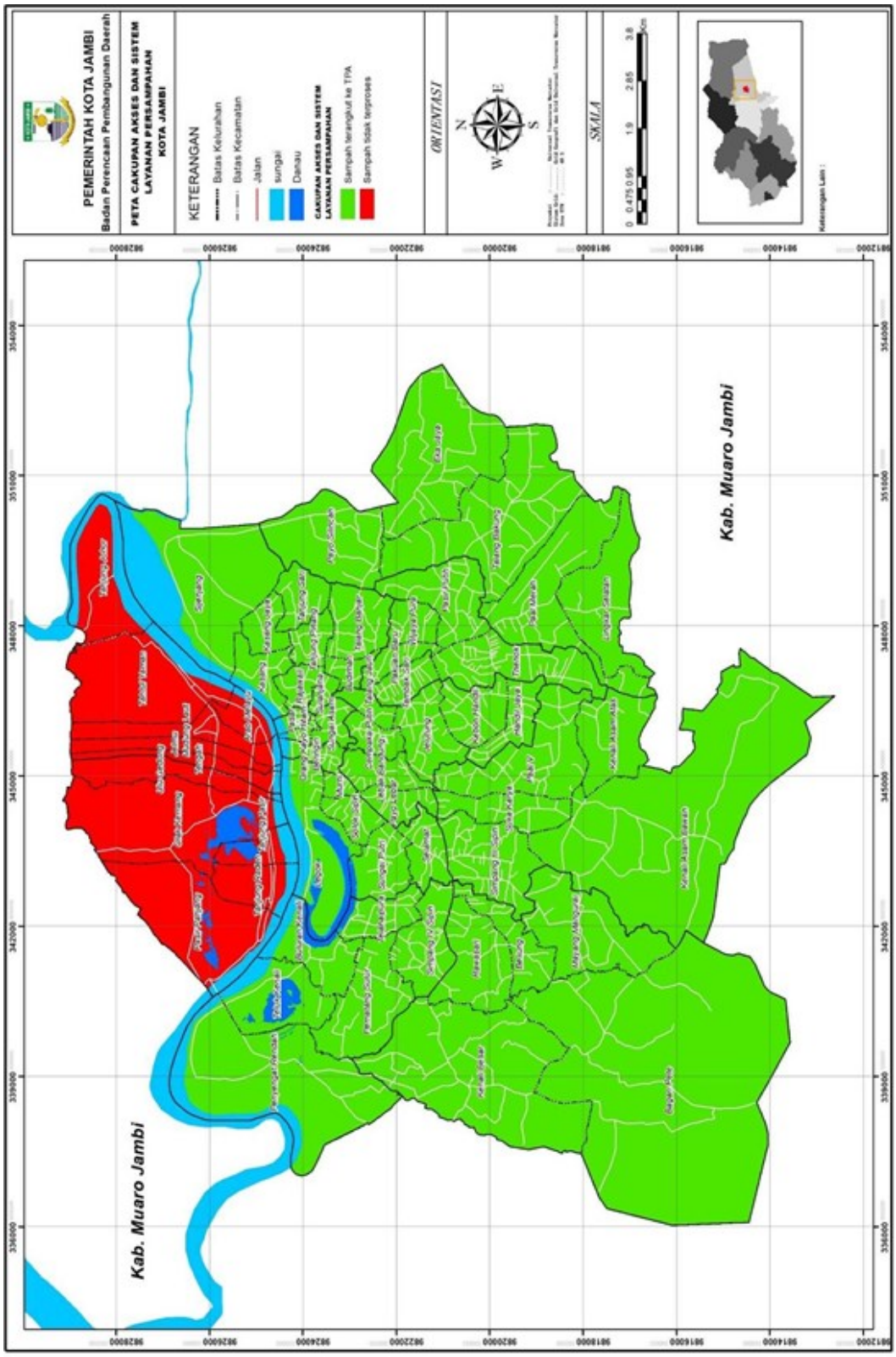

Gambar 4.2.41
Peta Cakupan Akses Dan Sistem Layanan Persampahan Kota Jambi



Standar yang dipergunakan dalam memperkirakan produksi sampah pada wilayah perencanaan didasarkan pada buku standar umum Perkotaan untuk timbunan sampah yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Subdin Cipta Karya. Berdasarkan standar panduan tentang volume sampah berikut pembuangan dan pengangkutannya adalah sebagai berikut.

a. Produksi sampah diasumsikan 2,5 L/Org/Hr
b. Tempat sampah setidaknya melayani 8-10 jiwa atau 50 liter tiap tong
c. Tempat pembuangan sampah semetara (TPS) diambil asumsi 1.000 liter tiap TPS
d. Pengangkutan mengunakan gerobak melayani 1.000-1.500 jiwa, diasumsikan setiap 1.000 liter sampah membutuhkan 5 buah gerobak
e. Truk sampah melayani minimal 6.000 jiwa

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (end-of-pipe), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah.

Berdasarkan asumsi dan kriteria di atas bahwa perkiraan volume sampah di Kota Jambi pada akhir rencana tahun 2044 menghasilkan timbulan sampah mencapai sekitar 3.269,93 M^3/Hr, dengan perkiraan kebutuhan sarannya untuk tong sampah (50 liter) membutuhkan sekitar 65.399 tong, grobak sampah (1 M3/4x) membutuhkan sekitar 1.635 buah, dan untuk drump truk sekitar 409 unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.





Tabel IV.2.27
Perkiraan Timbulan Sampah di Kota Jambi Tahun 2024 – 2044

No	Keterangan	Eksisting Tahun 2022	Tahun				
			2024	2029	2034	2039	2044
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	619.553	652.193	733.702	831.045	948.137	1.089.977
2	Rata - rata Timbulan Sampah 2,5 L/Org/Hr	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
3	Timbulan Sampah Domestik (M3/Hr)	1.548,88	1.630,48	1.834,26	2.077,61	2.370,34	2.724,94
4	Persentase Timbulan Sampah Non Domestik (%)	20	20	20	20	20	20
5	Timbulan Sampah Non Domestik (M3/Hr)	309,78	326,10	366,85	415,52	474,07	544,99
6	Total Timbulan Sampah (M3/Hr)	1.858,66	1.956,58	2.201,11	2.493,14	2.844,41	3.269,93

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2023

Tabel IV.2.28
Perkiraan Kebutuhan Sarana Persampahan di Kota Jambi Tahun 2024 – 2044

No	Keterangan	Eksisting Tahun 2022	Tahun				
			2024	2029	2034	2039	2044
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	619.553	652.193	733.702	831.045	948.137	1.089.977
2	Total Timbulan Sampah (M^3/Hr)	1.858,66	1.956,58	2.201,11	2.493,14	2.844,41	3.269,93
3	Perkiraan Kebutuhan Sarana						
	a. Tong Sampah (50 Liter)	37.173	39.132	44.022	49.863	56.888	65.399
	b. Gerobak Sampah (1 M3 / 4X)	465	489	550	623	711	817
	c. Becak Motor (2 M^3/ 1X)	929	978	1.101	1.247	1.422	1.635
	d. Truk Sampah (4 M3 / 2X)	232	245	275	312	356	409
	e. Tps (8m^3)	116	122	138	156	178	204

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2023

4.2.6 Sistem Penyediaan Air Limbah

Sistem pengelolaan air limbah merupakan infrastruktur yang dibangun khusus untuk menangani, menyalurkan, dan mengolah limbah atau limpahan air hujan agar dapat dikembalikan dan diterima oleh lingkungan sehingga tidak membahayakan. Di Kota Jambi memiliki beberapa Instalasi Pengelolahan Air Limbah (IPAL) yang tersebar dibeberapa kecamatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.





Tabel IV.2.29
Pengelolaan Air Limbah Kota Jambi Tahun 2022

No	Kecamatan	Kelurahan	Lokasi	Koordinat		Nama KSM	Nama KPP (Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara)	JUMLAH SR	KAPASITAS (M^3/HARI)
				LS	BT				
A.	**PROGRAM SANIMAS IDB TAHUN 2016**								
1	Alam Barajo	Rawasari	RT. 13	01° 37' 22,3"	103° 34' 24,7"	Teratai Merah	Teratai Merah	56	27
2	Jelutung	Cempaka Putih	RT.25	01° 36' 25,2"	103° 36' 45,4"	Kemang Lestari	Kemang Lestari	53	27
3	Telanaipura	Murni	RT.17	01° 35' 56,7"	103° 36' 13,6"	Murni Bangkit	Murni Bangkit	60	27
4	Pelayangan	Mudung Laut	RT. 14	01° 34' 19,1"	103° 36' 56,4"	Sejahtera	Sejahtera	57	27
5	Pelayangan	Tahtul Yaman	RT. 10	01° 34' 10,7"	103° 37' 15,3"	Cipta Bersama	Cipta Bersama	60	27
6	Jambi Timur	Tanjung Pinang	RT. 19	01° 35' 49,7"	103° 37' 53,6"	Pinang Mas	KPP Pinang Mas	65	27
7	Jambi Timur	Kasang	RT. 02	01° 35' 20,5"	103° 37' 33,5"	Bima	Bima	56	27
8	Jambi Timur	Rajawali	RT. 10	01° 35' 23,8"	103° 37' 28,8"	Bangkit Bersama	Bangkit Bersama	52	27
9	Telanaipura	Buluran Kenali	RT. 14	01° 35' 58,0"	103° 34' 25,3"	Buluran Sejahtera	Buluran Sejahtera	61	27
10	Jambi Timur	Budiman	RT. 02	01° 36' 10,8"	103° 37' 33,7"	Manggis	Manggis	62	27
11	Jambi Timur	Tanjung Sari	RT. 01	01° 35' 43,8"	103° 38' 08,5"	Bersama Bangkit	Bersama Bangkit	68	27
12	Jelutung	Payo Lebar	RT. 02	01° 36' 49,7"	103° 36' 02,7"	Cinta Lingkungan	Cinta Lingkungan	62	27
							JUMLAH	**712**	
B.	**PROGRAM SANIMAS IDB TAHUN 2017**								
1	Danau Sipin	Solok Sipin	RT 30	1˚ 35' 54,58" S	103˚ 36' 02,56" E	BERKAH	SOLOK SIPIN MANDIRI	56	27
2	Telanaipura	Penyengat Rendah	RT 02	1˚ 34' 28,27" S	103˚ 33' 30,6" E	FOKUS USAHA	MAJU BERSAMA	60	27
3	Jelutung	Jelutung	RT 51	1˚ 36' 53,58" S	103˚36'43,72" E	SEPAKAT	SEJAHTERA	55	27





No	Kecamatan	Kelurahan	Lokasi	Koordinat		Nama KSM	Nama KPP	JUMLAH	KAPASITAS
4	Alam Barajo	Kenali Besar	RT. 23	1˚ 37' 51,80"	103˚ 32' 45,76" E	AT-TAQWA 23	IPAL AT-TAQWA 23	56	27
5	Jelutung	Kebun Handil	RT. 10	1˚ 37' 15,6" S	103˚ 37' 01" E	MENDAH BERSERI	MENDAH BERSERI	52	27
6	Jelutung	Handil Jaya	RT 10	1˚ 38' 29,88" S	103˚ 36' 46,89" E	MAJU JAYA	MAJU JAYA	52	27
7	Kota Baru	Paal Lima	RT 29	1˚37'01,27" S	103˚ 36' 24.26" E	SUKOSARI	SUKOSARI	54	27
8	Jambi Timur	Talang Banjar	RT 17	1˚ 36' 7,2" S	103˚ 37' 48" E	ASPOL	ASPOL	56	27
9	Jambi Timur	Kasang	RT 13	1˚ 35' 45,6" S	103˚ 37' 37,62" E	CENDRAWASIH	CENDRAWASIH	52	27
10	Jambi Selatan	Pakuan Baru	RT 17	01˚ 36' 39" S	103˚ 37' 55" E	BINA MELATI	BINA MELATI	60	27
11	Jambi Selatan	Wijayapura	RT 14	01˚ 37' 10,27" S	103˚ 36' 24,26" E	WIJAYA MANDIRI	WIJAYA MANDIRI	53	27
12	Telanaipura	Telanaipura	RT 07	01˚ 37' 55" S	103˚ 37' 01" E	NURUL IKHSAN	NURUL IKHSAN	50	27
13	Alam Barajo	Bagan Pete	RT 17	1° 39' 05,30" S	103° 33' 07,20" E	PERMERU	PERMERU	63	27
14	Jelutung	Lebak Bandung	RT 06	1° 36' 04,9"S	103° 36' 31,1"E	SEPAKAT	SEPAKAT	55	27
15	Paal Merah	Payo Selincah	RT 26	1° 35' 33,5" S	103° 38' 50,7" E	MAJU BERSAMA	MAJU BERSAMA	62	27
C.	**DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TANGKI SEPTIK KOMUNAL TAHUN 2017**								
1	Pelayangan	Mudung Laut						54	25
2	Danau Teluk	Olak Kemang						50	25
D.	**DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) IPAL KOMUNAL KOMBINASI MCK TAHUN 2017**								
1	Jambi Timur	Rajawali	-	-	-	-	-	25	13
							JUMLAH	**965**	
E.	**PROGRAM SANIMAS IsDB TAHUN 2018**								
1	Jelutung	Jelutung	RT. 32	1° 36’ 44”	103° 26’ 33”	BAMBU	BAMBU KUNING	53	27





No	Kecamatan	Kelurahan	Lokasi	Koordinat		Nama KSM	Nama KPP	JUMLAH	KAPASITAS
						KUNING			
2	Jelutung	Kebun Handil	RT 04	1° 37′ 44″	103° 37′ 10″	DAMAI SEJAHTERA	DAMAI SEJAHTERA	52	27
3	Danau teluk	Olak Kemang	RT 05	1° 35′ 35″	103° 36′ 21″	FAJAR BARU	KPP IKHSANIYAH	66	27
4	Pelayangan	Mudung Laut	RT 07	1° 37′ 44″	103° 37′ 10″	MANDIRI	MANDIRI	54	27
5	Jambi Timur	Tanjung Sari	RT 21	1° 35′ 24″	103° 38′ 01″	KAMPUNG ASRI	KAMPUNG ASRI	56	27
6	Telanaipura	Telanaipura	RT. 06	1° 36′ 45″	103° 34′ 49″	PANCASILA	PANCASILA	56	27
7	Alam Barajo	Bagan Pete	RT 10	1° 39′ 13″	103° 33′ 51″	PATTISASI 151	PATTISASI 151	53	27
8	Alam Barajo	Bagan Pete	RT 35	1° 39′ 13″	103° 33′ 51″	MILAN	MILAN	71	27
							JUMLAH	**461**	
F.	**PROGRAM SANIMAS IsDB TAHUN 2019**								
1	Jambi Timur	Rajawali	RT. 01	1° 35′ 21″	103° 37′ 14″	Melati	Melati	50	27
2	Alam Barajo	Rawasari	RT 19	1° 3731′	103° 33′ 52″	KSM SEKAR	KSM SEKAR	50	27
3	Alam Barajo	Rawasari	RT 26	1° 29′ 31″	103° 30′ 13″	JAYA BERSAMA	SIDO ARUM JAYA	50	27
4	Danau teluk	Olak Kemang	RT 04	1° 35′ 5″	103° 36′ 3″	KSM SKIN DALAM	KPP GOTONG ROYONG	50	27
5	Jambi Timur	Talang Banjar	RT. 32	1° 36′ 15″	103° 38′ 12″	Kamboja	Kamboja	50	27
6	Alam Barajo	Kenali Besar	RT 31	1° 37′ 39″	103° 32′ 34″	AL IKHLAS	AL IKHLAS	50	27
7	Pelayangan	Mudung Laut	RT 04	1° 35′ 00″	103° 36′ 41″	SEJAHTERA MD	ANUGRAH	50	27
8	Jelutung	Handil Jaya	RT 01	1° 38′ 09″	103° 33′ 21″	Bantar Jaya	Bantar Jaya	50	27
9	Danau Sipin	Solok Sipin	RT 14	1° 36′ 19″	103° 35′ 53″	EMPU GANDRING 2 BANGKIT	EMPU GANDRING 2 BANGKIT	50	27
10	Danau Sipin	Legok	RT 16	1° 35′ 41.9″	103° 36′ 14.5″	CANDI BERJAYA	CANDI BERJAYA	50	27
11	Danau Sipin	Legok	RT 29	1° 35′ 30,3″	103° 36′ 17,1″	PANDAN SERUMPUN	PANDAN SERUMPUN	50	27
12	Danau Sipin	Legok	RT 39	1° 35′ 57″	103° 35′ 13″	KSM PEDAS	SIPIN 39	50	27
							JUMLAH	**600**	
G.	**DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TAHUN 2020**								
1	Jelutung	Jelutung						50	27





No	Kecamatan	Kelurahan	Lokasi	Koordinat		Nama KSM	Nama KPP	JUMLAH	KAPASITAS
H.	**DANA APBD TAHUN 2021**								
1	Kota Baru	Kenali Asam Bawah	Pasar Paal X					42	27
I.	**DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TAHUN 2022**								
1	Jelutung	Jelutung						50	27
							TOTAL SR	**2880**	
							TOTAL UNIT	**57**	

Sumber: Dinas PUPR Kota Jambi Bidang Cipta Karya, Tahun 2023





4.2.7 Kerentanan Terhadap Perubahan Iklim

Kajian iklim oleh BAPPENAS pada 2012 memprakirakan bahwa pada masa yang akan datang secara umum curah hujan akan naik pada bulan basah dan turun pada bulan kering. Dengan demikian ancaman terhadap hujan lebat dan banjir semakin bertambah di samping faktor kapasitas lingkungan dalam menghadapi situasi curah hujan tinggi.

Sementara pada musim kemarau beberapa daerah yang jauh dari akses air akan mengalami ancaman kekeringan. Selain curah hujan, dalam kajian BAPPENAS menunjukkan bahwa kenaikan suhu akan terus terjadi baik secara global yang dipengaruhi oleh meningkatnya konsentrasi GRK di atmosfer dan secara mikro yang dipengaruhi oleh laju degradasi tutupan lahan yang terus meningkat. suhu secara global ini juga memicu terjadinya peningkatan cuaca ekstrem akibat terpengaruhnya cuaca global yang dipicu suhu udara dan permukaan laut.

Adanya peningkatan urbanisasi, menjadikan perlunya memahami dampak perubahan iklim terhadap lingkungan perkotaan. Lavell (1996) dalam IPCC, 2012 mengidentifikasi delapan konteks kondisi kota yang dapat meningkatkan atau berkontribusi terhadap risiko bencana dan kerentanan perubahan iklim:

1. Sinergitas sifat dan kebergantungan bagian-bagian kota
2. Kurangnya redundansi dalam fungsi transportasi, energi, dan sistem drainase
3. Konsentrasi fungsi wilayah kunci dan kepadatan bangunan serta populasi
4. Penempatan lokasi yang tidak tepat
5. segregasi sosial-spasial
6. Degradasi lingkungan
7. Kurangnya koordinasi kelembagaan
8. Kontradiksi fungsi kota sebagai suatu sistem yang berfungsi terpadu dan batas administrasi yang menghambat koordinasi

Perubahan iklim merupakan tantangan untuk wilayah perkotaan dan populasi yang diam di dalamnya. Dampak perubahan iklim di wilayah perkotaan





yaitu: kota-kota memiliki suhu yang lebih hangat dan lebih sering mengalami siang dan malam yang panas di banyak wilayah; sedikit hari dan malam yang dingin; peningkatan frekuensi angin/ gelombang; peningkatan frekuensi kejadian hujan deras di beberapa wilayah; penambahan daerah yang terkena bencana kekeringan; peningkatan aktivitas badai tropis yang intens, dan peningkatan insiden kenaikan permukaan air laut tinggi ekstrim (Mangiza, NDM, dkk:2011).

Dampak perubahan iklim secara global telah menjadi perhatian utama masyarakat internasional, termasuk Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang memiliki berbagai sumber daya alam, keanekaragaman hayati yang tinggi serta populasi penduduk yang sangat besar, Indonesia sangat rentan terhadap dampak negatif pemanasan global yang diakibatkan oleh meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer. Baik alami maupun antropogenik yang menyerap dan memancarkan Kembali radiasi inframerah. Inventarisasi GRK adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi mengenai tingkat, status dan kecenderungan perubahan emisi GRK secara berkala dari berbagai sumber emisi dan penyerapannya.

Berdasarkan kegiatan inventarisasi emisi gas rumah kaca (GRK) Kota Jambi tahun 2021 dilakukan melalui estimasi timbulan emisi yang dihasilkan dari masing-masing kegiatan pada 4 sektor yaitu sektor pengelolaan limbah, IPPU, energi dan AFOLU. Total besaran emisi GRK yang dihasilkan oleh 4 sektor perhitungan di Kota Jambi tahun 2021 adalah sebesar 3541,19 Gg CO2 Eq. Adapun hasil rekapitulasi GRK Kota Jambi tahun 2021 dari masing-masing sektor adalah sebagai berikut.

Tabel IV.2.30
Rekapitulasi Perhitungan Timbulan Emisi Gas Rumah Kaca Kota Jambi tahun 2021

No	Sektor	Emisi CO_2 Eq (Gg)	Emisi CH_4 Eq (Gg)	Emisi N_2O Eq (Gg)
1	Pengelolaan Limbah		34,67	
2	IPPU	0,19		
3	Energi	3.541,19	0,94	0,17
4	AFOLU	0,71	1,26	1,71
TOTAL		**3.542,09**	**36,87**	**1,88**

Sumber : Data Primer diolah, 2022





Berdasarkan Rekapitulasi Perhitungan Timbulan Emisi Gas Rumah Kaca Kota Jambi tahun 2021, timbulan emisi gas rumah kaca di Kota Jambi adalah sebesar 3.542,09 Gg CO_2 Eq, 36,87 CH4 Eq dan 1,88 N_2O Eq. Dari timbulan tersebut dan kemudian diperjelas dengan diketahui bahwa sektor Energi merupakan sektor kontributor terbesar untuk GRK Kota Jambi pada tahun 2021 dengan persentase sebesar 98,9 % dari total timbulan emisi.

4.2.8 Infrastruktur Transportasi dan Pola Pergerakan

Pola penggunaan lahan merupakan pembangkit utama pola pergerakan penduduk dalam suatu wilayah. Perbedaan lokasi antar fungsi lahan atau komponen-komponen guna lahan menimbulkan pergerakan penduduk dalam suatu wilayah tersebut. Dalam arti lain, Interaksi antar komponen pemanfaatan ruang yang paling umum tercermin dari aliran penduduk antar pusat-pusat kegiatan dalam suatu wilayah tersebut. Aliran jumlah kendaraan baik dalam bentuk tabel ataupun gambar ilustrasi, merupakan pendekatan yang paling umum dalah melihat keterkaitan antar komponen ruang. Dalam mendeskripsikan keterkaitan antar komponen ruang suatu wilayah melalu aliran pergerakan, tingkat keterkaitan dapat diamati dari besaran objek yang dialiri melalui jaringan prasarana utama dari fungsi lahan yang satu terhadap fungsi lahan yang lain. Bangkitan pergerakan pada sistem prasarana utama tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.2.31
Kinerja Lalu Lintas Kota Jambi

NO LINK	NAMA LINK	LEBAR LINK (meter)	PANJANG LINK (meter)	KAPASITAS (smp/jam)	VOLUME (smp/jam)	V/C RATIO	KECEPATAN (km/jam)
212	JL. SULTAN AGUNG	5	367	945	663	0,70	14
214	JL. SUMANTRI BROJONEGORO	5	1100	1372	1483	1,08	20
221	JL. PROF. DR. SRIDEWI	6	538	1083	1168	1,08	21
222	JL. SUMANTRI BROJONEGORO	6	1100	1184	505	0,43	22
223	JL. SUMANTRI BROJONEGORO	6	454	1468	315	0,21	23
231	JL. SUMANTRI BROJONEGORO	6	526	1800	979	0,54	24
232	JL. SUMANTRI BROJONEGORO	6	418	1800	628	0,35	23
241	JL. A. BAKARUDIN	6	216	1200	1207	1,01	11
242	JL. Ir. H. JUANDA	5	1600	1000	379	0,38	25
243	JL. A. BAKARUDIN	6	383	1200	679	0,57	17
251	JL. A. BAKARUDIN	6	383	1645	557	0,34	18





NO LINK	NAMA LINK	LEBAR LINK (meter)	PANJANG LINK (meter)	KAPASITAS (smp/jam)	VOLUME (smp/jam)	V/C RATIO	KECEPATAN (km/jam)
261	JL. ARIF RAHMAN HAKIM	5	1800	917	916	1,00	25
262	JL. A. BAKARUDIN	6	1000	1250	557	0,45	24
263	JL. KAPT. PATIMURA	6	2000	1019	1098	1,08	19
271	JL. KAPT. PATIMURA	6	1600	1627	1269	0,78	25
272	JL. LINGKAR BARAT III	7	5300	1010	209	0,21	33
273	JL. LINTAS TIMUR	7	3100	1292	763	0,59	28
281	JL. MARSDA SURYA DARMA	6	2200	831	891	1,07	24
282	JL. LINGKAR SELATAN	4	2000	577	622	1,08	23
283	JL. LINTAS SUMATERA	7	1000	1090	1004	0,92	29
284	JL. LINGKAR BARAT I	6	3300	969	332	0,34	31
291	JL. P. HIDAYAT	3	1600	1221	1314	1,08	24
292	JL. LIRIK	2,5	1400	342	61	0,18	23
293	JL. MARSDA SURYA DARMA	3	735	1019	1098	1,08	19
294	JL. SERMA SARNIEM	2,5	1500	342	169	0,49	25
2101	JL. Ir. H. JUANDA	3	1600	764	808	1,06	25
2102	JL. MULTATULI	2,5	1100	425	458	1,08	28
2103	JL. Ir. H. JUANDA	3	1100	546	409	0,75	23
2111	JL. RM. MARZUKI	4	1800	847	526	0,62	25
2112	JL. MAYJEND BASUKI RAHMAT	5	140	1760	1890	1,07	13
2113	JL. P. HIDAYAT	5	1600	1171	1260	1,08	25
2121	JL. HAYAM WURUK	5	1500	1089	994	0,91	25
2122	JL. D.I. PANJAITAN	6	424	1147	969	0,85	15
2123	JL. GAJAH MADA	5	1600	956	576	0,60	25
2131	JL. PROF. DR. M.YAMIN	6	1400	1200	389	0,32	18
2133	JL. PROF. DR. M.YAMIN	6	348	1200	346	0,29	14
2141	JL. PROF. DR. M.YAMIN	6	348	1200	159	0,13	16
2142	JL. RM. MARZUKI	6	1800	1200	668	0,56	23
2143	JL. HOS COKROAMINOTO	4	1700	800	713	0,89	24
2152	JL. PANGERAN DIPONEGORO	4	130	1333	1440	1,08	5
2153	JL. SUDIRMAN	4	1100	573	52	0,09	19
2154	JL. HAYAM WURUK	6	1500	1071	1165	1,09	22
2161	JL. ORANG KAYO HITAM	3	383	465	438	0,94	14
2162	JL. KH. HASYIM ASHARI	6	470	871	270	0,31	17
2163	JL. ORANG KAYO HITAM	3	645	613	663	1,08	17
2164	JL. PANGERAN DIPONEGORO	6	727	1077	1165	1,08	21
2171	JL. KOMPOL ZAINAL ABIDIN	6	506	828	401	0,48	18
2172	JL. ORANG KAYO HITAM	3	523	777	839	1,08	17
2173	JL. KOL. POL. M. TAHIR	5	696	690	416	0,60	20
2174	JL. ORANG KAYO PINGAI	6	645	892	601	0,67	18
2181	JL. KOMPOL AHMAD BASTARI	3	1800	586	216	0,37	36
2182	JL. AMANGKURAT	3	1400	501	540	1,08	26
2183	JL. KOMPOL ZAINAL ABIDIN	3	506	586	591	1,01	21
2184	JL. PANGLIMA POLIM	3	396	346	374	1,08	13
2191	JL. RADEN PAMUK	3	295	612	189	0,31	19
2192	JL. YOS SUDARSO	3	3200	652	702	1,08	28
2193	JL. BRIGJEND. KATAMSO	4	1800	768	121	0,16	42
2201	JL. RADEN PAMUK	3	1300	946	1018	1,08	26
2202	JL. RADEN PATAH	3	3100	1049	1127	1,07	25
2203	JL. RADEN PAMUK	3	295	479	485	1,01	15
2204	JL. DR. SETIA BUDI	6	1200	1103	1188	1,08	34
2211	JL. LINGKAR TIMUR I	4	351	621	458	0,74	17
2212	JL. YOS SUDARSO	6	1100	1034	1119	1,08	21
2213	JL. LINGKAR TIMUR I	6	4500	931	423	0,45	31
2214	JL. YOS SUDARSO	4	3200	579	310	0,53	28
2221	JL. SENTOT ALIBASYA	3	2400	392	317	0,81	22





NO LINK	NAMA LINK	LEBAR LINK (meter)	PANJANG LINK (meter)	KAPASITAS (smp/jam)	VOLUME (smp/jam)	V/C RATIO	KECEPATAN (km/jam)
2222	JL. LINGKAR TIMUR I	3	551	831	799	0,96	24
2223	JL. LINGKAR TIMUR II	5	183	962	601	0,62	10
2231	JL. KOL. POL. M. TAHIR	4	718	562	455	0,81	24
2233	JL. KOL. POL. M. TAHIR	4	824	562	570	1,01	22
2241	JL. LINGKAR TIMUR II	4	2300	523	266	0,51	18
2242	JL. LINGKAR SELATAN II	3,5	796	894	516	0,58	27
2251	JL. SOEKARNO HATTA	6	566	1200	901	0,75	18
2252	JL. SOEKARNO HATTA	6	1100	1200	648	0,54	22
2253	JL. A. RAHMAN SALEH	3	404	1050	1129	1,08	17
2261	JL. A. RAHMAN SALEH	3	404	1084	1167	1,08	19
2262	JL. A. RAHMAN SALEH	3	787	1142	1228	1,07	20
2263	JL. ADAM MALIK	4	1400	1145	1232	1,08	27
2271	JL. RADEN SALEH	4	787	1273	1369	1,08	20
2272	JL. LINGKAR SELATAN I	3	3500	801	861	1,08	31
2273	JL. LINGKAR SELATAN I	4	1300	727	436	0,60	30
2281	JL. LINGKAR SELATAN I	5	375	923	49	0,05	27
2282	JL. LINGKAR SELATAN I	5	1900	1154	101	0,09	33
2283	JL. KOPRAL UD. SARING	5	2300	923	360	0,39	30
2291	JL. SUMANTRI BROJONEGORO	6	454	1191	505	0,42	18
2292	JL. KOL. ABUNJANI	6	526	1142	1228	1,07	20
2293	JL. JEND. URIP SUMOHARJO	4	704	729	789	1,08	15
2301	JL. KOL. POL. M. TAHIR	3	824	498	455	0,91	26
2303	JL. KOL. POL. M. TAHIR	3	230	527	570	1,08	14
2311	JL. KOL. POL. M. TAHIR	3	696	641	210	0,33	27
2312	JL. BHAYANGKARA	4	919	814	245	0,30	29
2313	JL. KOL. POL. M. TAHIR	3	718	549	570	1,04	27
511	JL. PENYENGAT RENDAH	3	3200	1800	234	0,13	31
512	JL. LINTAS TIMUR	3	3200	1800	1907	1,06	34
513	JL. KH. NADJID JAMBI	2	3200	1200	708	0,59	31
514	JL. LINTAS TIMUR	3	6500	1800	55	0,03	34
521	JL. DR. SIWABESSY	3	3200	1800	1846	1,03	28
522	JL. ADE IRMA SURYANI	5	1800	3000	708	0,24	39
523	JL. MAYJEN SUTOYO	5	1200	3000	0	0,00	13
531	JL. MAYJEN SUTOYO	4	1200	2400	0	0,00	14
532	JL. ABDUL MANAF	4	498	2400	916	0,38	23
533	JL. ARIF RAHMAN HAKIM	4	1400	2400	0	0,00	29
541	JL. KAPTEN PATIMURA	5	756	3000	1473	0,49	37
542	JL. H. IBRAHIM	2	1800	1200	0	0,00	39
543	JL. KAPTEN PATIMURA	5	2600	3000	679	0,23	36
551	JL. LINTAS TIMUR	5	6500	3000	275	0,09	35
552	JL. LINTAS TIMUR	5	3100	3000	1478	0,49	33
553	JL. LINTAS TIMUR	5	4000	3000	817	0,27	39
561	JL. ADE IRMA SURYANI	5	1800	3000	1846	0,62	37
562	JL. HM. YUSUF SINGADEKANI	6	1300	3600	1108	0,31	26
563	JL. RE. MARTADINATA	6	1600	3600	302	0,08	28
564	JL. ABDUL MANAF	4	486	2400	0	0,00	27
571	JL. LETKOL SLAMET RIADI	6	1300	3600	1108	0,31	32
572	JL. PROF DR. SRI SOEDEWI	5	538	3000	0	0,00	36
573	JL. JEND. URIP SUMOHARJO	5	724	3000	0	0,00	24
574	JL. HM. YUSUF SINGADEKANI	6	1300	3600	1642	0,46	31
581	JL. KOL. ABUNJANI	6	418	3600	979	0,27	27
582	JL. HOS COKROAMINOTO	6	1700	3600	668	0,19	29
583	JL. A. BAKARUDIN	6	216	3600	901	0,25	23
591	JL. KEJAYAAN	2	1800	1200	204	0,17	30
5101	JL. SERSAN ANWAR BAY	2	2100	1200	204	0,17	35





NO LINK	NAMA LINK	LEBAR LINK (meter)	PANJANG LINK (meter)	KAPASITAS (smp/jam)	VOLUME (smp/jam)	V/C RATIO	KECEPATAN (km/jam)
5102	JL. LINGKAR BARAT II	4	2400	2400	209	0,09	37
5103	JL. LINGKAR BARAT III	4	5300	2400	84	0,03	37
5111	JL. KH. ISMAIL MALIK	3	3200	1800	45	0,02	30
5112	JL. LINGKAR BARAT I	4	3300	2400	357	0,15	35
5113	JL. LINGKAR BARAT II	4	2400	2400	287	0,12	35
5121	JL. SK. SYAHBUDDIN	4	1500	2400	1128	0,47	35
5122	JL. H. SULTHAN EDISON	4	1500	2400	455	0,19	34
5123	JL. KH. ISMAIL MALIK	4	3200	2400	148	0,06	31
5131	JL. MARSDA SURYA DARMA	3	735	1800	891	0,50	27
5132	JL. MARSDA SURYA DARMA	3	2200	1800	1198	0,67	30
5133	JL. SUNAN GUNUNG JATI	2	2100	1200	0	0,00	23
5141	JL. JALAK RAYA	4	2000	2400	829	0,35	32
5142	JL. H. AGUS SALIM	4	2000	2400	1034	0,43	33
5143	JL. MAYJEN BASUKI RAHMAT	4	452	2400	1439	0,60	29
5144	JL. ZAINIR HAVIZ	4	510	2400	738	0,31	40
5151	JL. D.I. PANJAITAN	3	424	1800	1374	0,76	20
5152	JL. D.I. PANJAITAN	3	1900	1800	194	0,11	28
5153	JL. SUMATERA	4	2000	2400	776	0,32	32
5161	JL. OTTO ISKANDAR DINATA	4	280	2400	571	0,24	35
5162	JL. HALIM PERDANA KUSUMA	4	625	2400	52	0,02	29
5163	JL. HALIM PERDANA KUSUMA	4	190	2400	1078	0,45	29
5171	JL. RADEN MARTAHER	4	200	2400	330	0,14	15
5172	JL. RADEN MARTAHER	3	135	1800	1483	0,82	16
5173	JL. HALIM PERDANA KUSUMA	4	190	2400	623	0,26	24
5181	JL.ORANG KAYO HITAM	3	287	1800	438	0,24	27
5182	JL.ORANG KAYO HITAM	3	383	1800	571	0,32	30
5183	JL.OTTO ISKANDAR DINATA	4	280	2400	0	0,00	23
5191	JL.DEWI SARTIKA	6	201	3600	330	0,09	28
5192	JL. M. HUSNI THAMRIN	8	396	4800	1358	0,28	26
5201	JL.M. HUSNI THAMRIN	6	831	3600	1358	0,38	27
5202	JL. JEMBATAN MAKALAM	7	300	4200	946	0,23	30
5203	JL. M. HUSNI THAMRIN	5	695	3000	1252	0,42	23
5211	JL. SULTAN THAHA	8	1400	4800	0	0,00	16
5212	JL. KH AHMAD DAHLAN	5	265	3000	2893	0,96	15
5221	JL. SULTAN THAHA	8	497	4800	1786	0,37	24
5231	JL. SULTAN THAHA	8	655	4800	1456	0,30	21
5232	JL. RADEN PAMOK	7	831	4200	1483	0,35	35
5241	JL.RADEN MATTAHER	7	467	4200	1921	0,46	21
5242	JL.ORANG KAYO HITAM	5	287	3000	0	0,00	31
5251	JL. DR. SETIA BUDI	4	1200	2400	130	0,05	44
5252	JL. PANGLIMA POLIM	3	396	1800	700	0,39	21
5253	JL. KH HASYIM AZHARI	4	270	2400	1003	0,42	20
5261	JL. RADEN FATAH	5	3100	3000	2017	0,67	28
5262	JL. LINGKAR TIMUR I	4	2500	2400	1300	0,54	41
5263	JL. LINGKAR TIMUR I	5	367	3000	613	0,20	40
5271	JL. LINGKAR TIMUR I	4	4500	2400	314	0,13	33
5272	JL. KASANG PUDAK	2	1400	1200	61	0,05	36
5273	JL. LINGKAR TIMUR I	4	579	2400	806	0,34	34
5274	JL. LINGKAR TIMUR I	4	551	2400	871	0,36	43
5291	JL. JENDRAL SUDIRMAN	5	355	3000	446	0,15	25
5292	JL. KOL POL M TAHER	3	230	1800	455	0,25	27
5293	JL. SOEKARNO HATTA	5	566	3000	622	0,21	26
5301	JL. JENDRAL SUDIRMAN	5	883	3000	446	0,15	27
5303	JL. JENDRAL SUDIRMAN	5	355	3000	48	0,02	23
5311	JL. JENDRAL SUDIRMAN	5	1100	3000	446	0,15	31





NO LINK	NAMA LINK	LEBAR LINK (meter)	PANJANG LINK (meter)	KAPASITAS (smp/jam)	VOLUME (smp/jam)	V/C RATIO	KECEPATAN (km/jam)
5313	JL. JENDRAL SUDIRMAN	5	883	3000	52	0,02	22
5321	JL. KONSULIDASI TALANG BAKUNG	1,5	1500	900	24	0,03	31
5322	JL. SULTAN HASSANUDIN	1,5	1900	900	708	0,79	27
5323	JL. KAPT. UD SUNARYO	2,5	893	1500	685	0,46	36
5324	JL. LINGKAR SELATAN II	3	796	1800	266	0,15	33
5331	JL. BERBAH	4	1900	2400	420	0,17	30
5332	JL. SULTAN HASSANUDIN	4	1900	2400	301	0,13	29
5333	JL. SULTAN HASSANUDIN	4	1900	2400	467	0,19	28
5341	JL. KAPT. UD SUNARYO	3	893	1800	655	0,36	34
5342	JL. KOPRAL SARING	3	2300	1800	149	0,08	30
5343	JL. KOPRAL SARING	3	1100	1800	889	0,49	28
5351	JL. LINGKAR SELATAN I	3,5	2300	2100	495	0,24	29
5352	JL. DARMAPALA	2	1200	1200	390	0,32	24
5353	JL. LINGKAR SELATAN I	3,5	3500	2100	756	0,36	31
5361	JL. LINGKAR SELATAN I	3	1300	1800	682	0,38	30
5362	JL. LINGKAR SELATAN I	3	1400	1800	458	0,25	30
5363	JL. DHARMAWANGSA	3	3400	1800	43	0,02	27
5371	JL. RONI SANI	2,5	593	1500	352	0,23	33
5372	JL. DHARMAWANGSA	3	882	1800	22	0,01	32
5373	JL. DHARMAWANGSA	3	363	1800	516	0,29	29
5381	JL. MAYOR BRORI MANSYUR	4	988	2400	290	0,12	32
5382	JL. DHARMAWANGSA	3	363	1800	375	0,21	30
5383	JL. DHARMAWANGSA	3	770	1800	840	0,47	36
5391	JL. RONI SANI	2,5	873	1500	352	0,23	28
5393	JL. RONI SANI	2,5	593	1800	473	0,26	29
5411	JL. ADAM MALIK	3	1400	1800	1128	0,63	34
5413	JL. ADAM MALIK	3	326	1800	1232	0,68	36
5421	JL. YUNUS SANIS	3	1900	1800	577	0,32	40
5422	JL. ADAM MALIK	3,5	326	2100	1128	0,54	29
5423	JL. RONI SANI	3	873	1800	473	0,26	32
5424	JL. H. AGUS SALIM	3,5	2000	2100	633	0,30	31
5431	JL. LETKOL SLAMET RIADI	5	1300	3000	0	0,00	27
5432	JL. LETKOL SLAMET RIADI	5	1400	3000	1108	0,37	30
5433	JL. MALIK IBRAHIM	2,5	794	1500	0	0,00	29
5441	JL. SULTAN AGUNG	3,5	367	2100	1252	0,60	21
5442	JL. M. HUSNI THAMRIN	6	695	3600	663	0,18	21
5451	JL. HALIM PERDANA KUSUMA	3	625	1800	1078	0,60	29
5452	JL. PANGERAN DIPONEGORO	5	727	3000	362	0,12	33
5453	JL. PANGERAN DIPONEGORO	5	130	3000	1218	0,41	27
5461	JL. LINGKAR TIMUR II	4	183	2400	214	0,09	16
5462	JL. SERSAN DARPIN	3	3900	1800	136	0,08	26
5463	JL. LINGKAR TIMUR II	4	2300	2400	516	0,22	22
5471	JL. BHAYANGKARA	3	501	1800	532	0,30	34
5472	JL. SENTOT ALIBASYA	3	2400	1800	632	0,35	25
5473	JL. BHAYANGKARA	3	919	1800	154	0,09	37
5474	JL. ORANG KAYO PINGAI	3	523	1800	792	0,44	20
5481	JL. M. KUKUH	3	2000	1800	290	0,16	29
5483	JL. MAYOR BRORI MANSYUR	3	988	1800	324	0,18	29
5491	JL. MULTATULI	2,5	1100	1500	169	0,11	30
5492	JL. SERMA SARNIEM	2,5	1500	1500	359	0,24	30
5493	JL. SUNAN GUNUNG JATI	2,5	2100	1500	100	0,07	25
5501	JL. M. HUSNI THAMRIN	5	396	3000	330	0,11	21
5502	JL. RADEN MARTAHER	5	200	3000	1358	0,45	20
5512	JL. DHARMAWANGSA	2,5	3400	1500	22	0,01	29



NO LINK	NAMA LINK	LEBAR LINK (meter)	PANJANG LINK (meter)	KAPASITAS (smp/jam)	VOLUME (smp/jam)	V/C RATIO	KECEPATAN (km/jam)
5513	JL. DHARMAWANGSA	2,5	882	1500	43	0,03	31
5521	JL. MAYJEND BASUKI RAHMAT	3	452	1800	1603	0,89	21
5522	JL. M. KUKUH	2	2000	1200	324	0,27	27
5523	JL. MAYJEND BASUKI RAHMAT	3	140	1800	1693	0,94	26

Sumber : Dishub Kota Jambi Tahun 2016

Dari tabel diatas dapat terlihat pada dasarnya bangkitan pergerakan masih cenderung lebih besar berada pada ruas-ruas jalan utama yang menghubungkan pusat-pusat utama di Kota Jambi, seperti Kawasan CBD (BWP I), Perkantoran Pemerintah Provinsi Jambi di Telanai, Perkantoran Pemerintah Kota Jambi (BWP IV), dan pusat perlayanan transportasi, seperti Kawasan Bandar Udara di BWP III.

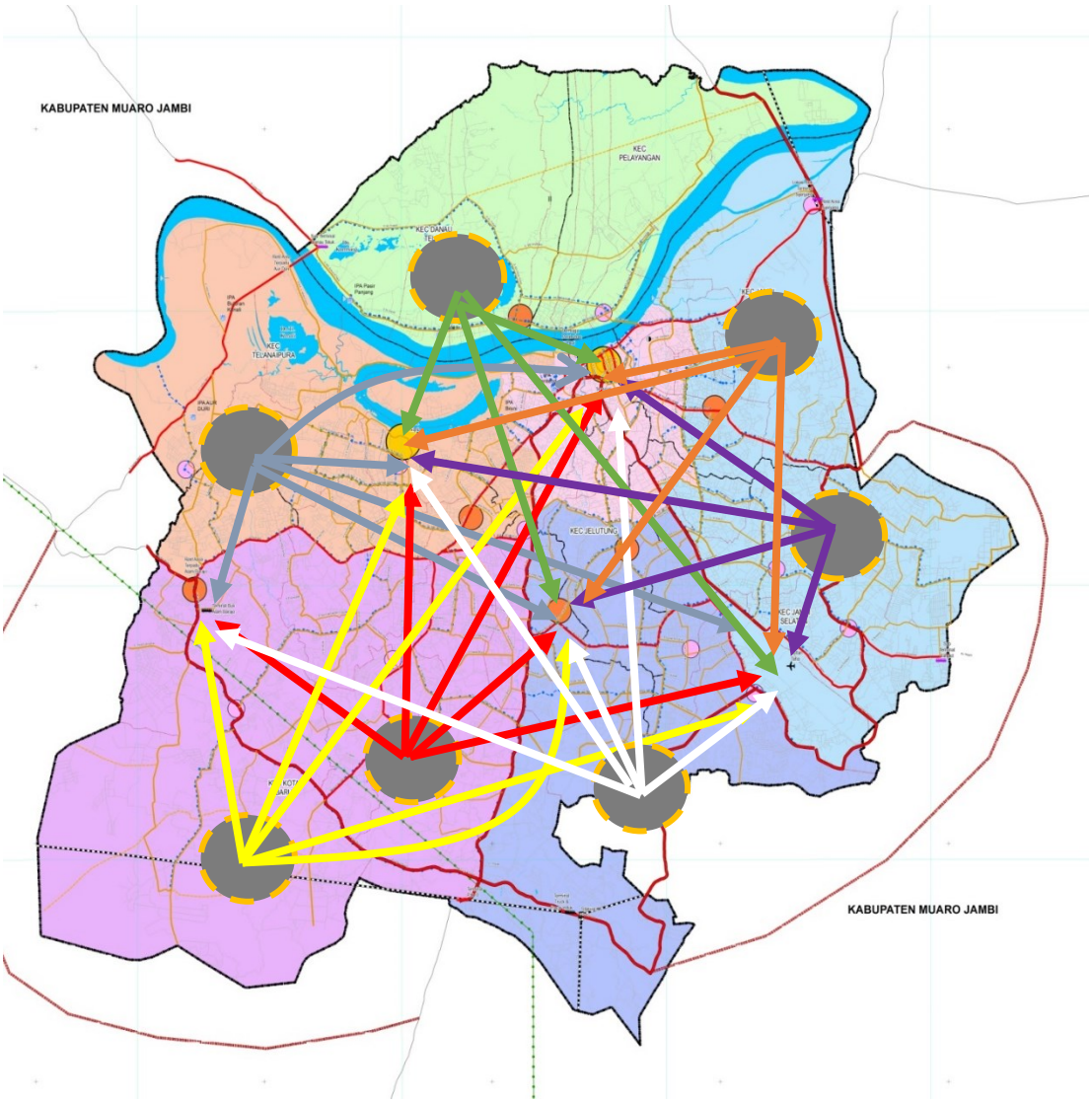

Gambar 4.2.42
Ilustrasi Interaksi Antar Komponen Ruang





BAB V

ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR TPB PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Updating Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDG's Kota Jambi menggunakan data tahun dasar 2022 dan data capaian tahun 2022. Data capaian pada 2022 berasal dari Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab pada capaian indikator tujuan pembangunan berkelajutan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG`s) Kota Jambi merupakan kebijakan yang bersifat strategis Pemerintah Kota Jambi dalam rangka mendukung komitmen pencapaian target-target TPB/SDG`s ditingkat nasional sebagaimana telah dijabarkan dalam tujuan, target, dan indikator. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's) yang menjadi kewenangan Kota Jambi berisikan 15 tujuan dengan 111 indikator. Pencapaian indikator TPB pada organisasi perangkat daerah di Kota Jambi, sebagai berikut:

1. Tujuan 1 Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun, untuk mencapai Tujuan 1 tersebut dapat dilihat dari capaian indikator diterjemahkan kedalam 5 target dengan 10 indikator.

   Rerata capaian Tujuan 1 pada tahun 2022 sebesar 10% tercapai, 50% belum tercapai dan 40% belum tersedia data.

   Pencapaian kinerja target pada tujuan 1 ini menjadi kewenangan/tugas fungsi dari Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dam BKAD.





Tabel V.1
Keterkaitan TPB Terhadap Program Organisasi Perangkat Daerah

Tujuan	Indikator		Program	OPD
Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk di Manapun	1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim.		Bappeda
	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.		Dinas Sosial
	1.2.2*	Presentase laki – laki, perempuan dan anak – anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definsi nasional.		Bappeda
	1.3.1*	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan		Dinas Kesehatan
	1.3.1 (a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan		Dinas Kesehatan
	1.3.1 (b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Sosial
	1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.		Bappeda
	1.4.2*	Proporsi dan penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.	Program Pengelolaan Pendapatan daerah - Pengelolaan Pendapatan Daerah - Penilaian pajak dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	BKAD
	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak	Program Penanganan Bencana - Perlindungan	Dinas Sosial





Tujuan	Indikator		Program	OPD
		bencana per 100.000 orang	Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Jd; Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
	1.5.4*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional	Program Penanganan Bencana - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Jd; Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Dinas Sosial

Berdasarkan hasil rekapitulasi capaian TPB dan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pada tujuan 1 belum mencapai target dan terdapat beberapa indikator tidak memiliki data. Untuk itu perlu adanya penambahan dan peningkatan program untuk memaksimalkan target capaian TPB.

- Pencapaian indikator 1.1.1, 1.2.1 dan 1.2.2 belum mencapai target dan tidak memiliki target pada tahun 2022. Untuk itu perlu adanya penambahan program untuk memaksimalkan target capaian TPB oleh Bappeda.
- Pencapaian indikator 1.3.1 dan 1.3.1.a belum mencapai target dan tidak memiliki target pada tahun 2022. Untuk itu perlu adanya penambahan program untuk memaksimalkan target capaian TPB oleh Dinas Kesehatan.
- Pencapaian indikator 1.3.1.b menjadi kewenangan Dinas Kesehatan Kota Jambi, dimana pada tahun 2022 telah melaksanakan program Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, namun capaian target belum termuat pada program tersebut.
- Pencapaian indikator 1.4.1 belum mencapai target dan tidak memiliki target pada tahun 2022. Untuk itu perlu adanya penambahan program untuk memaksimalkan target capaian TPB oleh Bappeda.





- Pencapaian indikator 1.4.2 belum mencapai target dan tidak memiliki target pada tahun 2022. Untuk itu perlu adanya penambahan program untuk memaksimalkan target capaian TPB oleh BKAD.
- Pencapaian indikator 1.5.1 dan 1.5.4 menjadi kewenangan Dinas Sosial telah melaksanakan program Penanganan Bencana. Namun capaian indikator tersebut belum ditargetkan sebelumnya dan data capaian tersebut tidak tersedia.

2. Tujuan 2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan, untuk mencapai Tujuan 2 tersebut dapat dilihat dari capaian indikator diterjemahkan kedalam 3 target dengan 3 indikator.

   Rerata capaian Tujuan 2 pada tahun 2022 sebesar 33,3% tercapai, 33,3% belum tercapai dan 33,3% belum tersedia data.

   Pencapaian kinerja target pada tujuan 2 ini menjadi kewenangan/tugas fungsi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi.

Tabel V.2
Keterkaitan TPB Terhadap Program Organisasi Perangkat Daerah

Tujuan	Indikator		Program	OPD
Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2.4.1 (a)	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan	-	Dinas PUPR Kota Jambi
	2.a.1*	Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah	Program Pengelolaan Pendapatan daerah	Dinas Ketahanan Pangan Kota Jambi
	2.c.1*	Indikator anomali harga pangan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat - Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kab./kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	Dinas Ketahanan Pangan Kota Jambi





Berdasarkan hasil rekapitulasi capaian TPB dan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pada tujuan 2.a.1 dan 2.c.1 belum mencapai target dan tidak memiliki target pada tahun 2022. Untuk itu perlu adanya penambahan program untuk memaksimalkan target capaian TPB oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Jambi.

3. Tujuan 3 Menjamin Kehidupan Yang Sehat Dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia, untuk mencapai Tujuan 3 tersebut dapat dilihat dari capaian indikator diterjemahkan kedalam 7 target dengan 14 indikator. Rerata capaian Tujuan 3 pada tahun 2022 sebesar 14,29% tercapai, 21,43% belum tercapai dan 64,29% belum tersedia data.

   Pencapaian kinerja target pada tujuan 3 ini menjadi kewenangan/tugas fungsi dari Dinas Kesehatan dan Badan Narkotika Nasional Kota Jambi.

Tabel V.3
Keterkaitan TPB Terhadap Program Organisasi Perangkat Daerah

Tujuan	Indikator		Program	OPD
Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan Kota Jambi
	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan Kota Jambi
	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1.000 orang	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat -	Dinas Kesehatan Kota Jambi





Tujuan	Indikator		Program	OPD
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
	3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan Kota Jambi
	3.3.5	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan Kota Jambi
	3.4.1 (a)	Persentase merokok pada penduduk usia 10-18 tahun.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Dinas Kesehatan Kota Jambi
	3.4.1 (b)	Prevalensi tekanan darah tinggi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - engelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dinas Kesehatan Kota Jambi
	3.4.1 (c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.		Dinas Kesehatan Kota Jambi
	3.5.1 (b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat -	BNN





Tujuan	Indikator		Program	OPD
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	
	3.8.1*	Cakupan pelayanan kesehatan essensial	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan Kota Jambi
	3.8.1 (a)	Unmet Need Pelayanan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan Kota Jambi
	3.8.2 (a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan Kota Jambi
	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Dinas Kesehatan Kota Jambi
	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan - Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan Kota Jambi





Berdasarkan hasil rekapitulasi capaian TPB dan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pada tujuan 3 terdapat beberapa indicator yang belum mencapai target dan tidak memiliki data. Untuk itu perlu adanya penambahan dan peningkatan program untuk memaksimalkan target capaian TPB.

- Pencapaian indikator 3.1.1* dan 3.1.2 menjadi kewenangan Dinas Kesehatan Kota Jambi, dimana pada tahun 2022 sudah terdapat data namun belum terdapat capaian target dan program. Untuk itu perlu adanya penambahan program.
- Pencapaian indikator 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.4.1.(a), 3.4.1.(b) dan 3.4.1.(c) menjadi kewenangan Dinas Kesehatan Kota Jambi dimana pada tahun 2022 1 indikator tersebut telah mencapai target dan 4 indikator belum tersedia data. Maka dari itu dinas Kesehatan Kota Jambi diharapkan menambah program yang lebih spesifik untuk mencapai target.
- Pencapaian indikator 3.5.1.(b) menjadi kewenangan BNN Kota Jambi. dimana pada tahun 2022 indikator tersebut belum tersedia data dan telah melaksanakan program Program Pemenuhan Upaya Kesehatan - Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA. Untuk itu perlu adanya pendataan untuk mengetahui tercapai atau tidak tercapainya indikator 3.5.1.(b)
- Pencapaian indikator 3.8.1*, 3.8.1.(a) dan 3.8.2.(a) masih belum mencapai target dan perlu peningkatan dengan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan - Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk - UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dari dinas Kesehatan.
- Pencapaian indikator 3.a.1 menjadi kewenangan dinas Kesehatan Kota Jambi, dimana pada tahun 2022 sudah terdapat data namun belum terdapat capaian target. Untuk itu perlu adanya penambahan program terkait indikator tersebut.





- Pencapaian indikator 3.c.1 menjadi kewenangan Dinas Kesehatan Kota Jambi, dimana pada tahun 2022 tidak ada data dan belum terdapat capaian target. Untuk itu perlu adanya penambahan program oleh Dinas Kesehatan Kota Jambi.

4. Tujuan 4 Menjamin Kualitas Pendidikan Yang Inklusif Dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua, untuk mencapai Tujuan 4 tersebut dapat dilihat dari capaian indikator diterjemahkan kedalam 6 target dengan 8 indikator.

   Rerata capaian Tujuan 4 pada tahun 2022 sebesar 25% tercapai, 62,50% belum tercapai dan 12,50% belum tersedia data.

   Pencapaian kinerja target pada tujuan 4 ini menjadi kewenangan/tugas fungsi dari Dinas Pendidikan Kota Jambi.

Tabel V.4
Keterkaitan TPB Terhadap Program Organisasi Perangkat Daerah

Tujuan	Indikator		Program	OPD
Menjamin Kualitas Pendidikan Yang Inklusif Dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua	4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat.	• Program Pengelolaan Pendidikan - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar • Program Pengelolaan Pendidikan - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan Kota Jambi
	4.1.2 (a)	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/ sederajat	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan Kota Jambi
	4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.		Dinas Pendidikan Kota Jambi
	4.3.1*	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin	Program Pengelolaan Pendidikan - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan Kota Jambi





Tujuan	Indikator		Program	OPD
	4.3.1 (a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).		Dinas Pendidikan Kota Jambi
	4.4.1 (a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).		Dinas Pendidikan Kota Jambi
	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Jambi
	4.6.1 (a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	program Pengelolaan Pendidikan - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan Kota Jambi

Berdasarkan hasil rekapitulasi capaian TPB dan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pada tujuan 4 masih terdapat indikator yang mencapai target dan beberapa indikator tidak memiliki data. Untuk itu perlu adanya penambahan dan peningkatan program untuk memaksimalkan target capaian TPB.

- Pencapaian indikator 4.1.2* dan 4.1.2.(a) menjadi kewenangan dinas Pendidikan Kota Jambi, dimana pada tahun 2022 sudah terdapat data namun belum terdapat capaian target.
- Pencapaian indikator 4.2.2* dan 4.3.1* menjadi kewenangan dinas Pendidikan Kota Jambi, dimana pada tahun 2022 sudah terdapat data namun belum terdapat capaian target.
- Pencapaian indikator 4.3.1.(a) dimana pada tahun 2022 tidak ada data dan belum terdapat capaian target. Untuk itu perlu adanya penambahan program oleh Dinas Pendidikan Kota Jambi.
- Pencapaian indikator 4.4.1.(a) menjadi kewenangan dinas Pendidikan Kota Jambi, dimana pada tahun 2022 sudah terdapat data namun belum terdapat capaian target.





- Pencapaian indikator 4.5.1* menjadi kewenangan dinas Pendidikan Kota Jambi, pada tahun 2022 hampir mencapai target dengan bantuan program Pengelolaan Pendidikan. Maka dari itu diperlukan program yang lebih spesifik untuk mencapai target indikator.
- Pencapaian indikator 4.6.1.(a) menjadi kewenangan dinas Pendidikan Kota Jambi, dimana pada tahun 2022 sudah terdapat data namun belum terdapat capaian target.

5. Tujuan 5 Mencapai Kesetaraan Gender Dan Memberdayakan Kaum Perempuan, untuk mencapai Tujuan 5 tersebut dapat dilihat dari capaian indikator diterjemahkan kedalam 3 target dengan 3 indikator.

   Rerata capaian Tujuan 5 pada tahun 2022 sebesar 33,33% tercapai, 33,33% belum tercapai dan 33,3% belum tersedia data.

   Pencapaian kinerja target pada tujuan 5 ini menjadi kewenangan/tugas fungsi dari Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi dan Diskominfo Kota Jambi.

Tabel V.5
Keterkaitan TPB Terhadap Program Organisasi Perangkat Daerah

Tujuan	Indikator		Program	OPD
Mencapai Kesetaraan Gender Dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah		Kesbangpol
	5.6.2*	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan Pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi
	5.b.1*	Proporsi individu yang memiliki telepon genggam.		Diskominfo Kota Jambi

Berdasarkan hasil rekapitulasi capaian TPB dan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pada tujuan 5 masih terdapat indikator yang mencapai target dan beberapa indikator tidak memiliki data. Untuk itu perlu adanya penambahan dan peningkatan program untuk memaksimalkan target capaian TPB.





- Pencapaian indikator 5.5.1* pada tahun 2022 sudah terdapat data namun belum terdapat capaian target.
- Pencapaian indikator 5.6.2* menjadi kewenangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi, dimana pada tahun 2022 tidak ada data dan belum terdapat capaian target. Untuk itu perlu adanya penambahan program oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi.
- Pencapaian indikator 5.b.1* pada tahun 2022 sudah terdapat data namun belum terdapat capaian target.

6. Tujuan 6 yaitu menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berbasis untuk semua, untuk mencapai Tujuan 6 dapat dilihat dari capaian indikator diterjemahkan kedalam 4 target dengan 5 indikator.

   Rerata capaian Tujuan 6 pada tahun 2022 sebesar 40% tercapai, 0% belum tercapai dan 60% belum tersedia data.

   Pencapaian kinerja target pada tujuan 6 ini menjadi kewenangan/tugas fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR Kota Jambi





Tabel V.6
Keterkaitan TPB Tujuan 6 Terhadap Program Organisasi Perangkat Daerah

Tujuan	Indikator		Program	OPD
AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK	6.1.1	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	1. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Dinas PUPR
	6.2.1	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	1. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Dinas PUPR
	6.3.1 (a)	Persentase limbah cair industri cair yang diolah secara aman	1. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengeloaan lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
	6.4.2. (a)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya		Dinas PUPR
	6.4.2. (b)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaanya		Dinas PUPR

Berdasarkan hasil rekapitulasi capaian TPB dan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pada tujuan 6 belum mencapai target dan terdapat beberapa indicator tidak memiliki data. Untuk itu perlu adanya penambahan dan peningkatan program untuk memaksimalkan target capaian TPB.

- Pencapaian indikator 6.1.1 menjadi kewenangan Dinas PUPR Kota Jambi, dimana pada tahun 2022 telah melaksanakan program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, capaian indikator tersebut memiliki nilai yang belum mencapai target nasional.





- Pencapaian indikator 6.2.1 menjadi kewenangan Dinas PUPR Kota Jambi, dimana pada tahun 2022 telah melaksanakan program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah. capaian indikator tersebut belum mencapai target nasional.
- Pencapaian indikator 6.3.1 (a) menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, dimana pada tahun 2022 telah melaksanakan program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengeloaan lingkungan, namun capaian target dan realisasi indikator belum termuat pada program tersebut.
- Pencapaian indikator 6.4.2 (a) menjadi kewenangan Dinas PUPR Kota Jambi, namun realisasi indikator tersebut ada tahun 2022 tidak ada data, serta serta tidak ditargetkan pada tahun 2022. Untuk itu perlu adanya penambahan program oleh Dinas PUPR Kota Jambi.
- Pencapaian indikator 6.4.2 (b) menjadi kewenangan Dinas PUPR Kota Jambi, namun realisasi indikator tersebut ada tahun 2022 tidak ada data, serta serta tidak ditargetkan pada tahun 2022. Untuk itu perlu adanya penambahan program oleh Dinas PUPR Kota Jambi.

7. Tujuan 7 yaitu menjamin akses energi yang terjangkau,andal, berkelanjutan dan modern untuk semua, untuk mencapai Tujuan 7 dapat dilihat dari capaian indikator diterjemahkan kedalam 2 target dengan 3 indikator.

   Rerata capaian Tujuan 7 pada tahun 2022 sebesar 66,67% tercapai, 33,33% belum tercapai dan 0% belum tersedia data.

   Pencapaian kinerja target pada tujuan 7 ini menjadi kewenangan/tugas fungsi dari Sekretariat Daerah.





Tabel V.7
Keterkaitan TPB Tujuan 7 Terhadap Program Organisasi Perangkat Daerah

Tujuan	Indikator		Program	OPD
ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU	7.1.1*	menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern		Sekretariat Daerah
	7.1.2 (a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga		Sekretariat Daerah
	7.1.2 (b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga		Sekretariat Daerah

Berdasarkan hasil rekapitulasi capaian TPB dan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pada tujuan 7 terdapat 3 indikator yang belum mencapai target dan tidak memiliki target pada tahun 2022. Untuk itu perlu adanya penambahan program untuk memaksimalkan target capaian TPB oleh sekretriat daerah.

8. Tujuan 8 yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua, untuk mencapai Tujuan 8 dapat dilihat dari capaian indikator diterjemahkan kedalam 2 target dengan 3 indikator.

   Rerata capaian Tujuan 8 pada tahun 2022 sebesar 33,33% tercapai, 66,67% belum tercapai dan 0% belum tersedia data.

   Pencapaian kinerja target pada tujuan 8 ini menjadi kewenangan/tugas fungsi dari Bappeda Kota Jambi





Tabel V.8
Keterkaitan TPB Tujuan 8 Terhadap Program Organisasi Perangkat Daerah

Tujuan	Indikator		Program	OPD
PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB perkapita		Bappeda
	8.1.1 (a)	PDB per kapita		Bappeda
	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.		Bappeda

Berdasarkan hasil rekapitulasi capaian TPB dan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pada tujuan 8 terdapat 3 indikator yang belum mencapai target dan tidak memiliki target pada tahun 2022. Untuk itu perlu adanya penambahan program untuk memaksimalkan target capaian TPB oleh Bappeda.

9. Tujuan 9 yaitu membangun infrastruktur yang Tangguh, meningkatkan industry inklusif yang berkelanjutan, serta mendorong inovasi, untuk mencapai Tujuan 9 dapat dilihat dari capaian indikator diterjemahkan kedalam 2 target dengan 3 indikator.

   Rerata capaian Tujuan 9 pada tahun 2022 sebesar 0% tercapai, 66,67% belum tercapai dan 33,33% belum tersedia data.

   Pencapaian kinerja target pada tujuan 9 ini menjadi kewenangan/tugas fungsi dari Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi.





Tabel V.9
Keterkaitan TPB Tujuan 9 Terhadap Program Organisasi Perangkat Daerah

Tujuan	Indikator		Program	OPD
INDUSTRI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	9.1.1 (a)	Kondisi mantap jalan nasional.	1. Program penyelenggaraan jalan	Dinas PUPR
	9.1.2*	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi	1. Program penyelenggaraan lalu lintas 2. Program pengelolaan pelayaran	Dinas Perhubungan
	9.2.1 (a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	1. Program perencanaan dan Pembangunan industri	Dinas Perindustrian dan perdagangan

Berdasarkan hasil rekapitulasi capaian TPB dan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pada tujuan 9 belum mencapai target dan terdapat beberapa indicator tidak memiliki data. Untuk itu perlu adanya penambahan dan peningkatan program untuk memaksimalkan target capaian TPB.

- Pencapaian indikator 9.1.1 (a) menjadi kewenangan Dinas PUPR Kota Jambi, dimana pada tahun 2022 realisasi indikator hampir mencapai target dan OPD tersebut telah melaksanakan program penyelenggaraan jalan.
- Pencapaian indikator 6.9.2 menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Jambi, dimana pada tahun 2022 telah melaksanakan program penyelenggaraan lalu lintas dan program pengelolaan pelayaran. namun capaian target dan realisasi indikator belum tertuang pada program tersebut.
- Pencapaian indikator 9.2.1 (a) menjadi kewenangan Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Jambi, dimana pada tahun 2022 telah melaksanakan program perencanaan dan Pembangunan industri, namun capaian target belum tertuang pada program tersebut.

10. Tujuan 10 yaitu mengurangi kesenjangan intra dan antar negara, untuk mencapai Tujuan 10 dapat dilihat dari capaian indikator diterjemahkan kedalam 6 target dengan 11 indikator.



Rerata capaian Tujuan 10 pada tahun 2022 sebesar 18,18% tercapai, 9,09% belum tercapai dan 72,73 % belum tersedia data.

Pencapaian kinerja target pada tujuan 10 ini menjadi kewenangan/tugas fungsi dari Bappeda, Polres Kota Jambi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Sekretariat Hukum, BKAD, Bank Indonesia dan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Jambi

Tabel V.10
Keterkaitan TPB Tujuan 10 Terhadap Program Organisasi Perangkat Daerah

Tujuan	Indikator		Program	OPD
BERKURANGNYA KESENJANGAN	10.1.1 (a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.		Bappeda
	10.1.1 (f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.		Bappeda
	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.		Bappeda
	10.3.1 (b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).		Polres Kota Jambi
	10.3.1 (c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia	1. Program pelindungan perempuan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota jambi





Tujuan	Indikator		Program	OPD
		(HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan		
	10.3.1 (d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM internasional		Sekretariat Hukum
	10.4.1 (b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	1. Program hubungan industrial	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Jambi
			2. Program pemberdayaan sosial	Dinas Sosial
	10.4.2	Dampak redistributif dari kebijakan fiskal.		BKAD Kota Jambi
	10.5.1 (a)	Indikator Kesehatan Perbankan.		Bank Indonesia
	10.7.2 (a)	Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan		Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Jambi
	10.7.2 (b)	Jumlah fasilitasi	1. Program rencana kerja	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM





Tujuan	Indikator		Program	OPD
		pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi		

Berdasarkan hasil rekapitulasi capaian TPB dan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pada tujuan 10 masih terdapat indikator yang mencapai target dan beberapa indikator tidak memiliki data. Untuk itu perlu adanya penambahan dan peningkatan program untuk memaksimalkan target capaian TPB.

- Pencapaian indikator 10.1.1 (a) menjadi kewenangan Bappeda Kota Jambi, dimana pada tahun 2022 sudah terdapat data namun belum terdapat capaian target dan program. Untuk itu perlu adanya penambahan program oleh Bappeda.
- Pencapaian indikator 10.1.1 (f) menjadi kewenangan Bappeda Kota Jambi, dimana pada tahun 2022 tidak ada data dan belum terdapat capaian target serta program. Untuk itu perlu adanya penambahan program oleh Bappeda.
- Pencapaian indikator 10.2.1* menjadi kewenangan Bappeda Kota Jambi, dimana pada tahun 2022 tidak ada data dan belum terdapat capaian target serta program. Untuk itu perlu adanya penambahan program oleh Bappeda.
- Pencapaian indikator 10.3.1 (b) menjadi kewenangan Polres Kota Jambi, dimana pada tahun 2022 tidak ada data dan belum terdapat capaian target serta program. Untuk itu perlu adanya penambahan program oleh Polres Kota Jambi.
- Pencapaian indikator 10.3.1 (c) menjadi kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi, dimana pada tahun 2022 indikator tersebut telah mencapai target dan telah melaksanakan program pelindungan perempuan.
- Pencapaian indikator 10.4.1 (b) menjadi kewenangan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Jambi Kota Jambi dan Dinas Sosial, dimana pada





tahun 2022 indikator belum ditargetkan seblumnya dan telah melaksanakan program berupa program hubungan industrial dan program pemberdayaan sosial.

- Pencapaian indikator 10.4.2 menjadi kewenangan BKAD Kota Jambi, dimana pada tahun 2022 tidak ada data dan belum terdapat capaian target serta program. Untuk itu perlu adanya penambahan program oleh BKAD Kota Jambi.
- Pencapaian indikator 10.7.2 (a) menjadi kewenangan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Jambi, dimana pada tahun 2022 tidak ada data dan belum terdapat capaian target serta program. Untuk itu perlu adanya penambahan program oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Jambi.
- Pencapaian indikator 10.4.1 (b) menjadi kewenangan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Jambi Kota Jambi dan Dinas Sosial, dimana pada tahun 2022 indikator belum ditargetkan seblumnya dan telah melaksanakan program berupa program hubungan industrial dan program pemberdayaan sosial.
- Pencapaian indikator 10.7.2 (b) menjadi kewenangan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Jambi, dimana pada tahun 2022 OPD telah melaksanakan program berupa program rencana tenaga kerja, namun target dan realisasi indikator belum tertuang pada program tersebut.

11. Tujuan 11 yaitu menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, Tangguh dan berkelanjutan, untuk mencapai Tujuan 11 dapat dilihat dari capaian indikator diterjemahkan kedalam 7 target dengan 11 indikator.

    Rerata capaian Tujuan 11 pada tahun 2022 sebesar 9,09% tercapai, 36,36% belum tercapai dan 54,55% belum tersedia data.

    Pencapaian kinerja target pada tujuan 11 ini menjadi kewenangan/tugas fungsi dari Dinas PUPR, BPKAD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi.





Tabel V.11
Keterkaitan TPB Tujuan 11 Terhadap Program Organisasi Perangkat Daerah

Tujuan	Indikator		Program	OPD
KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	11.3.1 (a)	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk		Dinas PUPR
	11.4.1 (a)	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP)		BPKAD
	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	1. Program penanganan bencana	Dinas Sosial
	11.5.2 (a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB	1. Program penanganan bencana	Dinas Sosial
	11.6.1 (a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya	1. Program pengembangan sistem dan pengelolaan persapahan regional	Dinas PUPR
			2. Program pengelolaan persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
	11.6.1 (b)	Persentase sampah nasional yang terkelola	1. Program pengembangan sistem dan pengelolaan persapahan regional	Dinas PUPR
			2. Program pengelolaan persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
	11.6.2 (a)	Rata-rata tahunan materi partikular halus PM 10	1. Program pengendalian peceamran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	11.6.2 (b)	Indeks Kualitas Udara	1. Program pengendalian penceamran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	11.7.1 (a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua	1. Program pengelolaan keanekaraganan hayati (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup
	11.b.2*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi	1. Program penanggulangan bencana	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan





Tujuan	Indikator		Program	OPD
		dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana		
	11.c.1 (a)	Persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan, dan menggunakan Material Lokal		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman

Berdasarkan hasil rekapitulasi capaian TPB dan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pada tujuan 11 masih terdapat indikator yang mencapai target dan beberapa indikator tidak memiliki data. Untuk itu perlu adanya penambahan dan peningkatan program untuk memaksimalkan target capaian TPB.

- Pencapaian indikator 11.3.1 (a) menjadi kewenangan Dinas PUPR Kota Jambi, dimana pada tahun 2022 tidak ada data dan belum terdapat capaian target serta program. Untuk itu perlu adanya penambahan program oleh Dinas PUPR Kota Jambi.
- Pencapaian indikator 11.5.1* menjadi kewenangan Dinas Sosial dan BPBD Kota Jambi, dimana pada tahun 2022 Dinas Sosial telah melaksanakan program berupa program penanganan becana, namun capaian target belum tertuang pada program tersebut dan perlu adanya penambahan program oleh Dinas Sosial Kota Jambi
- Pencapaian indikator 11.5.2 (a) menjadi kewenangan Dinas Sosial dan BPBD Kota Jambi, dimana pada tahun 2022 Dinas Sosial telah melaksanakan program berupa program penanganan becana, namun capaian dan realisasi





target belum termuat pada program tersebut dan perlu adanya penambahan program oleh Dinas Sosial Kota Jambi.

- Pencapaian indikator 11.6.1 (a) menjadi kewenangan Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, dimana pada tahun 2022 Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan program berupa program pengembangan sistem dan pengelolaan persapahan regional dan program pengelolaan persampahan, namun capaian target dan realisasi indikator belum termuat pada program-program tersebut.
- Pencapaian indikator 11.6.1 (b) menjadi kewenangan Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, dimana pada tahun 2022 Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan program berupa program pengembangan sistem dan pengelolaan persapahan regional dan program pengelolaan persampahan, namun indikator tersebut belum mencapai target.
- Pencapaian indikator 11.6.2 (a) menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, dimana pada tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan program berupa program pengendalian peceamran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, namun capaian target dan realisasi indikator belum termuat pada program tersebut.
- Pencapaian indikator 11.6.2 (b) menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, dimana pada tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan program berupa program pengendalian peceamran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, namun indikator tersebut belum mencapai target.
- Pencapaian indikator 11.7.1 (a) menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, dimana pada tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan program berupa program pengelolaan keanekaraganan hayati (KEHATI), namun indikator tersebut belum mencapai target dan belum ditargetkan sebelumnya.





- Pencapaian indikator 11.b.2* menjadi kewenangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, dimana pada tahun 2022 OPD tersebut telah melaksanakan program berupa program penanggulangan bencana, namun capaian target dan realisasi indikator belum termuat pada program tersebut.
- Pencapaian indikator 11.c.1 menjadi kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman Kota Jambi, namun realisasi indikator tersebut ada tahun 2022 tidak ada data, serta serta tidak ditargetkan pada tahun 2022. Untuk itu perlu adanya penambahan program oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi.

12. Tujuan 12 Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan, untuk mencapai Tujuan 12 tersebut dapat dilihat dari capaian indikator diterjemahkan kedalam 4 target dengan 8 indikator.

    Rerata capaian Tujuan 12 pada tahun 2022 sebesar 0% tercapai dan 37,50% belum ditargetkan, dimana nilai capian dengan kategori belum tercapai sebesar 25% dan belum tersedia data sebesar 75%. Pencapaian kinerja target pada tujuan 12 ini menjadi kewenangan/tugas fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup, Inspektorat Kota Jambi, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas Sosial dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.





Tabel V.12
Keterkaitan TPB Tujuan 12 Terhadap Program Organisasi Perangkat Daerah

Tujuan	Indikator		Program	OPD
KONSUMSI DAN PRODUKSI BERTANGGUNG JAWAB	12.3.1.(a)	Persentase Sisa Makanan		Dinas Lingkungan Hidup
	12.4.1.(a)	Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan Merkuri		Dinas Lingkungan Hidup
	12.4.2.*	(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengelolaannya	1. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Dinas Lingkungan Hidup
	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	1. Megurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	Dinas Lingkungan Hidup
	12.6.1*	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya	1. Program meningkatkan cakupan layanan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan berkelanjutan	Inspektorat Kota Jambi
	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.		Dinas Lingkungan Hidup
	12.8.1.(b)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan	Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas Sosial
	12.b.1(a)	Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Berdasarkan hasil rekapitulasi capaian TPB dan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pada tujuan 12 masih terdapat indikator yang belum mencapai target dan beberapa indikator tidak memiliki data. Untuk itu perlu adanya





penambahan dan peningkatan program untuk memaksimalkan target capaian TPB.

- Pencapaian indikator 12.3.1 (a) menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup, dimana pada tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup belum melaksanakan program, sehingga capaian target belum tertuang pada program tersebut dan perlu adanya penambahan program oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

- Pencapaian indikator 12.4.1(a) menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, dimana pada tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan program berupa Program pengendalian dan perusakan lingkungan hidup dan Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), namun capaian target belum tertuang pada program tersebut.
- Pencapaian indikator 12.4.2.* menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, dimana pada tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan program berupa Program pengendalian dan perusakan lingkungan hidup, dan Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3 namun capaian dan realisasi target belum termuat pada program tersebut dan perlu adanya penambahan program oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.
- Pencapaian indikator 12.5.1 (a) menjadi kewenangan Dinas Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, dimana pada tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan program berupa program megurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali dan Program Peningkatan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Dan Pengelolaan Persampahan, capaian target tahun 2022 sebesar 98%.
- Pencapaian indikator 12.6.1 (a) menjadi kewenangan Dinas Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, dimana pada tahun 2022 dan Dinas Lingkungan Hidup belum memiliki program. Untuk itu perlu adanya penambahan program oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.





- Pencapaian indikator 12.8.1 (b) menjadi kewenangan Dinas Kesehatan, Satpol PP dan Dinas Sosial, dimana pada tahun 2022 Dinas Dinas Kesehatan, telah melaksanakan program berupa Program Perencanaan SKPD, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan, namun indikator tersebut belum mencapai target dan belum ditargetkan sebelumnya.
- Pencapaian indikator 12.b.1 (a) menjadi kewenangan Dinas Pariwisata dan kebudayaan dimana pada tahun 2022 Dinas Pariwisata dan kebudayaan telah melaksanakan program berupa Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, namun indikator tersebut belum mencapai target dan belum ditargetkan sebelumnya.

13. Tujuan 13 Mengambil Tindakan Cepat Untuk Perubahan Iklim Dan Dampaknya, untuk mencapai Tujuan 13 tersebut dapat dilihat dari capaian indikator diterjemahkan kedalam 4 target dengan 2 indikator.

    Rerata capaian Tujuan 13 pada tahun 2022 sebesar 50% tercapai, dimana nilai capian dengan kategori belum tercapai sebesar 50% dan belum belum mencapai target sebesar 50%. Pencapaian kinerja target pada tujuan 13 ini menjadi kewenangan/tugas fungsi dari Dinas Sosial.





Tabel V.13
Keterkaitan TPB Tujuan 13 Terhadap Program Organisasi Perangkat Daerah

Tujuan	Indikator		Program	OPD
PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM	13.1.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Program Penanganan Bencana - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Jd; Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
	13.1.3*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana	Program Penanganan Bencana - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Jd; Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Dinas Sosial

- Pencapaian indikator 13.1.1.*menjadi kewenangan Dinas Sosial, dimana pada tahun 2022 Dinas Sosial memiliki program berupa Program Penanggulangan Bencana, Program Penanganan Bencana - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Jd; Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota, namun indikator tersebut belum mencapai target dan belum ditargetkan sebelumnya.
- Pencapaian indikator 13.1.2.* kewenangan Dinas Sosial, dimana pada tahun 2022 Dinas Sosial memiliki program berupa Program Penanggulangan Bencana, Program Penanganan Bencana - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Jd; Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota dari program tersebut capaian target yang dicapai sebesar 100% artinya tercapai dengan baik.





14. Tujuan 16 Menguatkan Masyarakat Yang Inklusif Dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, Dan Membangun Kelembagaan Yang Efektif, Akuntabel, Dan Inklusif Disemua Tingkatan, untuk mencapai Tujuan 16 tersebut dapat dilihat dari capaian indikator diterjemahkan kedalam 4 target dengan 20 indikator.

    Rerata capaian Tujuan 16 pada tahun 2022 sebesar 20% tercapai, dimana nilai capian dengan kategori belum tercapai sebesar 30% dan belum tersedia data sebesar 50%. Pencapaian kinerja target pada tujuan 16 ini menjadi kewenangan/tugas fungsi dari Polres, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bagian hukum sekretariat daerah, BPK, Inspektorat Jambi, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Bappeda.

Tabel V.14
Keterkaitan TPB Tujuan 16 Terhadap Program Organisasi Perangkat Daerah

Tujuan	Indikator		Program	OPD
PERDAMAIAN KEADILAN DAN KELEMBAGAAN TANGGUH	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.		Polres
	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.		Polres
	16.2.2*	Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
	16.3.1.(b)	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi		Bagian Hukum Sekretariat Daerah
	16.3.2.(a)	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan		Bagian Hukum Sekretariat Daerah





Tujuan	Indikator		Program	OPD
		terhadap seluruh jumlah tahanan.		
	16.3.3.(a)	Indeks Akses terhadap Keadilan (Access to Justice Index)		Bagian Hukum Sekretariat Daerah
	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	1. Program Pendataan dan Pengelolaan informasi berbasis spasial dan karakteristik kawasan	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
	16.6.1.(a)	Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	1. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	BPK RI
	16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B	1. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Program Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi	Inspektorat Kota Jambi
	16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B	1. Program penataan kelembagaan dan ketataletaksanaan kegiatan Reformasi pelayanan Publik 2. Program Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi	Inspektorat Kota Jambi
	16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.		Inspektorat Jambi
	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	1. Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan	Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan	1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2. Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Badan Kepegawaian Daerah (BKD)





Tujuan	Indikator		Program	OPD
		keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).		
	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menurut umur	1. Program Penataan Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.	1. Program Penataan Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun.	1. Program Penataan Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	16.10.1(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	1. Program Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
	16.10.1 (c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	1. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota jambi
	16.10.2.(a)	Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif.	1. Program Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi	Bappeda
	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi		Bagian Hukum Sekretariat Daerah





Tujuan	Indikator		Program	OPD
		menurut hukum HAM Internasional.		

Berdasarkan hasil rekapitulasi capaian TPB dan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pada tujuan 16 masih terdapat indikator yang mencapai target dan beberapa indikator tidak memiliki data. Untuk itu perlu adanya penambahan dan peningkatan program untuk memaksimalkan target capaian TPB.

- Pencapaian indikator 16.1.1.(a) menjadi kewenangan polres, namun realisasi indikator tersebut ada tahun 2022 tidak ada data, serta tidak ditargetkan pada tahun 2022. Untuk itu perlu adanya penambahan program oleh Polres Kota Jambi
- Pencapaian indikator 16.1.2.(a) menjadi kewenangan polres, namun realisasi indikator tersebut ada tahun 2022 tidak ada data, serta tidak ditargetkan pada tahun 2022. Untuk itu perlu adanya penambahan program oleh Polres Kota Jambi.
- Pencapaian indikator 16.2.2.* menjadi kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dimana pada tahun 2022 tidak ada data dan belum terdapat capaian target serta program. Untuk itu perlu adanya penambahan program oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Pencapaian indikator 16.3.1.(b) menjadi kewenangan Kanwilkumham Kota Jambi, dimana pada tahun 2022 Kanwilkumham tidak ada data dan belum terdapat capaian target serta program. Untuk itu perlu adanya penambahan program oleh Kanwilkumham Kota Jambi.
- Pencapaian indikator 16.3.2 (a) menjadi kewenangan Kanwilkumham Kota Jambi, dimana pada tahun 2022 Kanwilkumham tidak ada data dan belum terdapat capaian target serta program. Untuk itu perlu adanya penambahan program oleh Kanwilkumham Kota Jambi.
- Pencapaian indikator 16.3.3 (a) menjadi kewenangan Kanwilkumham Kota Jambi, dimana pada tahun 2022 Kanwilkumham tidak ada data dan belum



terdapat capaian target serta program. Untuk itu perlu adanya penambahan program oleh Kanwilkumham Kota Jambi.

- Pencapaian indikator 16.5.1 (a) menjadi kewenangan BPK RI Perwakilan Kota Jambi dan bagian hukum setda Kota Jambi.
- Pencapaian indikator 16.6.1 (a) menjadi kewenangan BPK RI Kota Jambi, dimana pada tahun 2022 BPK RI telah melaksanakan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan program Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, capaian target dan realisasi indikator yaitu WTP.
- Pencapaian indikator 16.6.1 (b) menjadi kewenangan Inspektorat Kota Jambi, dimana pada tahun 2022 Inspektorat Kota Jambi telah melaksanakan program berupaProgram peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Program Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi, dengan capaian target pada tahun 2022 adalah 70% dan realisasi indicator sebesar 67,37%.
- Pencapaian indikator 16.6.1 (c) menjadi kewenangan Inspektorat Kota Jambi, dimana pada tahun 2022 Inspektorat Kota Jambi telah melaksanakan program berupa Program penataan kelembagaan dan ketataletaksanaan kegiatan Reformasi pelayanan Publik, dan Program Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi, dengan capaian target pada tahun 2022 adalah 70% dan realisasi indikator sebesar 63,23%.
- Pencapaian indikator 16.6.2.(a) menjadi kewenangan Inspektorat Kota Jambi, namum tidak ada data dan belum terdapat capaian target serta program. Untuk itu perlu adanya penambahan program oleh Inspektorat Kota Jambi.





- Pencapaian indikator 16.7.1.(a) menjadi kewenangan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Jambi, dimana pada tahun 2022 Badan Kepegawaian Daerah (BKD) telah melaksanakan program berupa Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan dan Program Peningkatan kualitas dukungan pelaksanaan tugas, fungsi dan kedinasan DPRD Kota Jambi , namun belum memiliki capaian target pada tahun 2022 akan tetapi capaian target tidak terpenuhi sebesar 17,78%.
- Pencapaian indikator 16.9.1* menjadi kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, dimana pada tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melaksanakan program berupa Program Penataan Administrasi Kependudukan, namun belum memiliki capaian target pada tahun 2022 akan tetapi capaian target tidak terpenuhi sebesar 92,67% yang artinya perlu perhatian khusus.
- Pencapaian indikator 16.9.1.(a) menjadi kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, dimana pada tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melaksanakan program berupa Program Penataan Administrasi Kependudukan, namun belum memiliki capaian target pada tahun 2022 akan tetapi capaian target tidak terpenuhi sebesar 95,84% yang artinya perlu perhatian khusus.
- Pencapaian indikator 16.9.1.(b) menjadi kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, dimana pada tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melaksanakan program berupa Program Penataan Administrasi Kependudukan, memiliki capaian target pada tahun 2022 sebesar 92% dan capaian realisasi pada tahun 2022 sebesar 75,50% yang berarti capaian target terpenuhi.
- Pencapaian indikator 16.10.1.(b) menjadi kewenangan Kanwilkumham, dimana pada tahun 2022 OPD Kanwilkumham memiliki program berupa Program Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, namum tidak ada data dan belum terdapat capaian target.





- Pencapaian indikator 16.10.1.(c) menjadi kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota jambi, dimana pada tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota jambi memiliki program berupa Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum,.
- Pencapaian indikator 16.10.2.(a) menjadi kewenangan Bapedda Kota Jambi, dimana pada tahun 2022 OPD Bapedda memiliki program berupa Program Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi, namum tidak ada data dan belum terdapat capaian target.
- Pencapaian indikator 16.b.1.(a) menjadi kewenangan Kanwilkumham Kota Jambi, dimana pada tahun 2022 Kanwilkumham tidak ada data dan belum terdapat capaian target serta program. Untuk itu perlu adanya penambahan program oleh Kanwilkumham Kota Jambi

15. Tujuan 17 Menguatkan Sarana Pelaksanaan Dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan, untuk mencapai Tujuan 17 tersebut dapat dilihat dari capaian indikator diterjemahkan kedalam 4 target dengan 7 indikator. Rerata capaian Tujuan 17 pada tahun 2022 sebesar 28,6% tercapai, dimana nilai capian dengan kategori belum tersedia data sebesar 14,29%. Pencapaian kinerja target pada tujuan 17 ini menjadi kewenangan/tugas fungsi dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jambi, Diskominfo, Sekretariat Daerah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



Tabel V.15
Keterkaitan TPB Terhadap Tujuan 17 Program Organisasi Perangkat Daerah

Tujuan	Indikator		Program	OPD
KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN	17.1.1.*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	1. Program pengembangan data/ informasi	Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda)
	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	1. Program pengembangan data/ informasi	Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda)
	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi /Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda)
	17.8.1*	Persentase pengguna internet.	1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Diskominfo
	17.17.1.(b)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).		Sekretariat Daerah
	17.17.1.(c)	Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi.		Sekretariat Daerah





Tujuan	Indikator		Program	OPD
	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register).	1. Program Penataan Administrasi Kependudukan 2. Program Meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan adminstrasi kependudukan dan pencatatan sipil 3. Program Pengembangan Data/Informasi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Pencapaian indikator 17.1.1* menjadi kewenangan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Jambi, dimana pada tahun 2022 Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) telah melaksanakan program berupa Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program pengembangan data/ informasi, namun belum memiliki capaian target pada tahun 2022 akan tetapi capaian target tidak terpenuhi sebesar 82,72%.
- Pencapaian indikator 17.1.1.(a) menjadi kewenangan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Jambi, dimana pada tahun 2022 Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) telah melaksanakan program berupa Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program pengembangan data/ informasi.
- Pencapaian indikator 17.1.2* menjadi kewenangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jambi dan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), dimana pada tahun 2022 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi dan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), berupa Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, namun belum memiliki data dan capaian target pada tahun 2022.
- Pencapaian indikator 17.8.1* menjadi kewenangan Diskominfo Kota Jambi, dengan capaian target pada tahun 2022 sebesar 80,60% artinya status capaian target terpenuhi.





- Pencapaian indikator 17.17.1.(b) menjadi kewenangan Sekretariat Daerah Kota Jambi, namun Bagian Organisasi Setda Kota Jambi tidak ada data dan belum terdapat capaian target serta program. Untuk itu perlu adanya penambahan program oleh Sekretariat Daerah Kota Jambi.
- Pencapaian indikator 17.17.1.(c) menjadi kewenangan Bagian Organisasi Setda Kota Jambi, Namun Sekretariat Daerah Kota Jambi tidak ada data dan belum terdapat capaian target serta program. Untuk itu perlu adanya penambahan program oleh Sekretariat Daerah Kota Jambi.
- Pencapaian indikator 17.18.2.(b) menjadi kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, dimana pada tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki program berupa Program Penataan Administrasi Kependudukan, Program Meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan adminstrasi kependudukan dan pencatatan sipil dam Program Pengembangan Data/Informasi dengan capaian target terpenuhi.



Tabel V.16
Rekapitulasi Status Capaian Indikator Berdasarkan Target SDGs Nasional Tahun 2022

No	TPB	Jumlah Indikator Menjadi TUSI	Kondisi Ketercapaian			
			Mencapai Target Nasional	Belum Tercapai akan tetapi Membaik	Perlu Perhatian Khusus	N/A
1	Tanpa Kemiskinan	10	1	2	3	4
2	Tanpa Kelaparan	3	1	0	1	1
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	14	2	2	1	9
4	Pendidikan Berkualitas	8	2	2	3	1
5	Kesetaraan Gender	3	1	1	0	1
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	5	0	2	0	3
7	Energi Bersih dan Terjangkau	3	2	0	1	0
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan ekonomi	3	1	1	1	0
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	3	0	1	1	1
10	Berkurangnya kesenjangan	11	2	0	1	8
11	Kota dan permukiman berkelanjutan	11	1	0	2	8
12	Konsumsi dan produksi bertanggung jawab	8	0	1	2	5
13	Penanganan perubahan iklim	2	1	0	1	0
14	Ekosistim lautan	0	0	0	0	0
15	Ekosistem daratan	0	0	0	0	0
16	Perdamaian keadilan dan kelembagaan tangguh	20	4	3	3	10
17	Kemitraan untuk mencapai tujuan	7	2	0	1	4
Jumlah		**111**	**20**	**15**	**21**	**55**

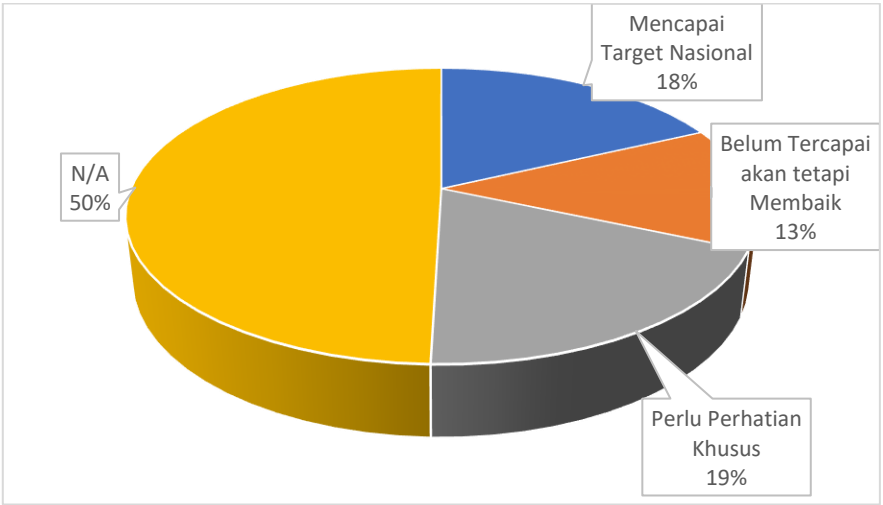

Gambar 5.1
Grafik Persentase Capaian Indikator SDG's Kota Jambi Terhadap Target Nasional





Tabel V.17
Kewenangan OPD Dalam Capaian Indikator di Kota Jambi

No	OPD	Jumlah Indikator	Indikator		Program Pembangunan Terkait TPB Yang Dilaksanakan (Bab VI RPJMD versi review)	Program/Kegiatan Dalam Permendagri 90/2019 Terkait TPB yang belum dilaksanakan (belum tertuang dalam RPJMD Sebelumnya)	
						Kode	Program
1	Bappeda	10	1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim.	Belum Memiliki Program	**1.06.05** 1.06.05.2.02	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**: Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
			1.2.2*	Presentase laki – laki, perempuan dan anak – anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definsi nasional.	Belum Memiliki Program	**1.06.05** 1.06.05.2.02	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**: Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
			1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.	Belum Memiliki Program	**1.01.02** 1.01.02.1.01 1.01.02.1.02 1.01.02.1.03 1.01.02.2.01 1.01.02.2.02 1.01.02.2.03 1.01.02.2.04 **1.01.04** 1.01.4.1.01 **1.02.02**	**Program Pengelolaan Pendidikan** - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Kejuruan - Pengelolaan Pendidikan Khusus - Pengelolaan Pendidikan Dasar - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ kesetaraan **Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan** - Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi





No	OPD	Jumlah Indikator	Indikator		Program Pembangunan Terkait TPB Yang Dilaksanakan (Bab VI RPJMD versi review)	Program/Kegiatan Dalam Permendagri 90/2019 Terkait TPB yang belum dilaksanakan (belum tertuang dalam RPJMD Sebelumnya)	
						Kode	Program
						1.02.02.2.01	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat** Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota
			8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB perkapita	Belum Memiliki Program	**3.26.04** 3.26.04.2.01 **5.01.04** 5.01.04.2.01 5.01.04.2.03 **5.02.02** 5.02.02.2.01 **5.05.02** 5.05.02.2.02 5.05.02.2.03	**Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual** - Penyediaan Prasarana (Zona kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota **Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam** - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian - Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam **Program Pengelolaan Keuangan Daerah** - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah **Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah** - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan





No	OPD	Jumlah Indikator	Indikator		Program Pembangunan Terkait TPB Yang Dilaksanakan (Bab VI RPJMD versi review)	Program/Kegiatan Dalam Permendagri 90/2019 Terkait TPB yang belum dilaksanakan (belum tertuang dalam RPJMD Sebelumnya)	
						Kode	Program
							Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
			8.1.1 (a)	PDB per kapita	Belum Memiliki Program	**3.26.04** 3.26.04.2.01 **5.01.04** 5.01.04.2.01 5.01.04.2.03 **5.02.02** 5.02.02.2.01 **5.05.02** 5.05.02.2.02 5.05.02.2.03	**Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual** - Penyediaan Prasarana (Zona kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota **Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam** - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian - Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam **Program Pengelolaan Keuangan Daerah** - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah **Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah** - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
			8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat	Belum Memiliki Program	**2.07.03**	**Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**





No	OPD	Jumlah Indikator	Indikator		Program Pembangunan Terkait TPB Yang Dilaksanakan (Bab VI RPJMD versi review)	Program/Kegiatan Dalam Permendagri 90/2019 Terkait TPB yang belum dilaksanakan (belum tertuang dalam RPJMD Sebelumnya)	
						Kode	Program
				pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.		2.07.03.2.01 2.07.03.2.05 **2.07.04** 2.07.04.2.01 2.07.04.2.03 **5.05.02** 5.05.02.2.02 5.05.02.2.03	- Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi - Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/kota **Program Penempatan Tenaga Kerja** - Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan informasi Program Kerja **Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah** - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
			10.1.1 (a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok	Belum Memiliki Program	**1.06.05** 1.06.05.2.02	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**: - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
			10.1.1 (f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	Belum Memiliki Program	**1.06.05** 1.06.05.2.02	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**: - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
			10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas	Belum Memiliki Program	**2.14.04** 2.14.04.2.01	**Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)** - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga





No	OPD	Jumlah Indikator	Indikator		Program Pembangunan Terkait TPB Yang Dilaksanakan (Bab VI RPJMD versi review)	Program/Kegiatan Dalam Permendagri 90/2019 Terkait TPB yang belum dilaksanakan (belum tertuang dalam RPJMD Sebelumnya)	
						Kode	Program
			16.10.2.(a)	Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif.	Program Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi	**5.05.02** 5.05.02.2.04 **5.06.02** 5.06.02.2.01	**Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah** - Pengembangan Inovasi dan Teknologi **Program Pelayanan Penghubung** - Pelaksanaan Pelayanan Penghubung Kabupaten/Kota
2	Dinas Kesehatan	16	1.3.1*	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan	Belum Memiliki Program	**1.06.05**	**Program perlindungan dan jaminan Sosial**
			1.3.1 (a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Belum Memiliki Program	**1.02.02** 1.02.02.2.02 1.02.02.2.02.26	**Program pemenuhan upaya kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan Masyarakat** - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
			3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Penyediaan Layanan	**1.02.02** 1.02.02.2.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatanperorangan Dan Upaya Kesehatanmasyarakat**





No	OPD	Jumlah Indikator	Indikator		Program Pembangunan Terkait TPB Yang Dilaksanakan (Bab VI RPJMD versi review)	Program/Kegiatan Dalam Permendagri 90/2019 Terkait TPB yang belum dilaksanakan (belum tertuang dalam RPJMD Sebelumnya)	
						Kode	Program
					Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.02.02.2.02.01 1.02.02.2.02.02	- Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
			3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	**1.02.02** 1.02.02.2.02 1.02.02.2.02.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatanperorangan Dan Upaya Kesehatanmasyarakat** - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
			3.3.3*	Kejadian Malaria per 1.000 orang	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Pelayanan	**1.02.02** 1.02.02.2.02 1.02.02.2.02.25	**Program pemenuhan upaya kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan Masyarakat** - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular





No	OPD	Jumlah Indikator	Indikator		Program Pembangunan Terkait TPB Yang Dilaksanakan (Bab VI RPJMD versi review)	Program/Kegiatan Dalam Permendagri 90/2019 Terkait TPB yang belum dilaksanakan (belum tertuang dalam RPJMD Sebelumnya)	
						Kode	Program
					Kesehatan Ibu Hamil dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
			3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	**1.02.02** 1.02.02.2.02 1.02.02.2.02.25	**Program pemenuhan upaya kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan Masyarakat** - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
			3.3.5	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	**1.02.02** 1.02.02.2.02 1.02.02.2.02.25	**Program pemenuhan upaya kesehatan Perorangan dan upaya kesehatanMasyarakat** - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular





No	OPD	Jumlah Indikator	Indikator		Program Pembangunan Terkait TPB Yang Dilaksanakan (Bab VI RPJMD versi review)	Program/Kegiatan Dalam Permendagri 90/2019 Terkait TPB yang belum dilaksanakan (belum tertuang dalam RPJMD Sebelumnya)	
						Kode	Program
			3.4.1 (a)	Persentase merokok pada penduduk usia 10-18 tahun	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	**1.02.02** 1.02.02.2.02 1.02.02.2.02.05	**Program pemenuhan upaya kesehatan Perorangan dan upaya Kesehatan Masyarakat** - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
			3.4.1 (b)	Prevalensi tekanan darah tinggi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	**1.02.02** 1.02.02.2.02 1.02.02.2.02.08	**Program pemenuhan upaya kesehatan Perorangan dan upaya Kesehatan Masyarakat** - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
			3.4.1 (c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	Belum Memiliki Program	**1.02.02** 1.02.02.2.02	**Program pemenuhan upaya kesehatan Perorangan dan upaya Kesehatan Masyarakat**





No	OPD	Jumlah Indikator	Indikator		Program Pembangunan Terkait TPB Yang Dilaksanakan (Bab VI RPJMD versi review)	Program/Kegiatan Dalam Permendagri 90/2019 Terkait TPB yang belum dilaksanakan (belum tertuang dalam RPJMD Sebelumnya)	
						Kode	Program
						1.02.02.2.02.06 1.02.02.2.02.07	- Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
			3.8.1*	Cakupan pelayanan kesehatan essensial	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**1.02.02** 1.02.02.2.02 1.02.02.2.02.01 1.02.02.2.02.12 1.02.02.2.02.13 1.02.02.2.02.14	**Program pemenuhan upaya kesehatan Perorangan dan upaya Kesehatan Masyarakat** - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota. - Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan. - Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan. - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
			3.8.1 (a)	Unmet Need Pelayanan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**1.02.02**	**Program pemenuhan upaya kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan Masyarakat**





No	OPD	Jumlah Indikator	Indikator		Program Pembangunan Terkait TPB Yang Dilaksanakan (Bab VI RPJMD versi review)	Program/Kegiatan Dalam Permendagri 90/2019 Terkait TPB yang belum dilaksanakan (belum tertuang dalam RPJMD Sebelumnya)	
						Kode	Program
			3.8.2 (a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	**1.02.02** 1.02.02.2.02 1.02.02.2.02.26	**Program pemenuhan upaya kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan Masyarakat** - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
			3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	**1.02.02** 1.02.02.2.02 1.02.02.2.02.06 1.02.02.2.02.07	**Program pemenuhan upaya kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan Masyarakat** - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
			3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan - Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	**1.02.03** 1.02.03.2.01 1.02.03.2.02	**Program peningkatan kapasitas sumber Daya manusia Kesehatan** - Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota - Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota





No	OPD	Jumlah Indikator	Indikator		Program Pembangunan Terkait TPB Yang Dilaksanakan (Bab VI RPJMD versi review)	Program/Kegiatan Dalam Permendagri 90/2019 Terkait TPB yang belum dilaksanakan (belum tertuang dalam RPJMD Sebelumnya)	
						Kode	Program
			12.8.1.(b)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan	**1.02.02** 1.02.02.2.02 **5.01.02** 5.01.02.2.03	**Program pemenuhan upaya kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan Masyarakat** - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota **Program perencanaan, pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah** - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah
3	Dinas Sosial	10	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Belum Memiliki Program	**1.06.05** 1.06.05.2.02	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**: Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
			1.3.1 (b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Program Penanganan Bencana - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Jd; Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	**2.07.03** 2.07.03.2.01 2.07.03.2.05 **2.07.04** 2.07.04.2.01 2.07.04.2.03 **2.07.05** 2.07.05.2.01	**Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja** - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi - Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/kota **Program Penempatan Tenaga Kerja** - Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan informasi Program Kerja **Program Hubungan Sosial** Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk





No	OPD	Jumlah Indikator	Indikator		Program Pembangunan Terkait TPB Yang Dilaksanakan (Bab VI RPJMD versi review)	Program/Kegiatan Dalam Permendagri 90/2019 Terkait TPB yang belum dilaksanakan (belum tertuang dalam RPJMD Sebelumnya)	
						Kode	Program
							Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Program Penanganan Bencana - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Jd; Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	**1.04.02** 1.04.02.2.01 **1.05.03** 1.05.03.2.03 1.05.03.2.04 **1.05.04** 1.05.04.2.01	**Program Pengembangan Perumahan** - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota **Program Penanggulangan Bencana** - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana **Program Penanggulangan Kebakaran** Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
			1.5.4*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional	Program Penanganan Bencana - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Jd; Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	**1.05.03** 1.05.03.2.01 1.05.03.2.02 1.05.03.2.03 1.05.03.2.04 **1.06.06** 1.06.06.2.02	**Program Penanggulangan Bencana** - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap bencana - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana **Program Penanganan Bencana** Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota





No	OPD	Jumlah Indikator	Indikator		Program Pembangunan Terkait TPB Yang Dilaksanakan (Bab VI RPJMD versi review)	Program/Kegiatan Dalam Permendagri 90/2019 Terkait TPB yang belum dilaksanakan (belum tertuang dalam RPJMD Sebelumnya)	
						Kode	Program
			10.4.1 (b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Program pemberdayaan sosial	**2.07.03** 2.07.03.2.01 2.07.03.2.05 **2.07.04** 2.07.04.2.01 2.07.04.2.03 **2.07.05** 2.07.05.2.01	**Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja** - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi - Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/kota **Program Penempatan Tenaga Kerja** - Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan informasi Program Kerja **Program Hubungan Sosial** Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Program penanganan bencana	**1.04.02** 1.04.02.2.01 **1.05.03** 1.05.03.2.03 1.05.03.2.04 **1.05.04** 1.05.04.2.01	**Program Pengembangan Perumahan** - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota **Program Penanggulangan Bencana** - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana **Program Penanggulangan Kebakaran** Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota





No	OPD	Jumlah Indikator	Indikator		Program Pembangunan Terkait TPB Yang Dilaksanakan (Bab VI RPJMD versi review)	Program/Kegiatan Dalam Permendagri 90/2019 Terkait TPB yang belum dilaksanakan (belum tertuang dalam RPJMD Sebelumnya)	
						Kode	Program
			11.5.2 (a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB	Program penanganan bencana	**3.27.05** 3.27.05.2.01	**Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian** Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
			12.8.1.(b)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan	**1.02.02** 1.02.02.1.02 **5.01.02** 5.01.02.2.03 **1.05.02** 1.05.02.2.01	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat** - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi **Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah** - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah **Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum** Penanganan Gangguan Ketenteraman danKetertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			13.1.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Program Penanganan Bencana - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Jd; Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	**1.04.02** 1.04.02.2.01 **1.05.03** 1.05.03.2.03 1.05.03.2.04	**Program Pengembangan Perumahan** - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota **Program Penanggulangan Bencana** - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana





No	OPD	Jumlah Indikator	Indikator		Program Pembangunan Terkait TPB Yang Dilaksanakan (Bab VI RPJMD versi review)	Program/Kegiatan Dalam Permendagri 90/2019 Terkait TPB yang belum dilaksanakan (belum tertuang dalam RPJMD Sebelumnya)	
						Kode	Program
						1.05.04 1.05.04.2.01	**Program Penanggulangan Kebakaran** Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
			13.1.3*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana	Program Penanganan Bencana - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Jd; Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	**1.05.03** 1.05.03.2.01 1.05.03.2.02 1.05.03.2.03 1.05.03.2.04 **1.06.06** 1.06.06.2.02	**Program Penanggulangan Bencana** - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap bencana - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana **Program Penanganan Bencana** Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
4	BKAD	2	1.4.2*	Proporsi dan penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.	Program Pengelolaan Pendapatan daerah - Pengelolaan Pendapatan Daerah - Penilaian pajak dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	**2.10.09** 2.10.09.2.01	**Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah** Penerbitan Izin Membuka Tanah
			10.4.2	Dampak redistributif dari kebijakan fiskal	Belum Memiliki Program	**5.02.02** 5.02.02.2.01	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah** - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah



No	OPD	Jumlah Indikator	Indikator		Program Pembangunan Terkait TPB Yang Dilaksanakan (Bab VI RPJMD versi review)	Program/Kegiatan Dalam Permendagri 90/2019 Terkait TPB yang belum dilaksanakan (belum tertuang dalam RPJMD Sebelumnya)	
						Kode	Program
						5.02.02.2.02 5.02.02.2.03 **5.02.03** 5.02.03.2.01 **5.02.04** 5.02.04.2.02	- Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah **Program Pengelolaan Barang Milik Daerah** - Pengelolaan Barang Milik Daerah **Program Pengelolaan Pendapatan Daerah** Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
5	Dinas PUPR	9	2.4.1 (a)	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan	Belum Memiliki Program	**1.03.12** 1.03.12.2.03 1.03.12.2.04 **3.27.06** 3.27.06.2.01	**Program penyelenggaraan penataan Ruang** - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota **Program Perizinan Usaha Pertanian** Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
			6.1.1	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	1. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	**1.03.03** 1.03.03.2.01	**Program pengelolaan dan Pengembangan sistem penyediaan air Minum** Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
			6.2.1	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola	1. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	**1.03.05** 1.03.05.2.01	**Program pengelolaan dan Pengembangan sistem air limbah**





No	OPD	Jumlah Indikator	Indikator		Program Pembangunan Terkait TPB Yang Dilaksanakan (Bab VI RPJMD versi review)	Program/Kegiatan Dalam Permendagri 90/2019 Terkait TPB yang belum dilaksanakan (belum tertuang dalam RPJMD Sebelumnya)	
						Kode	Program
				secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
			6.4.2. (a)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya	Belum Memiliki Program	**1.03.02** 1.03.02.2.01	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)** Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			6.4.2. (b)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaanya	Belum Memiliki Program	**1.03.02** 1.03.02.2.01	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)** Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			9.1.1 (a)	Kondisi mantap jalan nasional.	Program penyelenggaraan jalan	**1.03.10** 1.03.10.2.01	**Program Penyelenggaraan Jalan** Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
			11.3.1 (a)	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk		**1.03.12** 1.03.12.2.03 1.03.12.2.04	**Program penyelenggaraan penataan Ruang** - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
			11.6.1 (a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persapahan regional	**1.03.04** 1.03.04.2.01	**Program pengembangan sistem dan Pengelolaan persampahan regional** Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
			11.6.1 (b)	Persentase sampah nasional yang terkelola	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persapahan regional	**1.03.04** 1.03.04.2.01	**Program pengembangan sistem dan Pengelolaan persampahan regional** Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota





No	OPD	Jumlah Indikator	Indikator		Program Pembangunan Terkait TPB Yang Dilaksanakan (Bab VI RPJMD versi review)	Program/Kegiatan Dalam Permendagri 90/2019 Terkait TPB yang belum dilaksanakan (belum tertuang dalam RPJMD Sebelumnya)	
						Kode	Program
6	Dinas ketahanan Pangan Kota Jambi	2	2.a.1*	Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah	Program Pengelolaan Pendapatan daerah	**3.27.03** 3.27.03.2.01 3.27.03.2.02 3.27.03.2.03	**Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian** - Pengembangan Prasarana Pertanian - Pembangunan Prasarana Pertanian Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota
			2.c.1*	Indikator anomali harga pangan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat - Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kab./kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	**3.27.02** 3.27.02.2.01 **3.27.03** 3.27.03.2.01 3.27.03.2.02 3.27.03.2.03 **3.27.07** 3.27.07.2.01	**Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian** - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian **Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian** - Pengembangan Prasarana Pertanian - Pembangunan Prasarana Pertanian - Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota **Program Penyuluhan Pertanian** Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
7	BNN	1	3.5.1 (b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Pelayanan	**1.06.04** 1.06.4.2.01 1.06.04.2.02	**Program Rehabilitasi Sosial** - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial





No	OPD	Jumlah Indikator	Indikator		Program Pembangunan Terkait TPB Yang Dilaksanakan (Bab VI RPJMD versi review)	Program/Kegiatan Dalam Permendagri 90/2019 Terkait TPB yang belum dilaksanakan (belum tertuang dalam RPJMD Sebelumnya)	
						Kode	Program
					Kesehatan Jiwa dan NAPZA		
8	Dinas Pendidikan	8	4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat.	Program Pengelolaan Pendidikan - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dan Program Pengelolaan Pendidikan - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**1.01.02** 1.01.02.1.01 1.01.02.1.02 1.01.02.2.01 1.01.02.2.02	**Program Pengelolaan Pendidikan** - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Kejuruan - Pengelolaan Pendidikan Dasar - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
			4.1.2 (a)	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/ sederajat	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	**1.01.02** 1.01.02.1.01 1.01.02.1.02 1.01.02.2.01 1.01.02.2.02 1.01.02.2.03	**Program Pengelolaan Pendidikan** - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Kejuruan - Pengelolaan Pendidikan Dasar - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
			4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.	Belum Memiliki Program	**1.01.02** 1.01.02.2.03 **1.01.03** 1.01.03.2.02 **1.01.04**	**Program Pengelolaan Pendidikan** - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **Program Pengembangan Kurikulum** - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal **Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan**





No	OPD	Jumlah Indikator	Indikator		Program Pembangunan Terkait TPB Yang Dilaksanakan (Bab VI RPJMD versi review)	Program/Kegiatan Dalam Permendagri 90/2019 Terkait TPB yang belum dilaksanakan (belum tertuang dalam RPJMD Sebelumnya)	
						Kode	Program
						1,01.04.2.01 **1.01.05** 1.01.05.2.02	- Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan **Program Pengendaluan Perizinan Pendidkan** Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
			4.3.1*	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin	Program Pengelolaan Pendidikan - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	**1.01.02** 1.01.02.2.04 **1.01.03** 1.01.03.2.02 **1.01.04** 1,01.04.2.01	**Program Pengelolaan Pendidikan** - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan **Program Pengembangan Kurikulum** - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal **Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan** Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
			4.3.1 (a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	Belum Memiliki Program	**1.01.02** **1.01.03**	**Program Pengelolaan Pendidikan** **Program Pengembangan Kurikulum**
			4.4.1 (a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan	Belum Memiliki Program		





No	OPD	Jumlah Indikator	Indikator		Program Pembangunan Terkait TPB Yang Dilaksanakan (Bab VI RPJMD versi review)	Program/Kegiatan Dalam Permendagri 90/2019 Terkait TPB yang belum dilaksanakan (belum tertuang dalam RPJMD Sebelumnya)	
						Kode	Program
				teknologi informasi dan komunikasi (TIK).			
			4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas	Program Pengelolaan Pendidikan	**1.01.02** 1.01.02.1.01 1.01.02.1.02 1.01.02.2.01 1.01.02.2.02 **1.01.03**	**Program Pengelolaan Pendidikan** - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Kejuruan - Pengelolaan Pendidikan Dasar - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama **Program Pengembangan Kurikulum**
			4.6.1 (a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	program Pengelolaan Pendidikan - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**1.01.03** **1.01.04**	**Program Pengembangan Kurikulum** **Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan**
9	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi	1	5.6.2*	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan Pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.	Belum Memiliki Program	**5.05.02** 5.0502.2.02 **2.14.03** 2.14.03.2.03	**Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah** - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan **Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)** Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota





No	OPD	Jumlah Indikator	Indikator		Program Pembangunan Terkait TPB Yang Dilaksanakan (Bab VI RPJMD versi review)	Program/Kegiatan Dalam Permendagri 90/2019 Terkait TPB yang belum dilaksanakan (belum tertuang dalam RPJMD Sebelumnya)	
						Kode	Program
10	Dinas Lingkungan Hidup	11	6.3.1 (a)	Persentase limbah cair industri cair yang diolah secara aman	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengeloaan lingkungan	**2.11.03** 2.11.03.2.01 2.11.03.2.02	**Program pengendalian pencemaran Dan/atau kerusakan lingkungan hidup** - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
			11.6.1 (a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya	Program pengelolaan persampahan	**1.03.04** **1.03.04.2.01**	**Program pengembangan sistem dan Pengelolaan persampahan regional** Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
			11.6.1 (b)	Persentase sampah nasional yang terkelola	Program pengelolaan persampahan	**1.03.04** **1.03.04.2.01**	**Program pengembangan sistem dan Pengelolaan persampahan regional** Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
			11.6.2 (a)	Rata-rata tahunan materi partikular halus PM 10	Program pengendalian peceamran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	**2.11.03** 2.11.03.2.01 2.11.03.2.02	**Program pengendalian pencemaran Dan/atau kerusakan lingkungan hidup** - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
			11.6.2 (b)	Indeks Kualitas Udara	Program pengendalian penceamran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	**2.11.03** 2.11.03.2.01 2.11.03.2.02	**Program pengendalian pencemaran Dan/atau kerusakan lingkungan hidup** - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota





No	OPD	Jumlah Indikator	Indikator		Program Pembangunan Terkait TPB Yang Dilaksanakan (Bab VI RPJMD versi review)	Program/Kegiatan Dalam Permendagri 90/2019 Terkait TPB yang belum dilaksanakan (belum tertuang dalam RPJMD Sebelumnya)	
						Kode	Program
			11.7.1 (a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua	Program pengelolaan keanekaraganan hayati (KEHATI)	**2.11.04** 2.11.04.2.01	**Program pengelolaan keanekaragaman Hayati (kehati)** Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
			12.3.1.(a)	Persentase Sisa Makanan	Belum Memiliki Program	**1.03.04** 1.03.04.2.01	**Program pengembangan sistem dan Pengelolaan persampahan regional** Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
			12.4.1.(a)	Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan Merkuri	Belum Memiliki Program	**2.11.05**	**Program pengendalian bahan berbahaya Dan beracun (b3) dan limbah bahan Berbahaya dan beracun (limbah b3)**
			12.4.2.*	(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengelolaannya	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	**2.11.05** **2.11.05.2.01** **2.11.05.2.02**	**Program pengendalian bahan berbahaya Dan beracun (b3) dan limbah bahan Berbahaya dan beracun (limbah b3)** - Penyimpanan Sementara Limbah B3 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Megurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	**1.03.04** 1.03.04.2.01	**Program pengembangan sistem dan Pengelolaan persampahan regional** Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
			12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	Belum Memiliki Program		
11	Sekretariat Daerah	12	7.1.1*	menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern	Belum Memiliki Program		**Tidak ada Kewenangan Kabupaten/Kota**





No	OPD	Jumlah Indikator	Indikator		Program Pembangunan Terkait TPB Yang Dilaksanakan (Bab VI RPJMD versi review)	Program/Kegiatan Dalam Permendagri 90/2019 Terkait TPB yang belum dilaksanakan (belum tertuang dalam RPJMD Sebelumnya)	
						Kode	Program
			7.1.2 (a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga	Belum Memiliki Program		**Tidak ada Kewenangan Kabupaten/Kota**
			7.1.2 (b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga	Belum Memiliki Program		**Tidak ada Kewenangan Kabupaten/Kota**
			10.3.1 (d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM internasional	Belum Memiliki Program	**4.01.02** 4.01.02.2.03	**Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat** Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah
			16.3.1.(b)	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi	Belum Memiliki Program	**1.05.02** 1.05.02.2.01	**Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum** Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			16.3.2.(a)	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.	Belum Memiliki Program	**1.05.02** 1.05.02.2.01	**Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum** Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			16.3.3.(a)	Indeks Akses terhadap Keadilan (Access to Justice Index)	Belum Memiliki Program		**Tidak ada Kewenangan Kabupaten/Kota**
			16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Program Pendataan dan Pengelolaan informasi berbasis spasial dan karakteristik kawasan	**5.04.02** 5.04.02.2.01	**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia** Pengembangan Kompetensi Teknis





No	OPD	Jumlah Indikator	Indikator		Program Pembangunan Terkait TPB Yang Dilaksanakan (Bab VI RPJMD versi review)	Program/Kegiatan Dalam Permendagri 90/2019 Terkait TPB yang belum dilaksanakan (belum tertuang dalam RPJMD Sebelumnya)	
						Kode	Program
			16.10.1(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	Program Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	**1.05.02** 1.05.02.2.01	**Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum** Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Belum Memiliki Program	**4.01.02** 4.01.02.2.03	**Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat** Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah
			17.17.1.(b)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Belum Memiliki Program	**1.03.11** 1.03.11.2.02	**Program Pengembangan Jasa Konstruksi** Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
			17.17.1.(c)	Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi.	Belum Memiliki Program	**1.03.11** 1.03.11.2.02	**Program Pengembangan Jasa Konstruksi** Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
12	Dinas Perhubungan	1	9.1.2*	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi	Program penyelenggaraan lalu lintas dan Program pengelolaan pelayaran	**2.15.02** **2.15.03**	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)** **Program Pengelolaan Pelayaran**
13	Dinas Perindustrian	1	9.2.1 (a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	Program perencanaan dan Pembangunan industri		





No	OPD	Jumlah Indikator	Indikator		Program Pembangunan Terkait TPB Yang Dilaksanakan (Bab VI RPJMD versi review)	Program/Kegiatan Dalam Permendagri 90/2019 Terkait TPB yang belum dilaksanakan (belum tertuang dalam RPJMD Sebelumnya)	
						Kode	Program
	dan perdagangan						
14	Polres	3	10.3.1 (b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	Belum Memiliki Program	**1.05.02** 1.05.02.1.01 **2.08.03** 2.08.03.2.01 2.08.03.2.02 2.08.03.2.03	**Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi **Program Perlindungan Perempuan** - Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Belum Memiliki Program	**1.05.02** 1.05.02.1.01	**Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
			16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Belum Memiliki Program	**8.01.06**	**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**
15	Dinas Pemberdayaan	3	10.3.1 (c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran	Program pelindungan perempuan	**2.08.03** 2.08.03.2.01	**Program Perlindungan Perempuan**





No	OPD	Jumlah Indikator	Indikator		Program Pembangunan Terkait TPB Yang Dilaksanakan (Bab VI RPJMD versi review)	Program/Kegiatan Dalam Permendagri 90/2019 Terkait TPB yang belum dilaksanakan (belum tertuang dalam RPJMD Sebelumnya)	
						Kode	Program
	Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota jambi			Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan		2.08.03.2.02 2.08.03.2.03	- Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			16.2.2*	Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.	Belum Memiliki Program		
			16.10.1 (c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**2.08.03** 2.08.03.2.01 2.08.03.2.02 2.08.03.2.03	**Program Perlindungan Perempuan** - Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
16	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Jambi	3	10.4.1 (b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Program hubungan industrial	**2.07.05** 2.07.05.2.01	**Program Hubungan Industrial** Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1





No	OPD	Jumlah Indikator	Indikator		Program Pembangunan Terkait TPB Yang Dilaksanakan (Bab VI RPJMD versi review)	Program/Kegiatan Dalam Permendagri 90/2019 Terkait TPB yang belum dilaksanakan (belum tertuang dalam RPJMD Sebelumnya)	
						Kode	Program
							(Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			10.7.2 (a)	Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan	Belum Memiliki Program	**2.07.04** 2.07.04.2.04	**Program Penempatan Tenaga Kerja** Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
			10.7.2 (b)	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi	Program rencana kerja	**4.01.02** 4.01.02.2.4	**Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat** Fasilitasi Kerjasama Daerah
17	Bank Indonesia	1	10.5.1 (a)	Indikator Kesehatan Perbankan.	Belum Memiliki Program		
18	Dinas Pemadam Kebakaran	1	11.b.2*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana	Program penanggulangan bencana	**1.05.03** 1.05.03.2.01 1.05.03.2.02 1.05.03.2.03 1.05.03.2.04 **1.05.04** 1.05.4.1.1 **1.06.06** 1.06.06.2.02	**Program Penanggulangan Bencana** Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap bencana Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana **Program Penanggulangan Kebakaran** Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran **Program Penanganan Bencana** Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
19	Dinas Perumahan	1	11.c.1 (a)	Persentase Daerah yang memiliki Perda	Belum memiliki program	**1.03.08** 1.03.08.1.01	**Program Penataan Bangunan Gedung** Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan



No	OPD	Jumlah Indikator	Indikator		Program Pembangunan Terkait TPB Yang Dilaksanakan (Bab VI RPJMD versi review)	Program/Kegiatan Dalam Permendagri 90/2019 Terkait TPB yang belum dilaksanakan (belum tertuang dalam RPJMD Sebelumnya)	
						Kode	Program
	Rakyat dan Kawasan Permukiman			Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan, dan menggunakan Material Lokal			Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
20	Inspektorat Kota	4	12.6.1*	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya	Belum memiliki program	**6.01.02** 6.01.02.1.01	**Program Penyelenggaraan Pengawasan** Penyelenggaraan Pengawasan Internal
			16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B	1. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Program Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi	**4.01.04** 4.01.04.2.01 **5.05.02** 5.05.02.2.01	**Program Administrasi Umum** Pelaksanaan Administrasi Umum **Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah** Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
			16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B	1. Program penataan kelembagaan dan ketataletaksanaan kegiatan Reformasi pelayanan Publik	**4.01.04** 4.01.04.2.01 **5.05.02** 5.05.02.2.01	**Program Administrasi Umum** Pelaksanaan Administrasi Umum **Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah** Penelitian dan Pengembangan Bidang





No	OPD	Jumlah Indikator	Indikator		Program Pembangunan Terkait TPB Yang Dilaksanakan (Bab VI RPJMD versi review)	Program/Kegiatan Dalam Permendagri 90/2019 Terkait TPB yang belum dilaksanakan (belum tertuang dalam RPJMD Sebelumnya)	
						Kode	Program
					2. Program Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi		Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
			16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.	Belum Memiliki Program	**4.01.04** 4.01.04.2.01 **5.05.02** 5.05.02.2.01	**Program Administrasi Umum** Pelaksanaan Administrasi Umum **Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah** Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1	12.b.1(a)	Jumlah lokasi penerapan *sustainable tourism development*	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**3.26.05** 3.26.02.2.1 3.26.02.2.03	**Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif** - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
22	BPK	2	16.6.1.(a)	Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	**4.02.02** 4.02.03.2.02	**Program Layanan Dan Administrasi Keuangan** Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
			16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Program Pendataan dan Pengelolaan informasi berbasis spasial dan karakteristik kawasan	**5.04.02** 5.04.02.2.01	**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia** Pengembangan Kompetensi Teknis
23		2	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan	Program Peningkatan Kualitas Kehidupan	**4.02.03**	**Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**





No	OPD	Jumlah Indikator	Indikator		Program Pembangunan Terkait TPB Yang Dilaksanakan (Bab VI RPJMD versi review)	Program/Kegiatan Dalam Permendagri 90/2019 Terkait TPB yang belum dilaksanakan (belum tertuang dalam RPJMD Sebelumnya)	
						Kode	Program
	Badan Kepegawaian Daerah (BKD)			Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Masyarakat Perkotaan	4.02.03.2.08	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
			16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2. Program pembinaan dan pengembangan aparatur		
24	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menurut umur	Program Penataan Administrasi Kependudukan	**2.12.04** 2.12.04.2.01	**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
			16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	**2.12.04** 2.12.04.2.01	**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
			16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	**2.12.04** 2.12.04.2.01	**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
			17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register).	1. Program Penataan Administrasi Kependudukan 2. Program Meningkatkan	**2.12.04** 2.12.04.2.01 **2.12.05**	**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan **Program Pengelolaan Profil Kependudukan**





No	OPD	Jumlah Indikator	Indikator		Program Pembangunan Terkait TPB Yang Dilaksanakan (Bab VI RPJMD versi review)	Program/Kegiatan Dalam Permendagri 90/2019 Terkait TPB yang belum dilaksanakan (belum tertuang dalam RPJMD Sebelumnya)	
						Kode	Program
					kualitas dan jangkauan layanan adminstrasi kependudukan dan pencatatan sipil 3. Program Pengembangan Data/Informasi	2.12.05.2.01 **2.12.03** 2.12.03.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan **Program Pencatatan Sipil** Pelayanan Pencatatan Sipil
25	Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda)	3	17.1.1.*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Program pengembangan data/ informasi	**5.02.02** 5.02.02.2.01 **5.02.04** 5.02.04.2.02	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah** Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah **Program Pengelolaan Pendapatan Daerah** Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
			17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	Program pengembangan data/ informasi	**5.02.04** 5.02.04.2.02	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah** Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
			17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**5.02.04** 5.02.04.2.02	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah** Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
26	Kesbangpol	1	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah	Belum Memiliki Program	**2.08.02** 2.08.02.2.02	**Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan** Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
27	Diskominfo	2	5.b.1*	Proporsi individu yang memiliki telepon genggam.	Belum Memiliki Program	**4.01.02** 4.01.02.2.02	**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat** Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat





No	OPD	Jumlah Indikator	Indikator		Program Pembangunan Terkait TPB Yang Dilaksanakan (Bab VI RPJMD versi review)	Program/Kegiatan Dalam Permendagri 90/2019 Terkait TPB yang belum dilaksanakan (belum tertuang dalam RPJMD Sebelumnya)	
						Kode	Program
			17.8.1*	Persentase pengguna internet.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	**2.20.02**	**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**





Tabel V.18
Kondisi Capaian TPB Berdasarkan OPD yang Bertanggung Jawab

OPD	Jumlah Indikator Yang Menjadi Tusi		Kondisi Capaian				
	Tujuan	Indikator	Jumlah Indikator Mencapai Terget	Jumlah Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target	Jumlah Indikator TPB yang sudah dilaksanakan namun perlu perhatian khusus	Jumlah Indikator TPB yang Belum dilaksanakan	Jumlah Indikator N/A
Bappeda	Tujuan 1	1.1.1* Tingkat kemiskinan ekstrim. 1.2.2* Presentase laki – laki, perempuan dan anak – anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definsi nasional. 1.4.1* Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.			1		2
	Tujuan 8	8.1.1* Laju pertumbuhan PDB perkapita 8.1.1 (a) PDB per kapita 8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	1	1	1		
	Tujuan 10	10.1.1 (a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok 10.1.1 (f) Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal. 10.2.1* Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas	1				2
	Tujuan 16	16.10.2.(a) Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif.					1
Dinas Kesehatan	Tujuan 1	1.3.1* Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan 1.3.1 (a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan			2		
	Tujuan 3	3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI). 3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas Kesehatan 3.3.3* Kejadian Malaria per 1.000 orang 3.3.4* Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk 3.3.5 Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta 3.4.1 (a) Persentase merokok pada penduduk usia 10-18 tahun 3.4.1 (b) Prevalensi tekanan darah tinggi 3.4.1 (c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun 3.8.1* Cakupan pelayanan kesehatan essensial 3.8.1 (a) Unmet Need Pelayanan Kesehatan 3.8.2 (a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun. 3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	2	2	1		8
	Tujuan 12	12.8.1. (b)Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.			1		





OPD	Jumlah Indikator Yang Menjadi Tusi		Kondisi Capaian				
	Tujuan	Indikator	Jumlah Indikator Mencapai Terget	Jumlah Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target	Jumlah Indikator TPB yang sudah dilaksanakan namun perlu perhatian khusus	Jumlah Indikator TPB yang Belum dilaksanakan	Jumlah Indikator N/A
Dinas Sosial	Tujuan 1	1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. 1.3.1 (b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang 1.5.4* Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional	1		1		2
	Tujuan 11	11.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. 11.5.2 (a) Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB					2
	Tujuan 12	12.8.1.(b) Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.			1		
	Tujuan 13	13.1.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang 13.1.3* Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana	1		1		
BKAD	Tujuan 1	1.4.2* Proporsi dan penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.		1			
	Tujuan 10	10.4.2 Dampak redistributifdari kebijakan fiscal					1
Dinas PUPR	Tujuan 2	2.4.1 (a) Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan	1				
	Tujuan 6	6.1.1 Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman 6.2.1 Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun 6.4.2 (a) Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya 6.4.2 (b) Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaanya		2			2
	Tujuan 9	9.1.1 (a) Kondisi mantap jalan nasional.			1		
	Tujuan 11	11.3.1 (a) Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk 11.6.1 (a) Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya 11.6.1 (b) Persentase sampah nasional yang terkelola			1		2
Dinas Ketahanan Pangan Kota Jambi	Tujuan 2	2.a.1* Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah 2.c.1* Indikator anomali harga pangan			1		1
BNN	Tujuan 3	3.5.1 (b) Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi					1





OPD	Jumlah Indikator Yang Menjadi Tusi		Kondisi Capaian				
	Tujuan	Indikator	Jumlah Indikator Mencapai Terget	Jumlah Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target	Jumlah Indikator TPB yang sudah dilaksanakan namun perlu perhatian khusus	Jumlah Indikator TPB yang Belum dilaksanakan	Jumlah Indikator N/A
Dinas Pendidikan	Tujuan 4	4.1.2* Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat. 4.1.2 (a) Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/ sederajat 4.2.2* Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin. 4.3.1* Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin 4.3.1 (a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT). 4.4.1 (a) Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). 4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/laki-laki, (b pedesaan/perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas 4.6.1 (a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	3	2	3		1
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi	Tujuan 5	5.6.2* Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan Pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.					1
Dinas Lingkungan Hidup	Tujuan 6	6.3.1(a) Persentase limbah cair industri cair yang diolah secara aman					1
	Tujuan 11	11.6.1 (a) Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya 11.6.1 (b) Persentase sampah nasional yang terkelola 11.6.2 (a) Rata-rata tahunan materi partikular halus PM 10 11.6.2 (b) Indeks Kualitas Udara 11.7.1 (a) Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua	1		2		2
	Tujuan 12	12.3.1 (a) Persentase Sisa Makanan 12.4.1 (a) Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan Merkuri 12.4.2* (a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengelolaannya 12.5.1 (a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang. 12.6.1 (a) Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001		1	1		3
Sekretariat Daerah	Tujuan 7	7.1.1* menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern 7.1.2 (a) Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga 7.1.2 (b) Rasio penggunaan gas rumah tangga	2		1		
	Tujuan 10	10.3.1 (d) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM internasional					1





OPD	Jumlah Indikator Yang Menjadi Tusi		Kondisi Capaian				
	Tujuan	Indikator	Jumlah Indikator Mencapai Terget	Jumlah Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target	Jumlah Indikator TPB yang sudah dilaksanakan namun perlu perhatian khusus	Jumlah Indikator TPB yang Belum dilaksanakan	Jumlah Indikator N/A
	Tujuan 16	16.3.1.(b) Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi 16.3.2.(a) Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan. 16.3.3.(a) Indeks Akses terhadap Keadilan (Access to Justice Index) 16.5.1.(a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). 16.10.1(b) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). 16.b.1.(a) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.		1			5
	Tujuan 17	17.17.1.(b) Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). 17.17.1.(c) Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi.			1		1
Dinas Perhubungan Kota Jambi	Tujuan 9	9.1.2* Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi					1
Dinas Perindustrian dan perdagangan	Tujuan 9	9.2.1 (a) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur		1			
Polres Jambi	Tujuan 10	10.3.1 (b) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).					1
	Tujuan 16	16.1.1 (a) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir. 16.1.2 (a) Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.					2
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota jambi	Tujuan 10	10.3.1 (c) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	1				
	Tujuan 16	16.2.2* Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi. 16.10.1 (c) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap Perempuan			1		1
Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM	Tujuan 10	10.4.1 (b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 10.7.2 (a) Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan 10.7.2 (b) Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi			1		2
Bank Indonesia	Tujuan 10	10.5.1 (a) Indikator Kesehatan Perbankan.					1
Dinas Pemadam Kebakaran	Tujuan 11	11.b.2* Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana					1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tujuan 11	11.c.1 (a) Persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan, dan menggunakan Material Lokal					1





OPD	Jumlah Indikator Yang Menjadi Tusi		Kondisi Capaian				
	Tujuan	Indikator	Jumlah Indikator Mencapai Terget	Jumlah Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target	Jumlah Indikator TPB yang sudah dilaksanakan namun perlu perhatian khusus	Jumlah Indikator TPB yang Belum dilaksanakan	Jumlah Indikator N/A
Inspektorat Kota	Tujuan 12	12.6.1* Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya					1
	Tujuan 16	16.6.1(b) Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B 16.6.1 (c) Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B 16.6.2 (a) Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.		1	1		1
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Tuuan 12	12.b.1(a) Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development					1
BPK RI	Tujuan 16	16.6.1(a) Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 16.5.1 (a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	1				1
Badan Kepegawaian Daerah (BKD)	Tujuan 16	16.7.1 (a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 16.7.1 (b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).		1	1		
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tujuan 16	16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menurut umur 16.9.1 (a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah 16.9.1 (b) Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun.	3				
	Tujuan 17	17.19.2 (b) Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register).	1				
Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda)	Tujuan 17	17.1.1.* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya 17.1.1 (a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB 17.1.2* Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.					3
Kesbangpol	Tujuan 5	5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah		1			
Diskominfo	Tujuan 5	5.b.1* Proporsi individu yang memiliki telepon genggam.	1				
	Tujuan 17	17.8.1* Persentase pengguna internet		1			





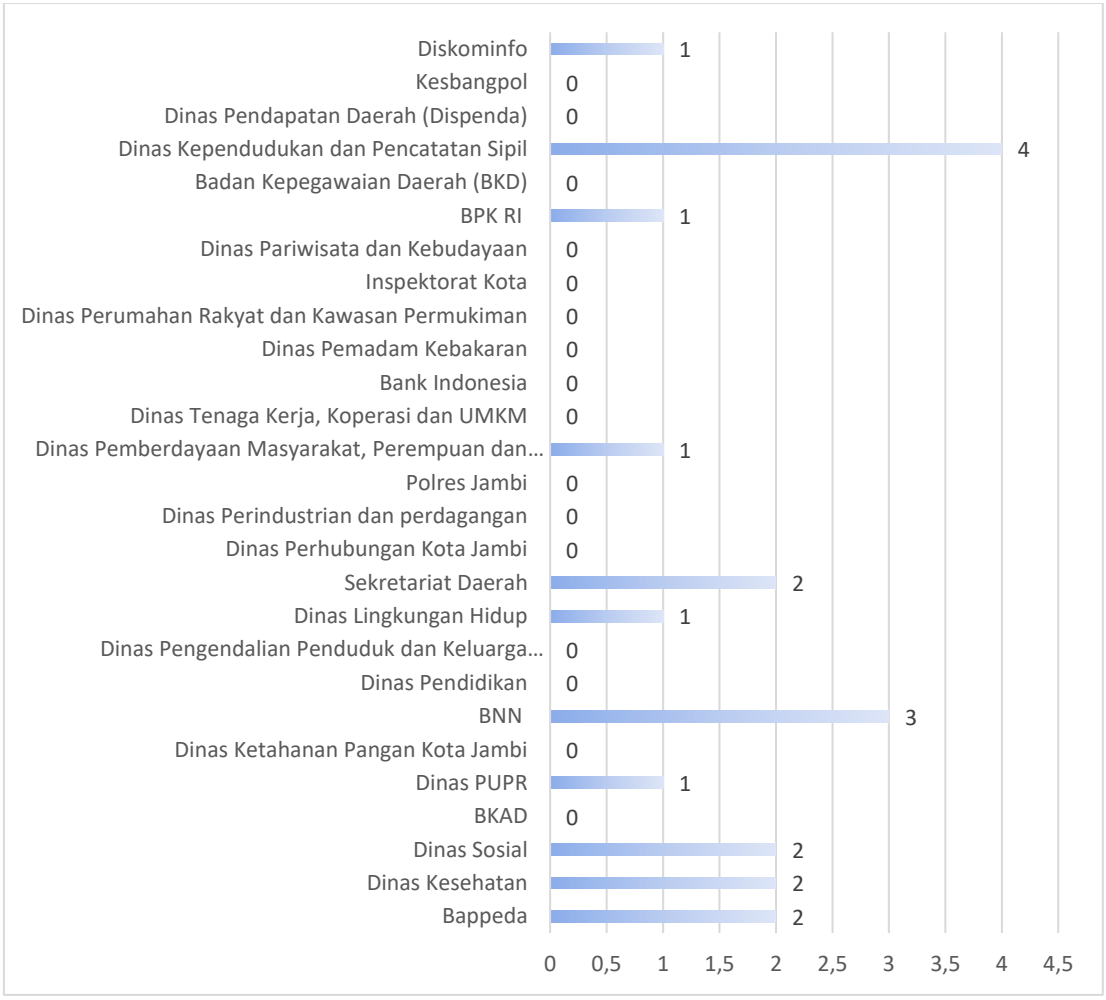

Gambar 5.2
Grafik Jumlah Indikator Mencapai Terget Pada Perangkat Daerah (PD)





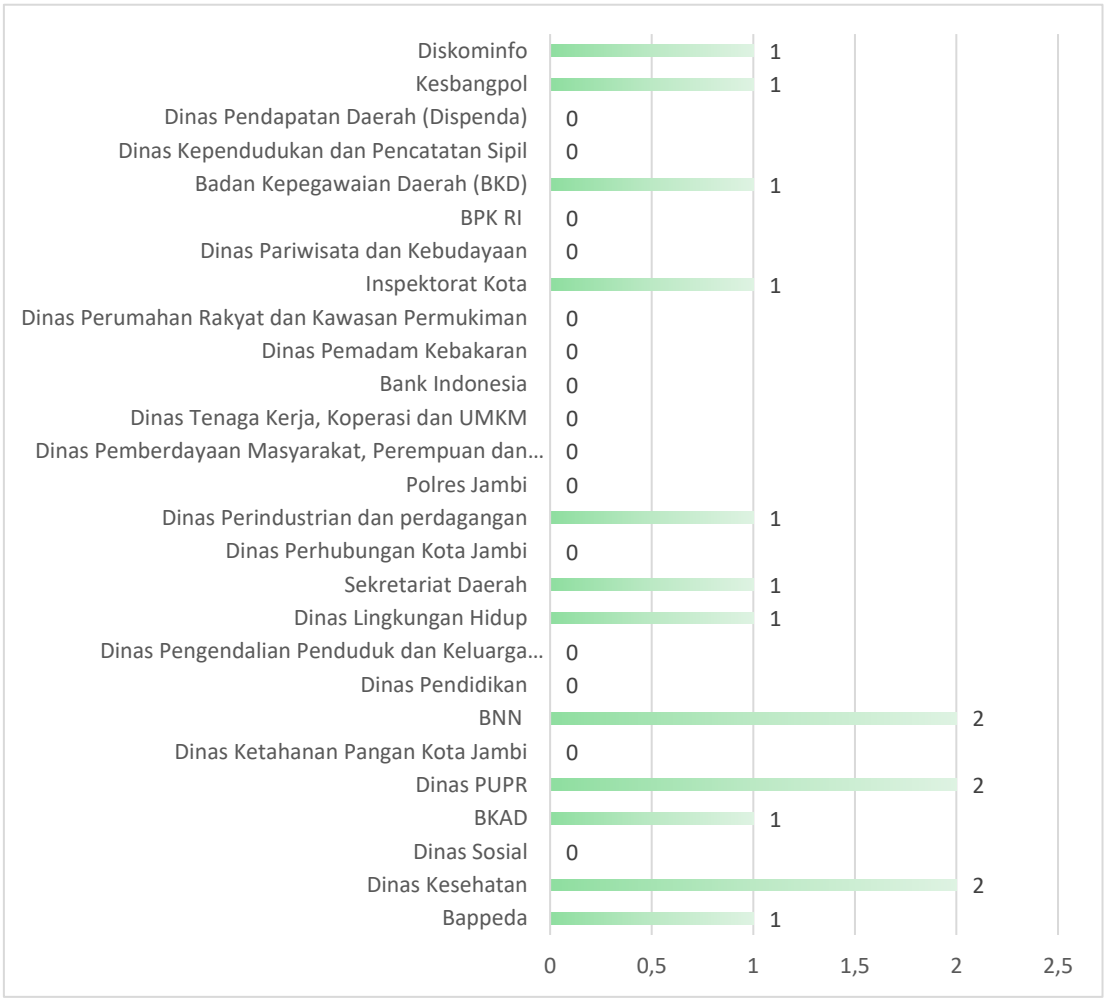

Gambar 5.3
Grafik Jumlah Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target Pada Perangkat Daerah (PD)



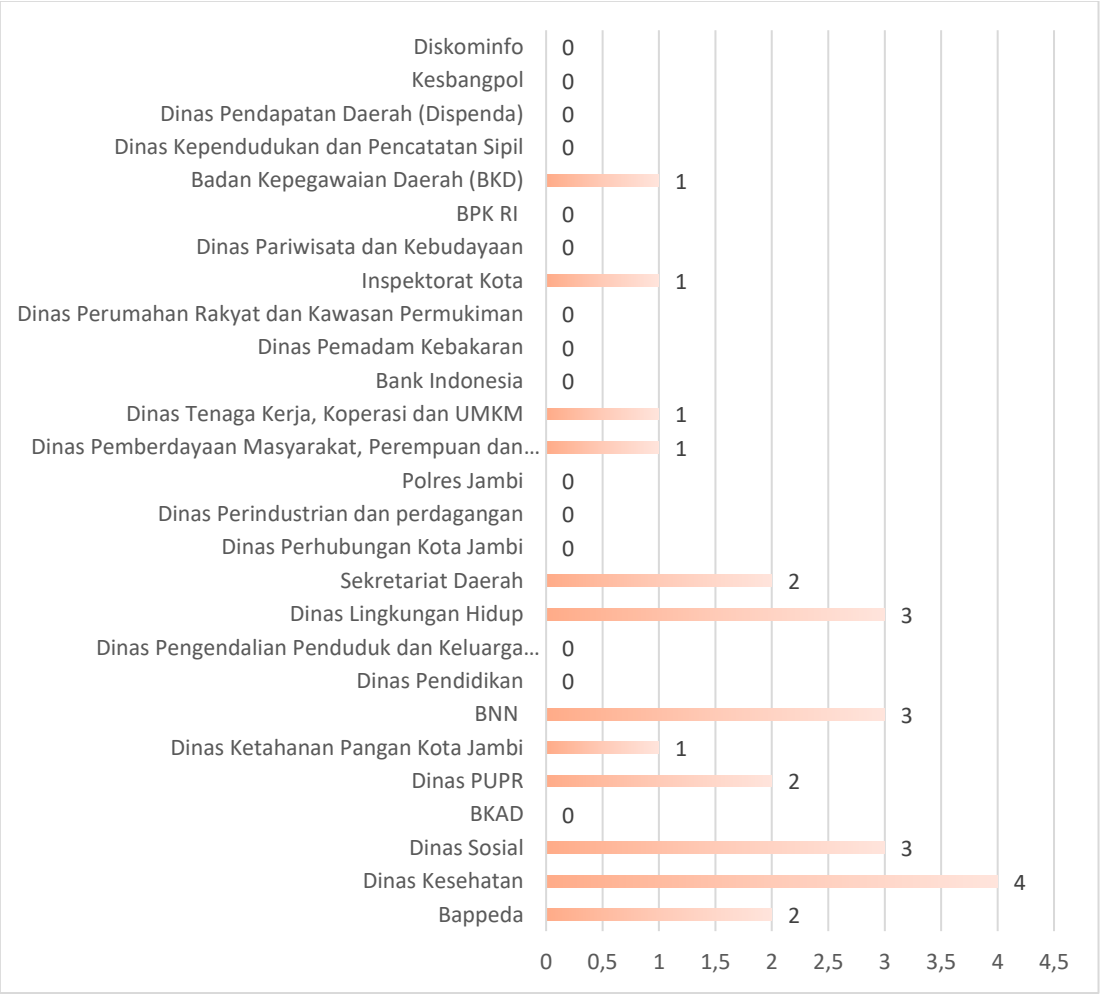

Gambar 5.4
Grafik Indikator TPB yang sudah dilaksanakan namun perlu perhatian khusus Pada Perangkat Daerah (PD)





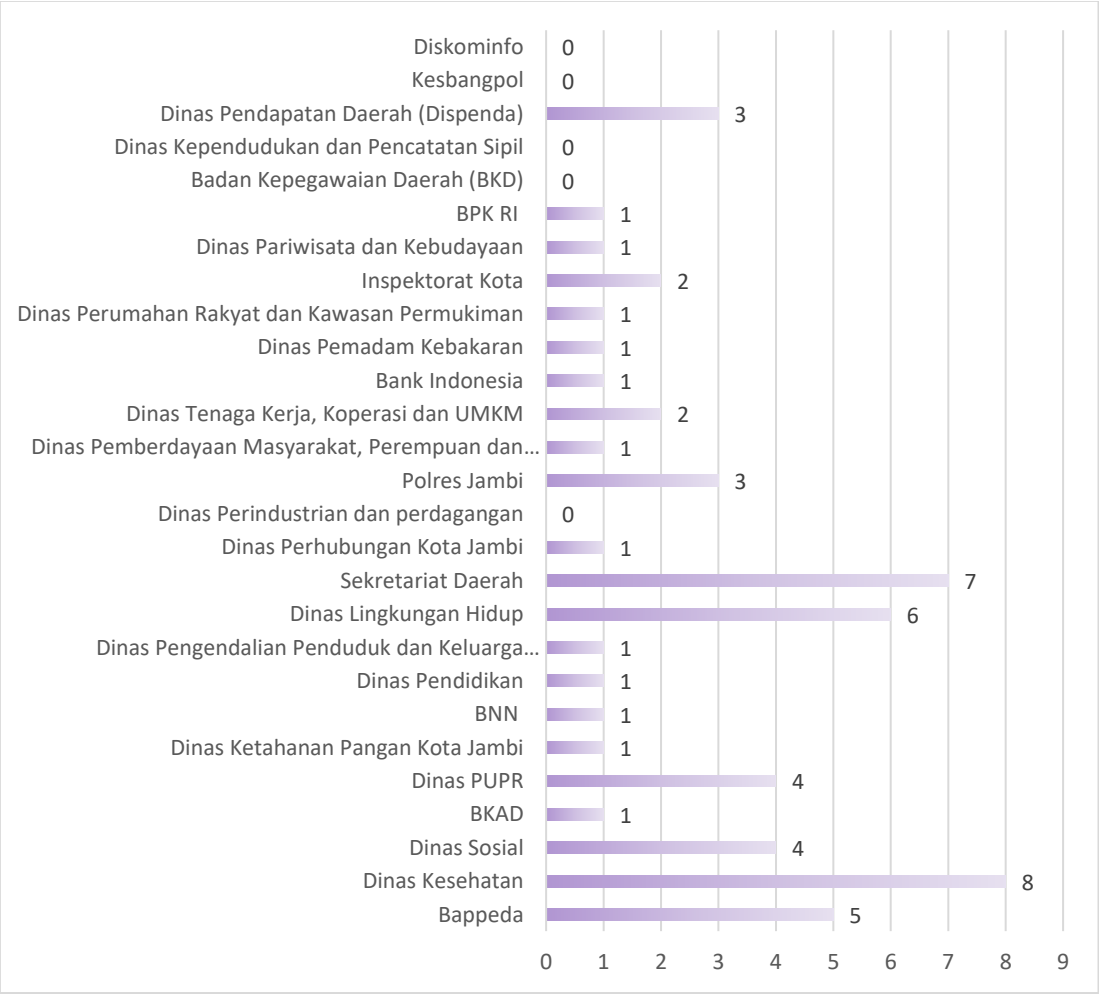

Gambar 5.5
Grafik Indikator TPB yang Tidak Memiliki Data (N/A) Pada Perangkat Daerah (PD)







BAB VI

ALTERNATIF SKENARIO DAN REKOMENDASI

6.1 PENDEKATAN PERUMUSAN ALTERNATIF SKENARIO DAN REKOMENDASI

Skenario dan rekomendasi merupakan masukan yang dapat diberikan dalam penyusunan rancangan awal RPJMD Kota Jambi selanjutnya berdasarkan hasil pengkajian daya dukung daya tampung lingkungan hidup, isu strategis Pembangunan berkelanjutan, dan kondisi ketercapaian indikator TPB.

Perumusan skenario pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) didasarkan pada hasil analisis hubungan antara kesenjangan (gap)/masalah dan TPB lainnya. Analisis gap/permasalahan TPB diuraikan berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dibahas sebelumnya dan dinilai penting untuk ditangai dalam konteks pembangunan daerah selama kurun waktu 20 (duapuluh) tahun kedepan. Secara terstruktur, rumusan topik dalam TPB masing-masing prioritas menjadi dasar penentuan pencapaian hasil yang diharapkan dalam rumusan RPJPD Kota Jambi pada masa yang akan datang.

Perumusan dilakukan dengan serangkaian kegiatan, yaitu: penyiapan draft alternatif yang selanjutnya dibahas bersama. Rangkaian rekomendasi disampaikan melalui ilurtrasi sebagai berikut:





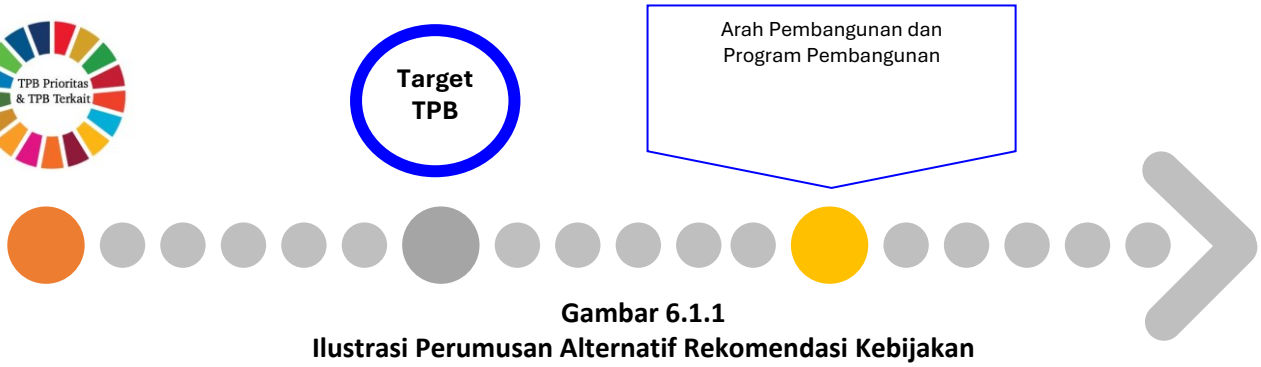

Gambar 6.1.1
Ilustrasi Perumusan Alternatif Rekomendasi Kebijakan

Perumusan rekomdendasi diawali dengan melihat keterkaitan Isu PB strategis dengan indikator terkait. Konsep ini dimaksudkan agar Isu PB yang sudah disepakati dan dirumuskan dapat memberikan pengaruh selain kondisi capaian indikator TPB. Matriks keterkaitan antara Isu PB stragis dengan kondisi capaian Indikator TPB diuraikan dengan tabel berikut ini:





Tabel VI.1.1
Matriks Keterkaitan Isu PB Strategis dengan Indikator TPB

ISU PB	Deskripsi Isu	6 Muatan KLHS	Sasaran Yang Diharapkan	Indikator TPB Terkait	
				Butuh Upaya Tambahan	BAU
Tata Guna Lahan (LH1)	Peningkatan perkembangan ekonomi dan sosial Kota Jambi sebagai pusat utama Provinsi Jambi berimplikasi terhadap peningkatan kebutuhan lahan pengembangan yang selanjutnya berdampak terhadap kerentanan pemanfaatan tidak sesuai daya dukung dan kepadatan yang berujung penurunan kualitas lingkungan hidup	**a) Kapasitas D3TLH ;** Berpengaruh terhadap pemanfaatan lahan yang tidak sesuai daya dukung, seperti lahan basah atau paparan banjir. Semakin menurun lahan potensi pertanian perkotaan yang berdampak terhadap semakin rendahnya daya dukung pangan. **b) Perkiraan Dampak resiko LH;** Peningkatan tutupan lahan berdampak terhadap peningkatan *runoff* dan resiko bencana banjir di kawasan permukiman. **c) Kinerja JE;** Jasa ekosistem penyediaan air yang dalam kategori sangat rendah hingga sedang akan semakin menurun karena berkurangnya air tanah sebagai akibat semakin meningkatnya tutupan lahan. Permasalahan lainnya adalah semakin menurunya JE tata kelola air. **d) Status Mutu dan ketersediaan SDA;** Semakin terbatas ketersediaan lahan dan meningkatnya harga lahan, berpotensi pemanfaatan lahan untuk menjaga mutu sumber daya alam seperti sempadan sungai dan danau.	1. Penetapan dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan; 2. Perlindungan lahan basah dari kegiatan fisik bangunan; 3. Perlindungan kawasan sempadan sungai dan danau; 4. Rehabilitasi DAS dan Sub DAS Batanghari; 5. Pengembangan kegiatan budidaya di lahan sesuai daya dukung; 6. Pengembangan permukiman yang aman, nyaman, dan berwawasan lingkungan; 7. Peningkatan ketersediaan ruang terbuka hijau baik publik maupun privat	• 2.a.1* Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah • 11.7.1 (a) Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua	• 2.4.1 (a) Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan • 11.3.1 (a)Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk





ISU PB	Deskripsi Isu	6 Muatan KLHS	Sasaran Yang Diharapkan	Indikator TPB Terkait	
				Butuh Upaya Tambahan	BAU
		e) **Ketahanan dan Potensi Kehati;** perubahan guna lahan dari non terbangun menjadi terbangun, berpotensi dampak terhadap menurunnya tempat hidup flora dan fauna, serta peningkatan sedimen yang mendukung pendangkalan DAS dan Sub Das termasuk danau. f) **Kerentanan Kapasitas terhadap Adaptasi Perubahan iklim;** potensi penurunan lahan hijau dan selanjutnya menurunkan penyerap karbon			
Kualitas Air (LH2)	Penurunan kualitas air permukaan di Sub DAS dalam wilayah Kota Jambi yang ditunjukan dengan indikator pencemaran hingga kategori sedang. Kondisi ini terjadi karena penyaluran langsung *greywater* rumah tangga dan termasuk kegiatan sosial ekonomi ke saluran yang pada akhirnya terkoneksi dengan Sub DAS	a) **Kapasitas D3TLH ;** Semakin meningkat sumber pencemar yang disalurkan ke Sub DAS menyebabkan semakin menurunnya daya tampung air yang sudah pada kategori tercemar sedang. b) **Perkiraan Dampak resiko LH;** Peningkatan jumlah penduduk, kegiatan sosial dan ekonomi berpotensi dampak peningkatan kadar pencemaran air permukaan. c) **Kinerja JE;** Jasa ekosistem pengelolaan air limbah di Kota Jambi didominasi kategori sangat rendah hingga sedang.	Kadar pencemaran air permukaan tidak melampaui baku mutu	6.2.1 Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	• 6.3.1 (a) Persentase limbah cair industri cair yang diolah secara aman • 6.4.2 (b) Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaanya • 12.4.1.(a) Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan Merkuri • 12.4.2.* (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengelolaannya





ISU PB	Deskripsi Isu	6 Muatan KLHS	Sasaran Yang Diharapkan	Indikator TPB Terkait	
				Butuh Upaya Tambahan	BAU
		Perkembangan kota akan berpotensi dampak terhadap peningkatan Persentase pengelolaan air limbah pada kategori sangat rendah dan rendah. **d) Status Mutu dan ketersediaan SDA;** Penurunan mutu air sungai dan danau. **e) Ketahanan dan Potensi Kehati;** penurunan mutu air sungai dan danau akan berdampak terhadap penurunan keanekaragaman hayati di sungai dan danau.			
Kualitas Udara (LH3)	Peningkatan kegiatan perkotaan yang diikuti oleh peningkatan emisi karbon	**a) Kapasitas D3TLH ;** Kualitas udara buruk berpotensi dampak terhadap . kerusakan fisiologis tanaman pertanian pangan perkotaan, seperti nekrosis daun, akibat partikulat dan senyawa-senyawa kimia beracun dalam udara. **b) Perkiraan Dampak resiko LH;** Dampak kesehatan yang selanjutnya berdampak peningkatan konsumsi rumah tangga untuk biaya kesehatan, serta penurunan produktivitas kerja **c) Kinerja JE;** Jasa ekosistem kualitas udara di Kota Jambi sekitar 90,94% pada kategori	Kualitas udara yang baik		11.6.2. (b) Indeks Kualitas Udara





ISU PB	Deskripsi Isu	6 Muatan KLHS	Sasaran Yang Diharapkan	Indikator TPB Terkait	
				Butuh Upaya Tambahan	BAU
		sangat rentah hingga sedang, dengan komposisi: 35,37% sangat rendah, 7,75% rendah, dan 47,46% sedang. **d) Status Mutu dan ketersediaan SDA;** Penurunan mutu udara perkotaan **e) Ketahanan dan Potensi Kehati;** polusi udara dapat merusak atau menghancurkan habitat hewan di kota, yang mengurangi ketersediaan tempat tinggal dan makanan bagi beragam spesies. Selain itu, polusi udara dapat memengaruhi perilaku hewan, termasuk migrasi, reproduksi, dan pola makan, yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem perkotaan. Kualitas udara yang buruk juga dapat memengaruhi kesehatan hewan, menyebabkan gangguan pernapasan dan masalah kesehatan lainnya Dampak terhadap tanaman adalah pertumbuhan tanaman yang terhambat akibat peningkatan kadar ozon troposferik yang menghambat pertumbuhan tanaman dan mengurangi produktivitas pertanian di sekitar perkotaan. **f) Kerentanan Kapasitas terhadap Adaptasi Perubahan iklim;** potensi penurunan kemampuan			





ISU PB	Deskripsi Isu	6 Muatan KLHS	Sasaran Yang Diharapkan	Indikator TPB Terkait	
				Butuh Upaya Tambahan	BAU
		tanaman dalam menyerap karbon			
Resiko Bencana (LH4)	Dilihat pada peta sebaran kawasan rawan banjir, Kerentanan tidak lagi hanya terjadi di sekitar DAS Batanghari, melainkan juga pada sub DAS dan bahkan saluran sekunder. Kondisi ini disebabkan oleh karena semakin menurunnya bidang resapan dan meningkatnya *runoff* sehingga subDAS (sistem primer) dan saluran sekunder tidak lagi mampu melayani pengaliran dengan kecepatan ideal.	**a) Kapasitas D3TLH ;** • Penurunan kualitas air permukaan; • Kerusakan lahan pertanian perkotaan. • Penurunan lahan layak pengembangan permukiman. **b) Perkiraan Dampak resiko LH;** Dampak ekonomi dan sosial penduduk hingga finansial pemerintah daerah. **c) Kinerja JE;** Jasa ekosistem tata Kelola air di Kota Jambi, sebesar 82,43% berada di kategori sangat rendah hingga sedang. **d) Status Mutu dan ketersediaan SDA;** Penurunan luas lahan layak perkembangan permukiman **e) Ketahanan dan Potensi Kehati;** Kerusakan kehati di sempadan sungai dan paparan banjir lainnya. **f) Kerentanan Kapasitas terhadap Adaptasi Perubahan iklim;** Penurunan luas hijau yang terpapar banjir dan selanjutnya berdampak penurunan penyerapan karbon.	• Kerentanan bencana yang dapat diminimalisir • Kejadian bencana termitigasi dengan baik.	• (11.7.1(a) Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua	• 11.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.





ISU PB	Deskripsi Isu	6 Muatan KLHS	Sasaran Yang Diharapkan	Indikator TPB Terkait	
				Butuh Upaya Tambahan	BAU
Persampahan (LH5)	• Belum semua bagian wilayah terlayani oleh sistem persampahan kota. Pelayanan persampahan saat ini: 79,07%; • 20 (duapuluh) tahun yang akan datang produksi timbulan sampah diperkirakan akan meningkat sekitar 3.269,93 m^3/hari	**a) Kapasitas D3TLH ;** Dampak terhadap daya tampung air dan tanah terhadap sampah yang tidak terkelolaa (dibuang ke badan air/dihampar di tanah) **b) Perkiraan Dampak resiko LH;** Pencemaran udara, tanah, dan air yang berpotensi dampak terhadap air minum dan kesehatan Masyarakat dan selanjutnya peningkatan pengeluaran/konsumsi untuk rehabilitasi kesehatan. **c) Kinerja JE;** Jasa ekosistem hama penyakit di Kota Jambi, sebesar 83,30% berada di kategori sangat rendah hingga sedang. **d) Status Mutu dan ketersediaan SDA;** Penurunan mutu kualitas air tanah dan air permukaan **e) Ketahanan dan Potensi Kehati;** Kerusakan kehati di sungai dan danau. **f) Kerentanan Kapasitas terhadap Adaptasi Perubahan iklim;** Tumpukan sampah di udara terbuka mengeluarkan gas metana, salah satu gas yang bertanggung jawab atas	• Sampah tereduksi di sumber; • Peningkatan layanan persampahan kota	• 11.6.1 (b) Persentase sampah nasional yang terkelola	• 12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.





ISU PB	Deskripsi Isu	6 Muatan KLHS	Sasaran Yang Diharapkan	Indikator TPB Terkait	
				Butuh Upaya Tambahan	BAU
		pemanasan global			
Perkembangan Ekonomi dan Infrastruktur (LH6)	• Perkembangan ekonomi adalah salah satu tujuan Pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun perlu pengelolaan keseimbangan dengan lingkungan hidup agar keuntungan yang didapat tidak menimbulkan peningkatan kerugian sebagai dampak penurunan kualitas lingkungan hidup. • Peningkatan pergerakan/lalu lintas yang semakin tidak sebanding dengan kapasitas jalan yang telah menyebabkan penurunan tingkat kemampuan pelayanan jalan; • Kebutuhan pengembangan PSU sebagai dampak perkembangan jumlah penduduk dan perkembangan kawasan terbangun.	**a) Kapasitas D3TLH ;** Peningkatan emisi berdampak lebih lanjut terhadap Kualitas udara buruk berpotensi dampak terhadap___. kerusakan fisiologis tanaman pertanian pangan perkotaan, seperti nekrosis daun, akibat partikulat dan senyawa-senyawa kimia beracun dalam udara. **b) Perkiraan Dampak resiko LH;** • Pembangunan tidak sesuai daya dukung lingkungan hidup berdampak terhadap penurunan kualitas lingkungan permukiman perkotaan; • Kemacetan dan dampak lanjutan terhadap peningkatan emisi **c) Kinerja JE;** Penurunan jasa layanan ekosistem terutama kelompok penyediaan dan pengaturan akibat peningkatan tutupan lahan/perubahan rona eksisting **d) Status Mutu dan ketersediaan SDA;** Penurunan mutu udara perkotaan **e) Ketahanan dan Potensi Kehati;** perubahan guna lahan dari non terbangun menjadi terbangun,	• Perkembangan ekonomi kota dan peningkatan pendapatan Masyarakat; • Aksesibilitas antar kawasan tercipta dengan baik; • Infastruktur tercukupi	• 1.1.1* Tingkat Kemiskinan Ekstrim • 8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun. • 9.1.1. (a) Kondisi mantap jalan nasional.	





ISU PB	Deskripsi Isu	6 Muatan KLHS	Sasaran Yang Diharapkan	Indikator TPB Terkait	
				Butuh Upaya Tambahan	BAU
		berpotensi dampak terhadap menurunnya tempat hidup flora dan fauna, serta peningkatan sedimen yang mendukung pendangkalan DAS dan Sub Das termasuk danau. **f) Kerentanan Kapasitas terhadap Adaptasi Perubahan iklim;** potensi penurunan lahan hijau dan selanjutnya menurunkan penyerap karbon			
Peningkatan SDM (LH7)	Kebutuhan tata Kelola birokrasi dan *stakeholders* yang terlibat dalam perwujudan Pembangunan berkelanjutan.	**a) Kapasitas D3TLH ;** Peningkatan dan penurunan tata Kelola Pembangunan berkelanjutan akan sangat mempengaruhi terhadap bertahannya D3TLH atau justru penurunan. **b) Perkiraan Dampak resiko LH;** Peningkatan dan penurunan tata Kelola Pembangunan berkelanjutan mempengaruhi jumlah, luas, dan tingkat resiko lingkungan hidup **c) Kinerja JE;** Peningkatan dan penurunan tata Kelola Pembangunan berkelanjutan berpengaruh terhadap kinerja jasa layanan ekosistem **d) Status Mutu dan ketersediaan SDA;**	Peningkatan tata Kelola Pembangunan berkelanjutan	• 16.6.1.(c) Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B	• 11.b.2* Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana • 16.6.1.(b) Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B





ISU PB	Deskripsi Isu	6 Muatan KLHS	Sasaran Yang Diharapkan	Indikator TPB Terkait	
				Butuh Upaya Tambahan	BAU
		Peningkatan dan penurunan tata Kelola Pembangunan berkelanjutan mempengaruhi eksistensi mutu sumberdaya alam **e) Ketahanan dan Potensi Kehati;** Peningkatan dan penurunan tata Kelola Pembangunan berkelanjutan mempengaruhi konsistensi ketersediaan Kehati. **f) Kerentanan Kapasitas terhadap Adaptasi Perubahan iklim;** Kebutuhan peningkatan tata Kelola dalam mencegah peningkatan perubahan iklim dan kebutuhan peningkatan Upaya mitigasi perubahan iklim yang sudah terjadi			

Sumber: Tim Penyusun





Dari tabel diatas, dapat terlihat bahwa terdapat 8 (delapan) indikator TPB yang butuh upaya tambahan dan terkait dengan Isu PB strategis. 8 (delapan) indikator TPB tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel VI.1.2
Rekapitulasi Indikator TPB yang Butuh Upaya Tambahan
Yang Terkait Dengan Isu PB Strategis

Tujuan	Indikator TPB Butuh Upaya Tambahan
Tujuan 1	1.1.1* Tingkat Kemiskinan Ekstrim
Tujuan 2	2.a.1* Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah
Tujuan 3	-
Tujuan 4	-
Tujuan 5	-
Tujuan 6	6.2.1 Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun
Tujuan 7	-
Tujuan 8	8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.
Tujuan 9	9.1.1. (a) Kondisi mantap jalan nasional.
Tujuan 10	-
Tujuan 11	• 11.7.1 (a) Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua • 11.6.1 (b) Persentase sampah nasional yang terkelola
Tujuan 12	-
Tujuan 13	-
Tujuan 14	-
Tujuan 15	-
Tujuan 16	16.6.1.(c) Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B
Tujuan 17	-

Sumber: Tim Penyusun

6.2 ALTERNATIF SKENARIO DAN REKOMENDASI

6.2.1 Alternatif Skenario dan Rekomendasi Daya Dukung Dan Daya Tampung

Sebagai pusat utama di Provinsi Jambi, Kota Jambi terus memperlihatkan perkembangan fisik secara signifikan, namun demikian berbagai permasalahan lingkungan juga tidak kalah peningkatannya. Pada dasarnya, dengan kesamaan cara pandang dan kemauan yang kuat, perkembangan dengan konsekuensi dampak dapat ditekan dengan kebijakan-kebijakan yang terarah dalam konteks menjaga keseimbangan kualitas lingkungan di Kota Jambi tersebut.

Perumusan sejumlah kemungkinan konsep pengembangan di masa depan ini didasarkan pada isu strategis yang telah ditetapkan dan diuraikan pada substansi sebelumnya. Alternatif skenario yang direkomendasikan,

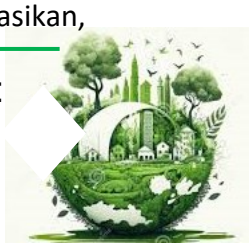



pempertimbangkan keterkaitan Isu PB strategis dengan indikator TPB yang memerlukan perhatian khusus. Uraian Isu PB strategis pada dasarnya juga memiliki pengaruh terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kota Jambi. Selain sintesa tersebut, alternatif skenario yang direkomendasikan juga merupakan harapan perwujudan Kota Jambi pada masa yang akan datang.

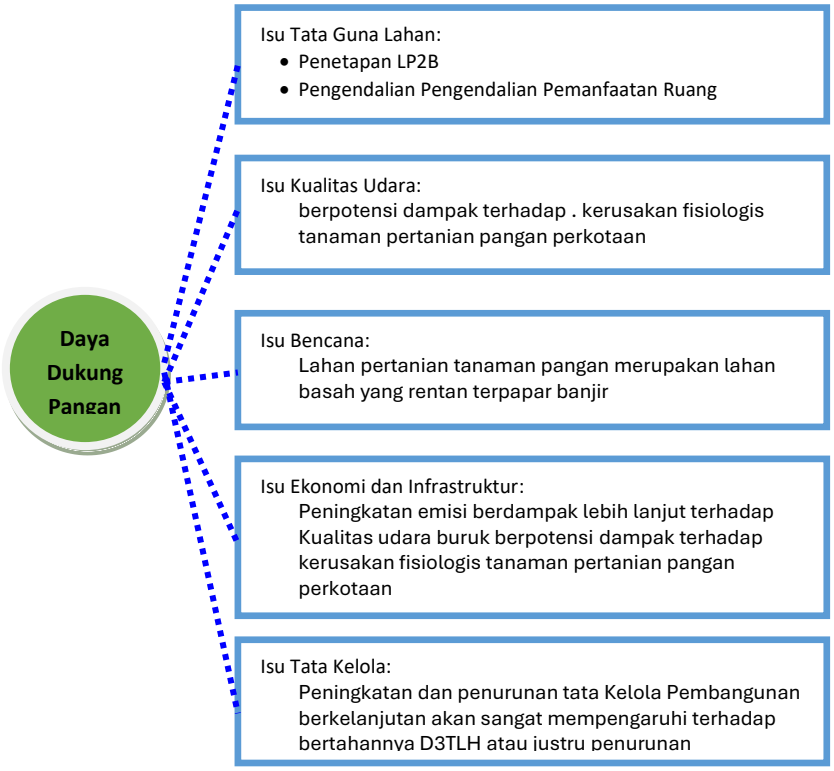

Gambar 6.2.1
Keterkaitan Daya Dukung Pangan Dengan Isu PB Strategis





Gambar 6.2.2
Keterkaitan Daya Dukung dan Daya Tampung Air
Dengan Isu PB Strategis

A. Alternatif Rekomendasi Terhadap Daya Dukung Pangan

Daya dukung lahan untuk ketahanan pangan yang seimbang ditentukan apabila luas lahan pertanian yang ada pada sustu wilayah dapat memenuhi kebutuhan fisik minimu penduduknya (imansyah dkk, 2020). Keseimbangan daya dukung lahan pertanian diwujudkan dengan kondisi dimana keadaan jumlah penduduk optimal yang mampu didukung oleh hasil tanaman pangan dari lahan pertanian yang ada (Wu dan Hu, 2020). Namun demikian, karena Kota Jambi merupakan entitas berkarakteristik perkotaan, pengembangan lahan pertanian pangan tidak menjadi dominan. Permasalahan pemenuhan kebutuhan dan ketahanan pangan kawasan perkotaan akan lebih didukung oleh wilayah lainnya yang berkarakteristik sebagai wilayah dengan domonasi kegiatan pertanian.

Daya dukung pangan pada dasarnya terkait kuat dengan TPB 2 (Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan Dan Gizi Yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan). Terdapat 2 (dua) indikator yang





menjadi kewenangan Pemerintah Kota, yaitu: Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan, dan Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah.

Untuk luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) di Kota Jambi seluas 459 Ha dan luas lahan Pertanian keseluruhan di Kota Jambi seluas 512 Ha. Maka proporsi luas lahan Pertanian yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebesar 89,64%. Sementara untuk total anggaran yang dialokasikan untuk urusan pertanian sebesar 2.671.474.117 rupiah, sedangkan nilai tambah Pertanian pada PDRB sebesar 168.690.000.000 rupiah pada tahun 2022. Jadi nilai Indeks orientasi Pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah sebesar 1,58%.

Daya dukung pangan sangat terkait dengan lahan pertanian. Daya dukung ini terkait dengan Isu PB strategis Tata Guna Lahan (LH1) dengan permasalahan sebagai berikut:

a. Perubahan pemanfaatan lahan dari pertanian menjadi kegiatan perumahan;
b. Pencegahan perubahan guna lahan melalui penetapan LP2B yang termuat dalam RTRW Kota Jambi;

Untuk menjawab atau mengantisipasi permasalahan tersebut diatas yang memang memiliki kecenderungan mengalami peningkatan seiring dengan *Demand* lahan akibat peningkatan jumlah penduduk, serta perkembangan kegiatan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, memang diperlukan upaya untuk mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan.





Tabel VI.2.1
Alternatif Rekomendasi Arah Kebijakan Ketahanan Pangan

ISU Lingkungan Hidup	No TPB	No. Indikator	Indikator Dengan Upaya Tambahan	Indikator BAU	Rumusan Keterkaitan Isu Dengan Daya Dukung Pangan	Rekomendasi
Tata Guna Lahan (LH 1)	TPB 2	2.a.1*	Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah	-	• Perkembangan sosial ekonomi Kota Jambi sebagai pusat utama Provinsi Jambi berimplikasi terhadap kebutuhan lahan pengembangan permukiman, sehingga menurunkan konsistensi lahan pertanian; • Sebagai kawasan perkotaan, tidak memprioritaskan sektor pertanian. Pemenuhan kebutuhan pangan lebih didukung oleh wilayah eksternal; • Beberapa bagian wilayah merupakan lahan dengan daya dukung rendah untuk kegiatan permukiman, dikarenakan merupakan lahan basah dan kecenderungan sebagai paparan banjir.	a. Skenario: Mempertahankan lahan basah perkotaan sebagai lahan non terbangun. Selain untuk mencegah limpasan penyebab meningkatnya kerentanan terhadap banjir, juga dapat dimanfaatkan sebagai lahan pengembangan kegiatan pertanian tanaman pangan. b. Arah Kebijakan: Melakukan perlindungan dan pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan/atau Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)

Sumber: Tim Penyusun





B. Alternatif Rekomendasi Terhadap Daya Dukung Air

Pada substansi sebelumnya sudah digambarkan bahwa Daya dukung air di wilayah Kota Jambi pada kondisi belum terlampaui, namun jasa ekosistem penyediaan air dominan pada kategori sangat rendah hingga sedang. Kondisi ini disebabkan karena sebagian besar wilayah sudah terbangun. Distribusi zona dengan jasa ekosistem penyediaan air pada kategori berlaku pada zona-zona yang cenderung belum terbangun. Dari dinamika ini dapat disimpulkan bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan berimplikasi terhadap kebutuhan lahan pengembangan permukiman serta kegiatan ikutannya, maka tutupan lahan terbangun juga akan semakin meningkat, pada akhirnya akan berpengaruh terhadap jasa ekosistem penyediaan air yang juga akan terus semakin menurun.

Perubahan penggunaan lahan mengakibatkan penurunan kualitas lahan dalam hal ini tentunya adalah kawasan-kawasan terbuka yang biasa menjadi bidang resap air hujan menjadi kedap dan selanjutnya menjadi *runoff* dan berdampak terhadap aspek lain, yaitu: kerentanan terhadap bencana banjir. Kondisi ini juga sudah ditunjukan oleh karakteristik jasa layanan ekosistem tata Kelola air yang berada pada kategori yang dominan sangat rendah hingga sedang (82,43%). Untuk isu daya dukung dan daya tampung air ini, arah kebijakan yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:





Tabel VI.2.2
Alternatif Rekomendasi Arah Kebijakan Daya Dukung dan Daya Tampung Air

ISU Lingkungan Hidup	No TPB	Indikator Dengan Upaya Tambahan	Indikator BAU	Rumusan Keterkaitan Isu Dengan Daya Dukung Pangan	Rekomendasi Arah Kebijakan
Tata Guna Lahan (LH 1)	TPB 11	11.7.1 (a) Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua		• Ruang terbuka untuk penyediaan ruang resapan • Tutupan lahan mempengaruhi debit *runoff*	a. Skenario: Pengendalian tutupan lahan dan peningkatan ketersediaan ruang terbuka hijau. b. Arah Kebijakan: • Peningkatan ketersediaan lahan RTH publik minimal 20%; • Pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga konsistensi kawasan fungsi lindung; • Pengawasan untuk penyediaan lahan terbuka privat pada bangunan • Rehabilitasi/revitaliasasi kawasan sempadan Sungai dan danau
Kualitas Air (LH2)	TPB 6	6.2.1 Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	• 6.3.1 (a) Persentase limbah cair industri cair yang diolah secara aman • 6.4.2 (b) Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaanya	Zat pencemar terbesar yang ada di Sub DAS bersumber dari limbah domestik	a. Skenario: Mengendalikan baku mutu pencemaran air di SubDAS dan Danau b. Arah Kebijakan: • Pembangunan/pengembangan SPAL-D skala kota hingga skala permukiman; • Pengawasan dan pengendalian sumber pencemaran air SubDAS Batanghari. • Pengawasan dan pengendalian air limbah yang dihasilkan oleh
	TPB 12		• 12.4.1.(a) Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri		





ISU Lingkungan Hidup	No TPB	Indikator Dengan Upaya Tambahan	Indikator BAU	Rumusan Keterkaitan Isu Dengan Daya Dukung Pangan	Rekomendasi Arah Kebijakan
			dari baseline 50 ton penggunaan Merkuri • 12.4.2.* (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/ diolah berdasarkan jenis		kegiatan industri dan kegiatan ekonomi lainnya.

Sumber: Tim Penyusun





C. Alternatif Rekomendasi Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Isu PB Strategis

Selain terhadap daya dukung pangan dan air, alternatif skenario lain yang perlu di rekomendasikan adalah juga terhadap permasalahan dalam lingkup isu pembangunan berkelanjutan yang telah disepakati. Alternatif skenario tersebut diuraikan sebagai berikut:





Tabel VI.2.3
Alternatif Rekomendasi Arah Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan

ISU Lingkungan Hidup	No TPB	Indikator Dengan Upaya Tambahan	Indikator BAU	Skenario	Rekomendasi Arah Kebijakan
Tata Guna Lahan (LH 1)	TPB 2	2.a.1* Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah	2.4.1 (a) Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan	• Menjaga konsistensi lahan pertanian pangan berkelanjutan; • Mewujudkan keseimbangan Pembangunan fisik dan lingkungan; • menciptakan permukiman yang aman, nyaman, dan berwawasan lingkungan;	a. Penetapan Lahan Sawah Dilindungi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah b. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang sempadan Sungai dan Danau; c. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang pada lahan basah dan tidak sesuai daya dukung lahan; d. Revitalisasi sempadan Sungai dan danau; e. Pengendalian pengembangan perumahan; f. Pengendalian pengembangan bangunan gedung g. Pengembangan perumahan vertical h. Peningkatan penyediaan ruang terbuka hijau
	TPB 11	11.7.1 (a) Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua	11.3.1 (a) Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk		
Kualitas Air (LH2)	`TPB 6	6.2.1 Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	• 6.3.1 (a) Persentase limbah cair industri cair yang diolah secara aman • 6.4.2 (b) Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaanya	Menjaga baku mutu kualitas air Sub Das Batanghari	a. Pemantauan berkala kualitas air permukaan; b. Pengawasan dan pengendalian limbah industri dan kegiatan ekonomi penghasil limbah lainnya; c. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur pengolahan air limbah domestik
	TPB 12		• 12.4.1.(a) Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan Merkuri • 12.4.2.* (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengelolaannya		





ISU Lingkungan Hidup	No TPB	Indikator Dengan Upaya Tambahan	Indikator BAU	Skenario	Rekomendasi Arah Kebijakan
Kualitas Udara (LH3)	TPB 11		11.6.2. (b) Indeks Kualitas Udara	Mengendalikan kualitas udara sesuai baku mutu udara ambien	a. Peningkatan uji emisi; b. Menekan emisi gas buang; c. Meningkatkan ruang hijau kota.
Resiko Bencana (LH4)		(11.7.1(a) Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua	11.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	• Mengatasi luas kawasan rawan bencana banjir; • Mencegah potensi peningkatan kerentanan bencana banjir	a. Pengendalian pemanfaatan ruang kota; b. Peningkatan infrastruktur sumberdaya air pengendali banjir; c. Meningkatkan ruang hijau kota.
Persampahan (LH5)	TPB 11 TPB 12	11.6.1 (b) Persentase sampah nasional yang terkelola	12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	• Peningkatan pelayanan persampahan kota; • Reduksi sampah di sumbernya	a. Peningkatan wilayah pelayanan persampahan dengan peningkatan jumlah armada dan ritase b. Peningkatan ketersediaan fasilitas pengumpulan di kawasan pengembangan permukiman dan kawasan permukiman sekitar DAS c. Peningkatan pengembangan TPST dan TPS 3R
Perkembangan Ekonomi dan Infrastruktur (LH6)	TPB 1 TPB 8 TPB 9	• 1.1.1* Tingkat Kemiskinan Ekstrim • 8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun. • 9.1.1. (a) Kondisi mantap jalan nasional.		• Peningkatan layanan jaminan sosial • Penyediaan ruang pengembangan ekonomi yang tertata dan berwawasan lingkungan • Pengembangan sektor UMKM • Peningkatan aksesibilitas perkotaan	a. Sosialisasi untuk peningkatan keikutsertaan program jaminan sosial b. Peningkatan modal bagi pelaku usaha UMKM c. Pemusatan kawasan industri besar; d. Pembangunan jalan baru e. Pengembangan jalan eksisting f. Pengembangan trayek transportasi umum skala lingkungan





ISU Lingkungan Hidup	No TPB	Indikator Dengan Upaya Tambahan	Indikator BAU	Skenario	Rekomendasi Arah Kebijakan
Peningkatan SDM (LH7)	TPB 11		• 11.b.2* Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana	• Pengembangan infrastruktur dan aplikasi TIK • Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi • Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis TIK	a. Meningkatkan ketatalaksanaan pemerintahan yang berbasis TIK b. Meningkatkan kompetensi dan integritas ASN c. Meningkatkan Akuntabilitas kinerja pemerintah d. Meningkatkan pengawasan pembangunan secara komprehensif, transparan dan akuntabel e. Meningkatkan Koordinasi , Fasilitasi dan kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan f. Meningkatkan cakupan pelayanan publik berbasis TIK
	TPB 16	16.6.1.(c) Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B	16.6.1.(b) Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem		





6.2.2 Alternatif Skenario Dan Rekomendasi Dengan Upaya Tambahan

Sub bab ini membahas alternatif skenario dan rekomendasi pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan upaya tambahan. Proyeksi menggunakan pendekatan berdasarkan ketersediaan data series pada TPB yang sudah dianalisa pada substansi sebelumnya. Proyeksi *business as usual* diterapkan untuk membantu pencapaian TPB sesuai targetnya. Proyeksi juga diterapkan untuk membantu pencapaian TPB sesuai targetnya. Proyeksi bisnis yang diterapkan terdiri atas proyeksi optimis dan proyeksi akselerasi. Proyeksi optimis ditempuh jika target TPB yang direncanakan dapat tercapai sesuai umur RPJMD (Tahun 2045).

Setelah ditentukan TPN bermasalah atau yang memiliki *GAP* dalam pencapaian target, selanjutnya dilakukan analisis keterkaitan TPB. Analisis keterkaitan dilakukan untuk mengidentifikasi TPB apa saja yang terkait satu sama lainnya. Dengan demikian penyelesaian masalah pada satu TPB akan secara langsung atau tidak langsung memberi dampak pada TPB lain yang terkait dengannya.

Keterkaitan dapat merujuk pada keterkaitan antar tujuan, antara tujuan dan target yang relevan, atau antar target. Hubungan sebab akibat adalah hubungan terarah yang berjalan sebagai kaitan kausal yang teridentifikasi antara target selanjutnya dikuantitatifkan untuk menunjukan seberapa kuat itu dan apakah kaitan itu positif atau negatif.



Tujuan 1 : Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun

a) Analisis Proyeksi Pencapaian TPB

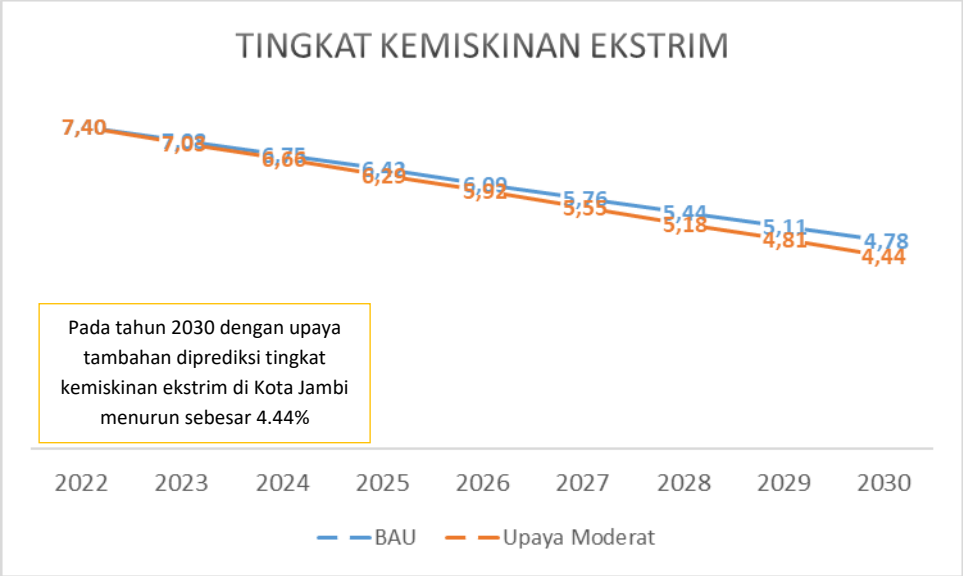

Gambar 6.2.3
Grafik Tingkat Kemiskinan Ekstrim di Kota Jambi

Tabel VI.2.4
Proyeksi Tingkat Kemiskinan Ekstrim Tahun 2022-2030 di Kota Jambi

Indikator	Indikator	Proyeksi	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.1*	Tingkat Kemiskinan Ekstrim	BAU	6,42	6,09	5,76	5,44	5,11	4,78
		Upaya Moderat	6,29	5,92	5,55	5,18	4,81	4,44

b) Gap Pencapaian TPB

- (1.1.1*) Tingkat Kemiskinan Ekstrim.
- (1.2.2*) Presentase laki – laki, perempuan dan anak – anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definsi nasional.
- (1.3.1*) Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.
- (1.3.1(a)) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.
- (1.3.1(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.
- (1.4.1*) Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.
- (1.4.2*) Proporsi dan penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.
- (1.5.1*) Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
- (1.5.4*) Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional



c) Keterkaitan TPB 1

Tabel VI.2.5
Keterkaitan TPB Tujuan 1 Terhadap Indikator TPB Yang Berkorelasi Kuat

Tujuan	Indikator TPB
Tujuan 1 : Tanpa Kemiskinan	• (10.1.1 (a)) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. • (10.2.1*) Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas. • (10.4.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan





Tabel VI.2.6
Rekomendasi Skenario, Arah Kebijakan, dan Program TPB Tujuan 1 Dengan Upaya Tambahan

Indikator	Isu PB Strategis Terkait	Skenario	Strategi Upaya Tambahan	Rekomendasi Program	OPD yang bertanggung jawab
1.1.1* Tingkat Kemiskinan Ekstrim	Isu Perkembangan Ekonomi	• pemenuhan pelayanan dasar • meningkatkan ketahanan pangan terhadap masyarakat miskin dan rentan • Peningkatan infrastruktur untuk meningkatan ekonomi masyarakat Peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi bagi masyarakat miskin dan rentan Perlindungan sosial dan layanan kesehatan terhadap kelompok miskin, rentan dan disabilitas	Sosialisasi dan penerapan syarat pelayanan pemerintah untuk peningkatan keikutsertaan program jaminan sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	• Bappeda • Dinas Sosial
			Peningkatan modal bagi pelaku usaha UMKM	• Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, Dan usaha mikro (UMKM) • Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Dinas Koperasi dan UKM
			Meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro kecil dan ekonomi kreatif	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi dan UKM
			Meningkatkan proteksi, pengembangan dan pemasaran produk lokal	Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi dan UKM
				Program Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP
			Penguatan Kelembagaan Koperasi	• Program Pendidikan dan Latihan Koperasi; • Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM
			Pengembangan pusat-pusat ekonomi	Proram Penataan Bangunan dan Lingkungan	DPUPR
			Peningkatan iklim investasi usaha	• Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal • Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	• DPMPTSP • Pol PP





1. Tujuan 2 : Tanpa Kelaparan

a) Gap Pencapaian TPB

- (2.a.1*) Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah
- (2.c.1*) Indikator anomali harga pangan.

b) Keterkaitan TPB 2

Tabel VI.2.7
Keterkaitan TPB Tujuan 2 Terhadap Indikator TPB Yang Berkorelasi Kuat

Tujuan	Indikator TPB
Tujuan 2 : Tanpa Kelaparan	• (1.4.2*) Proporsi dan penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.





Tabel VI.2.8
Rekomendasi Skenario, Arah Kebijakan, dan Program TPB Tujuan 2 Dengan Upaya Tambahan

Indikator	Isu PB Strategis Terkait	Skenario	Strategi Upaya Tambahan	Rekomendasi Program	OPD yang bertanggung jawab
(2.a.1*) Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah	Isu Tata Guna Lahan	Mewujudkan Konsistensi lahan pertanian tanaman pangan	• Penetapan Lahan Sawah Dilindungi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah • Peningkatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang sempadan Sungai dan Danau; • Peningkatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang pada lahan basah dan tidak sesuai daya dukung lahan;	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas PUPR
				Program Pengelolaan Sumberdaya Air	
				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan



2. Tujuan 4 : Pendidikan Berkualitas

Dengan upaya tambahan Pada tahun 2030 diprediksi Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.di Kota Jambi sudah mencapai Target 54,04%

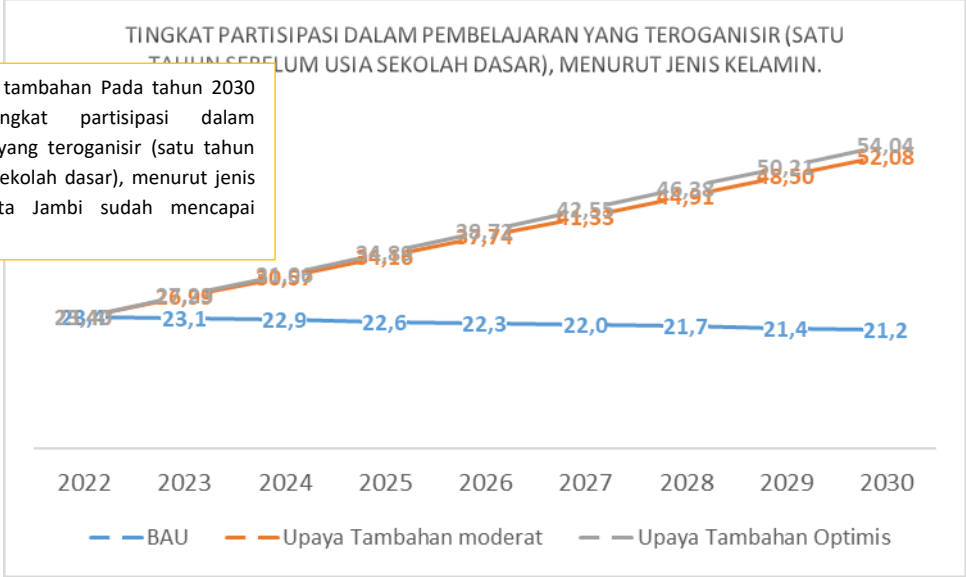

Gambar 6.2.4
Grafik Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin

Tabel VI.2.9
Proyeksi Partisipasi Dalam Pembelajaran Tahun 2022-2030 di Kota Jambi

Indikator	Indikator	Proyeksi	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.	BAU	22,3	22,0	21,7	21,4	21,2	23,1
		Upaya Tambahan moderat	34,16	37,74	41,33	44,91	48,50	52,08
		Upaya Tambahan Optimis	34,89	38,72	42,55	46,38	50,21	54,04

a) Gap Pencapaian TPB

- (4.1.2*) Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat.
- (4.1.2(a)) Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/ sederajat.
- (4.2.2*) Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.
- (4.3.1 (a)) Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).
- (4.4.1(a)) Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
- (4.5.1*) Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas.



b) Keterkaitan TPB 4

Tabel VI.2.10
Keterkaitan TPB Tujuan 4 Terhadap Indikator TPB Yang Berkorelasi Kuat

Tujuan	Indikator TPB
Tujuan 4 : Pendidikan Berkualitas	• (16.5.1(a)) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). • (16.6.1(b)) Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B • (16.6.1.(c)) Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B • (16.6.2.(a)) Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.





Tabel VI.2.11
Rekomendasi Skenario, Arah Kebijakan, dan Program TPB Tujuan 4 Dengan Upaya Tambahan

Indikator	Isu PB Strategis Terkait	Skenario	Strategi Upaya Tambahan	Rekomendasi Program	OPD yang bertanggung jawab
4.2.2* Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.	Peningkatan SDM	Pemerataan sarana, peningkatan kualitas, dan peningkatan akses sekolah	• Penyediaan sarana pendidikan merata untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia • Peningkatan rasio sekolah dan murid • Peningkatan rasio guru dan murid • Peningkatan penyediaan layanan publik pada sektor pendidikan • Peningkatan penyediaan layanan administrasi pemerintahan • Peningkatan jaminan pendidikan	• Program Pengelolaan Pendidikan - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar • Program Pengelolaan Pendidikan - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama • Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan • Program Pengelolaan Pendidikan - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	• Dinas Pendidikan





3. Tujuan 6 : Air Bersih dan Sanitasi Layak

a) Gap Pencapaian TPB

- (6.3.1(a)) Persentase limbah cair industri cair yang diolah secara aman
- (6.4.2 (a) Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya
- (6.4.2(b)) Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaanya

b) Keterkaitan TPB 6

Tabel VI.2.12
Keterkaitan TPB Tujuan 6 Terhadap Indikator TPB Yang Berkorelasi Kuat

Tujuan	Indikator TPB
Tujuan 6 : Air Bersih dan Sanitasi Layak	• (1.4.1*) Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar. • (12.3.1(a)) Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan Merkuri. • (12.4.2*) a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengelolaannya.





Tabel VI.2.13
Rekomendasi Skenario, Arah Kebijakan, dan Program TPB Tujuan 6 Dengan Upaya Tambahan

Indikator	Isu PB Strategis Terkait	Skenario	Strategi Upaya Tambahan	Rekomendasi Program	OPD yang bertanggung jawab
6.2.1 Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	Kualitas Air (LH2)	Peningkatan sarana pengelolaan dan skala layanan	• Pemantauan berkala kualitas air permukaan;	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
			• Pengawasan dan pengendalian limbah industri dan kegiatan ekonomi penghasil limbah lainnya;	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
			• Pembangunan dan pengembangan infrastruktur pengolahan air limbah domestik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	• DPUPR • Dinas Lingkungan Hidup • DPRKP • Dinas Kesehatan
			• Rehabilitasi jaringan perpipaan dan pengembangan jaringan perpipaan baru untuk meningkatkan kawasan terlayani		
			• Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penyediaan SPAL Domestik		
			• Regulasi penyiapan sarana air limbah domestic skala lingkungan bagi pengembangan perumahan	Program Pengembangan Perumahan	DPRKP



4. Tujuan 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

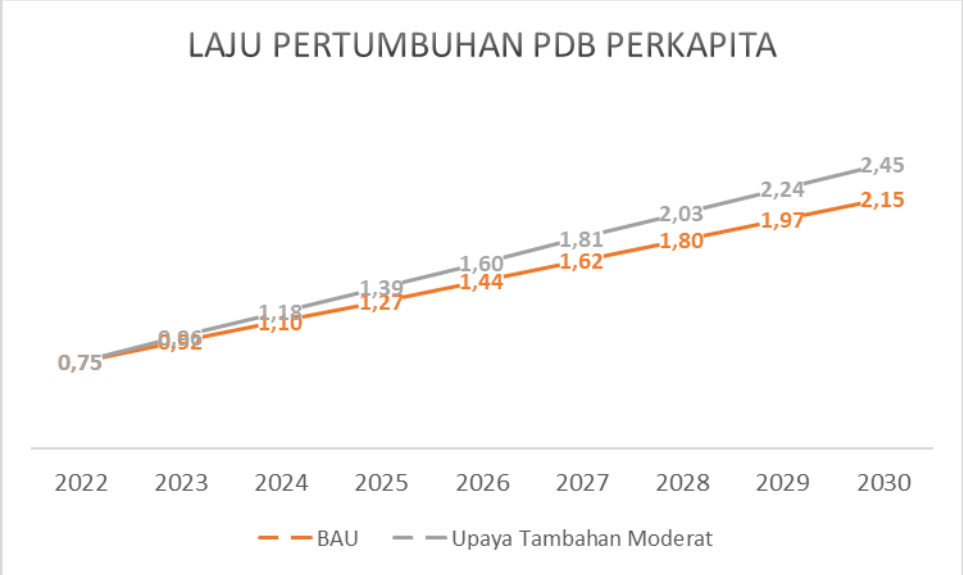

Gambar 6.2.5
Grafik Laju pertumbuhan PDB perkapita di Kota Jambi

Tabel VI.2.14
Proyeksi Laju pertumbuhan PDB Tahun 2022-2030 perkapita di Kota Jambi

Indikator	Indikator	Proyeksi	2025	2026	2027	2028	2029	2030
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB perkapita	BAU	1,27	1,44	1,62	1,80	1,97	2,15
		Upaya Tambahan moderat	1,39	1,60	1,81	2,03	2,24	2,45

a) Gap Pencapaian TPB

- (8.1.1 (a)) PDB per kapita
- (8.2.1*) Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun

b) Keterkaitan TPB 8

Tabel VI.2.15
Keterkaitan TPB Tujuan 8 Terhadap Indikator TPB Yang Berkorelasi Kuat

Tujuan	Indikator TPB
Tujuan 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	• (1.1.1*) Tingkat Kemiskinan Ekstrim. • (1.2.1*) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. • (1.2.2*) Presentase laki – laki, perempuan dan anak – anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definsi nasional. • (1.3.1*) Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan. • (1.3.1(a)) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang



Tujuan	Indikator TPB
	Kesehatan. • (1.3.1(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. • (1.4.1*) Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar. • (1.4.2*) Proporsi dan penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan. • (2.a.1*) Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah • (9.1.1(a)) Kondisi mantap jalan nasional. • (9.1.2*) Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi. • (10.1.1 (a)) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. • (10.2.1*) Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas. • (10.4.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan • (10.4.2) Dampak redistributif dari kebijakan fiskal. • (10.5.1 (a)) Indikator Kesehatan Perbankan.





Tabel VI.2.16
Rekomendasi Skenario, Arah Kebijakan, dan Program TPB Tujuan 8 Dengan Upaya Tambahan

Indikator	Isu PB Strategis Terkait	Skenario	Strategi Upaya Tambahan	Rekomendasi Program	OPD yang bertanggung jawab
8.1.1* Laju pertumbuhan PDB perkapita	Perkembangan Ekonomi dan Infrastruktur (LH6)		• Peningkatan modal bagi pelaku usaha UMKM	• Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, Dan usaha mikro (UMKM) • Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Dinas Koperasi dan UKM
			• Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja	Program Pelatihan kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
			• Meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro kecil dan ekonomi kreatif	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi dan UKM
			• Meningkatkan proteksi, pengembangan dan pemasaran produk lokal	Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi dan UKM
				Program Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP
			• Penguatan Kelembagaan Koperasi	• Program Pendidikan dan Latihan Koperasi; • Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM
			• Pengembangan kawasan-kawasan strategis ekonomi kota	• Program Penyelenggaraan Penataan Ruang • Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	DPUPR
			• Pengembangan kelembagaan, infrastruktur, dan SDM untuk pengembangan transformasi digital	• Program Aplikasi Informatika	Diskominfo



5. Tujuan 9 : Industri Inovasi dan Infrastruktur

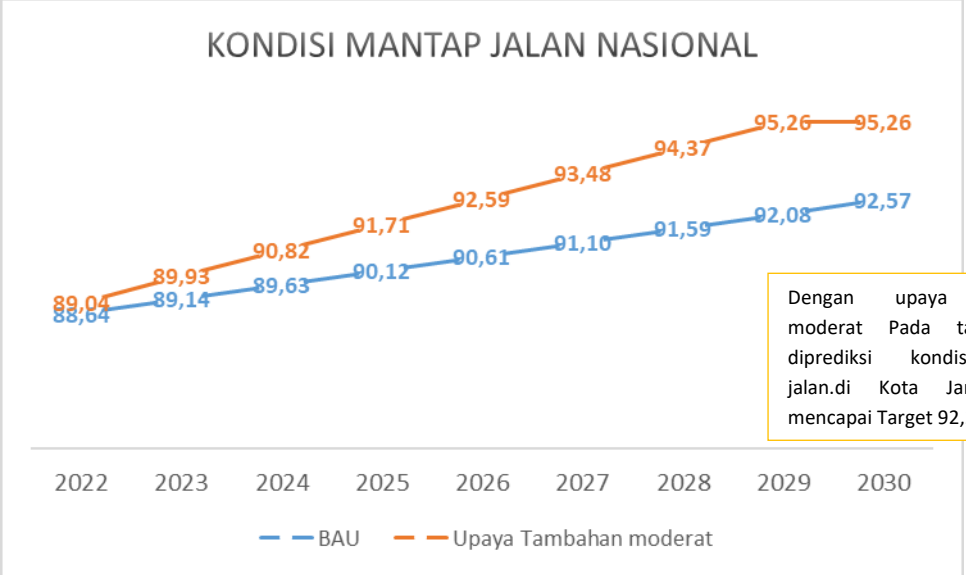

Gambar 6.2.6
Grafik Kondisi mantap jalan nasional di Kota Jambi

Tabel VI.2.17
Proyeksi Kondisi mantap jalan nasional Tahun 2025-2030 perkapita di Kota Jambi

Indikator	Indikator	Proyeksi	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9.1.1. (a)	Kondisi mantap jalan nasional	BAU	90,12	90,61	91,10	91,59	92,08	92,57
		Upaya Tambahan moderat	91,71	92,59	93,48	94,37	95,26	95,26



a. Gap Pencapaian TPB

- (9.1.1(a)) Kondisi mantap jalan nasional.
- (9.1.2*) Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi
- (9.2.1 (a)) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.

b. Keterkaitan TPB 9

Tabel VI.2.18
Keterkaitan TPB Tujuan 9 Terhadap Indikator TPB Yang Berkorelasi Kuat

Tujuan	Indikator TPB
Tujuan 9 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	• (17.17.1 (b)) Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). • (17.17.1.(c)) Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi.

c. Skenario Dan Rekomendasi Program Pembangunan

Alternatif scenario dan rekomendasi program pembangunan, dapat dilihat pada tabel berikut ini:





Tabel VI.2.16
Rekomendasi Skenario, Arah Kebijakan, dan Program TPB Tujuan 9 Dengan Upaya Tambahan

Indikator	Isu PB Strategis Terkait	Skenario	Strategi Upaya Tambahan	Rekomendasi Program	OPD yang bertanggung jawab
(9.1.1(a)) Kondisi mantap jalan nasional.	Perkembangan Ekonomi dan Infrastruktur (LH6)	Peningkatan Sistem Jaringan Jalan Umum	• Sinkronisasi perencanaan lintas pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	• SETDA • Bappeda
			• Peningkatan kualitas SDM bidang kontruksi	Program Pengembangan Jasa Kontruksi	DPUPR
			• Peningkatan Jalan Eksisting dan Pembangunan Jalan Baru Mereduksi Beban Jalan Utama dan Penataan Persimpangan Sebidang	Program Penyelenggaraan Jalan	



6. Tujuan 10 : Berkurangnya Kesenjangan

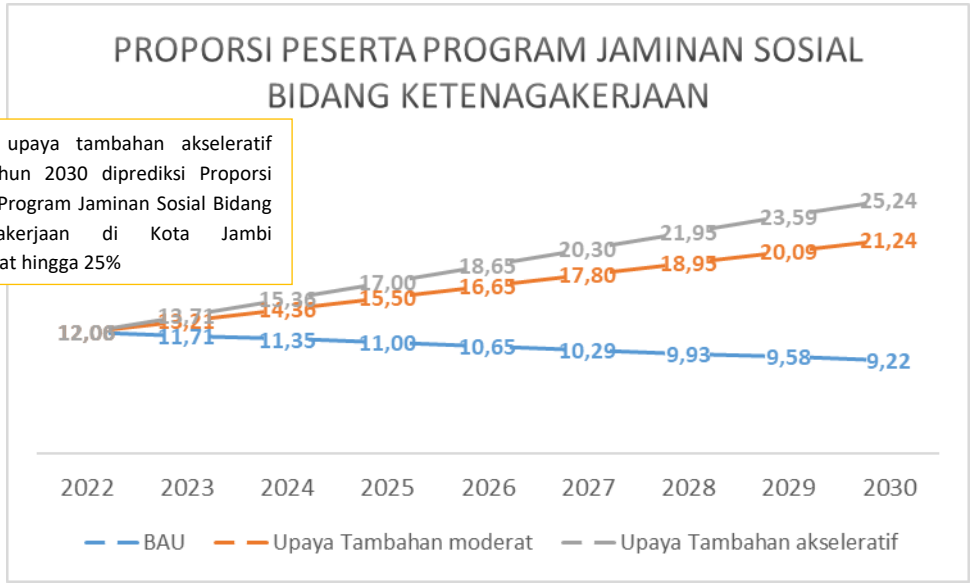

Gambar 6.2.7
Grafik Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan di Kota Jambi

Tabel VI.2.20
Proyeksi Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2022-2030 perkapita di Kota Jambi

Indikator	Indikator	Proyeksi	2025	2026	2027	2028	2029	2030
10.4.1. (b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	BAU	11,00	10,65	10,29	9,93	9,58	9,22
		Upaya Tambahan moderat	15,50	16,65	17,80	18,95	20,09	21,24
		Upaya Tambahan akseleratif	17,00	18,65	20,30	21,95	23,59	25,24

a) Gap Pencapaian TPB

- (10.2.1*) Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.
- pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM internasional
- (10.4.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan



b) Keterkaitan TPB 10

Tabel VI.2.21
Keterkaitan TPB Tujuan 10 Terhadap Indikator TPB Yang Berkorelasi Kuat

Tujuan	Indikator TPB
Tujuan 10 : Berkurangnya Kesenjangan	• (1.1.1*) Tingkat Kemiskinan Ekstrim. • (1.2.1*) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. • (1.2.2*) Presentase laki – laki, perempuan dan anak – anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definsi nasional. • (1.3.1*) Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan. • (1.3.1(a)) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan. • (1.3.1(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. • (8.2.1*) Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.





Tabel VI.2.22
Rekomendasi Skenario, Arah Kebijakan, dan Program TPB Tujuan 10 Dengan Upaya Tambahan

Indikator	Isu PB Strategis Terkait	Skenario	Strategi Upaya Tambahan	Rekomendasi Program	OPD yang bertanggung jawab
10.4.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Peningkatan SDM (LH7)	Perlindungan sosial dan layanan kesehatan terhadap kelompok miskin, rentan dan disabilitas	• Sinkronisasi perencanaan lintas pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	• SETDA • Bappeda
			Sosialisasi dan penerapan syarat pelayanan pemerintah untuk peningkatan keikutsertaan program jaminan sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	• Bappeda • Dinas Sosial





7. Tujuan 11 : Kota dan Permukiman Berkelanjutan

a. Gap Pencapaian TPB

- (11.3.1(a) Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk.
- (11.5.1*) Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP).
- (11.7.1(a)) Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua
- (11.6.1(a)) Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya.
- (11.6.1(b) Persentase sampah nasional yang terkelola
- (11.6.2.(a)) Rata-rata tahunan materi partikular halus PM 10

b. Keterkaitan TPB 11

Tabel VI.2.23
Keterkaitan TPB Tujuan 11 Terhadap Indikator TPB Yang Berkorelasi Kuat

Tujuan	Indikator TPB
Tujuan 11 : Kota dan Permukiman Berkelanjutan	• (1.4.1*) Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar. • (12.5.1(a)) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.





Tabel VI.2.24
Rekomendasi Skenario, Arah Kebijakan, dan Program TPB Tujuan 11 Dengan Upaya Tambahan

Indikator	Isu PB Strategis Terkait	Skenario	Strategi Upaya Tambahan	Rekomendasi Program	OPD yang bertanggung jawab
11.7.1 (a) Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua	Tata Guna Lahan (LH1)	Peningkatan luas RTH Perkotaan	• Pengendalian pemanfaatan ruang sempadan Sungai dan danau sebagai fungsi lindung (nonterbangun)	• Program Penyelenggaraan Penataan Ruang • Program Penyelenggaraan Keanekaragaman Hayati	• DPUPR • Dinas Lingkungan Hidup
			• Pengendalian pemanfaatan ruang lahan basah sebagai fungsi lindung (nonterbangun)		
			• Regulasi RTH Privat Bangunan Perdagangan dan Jasa, dan Perkantoran	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	DPUPR
			• Regulasi penyediaan RTH Perumahan dari Pengembang	Program Pengembangan Perumahan	DPRKP
11.6.1 (b) Persentase sampah nasional yang terkelola	Persampahan (LH5)	Peningkatan layanan pengumpulan, pengangkutan dan pengurangan pada tingkat sumber	• Peningkatan Wilayah Pelayanan Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
			• Peningkatan ketersediaan fasilitas persampahan untuk mengurangi pada tingkat sumber		
			• Kerjasama dengan daerah kabupaten berbatasan		



8. Tujuan 12 : Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggungjawab

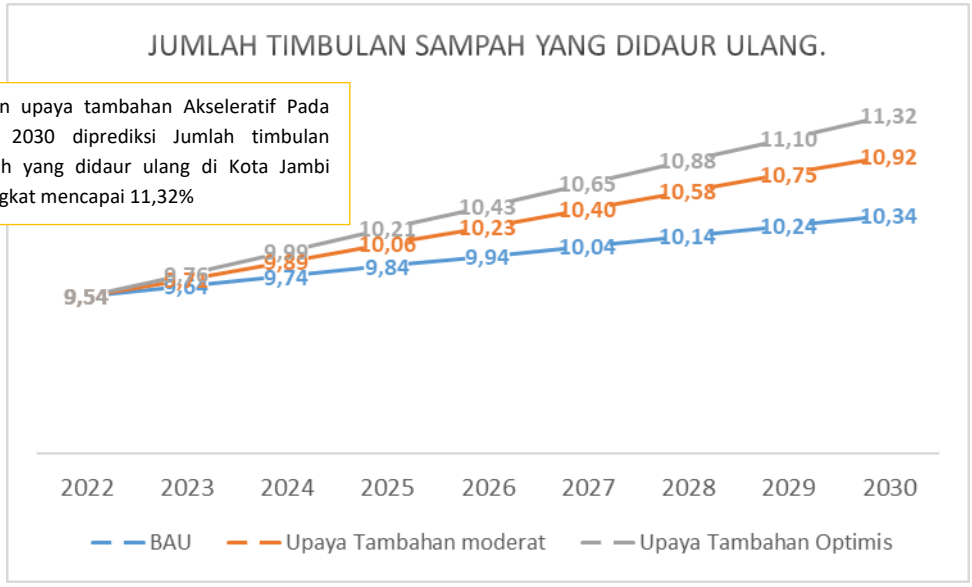

Gambar 6.2.8
Grafik Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang. di Kota Jambi

Tabel VI.2.25
Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang. di Kota Jambi

Indikator	Indikator	Proyeksi	2025	2026	2027	2028	2029	2030
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	BAU	9,84	9,94	10,04	10,14	10,24	10,34
		Upaya Tambahan moderat	10,06	10,23	10,40	10,58	10,75	10,92
		Upaya Tambahan Optimis	10,21	10,43	10,65	10,88	11,10	11,32

a. Gap Pencapaian TPB

- (12.3.1(a)) Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan Merkuri.
- (12.4.2*)a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengelolaannya
- (12.5.1(a)) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang

b. Keterkaitan TPB 12

Tabel VI.2.26
Keterkaitan TPB Tujuan 12 Terhadap Indikator TPB Yang Berkorelasi Kuat

Tujuan	Indikator TPB
Tujuan 12 : Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggungjawab	• (11.6.1(a)) Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya. • (11.6.1(b) Persentase sampah nasional yang terkelola



Tabel VI.2.27
Rekomendasi Skenario, Arah Kebijakan, dan Program TPB Tujuan 12 Dengan Upaya Tambahan

Indikator	Isu PB Strategis Terkait	Skenario	Strategi Upaya Tambahan	Rekomendasi Program	OPD yang bertanggung jawab
12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Persampahan (LH5)	Peningkatan ketersediaan sarana persampahan	• Peningkatan ketersediaan fasilitas persampahan untuk mengurangi pada tingkat sumber • Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat • Kerjasama dengan daerah kabupaten berbatasan	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup





9. Tujuan 13 : Penanganan Perubahan Iklim

a. Gap Pencapaian TPB

- (13.1.1*) Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang

b. Keterkaitan TPB 13

Tabel VI.2.28
Keterkaitan TPB Tujuan 13 Terhadap Indikator TPB Yang Berkorelasi Kuat

Tujuan	Indikator TPB
Tujuan 13 : Penanganan Perubahan Iklim	• (1.5.1*) Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang • (11.5.1*) Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. • (11.b.2*) Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana





Tabel VI.2.29
Rekomendasi Skenario, Arah Kebijakan, dan Program TPB Tujuan 13 Dengan Upaya Tambahan

Indikator	Isu PB Strategis Terkait	Skenario	Strategi Upaya Tambahan	Rekomendasi Program	OPD yang bertanggung jawab
(13.1.1*) Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang .	Resiko Bencana (LH4)	Peningkatan teknologi dan SDM	• peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam implementasi mitigasi bencana	• Program Penanggulangan Bencana • Program Kebakaran	Dinas Damkar dan Penyelamatan
			• penguatan teknologi dan infrastruktur yang sesuai dengan kebijakan lingkungan		
			• meningkatkan keterlibatan swasta dapat berperan sebagai penggerak dalam mendorong inovasi dan adopsi teknologi hijau	• Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat • Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup



10. Tujuan 16 : Perdamaian, keadilan dan kelembagaan tangguh

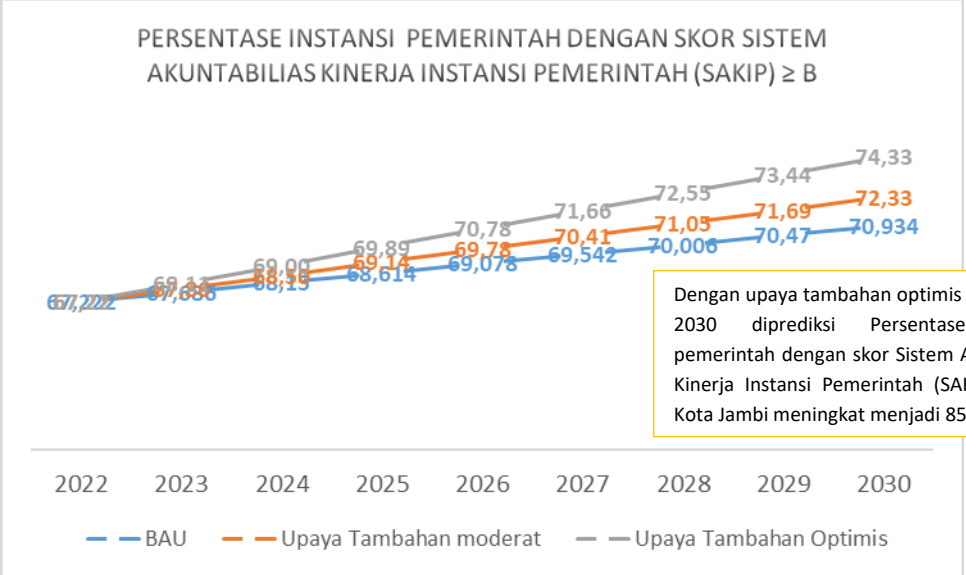

Gambar 6.2.9
Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B

Tabel VI.2.30
Proyeksi Target Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B
Tahun 2022-2045 di Kota Jambi

Indikator	Indikator	Proyeksi	2025	2026	2027	2028	2029	2030
16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B	BAU	68,61	69,07	69,54	70,00	70,47	70,93
		Upaya Tambahan moderat	69,14	69,78	70,41	71,05	71,69	72,33
		Upaya Tambahan akseleratif	69,89	70,78	71,66	72,55	73,44	74,33



a. Gap Pencapaian TPB

- (16.5.1(a)) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).
- (16.6.1(b)) Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B
- (16.6.1.(c)) Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B
- (16.6.2.(a)) Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.

b. Keterkaitan TPB 16

Tabel VI.2.31
Keterkaitan TPB Tujuan 16 Terhadap Indikator TPB Yang Berkorelasi Kuat

Tujuan	Indikator TPB
Tujuan 16 : Perdamaian, keadilan dan kelembagaan tangguh	-





Tabel VI.2.32
Rekomendasi Skenario, Arah Kebijakan, dan Program TPB Tujuan 16 Dengan Upaya Tambahan

Indikator	Isu PB Strategis Terkait	Skenario	Strategi Upaya Tambahan	Rekomendasi Program	OPD yang bertanggung jawab
16.6.1.(b). Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B	Peningkatan SDM (LH7)	Penyiapan Landasan Transformasi Digital	• Meningkatkan ketatalaksanaan pemerintahan yang berbasis TIK • Meningkatkan kompetensi dan integritas ASN • Meningkatkan pengawasan pembangunan secara komprehensif, transparan dan akuntabel	• Program Informasi dan Layanan Publik • Program Aplikasi Informatika	• Diskominfo





11. Tujuan 17 : Kemitraan untuk mencapai Tujuan

a. Gap Pencapaian TPB

- (17.1.1*) Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.
- (17.1.1(a)) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB
- (17.1.2*) Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.
- (17.17.1 (b)) Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
- (17.17.1.(c)) Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi.

b. Keterkaitan TPB 17

Tabel VI.2.33
Keterkaitan TPB Tujuan 17 Terhadap Indikator TPB Yang Berkorelasi Kuat

Tujuan	Indikator TPB
Tujuan 17 : Kemitraan untuk mencapai Tujuan	• (1.1.1*) Tingkat Kemiskinan Ekstrim. • (1.2.1*) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. • (8.2.1*) Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun. • (10.5.1 (a)) Indikator Kesehatan Perbankan. • (10.7.2 (a)) Jumlah dokumen Kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan • (10.7.2 (b)) Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi. • (11.5.2 (a)) Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB





Tabel VI.2.34
Rekomendasi Skenario, Arah Kebijakan, dan Program TPB Tujuan 17 Dengan Upaya Tambahan

Indikator	Isu PB Strategis Terkait	Skenario	Strategi Upaya Tambahan	Rekomendasi Program	OPD yang bertanggung jawab
(17.1.1*) Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Perkembangan Ekonomi dan Infrastruktur (LH6)	Penyiapan Landasan Transformasi Digital	• Meningkatkan ketatalaksanaan pemerintahan yang berbasis TIK • Meningkatkan kompetensi dan integritas ASN • Meningkatkan pengawasan pembangunan secara komprehensif, transparan dan akuntabel	• Program Informasi dan Layanan Publik • Program Aplikasi Informatika	• Diskominfo





6.2.3 Alternatif Skenario Tanpa Upaya Tambahan

Alternatif skenario tanpa upaya tambahan adalah indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah tercapai target nasional. Alternatif skenario tersebut direkomendasikan untuk dipertahankan, adapun target tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel VI.2.35
Alternatif di Indikator direkomendasikan untuk dipertahankan

Tujuan	Target	Indikator	Program Pembangunan
Tujuan 1	*Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional*	(1.2.1*) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
		(1.3.1 (b)) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
		(1.4.2) Proporsi dan penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.	• Program penyelesaian Sengketa tanah Garapan • *Program Pengelolaan Pendapatan daerah - Pengelolaan Pendapatan Daerah - Penilaian pajak dan bangunan dan perkotaan (PBBP2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan*
Tujuan 2	*Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian*	(2.4.1(a)) Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan	• Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian • Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian • Program Pengelolaan Sumber Ekonomi Untuk Kadaulatan Dan Kemandirian Pangan • Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk Kedaulatan dan kemandirian pangan • Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan Pangan Masyarakat • Program Penanganan Kerawanan Pangan • Program Pengawasan Keamanan Pangan • Program Penyelenggaraan Penataan Ruang • Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
Tujuan 4	*Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan lakilaki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.*	(4.3.1*) Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin	• Program Pengelolaan Pendidikan-Pengelolaan Pendidikan nonformal/ Kesetaraan • Program Pengelolaan Pendidikan - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar





Tujuan	Target	Indikator	Program Pembangunan
	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	(4.6.1(a)) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	• Program Pengelolaan Pendidikan - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
	Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.	(4.4.1 (a)) Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	• Program Pengelolaan Pendidikan-Pengelolaan Pendidikan nonformal/ Kesetaraan
		(4.5.1*) Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas	• Program Pengelolaan Pendidikan - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar • Program Pengelolaan Pendidikan - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Tujuan 6	*Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.*	(6.1.1) Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	• Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum-Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten/Kota • Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan
	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan	(6.2.1) Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	• Program Penyelenggaraan Air Limbah • Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan
Tujuan 8	*Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan,*	(8.1.1*) Laju pertumbuhan PDB perkapita (8.1.1(a)) PDB per kapita	• Program Pengelolaan Keuangan Daerah • Program Pengelolaan Pendapatan Daerah





Tujuan	Target	Indikator	Program Pembangunan
	khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.		• Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual • Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam • Program Pengelolaan Keuangan Daerah • Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah • Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja • Program Penempatan Tenaga Kerja • Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
Tujuan 9	*Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.*	(9.2.1 (a)*)* Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	• Program penyelenggaraan jalan • Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan • Program perencanaan dan Pembangunan industri
Tujuan 10	*Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.*	(10.1.1(a)) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	• Program Perlindungan dan Jaminan Sosial • Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan • Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja • Program Pengembangan Koperasi dan UMKM
	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan	(10.3.1(c)) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	• Program Perlindungan dan Jaminan Sosial





Tujuan	Target	Indikator	Program Pembangunan
	tersebut.		
Tujuan 11	*Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.*	(11.6.2. (b)) Indeks Kualitas Udara	• Program penyelenggaraan penataan Ruang • Program pengelolaan keanekaraganan hayati (KEHATI) • Program pengendalian pecemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
Tujuan 13	*Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.*	(13.1.3*) Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana	Program Penanganan Bencana - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Jd; Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
Tujuan 16	*Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.*	(16.6.1.(a)) Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). (16.6.1.(b)*)* Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B	• Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan • Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah • Program penataan kelembagaan dan ketataletaksanaan kegiatan Reformasi pelayanan Publik • Program Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi
	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	(16.7.1.(a)) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	• Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	(16.9.1*) Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menurut umur. (16.9.1.(a))Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% (16.9.1.(b)) Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun.	• Program Pencatatan Sipil • Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Tujuan 17	*Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan*	*(17.8.1*) Persentase pengguna internet.*	• Program Pengelolaan Keuangan Daerah





Tujuan	Target	Indikator	Program Pembangunan
	kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.		• Program Pengelolaan Pendapatan Daerah • Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual • Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam
	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	*(17.19.2.(b)) Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register).*	





6.3 REKOMENDASI, VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA JAMBI

Visi misi yang di terjemahkan dalam arahan kebijakan pembangunan yang telah dijabarkan pada substansi sebelumnya dikaitkan dengan amanat arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk PJM pertama. Untuk periode 2025-2029 (PJM I), arah kebijakan pembangunan Kota Jambi dititik beratkan kepada penguatan landasan transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola. Dalam mewujudkan penguatan landasan-landasan tersebut, arah kebijakan utama periode I dalam Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045 adalah sebagai berikut:

a) Transformasi sosial dititik beratkan untuk peningkatan sumberdaya manusia untuk membentuk masyarakat perkotaan yang produktif melalui pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial;
b) Transformasi ekonomi dititikberatkan kepada pemantapan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kota, sektor perdagangan, jasa, industri pengolahan, dan sektor-sektor ekonomi kreatif dengan dukungan melalui pengembangan infrastruktur digital. Transformasi ekonomi juga diarahkan untuk mewujudkan landasan penerapan ekonomi hijau;
c) Transformasi tata kelola, arah kebijakan didorong untuk memperbaiki kelembagaan perangkat daerah, terutama lembaga daerah yang berkaitan dengan sektor perdagangan, jasa, industri pengolahan, dan pelayanan publik;

Untuk memperkuat perwujudan landasan transformasi diatas, arah kebijakan pendukung transformasi, terdiri atas:

a) Peningkatan penegakan hukum, ketentraman, ketertiban umum dengan pembahuran regulasi hukum daerah, peningkatan kolaborasi lintas instansi penegak hukum, serta peningkatan peran masyarakat dalam menciptakan ketertiban umum ditengah heterogenitas perkotaan;
b) Peningkatan regulasi penataan ruang dan peningkatan kualitas lingkungan





perkotaan;

c) Peningkatan kualitas infrastruktur kota untuk mengatasi berbagai permasalah utama kota dan memenuhi kebutuhan prasarana dasar masyarakat;dan

d) Peningkatan pemenuhan kebutuhan hunian layak.

Selain selaras dengan arah kebijakan diatas, Visi pembangunan jangka menengah daerah juga harus mampu menjawab permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Visi yang drekomendasikan dalam rencana pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun kedepan untuk periode tahun 2025-2030 mengandung unsur :

MEWUJUDKAN KOTA JAMBI SEBAGAI PERKOTAAN YANG MAJU BERBASIS MASYARAKAT YANG BERDAYA SAING, NYAMAN, DAN BERKELANJUTAN.

- Perkotaan Yang Maju, melingkupi: berkembangnya sektor-sektor ekonomi dan sosial perkotaan yang didukung modernisasi infrastruktur dan teknologi pendukung, serta tata kelola yang berkemajuan;
- Masyarakat Berdaya Saing, melingkupi: kualitas sumberdaya manusia yang meningkat dengan peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial;
- Nyaman, melingkupi: kualitas lingkungan perkotaan yang baik dan keamanan yang terjaga.
- Berkelanjutan, dimaksudkan terhadap upaya pembangunan yang berkesinambungan dan kolaboratif antar pemangku kepentingan untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan masyarakat .

Adapun misi yang direkomendasikan dalam upaya pencapaian visi tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Penguatan ekonomi perkotaan yang inklusif:





Penguatan ekonomi terhadap sektor-sektor ekonomi utama kota perkotaan yang melibatkan seluruh skala ekonomi dengan regulasi dan teknologi yang adaptif. Penguatan ekonomi juga diorientasikan terhadap pengembangan pusat-pusat ekonomi yang hierarkis serta memulai pengembangan ekonomi hijau.

2. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur perkotaan:

   Peningkatan kualitas prasarana dan sarana transportasi dan jaringan utilitas yang merata.

3. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia perkotaan:

   Kualitas sumberdaya manusia ditingkatkan melalui peningkatan kualitas dan pemerataan akses terhadap pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

4. Peningkatan kualitas lingkungan perkotaan:

   Mengatasi permasalahan permukiman dan perumahan kumuh, peningkatan pengelolaan persampahan dan limbah dalam menjaga kualitas air dan tanah, mengatasi permasalahan kerentanan bencana, dan menciptakan peningkatan ruang terbuka hijau yang seimbang.

5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat

   Peningakatan tata kelola dengan mendorong peningkatan penyelenggaraan berbasis digital, pembaharuan regulasi, peningkatan harmonosasi lintas sektor, dan penguatan kapasitas aparatur.

6. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

   Peningkatan kolaborasi dengan lembaga penegak hukum dan peningkatan peran dan kesadaran Masyarakat berlandaskan ideologi pancasila dan kebhinekaan terhadap keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Dari usulan visi dan misi diatas, direkomendasikan arah kebijakan melalui tabel berikut:





Tabel VI.3.1
Rekomendasi Arah Kebijakan dan Rekapitulasi Rekomendasi Program Pembangunan

Misi	Rekomendasi Arah Kebijakan	Rekomendasi Program Pembangunan	Organisasi Perangkat Daerah
Penguatan ekonomi perkotaan yang inklusif	Pengembangan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan ekonomi dan teknologi terkini	• Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	• Bappeda
	Penyiapan Regulasi insentif dan disinsentif pengembangan ekonomi hijau		
	Pengembangan dan Peningkatan Pemasaran Produk Lokal	• Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, Dan usaha mikro (UMKM) • Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam • Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) • Program Pengembangan UMKM • Program Promosi Penanaman Modal • Program Pendidikan dan Latihan Koperasi; • Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi • Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal • Program perencanaan dan Pembangunan industri	• Dinas Koperasi dan UKM • DPMPTSP • Disperindag
	Pemantapan inovasi berteknologi tinggi yang mendorong efisiensi untuk menghasilkan produk komoditas yang berkualitas dan bernilai tambah tinggi		
	Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan kawasan strategis	• Program Penyelenggaraan Penataan Ruang • Proram Penataan Bangunan dan Lingkungan	• DPUPR
	Optimalisasi pemanfaatan tata ruang kota yang sesuai peruntukannya		
	Pengembangan kelembagaan, infrastruktur, dan SDM untuk pengembangan transformasi digital	• Program Informasi dan Layanan Publik • Program Aplikasi Informatika	• Diskominfo
	Peningkatan penyediaan transportasi publik	• Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	• Dishub
	Inovasi pengembangan sumber energi baru terbaharukan	• Program Penelitian dan Pengembangan Daerah • Program Pengelolaan Energi Baru Terbaharukan	• Bappeda
	Pengembangan infrastruktur digital yang merata	• Program Informasi dan Layanan Publik • Program Aplikasi Informatika	• Diskominfo
	Pengembangan Pariwisata dan Industri Kreatif	• Program Pengembangan Daya Tarik Destinasi Wisata • Program Pemasaran Pariwisata	• SETDA • Disparbud





Misi	Rekomendasi Arah Kebijakan	Rekomendasi Program Pembangunan	Organisasi Perangkat Daerah
		• Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
	Meningkatkan kapasitas dan daya saing tenaga kerja	Program Pelatihan kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur perkotaan	Pengembangan jaringan jalan eksisting dan penataan persimpangan	• Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Program Penyelenggaraan Jalan • Program Pengembangan Jasa Kontruksi	• Bappeda • DPUPR
	Pengembangan kota seberang dan kawasan pengembangan baru	• Program Penataan Bangunan dan Lingkungan • Program kawasan permukiman serta permukiman Kumuh • Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	• DPUPR • DPRKP
	Penataan Pasar tradisional	• Program Penataan Bangunan dan Lingkungan • Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	• DPUPR • Disperindag
	Perlindungan sumberdaya air	• Program Pengelolaan Sumberdaya Air	• DPUPR
	Rehabilitasi jaringan air minum perpipaan dan Pengembangan jaringan air minum perpipaan di kawasan pengembangan permukiman	• Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	• DPUPR • PDAM
	Pengembangan jaringan listrik tegangan rendah di kawasan pengembangan permukiman	• Program Ketenagalistrikan	PLN (bukan kewenangan daerah)
	Peningkatan layanan pengelolaan limbah dan persampahan dari tingkat domestik (mikro) hingga regional	• Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah • Program Pengelolaan Persampahan	• DPUPR • Dinas Lingkungan Hidup • DPRKP
	Peningkatan jaringan drainase eksisting dan Pembangunan sistem pengendali banjir	• Program Pengelolaan Sumberdaya Air • Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	DPUPR
Peningkatan kualitas sumberdaya manusia perkotaan	Pemerataan akses Pendidikan dengan percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) melalui penguatan layanan PAUD	• Program Pengelolaan Pendidikan - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar • Program Pengelolaan Pendidikan - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama • Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan	• Dinas Pendidikan





Misi	Rekomendasi Arah Kebijakan	Rekomendasi Program Pembangunan	Organisasi Perangkat Daerah
		Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Program Pengelolaan Pendidikan - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
	Peningkatan kualitas tenaga pendidik	Program Pendidik dan Tenaga Pendidikan	• Dinas Pendidikan
	Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana & prasarana pendidikan	Program Pengeloilaan Pendidikan	• Dinas Pendidikan • DPUPR
	Menyusun kurikulum pendidkan karakter dan religi untuk seluruh jenjang pendidikan	Program Pengembangan Kurikulum	• Dinas Pendidikan
	Peningkatan Fasilitas kesehatan yang memadai dan memenuhi standard	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan Upaya kesehatan masyarakat	• Dinas Kesehatan • DPUPR
	Peningkatan kuantitas & kualitas SDM bidang kesehatan	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kesehatan	• Dinas Kesehatan
	Menurunkan angka kemiskinan	• Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha Mikro (UMKM) • Program Pemberdayaan Sosial	• Dinas Koperasi dan UKM • Dinas Sosial
	Peningkatan kualitas dan kuantitas manfaat program perlindungan sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	• Bappeda • Dinas Sosial
	Peningkatan kualitas data PMKS	Program Rehabilitasi Sosial	• Dinas Sosial
	Meningkatkan pendidikan karakter dan penanaman nilai-nilai religius dalam masyarakat	Program Penyelenggaraan Pendidikan	• Dinas Pendidikan
	Perlindungan kawasan berkarakteristik sosial budaya Melayu Jambi	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	• DPUPR
	Peningkatan fasilitas penunjang aktivitas kepemudaan dan pelatihan di bidang olahraga, kesenian, budaya dan kewisausahaan	• Program Pengembangan Kebudayaan • Program Pengembangan Kesenian Tradisional • Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	• Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Penguatan kebijakan pengarus utamaan gender	• Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	• DPPPA
	Peningkatan kapasitas perempuan dalam aktifitas perekonomian	• Program Peningkatan Kapasitas Keluarga	• DPPPA
Peningkatan kualitas lingkungan perkotaan:	Penyiapan regulasi berupa Penetapan rencana rinci tata ruang dan Revisi kebijakan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	DPUPR
	Pengendalian pemanfaatan ruang		
	Pengendalian pengembangan perumahan dan mengIntegrasikan	• Program Pengembangan Perumahan	DPRKP





Misi	Rekomendasi Arah Kebijakan	Rekomendasi Program Pembangunan	Organisasi Perangkat Daerah
	pengembangan perumahan terhadap sistem prasarana, sarana, dan utilitas kota	• Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	
	Penataan kawasan permukiman dan perumahan kumuh	Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh	DPRKP
	Peningkatan layanan pengelolaan persampahan dari tingkat domestik (mikro) hingga regional	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
	Peningkatan dan penataan RTH publik	• Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Publik • Program Penyelenggaraan Penataan Ruang • Program Penyelenggaraan Keanekaragaman Hayati	• SETDA • DPUPR • Dinas Lingkungan Hidup
	Peningkatan sosialisasi dan intervensi kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan rumah tangga	• Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah • Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat • Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
	Regulasi penyiapan sarana air limbah domestic skala lingkungan bagi pengembangan perumahan	Program Pengembangan Perumahan	DPRKP
	Pengendalian, perlindungan, serta pengembangan, Kawasan Pertanian Pangan yang Berkelanjutan	• Program Penyelenggaraan Penataan Ruang • Program Pengelolaan Sumberdaya Air	Dinas PUPR
	Peningkatan dukungan layanan irigasi untuk petani	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Peningkatan kapasitas daerah untuk penanganan risiko bencana melalui mitigasi dan mekanisme penanggulangan bencana	• Program Penanggulangan Bencana • Program Kebakaran	Dinas Damkar dan Penyelamatan
	Peningkatan kapasitas daerah untuk mengembangkan alternatif pembangunan rendah karbon	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bappeda
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat	Sinkronisasi periodesasi perencanaan pembangunan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	• SETDA • Bappeda
	Pemutakhiran dokumen rencana sektoral		
	Peningkatan pendapatan asli daerah dan pengembangan sumber pembiayaan inovativ	• Program Pengelolaan Keuangan Daerah • Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	• BPKAD • BPPRD
	Peningkatan implementasi pembangunan daerah berdasarkan prioritas Pembangunan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD





Misi	Rekomendasi Arah Kebijakan	Rekomendasi Program Pembangunan	Organisasi Perangkat Daerah
	Penguatan terhadap perangkat daerah yang berkaitan dengan pengembangan sektor-sektor strategis dan pelayanan dasar untuk mewujudkan layanan publik yang berkualitas dan inklusif	Program Pelayanan Penghubung	• SETDA • Bappeda • BKD
	harmonisasi pelaksanaan antar pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota dan harmonisasi antar perangkat daerah;	• Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah • Program perencanaan perekonomian dan sumber daya Alam • Program perencanaan pemerintahan dan pembangunan Manusia • program perencanaan infrastruktur dan kewilayahan	Bappeda
	Peningkatan kapasitas manajerial, pembagian tugas, pokok, dan fungsi pada seluruh instansi pemerintahan		
	Penyusunan rencana digitalisasi/ pengadopsian teknologi informasi (TI) yang terintegrasi dan berjangka	• Program Informasi dan Layanan Publik • Program Aplikasi Informatika	Diskominfo
	Peningkatan kapasitas kompetensi ASN pengelola keuangan daerah	• Program Kepegawaian • Program Pengembangan Sumberdaya Manusia	Badan Kepegawaian Daerah
	Peningkatan pemahaman SPIP kepada seluruh OPD terkait serta menyusun kebijakan dan SOP yang berhubungan dengan SPIP		
	Penguatan database dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN		
	Pemantapan pemahaman dan kapasitas kebijakan pelayanan publik oleh seluruh instansi pemerintahan	Program Pelayanan Penghubung	• SETDA • Bappeda • BKD
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pembaharuan regulasi hukum daerah sesuai ketentuan perundangan dan dinamika lokal terkini	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	SETDA
	Meningkatkan kolaborasi penegakan hukum dengan instansi penegak hukum negara.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Pol PP
	Menurunkan angka kejahatan lingkungan		
	Penguatan OPD penegak hukum daerah dan penyelenggara ketertiban umum	• Program Kepegawaian • Program Pengembangan Sumberdaya Manusia	Badan Kepegawaian Daerah
	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah berlandaskan ideologi pancasila dan kebhinekaan terhadap keamanan dan kenyamanan Masyarakat	• Program penguatan ideologi pancasila dan karakter Kebangsaan • Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kesbangpol





Misi	Rekomendasi Arah Kebijakan	Rekomendasi Program Pembangunan	Organisasi Perangkat Daerah
	Penegakan hukum yang modern, efisien, terpadu,serta mengedepalkan pendekatan restoratif, korektif, dan rehabilitatif	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Pol PP







BAB VII

KESIMPULAN

Dalam Pelaksaannya penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Jambi yang telah melalui tahapan proses kegiatan, diawali dari proses pelingkupan isu, penyepakatan isu PB Strategis, analisis TPB hingga penyusunan rekomendasi dan program.

Berikut adalah beberapa kesimpulan utama yang dapat disampaikan berdasarkan hasil rangkaian proses penyusunan KLHS RPJMD Kota Jambi :

1. Kota Jambi sebagai pusat utama di Provinsi Jambi terus mengalami perkembangan. Perkembangan yang terjadi baik saat ini maupun pada masa yang akan datang perlu di kendalikan dengan kebijakan-kebijakan yang terarah dan efektif untuk untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan, ekonomi, dan sosial yang terjadi saat ini dan meminimalisir dampak atas perkiraan pada masa yang akan datanng;
2. Beberapa isu Pembangunan berkelanjutan yang dianggap paling strategis, meliputi:
   a. Tata guna lahan;
   b. Kualitas air;
   c. Kualitas udara;
   d. Resiko Bencana;
   e. Persampahan;
   f. Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur;dan
   g. Peningkatan SDM/tata Kelola birokrasi





3. Dari 111 indikator, baru 10% yang sudah mencapai yang mencapai target, sementara indikator yang belum mencapai target sebesar 13% namun trennya mengarah ke perbaikan. Untuk inkator yang trennya menurun dan perlu perhatian khusus ada sekitar 26% dan 51% lainnya belum ada data.
4. Beberapa indikator yang butuh perhatian khusus dan sangat terkait dengan Isu Pembangunan Berkelanjutan di Kota Jambi adalah sebagai berikut:
   a. 1.1.1* Tingkat Kemiskinan Ekstrim
   b. 2.a.1* Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah
   c. 6.2.1 Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun
   d. 8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.
   e. 9.1.1. (a) Kondisi mantap jalan nasional.
   f. 11.7.1 (a) Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua
   g. 11.6.1 (b) Persentase sampah nasional yang terkelola
   h. 16.6.1.(c) Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B.



LAMPIRAN

A. Kondisi Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Jambi

Pada bagian ini akan dipaparkan capaian tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan per tujuan. Setiap tujuan terdiri atas indikator – indikator capaian yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dengan merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2020 tersebut. Daftar indikator yang dituangkan dalam substansi ini adalah indikator yang menjadi kewenangan daerah Kota. Pembagian indikator yang menjadi kewenangan daerah Kota tersebut didasarkan kepada buku metadata TPB Indonesia dan juga berdasarkan dengan hasil koordinasi dengan Sekretarian SDGs Bappenas.



MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN

Tujuan global pertama SDGs yang ingin dicapai adalah tanpa kemiskinan. Secara rinci berikut adalah capaian sasaran dan indikator SDGs tujuan 1 yang dapat diukur di Kota Jambi.

Tabel 1
Status Capaian Tujuan ke – 1 SDGS Kota Jambi

Target dan Indikator TPB		Base Line 2018	Base Line 2019	Base Line 2020	Base Line 2021	Target Nasional 2022	Capaian Target			GAP	Status	Instansi
							Belum Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi			
1.1.1 *	Tingkat Kemiskinan Ekstrim	8,49	8,12	8,27	9,02	2,5%	6,4%			3,9%	▼	Bappeda Kota
1.2.1 *	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	8,46 %	8,09 %	8,32%	8,27%	9,57%			8,13%	1,44%	●	Dinas Sosial
1.2.2 *	Presentase laki – laki, perempuan dan anak – anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definsi nasional.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					-	Bappeda Kota
1.3.1 *	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan	71,97 %	63,30 %	67,60%	25,92 %	N/A	55,52%				▼	Dinas Kesehatan
1.3.1 (a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	67,86 %	67,86 %	66,70%	11,63 %	N/A	69,44%				▼	Dinas Kesehatan
1.3.1 (b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	8,34 %	13,80 %	11,63%	14,71 %	57,46%		41,48%		15,98%	▶	Dinas Sosial
1.4.1 *	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.	N/A	N/A	N/A	N/A	44,94% 80,92% 79,33%					-	Bappeda
1.4.2 *	Proporsi dan penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.	Milik Sendiri : 71,50 % Bukan Milik sendiri : 28,50 %	Milik Sendiri : 66,65 % Bukan Milik sendiri : 33,35 %	Milik Sendiri : 68,09% Bukan Milik sendiri : 31,91%	Milik Sendiri : 70,09 % Bukan Milik sendiri : 29,91 %	83,99% (Milik Sendiri) 6,13% (Bukan Milik Sendiri		Milik Sendiri : 73,49% Bukan Milik sendiri : 26,51%		Milik Sendiri : 0,11% Bukan Milik sendiri : 20,38%	▶	BPKAD
1.5.1 *	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	N/A	N/A	N/A	Korban Meninggal 3 orang : 0,49 Korban terkena Dampak 33 orang : 5,44	N/A	N/A				-	Dinas Sosial
1.5.2 *	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP.											Bukan Disagresi Kota
1.5.3 *	Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030											Bukan Disagresi Kota
1.5.4 *	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					-	Dinas Sosial
1.a.1 *	Proporsi sumber daya											Bukan Disagresi Kota





Target dan Indikator TPB		Base Line 2018	Base Line 2019	Base Line 2020	Base Line 2021	Target Nasional 2022	Capaian Target			GAP	Status	Instansi
							Belum Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi			
	yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.											
1.a.2 *	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.											Bukan Disagresi Kota
1.b.1	Proporsi pengeluaran rutin dan pembangunan pada sektor-sektor yang memberi manfaat pada kelompok perempuan, kelompok miskin dan rentan.											Bukan Disagresi Kota

Tercapai Akan Tercapai/ membaik Perlu Perhatian Khusus - Data tidak tersedia

- **TPB Perlu Perhatian Khusus**

  Pada analisis capaian TPB ke-1 Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun, terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian khusus diantaranya adalah indikator 1.3.1* Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.

- **TPB Perlu Adanya Pendalaman**

  Sedangkan indikator yang tidak memiliki data perlu adanya pendalaman, data yang tidak tersedia disebabkan oleh beberapa hal seperti ketiatan yang tidak cocok dengan nomenklatur indikator TPB atau indikator TPB bukan kewenangan dari daerah, sehingga indikator yang tidak memiliki data perlu adanya perhatian khusus untuk mencapai trend capaian membaik. Adapun indikator yang butuh adanya pendalaman diantaranya:

  - 1.2.2* Presentase laki – laki, perempuan dan anak – anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definsi nasional.;
  - 1.4.1* Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.6.4.2 (b) Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaanya;





- 1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang; dan
- 1.5.4* Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional.

a) Target 1.1.1* *(Tingkat kemiskinan ekstrim)*

Kemiskinan di Kota Jambi masih berada pada angka yang masih tinggi yaitu 8,33 % pada Tahun 2022. Dengan tingkat kemiskinan 8,83% tentunya menjadi permasalahan dan isu strategis yang harus menjadi prioritas dalam pembangunan kedepan. Namun demikian jika dilihat dari Tahun 2018 tingkat kemiskinan berada pada 8,49%, laju penurunan tingkat kemiskinan sudah menunjukkan hasil yang positif, walaupun belum menunjukkan angka yang cukup signifikan penurunannya, dengan rata-rata penurunan sekitar 0,04% perTahun.

Tabel 2
Data Kemiskinan Kota Jambi Tahun 2018 – 2022

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Penduduk Miskin (Ribu)	50,61	48,95	50,44	54,23	50,4
2	Tingkat Kemiskinan (%) (PO)	8,49	8,12	8,27	9,02	8,33
3	Garis Kemiskinan (Rp/bulan/kapita)	466.854	488.034	529.090	563.403	605.556
4	Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,26	1,52	1,47	1,42	1,19
5	Keparahan Kemiskinan	0,28	0,42	0,4	0,34	0,25

Sumber : Statistik Kesejahteraan Kota Jambi tahun 2017 – 2023, Kota Jambi Dalam Angka Tahun 2017 – 2023, BPS Kota Jambi Tahun 2023, BPS Provinsi tahun 2023 dan Pengolahan Data Tahun 2023

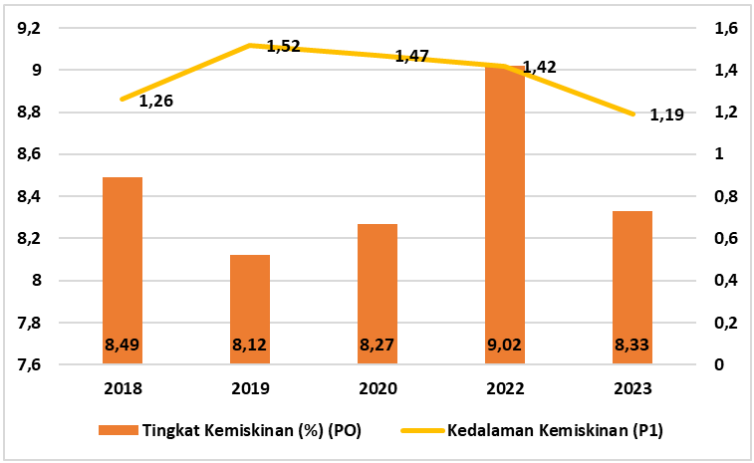

Gambar 1
Garafik Data Kemiskinan Kota Jambi Tahun 2018 – 2022





b) Target 1.2.1* *(Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur)*

Jumlah penduduk Kota Jambi pada tahun 2022 sebanyak 619.600 jiwa sedangkan jumlah penduduk miskin Kota Jambi pada tahun 2022 diketahui sebanyak 50.400 jiwa yang hidup dibawah garis kemiskinan. Maka pada tahun 2022 diketahui presentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional sebesar 8,13%.

Tabel 3
Data Kemiskinan Kota Jambi Tahun 2018 – 2022

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Penduduk Miskin (Ribu)	50,61	48,95	50,44	54,23	50,4
2	Tingkat Kemiskinan (%) (PO)	8,49	8,12	8,27	9,02	8,33
3	Garis Kemiskinan (Rp/bulan/kapita)	466.854	488.034	529.090	563.403	605.556
4	Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,26	1,52	1,47	1,42	1,19
5	Keparahan Kemiskinan	0,28	0,42	0,4	0,34	0,25

Sumber : Statistik Kesejahteraan Kota Jambi tahun 2017 – 2023, Kota Jambi Dalam Angka Tahun 2017 – 2023, BPS Kota Jambi Tahun 2023, BPS Provinsi tahun 2023 dan Pengolahan Data Tahun 2023

c) Target 1.2.2* (*Presentase laki – laki, perempuan dan anak – anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definsi nasional.)*

DIMENSI #1 KESEHATAN

1. *Imunisasi dasar : Persentase imunisasi dasar pada penduduk usia 12 - 23 bulan, terjadi deprivasi jika ada penduduk usia 12-23 tahun yang tidak mendapatkan imunisasi dasar.*
2. *Gizi : Prevalensi of Undernourishment (tingkat kekurangan gizi), terjadi deprivasi jika ada anggota rumah tangga yang kekurangan gizi*
3. *Indikator Morbilitas : persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan.*

DIMENSI #2 PENDIDIKAN

4. *Lama sekolah: Persentase ART usia 25 – 60 tahun yang tidak tamat SMP, terjadi deprivasi jika ada anggota rumahtangga yang tidak menyelesaikan pendidikan SMP pada usia 25 – 60 tahun.*





5. *Lama sekolah: Persentase ART usia 25 – 60 tahun yang tidak tamat SMP, terjadi deprivasi jika ada anggota rumahtangga yang tidak menyelesaikan pendidikan SMP pada usia 25 – 60 tahun.*

DIMENSI #3. STANDAR HIDUP

6. *Listrik: Persentase rumah tangga yang sumber penerangan utamanya bukan listrik, terjadi deprivasi jika tanpa listrik.*
7. *Air minum: Persentase rumah tangga tanpa akses pada air minum bersih, terjadi deprivasi jika rumahtangga tanpa akses pada air minum bersih atau air bersih yang dapat diperoleh tidak lebih dari 30 menit jalan kaki dari rumah.*
8. *Sanitasi: Persentase rumahtangga tidak mempunyai WC layak, terjadi deprivasi jika jika rumahtangga tidak mempunyai WC layak atau menggunakan WC bersama.*
9. *Lantai: PPersentase rumah tangga dengan jenis lantai terluas adalah tanah atau luas lantai per kapita kurang dari 8 m2, terjadi deprivasi jika rumah berlantai tanah, pasir atau lantai tercampur kotoran ternak atau luas lantai per kapita kurang dari 8m.*
10. *Bahan bakar memasak: Persentase rumah tangga dengan Bahan bakar memasak menggunakan elpiji 3kg, terjadi deprivasi jika memasak menggunakan elpiji 3kg.*
11. *Aset: Persentase rumah tangga yang tidak punya asset produktif, terjadi deprivasi jika rumahtangga tidak mempunyai sepeda atau sepeda motor, ternak, lahan, TV, tabung gas, lemari es, emas, mobil.*
12. *Akta kelahiran: Persentase penduduk yang berusia 0-17 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran, terjadi deprivasi jika ada anggota rumahtangga yang berusia 0-17 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran.*
13. *Akses internet: Persentase rumah tangga yang tidak punya akses internet, terjadi deprivasi jika tidak ada anggota rumahtangga yang bisa mengakses internet.*
14. *Pekerjaan: Persentase rumah tangga dengan anggota rumah tangga bekerja, terjadi deprivasi jika tidak ada anggota rumah tangga yang bekerja atau semua anggota rumah tangga yang bekerja kurang dari 20 jam seminggu.*





d) Target 1.3.1* (Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan)

Presentase penduduk Kota Jambi yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan pada tahun 2022 sebanyak 46,25 sedangkan penduduk dengan kelompok pengeluaran 40% terbawah sebanyak 55,52%.

Tabel 4
Presentase Penduduk Yang Menggunakan Jaminan Kesehatan Untuk Berobat Jalan Menurut Karakteristik Tahun 2022

Katakteristik	Menggunakan Jaminan Kesehatan Untuk Berobat Jalan
(1)	(2)
Jenis Kelamin	
Laki-laki	41,27
Perempuan	50,52
Kelompok Pengeluaran	
40% Terbawah	55,52
40% Tengah	40,03
20% Teratas	47,48
Kota Jambi	46,25

Sumber : Statistik Kota Jambi Tahun 2022

e) Target 1.3.1 (a) (*Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan*)

Presentase penduduk Kota Jambi yang memiliki jaminan Kesehatan pada tahun 2022 sebanyak 69,44%.

Tabel 5
Presentase penduduk kota jambi yang memiliki jaminan kesehatan menurut jenis jaminan kesehatan tahun 2022

Jenis Jaminan Kesehatan	(%)
BPJS Kesehatan	69,44
Jamkesda	1,37
Asuransi Swasta	0,97
Perusahaan/Kantor	3,14
Tidak Punya	25,44

Sumber : Statistik Kota Jambi Tahun 2022





f) Target 1.3.1 (b) (*Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan*)

Jumlah kepemilikikan jaminan sosial bidang ketenagakerjaan pada penduduk Kota Jambi di tahun 2022 sebesar 10,92%.

Tabel 6
RSE Presentase Rumah Tangga menurut jenis Jaminan Sosial, 2022

Jenis Jaminan Sosial	Presentase Rumah Tangga
Jaminan Pensiun/hari tua*	11.52
Asuransi/PHK**	10,92

* Jaminan pensiun/hari tua terdiri dari: Jaminan pensiun dan Jaminan hari tua

** Asuransi/PHK terdiri dari: Asuransi kematian, Jaminan kecelakaan kerja, & Pesangon PHK

g) Target 1.4.1* (Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar)

Data tidak tersedia.

h) Target 1.4.2* (Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan)

Status kepemilikan bangunan tempat tinggal yang ditempati menurut Susenas meliputi rumah milik sendiri, kontrak/sewa, dan lainnya (bebas sewa, dinas, dan lainnya). Pada tabel dibawah ini memperlihatkan bahwa persentase status bangunan tempat tinggal milik sendiri (73,49 persen) sudah jauh lebih tinggi dibanding status bangunan kontrak/sewa (4,25 persen), bebas sewa (22,15 persen) atau dinas/lainnya (0,60 persen).

Berdasarkan hasil Susenas 2022, kepemilikan bangunan tempat tinggal milik sendiri dan kontrak/sewa dapat dikaitkan dengan pendidikan kepala rumah tangga dan status ekonomi rumah tangga. Rumah tangga dengan tingkat pendidikan kepala rumah tangga yang lebih rendah, cenderung menempati rumah milik sendiri.





Tabel 7
Persentase Rumah Tangga Menurut Karakteristik dan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati Tahun 2022

Karakteristik	Status Kepemilikan Bangunan	
	Milik Sendiri	Bukan milik Sendiri*
Jenis Kelamin KRT		
Laki-laki	72,79	27,21
Perempuan	78,85	21,15
Kelompok Pengeluaran		
40% Terbawah	59,56	40,44
40% Tengah	78,35	21,65
20% Teratas	85,04	14,96
Pendidikan Tertinggi KRT		
SD ke bawah	66,85	33,15
SMP ke atas	75,01	24,99
Kota Jambi	73,49	26,51

**) Termasuk rumah lainnya adalah rumah dinas, rumah adat, dll*

i) Target 1.5.1* (Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang)

Data Tidak Tersedia.

j) Target 1.5.4* (Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional)

Data Tidak Tersedia.





MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN

Tujuan ke-2 adalah menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.

Tabel 8
Status Capaian Tujuan ke – 2 SDG's Kota Jambi

Target dan Indikator TPB		Base Line 2018	Base Line 2019	Base Line 2020	Base Line 2021	Target Nasional	Capaian Target			GAP	Status	Instansi
							Belum Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi			
Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.												
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).											Bukan Disagresi Kota
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.											Bukan Disagresi Kota
Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.												
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.											Bukan Disagresi Kota
2.2.2*	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.											Bukan Disagresi Kota
2.2.2. (a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).											Bukan Disagresi Kota
2.2.3*	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun.											Bukan Disagresi Kota
Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.												
2.3.1*	Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/peternakan/ perikanan/ kehutanan											Bukan Disagresi Kota
2.3.1 (a)	Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/perikanan/ kehutanan											Bukan Disagresi Kota
2.3.2*	Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil menurut subsektor.											Bukan Disagresi Kota
Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian												
2.4.1	Proporsi areal pertanian produktif dan berkelanjutan.											Bukan Disagresi Kota
2.4.1 (a)	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		89,64%		●	PUPR
Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional.												
2.5.1*	Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun jangka panjang.											Bukan Disagresi Kota
2.5.2*	Proporsi ras ternak lokal yang berisiko punah.											Bukan Disagresi Kota
Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur pedesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang.												
2.a.1*	Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah	2,73%	1,53%	0,52%	0,74%	N/A	N/A				▼	Dinas Ketahanan Pangan
2.a.2*	Total bantuin Pembangunan (ODA) dan bantuin lain untuk sektor pertanian.											
Memperbaiki dan mencegah pembatasan dan distorsi dalam pasar pertanian dunia, termasuk melalui penghapusan secara bersamaan segala bentuk subsidi ekspor pertanian dan semua tindakan ekspor dengan efek setara, sesuai dengan amanat the Doha Development Round.												
2.b.1*	Subsidi ekspor pertanian.											Bukan Disagresi Kota
Mengadopsi langkahlangkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim.												
2.c.1*	Indikator anomali harga pangan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,27				-	Dinas Ketahanan Pangan

● Tercapai ▶ Akan Tercapai/ membaik ▼ Perlu Perhatian Khusus - Data tidak tersedia





- **TPB Perlu Perhatian Khusus**

  Pada analisis capaian TPB Tujuan ke-2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan Dan Gizi Yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan, terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian khusus diantaranya adalah Indikator 2.a.1* Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah.

- **TPB Perlu Adanya Pendalaman**

  Sedangkan capaian indikator yang tidak memiliki data perlu adanya pendalaman, data tidak tersedia disebakan oleh beberapa hal seperti kegiatan tidak *match* dengan nomenklatur indikator TPB atau Indikator TPB tidak dengan kewenangan daerah. Sehingga indikator yang tidak memiliki data perlu perhatian khusus untuk mencapai trend capaian membaik. Capaian TPB yang tidak memiliki data terdapat pada indikator 2.4.1 (a) Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan 2.c.1* Indikator anomali harga pangan.

a) Target 2.4.1 (a) (Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan)

Diketahui luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) di Kota Jambi seluas 459 Ha dan luas lahan Pertanian keselurhan di Kota Jambi seluas 512 Ha. Maka proporsi luas lahan Pertanian yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebesar 89,64%.

b) Target 2.a.1* (Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah)

Diketahui total anggaran yang dialokasikan untuk urusan pertanian sebesar 2.671.474.117 rupiah, sedangkan nilai tambah Pertanian pada PDRB sebesar 168.690.000.000 rupiah pada tahun 2022. Jadi nilai Indeks orientasi Pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah sebesar 1,58%.

c) Target 2.c.1 (Indikator anomali harga pangan)

Data tidak tersedia.





MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA

Tujuan 3 (Tiga) adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.

Tabel 9
Status Capaian Tujuan ke – 3 SDG's Kota Jambi

Target dan Indikator TPB		Base Line 2018	Base Line 2019	Base Line 2020	Base Line 2021	Target Nasional	Capaian Target			GAP	Status	Instansi
							Belum Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi			
	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.											
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	N/A	N/A	N/A	0	N/A	4				▶	Dinas Kesehatan
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan	fasilitas kesehatan : 96,02 % ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih: 100%	N/A	fasilitas kesehatan : 98,44% ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih: 100%	fasilitas kesehatan : 100% ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih: 100%	95,79% ; 90,21%			fasilitas kesehatan : 98,77% ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih: 100%		●	Dinas Kesehatan
	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.											
3.2.1*	(a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.											Bukan Disagresi Kota
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.											Bukan Disagresi Kota
	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.											
3.3.1*	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi.											Bukan Disagresi Kota
3.3.2*	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.											Bukan Disagresi Kota
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1.000 orang	N/A	N/A	N/A	0	1,58					-	Dinas Kesehatan
3.3.3.[a]	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.											Bukan Disagresi Kota
3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.	N/A	N/A	N/A	N/A	1,64					-	Dinas Kesehatan
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta	N/A	N/A	N/A	0	59%			100%		●	Dinas Kesehatan
3.3.5. [a]	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta.											Bukan Disagresi Kota
3.3.5. [b]	Jumlah kabupaten/ kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi.											Bukan Disagresi Kota
	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.											
3.4.1	Kematian akibat penyakit kardiovaskuler, kanker, diabetes atau penyakit pernapasan kronis.											Bukan Disagresi Kota
3.4.1 (a)	Persentase merokok pada penduduk usia 10-18 tahun.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					-	
3.4.1 (b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	N/A	N/A	N/A	14,12	N/A					-	Dinas Kesehatan
3.4.1 (c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					-	Dinas Kesehatan
3.4.2	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.											Bukan Disagresi Kota
	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alcohol yang membahayakan											
3.5.1	Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi, psikososial, rehabilitasi dan layanan pasca											Bukan Disagresi Kota





Target dan Indikator TPB		Base Line 2018	Base Line 2019	Base Line 2020	Base Line 2021	Target Nasional	Capaian Target			GAP	Status	Instansi
							Belum Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi			
	intervensi) bagi gangguan penyalahgunaan zat.											
3.5.1 (a)	Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis											Bukan Disagresi Kota
3.5.1 (b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi	N/A	N/A	N/A	57 orang	5.405 jiwa					-	BNN
3.5.2*	Konsumsi alcohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.											Bukan Disagresi Kota
	Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas.											
3.6.1	Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas.											Bukan Disagresi Kota
	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.											
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern.											Bukan Disagresi Kota
3.7.2*	Angka kelahiran remaja (umur 1014 tahun; umur 15-19tahun) per 1000 Perempuan di kelompok umur yang sama.											Bukan Disagresi Kota
3.7.2. [a]	Total Fertility Rate (TFR).											Bukan Disagresi Kota
	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat – obatan dan vaksin, berkualitas dan terjangkau bagi semua orang											
3.8.1*	Cakupan pelayanan kesehatan essensial	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					-	Dinas Kesehatan
3.8.1 (a)	Unmet Need Pelayanan Kesehatan	N/A	N/A	N/A	N/A	6,09					-	Dinas Kesehatan
3.8.2*	Proporsi populasidengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan.											Bukan Disagresi Kota
3.8.2 (a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	75,68 %	75,5%	75,63%	92,98%	86,96%	74,92%			12,01%	▶	
	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.											
3.9.1	Angka kematian akibat rumah tangga dan polusi udara ambien.											Bukan Disagresi Kota
3.9.2	Angka kematian akibat air tidak aman, sanitasi tidak aman, dan tidak higienis.											Bukan Disagresi Kota
3.9.3	Angka kematian akibat keracunan.											Bukan Disagresi Kota
	Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat											
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	N/A	22,41 %	22,65%	22,65	28,26	20,97			7,29%	▼	Dinas Kesehatan
	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Publik Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas AspekAspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.											
3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional.											Bukan Disagresi Kota
3.b.2*	Total Official Development Assistant (ODA) untuk penelitian medis dan sektor kesehatan dasar.											Bukan Disagresi Kota
3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat essensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan.											Bukan Disagresi Kota
	Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil											
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	N/A	N/A	N/A	1,71	0,435					-	Dinas Kesehatan
	Memperkuat kapasitas semua negara, khususnya negara berkembang tentang peringatan di 088ni, pengurangan risiko dan manajemen risiko kesehatan nasional dan global.											
3.d.1*	Regulasi Kesehatan internasional dan kesiapsiagaan darurat kesehatan.											Bukan Disagresi Kota
3.d.2	Persentase infeksi aliran darah akibat organisme antimikroba-resisten terpilih/tertentu.											Bukan Disagresi Kota

● Tercapai ▶ Akan Tercapai/ membaik ▼ Perlu Perhatian Khusus - Data tidak tersedia





- **TPB Perlu Perhatian Khusus**

  Pada analisis capaian TPB Tujuan ke-3 Menjamin Kehidupan Yang Sehat Dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia, terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian khusus diantaranya adalah Indikator 3.8.2 (a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan 3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.

- **TPB Perlu Adanya Pendalaman**

  Sedangkan capaian indikator yang tidak memiliki data perlu adanya pendalaman, data tidak tersedia disebakan oleh beberapa hal seperti kegiatan tidak *match* dengan nomenklatur indikator TPB atau Indikator TPB tidak dengan kewenangan daerah. Sehingga indikator yang tidak memiliki data perlu perhatian khusus untuk mencapai trend capaian membaik, meliputi :

  - 3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI);
  - 3.3.3* Kejadian Malaria per 1.000 orang;
  - 3.3.4* Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk;
  - 3.4.1 (a) Persentase merokok pada penduduk usia 10-18 tahun;
  - 3.4.1 (b) Prevalensi tekanan darah tinggi;
  - 3.4.1 (c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun;
  - 3.5.1 Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi;
  - 3.8.1* Cakupan pelayanan kesehatan essensial;
  - 3.8.1 (a) Unmet Need Pelayanan Kesehatan; dan
  - 3.c.1 Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.

a) Target 3.1.1* (Angka Kematian Ibu (AKI))

Indikator menurunkan kasus kematian Ibu melahirkan di Kota Jambi ditargetkan sebanyak 0 kasus dan terealisasi sebanyak 4 kasus. Realisasi Jumlah Kematian Ibu Tahun 2022 ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 6 (enam) orang. Indikator ini diukur dari jumlah kematian ibu melahirkan di Kota Jambi dengan penyebab kematian faktor penyakit dari ibu melahirkan.





b) Target 3.1.2* *(Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan)*

Proporsi perempuan pernah kawin berumur 15-49 tahun yang pernah melahirkan dengan penolong persalinan oleh tenaga Kesehatan pada tahun 2022 sebesar 100 %.

Tabel 10
Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15 - 49 Tahun yang Pernah Melahirkan dengan Penolong Kesehatan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan menurut Karakteristik, 2022

Karakteristik	Melahirkan di Fasilitas Kesehatan
Kelompok Pengeluaran	
40 Persen Terbawah	100,00
40 Persen Tengah	100,00
20 Persen Teratas	100,00
Pendidikan Tertinggi	
SD ke bawah	100,00
SMP ke atas	100,00
Kota Jambi	**100,00**

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Jambi 2022

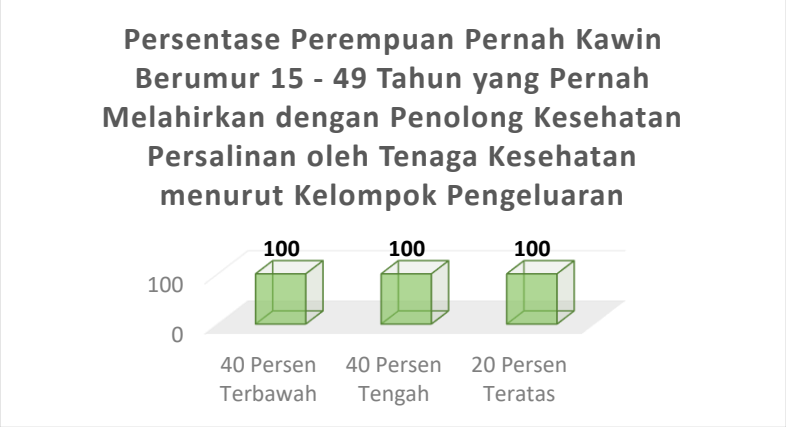

Gambar 2
Grafik Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15 - 49 Tahun yang Pernah Melahirkan dengan Penolong Kesehatan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Jambi Tahun 2022



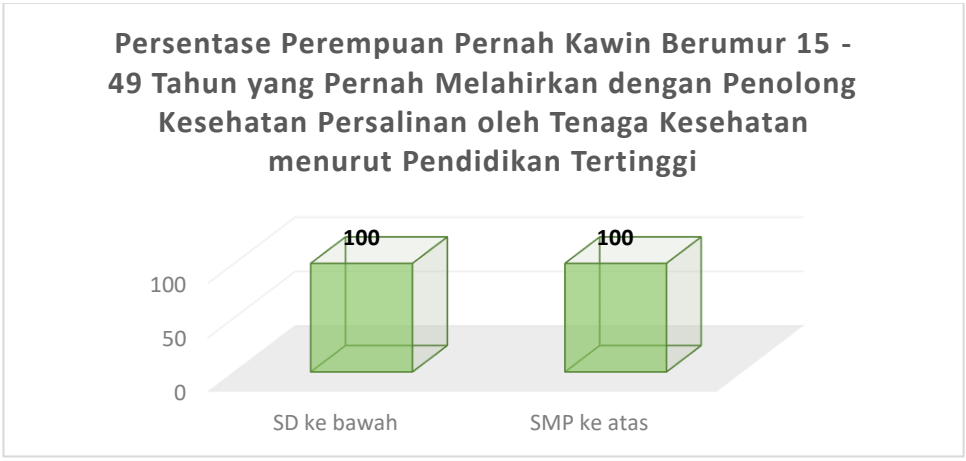

Gambar 3
Grafik Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15 - 49 Tahun yang Pernah Melahirkan dengan Penolong Kesehatan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan menurut Pendidikan Tertinggi di Kota Jambi Tahun 2022

Demi menjaga keselamatan dan kesehatan ibu dan anak maka proses persalinan diharuskan berada pada fasilitas-fasilitas kesehatan yang sudah disediakan oleh pemerintah. Berdasarkan data Statistik Kesejahteraan Kota Jambi Tahun 2022, persentase perempuan pernah kawin berusia 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan Kota Jambi sebesar 98,77%.

Tabel 11
Persentase Perempuan Berumur 15 - 49 Tahun yang Pernah Melahirkan di Fasilitas Kesehatan menurut Karakteristik, 2022

Karakteristik	Melahirkan di Fasilitas Kesehatan
Kelompok Pengeluaran	
40 Persen Terbawah	100,00
40 Persen Tengah	96,39
20 Persen Teratas	100,00
Pendidikan Tertinggi	
SD ke bawah	100,00
SMP ke atas	98,73
Kota Jambi	**98,77**

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Jambi 2022

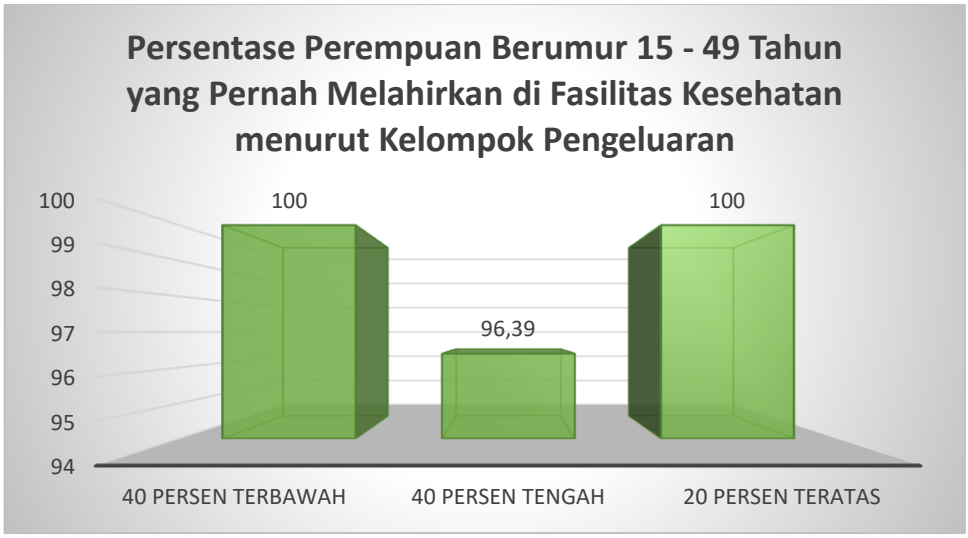

Gambar 4
Grafik Persentase Perempuan Berumur 15 - 49 Tahun yang Pernah Melahirkan di Fasilitas Kesehatan menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Jambi Tahun 2022

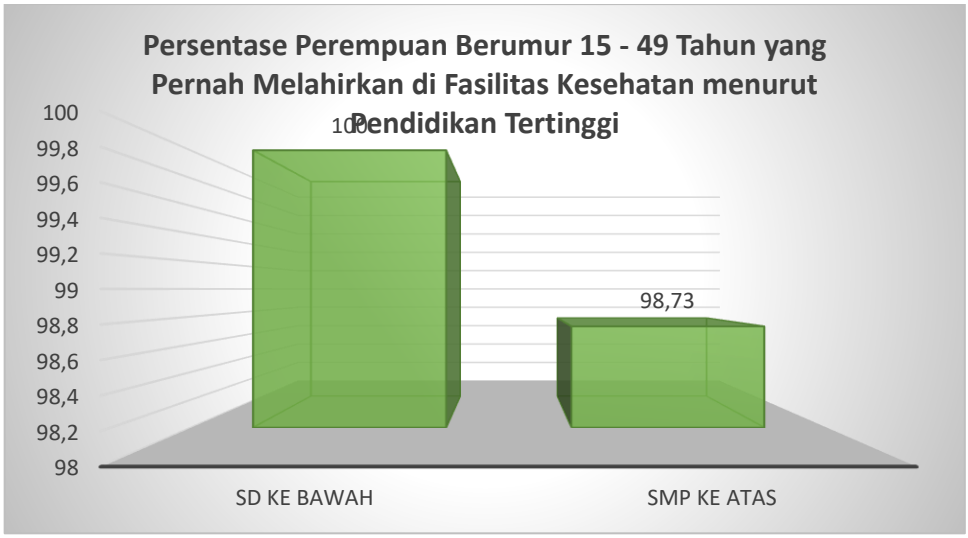

Gambar 5
Grafik Persentase Perempuan Berumur 15 - 49 Tahun yang Pernah Melahirkan di Fasilitas Kesehatan menurut Pendidikan Tertinggi di Kota Jambi Tahun 2022

c) Target 3.3.3 (Kejadian Malaria per 1.000 orang)

Data tidak tersedia.

d) Target 3.3.4 (Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk)

Data tidak tersedia.



e) Target 3.3.5 (Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta)

Filariasis adalah penyakit menular (Penyakit Kaki Gajah) yang disebabkan oleh cacing Filaria yang ditularkan oleh berbagai jenis nyamuk. Penyakit ini bersifat menahun (kronis) dan bila tidak mendapatkan pengobatan dapat menimbulkan cacat menetap berupa pembesaran kaki, lengan dan alat kelamin baik perempuan maupun laki-laki. Akibatnya penderita tidak dapat bekerja secara optimal bahkan hidupnya tergantung kepada orang lain sehingga menjadi beban keluarga, masyarakat dan negara.

Indikator menurunnya angka penyakit menular dan tidak ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sesuai target. Perhitungan ini diukur dengan menggunakan rumus jumlah realisasi dibagi dengan jumlah target dikali 100%.

f) Target 3.4.1 (a) (Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun)

Data tidak tersedia.

g) Target 3.4.1 (b) Prevalensi tekanan darah tinggi

Data tidak tersedia.

h) Target 3.4.1 (c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun

Data tidak tersedia.

i) Target 3.5.1 (b) (Jumlah yang mengakses layanan pascarehabilitasi)

Data tidak tersedia.

j) Target 3.8.1* (Cakupan pelayanan kesehatan essensial)

Data tidak tersedia.

k) Target 3.8.1 (a) (Unmet Need Pelayanan Kesehatan)

Data tidak tersedia.





l) Target 3.8.2 (a) *(Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN))*

Berdasarkan Data Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jambi Tahun 2022 Presentase Penduduk Kota Jambi yang memiliki jaminan Kesehatan di Daerah Perkotaan dan Perdesaan pada Tahun 2022 sebanyak 74,92%. Jaminan Kesehatan terdiri dari BPJS kesehatan, Jamkesda, Asuransi Swasta, Perusahaan/Kantor. Persentase dari berbagai jenis jaminan kesehatan di Kota Jambi yaitu BPJS kesehatan sebesar 69,44%, Jamkesda sebesar 1,37%, Asuransi Swasta sebesar 0,97% dan perusahaan/kantor sebesar 3,14%.

Tabel 12
Presentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Jaminan Kesehatan, 2022

Kabupaten/Kota	BPJS Kesehatan	Jamkesda	Asuransi Swasta	Perusahaan/Kantor	Tidak Punya
Kerinci	38,42	0,41	0,25	0,78	60,34
Merangin	42,57	0,21	0,06	0,46	56,74
Sarolangun	53,63	1,76	0,03	1,54	43,19
Batang Hari	63,04	2,24	0,79	2,73	31,21
Muaro Jambi	50,09	0,35	0,08	3,24	46,64
Tanjung Jabung Timur	41,60	50,16	0,00	0,34	10,83
Tanjung Jabung Barat	42,77	0,26	0,00	1,80	55,16
Tebo	38,97	0,00	0,00	0,29	60,75
Bungo	41,97	1,22	0,09	1,56	55,19
Kota Jambi	**69,44**	**1,37**	**0,97**	**3,14**	25,44
Kota Sungai Penuh	74,85	0,85	0,46	0,74	23,10
Provinsi Jambi	50,46	3,74	0,28	1,75	44,09

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jambi 2022



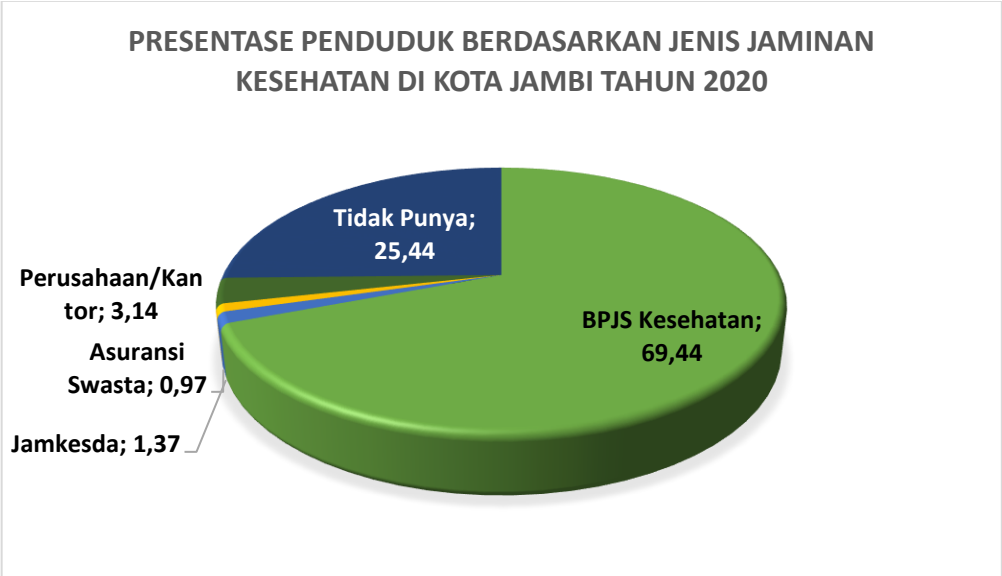

Gambar 6
Grafik Presentase Penduduk Berdasarkan Jenis Jaminan Kesehatan di Kota Jambi Tahun 2022

m) Target 3.a.1 (Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun)*

Indikator Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun. merupakan proksi untuk memonitor pelaksanaan *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC) WHO di Indonesia, dimana prevalensi tinggi penduduk yang merokok dapat berisiko terhadap kondisi kesehatan masyarakat. Berdasarkan data Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Jambi Tahun 2022 persentase penduduk 15 tahun ke atas yang merokok di Kota Jambi dalam 1 bulan terakhir sebanyak 20,97%.

Tabel 13
Persentase Penduduk 15 tahun ke atas yang Merokok dan Rata-rata Batang Rokok yang dihisap per Minggu menurut Karakteristik, 2022

Karakteristik	Presentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Merokok
Kelompok Pengeluaran	
40 Persen Terbawah	21,50
40 Persen Tengah	21,79
20 Persen Teratas	18,36
Pendidikan Tertinggi	
SD ke bawah	18,64
SMP ke atas	21,38
Kota Jambi	**20,97**

Sumber : Statistik Kesejahteraam Rakyat Kota Jambi 2022

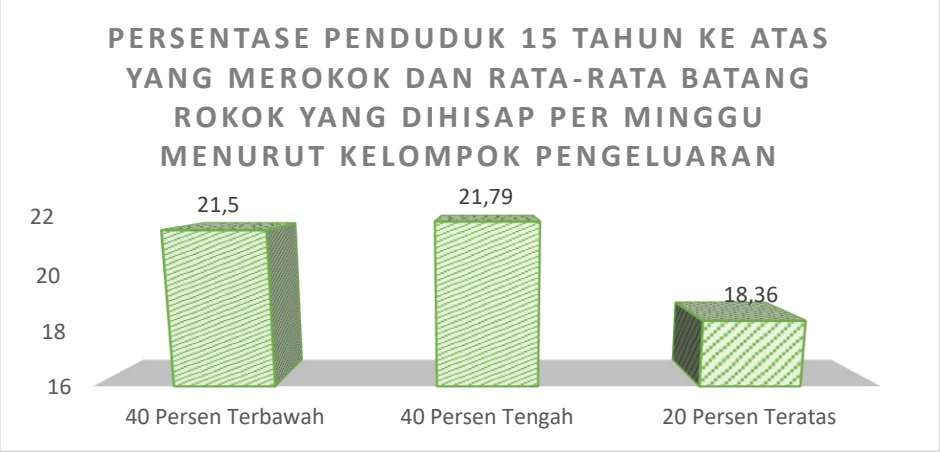

Gambar 7
Grafik Persentase Penduduk 15 tahun ke atas yang Merokok dan Rata-rata Batang Rokok yang dihisap per Minggu menurut Kelompok Pengeluaran

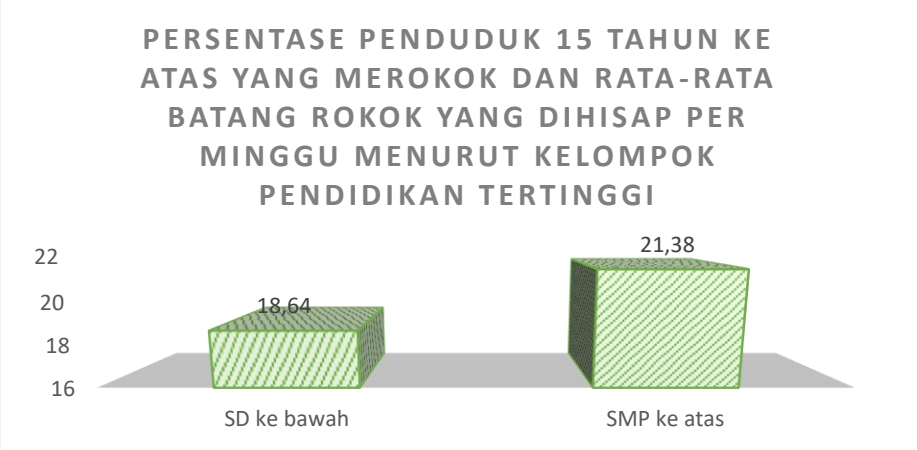

Gambar 8
Grafik Persentase Penduduk 15 tahun ke atas yang Merokok dan Rata-rata Batang Rokok yang dihisap per Minggu menurut Pendidikan Tertinggi

n) Target 3.c.1 *(Kepadatan dan distribusi tenaga Kesehatan)*

Tenaga kesehatan terdiri dari tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknis biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lain (UU Kesehatan No.36 Tahun 2014). Indikator Kepadatan dan distribusi tenaga Kesehatan dapat digunakan sebagai landasan perencanaan untuk pengembangan dan pemetaan tenaga kesehatan khususnya di daerah terpencil.



MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA

Tujuan 4 (empat) adalah menjamin kualitas Pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.

Tabel 14
Status Capaian Tujuan ke – 4 SDG's Kota Jambi

Target TPB dan Indikator TPB		Base Line 2018	Base Line 2019	Base Line 2020	Base Line 2021	Target Nasional	Capaian Target			GAP	Status	Instansi
							Belum Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi			
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan SD- SMP tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.												
4.1.1	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standarkemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.											Bukan Disagresi Kota
4.1.1. (a)	Proporsi anak-anak dan remaja di: (1) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.											Bukan Disagresi Kota
4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat.	SD : 32,90 SMP : 15,06 SMA : 30,42	SD : 32,75 SMP : 13,27 SMA : 32,36	SD : 31,59 SMP : 13,02 SMA : 33,11	SD : 31,29 SMP : 11,81 SMA : 34,45	SD : 97,37 SMP: 90,13 SMA: 65,94	SD : 34,84 SMP : 11,68 SMA : 32,27			SD : 62,53 SMP : 78,45 SMA : 33,67	▼	Dinas Pendidikan
4.1.2 (a)	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/ sederajat.	21,47%	21,37 %	22,08%	22,26%	SD : 0,71 SMA : 22,52 SMP: 6,94	20,99%			10,93%	▼	Dinas Pendidikan
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan lakilaki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.												
4.2.1*	Proporsi anak usia 24-59 bulan yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin.											Bukan Disagresi Kota
4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.	23,62%	23,76 %	27,15%	22,78%	95,1%	22,69%				▼	Dinas Pendidikan
Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan lakilaki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.												
4.3.1*	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.	Perempuan : 83,14% ; Laki-laki: 84,67 %	N/A	Perempuan : 80,70% ; Laki-laki: 84,69%	Perempuan : 80,37% ; Laki-laki: 86,61%	47,21%	Perempuan : 95,97% ; Laki-laki: 94,34%			47,94%	●	Dinas Pendidikan
4.3.1 (a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	N/A	N/A	N/A	N/A	31,16					-	Dinas Pendidikan
Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.												
4.4.1	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).											Bukan Disagresi Kota
4.4.1 (a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	55,55%	65,93 %	69,59 %	79,42%	N/A	80,60%				▶	Dinas Pendidikan
Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.												
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas	APM SD 97,07 ; APK SMP 86,59; APM SMA 66,74	N/A	APM SD 97,65 ; APK SMP 84,77; APM SMA 66,89	APM SD 99,87; APK SMP 85,88; APM SMA 67,06	APM SD 100,01% APK SMP 100,75% APK SMA/SMK 100,74%		APM SD 99,68 ; APK SMP 77,57; APK SMA 117,01.		APM SD 0,33 ; APK SMP 23,18;	▶	Dinas Pendidikan
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.												
4.6.1	Persentase remaja/dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level											Bukan Disagresi Kota





Target TPB dan Indikator TPB		Base Line 2018	Base Line 2019	Base Line 2020	Base Line 2021	Target Nasional	Capaian Target			GAP	Status	Instansi
							Belum Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi			
	tertentu dalam keterampilan (i) membaca dan (ii) menghitung, menurut jenis kelamin.											
4.6.1 (a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	99,81%	99,22	99,27%	99,16%	96,35%			99,37%		●	Dinas Pendidikan
Pada tahun 2030, menjamin semua peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan, termasuk antara lain, melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, promosi budaya damai dan non kekerasan, kewarganegaraan global dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya dan kontribusi budaya terhadap pembangunan												
4.7.1	Pengarusutamaan pada semua jenjang pendidikan, (i) pendidikan kewargaan dunia, (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia pada (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru, (d) penilaian siswa.											Bukan Disagresi Kota
Membangun dan meningkatkan fasilitas Pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.												
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).											Bukan Disagresi Kota
4.a.1. [a]	Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir.											Bukan Disagresi Kota
Pada tahun 2020, secara signifikan memperluas secara global, jumlah beasiswa bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, dan negara-negara Afrika, untuk mendaftar di pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, program teknik, program rekayasa dan ilmiah, di negara maju dan negara berkembang lainnya.												
4.b.1*	Jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang.											Bukan Disagresi Kota
Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.												
4.c.1*	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan.											Bukan Disagresi Kota

● Tercapai ▶ Akan Tercapai/ membaik ▼ Perlu Perhatian Khusus - Data tidak tersedia

- **TPB Perlu Perhatian Khusus**

  Pada analisis capaian TPB Tujuan ke-4 Menjamin Kualitas Pendidikan Yang Inklusif Dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua, terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian khusus diantaranya adalah Indikator 4.1.2* Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat, 4.1.2 (a) Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/ sederajat, 4.2.2* Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.

- **TPB Perlu Adanya Pendalaman**

  Sedangkan capaian indikator yang tidak memiliki data perlu adanya pendalaman, data tidak tersedia disebakan oleh beberapa hal seperti kegiatan





tidak match dengan nomenklatur indikator TPB atau Indikator TPB tidak dengan kewenangan daerah. Sehingga indikator yang tidak memiliki data perlu perhatian khusus untuk mencapai trend capaian membaik. Capaian TPB yang tidak memiliki data terdapat pada indikator 4.3.1 (a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).

a) Target 4.1.2 (Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat)*

Indikator ini mengukur persentase anak dan remaja yang berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan yang sesuai dengan rentang usianya. Rentang usia yang termasuk dalam perhitungan ini adalah antara 1 sampai dengan 3 tahun sejak usia kelulusan jenjang pendidikan pada umumnya. Berdasarkan usia wajib belajar yang dimulai sejak 7 tahun, maka dengan asumsi siswa belajar penuh waktu dan tidak tinggal kelas, mereka lulus SD/sederajat pada usia sekitar 12 tahun. Oleh karena itu rentang usia yang digunakan untuk penghitungan tingkat ketuntasan SD/sederajat adalah anak atau remaja usia 13 tahun (12 + 1 tahun) sampai dengan 15 tahun (12 + 3 tahun).

Pada tahun 2022 diketahui penduduk Kota Jambi berumur 7-24 tahun 34,84% sudah menyelesaikan pendidikan tingkat SD, 11,68% sudah menyelesaikan Pendidikan tingkat SMP dan 32,27% sudah menyelesaikan pendidikan tingkat SMA.

Tabel 15
Presentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun Menurut Karakteristik Dan Status Pendidikan Tahun 2022

Karakteristik	Masih Bersekolah		
	SD/sederajat	SMP/sederajat	SMA/keatas
Jenis Kelamin			
Laki-laki	35,03	11,37	30,53
Perempuan	34,64	12,00	34,05
Kelompok Pengeluaran			
40% terbawah	39,72	13,62	27,07
40% tengah	30,39	10,54	35,57
40% teratas	33,55	9,63	37,14
Kota Jambi	**34,84**	**11,68**	**32,27**

Sumber : BPS Kota Jambi Tahun 2022





b) Target 4.1.2 (a) Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat

Anak tidak sekolah adalah anak-anak dan remaja usia sekolah sesuai dengan jenjang Pendidikan anak usia dini (PAUD), SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat yang tidak terdaftar dalam satuan pendidikan tersebut. Pada tahun 2022 diketahui sebanyak 20,99% penduduk berumur 7-24 tahun tidak bersekolah lagi.

Tabel 16
Presentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun Tidak Bersekolah Lagi Tahun 2022

Karakteristik	Tidak Bersekolah Lagi (%)
Jenis Kelamin	
Laki-laki	22,87
Perempuan	19,07
Kelompok Pengeluaran	
40% terbawah	19,61
40% tengah	23,21
40% teratas	19,01
Kota Jambi	**20,99**

Sumber : BPS Kota Jambi Tahun 2022

c) Target 4.2.2 (Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin)*

Pada tahun 2022 tercatat 22,69% anak di Kota Jambi yang berpartisipasi dalam keikutsertaan pendidikan prasekolah.

Tabel 17
Presentase penduduk 0-6 Tahun menurut Keikutsertaan Pendidikan Prasekolah Tahun 2022 di Kota Jambi

Keikutsertaan Pendidikan Prasekolah	Jumlah (%)
Masih Mengikuti Prasekolah TA 2020/2021	14,99
Pernah Mengikuti Prasekolah TA 2020/2021 dan Sebelum TA 2020/2021	7,70
Tidak/Belum Pernah Mengikuti Prasekolah	77,31

Sumber : BPS Provinsi Jambi Tahun 2022



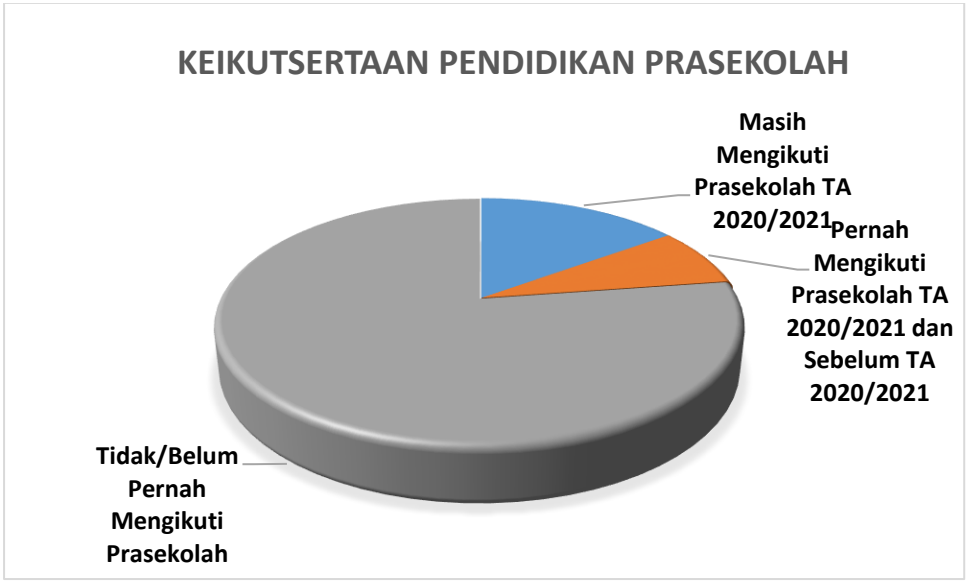

Gambar 9
Grafik Keikutsertaan Pendidikan Prasekolah di Kota Jambi Tahun 2022

d) Target 4.3.1* (Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin)

Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir di Kota Jambi, menurut jenis kelamin perempuan sebanyak 95,97% dan jenis kelamin laki-laki sebanyak 94,34%.

Tabel 18
Angka Partispasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK) Formal dan Nonformal Penduduk menurut Karakteristik dan Jenis Kelamin, 2022

Karakteristik	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
APS			
7-12 tahun	99,36	100,00	99,68
13-15 tahun	98,29	92,88	95,42
16-18 tahun	90,28	90,15	90,22
APM			
SD	99,36	100,00	99,68
SMP	81,36	73,78	77,57
SMA	78,55	63,22	71,52
APK			
SD	107,32	107,52	107,42
SMP	81,86	73,78	77,57
SMA	111,94	122,99	117,01

Sumber : BPS Kota Jambi Tahun 2022



e) Target 4.3.1 (a) (Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT))

Data tidak tersedia.

f) Target 4.4.1 (a) Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

Diketahui proporsi penduduk yang memiliki keterampilan teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kota Jambi sebanyak 80,60%.

Tabel 19
Presentase Anggota Rumah Tangga Berusia 5 Tahun Keatas Mengakses Internet selama Tiga Bulan Terakhir, 2022

Karakteristik	Mengakses Internet
Jenis Kelamin KRT	
Laki-laki	81,17
Perempuan	74,60
Kuintil Pengeluaran	
40% Terbawah	70,33
40% Tengah	85,46
20% Teratas	91,01
Pendidikan Tertinggi ART	
SD ke bawah	66,83
SMP ke atas	83,90
Kota Jambi	**80,60**

Sumber : BPS Kota Jambi Tahun 2022

g) Target 4.5.1* (Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan angka partisipasi penduduk bersekolah di jenjang tertentu sesuai kelompok usia pada jenjang tersebut. Berdasarkan data Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Jambi, Angka Partisipasi Murni (APM) SD pada tahun 2022 sebesar 99,68, Perhitungan realisasi ini diukur dengan rumus Jumlah Murid SD/Sederajat usia 7-12 Tahun di Kota Jambi terhadap terhadap jumlah penduduk usia 7-12 Tahun di Kota Jambi ; APK SMP pada tahun 2022 sebesar 77,57 perhitungan realisasi ini diukur dengan rumus perbandingan



antara jumlah Murid SMP/Sederajat di Kota Jambi terhadap jumlah penduduk usia 13-15 Tahun di Kota Jambi; dan APM SMA pada tahun 2022 sebesar 117,01.

Tabel 20
Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Jambi Tahun 2022

Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
APM			
SD	99,36	100,00	99,68
SMP	81,86	73,78	77,57
SMA	78,55	63,22	71,52
APK			
SD	107,32	107,52	107,42
SMP	81,,86	73,78	77,57
SMA	111,94	122,99	117,01

Sumber: : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Jambi Tahun 2022

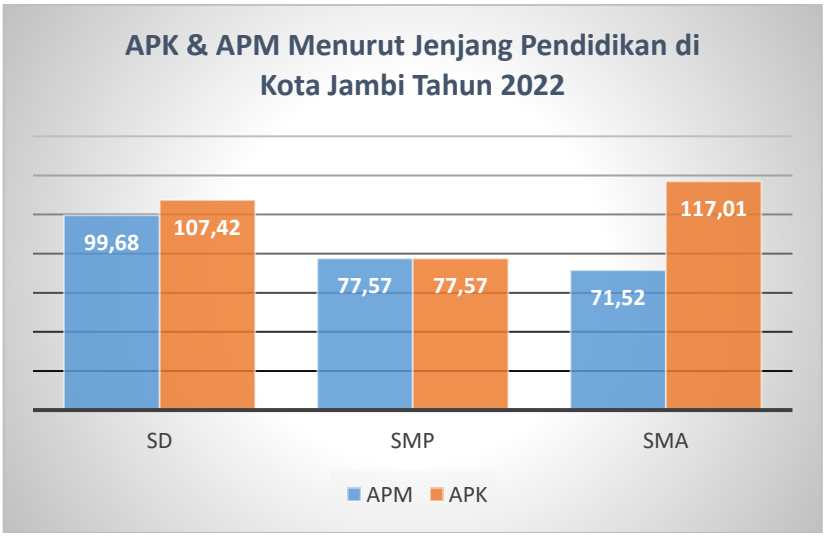

Gambar 10
Grafik Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Jambi Tahun 2022

h) Target 4.6.1 (a) (Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun)

Berdasarkan data Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Jambi Tahun 2022 persentase penduduk Kota Jambi usia 15 tahun ke atas mampu membaca dan menulis pada tahun 2022 sebesar 99,37%.



Tabel 21
Presentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Kemampuan Membaca dan Menulis Tahun 2022

Karakteristik	Huruf Latin	Huruf Lainnya*
Jenis Kelamin		
Laki-laki	99,52	44,81
Perempuan	99,22	47,15
Kelompok Pengeluaran		
40% Terbawah	99,56	46,77
40% Tengah	99,14	42,57
20% Teratas	99,48	51,30
Kota Jambi	**99,37**	**45,98**

Sumber: : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Jambi Tahun 2022

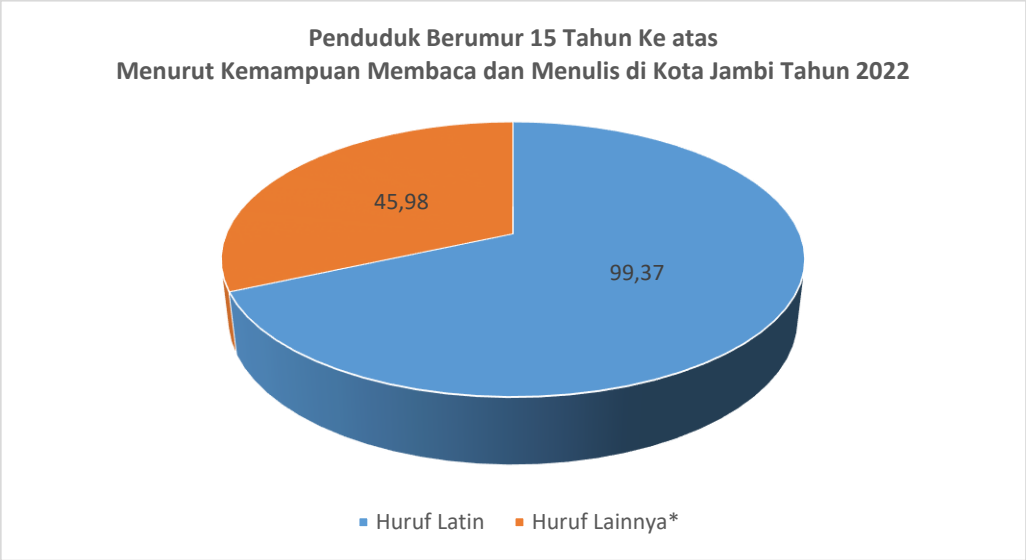

Gambar 11
Grafik Presentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis di Kota Jambi Tahun 2022





MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN

Tujuan Global kelima pembangunan berkelanjutan memiliki fokus mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Secara rinci bahasan capaian untuk tujuan 5 SDGs di Kota Jambi adalah sebagai berikut.

Tabel 22
Status Capaian Tujuan ke – 5 SDG's Kota Jambi

Target dan Indikator TPB		Base Line 2018	Base Line 2019	Base Line 2020	Base Line 2021	Target Nasional	Capaian Target			GAP	Status	Instansi
							Belum Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi			
Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadapkaum perempuan dimanapun.												
5.1.1*	Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.											Bukan Disagresi Kota
Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya												
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 1564 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.											Bukan Disagresi Kota
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 1564 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.											Bukan Disagresi Kota
Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.												
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.											Bukan Disagresi Kota
5.3.2	Persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM/C, menurut kelompok umur.											Bukan Disagresi Kota
Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional.												
5.4.1	Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi.											Bukan Disagresi Kota
Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.												
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah	N/A	(a) 25,7% (b) 0	(a)25,7%(b) 0	(a)16,9 8% (b) 17,78	N/A	(a)17,78 % (b) 25,00 %					Kesbangpol
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.											Bukan Disagresi Kota
Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensikonferensi tersebut.												
5.6.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan.											Bukan Disagresi Kota
5.6.2*	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan Pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.												
5.a.1*	(1) Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan.											Bukan Disagresi Kota
5.a.2*	Ketersediaan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol.											Bukan Disagresi Kota
Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan..												
5.b.1*	Proporsi individu yang memiliki telepon genggam.	77,39 %	79,91 %	74,95%	87,14 %	67,88%			82,57%			Diskominfo





Target dan Indikator TPB		Base Line 2018	Base Line 2019	Base Line 2020	Base Line 2021	Target Nasional	Capaian Target			GAP	Status	Instansi
							Belum Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi			
Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundangundangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan disemua tingkatan.												
5.c.1*	Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.											Bukan Disagresi Kota

● Tercapai ▶ Akan Tercapai/ membaik ▼ Perlu Perhatian Khusus - Data tidak tersedia

- **TPB Perlu Perhatian Khusus**

  Pada analisis capaian TPB Tujuan ke-5 Mencapai Kesetaraan Gender Dan Memberdayakan Kaum Perempuan, terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian khusus diantaranya adalah Indikator 5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah.

- **TPB Perlu Adanya Pendalaman**

  Sedangkan capaian indikator yang tidak memiliki data perlu adanya pendalaman, data tidak tersedia disebakan oleh beberapa hal seperti kegiatan tidak match dengan nomenklatur indikator TPB atau Indikator TPB tidak dengan kewenangan daerah. Sehingga indikator yang tidak memiliki data perlu perhatian khusus untuk mencapai trend capaian membaik. Capaian TPB yang tidak memiliki data terdapat pada indikator 5.6.2* Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan Pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.

a) Target 5.5.1 (Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah)

Setiap partai politik harus mengisi kuota perempuan minimal 30 persen, hal ini terangkum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 7/2013 pasal 27 ayat (1) huruf b menyangkut kuota 30 persen keterwakilan calon legislatif (caleg) perempuan di setiap daerah pemilihan (dapil). Ketentuan 30 persen caleg harus perempuan ini dimaksudkan untuk memberikan akses yang memadai bagi kaum perempuan agar dapat berpartisipasi dalam proses politik dan bernegara.





Berdasarkan Data Statistik Kota Jambi Tahun 2022, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi sebanyak 8 orang. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen daerah sebesar 17,78%.

Tabel 23
Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kota Jambi 2022

Partai Politik	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Partai Demokrat	3	2	5
PDI-Perjuangan	4	2	6
Partai Gerindra	7	-	7
Partai Amanat Nasional (PAN)	4	-	4
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	2	1	3
Partai Hati Nurani (HANURA)	2	-	2
Partai Golkar	4	-	4
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1	-	1
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	4	1	5
Partai Perindo	1	-	1
Partai Bulan Bintang (PBB)	-	1	1
Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	4	1	5
Partai Berkarya		-	1
Kota Jambi	**37**	**8**	**45**

Sumber : BPS Kota Jambi 2021

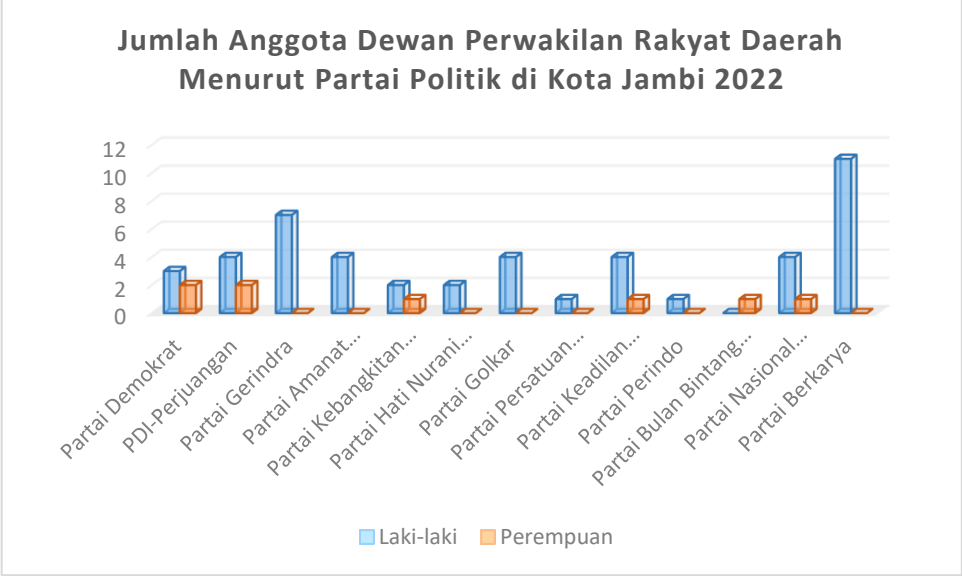

Gambar 12
Grafik Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik
di Kota Jambi Tahun 2022

Perempuan diposisi kepemimpinan seperti pemerintah di tingkat eksekutif, legislatif, peradilan dan penegak hukum, serta perusahaan milik publik atau swasta. Jabatan manajer menurut Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI) 2014 BPS meliputi: Pimpinan Eksekutif, Pejabat Tinggi Pemerintah dan Pejabat Pembuat



Peraturan Perundang-undangan, Manajer Administrasi dan Komersial ; Manajer Produksi dan Pelayanan Khusus ; dan Manajer Jasa Perhotelan, Perdagangan, dan Jasa Lainnya. Perempuan di posisi kepemimpinan pemerintah di Kota Jambi sebesar 25% (8 orang).

Tabel 24
Jumlah Pegawai Negri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kota Jambi Tahun 2022

Jabatan	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	24	8	32
Administrator	113	42	155
Pengawas	410	389	799
Jabatan Fungsional Dosen	332	1.576	1.908
Jabatan Fungsional Medis	98	934	1.032
Jabatan Fungsional Teknis	105	112	217
Jabatan Fungsional Umum/pelaksana	651	825	1.476
Jumlah	**1.733**	**3.886**	**5.619**

Sumber : BPS Kota Jambi Tahun 2022

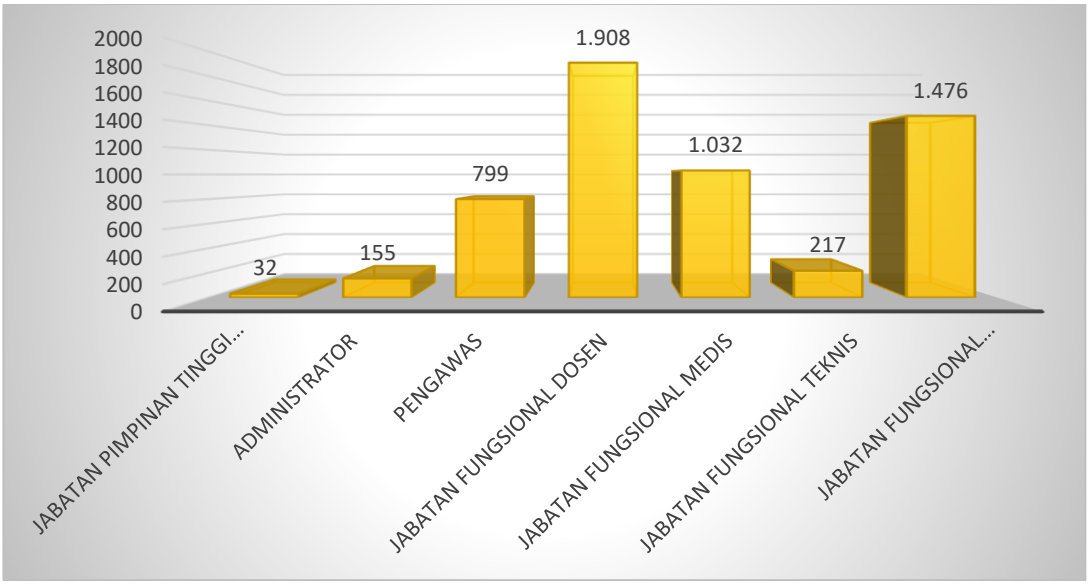

Gambar 13
Grafik Jumlah PNS Menurut Jabatan di Kota Jambi Tahun 2022

b) Target 5.6.2* (Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi)

Data tidak tersedia.



c) 5.b.1* (Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam)

Berdasarkan data Susenas Provinsi Jambi Tahun 2022, Persentase penduduk 5 tahun keatas yang memiliki/menguasai telepon selular/nirkabel di Kota Jambi sebesar 82,57%.

Tabel 25
Persentase Penduduk 5 Tahun Ke Atas yang Memiliki Telepon Selular (HP) dalam 3 bulan terakhir menurut Kabupaten/Kota, Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin di Provinsi Jambi Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
Kerinci	73,98	61,35	67,69
Maerangin	75,83	54,91	65,53
Sarolangun	74,62	59,36	67,15
Batang Hari	71,58	57,25	64,55
Muaro Jambi	74,74	61,39	68,34
Tanjab Timur	78,67	66,03	72,48
Tanjab Barat	75,33	57,30	66,61
Tebo	73,79	53,05	63,69
Bungo	74,95	59,59	67,38
Kota Jambi	84,51	80,60	82,57
Kota Sungai Penuh	80,82	68,85	74,82
Provinsi Jambi	**76,51**	**52,50**	**69,64**

Sumber : Statistik Kesejahteraan Provinsi Jambi Tahun 2022

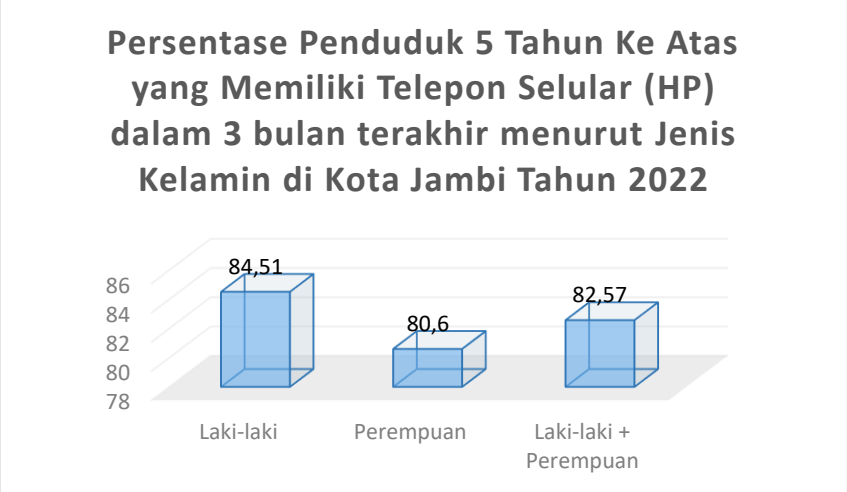

Gambar 14
Grafik Presentase Penduduk 5 Tahun Ke Atas yang Memiliki Telepon Selular (HP) dalam 3 bulan terakhir menurut Jenis Kelamin di Kota Jambi Tahun 2022



MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERBASIS UNTUK SEMUA

Tujuan global yang keenam dari pembangunan berkelanjutan memiliki fokus pada masalah ketersediaan air bersih dan sanitasi bagi seluruh penduduk. Pada tujuan keenam ini dijabarkan menjadi 3 sasaran global. Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 26
Status Capaian Tujuan ke – 6 SDG's Kota Jambi

Target TPB	Indikator TPB	Baseline				Targrt Nasional 2022	Capaian Target			GAP	Status	Instansi
		2018	2019	2020	2021		Belum Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi			
Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.												
6.1.1	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	65,42%	68,02%	70,78%	72,75%	91,05%		75,99%		15,06%	▶	Dinas PUPR
Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.												
6.2.1	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	13,5%	19,4%	25,3%	31,2%	N/A		37,1%			▶	Dinas PUPR
Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.												
6.3.1	Proporsi limbah cair rumah tangga dan industri cair yang diolah secara aman											Bukan disagregasi kota
6.3.1 (a)	Persentase limbah cair industri cair yang diolah secara aman	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					-	Dinas Lingkungan Hidup
6.3.2	Proporsi badan air dengan kualitas air ambien yang baik.											Bukan disagregasi kota
6.3.2 (a)	Kualitas air permukaan sebagai air baku											Bukan disagregasi kota
6.3.2 (b)	Kualitas air tanah sebagai air baku											Bukan disagregasi kota
Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.												
6.4.1	Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu											Bukan disagregasi kota
6.4.2	Tingkat water stress: proporsi pengambilan (withdrawal) air tawar terhadap ketersediannya											Bukan disagregasi kota
6.4.2 (a)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					-	Dinas PUPR Kota Jambi
6.4.2 (b)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaanya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					-	Dinas PUPR Kota Jambi
Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas sesuai kepantasan												
6.5.1*	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100)											Bukan disagregasi kota
6.5.2*	Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional											Bukan disagregasi kota
	Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau											
6.6.1*	Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari											Bukan disagregasi kota





Target TPB	Indikator TPB	Baseline				Targrt Nasional 2022	Capaian Target			GAP	Status	Instansi
		2018	2019	2020	2021		Belum Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi			
	waktu ke waktu.											
	Pada tahun 2030, memperluas kerjasama dan dukungan internasional dalam hal pembangunan kapasitas bagi negara-negara berkembang, dalam program dan kegiatan terkait air dan sanitasi, termasuk pemanenan air, desalinasi, efisiensi air, pengolahan air limbah, daur ulang dan teknologi daur ulang											
6.a.1	Jumlah ODA terkait air dan sanitasi yang menjadi bagian rencana belanja pemerintah											Bukan disagregasi kota
	Mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam meningkatkan pengelolaan air dan sanitasi											
6.b.1	Proporsi unit pemerintah lokal yang menerbitkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air dan sanitasi											Bukan disagregasi kota

Tercapai Akan Tercapai/ membaik Perlu Perhatian Khusus - Data tidak tersedia

- **TPB Perlu Adanya Pendalaman**

  Sedangkan indikator yang tidak memiliki data perlu adanya pendalaman, data yang tidak tersedia disebabkan oleh beberapa hal seperti ketiatan yang tidak cocok dengan nomenklatur indikator TPB atau indikator TPB bukan kewenangan dari daerah, sehingga indikator yang tidak memiliki data perlu adanya perhatian khusus untuk mencapai trend capaian membaik. Adapun indikator yang butuh adanya pendalaman diantaranya:

  - 6.3.1 (a) Persentase limbah cair industri cair yang diolah secara aman;
  - 6.4.2 (a) Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya; dan
  - 6.4.2 (b) Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaanya.

a) Target 6.1.1 (Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman)

Berdasarkan data PDAM, Persentase jumlah sabungan rumah air minum di Kota Jambi pada tahun 2022 sebesar 75,99%. Apabila dibandingkan dengan target nasional (91,05%), realisasi persentase rumah tangga yang menggunakan air minum yang dikelola secara aman masih terdapat gap sebesar 15,06%. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 27
Persentase Jumlah Sambungan Rumah
Kota Jambi Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Sambungan Rumah (Jiwa)	Persentase (%)
2018	78.259	65,42
2019	82.269	68,02
2020	85.809	70,78
2021	89.066	72,75
2022	94,156	75,99

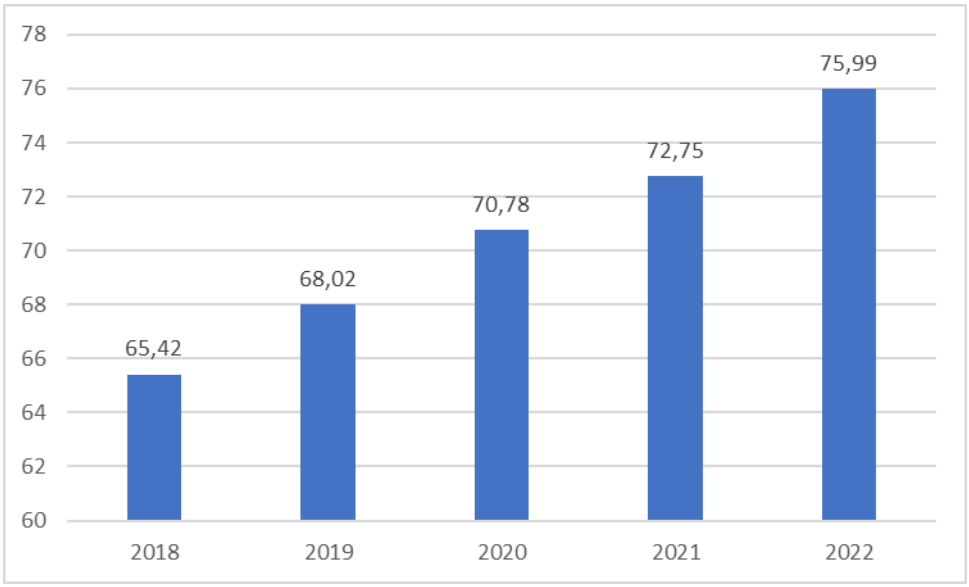

Gambar 15
Grafik Persentase Sambungan Rumah yang terlayani PDAM
di Kota Jambi Tahun 2022

b) Target 6.2.1 (Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun)

Berdasarkan data Strategi Santiasi Kota (SSK) Kota Jambi dapat diketahui bahwa Kota Jambi memiliki persentase sanitasi layak sebesar 37,1% pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh masyarakat di kota Jambi masih minim dalam sanitasi yang dikelola secara aman. Untuk itu masih dibutuhkan perhatian khusus Upaya meningkatkan sanitasi yang dikelola secara aman di Kota Jambi melalui program pemerintah.



Tabel 28
Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Menggunakan Sanitasi Secara Aman di Kota Jambi Tahun 2018-2022

Tahun	Persentase (%)
2018	13.5
2019	19,4
2020	25,3
2021	31,2
2022	37,1

c) Target 6.3.1 (a) (Persentase limbah cair industri cair yang diolah secara aman)

Data tidak tersedia

d) Target 6.4.2 (a) (Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya)

data tidak tersedia

e) Target 6.4.2 (b) (Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaanya)

Data tidak tersedia





MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN, DAN MODERN UNTUK SEMUA

Tujuan global pembangunan berkelanjutan yang ketujuh berfokus pada akses penduduk terhadap energi yang terjangkau dan berkelanjutan.

Tabel 29
Status Capaian Tujuan ke – 7 SDG's Kota Jambi

Target TPB	Indikator TPB	Baseline				Target Nasional 2022	Capaian Target			GAP	Status	Instansi
		2018	2019	2020	2021		Belum Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi			
Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.												
7.1.1*	Rasio elektrifikasi	99,80%	99,62%	99,69%	99,84%	100%		99,55%		0,45%	▼	ESDM
7.1.1 (a)	Konsumsi listrik per kapita.											Bukan disagregasi kota
7.1.2	Proporsi penduduk dengan sumber energi utama pada teknologi dan bahan bakar yang bersih.											Bukan disagregasi kota
7.1.2 (a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga.	602.850 Jiwa	641.058 Jiwa	618.151 Juwa	636.751 Jiwa	N/A		658.967 Jiwa			●	ESDM
7.1.2 (b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga	90,02%	94,68%	92,65%	94,56%	87,12%			96,77%		●	ESDM
Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global												
7.2.1*	Bauran energi terbarukan											Bukan disagregasi kota
Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat												
7.3.1*	Intensitas energi primer											Bukan disagregasi kota
Pada tahun 2030, memperkuat kerjasama internasional untuk memfasilitas akses pada teknologi dan riset energi bersih, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi, canggih, teknologi bahan bakar fosil lebih bersih, dan mempromosikan investasi di bidang infrastruktur energi dan teknologi energi bersih												
7.a.1	Bantuan keuangan internasional ke negara-negara berkembang untuk mendukung penelitian dan pengembangan energi bersih dan produksi energi terbarukan, termasuk sistem hibrida											Bukan disagregasi kota
Pada tahun 2030, memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk penyediaan layanan energi modern dan berkelanjutan bagi semua negaranegara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil dan negara berkembang												
7.b.1	Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik dari Energi Terbarukan dalam watt per kapita)											Bukan disagregasi kota

● Tercapai ▶ Akan Tercapai/ membaik ▼ Perlu Perhatian Khusus - Data tidak tersedia

➢ **TPB Perlu Perhatian Khusus**

Pada analisis capaian TPB terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian khusus diantaranya adalah indikator 7.1.1* Rasio Elektrifikasi.



a) Target 7.1.1 (Rasio elektrifikasi)*

Rasio elektrifikasi merupakan perbandingan antara jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga. Data Rasio Elektrifikasi digunakan untuk mengetahui jumlah rumah tangga yang sudah mendapatkan akses listrik. Berdasarkan data Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jambi pada tahun 2022 persentase Rumah Tangga berdasarkan sumber penerangan Listrik PLN pada daerah perkotaan dan perdesaan sebesar 99,55% dan sumber penerangan NonPLN sebesar 0,45%. Maka Rasio elektrifikasi di Kota Jambi sebesar 100%.

Tabel 30
Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota, Daerah Tempat Tinggal, dan Sumber Penerangan, Provinsi Jambi, 2022

Kabupaten/ Kota	Perkotaan + perdesaan			
	Listrik PLN	Listrik Non PLN	Bukan Listrik	Jumlah
Kerinci	95,22	1,69	3,10	100.00
Merangin	97,34	2,66	0,00	100.00
Sarolangun	97,69	1,37	0,94	100.00
Batang Hari	99,33	0,17	0,50	100.00
Muaro Jambi	98,56	1,34	0,09	100.00
Tanjab Timur	98,83	0,45	0,72	100.00
Tanjab Barat	97,50	1,72	0,78	100.00
Tebo	99,31	0,30	0,39	100.00
Bungo	98,90	0,52	0,58	100.00
Kota Jambi	**99,55**	**0,45**	**0,00**	**100.00**
Kota Sungai Penuh	100,00	0,00	0,00	100.00
Provinsi Jambi	98,39	1,04	0,57	100.00

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jambi 2022

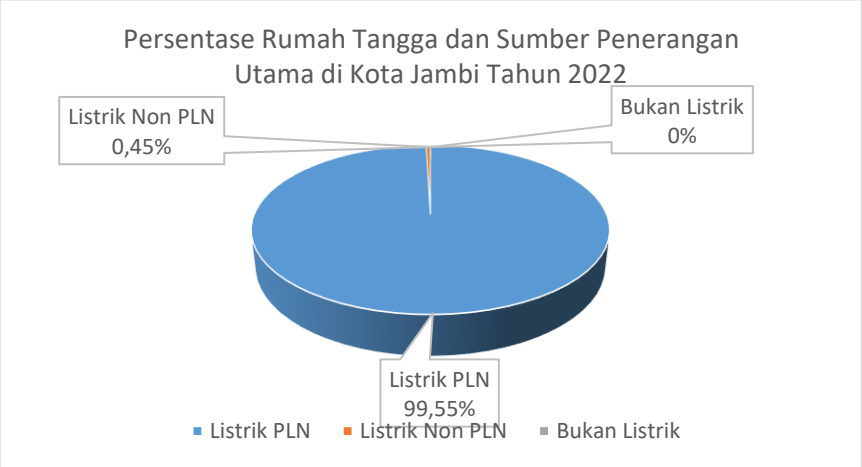

Gambar 16
Grafik Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Penerangan di Kota Jambi 2022



Berdasarkan data BPS Kota Jambi Tahun 2023, jumlah pelanggan pengguna listrik di Kota Jambi tahun 2022 mencapai 238.165, dengan jeniis pemakaian terbesar merupakan pemkaian untuk rumah tangga sebesar 210.823. Adapun jumlah listrik yang terjual adalah sebesar 776.799.185 (kWh). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 31
Jumlah Pelanggan, Daya, Pemakaian, dan Penjualan Tenaga Listrik di Kota Jambi Tahun 2022

Jenis Pelanggan	Jumlah Pelanggan	Jumlah VA/ Langganan	Nilai Penjualan Listrik
Sosial	2.872	28.076.350	40.295.878
Rumah Tangga	210.823	274.483.850	420.865.622
Industri	113	29.210.200	62.490.035
Bisnis	22.551	140.626.450	218.750.735
Perkantoran	841	16.622.800	22.794.389
Penerangan	945	4.122.500	10.988.457
Multiguna	20	132.000	613.069
Total	238.165	493.274.150	776.799.185

Sumber : BPS Kota Jambi Tahun 2020

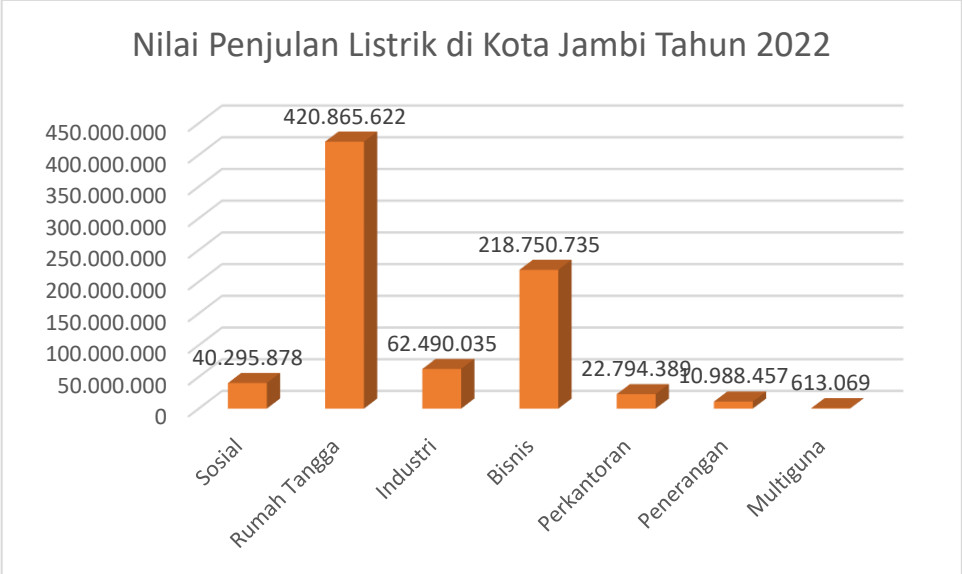

Gambar 17
Grafik Nilai Penjualan Listrik di Kota Jambi Tahun 2022

Indikator 7.1.2 (proporsi penduduk dengan sumber energi utama pada teknologi dan bahan bakar yang bersih) adalah global yang perlu dikembangkan. Indikator ini didekati dengan proksi indikator nasional, yaitu 7.1.2(a) (jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga) dan 7.1.2(b) (rasio penggunaan gas rumah tangga).



b) Target 7.1.2 (a) (Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga) dan Target 7.1.2 (b) (Rasio penggunaan gas rumah tangga)

Jumlah sambungan jaringan gas (jargas) untuk rumah tangga merupakan indikator dalam program prioritas nasional yaitu pembangunan jaringan distribusi gas untuk rumah tangga yang bertujuan untuk diversifikasi energi, pengurangan subsidi, dan penyediaan energi bersih. Pengguna jaringan gas untuk memasak di Kota Jambi adalah sebesar 599.541 jiwa, dengan persentase rumah tangga di Kota Jambi yang menggunakan Gas Kota/Biogas sebanyak 96,77%.

Tabel 32
Persentase Rumah Tangga di Daerah Perkotaan dan Perdesaan menurut Kabupaten/Kota dan Bahan Bakar/Energi Utama yang Digunakan untuk Memasak, Provinsi Jambi, 2022

Kabupaten/ Kota	Listrik	Elpiji/Gas Kota/ Biogas	Minyak Tanah/Briket/ Arang/ Kayu Bakar/Lainnya	Tidak Memasak	Jumlah
Kerinci	0,72	77,53	21,69	0,06	100,00
Merangin	0,00	78,92	20,94	0,14	100,00
Sarolangun	0,00	90,11	9,89	0,00	100,00
Batang Hari	0,21	98,06	1,73	0,00	100,00
Muaro Jambi	2,10	95,59	2,12	0,20	100,00
Tanjung Jabung Timur	0,45	98,20	1,35	0,00	100,00
Tanjung Jabung Barat	0,45	96,52	3,03	0,00	100,00
Tebo	0,00	93,40	6,60	0,00	100,00
Bungo	0,65	888,60	10,75	0,00	100,00
Kota Jambi	**0,73**	**96,77**	**1,98**	**0,52**	**100,00**
Kota Sungai Penuh	0,52	70,15	28,95	0,39	100,00
Provinsi Jambi	**0,60**	**91,05**	**8,21**	**0,13**	100,00

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jambi 2022

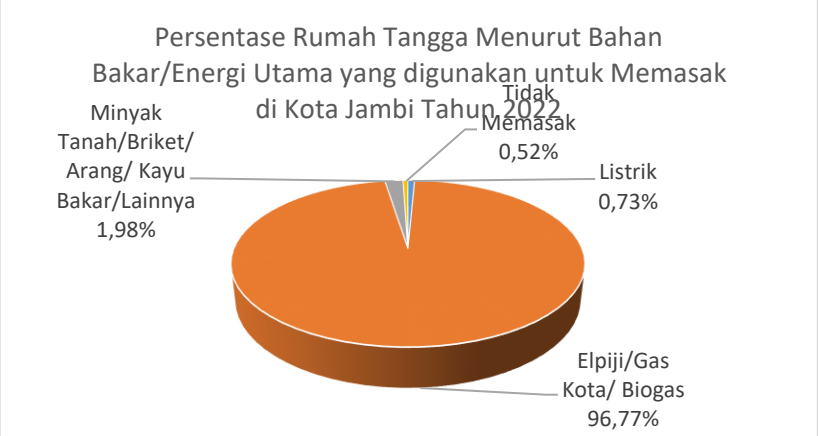

Gambar 18
Grafik Presentase Rumah Tangga Menurut Bahan Bakar/Energi Utama yang Digunakan untuk Memasak di Kota Jambi Tahun 2022





MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA

Tujuan pembangunan berkelanjutan yang kedelapan memiliki fokus pada isu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi bagi seluruh penduduk. Deskripsi sasaran dan indikator yang terukur dalam menjelaskan capaian SDGs tujuan 8 Kota Jambi adalah sebagai berikut.

Tabel 33
Status Capaian Tujuan ke – 8 SDG's Kota Jambi

Target TPB	Indikator TPB	Baseline				Target Nasional 2022	Capaian Target			GAP	Status	Instansi
		2018	2019	2020	2021		Belum Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi			
Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.												
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB perkapita	31,21%	32,86%	30,96%	31,83%	N/A	33,14%				●	Bappeda
8.1.1 (a)	PDB per kapita	Rp 34,80 Juta	Rp 35,60 Juta	Rp 36,95 Juta	Rp 40,40 Juta	Rp 71,03	RP 41,41 Juta			Rp.29,62 Jt	▶	Bappeda
Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.												
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	2,35%	1,93%	2,39%	4,96%	N/A	0,26%				▼	Bappeda
Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan												
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin											Bukan disagregasi kota
8.3.1 (a)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan											Bukan disagregasi kota
Meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan the 10-Year Framework of Programs on Sustainable Consumption and Production, dengan negara-negara maju sebagai pengarah												
8.4.1	Jejak material (material footprint) yang dihitung selama tahun berjalan.											Bukan disagregasi kota
8.4.1 (a)	Rencana dan implementasi Strategi pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan											Bukan disagregasi kota
8.4.2	Konsumsi material domestik (domestic material consumption).											Bukan disagregasi kota
Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya												
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja											Bukan disagregasi kota
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur											Bukan disagregasi kota
8.5.2 (a)	Persentase setengah pengangguran											Bukan disagregasi kota
Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan												
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)											Bukan disagregasi kota
Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya												
8.7.1	Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk											Bukan disagregasi kota





Target TPB	Indikator TPB	Baseline				Target Nasional 2022	Capaian Target			GAP	Status	Instansi
		2018	2019	2020	2021		Belum Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi			
	pekerjaan terburuk untuk anak)											
8.7.1 (a)	Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur											Bukan disagregasi kota
Melindungi hakhak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya												
8.8.1	Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status migran											Bukan disagregasi kota
8.8.1 (a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3											Bukan disagregasi kota
8.8.2	Peningkatan kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundang undangan negara terkait											Bukan disagregasi kota
Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal												
8.9.1*	Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi Pariwisata terhadap PDB											Bukan disagregasi kota
8.9.1 (a)	Jumlah wisatawan mancanegara											Bukan disagregasi kota
8.9.1 (b)	Jumlah kunjungan wisatawa nusantara.											Bukan disagregasi kota
8.9.1 (c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.											Bukan disagregasi kota
Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua												
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa											Bukan disagregasi kota
8.10.1 (a)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit											Bukan disagregasi kota
Meningkatkan bantuan untuk mendukung perdagangan bagi negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, termasuk melalui the Enhanced Integrated Framework for Trade-Related Technical Assistance bagi negara kurang berkembang												
8.a.1	Bantuan untuk komitmen Perdagangan dan pencairan pendanaan											Bukan disagregasi kota
Pada tahun 2020, mengembangkan dan mengoperasionalkan strategi global untuk ketenagakerjaan pemuda dan menerapkan the Global Jobs Pact of the International Labour Organization												
8.b.1	Adanya strategi nasional terkait ketenagakerjaan pemuda yang sudah dikembangkan dan operasional sebagai strategi khusus atau sebagai bagian dari strategi ketenagakerjaan nasional											Bukan disagregasi kota

● Tercapai ▶ Akan Tercapai/ membaik ▼ Perlu Perhatian Khusus - Data tidak tersedia





➢ **TPB Perlu Perhatian Khusus**

Pada analisis capaian TPB terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian khusus diantaranya adalah indikator 8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.

a) Target 8.1.1 (Laju pertumbuhan PDB perkapita) dan 8.1.1 (a) (PDRB Per Kapita)*

Tingkat kemakmuran suatu daerah juga dapat dihitung dengan menggunakan angka PDRB Perkapita yaitu dengan cara nilai total PDRB dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun. Dengan cara ini dapat diketahui pendapatan perkapita penduduk Kota Jambi pada tahun tertentu baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Walaupun secara teoritis angka yang diperoleh merupakan indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan suatu daerah, namun dari angka ini belum dapat melihat tingkat pemerataan pendapatan penduduk daerah tersebut.

PDRB perkapita Kota Jambi baik ADHB maupun ADHK mengalami pertumbuhan naik turun diperiode 2018-2022. Dimana pada tahun 2018-2019 PDRB Perkapita ADHB maupun ADHK mengalami peningkatan sebesar 6,4% dan 4,7%, namun pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan sebesar -3,83% dan -4,24%. Pada tahun 2020-2022 PDRB Perkapita ADHB maupun ADHK terus mengalami peningkatan. Yang perlu menjadi perhatian adalah PDRB perkapita sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan PDRB dan besaran jumlah penduduk. Adapun data PDRB Perkapita ADHB dan ADHK tahun 2021 dan 2022 merupakan data sementara dari BPS. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 34
PDRB Perkapita di Kota Jambi Tahun 2016 – 2020 (Juta Rupiah)

Tahun	PDRB Per Kapita ADHB (juta rupiah)	PDRB Per Kapita ADHK (juta rupiah)	Pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHK (%)
2018	48,15	34,80	31,21
2019	51,50	35,60	32,86
2020	48,73	36,95	30,96
2021*	52,10	40,40	31,83
2022**	58,34	41,41	33,14

Sumber: BPS Kota Jambi Tahun 2020
* *Angka Sementara*
** *Angka Sangat Sementara*



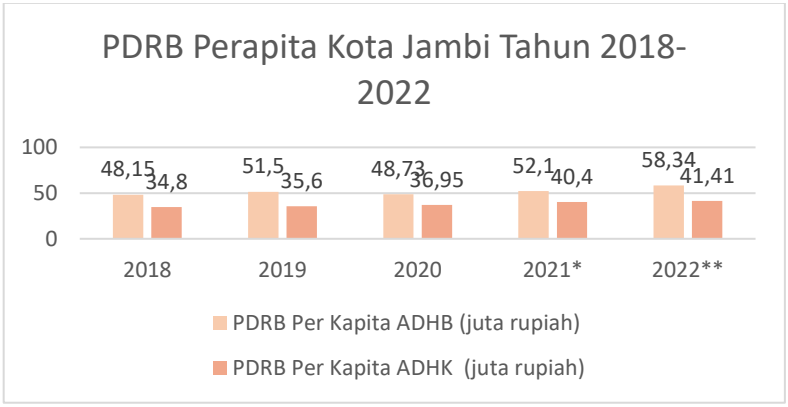

Gambar 19
Grafik PDRB Perkapita Kota Jambi Tahun 2016-2020

b) Target 8.2.1* (Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun)

Berdasarkan data BPS Kota Jambi pada Tahun 2023 jumlah penduduk yang bekerja dengan usia 15 tahun keatas sebanyak 276.359 jiwa, sedangkan jumlah penduduk yang tidak bekerja dengan usia 15 tahun keatas adalah 27.158 jiwa. Untuk mengetahui laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja per tahun dapat diketahui dengan rumus berikut:

$$LP\ PDBptk = \left(\frac{PDBptk\ t - PDBptk\ t-1}{pdbptk\ t-1}\right) x\ 100\%$$

Dengan:

$$PDBptk = \frac{PDB}{PB}$$

Keterangan:

LP PDBptk	: laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (%)
$PDBptk_t$	: PDB per tenaga kerja pada periode t (ribu rupiah)
$PDBptk_{t-1}$	: PDB per tenaga kerja pada periode t-1 (ribu rupiah)
PDB	: Produk Domestik Bruto dengan harga konstan (ribu rupiah)
PB	: jumlah penduduk yang bekerja (orang)

$$LP\ PDBptk = \left(\frac{74{,}29 - 74{,}09}{74{,}09}\right) x\ 100\%$$

$$LP\ PDBptk = 0{,}26\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja di Kota Jambi tahun 2022 sebesar 0,26%. Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja ini dilakukan untuk memantau tingkat produktivitas tenaga kerja dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi.





MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF YANG BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI

Tujuan global yang kesembilan pembangunan berkelanjutan berfokus pada isu industri, inovasi dan infrastruktur. Deskripsi sasaran dan indikator yang terukur dalam menjelaskan capaian SDGs tujuan 9 Kota Jambi adalah sebagai berikut.

Tabel 35
Status Capaian Tujuan ke – 9 SDG's Kota Jambi

Target TPB	Indikator TPB	Baseline				Target Nasional 2022	Capaian Target			GAP	Status	Instansi
		2018	2019	2020	2021		Belum Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi			
Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.												
9.1.1*	Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak.											Bukan disagregasi kota
9.1.1. (a)	Kondisi mantap jalan nasional.	N/A	87,06%	87,54%	88,73%	92,22%		88,30%		3,92%	▼	Dinas PUPR Kota Jambi
9.1.1 (b)	Panjang pembangunan jalan tol.											Bukan disagregasi kota
9.1.1 (c)	Panjang jalur kereta api.											Bukan disagregasi kota
9.1.2*	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					-	Dinas Perhubungan Kota Jambi
9.1.2 (a)	Jumlah bandara.											Bukan disagregasi kota
9.1.2 (b)	Jumlah pelabuhan penyeberangan											Bukan disagregasi kota
9.1.2 (c)	Jumlah pelabuhan strategis											Bukan disagregasi kota
Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.												
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita											Bukan disagregasi kota
9.2.1 (a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	3,08%	2,74%	-1,14%	1,76%	4,89%	3,55%			1,34%	▶	Dinas Perindustrian dan perdagangan
9.2.2 *	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur											Bukan disagregasi kota
Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar												
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.											Bukan disagregasi kota
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.											Bukan disagregasi kota
Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masingmasing.												
9.4.1*	Rasio emisi CO2/ emisi gas rumah kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur											Bukan disagregasi kota





Target TPB	Indikator TPB	Baseline				Target Nasional 2022	Capaian Target			GAP	Status	Instansi
		2018	2019	2020	2021		Belum Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi			
9.4.1 (a)	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri.											Bukan disagregasi kota
9.4.1 (b)	Intensitas emisi sektor industri.											Bukan disagregasi kota
Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.												
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.											Bukan disagregasi kota
9.5.2*	Jumlah sumber daya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (peneliti, perekayasa, dan dosen) pada instansi pemerintah dan perguruan tinggi per satu juta penduduk.											Bukan disagregasi kota
9.5.2 (a)	Proporsi sumberdaya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan gelar Doktor (S3)											Bukan disagregasi kota
Memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan tangguh di negara berkembang, melalui peningkatan keuangan, teknologi dan dukungan teknis bagi negara-negara Afrika, negara-negara kurang berkembang, negaranegara berkembang terkurung daratan dan negara-negara pulau kecil												
9.a.1	Total dukungan resmi internasional (bantuan resmi pembangunan ditambah aliran bantuan resmi biaya) untuk infrastruktur.											Bukan disagregasi kota
Mendukung pengembangan teknologi domestik, riset dan inovasi di negaranegara berkembang, termasuk dengan memastikan lingkungan kebijakan yang kondusif, antara lain untuk diversifikasi industri dan peningkatan nilai tambah komoditas												
9.b.1	Proporsi nilai tambah teknologi menengah dan tinggi terhadap total nilai tambah.											Bukan disagregasi kota
9.b.1 (a)	Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi											Bukan disagregasi kota
Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negaranegara kurang berkembang pada tahun 2020.												
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband											Bukan disagregasi kota

● Tercapai ▶ Akan Tercapai/ membaik ▼ Perlu Perhatian Khusus - Data tidak tersedia

- **TPB Perlu Perhatian Khusus**

  Pada analisis capaian TPB terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian khusus diantaranya adalah indikator 9.1.1 (a) kondisi mantap jalan.

- **TPB Perlu Adanya Pendalaman**

  Sedangkan indikator yang tidak memiliki data perlu adanya pendalaman, data yang tidak tersedia disebabkan oleh beberapa hal seperti ketiatan yang tidak cocok dengan nomenklatur indikator TPB atau indikator TPB bukan kewenangan dari daerah, sehingga indikator yang tidak memiliki data perlu





adanya perhatian khusus untuk mencapai trend capaian membaik. Adapun indikator yang butuh adanya pendalaman diantaranya yaitu indikator 9.1.2* Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi;

a) Target 9.1.1 (a) (Kondisi mantap jalan nasional)

Berdasarkan data LKPJ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi tahun 2022, target rasio jalan status kota dalam kondisi mantap sebesar 90,37% atau sepanjang 461,270 km dari total panjang jalan Kota Jambi. Adapun realisasi tahun 2022 rasio jalan status kota dalam kondisi mantap terealisasikan sebesar 88,30% atau sepanjang 450,708 km. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi mantap jalan di Kota Jambi than 2022 hampir memenuhi targetnya. Adapun perhitungannya dapat dilihat sebagai berikut.

$$kondsi\ mantap\ jalan = \frac{panjang\ jalan\ kota\ sampai\ tahun\ N\ (km) + jalan\ yang\ dikerjalan\ tahun\ N\ (km)}{panjang\ jalan\ kota\ (km)}\ x\ 100\%$$

$$kondsi\ mantap\ jalan = \frac{435.630\ km + 15.078\ km}{510.452\ km}\ x\ 100\%$$

$$kondsi\ mantap\ jalan = 88{,}30\%$$

b) Target 9.2.1 (a) (Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur)

Berdasarkan data BPS Kota Jambi Tahun 2022, laju pertumbuhan PDB industry manufaktur mengalami penurunan dan peningkatan, dimana pada tahun 2018-2020 mengalami penurunan dari 3,08% menjadi -1,14% dan pada tahun 2020-2022 mengalami peningkatan sebesar 3,55% pada tahun 2022. Namun data yang digunakan pada tahun 2021 dan 2022 merupakan data sementara. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.

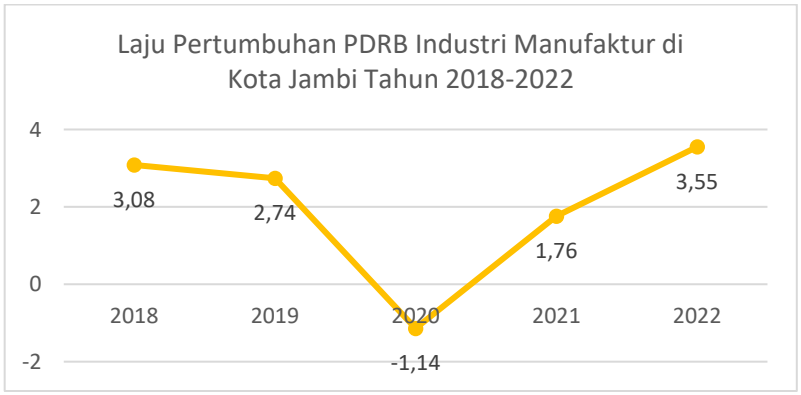

Gambar 20
Grafik Laju Pertumbuhan PDRB Industri Manufaktur di Kota Jambi Tahun 2016-2020





MENGURANGI INTRA DAN ANTAR NEGARA

Tujuan kesepuluh pembangunan berkelanjutan memiliki fokus untuk mengurangi ketimpangan dalam negeri dan antar negara.

Tabel 36
Status Capaian Tujuan ke – 10 SDG's Kota Jambi

Target TPB	Indikator TPB	Baseline				Target Nasional 2022	Capaian Target			GAP	Status	Instansi
		2018	2019	2020	2021		Belum Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi			
Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.												
10.1.1*	Rasio Gini.											Bukan disagregasi kota
10.1.1 (a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	8,49%	8,12%	8,27%	9,02%	9,57%	8,33%			1,24%	●	Bappeda
10.1.1 (b)	Jumlah desa tertinggal.											Bukan disagregasi kota
10.1.1 (c)	Jumlah Desa Mandiri.											Bukan disagregasi kota
10.1.1 (d)	Jumlah daerah tertinggal.											Bukan disagregasi kota
10.1.1 (e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.											Bukan disagregasi kota
10.1.1 (f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					-	Bappeda
Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.												
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	N/A	N/A	N/A	N/A	10,16					-	Bappeda
Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.												
10.3.1	Proporsi penduduk yang melaporkan merasa didiskriminasikan atau dilecehkan dalam kurun 12 bulan terakhir atas dasar larangan diskriminasi sesuai hukum internasional Hak Asasi Manusia											Bukan disagregasi kota
10.3.1 (a)	Indeks Kebebasan											Bukan disagregasi kota
10.3.1. (b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					-	Polres Kota Jambi
10.3.1. (c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	N/A	36	77	(123 kasus) 100%	N/A			(111 kasus) 100%		●	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota jambi
10.3.1. (d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM internasional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					-	Sekretariat Hukum
Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.												
10.4.1	Proporsi upah dan subsidi perlindungan sosial dari pemberi kerja terhadap PDB											Bukan disagregasi kota
10.4.1 (a)	Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat											Bukan disagregasi kota





Target TPB	Indikator TPB	Baseline				Target Nasional 2022	Capaian Target			GAP	Status	Instansi
		2018	2019	2020	2021		Belum Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi			
10.4.1. (b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	N/A	N/A	11,63%	14,71%	35,49%	10,92%			24,57%	▼	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Jambi), Dinas Sosial
10.4.2	Dampak redistributif dari kebijakan fiskal.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					-	BPKAD
Memperbaiki regulasi dan pengawasan pasar dan 51embaga keuangan global, dan memperkuat pelaksanaan regulasinya												
10.5.1	Financial Soundness Indicator.											Bukan disagregasi kota
10.5.1 (a)	Indikator Kesehatan Perbankan.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					-	Bank Indonesia
Memastikan peningkatan representasi dan suara bagi negara berkembang dalam pengambilan keputusan di lembagalembaga ekonomi dan keuangan internasional global, untuk membentuk kelembagaan yang lebih efektif, kredibel, akuntabel dan terlegitimasi.												
10.6.1	Proporsi anggota dan hak suara negaranegara berkembang di organisasi internasional											Bukan disagregasi kota
Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik.												
10.7.1	Proporsi biaya rekrutmen yang ditanggung pekerja terhadap pendapatan tahunan di negara tujuan											Bukan disagregasi kota
10.7.2	Jumlah negara yang mengimplementasikan kebijakan migran yang baik.											Bukan disagregasi kota
10.7.2. (a)	Jumlah dokumen Kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					-	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Jambi
10.7.2 (b)	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					-	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Jambi
10.7.3	Jumlah orang yang meninggal atau hilang dalam proses migrasi menuju tujuan internasional											Bukan disagregasi kota
10.7.4	Proporsi penduduk yang mengungsi menurut negara asal											Bukan disagregasi kota
Menerapkan prinsip perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang, khususnya negara yang kurang berkembang, sesuai dengan kesepakatan World Trade Organization												
10.a.1	Besaran nilai tarif yang diberlakukan untuk mengimpor dari negara kurang berkembang/ berkembang dengan tarif nol persen.											Bukan disagregasi kota
Mendorong bantuan pembangunan dan arus keuangan yang resmi, termasuk investasi asing secara langsung, ke negara-negara yang paling membutuhkan, terutama negara kurang berkembang, negara-negara Afrika, negara berkembang pulau kecil dan negara terkurung daratan, sesuai dengan rencana dan program nasional mereka.												
10.b.1	Total aliran sumberdaya yang masuk untuk pembangunan, terpilah berdasarkan negara-negara penerima dan donor serta jenis aliran (misalnya, bantuan Pembangunan resmi, investasi asing langsung, serta aliran yang lain)											Bukan disagregasi kota
Memperbesar pemanfaatan jasa keuangan bagi pekerja												
10.c.1	Proporsi biaya remitansi dari jumlah yang dikirimkan.											Bukan disagregasi kota

● Tercapai ▶ Akan Tercapai/ membaik ▼ Perlu Perhatian Khusus - Data tidak tersedia





- **TPB Perlu Perhatian Khusus**

  Pada analisis capaian TPB terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian khusus diantaranya adalah indikator 10.4.1 (b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.

- **TPB Perlu Adanya Pendalaman**

  Sedangkan indikator yang tidak memiliki data perlu adanya pendalaman, data yang tidak tersedia disebabkan oleh beberapa hal seperti ketiatan yang tidak cocok dengan nomenklatur indikator TPB atau indikator TPB bukan kewenangan dari daerah, sehingga indikator yang tidak memiliki data perlu adanya perhatian khusus untuk mencapai trend capaian membaik. Adapun indikator yang butuh adanya pendalaman diantaranya:

  - 10.2.1* Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas;
  - 10.3.1 (b) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM);
  - 10.3.1 (d) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM internasional;
  - 10.4.2 Dampak redistributive dari kebijakan fiskal;
  - 10.5.1 (a) Indikator Kesehatan Perbankan;
  - 10.7.2 (a) Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan; dan
  - 10.7.2 (b) Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi.

a) Target 10.1.1 (a) (Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur)

Penduduk miskin Kota Jambi dalam kurun tahun 2018 sampai dengan 2022 menunjukan tren naik turun dengan jumlah penduduk miskin 50,61 ribu orang pada tahun 2018 kemudian menurun menjadi 50,40 ribu orang pada tahun 2022. Angka Kemiskinan Kota Jambi Tahun 2022 sebesar 8,33 persen, turun dari angka





Tahun 2021 yang sebesar 9,02 persen. Angka Kemiskian ini berada di bawah angka kemiskinan Indonesia Tahun 2022 yang tercatat sebesar 9,54 persen. Pada Tahun 2018 sampai dengan 2022 garis kemiskinan di Kota Jambi meningkat dari 466.854 rupiah/kapita/bulan menjadi 605.556 rupiah/kapita/bulan.

Tabel 37
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Jambi Tahun 2018-2022

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2018	466.854	50,61	8,49
2019	488.034	48,95	8,12
2020	529.090	50,44	8,27
2021	563.403	5423	9,02
2022	605.556	50,40	8,33

Sumber: BPS Kota Jambi Tahun 2023



Gambar 21
Grafik Perkembangan Presentase Penduduk Miskin
Di Kota Jambi, Tahun 2018 – 2022
Sumber : BPS Kota Jambi, 2023

b) Target 10.1.1 (f) (Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal)

Data tidak tersedia.

c) Target 10.2.1* (Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas)

Data tidak tersedia.

d) Target 10.3.1 (b) (Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM))

Data tidak tersedia.





e) Target 10.3.1 (c) (Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan)

Berdasarkan data LKPJ Kota Jambi tahun 2022, kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan tahun 2022 mengalami apabila di bandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan laporan pengaduan yang masuk di Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA), pada tahun 2022 kasus kekerasan pada anak 65 kasus dan kekerasan terhadap perempuan sebanyak 46 kasus dengan total 111 kasus dan semua kasus sudah dilakukan penanganan.

f) Target 10.3.1 (d) (Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM internasional)

Data tidak tersedia.

g) Target 10.4.1 (b) (Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan)

Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi sosial yang bersifat wajib berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak kepada setiap orang yang telah membayar iuran apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan kerja, memasuki usia lanjut/pensiun, atau meninggal dunia. Berdasarkan data BPS Kota Jambi Tahun 2022, jumlah rumah tangga yang memiliki jaminan sosial bidang ketenagakerjaan pada penduduk Kota Jambi sebesar 10,92%.

Tabel 38
RSE Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Jaminan Sosial Tahun 2022

Jenis Jaminan Sosial	Persentase Rumah Tangga
Jaminan Pensiun/hari tua*	11,52
Asuransi/PHK**	10,92

**jaminan pension/hari tua terdiri dari: jaminan pensiun dan jaminan hari tua*
***asuransi/PHK terdiri dari: asuransi kematian, jaminan kecelakaan kerja dan pesangon PHK*





Gambar 22
Grafik RSE Persentase Rumah Tangga Menurut Jaminan Sosial
Di Kota Jambi, Tahun 2018 – 2022
Sumber : BPS Kota Jambi, 2023

h) Target 10.5.1 (a) (Indikator Perbankan)

Data tidak tersedia.

i) Target 10.7.2 (a) (Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan)

Data tidak tersedia.

j) Targer 10.7.2 (b) (Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi)

Data tidak tersedia.



KOTA DAN PERMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN

Tujuan kesebelas pembangunan berkelanjutan memiliki fokus terhadap masalah kota dan permukiman berkelanjutan. Sebagaimana pada pembahasan – pembahasan sebelumnya beberapa sasaran tidak dapat terukur di Kota Jambi karena ketersediaan data yang masih terbatas.

Tabel 39
Status Capaian Tujuan ke – 11 SDG's Kota Jambi

Target TPB	Indikator TPB	Baseline				Target Nasional 2022	Target Sasaran			GAP	Status	Instansi
		2018	2019	2020	2021		Belum Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi			
Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh												
11.1.1	Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak											Bukan disagregasi kota
11.1.1 (a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau											Bukan disagregasi kota
Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua												
11.2.1	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang disabilitas											Bukan disagregasi kota
11.2.1 (a)	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik											Bukan disagregasi kota
11.2.1 (b)	Persentase penduduk terlayani transportasi umum											Bukan disagregasi kota
Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.												
11.3.1	Rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan laju pertumbuhan penduduk											Bukan disagregasi kota
11.3.1 (a)	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16,34				-	Dinas PUPR Kota Jambi
11.3.2	Proporsi kota dengan struktur partisipasi langsung masyarakat sipil dalam perencanaan dan manajemen kota yang berlangsung secara teratur dan demokratis											Bukan disagregasi kota
Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.												
11.4.1	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (dengan Purchase											Bukan disagregasi kota





Target TPB	Indikator TPB	Baseline				Target Nasional 2022	Target Sasaran			GAP	Status	Instansi
		2018	2019	2020	2021		Belum Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi			
	Power Parity, PPP)											
11.4.1 (a)	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					-	Badan Keuagan Daerah
Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relative terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan 57ocus melindungi orang miskin dan orangorang dalam situasi rentan												
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					-	Dinas Sosial
11.5.2	Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, termasuk kerusakan bencana terhadap infrastruktur yang kritis dan gangguan terhadap pelayanan dasar											Bukan disagregasi kota
11.5.2 (a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					-	Dinas Sosial
Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.												
11.6.1	Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotan yang dihasilkan oleh suatu kota											Bukan disagregasi kota
11.6.1 (a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					-	Dinas PUPR/Dinas Lingkungan Hidup Kota jambi
11.6.1 (b)	Persentase sampah nasional yang terkelola	N/A	N/A	78,71%	75,27%	76,81%		74,97%		1,84%	▼	Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
11.6.2	Rata-rata tahunan materi partikular halus (PM 2,5 dan PM 10) di Perkotaan (dibobotkan jumlah penduduk)											Bukan disagregasi kota
11.6.2. (a)	Rata-rata tahunan materi partikular halus PM 10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					-	Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
11.6.2. (b)	Indeks Kualitas Udara	88,68	76,84	80,72	85,02	88,06			88,09		●	Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.												
11.7.1	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas.											Bukan disagregasi kota
11.7.1 (a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua	N/A	N/A	43,88%	N/A	N/A	26,87%				▼	Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
11.7.2	Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir)											Bukan disagregasi kota
11.7.2 (a)	Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir											Bukan disagregasi kota





Target TPB	Indikator TPB	Baseline				Target Nasional 2022	Target Sasaran			GAP	Status	Instansi
		2018	2019	2020	2021		Belum Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi			
Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015- 2030.												
11.a.1	Jumlah negara yang memiliki kebijakan perkotaan nasional atau rencana pembangunan daerah yang (a) merespon dinamika penduduk; (b) memastikan keseimbangan perencanaan wilayah; dan (c) meningkatkan ruang fiskal daerah.											Bukan disagregasi kota
11.a.1 (a)	Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah dilengkapi KLHS											Bukan disagregasi kota
11.b.1*	Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030											Bukan disagregasi kota
11.b.2*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Memberikan dukungan kepada negara-negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan 58angguh, dengan memfaatkan bahan lokal.												
11.c.1. (a)	Persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan, dan menggunakan Material Lokal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman

● Tercapai ▶ Akan Tercapai/ membaik ▼ Perlu Perhatian Khusus - Data tidak tersedia

- **TPB Perlu Perhatian Khusus**

  Pada analisis capaian TPB terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian khusus diantaranya adalah indikator 11.6.1 (b) Persentase sampah nasional yang terkelola dan 11.7.1 (a) Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua.

- **TPB Perlu Adanya Pendalaman**

  Sedangkan indikator yang tidak memiliki data perlu adanya pendalaman, data yang tidak tersedia disebabkan oleh beberapa hal seperti ketiatan yang tidak cocok dengan nomenklatur indikator TPB atau indikator TPB bukan kewenangan dari daerah, sehingga indikator yang tidak memiliki data perlu adanya perhatian khusus untuk mencapai trend capaian membaik. Adapun indikator yang butuh adanya pendalaman diantaranya:





- 11.3.1 (a) Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk;
- 11.4.1 (a) Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP);
- 11.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang;
- 11.5.2 (a) Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB;
- 11.6.1 (a) Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya;
- 11.6.2 (a) Rata-rata tahunan materi partikular halus PM 10;
- 11.b.2* Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana; dan
- 11.c.1 (a) Persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan, dan menggunakan Material Lokal.

a) Target 11.3.1 (a) (Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk)

Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk adalah perbandingan laju perluasan lahan terbangun (tidak bervegetasi, memiliki tutupan permanen atau semi permanen yang kedap air) dengan laju pertumbuhan penduduk pada kurun waktu yang sama. Untuk menghitung rasio laju perluasan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk menggunakan data RTRW Kota Jambi tahun 2020 dan tahun 2022. Dengan laju perluasan lahan terbangun sebesar 33,74 dan laju pertumbuhan penduduk sebesae 2,06 Adapun rumus yang digunakan berdasarkan metadata diantaranya:

$$RLTPP = \frac{LPLT}{LPP}$$

$$RTP = \frac{33{,}74}{2{,}06}$$





$RTP = 16{,}34$

Keterangan:

RLTPP = Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk
LPLT = Laju perluasan lahan terbangun pada kurun waktu xxxx-yyyy
LPP = Laju pertumbuhan penduduk pada kurun waktu xxxx-yyyy

b) Target 11.4.1 (a) (Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP))

Data tidak tersedia.

c) Target 11.5.1* (Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.)

Data tidak tersedia.

d) Target 11.5.2 (a) (Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB)

Data tidak tersedia.

e) Target 11.6.1 (a) (Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya)

Data tidak tersedia.

f) Target 11.6.1 (b) (Persentase sampah nasional yang terkelola)

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2023, persentase penanganan sanpah di Kota Jambi pada tahun 2022 sebesar 74,97%. Angka ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2021 penanganan sampah di Kota Jambi pada tahun 2021 sebesar 75,27%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.





Tabel 40
Status Capaian Tujuan ke – 11 SDG's Kota Jambi

Indikator Kinerja	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Sampah yang ditangani	438.520,00	121.755,21	117.445,26	118.999,31	119.723,96
Volunm Produksi Sampah	566.594,00	154.558,00	156.103,40	158.106,98	159.688,01
Persentase Penanganan Sampah (%)	77,35	78,78	79,24	75,27	74,97

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, 2023

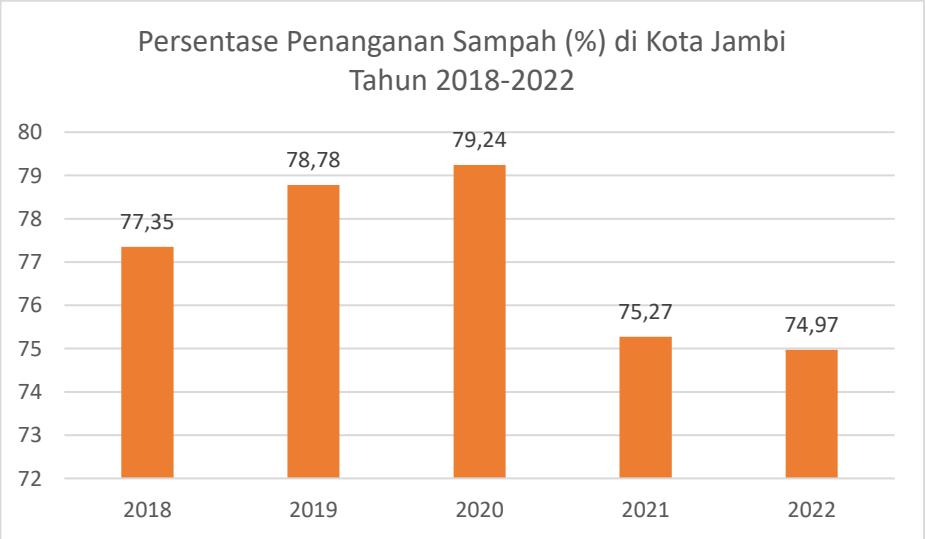

Gambar 23
Grafik Persentase Pengelolaan Sampah di Kota Jambi Tahun 2018-2022
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, 2023

g) Target 11.6.2 (a) (Rata-rata tahunan materi partikular halus PM 10)

Data tidak tersedia.

h) Target 11.6.2 (b) (Indeks Kualitas Udara)

Indeks Kualitas Udara (IKU) merupakan gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter (indicator) individual polusi udara yang saling berhubungan seperti NO_2, SO_2, SPM, O, dan CO. Adapun dalam 5 tahun terakhir rata-rat kriteria Indeks Kualitas Udara (IKU) di Kota Jambi masih sangat baik, dimana pada tahun 2022 Indeks Kualitas Udara di Kota Jambi sebesar 88,09.



i) Target 11.7.1 (a) (Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua)

Ruang terbuka perkotaan adalah lahan terbangun yang bisa berupa ruang publik, jalan serta ruang di sekitar jalan di kawasan perkotaan. Kawasan perkotaan yang dimaksud adalah kawasan perkotaan fungsional yang berarti kawasan di mana kegiatan ekonomi utamanya adalah perdagangan dan jasa serta luas kawasannya tidak terbatas pada batas administratif. Untuk mengetahui ruang terbuka perkotaan di Kota Jambi menggunakan data hasil digitasi citra satelit. Adapun perhitngannya diantaranya:

$$RTP = \frac{RTH + RTNH + RJ}{LP}\ x\ 100$$

$$RTP = \frac{2128{,}56 + 72{,}04}{8189{,}51}\ x\ 100$$

$$RTP = 26{,}87\%$$

Keterangan:

RTP	= Proporsi Rang Terbuka Perkotaan
RTH	= Luas Ruang Terbuka Hijau (Ha)
RTNH	= Luas Ruang Terbuka Non Hijau (Ha)
RJ	= Luas Ruanh untuk Jalan (Ha)
LP	= Luas Lahan Terbangun di Perkotaan (Ha)

Berdasarkan perhitungan diatas untuk mengetahui proporsi ruang terbuka perkotaan dihitung dengan menjumlahkan ruang terbuka hijau, ruang terbuka non hijau dan ruang untuk jalan dalam hectare kemudian dibagi dnegan luas lahan terbangun dalam satuan hectare. Luas RTH dan RTNH di Kota Jambi sebesar 2128,56 ha, luas ruang untuk jalan 73,04 ha dan luas lahan terbangun di kota jambi sebesar 8189,51 ha.





j) Target 11.b.2* (Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana).

Data tidak tersedia.

k) Target 11.c.1 (a) (Persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan, dan menggunakan Material Lokal).

Data tidak tersedia.





MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN

Tujuan kedua belas pembangunan berkelanjutan berfokus pada permasalahan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Sebagaimana pada pembahasan – pembahasan sebelumnya beberapa sasaran tidak dapat terukur di Kota Jambi karena ketersediaan data yang masih terbatas. Oleh karena itu hanya beberapa sasaran saja yang dapat dirinci ke dalam pembahasan berikut.

Tabel 41
Status Capaian Tujuan ke – 12 SDG's Kota Jambi

Kode Indikator	Nama Indikator	*Baseline*				Target Nasional 2022	Capaian Target			GAP	Status	Instansi
		2018	2019	2020	2021		Belum Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi			
Melaksanakan *the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns*, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang												
12.1.1*	Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan											Bukan Disagregasi Kota
Pada tahun 2030, mengurangi separuh jumlah dari sampah pangan global perkapita pada tingkat retail dan konsumen dan mengurangi kerugian makanan sepanjang produksi dan rantai penawaran, termasuk kerugian paska panen.												
12.3.1.(a)	Persentase Sisa Makanan	N/A	N/A	N/A	N/A	41,55%	16,11% (Belum Ditargetkan Sebelumnya)			25,44%	▼	Dinas Lingkungan Hidup
Pada tahun 2020, mencapai pengelolaan berwawasan lingkungan, atas bahan kimia dan semua jenis limbah lainnya di sepanjang siklus hidupnya,sesuai dengan kerangka kerja internasional yang telah disepakati, dan secara signifikan mengurangi pelepasan bahan-bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.												
12.4.1*	Peran aktif dalam mengikuti kesepakatan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya.											Bukan Disagregasi Kota
12.4.1.(a)	Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan Merkuri	N/A	N/A	N/A	N/A	20%					-	Dinas Lingkungan Hidup
12.4.1.(b)	Persentase penurunan tingkat konsumsi perusak ozon dari baseline.											Bukan Disagregasi Kota
12.4.2.*	(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan	N/A	N/A	N/A	N/A	97,50%					-	Dinas Lingkungan Hidup
	(b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengelolaannya	N/A	N/A	N/A	N/A						-	Dinas Lingkungan Hidup
Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.												
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	9,50%	8,50%	9,70%	9,50%	10,84%		9,50%		1,34%	▶	Dinas Lingkungan Hidup
Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka												
12.6.1*	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					-	Inspektorat Kota Jambi
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	N/A	N/A	N/A	N/A	2,634					-	Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatkan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.												
12.7.1*	Tingkatan *(degree)* kebijakan pengadaan publik dan											Bukan Disagregasi Kota





Kode Indikator	Nama Indikator	*Baseline*				Target Nasional 2022	Capaian Target			GAP	Status	Instansi
		2018	2019	2020	2021		Belum Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi			
	implementasi rencana aksi											
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah											Bukan Disagregasi Kota
12.7.1.(b)	Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk pengadaann Barang dan Jasa											Bukan Disagregasi Kota
Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.												
12.8.1.(a)	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup											Bukan Disagregasi Kota
12.8.1.(b)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	N/A	N/A	N/A	N/A	15	4 Instansi (Belum ditargetkan sebelumnya)			11 Instansi	▼	Dinas Kesehatan Kota Jambi/Satpol PP / Dinas Sosial
Mendukung negara-negara berkembang untuk memperkuat kapasitasilmiah dan teknologi mereka untuk bergerak ke arah pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan.												
12.a.1*	Kapasitas pembangkit energi terbarukan yang terpasang (dalam watt per kapita)											Bukan Disagregasi Kota
Mengembangkan dan mengimplementasikan alat untuk memonitor dampak pembangunan berkelanjutan untuk pariwisata yang berkelanjutan yang dapat menciptakan lapangan kerja dan mendukung budaya dan produk lokal.												
12.b.1(a)	Jumlah lokasi penerapan *sustainable tourism development*	N/A	N/A	N/A	N/A						-	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Merasionalisasi subsidi bahan bakar fosil tidak efisien yang mendorong pemborosan konsumsi dengan menghilangkan distorsi pasar, sesuai dengan keadaan nasional, termasuk dengan restrukturisasi pajak dan penghapusan secara bertahap jika ada subsidi berbahaya , yang dicerminkan oleh dampak lingkungannya, dengan sepenuhnya memperhitungkan kebutuhan dan kondisi khusus negara-negara berkembang dan meminimalkan dampak negatif yang bisa terjadi pada pembangunannya dengan cara yang melindungi rakyat miskin dan masyarakat yang terkena dampak.											
12.c.1*	(a) Jumlah subsidi bahan bakar fosil sebagai persentase dari PDB; dan											Bukan Disagregasi Kota
	(b) Jumlah subsidi bahan bakar fosil sebagai proporsi dari total pengeluaran nasional untuk bahan bakar fosil.											Bukan Disagregasi Kota

● Tercapai ▶ Akan Tercapai/membaik ▼ Perlu Perhatian Khusus - Data Tidak Tersedaia

- **TPB Perlu Perhatian Khusus**

  Pada analisis capaian TPB Tujuan ke-12 Menjamin Pola Produksi Dan Konsumsi Yang Berkelanjutan terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian khusus diantaranya adalah Indikator 12.3.1.(a) Persentase Sisa Makanan dan 12.8.1.(b) Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.

- **TPB Perlu Adanya Pendalaman**

  Sedangkan capaian indikator yang tidak memiliki data perlu adanya pendalaman, data tidak tersedia disebakan oleh beberapa hal seperti kegiatan tidak match dengan nomenklatur indikator TPB atau Indikator TPB tidak





dengan kewenangan daerah. Sehingga indikator yang tidak memiliki data perlu perhatian khusus untuk mencapai trend capaian membaik. Capaian TPB yang tidak memiliki data terdapat pada indicator:

1. 12.4.1.(a) Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri
2. 12.4.2.*(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya /pengelolaannya
3. 12.6.1*Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya
4. 12.6.1.(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001
5. 12.b.1(a)Jumlah lokasi penerapan s*ustainable tourism development.*

a) Target 12.3 (Pada tahun 2030, mengurangi separuh jumlah dari sampah pangan global perkapita pada tingkat retail dan konsumen dan mengurangi kerugian makanan sepanjang produksi dan rantai penawaran, termasuk kerugian paska panen)

1) Indikator 12.3.1* (Persentase Sisa Makanan)

Berdasarkan data pada tahun 2022, sumber sampah di Kota Jambi dengan penyumbang sampah terbesar berasal dari sampah rumah tangga sebesar 77,56 ton (51%) dengan Timbulan sampah sebesar 158.295,79 ton/tahun. Sampah yang terkelola sekitar 125.069.505 ton/tahun (79,01%) dan sampah yang tidak terkelola sebesar 33.226.287 (20,99%). Jika ditinjau dari komposisi sampah berdasarkan sumber sampah maka sampah yang berasal dari rumah tangga sebesar 51% kemudian diikuti dengan sampah yang berasal dari pusat pasar sebesar 19% dan pusat perniagaan sebesar 9%. Komposisi sampah berdasarkan jenis sampah terbagi menjadi beberapa kategori seperti sisa makanan, kayu ranting, kertas karton, plastik, dan logam. Komposisi sampah berdasarkan jenis sampah dominasi oleh sampah plastik (44,07%), sedangkan untuk kategori sisa makanana sebesar 16,11% dari seluruh komposisi sampah



berdasarkan jenis sampah di Kota Jambi. Persentase sisa makanan adalah jumlah sisa makanan dibagi dengan total sampah dikali dengan 100 persen.

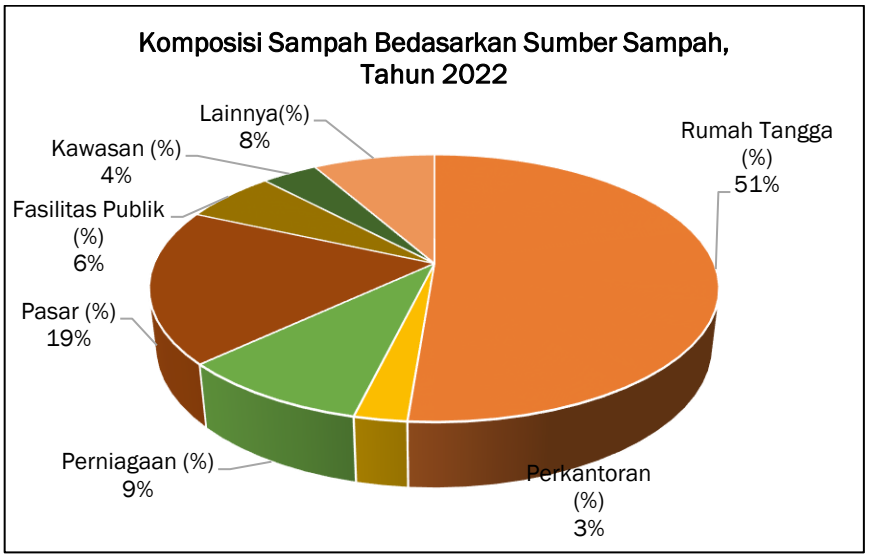

Gambar 24
Komposisi Sampah Berdasarkan Sumber Sampah, 2022
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi 2023, dan http://sipsn.menlhk.go.id/

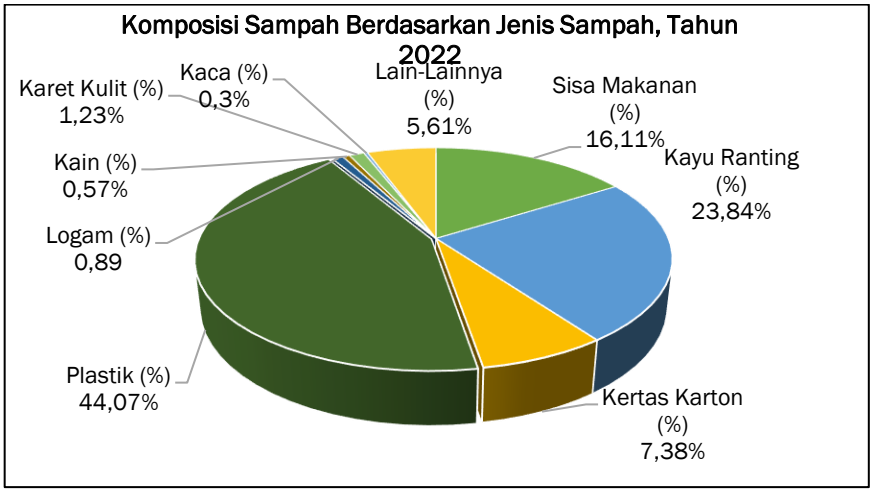

Gambar 25
Komposisi Sampah Berdasarkan Jenis Sampah, 2022
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi 2023, dan http://sipsn.menlhk.go.id/

b) Target 12.4 (Pada tahun 2020, mencapai pengelolaan berwawasan lingkungan, atas bahan kimia dan semua jenis limbah lainnya di sepanjang siklus hidupnya,sesuai dengan kerangka kerja internasional yang telah disepakati, dan secara signifikan mengurangi pelepasan bahan-bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air dan tanah untuk



meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan)

1) **Indikator 12.4.1.(a) - Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri**

   Data Tidak Tersedia

2) **Indikator 12.4.2* - (a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengelolaannya**

   Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) merupakan sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mempunyai sifat, konsentrasi, dan atau jumlahnya dapat mencemarkan dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung (PP No. 101/2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun). Pengelolaan limbah B3 meliputi rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, dan pengolahan termasuk penimbunan hasil pengolahan limbah B3 tersebut. Limbah B3 yang terkelola sesuai peraturan perundangan adalah seluruh timbulan limbah B3 dari berbagai kegiatan industri yang dikelola selama tahun berjalan. Sedangkan limbah B3 yang diolah sesuai dengan peraturan perundangan adalah timbulan limbah B3 yang dikurangi dan atau dihilangkan sifat bahaya dan atau sifat racunnya

   menurut jenis pengolahan tertentu sesuai dengan peraturan perundangan.

   Semakin besarnya proporsi limbah B3 yang tidak dikelola mengindikasikan semakin banyak pula limbah B3 yang dikelola tanpa izin, diserahkan ke pihak ketiga yang tidak berizin, dan dibuang tanpa izin.

   Data Tidak Tersedia





c) Target 12.5 (Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.)

***1)* Indikator 12.5.1.(a) (Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang)**

Pengolahan sampah merupakan bagian dari penanganan sampah dan menurut UU no 18 Tahun 2008 didefinisikan sebavai proses perubahan bentuk sambah dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah. Pengolahan sampah merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk mengurangi jumlah sampah, disamping memanfaatkan nilai yang masih terkandung dalam sampah itu sendiri. Pengolahan sampah dapat dilakukan berupa : pengomposan, *recycling*/daur ulang, pembakaran (insinersi), dan lain-lain.

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup jumlah timbulan sampah yang dihasilkan di Kota Jambi tahun 2022 sebesar 158.295,79 Ton. Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang sebesar 119.723,96 Ton. Capaian kinerja persentase jumlah sampah yang didaur ulang di tingkat sumber sampah pada tahun 2022 sebesar 9,50% dengan target nasional sebesar 10,84%.

Tabel 42
Persentase Penanganan Sampah Kota Jambi Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Volume Timbulan Sampah (Ton)	566.593	154.557,83	155.683,45	158.107,05	158.295,79
1	Jumlah Sampah yang ditangani	438.260	121.760,69	123.363,57	119.007,18	118.674,35
3	Persentase Penanganan Sampah (%)	77,35	78,78	79,24	75,27	74,97
4	Jumlah TPS	445	445	445	445	445
5	Jumlah Daya Tampung TPS (m^3/hari)	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018
6	Jumlah Penduduk	597.044	604.923	611.353	618.814	619.553
7	Rasio Daya Tampung TPS terhadap Jumlah Penduduk	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, dan Dokumen LKPJ Kota Jambi, 2023

d) Target 12.6 (Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka)





1) Indikator 12.6.1* - Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya

Data Tidak Tersedia

2) Indikator 12.6.1.(a) - Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.

Data Tidak Tersedia]

e) Target 12.8 (Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam)

1) Indikator 12.8.1.(b) - Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.

Tabel 43
Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Dinas Pendidikan Kota Jambi Tahun 2022

No	Uraian	Sasaran	Target	Capaian
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	10.000 Peserta Didik	100%	96,05%
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	53.049 Peserta Didik	100%	100%
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	25.695 Peserta Didik	100%	100%
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	1.163 Peserta Didik	100%	100%

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Jambi 2023





Tabel 44
Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Dinas Kesehatan Kota Jambi Tahun 2022

No	Uraian SPM	Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi %
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	11571	10083	87
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	11044	9853	89
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	11044	9699	88
4	Pelayanan Kesehatan Balita	28306	24784	88
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	67025	60254	90
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	80000	64522	81
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	42680	40934	96
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	37000	29745	80
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus (DM)	17000	12764	75
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	1100	1045	95
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9025	6139	68
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia	16.645	8.135	49

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Jambi 2023

Tabel 45
Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Satpol PP pada Tahun 2022

No	Indikator kinerja/Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian (%)
	TRANTIBUM	**TUNTAS UTAMA**			**95,61**
1	**Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)**				**95,61**
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)				**80**
	Pencapaian Penerima Layanan Dasar	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Dilayani	Yang Belum Terlayani	80
	A. Jumlah yang harus dilayani	10	10	0	100
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Daasar (20%)				**15,61**
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang /Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang belum tersedia	87,05
	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materiil	15	15	0	100
	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	5	0	5	0
	Standar operasional prosedur Satpol PP	51	51	0	100
	Standar sarana Satpol PP	35	31	4	88,57
	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat	350	279	71	79,71
	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	3	3	0	100

Sumber: Laporan Tahunan Satpol PP Kota Jambi, 2023.





Tabel 46
Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Dinas Sosial Kota Jambi pada Tahun 2022

No	Uraian SPM	Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi %
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar diluar Panti	1.351	1.009	74,68
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar diluar Panti	15	15	100
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar diluar Panti	791	1699	214,79
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis diluar Panti	250	252	100,80
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Tanggap dan Pasca Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	217	217	100

Sumber: Dinas Sosial Kota Jambi, 2023

f) Target 12.b (Mengembangkan dan mengimplementasikan alat untuk memonitor dampak pembangunan berkelanjutan untuk pariwisata yang berkelanjutan yang dapat menciptakan lapangan kerja dan mendukung budaya dan produk lokal)

1) Indikator 12.b.1.(a) - Jumlah lokasi penerapan sustainable *tourism development*.

Data Tidak Tersedia





MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA

Tujuan ke-tiga belas pembangunan berkelanjutan memiliki fokus dalam hal penanganan perubahan iklim. Capaian sasaran pada tujuan 13 SDG's di Kota Jambi adalah sebagai berikut.

Tabel 47
Status Capaian Tujuan ke – 13 SDG's Kota Jambi

Kode Indikator	Nama Indiaktor	*Baseline*				Target Nasional 2022	CapaianTarget			GAP	Status	Instansi
		2018	2019	2020	2021		Belum Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi			
Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.												
13.1.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	N/A	N/A	Korban Meninggal : 3/0,49 Korban Terluka : 33/5,44	N/A	N/A	Korban Meninggal : 8/1,29 Korban Terluka : 4/0,64				▼	Dinas Sosial
13.1.2*	Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan *the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction* 2015–2030											Bukan Disagregasi Kota
13.1.3*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana	100%	100%	100%	100 %	N/A			100%		●	Dinas Sosal
13.2.1*	Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen *Biennial Update Report* (BUR) dan National *Communications*											Bukan Disagregasi Kota
13.2.2*	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun											Bukan Disagregasi Kota
13.2.2.(a)	Potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)											Bukan Disagregasi Kota
13.2.2.(b)	Potensi penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)											Bukan Disagregasi Kota
Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim.												
13.3.1.(a)	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup.											Bukan Disagregasi Kota
Melaksanakan komitmen negara maju pada *the United Nations Framework Convention on Climate Change* untuk tujuan mobilisasi dana bersama sebesar 100 miliar dolar Amerika per tahun pada tahun 202dari semua sumber untuk mengatasi kebutuhan negara berkembandalam konteks aksi mitigasi yang bermanfaat dan transparansi dalam pelaksanaannya dan mengoperasionalisasi secara penuh *the Green Climate Fund* melalui kapitalisasi dana tersebut sesegera mungkin.												
13.a.1.(a)	Jumlah dana publik *(budget tagging)* untuk pendanaan perubahan iklim.											Bukan Disagregasi Kota

● Tercapai ▶ Akan Tercapai/membaik ▼ Perlu Perhatian Khusus - Data Tidak Tersedaia





- **TPB Perlu Perhatian Khusus**

  Pada analisis capaian TPB Tujuan 13 Mengambil Tindakan Cepat Untuk Perubahan Iklim Dan Dampaknya terdapat dua indikator yang menjadi kewenangan Kota Jambi, dari dua indikator terdapat satu indikator yang perlu perhatian khusus yaitu indikator 13.1.3* Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana, indikator ini memerlukan pendalaman sehingga perlu adanya perhatian khusus untuk capaian trend yang membaik.

a) Target 13.1 (Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara)

1) Indikator 13.1.1* (Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang)

Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah adalah dokumen yang berisi strategi dan/atau rencana aksi pencegahan bencana tingkat nasional dan daerah untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, termasuk rencana aksi adaptasi perubahan iklim. Pada saat ini terdapat 1 (satu) kebijakan strategis mengenai Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yaitu SK Walikota Jambi Nomor 137 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Jenis Bantuan dan Kriteria Korban Kebakaran dan Bencana Lainnya di Kota Jambi.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana). Jumlah korban meninggal adalah jumlah orang yang dilaporkan tewas atau





meninggal dunia akibat bencana (Perka BNPB No. 8/2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan). Jumlah korban hilang adalah jumlah orang yang dilaporkan hilang atau tidak ditemukan atau tidak diketahui keberadaannya setelah terjadi bencana (Perka BNPB No. 8/2011). Jumlah korban terdampak adalah jumlah orang atau sekelompok orang yang menderita akibat dampak buruk bencana, seperti kerusakan dan/atau kerugian harta benda, namun masih dapat menempati tempat tinggalnya (Perka BNPB No. 8/2011).

Berdasarkan data dari tahun 2018 - 2022 bencana alam yang terjadi di Kota Jambi yaitu banjir, kebakaran hutan/lahan, kebakaran bangunan dan Angin puting beliung.

Tabel 48
Jumlah Kejadian dan Korban Bencana di Kota Jambi Tahun 2010-2022

No	Bencana	Jumlah Kejadian	Korban				Kerusakan			
			Meninggal	Terluka	Menderita	Mengungsi	Rumah	Fasilitas Pendidikan	Fasilitas Peribadatan	Perkantoran
1	Banjir	20	6	2	9.275	14.051	441	22	3	1
2	Puting beliung	8	1	2	-	-	197	-	-	-
3	Kebakaran	13	1	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		41	8	4	9.275	14.051	638	22	3	1

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota;
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jambi,2021 dan
https://dibi.bnpb.go.id/

2) Indikator 13.1.3* (Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana)

Selaras dengan Rencana/Strategi Nasional bahwa strategi penanggulangan bencana yang diadopsi dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah sejalan atau "selaras" dengan rencana atau strategi nasional. Ini menjamin konsistensi dan koordinasi antara tingkat pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dalam menghadapi risiko bencana. Pengukuran persentase dalam konteks ini akan





menunjukkan bahwa pemerintah Kota Jambi dalam penanggulangan bencana telah mencapai angka 100% dapat dianggap sebagai indikator positif bahwa banyak pemerintah daerah mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan pedoman dan perencanaan nasional untuk mengurangi dampak bencana.



MELESTARIKAN DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN SAMUDERA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Tujuan ke-empat belas melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan. Capaian sasaran pada tujuan 14 SDG's di Kota Jambi adalah sebagai berikut.

Tabel 49
Status Capaian Tujuan ke – 14 SDG's Kota Jambi

Kode Indikator	Nama Indikator	*Baseline*				Target 2022	Capaian Target			GAP	Status	Instansi
		2018	2019	2020	2021		Tidak Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi			
	Mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi pada tahun 2025											
14.1.1.(a)	Persentase penurunan sampah terbuang ke laut											Bukan Disagregasi Kota
	Mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan,termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif											
14.2.1*	Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal lautan											Bukan Disagregasi Kota
14.2.1.(a)	Terkelolanya 11 Wilayah PengelolaanPerikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan											Bukan Disagregasi Kota
	Secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya											
14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan laut yang berada dalam batasan biologis yang aman.											Bukan Disagregasi Kota
	Melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia pada tahun 2020.											
14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut.											Bukan Disagregasi Kota
	Melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan,menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada *the World Trade Organization* (WTO) pada tahun 2020.											
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.											Bukan Disagregasi Kota
	Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar											
14.b.1*	Tingkat penerapan kerangka hukum/regulasi/ kebijakan/kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil											Bukan Disagregasi Kota
14.b.1.(a)	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan											Bukan Disagregasi Kota
14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi											Bukan Disagregasi Kota
	Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menerapkan hukum internasional yang tercermin dalam *the United Nations Convention on the Law of the Sea*, yang menyediakan kerangka hukum untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya, seperti yang tercantum dalam ayat 158 dari *"The future we want"*.											
14.c.1*	Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS *(the United Nations Convention on the Law of theSea)*											Bukan Disagregasi Kota







MELINDUNGI, MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLA HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

Tujuan 15 (lima belas) adalah melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

Tabel 50
Status Capaian Tujuan ke – 15 SDG's Kota Jambi

Kode Indikator	Nama Indikator	Baseline				Target Nasional 2022	Capaian Target			GAP	Status	Instansi
		2018	2019	2020	2021		Tidak terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi			
	Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.											
15.1.1*	Proporsi 78ndicat hutan terhadap total luas lahan.											Bukan Disagregasi Kota
15.1.2.(a)	Luas Kawasan Bernilai KonservasiTinggi (HCV).											Bukan Disagregasi Kota
	Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan aforestasi dan reforestasi secara global.											
15.2.1.(a)	Jumlah KPH yang Masuk Kategori Maju											Bukan Disagregasi Kota
	Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.											
15.3.1*	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan.											Bukan Disagregasi Kota
	Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan,termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan.											
15.4.1*	Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam 78ndicat konservasi											Bukan Disagregasi Kota
15.4.2*	Indeks tutupan hijau pegunungan.											Bukan Disagregasi Kota
	Melakukan 78ndicato cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan, pada tahun 2020, melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah.											
15.5.1*	Indeks Daftar Merah (Red-list index)											Bukan Disagregasi Kota
	Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya 78ndicat, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.											
15.6.1*	Kerangka kerja legislasi, 78ndicator78tive dan kebijakan untuk memastikan pembagian manfaat yang adil dan merata.											Bukan Disagregasi Kota
	Melakukan 78ndicato cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara 78ndicat.											
15.7.1.(a)	Jumlah kasus perburuan atau perdagangan illegal Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL).											Bukan Disagregasi Kota
	Pada tahun 2020, memperkenalkan 78ndicat-langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis asing 78ndicato pada ekosistem darat dan air, serta mengendalikan atau memberantas jenis asing 78ndicato prioritas.											
15.8.1*	Kerangka legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing invasive (JAI)											Bukan Disagregasi Kota
	Pada tahun 2020, mengitegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.											
15.9.1.(a)	Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi 2 dariRencana Strategis.											Bukan Disagregasi Kota
	Memobilisasi sumber daya penting dari semua sumber dan pada semua tingkatan untuk membiayai pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan memberikan insentif yang memadai bagi negara berkembang untuk memajukan pengelolaannya, termasuk untuk pelestarian dan reforestasi.											
15.a.1.(a)	Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan											Bukan Disagregasi Kota





Kode Indikator	Nama Indikator	Baseline				Target Nasional 2022	Capaian Target			GAP	Status	Instansi
		2018	2019	2020	2021		Tidak terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi			
	keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.											
	Memobilisasi sumber daya penting dari semua sumber dan pada semua tingkatan untuk membiayai pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan memberikan insentif yang memadai bagi negara berkembang untuk memajukan pengelolaannya, termasuk untuk pelestarian dan reforestasi.											
15.b.1.(a)	Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan											Bukan Disagregasi Kota
	Meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan jenis yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat 79ndic mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan.											
15.c.1.(a)	Jumlah kasus perburuan atau perdagangan 79ndicat TSL											Bukan Disagregasi Kota

● Tercapai ▶ Akan Tercapai/membaik ▼ Perlu Perhatian Khusus - Data Tidak Tersedaia







MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DISEMUA TINGKATAN.

Fokus tujuan global keenam belas pembangunan berkelanjutan adalah masalah perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang 80ndicat. Berikut secara rinci Update Capaian SDGs di Kota Jambi berdasarkan 80ndicator yang disepakati.

Tabel 51
Status Capaian Tujuan ke – 16 SDG's Kota Jambi

Kode Indikator	Nama Indikator	Baseline				Target Nasional 2022	Capaian Target			GAP	Status	Instansi
		2018	2019	2020	2021		Tidak Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi			
Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimana pun.												
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	N/A	N/A	1 Kasus	N/A	N/A					-	Polres
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	N/A	N/A	1 kasus = 0,16 per 100.000 penduduk	N/A	N/A					-	Polres
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.											Bukan Disagregasi Kota
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.											Bukan Disagregasi Kota
Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.												
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik											Bukan Disagregasi Kota
16.2.1.(b)	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya											Bukan Disagregasi Kota
16.2.2*	Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan											Bukan Disagregasi Kota





Kode Indikator	Nama Indikator	Baseline				Target Nasional 2022	Capaian Target			GAP	Status	Instansi
		2018	2019	2020	2021		Tidak Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi			
	seksual sebelum umur 18 tahun.											
	Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.											
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.											Bukan Disagregasi Kota
16.3.1.(b)	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi	N/A	N/A	N/A	N/A	84,91% (Angka Litigasi) 82,18% (Angka Non Litigasi)					-	Kanwilkumham
K16.3.1.(c)	Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara											Bukan Disagregasi Kota
16.3.2.(a)	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					-	Kementerian Hukum dan HAM Kanwilkumham
16.3.3.(a)	Indeks Akses terhadap Keadilan (*Access to Justice Index*)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					-	Kanwilkumham
	Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.											
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	N/A	N/A	N/A	N/A	4,03		2,16		1,87	▶	BPK
	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.											
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.											Bukan Disagregasi Kota
16.6.1.(a)	Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP			WTP		●	BPK
16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B	65,50%	65,70%	66,30%	66,60%	72,05%		67,37%		4,68%	▶	Inspektorat Kota Jambi
16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B	62,4 %	62,7 %	62,8%	63,10%	45%	63,23%			18,23%	▼	Inspektorat Kota Jambi
16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.	N/A	N/A	N/A	N/A	53					-	Inspektorat Jambi
	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.											





Kode Indikator	Nama Indikator	Baseline				Target Nasional 2022	Capaian Target			GAP	Status	Instansi
		2018	2019	2020	2021		Tidak Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi			
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	21,62%	21,62%	17,78%	17,78%	15,53%		17,78%		2,25%	▶	Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	N/A	3,44% (Belum ditargetkan sebelumnya)				▼	Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
16.7.2.(a)	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi											Bukan Disagregasi Kota
16.7.2.(b)	Indeks Aspek Kebebasan.											Bukan Disagregasi Kota
16.7.2.(c)	Indeks Kesetaraan											Bukan Disagregasi Kota
	Memperluas dan meningkatkan partisipasi negara berkembang di dalam lembaga tata kelola global.											
16.8.1.(a)	Jumlah keanggotaan dan kontribusi dalam forum dan organisasi internasional											Bukan Disagregasi Kota
	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.											
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menurut umur.	62,83%	79,02%	83,63%	84,28%	81,34%			92,67%		●	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.	94,70%	95,06	95,55%	92,22%	86,87%			95,84%		●	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun.	96,40%	96,18%	96,53%	94,25%	97,00%			97,50%		●	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.											
16.10.1(a)	Indikator Kebebasan dari kekerasan bagi jurnalis dan awak media.											Bukan Disagregasi Kota
16.10.1(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					-	Kanwilkumham
16.10.1(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	111 (Belum ditargetkan sebelumnya)				▼	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota jambi
16.10.2*	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori,											Bukan Disagregasi Kota





Kode Indikator	Nama Indikator	Baseline				Target Nasional 2022	Capaian Target			GAP	Status	Instansi
		2018	2019	2020	2021		Tidak Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi			
	dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.											
16.10.2.(a)	Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					-	Bappeda
16.10.2.(b)	Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.											Bukan Disagregasi Kota
	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.											
16.a.1*	Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan *Paris Principles.*											Bukan Disagregasi Kota
	Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.											
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					-	Kanwilkumham

Tercapai Akan Tercapai/membaik Perlu Perhatian Khusus - Data Tidak Tersedia

- **TPB Perlu Perhatian Khusus**

Pada Analisis Capaian TPB Tujuan Ke-16 Menguatkan Masyarakat Yang Inklusif Dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, Dan Membangun Kelembagaan Yang Efektif, Akuntabel, Dan Inklusif Disemua Tingkatan terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian khusus diantaranya adalah Indikator 16.6.1.(c) Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B, Indikator 16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), indikator 16.7.1.(b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) dan indikator 16.10.1(c) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan. Sedangkan capaian indikator yang tidak memiliki data perlu adanya pendalaman, data tidak





tersedia disebakan oleh beberapa hal seperti kegiatan tidak match dengan nomenklatur indikator TPB atau Indikator TPB tidak dengan kewenangan daerah. Sehingga indikator yang tidak memiliki data perlu perhatian khusus untuk mencapai trend capaian membaik.

- **TPB Perlu Adanya Pendalaman**

  Capaian TPB yang tidak memiliki data terdapat pada indikator 16.1.1.(a) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir. Indikator 16.1.2.(a) Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk, indikator 16.2.2* Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi, indikator 16.3.1.(b) Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi, indikator 16.3.2.(a) Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan, indikator 16.3.3.(a) Indeks Akses terhadap Keadilan (*Access to Justice Index*), indikator 16.6.2.(a) Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik, indikator 16.10.1(b) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), indiakator 16.10.2.(a) Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif dan indikator 16.b.1.(a) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.

a) Target 16.1 (Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimana pun)

1) **Indikator 16.1.2.(a) - Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.**

   Data Tidak tersedia

2) **Indikator 16.1.2.(a) - Kematian disebabkan konflik per 100.000 Penduduk**

   Data Tersedia





b) Target 16.2 (Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak)

1) Indikator 16.2.2* - Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.

Data Tidak Tersedia

c) Target 16.3 (Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua)

1) *Indikator 16.3.1.(b) - Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi*

Data Tidak Tersedia

2) Indikator 16.3.2.(a) - Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.

Data Tidak Tersedia

3) *Indikator 16.3.3.(a) - Indeks Akses terhadap Keadilan (Access to Justice Index)*

Data Tidak Tersedia

d) Target 16.5 (Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya)

1) Indiaktor 16.5.1.(a) - Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).

IPAK disusun berdasarkan dua dimensi, yaitu dimensi persepsi dan dimensi pengalaman. Dimensi persepsi bertujuan untuk melihat penilaian atau pendapat terhadap kebiasaan perilaku antikorupsi di masyarakat. Sementara itu, dimensi pengalaman bertujuan untuk melihat perilaku antikorupsi dari sisi pengalaman masyarakat ketika menggunakan atau berinteraksi dengan layanan publik dan pengalaman lainnya.





Tujuan SPAK adalah untuk mengukur tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku antikorupsi dengan menggunakan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). Survei ini mengukur perilaku masyarakat dalam tindakan korupsi skala kecil (*petty corruption*) dan tidak mencakup korupsi skala besar (*grand corruption*). Data yang dikumpulkan mencakup pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman berhubungan dengan layanan publik dalam hal penyuapan (*bribery*), gratifikasi (*graft/gratuities*), pemerasan (*extortion),* nepotisme (*nepotism*), dan 9 (sembilan) nilai antikorupsi.

Berdasarkan data LKPJ Kota Jambi tahun 2022 nilai IPAK yang teralisasi pada tahun 2022 yaitu 2,160 dengan target nasional 2022 yaitu 4,03 ini berarti indeks perilaku anti korupsi yang ada di Kota Jambi cenderung membaik.

e) Target 16.6 (Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat)

1) **Indiaktor 16.6.1.(a) - Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).**

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan dilakukan dengan tujuan untuk memberikan opini (pernyataan pendapat) atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan mendasarkan pada kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Jambi tahun 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Kota Jambi dapat mempertahankan opini WTP untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2017-2022.





2) **Indiaktor 16.6.1.(b) - Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B**

Berdasarakan data RKPD Kota Jambi Nilai SAKIP instansi pemerintah dengan teralisasi 67,37% (B) pada tahun 2022 dan nilai SAKIP pada target nasional yaiut 72,05%. Artinya nilai SAKIP yang tinggi menunjukkan bahwa instansi pemerintah tersebut telah berhasil dalam mencapai tujuan-tujuannya dan mengelola sumber daya dengan efisien. Sebaliknya, nilai SAKIP yang rendah dapat menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan kinerja dan sumber daya. Nilai SAKIP mencerminkan sejauh mana suatu instansi pemerintah telah mencapai tujuan-tujuannya dan seberapa baik kinerjanya telah diukur dan dinilai berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Penilaian ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti efisiensi penggunaan anggaran, pencapaian target, pelayanan publik, dan sebagainya.

3) **Indiaktor 16.6.1.(c) - Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B**

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), Pemerintah Kota Jambi dalam penyelenggaraan pemerintahan berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akutanbilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat berdasarkan amanat undang-undang. Untuk mencapai hal tersebut, salah satu bentuk yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan melakukan pengawasan terhadap berbagai penyelenggaraan pemerintah daerah. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan

pemerintahan sepenuhnya dilaksanakan oleh Inspektorat. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan di lingkunga Pemerintahan





Kota Jambi secara berkala dan menginformasikan hasilnya kepada publik.

Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat bersifat internal dalam rangka meningkatkan kinerja urusan pembangunan daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Jambi, obyek pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan kepala daerah. Pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah dilakukan dengan pemeriksaan terhadap laporan penyelenggaraan pemerintah dan tindaklanjut atas rekomendasi hasil pengawasan. Laporan hasil pemeriksaan di Kota Jambi pada tahun 2021 mencapai 410 laporan dengan kinerja laporan hasil tindak lanjut temuan hasil pengawasan yang telah disusun sangat baik yaitu mencapai 100%. Salah satu tugas dan fungsi lain dari pelaksanaan pengawasan di daerah adalah menindak lanjuti hasil temuan dari instansi pemeriksa dari tingkat pusat,dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK salah satunya akan menghasilkan temuan-temuan atas tindakan pengelolaan keuangan di daerah. Temuan-temuan tersebut kemudian harus ditindak lanjuti oleh Inspektorat. Sampai tahun 2022, rasio temuan BPK yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kota Jambi telah mencapai 52,97%. Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Kota Jambi telah mampu menunjukkan kecenderungan perbaikan dan/atau sebagian besar target yang relavan terpenuhi.





Tabel 52
Indikator Urusan Pengawasan Kota Jambi Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
		2018	2019	2020	2021	2022
Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	%	60,70	60	66	66,45	52,97
Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	LHP	322	430	401	410	371
Persentase laporan hasil tindak lanjut temuan hasil yang telah disusun	%	100	100	100	100	100
Persentase tenaga pemeriksaan yang menguasai teknik/teori pegawasan dan penilaian akuntibilitas kinerja	%	40	40	88,23	77,19	80
Meningkatnya level kapabilitas Inspektorat Kota	Level	N/A	Level II	Level III	Level III	Level III
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	55,74	71,28	N/A	N/A	63,23

Sumber : Inspektorat Kota Jambi, 2023

4) **Indiaktor 16.6.2.(a) - Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik**

Berdasarakan UndangUndang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 15 dan Bab V, memiliki kepentingan untuk memastikan penyelenggara pelayanan publik mematuhi kewajiban menyusun dan menyediakan standar pelayanan, maklumat pelayanan, siste informasi pelayanan publik, sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik, pelayanan khusus, pengelolaan pengaduan, dan sistem pelayanan terpadu.

Tingkat kepatuhan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah terhadap implementasi Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, khususnya kewajiban penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi komponen standar pelayanan publik dengan cara mengetahui hak-hak masyarakat dalam pelayanan publik, seperti ada/atau tidaknya persyaratan pelayanan, kepastian waktu dan biaya, prosedur dan alur pelayanan, sarana pengaduan, pelayanan yang ramah dan nyaman, dll.

Pada penilaian pelayanan publik 2022, sebanyak dua pemda di Jambi berhasil meraih 10 besar secara nasional, yaitu Pemerintah Provinsi Jambi, yang meraih peringkat ketujuh dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, dan Kabupaten Tebo yang meraih peringkat kesepuluh dari





415 kabupaten yang ada di Indonesia. Selain itu Pemerintah Kabupaten Batang Hari dan Kota Jambi juga ikut memperoleh zona hijau.

f) Target 16.7 (Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan)

1) Indikator 16.7.1.(a) - Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Setiap partai politik harus mengisi kuota perempuan minimal 30 persen, hal ini terangkum dalam **Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 7/2013 pasal 27 ayat (1) huruf b menyangkut kuota 30 persen keterwakilan calon legislatif (caleg) perempuan di setiap daerah pemilihan (dapil).** Ketentuan 30 persen caleg harus perempuan ini dimaksudkan untuk memberikan akses yang memadai bagi kaum perempuan agar dapat berpartisipasi dalam proses politik dan bernegara.

Berdasarkan Data Statistik Kota Jambi Tahun 2022, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi sebanyak 8 orang. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen daerah sebesar 17,78 %.

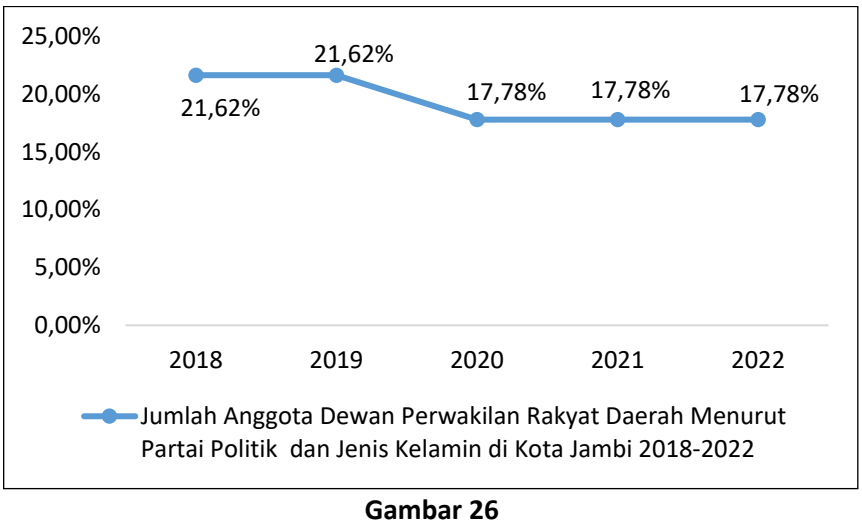

Gambar 26
Grafik Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik di Kota Jambi Tahun 2022
Sumber : BPS Kota Jambi 2023





2) Indikator 16.7.1.(b) - Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).

Perempuan diposisi kepemimpinan seperti pemerintah di tingkat eksekutif, legislatif, peradilan dan penegak hukum, serta perusahaan milik publik atau swasta. Jabatan manajer menurut Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI) 2014 BPS meliputi: Pimpinan Eksekutif, Pejabat Tinggi Pemerintah dan Pejabat Pembuat Peraturan Perundang-undangan, Manajer Administrasi dan Komersial ; Manajer Produksi dan Pelayanan Khusus ; dan Manajer Jasa Perhotelan, Perdagangan, dan Jasa Lainnya. . Perempuan di posisi kepemimpinan pemerintah (Menteri, Gubernur, pemerintah (Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, Eselon I-II) di Kota Jambi sebesar 3,44%.

Tabel 53
Jumlah Pegawai Negri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2018-2022

Jabatan	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
Jabatan Pimpinan Tinggi Pertama	23	8	31
Administrator	119	43	162
Pengawas	246	234	480
Eselon V	1	1	2
Eselon IV	322	155	477
Eselon III	130	22	152
Eselon II	28	1	29
Eselon I	0	0	0
Jabatan Fungsional Guru	331	1.441	1.752
Jabatan Fungsional Medis	99	977	1.076
Jabatan Fungsional Teknis	233	264	497
Jabatan Fungsional Umum	561	681	1.242
Jumlah	**1.592**	**3.648**	**5.240**

Sumber : BPS Kota Jambi Tahun 2023



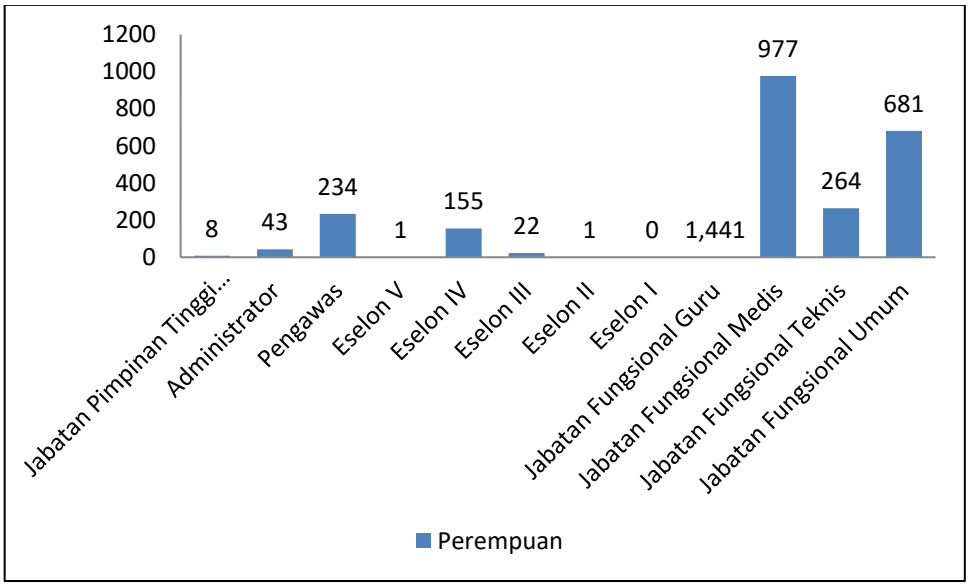

Gambar 27
Grafik Jumlah Pegawai Negri Sipil Menurut Jabatan Tahun 2022

g) Target 16.9 (Pada tahun 2030, memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran)

1) Indikator 16.9.1* - Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menurut umur.

Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Yang dimaksud dengan lembaga pencatatan sipil berdasar pada UU No. 24 Tahun 2013 adalah instansi pelaksana yaitu perangkat pemerintah kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan. Akta Kelahiran merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara bagi individu yang baru lahir.

Jumlah Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil pada tahun 2022 di Kota Jambi sebesar 92,67% yang memiliki akte kelahiran dan dapat ditunjukkan dan 7,33%



yang memiliki akte kelahiran dan tidak dapat ditunjukkan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 54
Persentase Anak Berumur 0-4 Tahun di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Kabupaten/Kota dan Kepemilikan Akte Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Kota Jambi, 2022

Kabupaten/Kota	Kepemilikan Akte Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil			
	Ya Dapat Ditunjukkan	Ya Tidak Dapat Ditunjukkan	Tidak Memiliki	Jumlah
Kerinci	77,65	20,50	1,85	100,00
Merangin	83,17	15,67	1,16	100,00
Sarolangun	91,48	8,00	0,51	100,00
Batang Hari	91,82	8,18	0,00	100,00
Muaro Jambi	95,26	4,44	0,30	100,00
Tanjab Timur	83,19	16,81	0,00	100,00
Tanjab Barat	84,58	15,42	0,00	100,00
Tebo	74,00	25,42	1,03	100,00
Bungo	92,90	6,41	0,69	100,00
Kota Jambi	**92,67**	**7,33**	**0,00**	**100,00**
Kota Sungai Penuh	82,07	17,93	0,00	100,00
Provinsi Jambi	87,53	11,98	0,49	100,00

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jambi, 2023

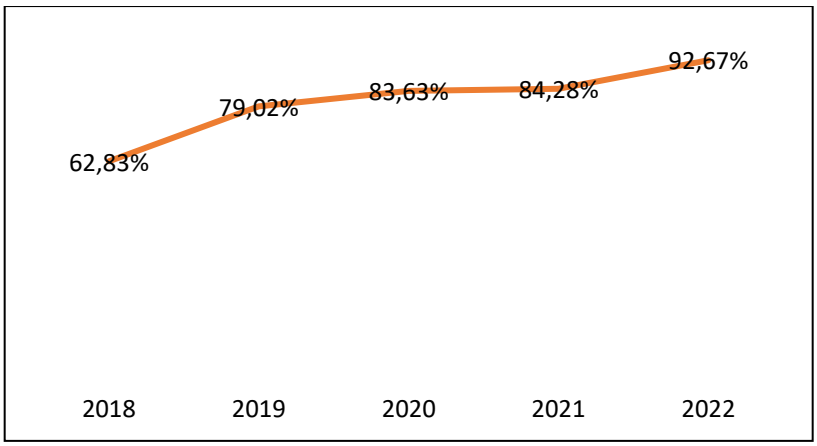

Gambar 28
Grafik Persentase Anak Berumur 0-4 Tahun di kota jambi yang memiliki Akte Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Kota Jambi Jambi tahun 2018 – 2022





2) Indikator 16.9.1.(a) - Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.

Akta kelahiran merupakan bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Setiap anak lahir berhak memiliki akta kelahiran sebagai bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahirannya. Berdasarkan data Statistik Kesejahteraan Kota Jambi Tahun 2023 persentase penduduk berumur 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran menurut karakteristik kelompok pengeluaran 40 persen terbawah sebanyak 95,84 persen. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 55
Persentase Kepemilikan Akta Lahir Untuk Penduduk 0-17 Tahun Pada 40% Berpendapatan Bawah, Tahun 2022

Karakteristik	Penduduk Umur 0-17 Tahun
Jenis Kelamin	
Laki-laki	98,07
Perempuan	96,89
Kelompok Pengeluaran	
40 persen terbawah	**95,84**
40 persen tengah	99,57
20 persen teratas	97,68
Pendidikan Tertinggi KRT	
SD ke bawah	98,04
SMP ke atas	97,40
Kota Jambi	**97,50**

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Jambi, 2023

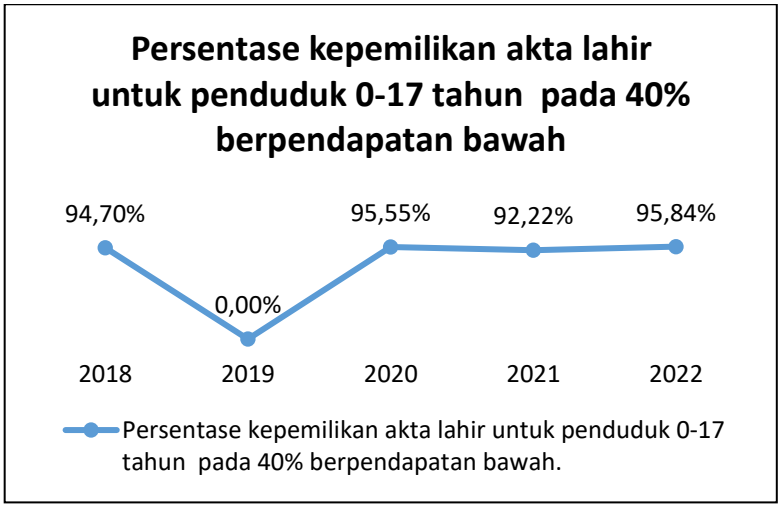

Gambar 29
Grafik Persentase Kepemilikan Akta Lahir Untuk Penduduk 0-17 Tahun Pada 40% Berpendapatan Bawah, Tahun 2018 – 2022





3) Indikator 16.9.1.(b) - Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun.

Kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun merujuk pada proporsi atau persentase dari populasi anak-anak dan remaja dalam kelompok usia 0 hingga 17 tahun yang memiliki akta kelahiran yang sah dan terdaftar. Akta kelahiran merupakan identitas dalam berbagai situasi sepanjang hidup seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan bantuan social, termasuk mencari pekerjaan maupun mendapatkan izin mengemudi, atau berurusan dengan masalah hukum.

Berdasarkan data statistic kesejahteraan masyarakat, persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada usia 0-17 tahun sebesar 97,50%.

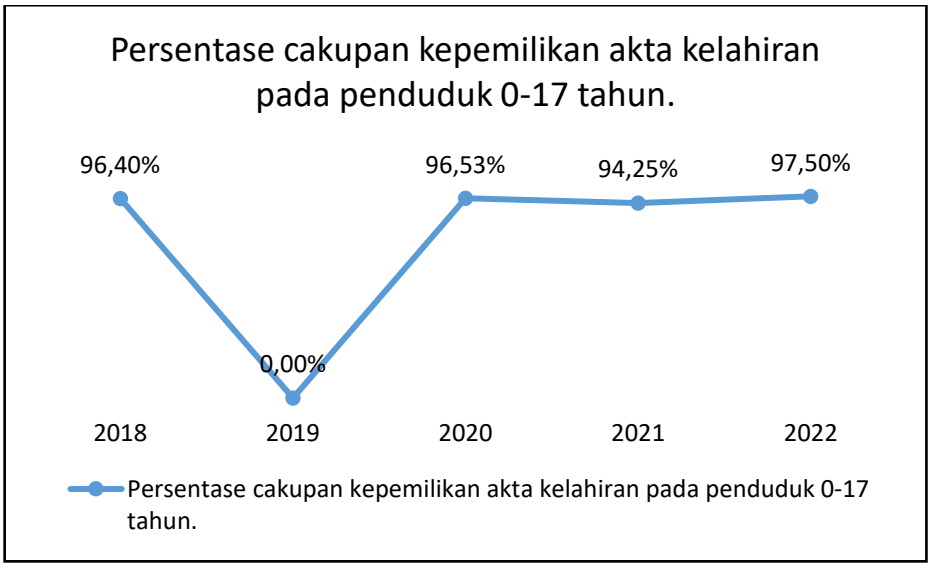

Gambar 30
Grafik Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun, Tahun 2018 – 2022

h) Target 16.10 (Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional)

1) Indikator 16.10.1.(b) - Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

Data Tidak Tersedia





2) Indikator 16.10.1.(c) - Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.

Tindak kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga masih dianggap sebagai masalah pribadi dan bisa menimbulkan aib keluarga, sehingga banyak warga yang tidak berani melaporkan permasalahan tersebut. Kekerasan ini terjadi mayoritas karena masalah ekonomi keluarga serta usia pernikahan dini yang menyebabkan secara mental masih cukup labil. Seiring dengan sosialisasi dan perlatihan terkait dengan penanganan korban kekerasan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi, masyarakat sudah berani untuk melaporkannya bila terjadi tindak kekerasan baik dari korban maupun dari warga setempat kejadian.

Kesadaran masyarakat khususnya perempuan di Kota Jambi untuk melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga (Perempuan dan Anak-anak) mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2018 hingga tahun 2020, dimana tahun 2018 terjadi pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak Sebanyak 85 kasus, meningkat pada tahun 2020 Mencapai 130 kasus, namun terjadi penurunan kasus dari tahun 2020 hingga tahun 2022 menjadi 111 kasus. Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak-anak dari tindakan kekerasan dari tahun 2018-2022 cenderung meningkat kemudian menurun, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak semua pengaduan dapat diselesaikan 100%.



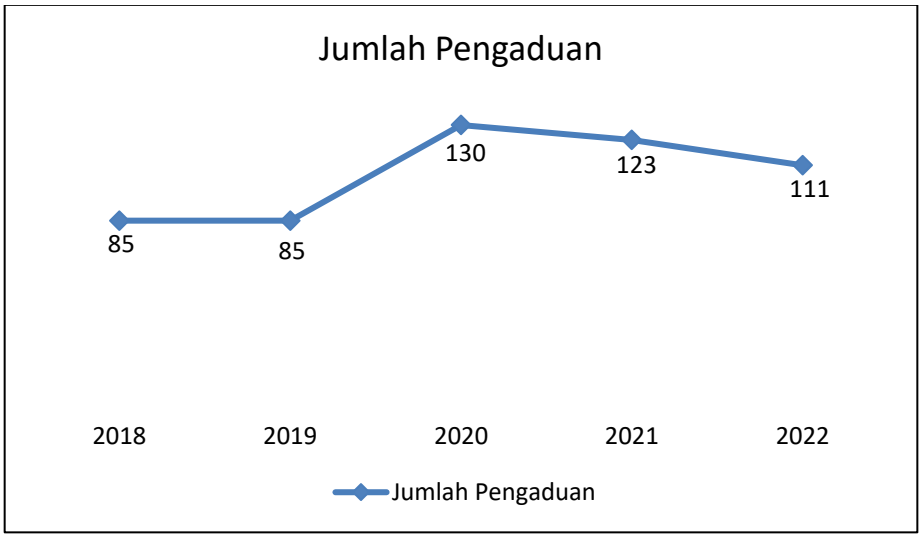

Gambar 31
Pengaduan Perlindungan Perempuan
Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan di Kota Jambi Tahun 2018-2022
Sumber : DPMPPA Kota Jambi, 2023

3) Indikator 16.10.2.(a) - Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif

Data Tidak tersedia

i) Target 16.b (Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan)

1) Indikator 16.b.1.(a) - Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.

Data Tidak tersedia



MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.

Fokus dari tujuan terakhir dari pembangunan berkelanjutan adalah membina kemitraan global untuk meraih tujuan pembangunan berkelanjutan. Secara rinci capaian RAD Kota Jambi untuk sasaran ke 17 adalah sebagai berikut:

Tabel 56

Status Capaian Tujuan ke – 17 SDG's Kota Jambi

Kode Indikator	Nama Indikator	Baseline				Target Nasional 2022	Target Capaian			GAP	Status	Sumber Data
		2018	2019	2020	2021		Tidak Terpenuhi	Hanpir Terpenuhi	Terpenuhi			
Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.												
17.1.1.*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	N/A	N/A	10,37	N/A	10,18%					-	Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda)
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	N/A	N/A	8,57	N/A	8,37					-	Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda)
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	N/A	N/A	50,05	N/A	52,24					-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi /Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda)
Negara-negara maju melaksanakan secara penuh komitmen atas bantuan pembangunan (Official Development Assistance ODA) termasuk komitment dari banyak negara maju untuk mencapat target 0.7 persen dari pendapatan nasional bruto untuk pembangunan (ODA/GNI) bagi negara berkembang dan 0.15 samapi 0,2 persen ODA/GNI kepada negara kurang berkembang penyedia ODA didorong untuk mempertimbangkan penetapan target untuk memberikan paling tidak 0,20 persen dari ODA/GNI untuk negera kurang berkembang												
17.2.1.(a)	Proporsi ODA terhadap PDB dan PNB											Bukan Disagregasi Kota
Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.												
17.3.2.(a)	Proporsi volume remitansi PMI (dalam US dollars) terhadap PDB.											Bukan Disagregasi Kota
Membantu negara berkembang untuk mendapatkan keberlanjutan utang jangka panjang melalui kebijakan-kebijakan yang terkoordinasi yang ditujukan untuk membantu pembiayaan utang, keringanan utang dan restrukturisasi utang, yang sesuai, dan menyelesaikan utang luar negeri dari negara miskin yang berutang besar untuk mengurangi												
17.4.1*	Proporsi pembayaran utangdan bunga (*Debt Service*) terhadap ekspor barang dan jasa.											Bukan Disagregasi Kota
Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.												
17.6.1.(a)	Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (*fixed broadband*) terhadap total rumah tangga											Bukan Disagregasi Kota
17.6.1.(b)	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif).											Bukan Disagregasi Kota
Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.												
17.8.1*	Persentase pengguna internet.	55,55%	65,93%	69,59%	79,42%	79,2			80,60%			Diskominfo
Meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif dan sesuai target di negara berkembang untuk mendukung rencana nasional untuk melaksanakan seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan triangular												
17.9.1.(a)	Jumlah pendanaan											Bukan Disagregasi Kota





Kode Indikator	Nama Indikator	Baseline				Target Nasional 2022	Target Capaian			GAP	Status	Sumber Data
		2018	2019	2020	2021		Tidak Terpenuhi	Hanpir Terpenuhi	Terpenuhi			
	kegiatan kerja sama pembangunan internasional termasuk KSST											
17.9.1.(b)	Jumlah program/kegiatan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular											Bukan Disagregasi Kota
Menggalakkan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, tidak diskriminatif dan adil di bawah *the World Trade Organization* termasuk melalui kesimpulan dari kesepakatan di bawah *Doha Development Agenda.*												
17.10.1.(a)	Jumlah PTA/FTA/CEPA yang disepakati											Bukan Disagregasi Kota
Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.												
17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk nonmigas.											Bukan Disagregasi Kota
Meningkatkan stabilitas makroekonomi global, termasuk melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan.												
17.13.1*	Tersedianya *Dashboard Makroekonomi.*											Bukan Disagregasi Kota
Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.												
17.17.1.(a)	Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun.											Bukan Disagregasi Kota
17.17.1.(b)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13 Proyek (Belum ditargetkan sebelumnya)				▼	Sekretariat Daerah
17.17.1.(c)	Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					-	Sekretariat Daerah
Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkansecara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.												
17.18.1.(a)	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.											Bukan Disagregasi Kota
17.18.1.(b)	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.											Bukan Disagregasi Kota
17.18.2*	Jumlah negara yang memiliki undang-undang statistik nasional yang tunduk pada Prinsip-prinsip fundamental Statistik Resmi											Bukan Disagregasi Kota
17.18.3*	Jumlah negara dengan Perencanaan Statistik Nasional yang didanai dan melaksanakan rencananya											Bukan Disagregasi Kota





Kode Indikator	Nama Indikator	Baseline				Target Nasional 2022	Target Capaian			GAP	Status	Sumber Data
		2018	2019	2020	2021		Tidak Terpenuhi	Hanpir Terpenuhi	Terpenuhi			
	berdasar sumber pendanaan.											
Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.												
17.19.1.(a)	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik.											Bukan Disagregasi Kota
17.19.1.(b)	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar.											Bukan Disagregasi Kota
17.19.2.(a)	Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.											Bukan Disagregasi Kota
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (*Vital Statistics Register*).					Ada			Ada		●	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

● Tercapai ▶ Akan Tercapai/membaik ▼ Perlu Perhatian Khusus - Data Tidak Tersedia

- **TPB Perlu Perhatian Khusus**

  Pada analisis capaian TPB Tujuan ke-17 Menguatkan Sarana Pelaksanaan Dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan, terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian khusus adalah indikator 17.17.1.(b) Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

- **TPB Perlu Adanya Pendalaman**

  Sedangkan capaian indikator yang tidak memiliki data perlu adanya pendalaman, data tidak tersedia disebakan oleh beberapa hal seperti kegiatan tidak match dengan nomenklatur indikator TPB atau Indikator TPB tidak dengan kewenangan daerah. Sehingga indikator yang tidak memiliki data perlu perhatian khusus untuk mencapai trend capaian membaik. Capaian TPB yang tidak memiliki data terdapat pada indikator 17.1.1.* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya, Indikator 17.1.1.(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB, indikator 17.1.2* Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestic, dan indikator 17.17.1.(c) Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi.





a) Target 17.1 (Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya)

1) Indikator 17.1.1* - Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya.

Data Tidak Tersedia

2) Indikator 17.1.1.(a) - Rasio penerimaan pajak terhadap PDB

Data Tidak Tersedia

b) Target 17.8 (Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi)

1) Indikator 17.8.1* - Persentase Pengguna Internet

Persentase Pengguna Internet digunakan Untuk mengukur pembangunan masyarakat di bidang teknologi informasi, serta perkembangan masyarakat digital. Berdasarkan data Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Jambi Tahun 2022, persentase penduduk 5 tahun ke atas yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir sebesar 80,60%.

Tabel 57
Persentase Anggota Rumah Tangga Berusia 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet selama Tiga Bulan Terakhir 2022

No	Karakteristik	Mengakses Internet
Jenis Kelamin		
1	Laki-Laki	81,17
2	Perempuan	74,60
Kuintil Pengeluaran		
3	40 Persen Terbawah	70,33
4	40 Persen Tengah	85,46
5	20 Persen Teratas	91,01
Pendidikan Tertinggi ART		
6	SD ke Bawah	66,83
7	SMP ke Atas	83,90
Kota Jambi		**80,60**

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Jambi, 2022



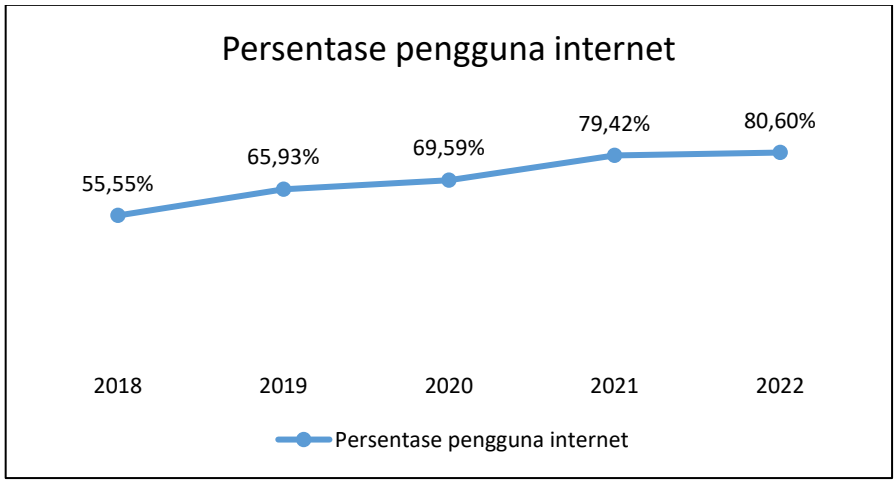

Gambar 32
Grafik Persentase Penggunaan Internet
Tahun 2018 – 2022

c) Target 17.17 (Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama)

2) Indikator 17.17.1.(b) - Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) adalah sebuah model kerjasama di mana pemerintah bekerja sama dengan badan usaha atau sektor swasta untuk melaksanakan proyek infrastruktur atau proyek lainnya. Proyek-proyek yang dapat dijalankan dengan skema KPBU biasanya adalah proyek-proyek besar yang memerlukan investasi signifikan.

Berdasarkan data jumlah kerjasama pemerintah dan badan usaha (KBPU) dari tahun 2018-2022 ceenderung mengalami fluktuasi dimana capaian kinerja tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebanyak 53 kerjasama dan terjadi penurunan sebesar 7,06% jumlah kerjasama pada tahun 2022 hanya 13 kerja sama.



Tabel 58
Jumlah Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

No	Indikator	Capaian Kinerja				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Nilai LPPD	2,9893 (Tinggi)	Hasil belum keluar	Hasil belum keluar	Hasil belum keluar	Hasil belum keluar
2	Jumlah Peraturan Daerah yang ditebitkan	7	10	10	6	7
3	Jumlah Peraturan Kepala Daerah yang diterbitkan	88	66	78	39	46
4	Jumlah Produk Hukum daerah yang tersosialisasikan	4 Perda 1 Perwal	4 Perda 3 Perwal	1 Perda 3 Perwal	2 Perda 2 Perwal	1 Perda 4 Perwal
5	Persentase paket pengadaan B/J yang diumumkan melalui LPSE Kota Jambi	100%	100%	100%	100%	100%
6	Nilai LKJip	B	B	A	A	Hasil belum keluar
7	Jumlah kerjasama daerah	29	52	37	53	13
8	Persentase publikasi kegiatan KDH/WKDH	100%	100%	100%	100%	1005
9	Persentase pemenuhan pelayanan KDH/WKDH	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Bagian Organisasi Setda-Kota Jambi Kota Jambi, 2023

3) Indikator 17.17.1.(c) - Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi.

Data Tidak Tersedia

d) Target 17.19 (Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang)

1) Indikator 17.19.2.(b) - Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (*Vital Statistics Register*).

TFR (*Total Fertility Rate*) yang merupakan ukuran jumlah rata-rata anak yang diharapkan akan dilahirkan oleh seorang wanita selama hidup reproduktifnya. TFR mencerminkan tingkat fertilitas rata-rata dalam suatu populasi. Jika TFR lebih dari 2,1, ini menunjukkan bahwa populasi tersebut memiliki tingkat kelahiran yang cukup tinggi untuk mempertahankan atau meningkatkan jumlah penduduk. Sebaliknya, jika TFR kurang dari 2,1, ini menunjukkan tingkat kelahiran di bawah tingkat kesuburan yang diperlukan untuk pertumbuhan.





Tabel 59
Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur

Kabupaten/Kota	Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur					
		15-19	20-24	25-29	35-39	40,44	45,49
Kerinci	2,20	47,20	104,90	144,30	82,10	45,50	13,00
Merangin	2,18	2,18	40,60	104,50	138,60	89,00	48,70
Sarolangun	2,64	2,64	62,10	115,60	145,30	110,30	64,50
Batang Hari	2,27	2,27	50,10	107,50	100,90	115,20	46,80
Muaro Jambi	2,19	2,19	21,70	101,00	140,60	94,60	60,30
Tanjab Timur	2,36	2,36	63,00	102,30	120,30	107,10	48,90
Tanjab Barat	2,39	2,39	50,80	116,70	130,80	105,80	56,10
Tebo	2,45	2,45	46,80	127,30	131,80	95,30	59,30
Bungo	2,23	2,23	38,60	107,90	124,20	99,80	51,70
Kota Jambi	**2,08**	2,08	17,50	95,30	134,30	93,70	57,20
Kota Sungai Penuh	2,19	2,19	17,40	88,60	155,70	104,90	57,00
Provinsi Jambi	***2,28***	***2,28***	***50,47***	***101,37***	***130,47***	***99,26***	***52,25***

Sumber :BPS Provinsi Jambi, Tahun 2023

Tabel 60
Angka Kematian Ibu Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Jumlah Kematian Ibu
Kerinci	7
Merangin	6
Sarolangun	6
Batang Hari	8
Muaro Jambi	9
Tanjab Timur	5
Tanjab Barat	5
Tebo	8
Bungo	9
Kota Jambi	**4**
Kota Sungai Penuh	3
Provinsi Jambi	**70**

Sumber : Seksi Kesga dan Gizi Masyarakat Bidang Kesmas,2022

Tabel 61
Angka Kematian Bayi, Anak, dan Angka Kematian Balita Menurut Kabupaten/Kota,Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Angka Kematian Bayi (IMR)	Angka Kematian Anak (CMR)	Angka Kematian Balita (USMR)
Kerinci	19,60	5,51	25,11
Merangin	16,11	2,67	18,78
Sarolangun	18,30	4,70	23,00
Batang Hari	14,73	2,53	17,27
Muaro Jambi	14,05	2,29	16,34
Tanjab Timur	16,82	2,77	19,59
Tanjab Barat	19,31	3,56	22,87
Tebo	18,22	3,08	21,31
Bungo	17,77	2,99	20,76
Kota Jambi	**13,02**	2,07	15,09
Kota Sungai Penuh	16,84	2,98	19,82
Provinsi Jambi	**19,60**	**5,51**	**25,11**

Sumber :BPS Provinsi Jambi, Tahun 2023



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PEMERINTAH DAERAH KOTA JAMBI

PROSIDING PENYUSUNAN KLHS RPJMD DAN RPJPD KOTA JAMBI

TAHUN ANGGARAN 2023



01. SK PEMBENTUKAN POKJA KLHS RPJMD DAN KLHS RPJPD

WALIKOTA JAMBI

PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR 386 TAHUN 2023

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2025-2030 DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2025-2045 TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA JAMBI,

Menimbang :

a. bahwa kajian lingkungan hidup strategis merupakan rangkaian analisis yang sistematis menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, kebijakan, rencana, dan/atau program;

b. bahwa untuk melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi tahun 2025-2030 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2045 membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota Jambi tentang Kelompok Kerja Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi tahun 2025-2030 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2045 Tahun Anggaran 2023.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);





3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);





10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI TENTANG KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2025-2030 DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2025-2045 TAHUN ANGGARAN 2023.**

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi tahun 2025-2030 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2045 Tahun Anggaran 2023, dengan Susunan Anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini;

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan forum koordinasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Kota Jambi, dengan tugas sebagai berikut:

a. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK);
b. melaksanakan Konsultasi Publik;
c. membuat dan melaksanakan KLHS RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2030 dan RPJPD Kota Jambi Tahun 2023-2045;
d. melaksanakan pengintegrasian hasil KLHS RPJMD Kota Jambi tahun 2025-2030 dan RPJPD Kota Jambi tahun 2025-2045 kedalam Kebijakan, Rencana dan/atau Program;
e. melaksanakan penjaminan kualitas KLHS RPJMD Kota Jambi tahun 2025-2030 dan RPJPD Kota Jambi tahun 2025-2045;
f. melaksanakan pendokumentasian KLHS RPJMD Kota Jambi tahun 2025-2030 dan RPJPD Kota Jambi tahun 2025-2045 dan;
g. melaksanakan validasi KLHS Perubahan RPJMD Kota Jambi tahun 2025 - 2030 dan RPJPD Kota Jambi tahun 2025-2045 ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Walikota Jambi melalui Sekretaris Daerah Kota Jambi;





KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Jambi
Pada Tanggal 02 Oktober 2023

WALIKOTA JAMBI,

SYARIF FASHA

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Sekretaris Daerah Kota Jambi;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi;
3. Inspektur Kota Jambi di Jambi;
4. Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi di Jambi;
5. Arsip.





LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR : 386 TAHUN 2023
TANGGAL : 02 OKTOBER 2023
TENTANG : KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2025-2030 DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2025-2045 TAHUN ANGGARAN 2023.

SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2025-2030 DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2025-2045 TAHUN ANGGARAN 2023.

I. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
II. Wakil Ketua : Kepala BAPPEDA Kota Jambi
III. Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
IV. Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
V. Anggota :
1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi
4. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Jambi
5. Kepala Dinas Pengendalian Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi
6. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi
7. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Jambi
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi
9. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi
10. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
11. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Jambi
12. Kepala Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Bapeda Kota Jambi
13. Kepala Bidang Penataan Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan DLH Kota Jambi
14. Ketua LSM Pinse (Pinang Sebatang) Provinsi Jambi





15. Henri Wibowo,ST,ME Fungsional Pedal Ahli Muda DLH Kota Jambi
16. Esti Susilawati S, SE, M.Si Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda DLH Kota Jambi
17. Marlon Sutoyo, SE Fungsional Pedal Ahli Muda DLH Kota Jambi
18. Defiana Nasrun, ST Fungsional Penyuluh Ahli Muda DLH Kota Jambi.
19. Arbi Rifaul Khusna, S.Si. Staf Bidang PPLH DLH Kota Jambi

VI. Tim Ahli : Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen KLHS RPJMD

1. Doni Patria, ST, M.Si (Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota)
2. Arif Dwinanto, ST (Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota)
3. Nur Kholisoh, ST (Ahli Lingkungan)
4. Moch. Rizal Budiman, ST (Ahli Pemetaan)

1. Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen KLHS RPJPD
2. Heruza Putra, Sp. M.Si (Ahli Pemetaan)
3. Suci Rachmawati, ST (Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota)
4. Dennisa Ramadani, ST (Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota)

Moch Ricky Adha Budiman, ST (Ahli Lingkungan)

WALIKOTA JAMBI,

SYARIF FASHA





02. RINGKASAN KEGIATAN PENYUSUNAN KLHS RPJMD DAN RPJPD KOTA JAMBI TAHUN 2023

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dimulai disusun pada bulan Oktober tahun 2023 sampai bulan Desember 2023 konsultan penyusun KLHS bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Selain itu terdapat juga Organiasai Perangkat Daerah (OPD) dan beberapa pemangku kepentingan yang ikut berkontribusi dalam penyusunan Dokumen KLHS INI. Setiap stakeholder mewakili masing-masing bidang terkait, diantaranya meliputi:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi
2. Dinas Pendidikan Kota Jambi
3. Dinas Kesehatan Kota Jambi
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Jambi
5. Dinas Pengendalian Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi
6. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi
7. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Jambi
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi
9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi
10. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
11. Bagian Perekonomian Setda Kota Jambi
12. Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Bapeda Kota Jambi
13. Ketua LSM Pinse (Pinang Sebatang) Provinsi Jambi
14. Dr. Ir. Rosyani, M.Si (Dosen Universitas Jambi / Ahli Ilmu Lingkungan)
15. Dr. Ir. Aswandi, M.Si (Dosen Universitas Jambi / Ahli Hidrologi)

Rapat FGD Laporan Pendahuluan dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2023 di Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. Acara diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi berlangsung 1 hari adapun kegiatan berlangsung terdiri dari pemaparan materi (penjelasan kebijakan umum pembangunan berkelanjutan, kondisi umum daerah, capaian indicator TPB, kondisi pencapaian TPB) oleh tim penyusun dan dilanjutkan diskusi dengan para peserta rapat FGD laporan pendahuluan dan ditutup dengan pembacaan berita acara.

Dilanjutkan dengan Rapat FGD Laporan Akhir pada tanggal 11 Desember 2023, di Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. Acara diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi berlangsung 1 hari adapun kegiatan berlangsung terdiri dari pemaparan materi (scenario Pembangunan berkelanjutan, penjelasan isu





strategis, permasalahan dan sasaran strategis serta penjelasan alternatif rekomendasi skenario dan program RPJMD kota jambi) oleh tim penyusun dan dilanjutkan diskusi dengan para peserta rapat FGD laporan akhir dan ditutup dengan pembacaan berita acara.



03. RAPAT LAPORAN PENDAHULUAN KLHS RPJPD DAN RPJMD KOTA JAMBI TAHUN 2023

PEMERINTAH KOTA JAMBI
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Jenderal Basuki Rahmat Kota Baru NO.01 Telp. (0741) 40463-40827
Fax.(0741) 40032
J A M B I - 36128

Jambi, 26 September 2023

Nomor : LH.01.00/2070/DLH.2.1/IX/2023
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Undangan FGD Laporan Pendahuluan KLHS RPJMD dan RPJPD Kota Jambi Tahun 2023**

Kepada Yth,
Sdr. (daftar terlampir)
di -
Jambi

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa berlaku RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 dan RPJPD Kota Jambi Tahun 2005-2025, maka untuk penyusunan dokumen RPJMD dan RPJPD terbaru diperlukan Dokumen KLHS RPJMD dan KLHS RPJPD. Sehubungan dengan hal tersebut maka akan dilaksanakan Focus Group Discusion (FGD) untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan dokumen tersebut, yang akan dilakasanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu / 04 Oktober 2023
Waktu : 08.00 WIB s/d selesai
Acara : Rapat Laporan Pendahuluan Penyusunan Dokumen KLHS RPJMD dan KLHS RPJPD Tahun Anggaran 2023
Tempat : Aula Adiwiyata DLH Kota Jambi

Demikian disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terimakasih.

SEKRETARIS DAERAH
KOTA JAMBI

Drs. H.A. RIDWAN, M. Si
Pembina Utama Madya
NIP.19661107 198512 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Walikota Jambi di Jambi (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
3. A r s i p



Lampiran
Nomor : LH.01.00/2070/DLH.2.1/IX/2023
Tanggal : 26 September 2023
Perihal : Undangan Rapat Laporan Pendahuluan Penyusunan Dokumen KLHS RPJMD dan KLHS RPJPD Tahun Anggaran 2023

1 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi
3 Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi
4 Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Jambi
5 Kepala Dinas Pengendalian Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi
6 Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi
7 Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Jambi
8 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi
9 Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi
10 Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
11 Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Jambi
12 Kepala Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Bapeda Kota Jambi
13 Kepala Bidang Penataan Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan DLH Kota Jambi
14 Ketua LSM Pinse (Pinang Sebatang) Provinsi Jambi
15 Dr. Ir. Rosyani, M.Si (Dosen Universitas Jambi / Ahli Ilmu Lingkungan)
16 Dr. Ir. Aswandi, M.Si (Dosen Universitas Jambi / Ahli Hidrologi)
17 Henri Wibowo,ST, ME (Fungsional Pedal Ahli Muda) DLH Kota Jambi
18 Esti Susilawati S, SE, M.Si (Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda) DLH Kota Jambi
19 Marlon Sutoyo, SE (Fungsional Pedal Ahli Muda) DLH Kota Jambi
20 Erwin Paulus Barasa, SKM (Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda) DLH Kota Jambi
21 Defiana Nasrun, ST (Fungsional Penyuluh LH Ahli Muda) DLH Kota Jambi
22 Reni Sesmawati, SP, M.Si (Fungsional Pedal Ahli Muda) DLH Kota Jambi
23 Syawaliah, ST (Fungsional Penyuluh LH Ahli Pertama) DLH Kota Jambi
24 Doni Patria, ST, M.Si (Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota)
25 Arif Dwinanto, ST (Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota)
26 Nur Kholisoh, ST (Ahli Lingkungan)
27 Moch. Rizal Budiman, ST (Ahli Pemetaan)
28 Heruza Putra, Sp. M.Si (Ahli Pemetaan)
29 Suci Rachmawati, ST (Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota)
30 Dennisa Ramadani, ST (Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota)
31 Moch. Ricky Adha Budiman, ST (Ahli Lingkungan)
32 Staf Bidang PPLH DLH Kota Jambi

SEKRETARIS DAERAH
KOTA JAMBI

Drs. H.A. RIDWAN, M. Si
Pembina Utama Madya
NIP.19661107 198512 1 001





Adapun beberapa masukan yang disampaikan oleh peserta rapat untuk selanjutnya menjadi bahan penyempurnaan produk adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Masukan dari OPD dan Lembaga pada FGD Laporan Pendahuluan

Stakeholder	Masukan
Konsultan	Isu prioritas : alih fungsi lahan, resiko bencana banjir dan genangan, pengelolaan persampahan, penurunan kualitas air, tata Kelola lingkungan dan kualitas udara;
Dr. Ir. Rosyani, M.Si (Dosen Universitas Jambi/Ahli Ilmu Lingkungan) :	• KLHS RPJMD dan RPJPD adalah tanggung jawab Bersama, ruh nya KLHS adalah pemikiran dari OPD terkait secara bersama; • Belum memuat Perpres Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; • Belum mengadopsi surat edaran terbaru terkait sistematika KLHS 2023 mulai dari bab 1-7; • Belum memuat tabel integrasi yang sesuai dengan surat edaran terbaru; • Isu prioritas yang dipaparkan harus tergambar pada bab 3 dokumen KLHS; • sinkronisasi isu dengan rancangan awal RPJPD dan RPJMD yang sedang disusun di Bappeda Kota Jambi; • Isu transportasi merupakan isu penting di tahun 2045; • dokumen KLHS RPJPD dan RPJMD yang akan disusun diintegrasikan dengan dokumen green road yang sudah disusun;
Dr. Ir. Aswandi, M.Si (Dosen Universitas Jambi/Ahli Ilmu Lingkungan)	• Water system di Jambi ada 2 yaitu Sungai dan danau, bagaimana konektivitas yang terdapat di Kota Jambi di 20 tahun yang akan datang perlu menjadi pertimbangan; • Sungai dan danau dapat di rekayasa menjadi system jaringan transportasi; • Sedimentasi Sungai Batanghari sudah cukup tinggi; • Isu resiko banjir berkaitan dengan system air dalam bentuk pintu air dan lainnya; • Alih fungsi lahan dapat dihubungkan dengan teknologi zero water/zero run off seperti biopori dan kolam retensi/menyatu dengan daerah wisata; • Perlu penegasan mengenai monitoring bangunan yang melanggar aturan contohnya ruko-ruko didaerah simpang rimbo; • Tanggapan : • Kota Jambi tidak memiliki grid jalan; • Pergerakan penduduk luar kota diharapkan hanya berada di barat dan timur kota jambi; • Perlu sosialisasi mengenai KDB KDH pada kepada perangkat daerah tingkat kelurahan dan Kecamatan;
Henri Wibowo, ST, ME (Fungsional Pedal Ahli Muda) DLH Kota Jambi	• Perlu pengawasan target Pembangunan peogram yang tertuang didalam RPJD dan RPJMD; • RPJMD dan RPJPD yang disusun harus sudah memiliki target sampai tahun 2045; • Isu alih fungsi lahan di kawasan sempadan Sungai Batanghari;





Stakeholder	Masukan
Bappeda Kota Jambi	• Perpres Nomor 111 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dapat dipedomani dalam penyusunan dokumen KLHS RPJMD dan RPJPD; • Dalam penyusunan RPJMD dan RPJPD dapat mengadopsi Rencana induk lalu lintas sudah disusun Tahun 2022;
Dinas Pengendalian Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi	Terkait isu strategis yang menjadi bahan pertimbangan penyusunan dokumen dikoordinasikan diluar rapat
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Jambi	• Trend wisata untuk ditahun yang akan datang, sejalan dengan Pembangunan berkelanjutan. Maka konsep pariwisata untuk ditahun yang akan datang berupa pariwisata yang menjamin ketahanan pangan; • Bagaimana memanen air hujan dan menyimpannya; • Perlu merumuskan strategis terkait ketahanan air di masa yang akan datang; • Danau sipin dapat digunakan sebagai tempat penyimpanan/penampungan air dan sebagai destinasi wisata;
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Jambi	• Pasar di Kota Jambi belum maksimal dalam penerapan pasar modern yang sesuai SNI; • Rencana infrastruktur untuk lahan parkir perlu direncanakan sesuai dengan jenis pasar, contohnya pasar elektronik;
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi	• Pertanian di Kota Jambi sangat terbatas; • Kenali besar direncanakan menjadi Kawasan peternakan; • Balai benih yang terdapat di Paal 10 sering terkena banjir, sehingga benih-benih yang disiapkan tidak bisa diselamatkan;
Dinas PU Kota Jambi	• Terkait isu alih fungsi lahan kaitannya dengan tata ruang, berhubungan dengan Infrastruktur seperti drainase dan sarana pengelolaan sampah; • Sistem jaringan jalan di Kota Jambi belum terdapat system sekunder yang ditetapkan; • Isu pengendalian susah dikendalikan jika tidak ada Kerjasama antar stake holder;
Dinas Kesehatan Kota Jambi	• Seiring dengan berkembangnya Kota Jambi maka akan terjadi perkembangan jumlah penduduk sehingga diperlukan fasilitas pelayanan Kesehatan di Kota Jambi; • Pengelolaan limbah di daerah Jambi – Seberang hamper 100% memiliki septictank tidak kedap air sehingga dapat mencemarkan dan penurunan kualitas air;
Pendidikan Kota Jambi	• Pertambahan penduduk merupakan isu utama dimasa yang akan mendatang; • Limbah energi baru dan terbarukan merupakan salah satu isu penting;
Kepala Bidang Dinas LH Kota Jambi	Dampak Pembangunan di Kota Jambi kurang diperhatikan sehingga menyebabkan masalah lingkungan seperti kemacetan lalu lintas
Erwin Paulus Barasa, SKM (Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda)	Isu persampahan terdapat sampah elektronik yang belum terkelola, maka kedepannya perlu menyusun strategis untuk permasalahan ini



DOKUMENTASI
RAPAT FGD LAPORAN PENDAHULUAN










04. RAPAT FGD LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN DOKUMEN KLHS RPJMD DAN KLHS RPJPD KOTA JAMBI TAHUN 2023

PEMERINTAH KOTA JAMBI
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Jend.Basuki Rahmat No.01 Kota Baru Jambi 36128
Telp. (0741) 40463- 40827 Fax (0741) 40032

Jambi, 06 Desember 2023

Nomor : LH.01.00/2728/DLH.2.1/XII/2023
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Ralat Undangan FGD Laporan Akhir KLHS RPJMD dan RPJPD Kota Jambi Tahun 2023**

Kepada Yth,
Sdr. (daftar terlampir)
di -
Jambi

Sehubungan dengan surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional No. 131/UND-200.PB-01/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023 perihal Undangan Rapat Koordinasi Lintas Sektor yang di tujukan kepada Pemerintah Kota Jambi. Rapat tersebut bersamaan dengan FGD Penyusunan Dokumen KLHS RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2030 dan KLHS RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045 Tahun Anggaran 2023. Tenaga Ahli Tim Penyusun KLHS ikut dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektor. Berkenan dengan hal tersebut diatas maka terhadap surat kami No. LH.01.00/2708/DLH.2.1/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023 perihal Undangan FGD, di ralat pelaksanaanya yang semula akan dilakasanakan pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 di undur menjadi :

Hari/Tanggal : Senin / 11 Desember 2023
Waktu : 09.00 WIB s/d selesai
Acara : Rapat Laporan Akhir Penyusunan Dokumen KLHS RPJMD dan KLHS RPJPD Tahun Anggaran 2023
Tempat : Aula Adiwiyata DLH Kota Jambi

Demikian disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terimakasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh:

a.n.WALIKOTA JAMBI
Sekretaris Daerah
Drs. H. A. RIDWAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661107 198512 1 001

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atauhasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan cara scan qrcode pada surat

Balai Sertifikasi Elektronik





Lampiran
Nomor : LH.01.00/2728/DLH.2.1/XII/2023
Tanggal : 6 Desember 2023
Perihal : Ralat Undangan Rapat Laporan Akhir Penyusunan Dokumen KLHS RPJMD dan KLHS RPJPD Tahun Anggaran 2023

1 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi
3 Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi
4 Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Jambi
5 Kepala Dinas Pengendalian Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi
6 Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi
7 Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Jambi
8 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi
9 Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi
10 Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
11 Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Jambi
12 Kepala Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Bapeda Kota Jambi
13 Kepala Bidang PPLH Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
14 Kepala Bidang Penataan Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan DLH Kota Jambi
15 Ketua LSM Pinse (Pinang Sebatang) Provinsi Jambi
16 Dr. Ir. Rosyani, M.Si (Dosen Universitas Jambi / Ahli Ilmu Lingkungan)
17 Dr. Ir. Aswandi, M.Si (Dosen Universitas Jambi / Ahli Hidrologi)
18 Henri Wibowo,ST, ME (Fungsional Pedal Ahli Muda) DLH Kota Jambi
19 Esti Susilawati S, SE, M.Si (Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda) DLH Kota Jambi
20 Marlon Sutoyo, SE (Fungsional Pedal Ahli Muda) DLH Kota Jambi
21 Erwin Paulus Barasa, SKM (Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda) DLH Kota Jambi
22 Defiana Nasrun, ST (Fungsional Penyuluh LH Ahli Muda) DLH Kota Jambi
23 Reni Sesmawati, SP, M.Si (Fungsional Pedal Ahli Muda) DLH Kota Jambi
24 Syawaliah, ST (Fungsional Penyuluh LH Ahli Pertama) DLH Kota Jambi
25 Doni Patria, ST, M.Si (Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota)
26 Arif Dwinanto, ST (Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota)
27 Nur Kholisoh, ST (Ahli Lingkungan)
28 Moch. Rizal Budiman, ST (Ahli Pemetaan)
29 Heruza Putra, Sp. M.Si (Ahli Pemetaan)
30 Suci Rachmawati, ST (Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota)
31 Dennisa Ramadani, ST (Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota)
32 Moch. Ricky Adha Budiman, ST (Ahli Lingkungan)
33 Staf Bidang PPLH DLH Kota Jambi

Ditandatangani secara elektronik oleh:

a.n.WALIKOTA JAMBI
Sekretaris Daerah
Drs. H. A. RIDWAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661107 198512 1 001

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atauhasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan cara scan qrcode pada surat

Balai Sertifikasi Elektronik





DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Senin / 11 Desember 2023
Jam : 09.00 WIB s.d selesai
Tempat : Aula Adiwiyata DLH Kota Jambi
Acara : FGD (Focus Group Discusion) Penyusunan KLHS RPJMD dan RPJPD Tahun 2023

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	Dr. H. Ardi, SE. Msi	Kadis LH	1.
2	M. Yunius, ST, MT	Sekretaris DLH	2.
3	Dodon Rahmana	Kabid PPLH	3.
4	Khairul Fauzi	DLH	4.
5	Husni Thamrin SE	Ka/KSM Pinang Sebatang	5.
6	Paldy Sinuraya	DALKAR Kota Jambi	6.
7	Nur Kholisoh	Konsultan	7.
8	Suci Rachmawati	konsultan	8.
9	Denissa Rahmadhani	konsultan	9.
10	Ahmad Darnah	DPKP kota	10.
11	MARLON SUTOYO	DLH	11.
12	ERWIN PAULUS B.	DLH	12.
13	Aswandi	Unja	13.
14	SUARLIS	DINKES	14.
15	Syawalrah	DLH	15.
16	Cahyo S.	Disparbud	16.
17	Henri Wibowo	DLH kota jmi	17.
18	Defiana	DLH	18.
19	Heruza putra	BKI	19.
20	Lufi A	DINAS TENAGA KERJA	20.
21	Farida Lahay	Bappeda	21.
22	Rudi Hartono.	Litbang Bappeda.	22.
23	IWAN R.	DIKDIK	23.
24	Lasmanto	PUPR	24.
25	Taufiq	Bag. Perekonomian	25.
26	Dony Patria	BI	26.



NO	NAMA	INSTANSI	INSTANSI
27	Rizal Budiman	KL	27.
28	Ricky Adha Budiman	KL	28.
29	ARIF DWINANTO	KONSULTAN	29.
30	Cikasati trialdi	DLH	30.
31	Catherine Ayu	DLH	31.
32	WIAH/UDI	DLH	32.
33	ITAWAN	DLH	33.
34	Nova Tiodora	DLH	34.
35	Tiya Maheisa P	DLH	35.
36	Agus Setiawan	DLH	36.
37	ERIZAL	DLH	37.
38	Andre	DLH	38.
39	Rena Krisyana	DLH	39.
40	Adelita	DLH	40.
41	Arbi Rizal Wibowo	DLH	41.
42	Jamh	DLH	42.
43	Roni Sesmarcot	DLH	43.
44	Kharisma Adipuro	DLH	44.
45	Nurjanah	DLH	45.
46	S. Martini	DLH	46.
47	HILMAN	DLH	47.
48	SUTISNO	DLH	48.
49	Najemah	DLH	49.
50	ENda	DLH	50.

Mengetahui,

Kabid. Perencanaan dan
Pengendalian Lingkungan Hidup
DLH Kota Jambi

Dadan Rudiana, S.Hut, M.Si
Pembina / IV.a
NIP. 19681213 198903 1 003

Jambi, Desember 2023

Pelaksana Kegiatan,

Marlon Sutoyo, SE
Penata / III.c
NIP. 19760929 2008021 2 004





Tabel 2. Masukan dari OPD dan Lembaga pada FGD Laporan Akhir

Stakeholder	Masukan
Dr. Ir. Aswandi, M.Si – Universitas Jambi	• Akses jalan utama menuju Kota Jambi yang terbatas • Tidak menyinggung potensi Sungai Batanghari dalam perencanaan kota (*water front city*), yang mana Sungai Batanghari memiliki potensi wisata, ekonomi dan sebagainya. • Pertumbuhan Kota Jambi lebih banyak diarahan oleh pengembang dibandingkan oleh pemerintah • Alternatif rekomendasi scenario dan program pada tujuan 6 dan 7 berkaitan dengan pengelolaan air dan akses energi • Memaksimalkan fungsi dari sungai-sungai jambi yang dijadikan sebagai pengendali banjir • Pintu tol jauh dari kota sehingga peluang keuntungan di Kota Jambi sedikit • Penyelsaian masalah di Pulau Pandan dengan membuka jalan ke danau tersebut • Danau Sipin sebagai salah satu potensi pariwisata dan mendorong Danau Sipin dan Danau Teluk menjadi *water city* • Banyaknya pelanggaran bangunan yang mengganggu jalan namun belum mendapatkan tindakan tegas dari pemerintah
Budi – Bappeda Kota Jambi	• Banjir Kota Jambi yang disebabkan oleh beberapa hal: - drainase yang kurang baik - Belum terdapat peta drainse subdas dan data peta kontur - Berkembangnya permukiman di sempadan Sungai • Tingginya harga pembebasan lahan sehingga pemda tidak mampu • Memberlakukan one way pada jalan yang memiliki LHR tinggi • Merencanakan pembangunan bangunan campuran untuk meminimalisir pelanggran bangunan dan tingginya backlog • Tingginya sedimentasi pada Sungai Batanghari sehingga alur pelayaran Sungai tidak beroperasi
Ketua LSM Pinse (Pinang Sebatang) Provinsi Jambi	• Menambahkan Indonesia Emas pada visi RPJPD 2025-2045 • Tingginya laju pembangunan bangunan namun tidak sejalan dengan pelebaran jalan • Perlu menata kembali bangunan yang tidak beraturan • Mengebalikan fungsi pasar • Hilangnya tagar water front city di Kota Jambi
Ida – Bappeda Kota Jambi	• Berrdasarkan aturan, indaktor TPB harus dikaitkan dengan kondisi umum daerah, daya dukung dan daya tampung, OPD dan nasional • Bagaimana kondisi daya dukung dan daya tampung di RPJMD dan RPJPD • Data emisi bersumber berbeda dengan data bappeda • Tidak adanya pemnanfaatan potensi Sungai Batanghari dalam isu KLHS • Data daya dukung dan daya tampung tidak terdapat di dokumen perlu disesuaikan dengan data Dinas Lingkungan Hidup





Stakeholder	Masukan
	• Pada tujuan 6 dan 7 perlu dimasukkan ke scenario alternatif perlu perhatian khusus karena pada kondisi eksisting kondisi sanitasi Kota Jambi masih memerlukan usaha lebih
Budi Siswanto – Dinas Pengendalian Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi	• Terdapat 160 kebakaran di kota jambi pada tahun 2023 yang mana dapat dikatakan cukup tinggi namun belum dimasukan ke dalam isu strategis
Laswanto – Dinas PUPR Kota Jambi	• Isu strategis KLHS sudah sesuai dan mengakomodir isu yang ada dalam RTRW
Henri Wibowo – Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi	• Terdapat beberapa data yang tidak update (contoh: perhitungan daya tampung air menggunakan tahun 2021) • Menambahkan rekomendasi tujuan 6



DOKUMENTASI
RAPAT FGD LAPORAN AKHIR








Sertifikat Pelatihan Penyusun KLHS



PUSAT STUDI LINGKUNGAN HIDUP
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

menyatakan bahwa

Dony Patria, S.T., M.Si.

telah mengikuti

PELATIHAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Gelombang 10 di Bandung pada tanggal 24 – 28 Februari 2020
dan kepadanya diberikan sertifikat dengan nomor
KLHS-10202005/I1.B04.1.1/LL/2020

Bandung, 28 Februari 2020
Kepala PSLH ITB,

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PUSAT STUDI LINGKUNGAN

Prof. Tjandra Setiadi, Ph.D., IPU.
NIP. 195609061982111001





PUSAT STUDI LINGKUNGAN HIDUP
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

menyatakan bahwa

Moch. Rizal Budiman, S.T.

telah mengikuti

PELATIHAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Gelombang 10 di Bandung pada tanggal 24 – 28 Februari 2020
dan kepadanya diberikan sertifikat dengan nomor
KLHS-10202004/I1.B04.1.1/LL/2020

Bandung, 28 Februari 2020
Kepala PSLH ITB,

Prof. Tjandra Setiadi, Ph.D., IPU.
NIP. 195609061982111001



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1.	**Posisi yang diusulkan**	:	**Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota**
2.	**Nama Personil**	:	Dony Patria, ST,Msi
3.	**Tempat dan Tanggal lahir**	:	Jambi,18 Juli 1981
4.	**Pendidikan**	:	S1 Teknik Planologi, Universitas Bung Hatta Tahun 2005 S2 Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi
5.	**Pendidikan Non Formal**		▪
6.	**Penguasaan Bahasa**	:	**Inggris** : Aktif
	Penguasaan Bahasa		**Indonesia** : Baik
7.	**Pengalaman kerja**	:	

Tahun 2020

Nama Proyek	:	**Konsultan Individual Bidang Tata Ruang di Provinsi Jambi**
Lokasi Proyek	:	Provinsi Jambi
Pengguna Jasa	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
Nama Perusahaan	:	
Uraian Tugas	:	1) Identifikasi kesahihan materi teknis 2) Identifikasi muatan materi teknis 3) FGD dan koordinasi antar sektor 4) Konsep perancangan kawasan 5) Rencana pengembangan dan penataan kawasan.
Waktu Pelaksanaan	:	1 Maret 2020 – 30 Desember 2020
Posisi Penugasan	:	Konsultan Individual
Status Kepegawaian pada Perusahaan	:	Tenaga Ahli tidak Tetap
Surat Referensi dari Pengguna Jasa	:	

Tahun 2019

Nama Proyek	:	**Konsultan Individual Bidang Tata Ruang di Provinsi Jambi**
Lokasi Proyek	:	Provinsi Jambi
Pengguna Jasa	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
Nama Perusahaan	:	
Uraian Tugas	:	1) Identifikasi kesahihan materi teknis





2) Identifikasi muatan materi teknis
3) FGD dan koordinasi antar sektor
4) Konsep perancangan kawasan
5) Rencana pengembangan dan penataan kawasan.

Waktu Pelaksanaan	:	1 Maret 2019 – 30 November 2019
Posisi Penugasan	:	Konsultan Individual
Status Kepegawaian pada Perusahaan	:	Tenaga Ahli tidak Tetap
Surat Referensi dari Pengguna Jasa	:	

Tahun 2018

Nama Proyek	:	**Penyempurnaan RDTR Perkotaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur**
Lokasi Proyek	:	Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Pengguna Jasa	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nama Perusahaan	:	
Uraian Tugas	:	1) Identifikasi kesahihan materi teknis 2) Identifikasi muatan materi teknis 3) FGD dan koordinasi antar sektor 4) Konsep perancangan kawasan 5) Rencana pengembangan dan penataan kawasan.
Waktu Pelaksanaan	:	18 September 2018 – 16 Desember 2018
Posisi Penugasan	:	Team Leader
Status Kepegawaian pada Perusahaan	:	Tenaga Ahli tidak Tetap
Surat Referensi dari Pengguna Jasa	:	

Tahun 2018

Nama Proyek	:	**Fasilitasi Penyelesaian KSP di Provinsi Jambi**
Lokasi Proyek	:	Provinsi Jambi
Pengguna Jasa	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
Nama Perusahaan	:	
Uraian Tugas	:	1) Identifikasi kesahihan materi teknis 2) Identifikasi muatan materi teknis 3) FGD dan koordinasi antar sektor 4) Konsep perancangan kawasan 5) Rencana pengembangan dan penataan kawasan.
Waktu Pelaksanaan	:	1 April 2018 – 30 September 2018
Posisi Penugasan	:	Konsultan Individual
Status Kepegawaian pada Perusahaan	:	Tenaga Ahli tidak Tetap
Surat Referensi dari Pengguna Jasa	:	





Tahun 2017

Nama Proyek	:	**Penyusunan Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Rengas Condong**
Lokasi Proyek	:	Kabupaten Batanghari
Pengguna Jasa	:	Bappeda Kabupaten Batanghari
Nama Perusahaan	:	
Uraian Tugas	:	1) Analisa peran dan fungsi kawasan 2) Analisa fisik kawasan 3) Analisa sosial ekonomi kawasan 4) Konsep perancangan kawasan 5) Rencana pengembangan dan penataan kawasan.
Waktu Pelaksanaan	:	14 September 2017 – 12 Desember 2017
Posisi Penugasan	:	Team Leader
Status Kepegawaian pada Perusahaan	:	Tenaga Ahli tidak Tetap
Surat Referensi dari Pengguna Jasa	:	

Tahun 2017

Nama Proyek	:	**Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur**
Lokasi Proyek	:	Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Pengguna Jasa	:	Bidang Penataan Ruang, Dinas PUPR Kab.Tanjabtim
Nama Perusahaan	:	
Uraian Tugas	:	1) Membantu penyelenggaraan tahapan Identifikasi Pemangku Kepentingan. 2) Membantu penyelenggaraan tahapan Prapelingkupan Issue. 3) Membantu penyelenggaraan tahapan pelingkupan Issue. 4) Analisa Daya Dukung dan Daya Tampung. 5) Kajian Pengaruh KRP RTRW .
Waktu Pelaksanaan	:	22 Maret 2017 – 19 September 2017
Posisi Penugasan	:	Ahli Planologi
Status Kepegawaian pada Perusahaan	:	Tenaga Ahli tidak Tetap
Surat Referensi dari Pengguna Jasa	:	

Tahun 2016

Nama Proyek	:	**Konsultan Individual (PF Implementasi) Program PPSP Jambi Tahun 2016**
Lokasi Proyek	:	Provinsi Jambi
Pengguna Jasa	:	Satker PSPLP Provinsi Jambi
Nama Perusahaan	:	
Uraian Tugas	:	1) Menginventarisasi seluruh usulan program/kegiatan sanitasi yang tercantum pada





SSK Kabupaten/Kota peserta Program PPSP yang berada di Provinsi tempatnya bertugas dan membuat rekapitulasinya.

2) Menginventarisasi seluruh pelaksanaan program/kegiatan sanitasi yang anggarannya berasal dari berbagai sumber (APBD Kab/Kota; APBD Provinsi; APBN termasuk DAK dan sumber-sumber pendanaan lainnya/Swasta dan/atau masyarakat), mulai dari tahun pertama kali Kab/Kota tersebut berperan serta dalam program PPSP, baik program/kegiatan yang sudah, sedang maupun yang akan dilaksanakan di Kabupaten/Kota di Provinsi tempat bertugas, dan membandingkannya dengan usulan program/kegiatan sanitasi Kabupaten/kota yang tercantum pada SSK.
3) Mencari informasi tentang faktor-faktor penyebab perbedaan (jika ada) dalam pelaksanaan program/kegiatan sanitasi dengan usulan program/kegiatan yang tercantum pada SSK.
4) Mengumpulkan informasi mengenai jadwal penganggaran di tingkat Kab/Kota, Provinsi (Musrembang sampai penyusunan Perda APBD), dan Nasional.
5) Mengecek pemenuhan krtiteria kesiapan (readiness criteria) yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota untuk kegiatan-kegiatan sanitasi yang diusulkan, khususnya program/kegiatan yang diusulkan pendanaannya dari APBN.
6) Memberikan masukan kepada kab/kota yang sedang melakukan penyusunan dokumen Detail Engineering Detail (DED) dan/atau Masterplan (MP) di tahun 2017.
7) Memberikan advokasi kepada Ketua Pokja Sanitasi Provinsi, sehingga SKPD terkait dengan PPSP dapat menginventarisir sejauh mana Kabupaten/Kota melaksanakan program/kegiatan sebagaimana tercantum pada SSK.
8) Memberikan advokasi kepada Ketua Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota sehingga SKPD yang terkait dengan PPSP dapat melaksanakan usulan program/kegiatan sebagaimana yang tercantum pada SSK.
9) Hadir dan berpartisipasi aktif pada acara-acara Pokja Sanitasi Provinsi, Kabupaten/Kota yang relevan dengan lingkup pekerjaan.
10) Melaporkan progres dan substansi hasil kerjanya kepada pihak Pokja Sanitasi Provinsi,





Kepala Satker yang menangani sanitasi di tingkat Provinsi, dan di tingkat Pusat.

Waktu Pelaksanaan	:	22 Maret 2016 – 22 November 2016
Posisi Penugasan	:	PF Implementasi
Status Kepegawaian pada Perusahaan	:	Tenaga Ahli tidak Tetap
Surat Referensi dari Pengguna Jasa	:	

Tahun 2015

Nama Proyek	:	**Konsultan Individual Perencanaan Kota**
Lokasi Proyek	:	Provinsi Jambi
Pengguna Jasa	:	Satker Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Jambi
Nama Perusahaan	:	
Uraian Tugas	:	• Memfasilitasi Kabupaten/Kota dalam mengidentifikasi ketersediaan RTH Publik eksisting. • Memfasilitasi Kabupaten/Kota dalam kajian keruangan . • Memfasilitasi Kab/kota dalam menganalisa kebutuhan RTH selama 20 (duapuluh) tahun yang akan datang. • Memfasilitasi Kabupaten/Kota dalam menyusun masterplan Kota Hijau. • Memfasilitasi Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosialisasi * (delapan) atribut P2KH. • Berkoordinasi dengan konsultan individual lainnya dalam mewujudkan rencangan/design RTH yang telah ditetapkan.
Waktu Pelaksanaan	:	01 Juli 2015 – 30 November 2015
Posisi Penugasan	:	KI Perencanaan Kota
Status Kepegawaian pada Perusahaan	:	Tenaga Ahli tidak Tetap
Surat Referensi dari Pengguna Jasa	:	

Tahun 2015

Nama Proyek	:	**Penyusunan Peraturan Walikota Jambi Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Bangunan Gedung**
Lokasi Proyek	:	Kota Jambi
Pengguna Jasa	:	Bidang Penataan Bangunan Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Jambi
Nama Perusahaan	:	CV.ARIMAN CONSULTAN





Uraian Tugas	:	• Kajian ketentuan penyelenggaraan bangunan gedung dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Tentang Bangunan Gedung. • Perumusan peraturan turunan dari Peraturan Daerah Kota Jambi Tentang Bangunan Gedung
Waktu Pelaksanaan	:	02 April 2015 – 01 Juni 2015
Posisi Penugasan	:	Ahli Perencanaan Kota
Status Kepegawaian pada Perusahaan	:	Tenaga Ahli tidak Tetap
Surat Referensi dari Pengguna Jasa	:	

Tahun 2014

Nama Proyek	:	**Konsultan Individual Perencanaan Bidang Keciptakaryaan**
Lokasi Proyek	:	Provinsi Jambi
Pengguna Jasa	:	Satker Randal PIP Jambi Kementerian PU
Nama Perusahaan	:	
Uraian Tugas	:	• Memfasilitasi Kabupaten/Kota dalam menyusun dokumen review RPIJM Kabupaten/Kota Sektor Air Minum dan Bangkim. • Memfasilitasi Kabupaten/Kota dalam menyusun review Memorandum Program Bidang Cipta Karya Sektor Air Minum dan Bangkim. • Memfasilitasi Kab/kota dalam penentuan lokasi keterpaduan program dan penyiapan kegiatan-kegiatan dalam rangka keterpaduan program bidang Cipta Karya khususnya Kab/Kota yang termasuk dalam KSN Sektor Air Minum dan Bangkim. • Memfasilitasi Kabupaten/Kota dalam menyusun rencana kegiatan sub bidang air minum dan sanitasi yang didanai melalui DAK. • Memfasilitasi Kabupaten/Kota dalam menyiapkan *readiness criteria* Sektor Air Minum dan Bangkim. • Memfasilitasi Kab/Kota dalam penyiapan kegiatan-kegiatan yang potensial didanai oleh PHLN dan sumber dana lainnya Sektor Air Minum dan Bangkim.
Waktu Pelaksanaan	:	13 Februari 2014 – 31 Desember 2014
Posisi Penugasan	:	KI Perencanaan
Status Kepegawaian pada Perusahaan	:	Tenaga Ahli tidak Tetap
Surat Referensi dari Pengguna Jasa	:	

Tahun 2013





Nama Proyek	:	**Konsultan Individual Perencanaan Bidang Keciptakaryaan**
Lokasi Proyek	:	Provinsi Jambi
Pengguna Jasa	:	Satker Randal PIP Jambi Kementerian PU
Nama Perusahaan	:	
Uraian Tugas	:	• Memfasilitasi Kabupaten/Kota dalam menyusun dokumen review RPIJM Kabupaten/Kota Sektor Air Minum dan Bangkim. • Memfasilitasi Kabupaten/Kota dalam menyusun review Memorandum Program Bidang Cipta Karya Sektor Air Minum dan Bangkim. • Memfasilitasi Kab/kota dalam penentuan lokasi keterpaduan program dan penyiapan kegiatan-kegiatan dalam rangka keterpaduan program bidang Cipta Karya khususnya Kab/Kota yang termasuk dalam KSN Sektor Air Minum dan Bangkim. • Memfasilitasi Kabupaten/Kota dalam menyusun rencana kegiatan sub bidang air minum dan sanitasi yang didanai melalui DAK. • Memfasilitasi Kabupaten/Kota dalam menyiapkan *readiness criteria* Sektor Air Minum dan Bangkim. • Memfasilitasi Kab/Kota dalam penyiapan kegiatan-kegiatan yang potensial didanai oleh PHLN dan sumber dana lainnya Sektor Air Minum dan Bangkim.
Waktu Pelaksanaan	:	13 Februari 2013 – 31 Desember 2013
Posisi Penugasan	:	KI Perencanaan
Status Kepegawaian pada Perusahaan	:	Tenaga Ahli tidak Tetap
Surat Referensi dari Pengguna Jasa	:	

Tahun 2012

Nama Proyek	:	**Konsultan Perorangan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi 2012-2032 *(Lanjutan)***
Lokasi Proyek	:	Kota Jambi
Pengguna Jasa	:	Bappeda Kota Jambi
Nama Perusahaan	:	
Uraian Tugas	:	- Mengikuti setiap rapat pembahasan dilingkungan Pokja Perencanaan BKPRD Kota Jambi : - Mengikuti setiap rapat pembahasan dilingkungan Pansus Raperda RTRW Kota Jambi - Mengikuti koordinasi dengan BKPRN ; - Mengikuti setiap kunjungan lapangan (groundcheck) ;
Waktu Pelaksanaan	:	20 Juni 2012 – 16 Desember 2012





Posisi Penugasan	:	Team Leader
Status Kepegawaian pada Perusahaan	:	Tenaga Ahli tidak Tetap
Surat Referensi dari Pengguna Jasa	:	

Tahun 2012

Nama Proyek	:	**Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya Kota Jambi**
Lokasi Proyek	:	Kota Jambi
Pengguna Jasa	:	Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Jambi
Nama Perusahaan	:	
Uraian Tugas	:	- Mengidentifikasi potensi dan permasalahan wilayah perencanaan dalam kaitannya dengan pengembangan. - Melakukan analisis terhadap potensi daya dukung lahan untuk pengembangan fisik. - Mengkaji dan menyusun konsep pengembangan kota serta kecenderungannya. - Menyusun konsep pemanfaatan lahan. - Menyusun konsep pembagian unit lingkungan serta arahan distribusi penduduknya. - Menyusun konsep intensitas penggunaan lahan. - Membuat rencana struktur pengembangan wilayah berdasarkan kemampuan lahan. - Memprediksi kebutuhan sarana dan prasarana hingga akhir tahun rencana - Merumuskan strategi penguatan dan pengembangan kapasitas kelembagaan
Waktu Pelaksanaan	:	12 Maret 2012 – 10 Juni 2012
Posisi Penugasan	:	Tenaga Ahli Planologi
Status Kepegawaian pada Perusahaan	:	Tenaga Ahli tidak Tetap
Surat Referensi dari Pengguna Jasa	:	

Tahun 2011

Nama Proyek	:	**Konsultan Perorangan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi 2011-2031**
Lokasi Proyek	:	Kota Jambi
Pengguna Jasa	:	Bappeda Kota Jambi
Nama Perusahaan	:	
Uraian Tugas	:	- Mengidentifikasi potensi dan permasalahan wilayah perencanaan dalam kaitannya dengan Kebutuhan pengembangan Sttuktur dan pola ruang kota - Melakukan analisis terhadap arah kebijakan keruangan daerah. - Mengkaji pusat-pusat simpul transportasi lokal - Mengkaji konsep pengembangan kependudukan.





- Mengkaji pola penggunaan lahan.
- Memprediksi kebutuhan sarana dan prasarana hingga akhir tahun rencana
- Perumusan Raperda RTRW dan Naskah Akademis RTRW

Waktu Pelaksanaan	:	16 Juni 2011 – 10 Desember 2011
Posisi Penugasan	:	Ahli Planologi
Status Kepegawaian pada Perusahaan	:	Tenaga Ahli tidak Tetap
Surat Referensi dari Pengguna Jasa	:	

Tahun 2011

Nama Proyek	:	**Penyusunan Masterplan Drainase Perkotaan Sengeti, Kecamatan Sekernan**
Lokasi Proyek	:	Kabupaten Muaro Jambi
Pengguna Jasa	:	Satker PPLP Dinas PU Provinsi Jambi
Nama Perusahaan	:	**CV.Beltra Mandiri**
Uraian Tugas	:	- Mengidentifikasi potensi dan permasalahan wilayah perencanaan dalam kaitannya dengan Kebutuhan pengembangan Sttuktur dan pola ruang kota - Melakukan analisis terhadap arah kebijakan keruangan daerah. - Mengkaji pusat-pusat kegiatan sosial ekonomi eksisting - Mengkaji konsep pengembangan kawasan perkotaan. - Mengkaji pola penggunaan lahan. - Memprediksi kebutuhan jaringan prasarana drainase
Waktu Pelaksanaan	:	17 Maret 2011 – 16 Juni 2011
Posisi Penugasan	:	Ahli Planologi
Status Kepegawaian pada Perusahaan	:	Tenaga Ahli tidak Tetap
Surat Referensi dari Pengguna Jasa	:	

Tahun 2010

a.	Nama Proyek	:	**Penyusunan Tataran Transportasi Lokal Kabupaten Muaro Jambi**
b.	Lokasi Proyek	:	Kabupaten Muaro Jambi
c.	Pengguna Jasa	:	Bappeda Kabupaten Muaro Jambi
d.	Nama Perusahaan	:	**CV.Beltra Mandiri**
e.	Uraian Tugas	:	- Mengidentifikasi potensi dan permasalahan wilayah perencanaan dalam kaitannya dengan Kebutuhan pengembangan Transportasi. - Melakukan analisis terhadap arah kebijakan keruangan daerah. - Mengkaji pusat-pusat simpul transportasi lokal





- Mengkaji konsep pengembangan kependudukan.
- Mengkaji pola penggunaan lahan.
- Memprediksi kebutuhan sarana dan prasarana transportasi hingga akhir tahun rencana
- Merumuskan strategi penguatan dan pengembangan kapasitas kelembagaan pengelolaan transportasi

f. Waktu Pelaksanaan : 28 Juni 2010 – 23 Desember 2010
g. Posisi Penugasan : Ahli Planologi
h. Status Kepegawaian pada Perusahaan : Tenaga Ahli tidak Tetap
i. Surat Referensi dari Pengguna Jasa :

Tahun 2010

a. Nama Proyek : **Penyusunan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL) Kabupaten Muaro Jambi**
b. Lokasi Proyek : Kabupaten Muaro Jambi
c. Pengguna Jasa : Bappeda Kabupaten Muaro Jambi
d. Nama Perusahaan : **CV.Beltra Mandiri**
e. Uraian Tugas :
- Mengkaji rencana pola ruang Kabupaten Muaro Jambi;
- Mengkaji pola penggunaan lahan Kabupaten Muaro Jambi ;
- Identifikasi degradasi pemanfaatan ruang peruntukan hutan ;
- Perumusan konsep dan strategi rehabilitasi hutan di Kabupaten Muaro Jambi

f. Waktu Pelaksanaan : 18 Maret 2010 – 16 Juni 2010
g. Posisi Penugasan : Ahli Planologi
h. Status Kepegawaian pada Perusahaan : Tenaga Ahli tidak Tetap
i. Surat Referensi dari Pengguna Jasa :

Tahun 2009

a. Nama Proyek : **Penyusunan Rencana Kawasan Siap Bangun Pudak, Kumpeh Ulu**
b. Lokasi Proyek : Kabupaten Muaro Jambi
c. Pengguna Jasa : Bappeda Kabupaten Muaro Jambi
d. Nama Perusahaan : **CV.Beltra Mandiri**
e. Uraian Tugas :
- Mengidentifikasi potensi dan permasalahan wilayah perencanaan dalam kaitannya dengan pengembangan.
- Melakukan analisis terhadap potensi daya dukung lahan untuk pengembangan fisik.
- Mengkaji dan menyusun konsep pengembangan kota serta kecenderungannya.
- Menyusun konsep pemanfaatan lahan.





- Menyusun konsep pembagian unit lingkungan serta arahan distribusi penduduknya.
- Menyusun konsep intensitas penggunaan lahan.
- Membuat rencana struktur pengembangan wilayah berdasarkan kemampuan lahan.
- Memprediksi kebutuhan sarana dan prasarana hingga akhir tahun rencana
- Merumuskan strategi penguatan dan pengembangan kapasitas kelembagaan

f. Waktu Pelaksanaan : 12 Juli 2009 – 09 Desember 2009
g. Posisi Penugasan : Ahli Planologi
h. Status Kepegawaian pada Perusahaan : Tenaga Ahli Tidak Tetap
i. Surat Referensi dari Pengguna Jasa :

Tahun 2009

a. Nama Proyek : **Penyusunan Studi Pengembangan Ekonomi Kawasan Kuala Jambi**
b. Lokasi Proyek : Kabupaten Tanjung Jabung Timur
c. Pengguna Jasa : Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Timur
d. Nama Perusahaan : **CV.Beltra Mandiri**
e. Uraian Tugas :
- Mengkaji peran dan fungsi kawasan perencanaan dalam konstelasi regional ;
- Mengidentifikasi potensi dan kendala pengembangan ekonomi kawasan perencanaan ;
- Merumuskan konsep dan strategi pengembangan ekonomi kawasan perencanaan

f. Waktu Pelaksanaan : 26 Maret 2009 – 23 Juni 2009
g. Posisi Penugasan : Ahli Planologi
h. Status Kepegawaian pada Perusahaan : Tenaga Ahli Tidak Tetap
i. Surat Referensi dari Pengguna Jasa :

Tahun 2008

a. Nama Proyek : **Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah Bidang Cipta Karya Kota Jambi**
b. Lokasi Proyek : Kota Jambi
c. Pengguna Jasa : Satker Randal Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi
d. Nama Perusahaan :
e. Uraian Tugas :
- Mengkaji peran dan fungsi kawasan perencanaan;
- Mengkaji rencana pengembangan infrastruktur permukiman bidang cipta karya ;
- Mengkaji kebutuhan pengembangan infrastruktur permukiman bidang cipta karya ;
- Merumuskan konsep dan strategi pemenuhan kebutuhan;
- Merumuskan matrik perencanaan pembangunan jangka menengah bidang cipta karya





f.	Waktu Pelaksanaan	:	26 Juni 2008 – 23 Desember 2008
g.	Posisi Penugasan	:	Ahli Planologi
h.	Status Kepegawaian pada Perusahaan	:	Tenaga Ahli Tidak Tetap
i.	Surat Referensi dari Pengguna Jasa	:	

Tahun 2008

a.	Nama Proyek	:	**Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Perbatasan Kabupaten Tebo**
b.	Lokasi Proyek	:	Serai Serumpun, Kabupaten Tebo
c.	Pengguna Jasa	:	Bappeda Kabupaten Tebo
d.	Nama Perusahaan	:	**CV.Beltra Mandiri**
e.	Uraian Tugas	:	- Mengidentifikasi potensi dan permasalahan wilayah perencanaan dalam kaitannya dengan pengembangan. - Melakukan analisis terhadap potensi daya dukung lahan untuk pengembangan fisik. - Mengkaji dan menyusun konsep pengembangan kota serta kecenderungannya. - Menyusun konsep pemanfaatan lahan. - Menyusun konsep pembagian unit lingkungan serta arahan distribusi penduduknya. - Menyusun konsep intensitas penggunaan lahan. - Membuat rencana struktur pengembangan wilayah berdasarkan kemampuan lahan. - Memprediksi kebutuhan sarana dan prasarana hingga akhir tahun rencana - Merumuskan strategi penguatan dan pengembangan kapasitas kelembagaan
f.	Waktu Pelaksanaan	:	19 Maret 2008 – 16 Juli 2008
g.	Posisi Penugasan	:	Ahli Planologi
h.	Status Kepegawaian pada Perusahaan	:	Tenaga Ahli Tidak Tetap
i.	Surat Referensi dari Pengguna Jasa	:	

Tahun 2007

a.	Nama Proyek	:	**Penyusunan Studi Pengembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin**
b.	Lokasi Proyek	:	Kabupaten Merangin
c.	Pengguna Jasa	:	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Merangin
d.	Nama Perusahaan	:	**CV.Beltra Mandiri**
e.	Uraian Tugas	:	- Mengkaji peraturan perundangan tentang pajak dan retribusi daerah ; - Mengkaji peraturan daerah terkait pajak dan retribusi daerah yang telah terbit;





- Mengkaji potensi dan permasalahan objek pajak dan retribusi di Kabupaten Merangin
- Merumuskan rekomendasi pengembangan PAD

f. Waktu Pelaksanaan : 17 Oktober 2007 – 15 Desember 2007
g. Posisi Penugasan : Ahli Planologi
h. Status Kepegawaian pada Perusahaan : Tenaga Ahli Tidak Tetap
i. Surat Referensi dari Pengguna Jasa :

Tahun 2007

a. Nama Proyek : **Penyusunan Revisi RUTRK Tabir**
b. Lokasi Proyek : Kabupaten Merangin
c. Pengguna Jasa : Bappeda Kabupaten Merangin
d. Nama Perusahaan : **CV.Beltra Mandiri**
e. Uraian Tugas :
- Mengidentifikasi potensi dan permasalahan wilayah perencanaan dalam kaitannya dengan pengembangan.
- Melakukan analisis terhadap potensi daya dukung lahan untuk pengembangan fisik.
- Mengkaji dan menyusun konsep pengembangan kota serta kecenderungannya.
- Menyusun konsep pemanfaatan lahan.
- Menyusun konsep pembagian unit lingkungan serta arahan distribusi penduduknya.
- Menyusun konsep intensitas penggunaan lahan.
- Membuat rencana struktur pengembangan wilayah berdasarkan kemampuan lahan.
- Memprediksi kebutuhan sarana dan prasarana hingga akhir tahun rencana
- Merumuskan strategi penguatan dan pengembangan kapasitas kelembagaan

f. Waktu Pelaksanaan : 20 Juni 2007– 20 Oktober 2007
g. Posisi Penugasan : Ahli Planologi
h. Status Kepegawaian pada Perusahaan : Tenaga Ahli Tidak Tetap
i. Surat Referensi dari Pengguna Jasa :

Tahun 2007

a. Nama Proyek : **Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota Kecamatan Sungai Gelam**
b. Lokasi Proyek : Kabupaten Muaro Jambi
c. Pengguna Jasa : Bappeda Kabupaten Muaro Jambi
d. Nama Perusahaan : **CV.Beltra Mandiri**
e. Uraian Tugas :
- Mengidentifikasi potensi dan permasalahan wilayah perencanaan dalam kaitannya dengan pengembangan.
- Melakukan analisis terhadap potensi daya dukung lahan untuk pengembangan fisik.





- Mengkaji dan menyusun konsep pengembangan kota serta kecenderungannya.
- Menyusun konsep pemanfaatan lahan.
- Menyusun konsep pembagian unit lingkungan serta arahan distribusi penduduknya.
- Menyusun konsep intensitas penggunaan lahan.
- Membuat rencana struktur pengembangan wilayah berdasarkan kemampuan lahan.
- Memprediksi kebutuhan sarana dan prasarana hingga akhir tahun rencana
- Merumuskan strategi penguatan dan pengembangan kapasitas kelembagaan

f. Waktu Pelaksanaan : 23 Maret 2007 – 20 Juli 2007
g. Posisi Penugasan : Ahli Planologi
h. Status Kepegawaian pada Perusahaan : Tenaga Ahli Tidak Tetap
i. Surat Referensi dari Pengguna Jasa :

Tahun 2006

a. Nama Proyek : **Penyusunan Materplan Air Bersih Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi**
b. Lokasi Proyek : Kabupaten Muaro Jambi
c. Pengguna Jasa : Bappeda Kabupaten Muaro Jambi
d. Nama Perusahaan : **CV.Beltra Mandiri**
e. Uraian Tugas :
- Mengidentifikasi potensi dan permasalahan wilayah perencanaan dalam kaitannya dengan pengembangan.
- Mengkaji pola perkembangan penduduk dan kegiatan sosial ekonomi kawasan perencanaan
- Mengkaji sumber air baku ;
- Merumuskan konsep dan strategi pengembangan

f. Waktu Pelaksanaan : 12 Oktober 2006 – 10 Desember 2006
g. Posisi Penugasan : Ahli Planologi
h. Status Kepegawaian pada Perusahaan : Tenaga Ahli Tidak Tetap
i. Surat Referensi dari Pengguna Jasa :

Tahun 2006

a. Nama Proyek : **Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Kecamatan Muara Siau**
b. Lokasi Proyek : Kabupaten Merangin
c. Pengguna Jasa : Bappeda Kabupaten Merangin
d. Nama Perusahaan : **CV.Beltra Mandiri**
e. Uraian Tugas :
- Mengidentifikasi potensi dan permasalahan wilayah perencanaan dalam kaitannya dengan pengembangan.





- Melakukan analisis terhadap potensi daya dukung lahan untuk pengembangan fisik.
- Mengkaji dan menyusun konsep pengembangan kota serta kecenderungannya.
- Menyusun konsep pemanfaatan lahan.
- Menyusun konsep pembagian unit lingkungan serta arahan distribusi penduduknya.
- Menyusun konsep intensitas penggunaan lahan.
- Membuat rencana struktur pengembangan wilayah berdasarkan kemampuan lahan.
- Memprediksi kebutuhan sarana dan prasarana hingga akhir tahun rencana
- Merumuskan strategi penguatan dan pengembangan kapasitas kelembagaan

f.	Waktu Pelaksanaan	:	12 Juni 2006 – 12 Oktober 2006
g.	Posisi Penugasan	:	Ahli Planologi
h.	Status Kepegawaian pada Perusahaan	:	Tenaga Ahli Tidak Tetap
i.	Surat Referensi dari Pengguna Jasa	:	

Tahun 2006

a.	Nama Proyek	:	**Penyusunan Buku Profil Kabupaten Tanjung Jabung Barat**
b.	Lokasi Proyek	:	Kabupaten Tanjung Jabung Barat
c.	Pengguna Jasa	:	Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat
d.	Nama Perusahaan	:	**CV.Beltra Mandiri**
e.	Uraian Tugas	:	- Kompilasi profil setiap sektor di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
f.	Waktu Pelaksanaan	:	17 Maret 2006 – 14 Juni 2006
g.	Posisi Penugasan	:	Ahli Planologi
h.	Status Kepegawaian pada Perusahaan	:	Tenaga Ahli Tidak Tetap
i.	Surat Referensi dari Pengguna Jasa	:	





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Nama Tenaga Ahli : **MOCH. RIZAL BUDIMAN, ST.**
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Klaten, 20 Januari 1984
3. Pendidikan : 1. Sarjana S1 (Strata Satu)Teknik Sipil Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Lulus 2008.
   2. Sedang dalam masa studi S2 (Pasca Sarjana) Ilmu Lingkungan Universitas Jambi
4. Pendidikan non Formal : Pelatihan Geografi Informasi System (GIS)
   Pelatihan Dasar Amdal, IPB 2015.
5. Penguasaan Bahasa Inggris dan Bahsa Indonesia : Bahasa Inggris - Baik
   Bahasa Indonesia - Baik
6. Pengalaman Kerja :

PEKERJAAN BIDANG SIPIL DAN TATA RUANG

Tahun 2021

a. Nama Pekerjaan : KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Hari
b. Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Batang Hari
c. Pengguna Jasa : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang Hari
d. Uraian Tugas :
- Digitasi Peta
- Mengumpulkan data-data dan informasi yang berhubungan dengan pekerjaan sebagai bahan pembuatan peta.
- menganalisis data peta yang diperoleh.
- Menyusun Album Peta RTRW
- Berkoordinasi dengan tim dan penyusunan laporan

e. Waktu Pelaksanaan : Juli 2021 – Desember 2021 (6 Bulan)
f. Posisi Penugasan : Tenaga Ahli Pemetaan

Tahun 2021

a. Nama Pekerjaan : KLHS Review RPJMD Kota Jambi
b. Lokasi Pekerjaan : Kota Jambi
c. Pengguna Jasa : Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
d. Uraian Tugas :
- Digitasi Peta
- Mengumpulkan data-data dan informasi yang berhubungan dengan pekerjaan sebagai bahan pembuatan peta.
- Menganalisis data peta yang diperoleh.
- Penggambaran Isu

e. Waktu Pelaksanaan : September 2021 – November 2021 (3 Bulan)
f. Posisi Penugasan : Tenaga Ahli Pemetaan



Tahun 2021

a.	Nama Pekerjaan	:	KLHS Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Jambi Luar Kota
b.	Lokasi Pekerjaan	:	Muaro Jambi
c.	Pengguna Jasa	:	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi
d.	Uraian Tugas	:	•Digitasi Peta •Mengumpulkan data-data dan informasi yang berhubungan dengan pekerjaan sebagai bahan pembuatan peta. •menganalisis data peta yang diperoleh. •Menyusun Peta KLHS RDTR •Berkoordinasi dengan tim dan penyusunan laporan
e.	Waktu Pelaksanaan	:	Oktober 2021 – Desember 2021 (3 Bulan)
f.	Posisi Penugasan	:	Tenaga Ahli Pemetaan

Tahun 2021

a.	Nama Proyek	:	Konsultan Individual di Satker Perencanaan dan Pengendalian
b.	Lokasi Proyek	:	Provinsi Jambi
c.	Pengguna Jasa	:	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi
d.	Uraian Tugas	:	•Digitasi Peta •Progress Mapping Kegiatan CK •Berkoordinasi dengan tim dan penyusunan laporan
e.	Waktu Pelaksanaan	:	Februari 2021 –Desember 2021
f.	Posisi Penugasan	:	Tenaga Ahli Pemetaan

Tahun 2021

a.	Nama Proyek	:	Konsultan Individual di Satker Perencanaan dan Pengendalian
b.	Lokasi Proyek	:	Provinsi Jambi
c.	Pengguna Jasa	:	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi
d.	Uraian Tugas	:	•Digitasi Peta •Progress Mapping Kegiatan CK •Berkoordinasi dengan tim dan penyusunan laporan
e.	Waktu Pelaksanaan	:	Februari 2021 –Desember 2021
f.	Posisi Penugasan	:	Tenaga Ahli Pemetaan





Tahun 2020

a.	Nama Proyek	:	Konsultan Individual di Satker Perencanaan dan Pengendalian
b.	Lokasi Proyek	:	Provinsi Jambi
c.	Pengguna Jasa	:	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi
d.	Uraian Tugas	:	•Digitasi Peta •Progress Mapping Kegiatan CK •Berkoordinasi dengan tim dan penyusunan laporan
e.	Waktu Pelaksanaan	:	Februari 2017 –Desember 2017
f.	Posisi Penugasan	:	Tenaga Ahli Pemetaan

Tahun 2019

a.	Nama Proyek	:	Konsultan Individual di Satker Perencanaan dan Pengendalian
b.	Lokasi Proyek	:	Provinsi Jambi
c.	Pengguna Jasa	:	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi
d.	Uraian Tugas	:	•Digitasi Peta •Progress Mapping Kegiatan CK •Berkoordinasi dengan tim dan penyusunan laporan
e.	Waktu Pelaksanaan	:	Februari 2017 –Desember 2017
f.	Posisi Penugasan	:	Tenaga Ahli Pemetaan

Tahun 2018

a.	Nama Proyek	:	Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Jambi
b.	Lokasi Proyek	:	Kota Jambi
c.	Pengguna Jasa	:	Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
d.	Uraian Tugas	:	·Digitasi Peta ·Analisa SIG KJE Ekoregion ·Analisa SIG Kelas Kemampuan Lahan
e.	Waktu Pelaksanaan	:	Mei 2018 – Agustus 2018
f.	Posisi Penugasan	:	Tenaga Ahli Pemetaan

Tahun 2018

a.	Nama Proyek	:	Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Jambi
b.	Lokasi Proyek	:	Kota Jambi
c.	Pengguna Jasa	:	Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
d.	Uraian Tugas	:	·Analisa KRP dan keterkaitan isu PB ·Analisa SIG ·Berkoordinasi dengan tim dan penyusunan laporan
e.	Waktu Pelaksanaan	:	September 2018 –Desember 2018
f.	Posisi Penugasan	:	Tenaga Ahli Pemetaan





Tahun 2017

a.	Nama Proyek	:	Konsultan Individual di Satker Pengembangan Kawasan Permukiman
b.	Lokasi Proyek	:	Provinsi Jambi
c.	Pengguna Jasa	:	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi
d.	Uraian Tugas	:	·Digitasi Peta ·Progress Mapping Kegiatan Satker PKP ·Berkoordinasi dengan tim dan penyusunan laporan
e.	Waktu Pelaksanaan	:	Maretl 2017 –Desember 2017
f.	Posisi Penugasan	:	Tenaga Ahli Pemetaan

Tahun 2016

a.	Nama Proyek	:	Konsultan Individual di Satker Pengembangan Kawasan Permukiman
b.	Lokasi Proyek	:	Provinsi Jambi
c.	Pengguna Jasa	:	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi
d.	Uraian Tugas	:	·Digitasi Peta ·Progress Mapping Kegiatan Satker PKP ·Berkoordinasi dengan tim dan penyusunan laporan
e.	Waktu Pelaksanaan	:	April 2016 –November 2016 (8 Bulan)
f.	Posisi Penugasan	:	Tenaga Ahli Pemetaan

Tahun 2015

a.	Nama Proyek	:	Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Kota Jambi
b.	Lokasi Proyek	:	Kota Jambi, Provinsi Jambi
c.	Pengguna Jasa	:	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi
d.	Uraian Tugas	:	·Digitasi Peta ·Penyusunan Peta Komunitas ·Berkoordinasi dengan tim dan penyusunan laporan
e.	Waktu Pelaksanaan	:	Juli 2015 –November 2015 (4 Bulan)
f.	Posisi Penugasan	:	Tenaga Ahli Pemetaan





Tahun 2014

a.	Nama Proyek	:	Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Rantau Panjang Kecamatan Tabir
b.	Lokasi Proyek	:	Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi
c.	Pengguna Jasa	:	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin
d.	Uraian Tugas	:	·Digitasi Peta ·Menyusun Album Peta RDTR ·Berkoordinasi dengan tim dan penyusunan laporan
e.	Waktu Pelaksanaan	:	09 April 2014 – 09 November 2014 (7 Bulan)
f.	Posisi Penugasan	:	Tenaga Ahli Pemetaan

Tahun 2013

a.	Nama Proyek	:	Penyusunan RDTR Kawasan Kecamatan Dendang
b.	Lokasi Proyek	:	Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi
c.	Pengguna Jasa	:	Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Timur
d.	Uraian Tugas	:	·Digitasi Peta ·Menyusun Album Peta RDTR ·Berkoordinasi dengan tim dan penyusunan laporan
e.	Waktu Pelaksanaan	:	01 Mei 2013 – 01 Juli 2013 (3 Bulan)
f.	Posisi Penugasan	:	Tenaga Ahli Pemetaan

Tahun 2012

a.	Nama Proyek	:	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya Kota Jambi
b.	Lokasi Proyek	:	Kota Jambi, Provinsi Jambi
c.	Pengguna Jasa	:	Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Jambi
d.	Uraian Tugas	:	·Digitasi Peta ·Membuat Peta dasar RTBL ·Berkoordinasi dengan tim dan penyusunan laporan
e.	Waktu Pelaksanaan	:	15 April 2012 – 15 Juli 2012 (3 Bulan)
f.	Posisi Penugasan	:	Tenaga Ahli Pemetaan

Tahun 2012

a.	Nama Proyek	:	Penyusunan RDTR Kawasan Kecamatan Mendahara
b.	Lokasi Proyek	:	Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi
c.	Pengguna Jasa	:	Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Timur
d.	Uraian Tugas	:	·Digitasi Peta ·Menyusun Album Peta RDTR ·Berkoordinasi dengan tim dan penyusunan laporan
e.	Waktu Pelaksanaan	:	15 April 2012 – 15 Juli 2012 (3 Bulan)
f.	Posisi Penugasan	:	Tenaga Ahli Pemetaan





Tahun 2011

a. Nama Proyek : Penyusunan Strategi Penanaman Modal Kabupaten Tanjung Jabung Barat
b. Lokasi Proyek : Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi
c. Pengguna Jasa : Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Tanjung Jabung Barat
d. Uraian Tugas :
- Mengumpulkan data-data dan informasi yang berhubungan dengan proyek sebagai bahan penyusunan laporan
- Mengevaluasi data yang diperoleh dan mengkoordinir dan mengarahkan tim.
- Proaktif terhadap penyusunan sistem pelaporan.
- Berkoordinasi dengan tim dan penyusunan laporan

e. Waktu Pelaksanaan : 20 Juni 2011 - 22 Agustus 2011 (3 Bulan)
f. Posisi Penugasan : Ahli Sipil

Tahun 2011

a. Nama Proyek : Penyusunan Masterplan Kawasan Minapolitan Kabupaten Merangin
b. Lokasi Proyek : Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi
c. Pengguna Jasa : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Merangin
d. Uraian Tugas :
- Mengumpulkan data-data dan informasi yang berhubungan dengan proyek sebagai bahan penyusunan laporan
- Digitasi Peta.
- Proaktif terhadap penyusunan sistem pelaporan.
- Berkoordinasi dengan tim dan penyusunan laporan

e. Waktu Pelaksanaan : 15 November 2011 - 15 Desember 2011 (1 Bulan)
f. Posisi Penugasan : Tenaga Ahli Pemetaan

Tahun 2010

a. Nama Proyek : Studi Kelayakan Pembangunan Islamic Centre di Kabupaten Merangin
b. Lokasi Proyek : Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi
c. Pengguna Jasa : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Merangin
d. Uraian Tugas :
- Pemetaan Kawasan Pembangunan Islamic Centre
- Proaktif terhadap penyusunan sistem pelaporan.
- Berkoordinasi dengan tim dan penyusunan laporan

e. Waktu Pelaksanaan : 15 November 2010 –15 Desember 2010 (1Bulan)
f. Posisi Penugasan : Tenaga Pemetaan dan Surveying





a. Nama Proyek : Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Jambi
b. Lokasi Proyek : Kota Jambi, Provinsi Jambi
c. Pengguna Jasa : Dinas Tata Kota Kota Jambi
d. Uraian Tugas :
- Mengumpulkan data-data dan informasi yang berhubungan dengan proyek sebagai bahan penyusunan laporan
- Digitasi Peta.
- Penyusunan Dokumen Album Peta RDTR.
- Proaktif terhadap penyusunan sistem pelaporan.
- Berkoordinasi dengan tim dan penyusunan laporan

e. Waktu Pelaksanaan : 31 Juli 2010 – 10 November 2010 (3 Bulan)
f. Posisi Penugasan : Tenaga Ahli Pemetaan

Tahun 2010

a. Nama Proyek : Penyusunan Rencana Teknik Ruang Kawasan Koridor Jembatan Muara Sabak
b. Lokasi Proyek : Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi
c. Pengguna Jasa : Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Timur
d. Uraian Tugas :
- Mengumpulkan data-data dan informasi yang berhubungan dengan proyek sebagai bahan penyusunan laporan
- Mengevaluasi data yang diperoleh.
- Melakukan kajian teknis.
- Proaktif terhadap penyusunan sistem pelaporan.
- Berkoordinasi dengan tim dan penyusunan laporan

e. Waktu Pelaksanaan : 01 Maret 2010 – 20 Juli 2010 (4 Bulan)
f. Posisi Penugasan : Tenaga Teknik Sipil

Tahun 2009

a. Nama Proyek : Inventarisasi Kondisi dan Pemetaan Jaringan Irigasi Serta Saluran Air
b. Lokasi Proyek : Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi
c. Pengguna Jasa : Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Timur
d. Uraian Tugas :
- Mengumpulkan data-data dan informasi yang berhubungan dengan proyek sebagai bahan penyusunan laporan
- Mengevaluasi data yang diperoleh dan mengkoordinir dan mengarahkan tim.
- Digitasi Peta.
- Proaktif terhadap penyusunan sistem pelaporan.
- Berkoordinasi dengan tim dan penyusunan laporan

e. Waktu Pelaksanaan : 11 Agustus 2009 – 08 Desember 2009 (4 Bulan)
f. Posisi Penugasan : Tenaga Ahli Pemetaan





a. Nama Proyek : Rencana Pengembangan dan Kriteria Kawasan Budidaya Yang Memiliki Nilai Strategis Kabupaten
b. Lokasi Proyek : Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi
c. Pengguna Jasa : Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Timur
d. Uraian Tugas :
- Mengumpulkan data-data dan informasi yang berhubungan dengan proyek sebagai bahan penyusunan laporan
- Mengevaluasi data yang diperoleh dan mengkoordinir dan mengarahkan tim.
- Proaktif terhadap penyusunan sistem pelaporan.
- Berkoordinasi dengan tim dan penyusunan laporan

e. Waktu Pelaksanaan : 12 Mei 2009 – 09 Agustus 2009 (3 Bulan)
f. Posisi Penugasan : Tenaga Ahli Sipil

Tahun 2009

a. Nama Proyek : Rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Kabupaten Tanjung Jabung Timur
b. Lokasi Proyek : Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi
c. Pengguna Jasa : Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Timur
d. Uraian Tugas :
- Mengumpulkan data-data dan informasi yang berhubungan dengan proyek sebagai bahan penyusunan laporan
- Mengevaluasi data yang diperoleh dan mengkoordinir dan mengarahkan tim.
- Proaktif terhadap penyusunan sistem pelaporan.
- Berkoordinasi dengan tim dan penyusunan laporan

e. Waktu Pelaksanaan : 05 Februari 2009 – 05 April 2009 (3 Bulan)
f. Posisi Penugasan : Tenaga Ahli Spil

PEKERJAAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

No.	Posisi dalam Pekerjaan	Nama Pekerjaan	Tahun
1.	Tenaga Ahli Sipil	UKL UPL Perumahan Villa Wahana Asri, Kota Jambi	2016
2.	Tenaga Ahli Sipil	UKL UPL Usaha Penggelolaan Pinang	2016
3.	Tenaga Ahli Sipil	UKL UPL Perumahan Edelweiss Regency	2016
4.	Tenaga Ahli Sipil	UKL UPL Hotel Pundi 3	2016
5.	Tenaga Ahli Sipil	UKL UPL Klinik Kesehatan Cuci Darah	2016
6.	Tenaga Ahli Sipil	UKL UPL Bengkel Mobil Dan Alat Berat PT. Kosambi Laksana Mandiri	2016
7.	Tenaga Ahli Sipil	UKL UPL Asrama Putri Teladan Stikes Baiturrahim	2016
8.	Tenaga Ahli Sipil	UKL UPL Gudang Ritel Kering Yusrin	2016



9.	Tenaga Ahli Sipil	UKL UPL Perumahan Pondok Alam	2016
10.	Tenaga Ahli Sipil	UKL UPL Perumahan Kayana Residence	2016
11.	Tenaga Ahli Sipil	UKL UPL PDC Toyota	2016
12.	Tenaga Ahli Sipil	UKL UPL Peningkatan Jalan Sungai Ulak – Mentawak 1 Kabupaten Merangin	2016
13.	Tenaga Ahli Sipil	UKL UPL Showhroom dan Dealer Hyundai Kota Jambi	2016
14.	Tenaga Ahli Sipil	UKL UPL Perumahan Griya Raya, Kota Jambi	2015
15.	Tenaga Ahli Sipil	DPLH Percetakan dan Penerbitan Jambi Press intermedia, Kota Jambi	2015
16.	Tenaga Ahli Sipil	DPLH Sekolah Al-Azhar Jambi (Yayasan Pesantren Diniyyah), Kota Jambi	2015
17.	Tenaga Ahli Sipil	UKL UPL Peningkatan Jalan Simpang Kodim-Biuku Tanjung, Kabupaten Merangin	2015
18.	Tenaga Ahli Sipil	UKL UPL Pembangunan Dermaga penyeberangan Ro-Ro Kabupaten Tanjung Jabung Barat	2015
19.	Tenaga Ahli Sipil	UKL UPL Pembangunan Gedung Kantor Stadion Mini Kabupaten Muaro Jambi	2015
20.	Tenaga Ahli Sipil	UKL UPL Pembangunan Swalayan Mandala Mart, Kota Jambi	2015
21.	Tenaga Ahli Sipil	UKL UPL Pembangunan Restoran Double Dipps, Kota Jambi	2015
22.	Tenaga Ahli Sipil	UKL UPL Perumahan Kenalii Raya Indah 2, Kota Jambi	2015
23.	Tenaga Ahli Sipil	UKL UPL Perumahan Bumi Citra Lestari 6, Kota Jambi	2015
24.	Tenaga Ahli Sipil	UKL UPL Perumahan Villa Donorejo, Kota Jambi	2014
25.	Tenaga Ahli Sipil	UKL UPL Perumahan Teras Marlini, Kota Jambi	2014
26.	Tenaga Ahli Sipil	UKL UPL Perumahan Kawasan Pergudangan Samuel, Kota Jambi	2014

Jambi, Januari 2022
Yang Menyatakan,

MOCH RIZAL BUDIMAN, ST.